



"Saya sangat gembira dengan terbitnya buku ini dan sangat mengapresiasi sebagai salah satu cara menampakkan identitas diri (izhar NU) dan meretas kembali sejarah kebesaran NU di Lombok. Buku yang ada di tangan pembaca ini sangat penting dan layak dibaca semua kalangan sebagai sebagai 'ibrah dan tazkirah".

(TGH. Lalu Muhammad Turmuzdi Badaruddin, Mustasyar PBNU dan Pengasuh Pondok Pesantren Qamarul Huda, Bagu, LOTENG)

"Membaca Nahdlatul Ulama bagaikan membaca sejarah tentang keikhlasan dan keistiqamahan para ulama dalam berjuang menegakkan agama dan pembentukan semangat kebangsaan. Aura kebangsaan begitu kental terasa dalam jalinan nilai-nilai *tawassuth*, *tawazzun* dan *ta'adul* dari teologi Islam Ahlussunnah wal Jama'ah. Mozaik NU Lombok adalah gambaran tentang perjuangan penuh dinamika yang mewarnai wajah sosial masyarakat dalam menegakkan agama dan membela bangsa".

(TGH. Ahmad Taqi'iuddin Mansyur, Ketua Umum PWNU NTB)

"Buku ini ditulis untuk mereview sejarah Nahdlatul Ulama di Pulau Lombok yang penuh dengan dinamika perkembangan mulai dari masa sebelum kemerdekaan sampai masa reformasi. Buku ini penting dibaca untuk menegaskan identitas marwah NU di pulau Lombok"

(H. Lalu Winengan, Sekretaris PWNU NTB)

"Tokoh sentral dari sejarah NU Lombok tahun 1930-an ada pada sosok TGH. Mustafa Bakri, beliau tercatat sebagai utusan Konsul Nahdlatul Ulama Cabang Ampenan Lombok pada Muktamar NU ke-14 di Magelang tahun 1939. Perannya sangat menonjol dalam mengembangkan Cabang Nahdlatul Ulama se-Daerah Lombok pada masa-masa awal pembentukannya. Membaca buku Mozaik NU ini mengingatkan memori saya tentang "Papuq Tuan Haji Mustafa Bakri" yang berjuang secara ikhlas dan istiqamah untuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama Lombok".

(Hj. Warti'ah, Ketua Umum PPP NTB)

"Selama ini, warga Nahdliyyin di pulau Lombok terkesan tidak memiliki rekam jejak sejarah, karena boleh jadi disebabkan oleh sikapnya yang *low profile*, terlalu tawadlu 'tidak mau menampakkan eksistensinya. Kehadiran buku Mozaik NU ini sebagai jawaban bahwa NU di pulau Lombok punya sejarah panjang dan berliku. Kehadiran buku ini sebagai khazanah literasi keilmuan NU di pulau seribu masjid".

(Baiq Mulianah, Wakil Rektor UNU NTB)

"Membaca visi politik NU mengandung arti keterlibatan warganegara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh, dengan ungkapan lain, "Pemilih berdaulat Negara kuat". Dalam konteks inilah, politik bagi NU adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang demokratis, mendidik kedewasaan warga bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggungjawabnya dalam mencapai kemaslahatan bersama".

(Lalu Aksar Anshori, Ketua Umum KPU NTB)

"Nahdlatul Ulama adalah sebuah fenomena unik, menarik dan penuh warna untuk dikaji. Mozaik NU adalah buku yang menarik dan perlu untuk dibaca sebagai bagian dari mata rantai jaringan Islam Nusantara".

(H. Lukman Hakim, Ketua LP. Ma'arif NU & Ketua PIU IsDB UIN Mataram)

ISBN 602622363-0



9 786026 223630



Sanabil

Puri Bunga Amanah  
Jln. Kerajinan I Blok C/ 13 Mataram  
Telp. 0370-7505946, Mobile: 081-805311362  
Email: sanabil.creative@yahoo.co.id



MOZAIK NU

Dinamika Perkembangan Nahdlatul Ulama di Pulau LOMBOK

Pengantar :  
Rektor UIN Mataram



# MOZAIK NU

Dinamika Perkembangan  
Nahdlatul Ulama  
di Pulau LOMBOK



H. Lalu Sohimun Faisol  
Muhammad Harfin Zuhdi

H. Lalu Sohimun Faisol ▪ Muhammad Harfin Zuhdi

# MOZAIK NU

Dinamika Perkembangan Nahdlatul Ulama  
di Pulau LOMBOK

 Sanabil

**Perpustakaan Nasional RI, Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

Mozaik NU: Dinamika Perkembangan Nahdlatul Ulama  
di Pulau Lombok/H. Lalu Sohimun Faisol, et al. / 2017

I. Sejarah

II. Judul

*All right reserved*

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
baik melalui media cetak ataupun digital dengan tujuan komersial  
tanpa izin tertulis dari penulis

**Mozaik NU :**

***Dinamika Perkembangan Nahdlatul Ulama di Pulau Lombok***

**Penulis** : H. Lalu Sohimun Faisol  
Muhammad Harfin Zuhdi  
Ahmad Pahrurrozi  
Muhammad Ahyar Rasidi

**Tata Letak** : Luthfi Hamdani  
**Desain Cover** : Romlan Wildan LA

**Cetakan 1** : September 2017  
**ISBN** : 978-602-6223-63-0

Sanabil

Jl. Kerajinan 1 Puri Bunga Amanah

Blok C/13 Cakranegara Mataram

Telp.: (0370) 7505946, Mobile: 081-05311362

Email: sanabilpublishing@gmail.com

# KATA PENGANTAR

## REKTOR UIN MATARAM

SECARA HISTORIS, kelahiran Nahdlatul Ulama berawal dari sebuah kelompok kajian pencerahan Tashwirul Afkar tahun 1914, kemudian berkembang menjadi Nadhlatul Tujjar tahun 1916, lalu menjadi Syubbanul Wathan tahun 1918, dan disusul menjadi Nahdlatul Wathan tahun 1924. Akhirnya menjadi Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H /31 Januari 1926.

Berdirinya NU dapat dikatakan sebagai muara perjalanan dari perkembangan gagasan-gagasan yang muncul di kalangan ulama pada paruh seperempat abad ke-20. Berdirinya NU diawali dengan munculnya Taswirul Afkar sebagai gerakan keilmuan dan kebudayaan, kemudian lahir Nahdlatul Tujjar yang muncul sebagai lambang pergerakan ekonomi pedesaan, dan disusul dengan berdirinya Nahdlatul Wathan sebagai gerakan politik dalam bentuk pendidikan. Dengan demikian NU didukung oleh tiga pilar utama yang bertumpu pada kesadaran keagamaan. Tiga pilar tersebut adalah wawasan ekonomi kerakyatan, wawasan keilmuan dan sosial budaya dan wawasan kebangsaan.

Nahdlatul Ulama menganut paham *AhlussunahwalJama'ah*, yaitu sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara dalil naqli dan dalil aqli. Karena itu sumber keagamaan bagi NU adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Artinya, di samping menggunakan dalil *naqli*, NU juga menggunakan dalil *aqli* dengan mendayagunakan fungsi kemampuan akal ditambah dengan analisis realitas empirik. Formulasi berpikir semacam itu dirujuk dari pemikiran teologi Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dalam fiqh mengikuti salah satu dari empat imam mazhab: Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad Idris al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Pada bidang tasawuf



mengikuti ajaran Junaidi al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali, yang mengintegrasikan antara syari'at dengan tasawuf.

Nahdlatul Ulama tidak hanya mengaku sebagai penganut paham Ahlussunnahwal-Jama'ah, tetapi juga mengembangkannya secara lebih komprehensif. Menurut NU, Ahlussunnahwal-Jama'ah adalah corak keberagaman umat Islam, baik pemahaman maupun praktik yang didasarkan atas tradisionalisme mazhabiyah. Ia merupakan sistem ajaran Islam yang diajarkan dan dipraktikan Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, dan para tabi'in watabi'ittabi'in. Untuk merinci lebih jelas rumusan Aswaja, ulama NU menempatkan aqidah sebagai sistem kepercayaan, fiqh sebagai norma yang mengatur kehidupan, dan tasawuf sebagai tuntunan dalam membina akhlak untuk mencerahkan ruhani. Ketiganya bukan sebagai ajaran yang terpisah satu sama lain, melainkan sebagai tiga aspek yang menyatu sebagai ajaran Islam.

Dalam kiprahnya selama hampir satu abad, jati diri Nahdlatul Ulama pada hakekatnya tidak pernah berubah dalam mengembangkan mainstream faham keagamaan-kebangsaan yang dijiwai semangat keislaman-keindonesiaan yang moderat, inklusif, toleran dan kultural.

Selanjutnya, dalam konteks masyarakat Lombok, Islam merupakan rujukan utama dan lensa ideologis dalam memahami dinamika yang terus berkembang dan mengevaluasi berbagai perubahan, karena Islam merupakan agama yang sangat dominan di pulau Lombok yang memainkan peran penting sebagai penjaga nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Secara sosiologis, masyarakat Lombok misalnya, dikenal sebagai masyarakat yang kuat mempertahankan nilai dan ajaran agama, hal ini disebabkan oleh pengakuan dan penghormatan terhadap peran Tuan Guru dan memandang mereka sebagai panutan dalam kehidupan sosial-keagamaan. Dominannya jumlah umat Islam, tentu mempunyai pengaruh signifikan terhadap jumlah Masjid, sehingga pulau Lombok terkenal dengan sebutan "Pulau Seribu Masjid" dan banyaknya jama'ah haji dari pulau ini. Dalam titik inilah peran sosial keagamaan Nahdlatul Ulama di pulau Lombok menjadi sangat signifikan.

Akhirnya, secara pribadi sebagai warga NU dan sebagai bagian dari masyarakat Lombok, saya mengapresiasi dan menyambut baik terbitnya buku "Mozaik NU: Dinamika Perkembangan Nahdlatul Ulama di Pulau Lombok" sebagai karya "orang dalam" akademisi dan kader-kader NU

di pulau Lombok yang mampu memotret dinamika perkembangan Nahdlatul Ulama dalam lintasan sejarah tentang kajian wawasan paham keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan secara komprehensif.

Hadirnya buku ini dapat mengantarkan pembaca bernostalgia, mengenang masa silam, dan menyelam informasi cakrawala pembaca yang ingin menelusuri mozaik historisitas Nahdlatul Ulama di pulau Lombok. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi kontribusi bagi literatur khazanah keilmuan, keislaman dan keindonesiaan. Semoga.[]

*Wallahul Muwaffiqilaa Aqwamit Thariiq*

Mataram, 4 September 2017

Dr. H. Mutawali, M.Ag.



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar Rektor UIN Mataram • iii

Daftar Isi • vii

Bab I Relasi Islam, Adat dan Hukum di Lombok • 1

- A. Akar Sejarah Pulau Lombok • 2
- B. Geografi dan Demografi Pulau Lombok • 8
- C. Dinamika Akulturasi Budaya Suku Sasak • 10
- D. Sistem Kekerabatan Suku Sasak • 12
- E. Stratifikasi Sosial Suku Sasak • 20
- F. Status dan Kedudukan Perempuan Sasak • 22
- G. Relasi Islam, Adat dan Hukum • 26
- H. Wawasan Konseptual Agama, Adat dan Hukum • 28
- I. Dialektika Islam dan Adat • 34
- J. Akomodasi, Adaptasi dan Akulturasi Islam dengan Adat • 47

Bab II Paham Keagamaan Nahdlatul Ulama • 57

- A. Sumber Hukum Islam • 57
- B. Landasan Dasar Keagamaan Nahdlatul Ulama • 63
- C. Paham Keagamaan Nahdlatul Ulama • 65
- D. Prinsip Nilai Ahlussunnah Wal Jama'ah Nahdlatul Ulama • 66
- E. Metode Bermazhab dan Istinbath Al-Ahkam Nahdlatul Ulama • 74
- F. Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah Nahdlatul Ulama • 76
- G. Perbedaan Paham Ahlussunnah Waljama'ah NU dengan

|   |  |
|---|--|
| Paham yang Lain • 93  |  |
| H. Sikap NU dalam Beragama dan Bermasyarakat (Diniyah wal Ijtima'iyah) • 99 |  |
| I. Sikap NU di Bidang Politik • 100   |  |
| J. Sikap NU di Bidang Kebudayaan • 103                                      |  |
| K. Sikap NU di Bidang Pendidikan • 108                                      |  |
| L. Sikap NU di Bidang Ekonomi • 111   |  |
| M. Sikap NU di Bidang Dakwah • 112  |  |
| N. Sikap NU di Bidang Kebangsaan • 116                                      |  |
| O. Perangkat Organisasi Nahdlatul Ulama • 119                               |  |
| <br>  |  |
| Bab III Kelahiran NU di Lombok • 123  |  |
| A. Lombok Pra Kelahiran Nahdlatul Ulama • 123                               |  |
| B. Lahirnya Nahdlatul Ulama di Lombok • 127                                 |  |
| <br>  |  |
| Bab IV NU Sebagai Parpol (1952- 1971) • 141                                 |  |
| A. Terbentuknya NU sebagai Partai Politik • 141                             |  |
| B. Pelaksanaan Fungsi Partai NU di Lombok NTB • 148                         |  |
| <br>  |  |
| Bab V Nahdlatul Ulama Versus Gerakan 30 September/PKI • 161                 |  |
| A. Paham Komunisme dan Aksinya • 161  |  |
| B. NU Versus PKI di Lombok • 166  |  |
| <br>  |  |
| Bab VI Dinamika Internal NU Sebelum Kembali ke Khittah 1926 • 195           |  |
| A. Lintas Peristiwa Sebelum Khittah • 195                                   |  |
| B. Pergolakan Internal NU Sebelum Khittah • 196                             |  |
| <br>  |  |
| Bab VII NU Lombok Pasca Khittah 1926 • 211                                  |  |
| A. Proses NU Kembali ke Khittah 1926 • 211                                  |  |
| B. Aktifitas NU Lombok NTB Pasca Khittah 1926 • 224                         |  |
| <br>  |  |
| Bab VIII Dinamika Internal NU Pasca Khittah 1926 • 241                      |  |
| A. Dinamika Internal NU Pasca Khittah • 241                                 |  |
| B. Terselenggaranya Komes dan Munas di Bagu Lombok • 255                    |  |



|   |  |
|---|--|
| Bab IX Nahdlatul Ulama & Orde Reformasi • 267   |  |
| A. Nahdlatul Ulama dan Menjelang Reformasi • 267                                      |  |
| B. Nahdaltul Ulama di Orde Reformasi • 270  |  |
| <br>  |  |
| Bab X Mengikuti Mukhtamar NU ke XXX &<br>Sabtu Kelabu di Mataram • 283                |  |
| A. Mengikuti Mukhtamar NU Ke-30 • 283   |  |
| B. Sabtu Kelabu di Mataram • 291  |  |
| <br>  |  |
| Bab XI NU NTB Pasca GUSDUR sebagai Presiden • 295                                     |  |
| A. Kilas Biografi GUSDUR • 295  |  |
| B. NU NTB Saat GUSDUR sebagai Presiden • 298  |  |
| <br>  |  |
| Bab XII Tanah Al Ma'arif Mataram dan Basis-Basis NU<br>di Lombok Pasca Khitthah • 307 |  |
| A. Tanah al-Ma'arif Nahdlatul Ulama • 307   |  |
| B. Basis-Basis Nahdlatul Ulama di Lombok • 311  |  |
| <br>  |  |
| Bab XIII Penutup • 337  |  |
| Daftar Pustaka • 341  |  |
| Indeks • 349  |  |
| Dokumentasi • 353   |  |
| Tentang Penulis • 367   |  |



# B A B I

## RELASI ISLAM, ADAT DAN HUKUM DI LOMBOK

SUB BAB INI MENDISKUSIKAN dua topik utama, yaitu pertama membahas tentang pulau Lombok yang meliputi akar genealogi sejarah, adat istiadat, sistem kekrabatan dan kedua membahas tentang relasi Islam, adat dan hukum di pulau Lombok. Uraianya bersifat diskriptif dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang relasi ketiga aspek tersebut, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan komprehensif dalam menganalisa tema utama tentang sejarah sosial Nahdlatul Ulama di pulau Lombok.

Sebelum itu perlu dibahas tentang Lombok. Pulau Lombok,<sup>1</sup> selain dikenal dengan wisata alamnya, juga penting untuk studi-studi sosial dikarenakan banyak sisi yang menarik untuk ditelaah mulai dari historisitas, tradisi maupun institusi sosial politik dan dinamika keagamaan yang berkembang di daerah yang dijuluki “Pulau Seribu Masjid itu”.<sup>2</sup>

Penduduk asli pulau Lombok disebut suku Sasak. Mereka adalah kelompok etnik mayoritas yang berjumlah tidak kurang dari 89% dari keseluruhan penduduk Lombok. Sedangkan kelompok-kelompok etnik lainnya seperti Bali, Jawa, Arab, dan Cina adalah pendatang.<sup>3</sup> Orang-orang Sasak menyebar di hampir seluruh daratan Lombok. Sedangkan

---

<sup>1</sup> Pulau Lombok terdiri dari empat Kabupaten (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara) dan satu Kotamadya yaitu Kota Mataram.

<sup>2</sup> Berdasarkan data di Kantor Wilayah Kementerian NTB, jumlah masjid di Lombok telah mencapai 4.500 buah. Ini belum termasuk jumlah mushola. Bila dibandingkan dengan luas wilayah NTB yang mencapai 20.153 meter persegi, boleh dikata, rata-rata, setiap 500 meter ada masjid.

<sup>3</sup> Erni Budiwanti, *Islam SasakWetu Telu vs Waktu Lima* (Yogyakarta: LkiS, 2000), hlm. 6.

para pendatang, biasanya tinggal di daerah-daerah tertentu. Sebagian besar orang Bali misalnya tinggal di Lombok Barat dan Lombok Tengah. Orang-orang Sumbawa terutama bermukim di Lombok Timur dan orang-orang Arab di Ampenan. Lingkungan pemukiman masyarakat Arab di Ampenan disebut Kampung Arab Ampenan. Orang-orang Cina yang bekerja sebagai pedagang umumnya tinggal di pusat-pusat kota seperti Cakranegara, Ampenan dan Praya.

## A. Akar Sejarah Pulau Lombok

Suku Sasak merupakan kelompok masyarakat yang mendiami hampir sebagian besar Pulau Lombok. Sejarah suku Sasak ditandai dengan silih bergantinya berbagai dominasi kekuasaan di Pulau Lombok dan masuknya pengaruh budaya lain yang membawa dampak beragamnya khazanah kebudayaan Sasak. Hal ini sebagai bentuk dari pertemuan (difusi, akulturasi, inkulturasi) kebudayaan. Lombok pernah dikuasai oleh beberapa buah kerajaan di Nusantara, namun yang paling besar pengaruhnya adalah Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Karang Asem Bali.

Sangat sedikit yang dapat diketahui tentang sejarah awal Pulau Lombok. Pemerhati sejarah Lombok merasakan adanya kesulitan ketika berusaha merekonstruksi proses perjalanan pulau ini dengan baik. Hal yang sama juga dirasakan ketika kita mencoba menelusuri tapak sejarah masuknya Islam di wilayah ini. Paling tidak secara ilmiah, kita akan kesulitan menemukan data-data *valid* dan *reliable* yang dapat diverifikasi oleh semua pihak.

Dalam konteks ini tidak berlebihan jika kemudian para peneliti, seperti John Ryan Bartholomew melihat ada dua tema penting yang melembari sejarah Lombok, yaitu: *pertama*, pulau yang seolah-olah tidur dan terbelakang ini merupakan situs dari bermacam-macam inkursi (serbuan atau penyerangan) yang mempengaruhi praktik-praktik dan kepercayaan Sasak. *Kedua*, ada seruan periodik namun konsisten terhadap purifikasi agama. Perubahan-perubahan sosial akibat dari inkursi-inkursi ini memberikan stimulus perasaan akan kebutuhan untuk memperbarui agama.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> John Ryan Bartholomew, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*, terj. Imran Rasidi (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 93.

Satu-satunya sumber yang selama ini secara khusus menguraikan perjalanan pulau ini adalah *Babad*; Babad Lombok, Babad Selaparang, dan lain-lain. Keraguan muncul, ketika di dalam babad-babad tersebut termuat cerita-cerita legenda dan mistis lainnya, yang sedikit banyak mempersulit pemilahan antara fakta dan mitos di dalamnya.

Era pra sejarah pulau Lombok tidak jelas karena sampai saat ini belum ada data-data dari para ahli serta bukti yang dapat menunjang tentang masa pra sejarah Lombok. Suku Sasak termasuk dalam ras tipe Melayu yang konon telah tinggal di Lombok selama 2.000 tahun yang lalu dan diperkirakan telah menduduki daerah pesisir pantai sejak 4.000 tahun yang lalu. Dengan demikian, perdagangan antarpulau sudah aktif terjadi sejak zaman tersebut dan bersamaan dengan itu saling mempengaruhi antar budaya juga telah menyebar.

Khusus mengenai sejarah Pulau Lombok, baru menjelang abad XIV terdapat bukti yang menunjukkan adanya hubungan dengan Pulau Jawa. Dalam buku *Negarakertagama* (1365), karangan Mpu Prapanca, istilah *Lombok* (*Lombok Mirah*) dan *Sasak* (*Sasak Adi*), yang merepresentasikan Pulau Lombok dengan masyarakatnya, disebutkan sebagai bagian dari wilayah Majapahit. “Lombok Mirah” dan “Sasak Adi” merupakan salah satu kutipan dari kitab *Negarakertagama*, sebuah kitab yang memuat tentang kekuasaan dan pemerintahan Kerajaan Majapahit. Kata “Lombok” dalam bahasa Kawi berarti *lurus* atau *jujur*; “Mirah” berarti *permata*; “Sasak” berarti *kenyataan*; “Adi” berarti *yang baik* atau *yang utama*, maka arti keseluruhan, yaitu “kejujuran adalah permata kenyataan yang baik atau utama”. Makna filosofi itulah mungkin yang selalu diidamkan leluhur penghuni tanah Lombok yang tercipta sebagai bentuk kearifan lokal yang harus dijaga dan dilestariakan oleh anak cucunya. Lebih lanjut keterangan mengenai Lombok dalam pupuh ke-14 tertulis:

“Muwah tang I Gurunsanusari Lombok Mirah lawantikang sasakadi  
ikalun kahayian kabeh Muwah tanah I Bantayan Pramuka Bantayan len  
Luwuk teken Udamakatrayadhi nikayang sanusa pupul”.<sup>5</sup>

Penyebutan Lombok Mirah untuk daerah Lombok Barat dan Sasak Adi untuk daerah Lombok Timur. Lombok Timur disebut demikian,

---

<sup>5</sup> Sebagaimana dikutip Fathurrahman Zakaria, *Mozaik Budaya Orang Mataram* (Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamid, 1998), hlm. 37.



karena pada zaman dahulu ditumbuhi hutan belantara yang lebat sekali sampai sesak, hingga di sini asal nama Sasak, dari *Saksak* (bahasa Sansekerta).

Lebih lanjut dijelaskan dalam Babad Tanah Lombok, bahwa sebutan “Sasak” pada etnis asli Lombok berlatar legenda rakyat. Hal itu mengaca pada kondisi daerah Lombok yang berupa hutan nan rapat sehingga seolah benteng kokoh. Orang pun lalu menyebutnya *sesek* (penuh sesak) untuk menunjukkan daerah ini. Selanjutnya daerah dan penduduk kawasan ini pun dikenal orang dengan nama *sasak* atau *tanah sasak*.<sup>6</sup>

Sumber lain, kata “Sasak” berasal dari bahasa Sansekerta, yakni *Sak* (pergi). Sumber lain, dan kata *Saka* (asal). Disebutkan pula bahwa orang Sasak adalah orang – orang yang pergi dari negeri asal dengan menggunakan rakit berlayar hingga terdampar di pulau ini. Diduga mereka berasal dari Jawa dan menetap di pulau ini secara turun temurun. Dari pengertian etimologis ini, diduga leluhur orang Sasak adalah orang Jawa. Terbukti pula dari tulisan Sasak yang oleh penduduk Lombok disebut Jejawan, yakni aksara Jawa yang selengkapnya diresepsi oleh kesusastraan Sasak.

Bukti penguat tesis ini adalah adanya silsilah para bangsawan Lombok yang terangkum dalam suatu sastra tertulis dalam gubahan bahasa *Jawa Madya* dan *Jejawan*.<sup>7</sup> Sedangkan dalam Babad “Sangupati”, Pulau Lombok juga disebut dengan *meneng* (sepi), dalam babad ini yang disebut pangeran Sangupati (Sang Upati) tiada lain adalah Dahyang Nirarta yang pernah datang ke Lombok pada tahun 1530 M. Sementara Patih Gajah Mada yang datang tahun 1345, menyebutkan Lombok dengan “*Selapawis*” yang berarti *sela* (batu) dan *pawis* adalah parang karang. Namun ini semua berasal dari bahasa Sansekerta. Dan nama Selaparang inilah yang populer bagi sebutan Lombok sejak Prabu Rangkesari sampai datangnya Islam di Lombok.<sup>8</sup>

Kerajaan Selaparang merupakan salah satu kerajaan tertua yang pernah tumbuh dan berkembang di Pulau Lombok, bahkan disebut-

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun Monografi Daerah NTB, *Monografi Daerah NTB* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997), hlm. 4.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Anak Agung Ketut Agung, *Kupu-kupu Kuning Yang Terbang di Selat Lombok* (Denpasar: Upada Sastra, 1992), hlm. 37.

sebut sebagai embrio yang kemudian melahirkan raja-raja Lombok. Posisi ini selanjutnya menempatkan Kerajaan Selaparang sebagai ikon penting kesejarahan pulau ini. Terbukti penamaan pulau ini juga sering disebut sebagai Bumi Selaparang atau dalam istilah lokalnya sebagai *Gumi Selaparang*.

Berkaitan dengan Kerajaan Selaparang ini, ada tiga pendapat tentang asal muasal Kerajaan Selaparang,<sup>9</sup> yaitu: *pertama*, disebutkan bahwa kerajaan ini merupakan proses kelanjutan dari kerajaan tertua di Pulau Lombok, yaitu Kerajaan Desa Lae' yang diperkirakan berkedudukan di Kecamatan Sambalia, Lombok Timur sekarang. Dalam perkembangannya masyarakat kerajaan ini berpindah dan membangun sebuah kerjaan baru, yaitu Kerajaan Pamatan di Kecamatan Aikmel dan diduga berada di Desa Sembalun sekarang. Dan ketika Gunung Rinjani meletus, penduduk kerajaan ini terpecah-pecah yang menandai berakhirnya kerajaan. Betara Indra kemudian mendirikan kerajaan baru bernama Kerajaan Suwung, yang terletak di sebelah utara Perigi sekarang. Setelah berakhirnya kerajaan yang disebut terakhir, barulah kemudian muncul Kerajaan Lombok atau Kerajaan Selaparang.

*Kedua*, disebutkan bahwa setelah Kerajaan Lombok dihancurkan oleh tentara Majapahit, Raden Maspahit melarikan diri ke dalam hutan dan kembalinya tentara itu, Raden Maspahit membangun kerajaan yang baru bernama Batu Parang yang kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Selaparang. *Ketiga*, disebutkan bahwa pada abad XII, terdapat satu kerajaan yang dikenal dengan nama Kerajaan Perigi yang dibangun oleh sekelompok transmigran dari Jawa di bawah pimpinan Prabu Inopati dan sejak waktu itu Pulau Lombok dikenal dengan sebutan Pulau Perigi. Ketika Kerajaan Majapahit mengirimkan ekspedisinya ke Pulau Bali pada tahun 1443 yang diteruskan ke Pulau Lombok dan Dompu pada tahun 1357 di bawah pemerintahan Mpu Nala, ekspedisi ini menaklukkan Selaparang dan Dompu.

Agak sulit membuat kompromi penafsiran untuk menemukan benang merah ketiga deskripsi di atas. Minimnya sumber-sumber sejarah menjadi alasan yang tak terelakkan. Menurut Lalu Djelenga,<sup>10</sup> catatan sejarah kerajaan-kerajaan di Lombok yang lebih berarti dimulai dari masuknya Majapahit melalui ekspedisi di bawah Mpu Nala pada tahun

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun ..., hlm. 10.

<sup>10</sup> Lalu Djelenga, *Keris di Lombok* (Mataram: Yayasan Pusaka Selaparang, 2002), hlm. 20.

1343, sebagai pelaksanaan Sumpah Palapa Maha Patih Gajah Mada yang kemudian diteruskan dengan inspeksi Gajah Mada sendiri pada tahun 1352. Pasukan Gajah Mada ini diberitakan mendarat pertama kali di desa Akar-akar, wilayah Lombok Barat bagian utara.<sup>11</sup>

Ekspedisi ini, lanjut Djelenga, meninggalkan jejak Kerajaan Gelgel di Bali. Sedangkan di Lombok, dalam perkembangannya meninggalkan jejak berupa empat kerajaan utama saling bersaudara, yaitu Kerajaan Bayan di Barat, Kerajaan Selaparang di Timur, Kerajaan Langko di Tengah, dan Kerajaan Pejanggik di Selatan. Selain keempat kerajaan tersebut, terdapat kerajaan-kerajaan kecil, seperti Parwa dan Sokong serta beberapa desa kecil, seperti Pujut, Tempit, Kedaro, Batu Dendeng, Kuripan, dan Kentawang. Seluruh kerajaan dan desa ini selanjutnya menjadi wilayah yang merdeka, setelah Kerajaan Majapahit runtuh.<sup>12</sup>

Sasak tradisional merupakan etnis mayoritas penghuni pulau Lombok, suku Sasak merupakan etnis utama meliputi hampir 95% penduduk seluruhnya. Bukti lain juga menyatakan bahwa berdasarkan prasasti tong-tong yang ditemukan di Pujungan, Bali, Suku Sasak sudah menghuni pulau Lombok sejak abad IX sampai XI Masehi, Kata Sasak pada prasasti tersebut mengacu pada tempat suku bangsa atau penduduk seperti kebiasaan orang Bali sampai saat ini sering menyebut pulau Lombok dengan gumi sasak yang berarti tanah, bumi atau pulau tempat bermukimnya orang Sasak.

Sejarah Lombok tidak lepas dari silih bergantinya penguasaan dan peperangan yang terjadi di dalamnya baik konflik internal, yaitu peperangan antar kerajaan di Lombok maupun eksternal yaitu penguasaan dari kerajaan di luar pulau Lombok. Perkembangan era Hindu, Buddha, memunculkan beberapa kerajaan seperti Selaparang Hindu, dan Bayan. Kerajaan-kerajaan tersebut dalam perjalannya di tundukan oleh penguasa dari kerajaan Majapahit saat ekspedisi Gajah Mada di abad XIII – XIV dan penguasaan kerajaan Gel – Gel dari Bali pada abad VI.

Antara Jawa, Bali dan Lombok mempunyai beberapa kesamaan budaya seperti dalam bahasa dan tulisan. Jika di telusuri asal – usul mereka banyak berakar dari Hindu Jawa. Hal itu tidak lepas dari pengaruh

---

<sup>11</sup> Muhammad Syamsu AS, *Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya* (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), hlm. 114.

<sup>12</sup> Djelenga, *Keris...*, hlm. 22.

penguasaan kerajaan Majapahit yang kemungkinan mengirimkan anggota keluarganya untuk memerintah atau membangun kerajaan di Lombok. Pengaruh Bali memang sangat kental dalam kebudayaan Lombok hal tersebut tidak lepas dari ekspansi yang dilakukan oleh kerajaan Bali sekitar tahun 1740 di bagian barat pulau Lombok dalam waktu yang cukup lama. Sehingga banyak terjadi akulturasi antara budaya lokal dengan kebudayaan kaum pendatang. Hal tersebut dapat dilihat dari terjelmanya genre–genre campuran dalam kesenian. Banyak genre seni pertunjukan tradisional berasal atau diambil dari tradisi seni pertunjukan dari kedua etnik. Sasak dan Bali saling mengambil dan meminjam sehingga terciptalah genre kesenian baru yang menarik dan saling melengkapi.

Gumi Sasak silih berganti mengalami peralihan kekuasaan hingga ke era Islam yang melahirkan kerajaan Islam Selaparang dan Pejanggalik. Ada beberapa versi masuknya Islam ke Lombok sepanjang abad XVI Masehi. Pertama berasal dari Jawa dengan cara Islam masuk lewat Lombok Timur; Kedua, Islamisasi berasal dari Makassar dan Sumbawa. Ketika ajaran tersebut diterima oleh kaum bangsawan ajaran tersebut dengan cepat menyebar ke kerajaan–kerajaan di Lombok timur dan Lombok tengah.

Mayoritas etnis sasak beragama Islam, namun demikian dalam kenyataannya pengaruh Islam juga berakulturasi dengan kepercayaan lokal sehingga terbentuk aliran seperti *wektu telu*, jika dianalogikan seperti abangan di Jawa. Pada saat ini keberadaan *wektu telu* sudah kurang mendapat tempat karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Pengaruh Islam yang kuat menggeser kekuasaan Hindu di pulau Lombok, hingga saat ini dapat dilihat keberadaannya hanya di bagian barat Pulau Lombok saja khususnya di Kota Mataram.

Silih bergantinya penguasaan di Pulau Lombok dan masuknya pengaruh budaya lain membawa dampak semakin kaya dan beragamnya khasanah kebudayaan Sasak. Sebagai bentuk dari Pertemuan (difusi, akulturasi, inkulturasi) kebudayaan. Seperti dalam hal kesenian, bentuk kesenian di Lombok sangat beragam. Kesenian asli dan pendatang saling melengkapi sehingga tercipta genre–genre baru. Pengaruh yang paling terasa berakulturasi dengan kesenian lokal yaitu kesenian Bali dan pengaruh kebudayaan Islam. Keduanya membawa kontribusi yang besar terhadap perkembangan kesenian–kesenian yang ada di Lombok

hingga saat ini. Implementasi dari pertemuan kebudayaan dalam bidang kesenian yaitu, yang merupakan pengaruh Bali; Kesenian Cepung, cupak gerantang, Tari jangger, Gamelan Thokol, dan yang merupakan pengaruh Islam yaitu kesenian Rudad, Cilokaq, Wayang Sasak, Gamelan Rebana.

Demikianlah sejarah dinamika Lombok tidak lepas dari silih bergantinya penguasaan dan peperangan yang terjadi di dalamnya baik konflik internal, yaitu peperangan antarkerajaan di Lombok maupun eksternal, yaitu penguasaan dari kerajaan dari luar Pulau Lombok.

## **B. -Geografi dan Demografi Pulau Lombok**

Suku Sasak adalah suku yang secara geografis hidup di pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dan secara budaya terikat dengan adat dan kebudayaan Sasak, siapapun dan dimanapun mereka berada. Dahulu kala, NTB mencakup Bali, Lombok, dan pulau Sumbawa. Provinsi ini pada zaman Belanda disebut dengan Sunda Kecil.<sup>13</sup>

Secara historis, Pulau Lombok sejak tanggal 19 Agustus 1945 sampai sebelum tahun 1958 termasuk dalam wilayah Provinsi Sunda Kecil, yang meliputi Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Timor, Rote, Sumba, dan Sawu dengan ibukotanya Singaraja, Bali dan dipimpin oleh Gubernur I Gusti Ketut Pudja. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1958, Provinsi Sunda Kecil dipisah menjadi tiga provinsi, masing-masing adalah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Pulau Bali menjadi provinsi tersendiri dengan ibukotanya Denpasar. Sementara Pulau Lombok dan Sumbawa disatukan menjadi provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan ibu kota Mataram. Sedangkan pulau-pulau di kawasan timur, mulai dari Pulau Flores, Timor, Rote, Sumba dan Sawu, menjadi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan ibukota Kupang.

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang luasnya 20.153,15 km<sup>2</sup>. Secara astronomis membujur ke arah timur dan barat di antara 115,46 Bujur Timur dan melintang dari utara ke selatan antara 8,5 dan 9,5 Lintang Selatan.<sup>14</sup> Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ini terdiri dari

---

<sup>13</sup> Alvons Van Deer Kraan, *Lombok, Conquest, Colonization and Underdevelopment 1870-1940* (Australian University Press: 1980), hlm. 4-5; Aryani Setyaningsih. "Lelaki Pepadu", Tesis, (Yogyakarta: UGM, Fakultas Ilmu Budaya, Jurusan Antropologi, 2009).

<sup>14</sup> Tim Penyusun ..., hlm. 7



dua pulau, yaitu Pulau Lombok dan Sumbawa. Pulau Lombok ditempati oleh suku Sasak sebagai etnis pribumi, sedangkan pulau Sumbawa didiami oleh suku Samawa (Sumbawa) dan suku Mbojo (Bima dan Dompu).<sup>15</sup> Luas Pulau Lombok 4.738,70 Km<sup>2</sup> (23,51%), sedangkan Pulau Sumbawa 15.414,37 km<sup>2</sup> (76,49%). Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 148 m dari permukaan laut sementara Raba terendah dengan 13 m dari permukaan laut. Dari tujuh gunung yang ada di Pulau Lombok, Gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi dengan ketinggian 3.775 m, sedangkan Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Sumbawa dengan ketinggian 2.851 m.<sup>16</sup>

Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena terletak pada lintas perhubungan Banda Aceh-Kupang yang secara ekonomis cukup menguntungkan. Selat Lombok di sebelah barat dan Selat Makasar di sebelah utara merupakan jalur perhubungan laut strategis yang semakin ramai dari arah Timur Tengah untuk lalu lintas bahan bakar minyak dan dari Australia berupa mineral logam ke Asia Pasifik. Kawasan ini merupakan lintas perdagangan ke Kawasan Timur Indonesia (Surabaya-Makasar). Terletak pada daerah lintas wisata dunia yang terkenal: Bali, Komodo, dan Tanah Toraja.<sup>17</sup>

Dari aspek demografis, berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 yang dilakukan Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat,<sup>18</sup> tercatat jumlah penduduk mencapai 4,4 juta jiwa, yang terdiri atas 2,1 juta laki-laki dan 2,3 juta perempuan. Dari total jumlah penduduk tersebut, sebanyak 70,42% tersebar di Pulau Lombok, sedangkan di Pulau Sumbawa sebesar 29,58 persen. Kabupaten/kota di NTB yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1.1 juta jiwa lebih, disusul Kabupaten Lombok Tengah 859.309 jiwa, Lombok Barat 306.486 jiwa. Selanjutnya Kabupaten Bima sebanyak 438.522 jiwa, Sumbawa 415.363 jiwa, Kota Mataram 402.296 jiwa, Kabupaten Dompu 218.984 jiwa, Lombok Utara 199.904 jiwa, Kota Bima 142.443 jiwa dan Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 114.754 jiwa.

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat* (Jakarta: Eka Darma, 1997), hlm. 11.

<sup>16</sup> [www.ntb.go.id](http://www.ntb.go.id)

<sup>17</sup> [www.ntb.go.id](http://www.ntb.go.id)

<sup>18</sup> [www.bps.go.id/hasilSP2010/ntb/5200.pdf](http://www.bps.go.id/hasilSP2010/ntb/5200.pdf)

Tingkat kepadatan penduduk rata-rata di NTB yang memiliki luas wilayah sekitar 20.153,15 kilometer persegi, yakni sebanyak 223 orang per kilometer persegi. Kabupaten/kota yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kota Mataram, yakni sebanyak 6.563 orang per kilometer persegi, sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 62 orang per kilometer persegi. Laju pertumbuhan penduduk NTB per tahun selama sepuluh tahun terakhir 2000-2010 sebesar 1,17%. Laju pertumbuhan penduduk Pulau Sumbawa mencapai 1,29%, lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk di Pulau Lombok yang mencapai 1,10%. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat yakni sebesar 2,71%, sedangkan terendah di Kabupaten Lombok Timur 0,78%. Meskipun Kabupaten Lombok Timur memiliki jumlah penduduk paling banyak di NTB, tapi laju pertumbuhan penduduknya paling rendah dibandingkan dengan sembilan kabupaten/lainnya.

Hasil Sensus Penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan, bahwasex *ratio* penduduk NTB sebesar 94,11%. Artinya, jumlah penduduk perempuan enam persen lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki, atau dengan kata lain dari 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 94 penduduk laki-laki. *Sex ratio* tertinggi di Kabupaten Sumbawa, yakni sebesar 103,70% dan terkecil di Kabupaten Lombok Timur sebesar 86,98%. Sedangkan jumlah rumah tangga di NTB, mencapai 1,2 juta lebih rumah tangga. Dengan demikian, jumlah penduduk NTB sebanyak 4,4 juta jiwa lebih, rata-rata anggota rumah tangga mencapai 3,59 orang. Artinya banyaknya penduduk yang menempati satu rumah tangga di NTB rata-rata sebanyak 3,59 orang. Rata-rata anggota rumah tangga di setiap kabupaten/kota berkisar antara 3,35 orang yang terdapat di Kabupaten Lombok Tengah, sampai 4,13 orang yang terdapat di Kabupaten Dompu.

### **C. Dinamika Akulturasi Budaya Suku Sasak**

Kebudayaan hadir sebagai pranata yang secara terus-menerus dipelihara oleh para pembentuknya dan diwarisi kepada generasi selanjutnya secara turun temurun. Dalam konteks ini paling tidak ada empat budaya yang paling signifikan mendominasi dan mempengaruhi perkembangan dinamika pulau ini, yaitu: 1) pengaruh Hindu Jawa; 2)

pengaruh Hindu Bali; 3) pengaruh Islam; dan 4) pengaruh kolonial Belanda dan Jepang.

Orang Jawa, Makasar, Bali, Belanda, dan Jepang berhasil menguasai Lombok lebih kurang satu milenium.<sup>19</sup> Kerajaan Hindu Majapahit dari Jawa Timur, masuk ke Lombok pada abad VII dan memperkenalkan Hindu-Budhisme ke komunitas suku Sasak. Setelah dinasti Majapahit jatuh, agama Islam dibawa pertama kali oleh para raja Jawa Muslim pada abad XIII ke kalangan orang Sasak Lombok dari Barat laut. Islam segera menyatu dengan ajaran sufisme Jawa yang penuh mistikisme. Sementara orang-orang Makasar tiba di Lombok Timur pada abad XVI dan berhasil menguasai Selaparang, kerajaan orang Sasak asli. Warna Islam yang dibawa orang Makasar adalah Islam sunni. Mereka berhasil mengkonversi hampir seluruh orang Sasak ke dalam Islam. Sedangkan Kerajaan Bali dari Karangasem menduduki daerah Lombok Barat sekitar abad XVII, dan kemudian mengkonsolidasikan kekuasaannya terhadap seluruh Lombok setelah mengalahkan kerajaan Makasar tahun 1740. Kekuasaan Hindu-Bali saat itu sebenarnya relatif toleran terhadap agama anutan orang sasak. Namun itu tak membuat bangsawan Sasak dan para Tuan Guru kehilangan alasan untuk bangkit melawan Kerajaan Hindu-Bali, tapi selalu berhasil dipatahkan. Belakangan, kekalahan itu mendorong mereka untuk meminta keterlibatan militer Belanda guna mengusir Kerajaan Bali. Ketika akhirnya Bali berhasil diusir, alih-alih mengembalikan kekuasaan bangsawan Sasak, orang-orang Belanda justru menjadi penjajah baru di Lombok. Bahkan Belanda banyak mengambil tanah yang sebelumnya dikuasai oleh Kerajaan Bali, dan memberlakukan pajak tanah yang tinggi terhadap penduduk. Masa-masa itu juga sekaligus menjadi awal dimulainya kolonialisasi Belanda yang berlangsung hingga berabad-abad kemudian. Hingga kemudian Jepang datang dan menjarah Lombok untuk suatu rentang waktu yang singkat, yaitu 1942-1945.<sup>20</sup> Selain konfigurasi politik kedatangan kedua penjajah asing tersebut, tampaknya tidak mengubah sama sekali polarisasi keagamaan antara Hindu dan Islam yang sejauh itu telah mapan di Pulau Lombok.

Demikianlah berbagai kekuatan asing bergantian menaklukkan Lombok selama berabad-abad. Hal itu, tentu saja, teramat mempengaruhi

---

<sup>19</sup> Erni Budiwanti, *Islam Sasak: Wetu Telu Versus Waktu Lima* (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 8.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 9-11.

cara orang sasak dalam menyerap beragam pengaruh luar tersebut. Selama rentang waktu amat panjang penguasaan berbagai kekuatan luar itu, dinamika keberagaman orang Sasak berlangsung penuh warna. Agama Hindu (Majapahit) yang datang dan terserap lebih dulu sedikit banyak menentukan struktur kesadaran keagamaan orang Sasak yang tentu tak mudah begitu saja dikikis-tiadakan oleh kedatangan Islam (Jawa). Terlebih simbiosis ajaran keduanya dimungkinkan oleh Islam Jawa berwajah sufisme yang mampu menampung aneka “kreativitas” keagamaan, yang datang mendahului kehadiran Islam sunni nan ortodoks dari Makasar. Wajah keberagaman itu kian warna-warni menyusul kehadiran agama Hindu (Bali), terutama di kawasan Barat dan Utara Lombok. Aktivitas dakwah ke kawasan tersebut yang dimulai intensif pada abad XVIII dengan segera menemukan dinamika “pelangi” keberagaman itu.

Akhirnya, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kedatangan berbagai agama secara berturut-turut mulai Hindu-Majapahit, kemudian Islam Jawa, berlanjut dengan kehadiran Islam Makasar, dan lalu Hindu-Bali (sedikit-banyak termasuk menentukan corak warna dan bentuk pola keberagaman yang berbeda-beda penuh warna. Tak pelak, bentuk-bentuk penghayatan keIslaman masyarakat Sasakpun dapat dipilah ke dalam dua kategorisasi yaitu *Wetu Telu* dan *Waktu Lima*.<sup>21</sup>

#### **D. Sistem Kekerabatan Suku Sasak**

Sistem atau yang biasa disebut metode merupakan cara yang teratur untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kerabat adalah keluarga, sanak famili, teman sejawat (teman kerja).<sup>22</sup> Jadi dengan begitu dapat dikatakan bahwa sistem kekerabatan merupakan cara untuk mengatur

---

<sup>21</sup> *Wetu Telu* diidentifikasi dengan mereka yang dalam praktek kehidupan sehari-hari sangat kuat berpegang kepada adat-istiadat nenek moyang mereka. Dalam ajaran *Wetu Telu*, terdapat banyak nuansa Islam di dalamnya. Namun demikian, artikulasinya lebih dimaknakan dalam idiom adat. Di sini warna agama bercampur dengan adat, padahal adat sendiri tidak selalu sejalan dengan agama. Pencampuran praktek-praktek agama ke dalam adat ini menyebabkan watak *Wetu Telu* menjadi sangat sinkretik. *Waktu Lima*, adalah sebutan khas suku Sasak untuk membedakan dengan varian Islam *Wetu Telu* di pulau Lombok. Komunitas *Waktu Lima* dapat diidentifikasi berdasarkan kebiasaan, kepercayaan dan ritus keberagaman yang dipraktikkan sesuai dengan Islam normatif. Islam *Waktu Lima* adalah prototipe komunitas Islam yang ditandai oleh ketaatan dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Komitmen mereka terhadap syari'ah lebih besar dibandingkan komunitas *Wetu Telu*. Lihat, Muhammad Harfin Zuhdi, *Parokialitas Adat Terhadap Pola Keberagaman Komunitas Islam Wetu Telu di Bayan Lombok* (Jakarta: Lemlit UIN Jakarta, 2009), hlm. 2.

<sup>22</sup> Sutan Rajasa, *Kamus Ilmiah Populer*. (Surabaya: Karya Utama, 2002), hlm. 298.

atau cara dalam mengatur hubungan sesama keluarga, sanak famili, teman sejawat maupun teman kerja berdasarkan adanya aturan yang dibuat bersama secara turun temurun maupun berkala.

Untuk mengenal lebih jauh mengenai sistem kekerabatan tersebut, maka sebelumnya harus terlebih dahulu memahami lahirnya sistem kekerabatan tersebut yakni rumah tangga dan keluarga inti. Koentjaraningrat<sup>23</sup> misalnya, menjelaskan bahwa rumah tangga yang merupakan keluarga inti adalah pemegang atau inti dari sistem kekerabatan. Lebih lanjut seperti yang dikatakan Koentjaraningrat bahwa pasangan suami istri membentuk suatu kesatuan sosial yang mengurus ekonomi rumah tangganya. Rumah tangga biasanya terdiri dari satu keluarga inti, tapi mungkin juga terdiri dari dua sampai tiga keluarga inti. Sedangkan yang termasuk keluarga inti adalah suami, istri dan anak-anak mereka yang belum menikah, anak tiri dan anak yang secara resmi diangkat sebagai anak, memiliki hak yang kurang lebih sama dengan hak anak kandung, dan karena itu dapat dianggap pula sebagai anggota dari suatu keluarga inti.<sup>24</sup> Jadi secara sederhana dapat dikatakan semakin meluasnya kekerabatan maka akan semakin kompleks pula sistem kekerabatannya, dalam artian kadang-kadang budaya yang dikembangkan oleh suatu kerabat yang serumpun kadang-kadang berbeda dengan kelompoknya yang satu kerabat, bisa karena perpindahan tempat tinggal maupun adanya pengaruh lingkungan, sosial, ekonomi maupun pendidikan. Namun bagaimanapun sistem kekerabatan yang disusun dalam suatu masyarakat dapat kita lihat dari status maupun tingkatan strata sosialnya dalam kehidupan masyarakat.

Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, dan seterusnya. Dalam kajian sosiologi-antropologi, ada beberapa macam kelompok kekerabatan dari yang jumlahnya relatif kecil hingga besar seperti

---

<sup>23</sup> Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi I*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 103.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 109.



keluarga ambilineal, klan, fatri, dan paroh masyarakat. Di masyarakat umum dikenal kelompok kekerabatan lain, seperti keluarga inti, keluarga luas, keluarga bilateral, dan keluarga unilateral.

Untuk mengenal lebih jauh mengenai sistem kekerabatan, maka terlebih dahulu harus memahami lahirnya sistem kekerabatan tersebut, yakni rumah tangga dan keluarga inti. Koentjaraningrat, misalnya menjelaskan bahwa rumah tangga yang merupakan keluarga inti adalah pemegang atau inti dari sistem kekerabatan. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pasangan suami isteri membentuk suatu kesatuan sosial yang mengurus ekonomi rumah tangganya. Rumah tangga biasanya terdiri dari satu keluarga inti, tapi mungkin juga terdiri dari dua sampai tiga keluarga inti.<sup>25</sup> Sedangkan yang termasuk keluarga inti adalah suami, isteri, anak kandung yang belum menikah, anak tiri, dan anak angkat yang secara resmi diangkat sebagai anak memiliki hak yang kurang lebih sama dengan hak anak kandung, karena itu dapat dianggap pula sebagai anggota dari suatu keluarga inti.

Adanya keluarga ini seperti yang dijelaskan di atas, walaupun di masing-masing kelompok masyarakat berbeda-beda, namun merupakan satu kesatuan yang dalam antropologi dan sosiologi disebut sebagai *king group*. Ada pun satu kelompok (*king group*) adalah kesatuan yang diikat oleh sekurang-kurangnya 6 unsur, yaitu:

1. Sistem norma-norma yang mengatur tingkah laku warga kelompok.
2. Rasa kepribadian kelompok yang disadari semua warganya.
3. Interaksi yang intensif antar warga kelompok.
4. Sistem hak dan kewajiban mengatur interaksi antar warga kelompok.
5. Pemimpin yang mengatur kegiatan-kegiatan kelompok.
6. Sistem hak dan kewajiban terhadap harta produktif atau harta pusaka tertentu.

Dengan demikian hubungan kekerabatan merupakan unsur pengikat bagi suatu kelompok kekerabatan.<sup>26</sup> Dalam teori C. Van Volenhoven, Bali, Lombok, dan Sumbawa bagian Barat digolongkan sebagai

---

<sup>25</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar..*, hlm. 103-106.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

satu daerah adat.<sup>27</sup>Tesis ini relevan jika ditinjau dari aspek kekerabatan yang berlangsung di ketiga pulau tersebut. Di Pulau Lombok sistem kekerabatannya dapat ditelusuri dari keluarga kecil maupun keluarga yang lebih besar. Keluarga kecil biasa disebut sebagai *kurenan*, sementara keluarga besar disebut *sorohan*. Di dalam *sorohan* tersebut dikenal istilah *papu' balo'* untuk garis keturunan ke atas, dan *semeton jari* untuk garis ke samping, sedangkan untuk garis ke bawah di sebut *papu' bai*. Garis keturunan ini jika berasal dari garis (*pancar*) laki-laki disebut *nurut lekan mame*, sedangkan dari perempuan disebut *nurutekan nine*.

Sistem kekeluargaan suku Sasak di pulau Lombok dikenal dengan istilah *Sekurenan* atau *Kurenan* dan *Sorohan*. *Sekurenan* berarti keluarga inti mereka yang terdiri dari bapak, seorang atau lebih ibu dengan beberapa anak. Adapun *Sorohan* adalah istilah orang Sasak untuk menyebut keluarga luas mereka. Jika melihat arti ini, tampaknya pola perkawinan poligami, di mana istri tinggal dalam satu rumah sudah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan orang Sasak sejak dulu kala (bahkan hingga sekarang).<sup>28</sup>

Menurut orang Sasak, keluarga akan lahir bilamana terjadi perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik dari hubungan keluarga (misan) ataupun dari pihak yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Bila perkawinan yang sesuai dengan adat Sasak selesai dilaksanakan (berarti yang tidak sesuai adat dianggap tidak sah), ketika mereka memiliki anak, maka anak tersebut adalah anak dari bapak dan ibunya dan oleh karena itu anak tersebut mempunyai hubungan kekeluargaan baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapaknya.<sup>29</sup>

Dalam aturan adat Sasak sehubungan dengan perkawinan, apabila keluarga tersebut bubar karena perceraian misalnya, maka anak-anak keduanya jika sudah besar biasanya akan ikut bapaknya. Dan sebaliknya, jika masih menyusui akan ikut ibunya, namun jika sudah besar akan kembali ikut bapaknya. Selama dalam proses menyusui bersama ibunya, maka sang bapak wajib memberikan nafkahnya.

Adat Sasak juga mengatur, bahwa jika sang isteri meninggal sebelum keluarga tersebut bubar, maka biasanya jenazahnya dimakamkan di

---

<sup>27</sup> Ahmad Amin, et. al., *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1997), hlm. 143.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 144.

<sup>29</sup> Bartholemew, *Alif...*, hlm. 27.

kampung tempat tinggal suaminya. Pihak keluarga sang isteri biasanya tidak akan meminta jenazah tersebut untuk dimakamkan di kampung aslinya karena masih terikat dalam satu keluarga (artinya masih hak suaminya).<sup>30</sup>

Jika mencermati aturan adat di atas, maka keluarga bagi orang Sasak merupakan salah satu bagian penting yang perlu untuk ditata. Penataan ini didasarkan pada pemikiran bahwa agar silsilah kekerabatan mereka menjadi jelas, karena ketidakjelasan silsilah bagi orang Sasak akan berdampak negatif terhadap pembagian warisan, aturan siapa-siapa yang boleh dan tidak boleh untuk dinikahi, interaksi kehidupan di masyarakat, bahkan konflik keluarga.

Jika keluarga Sasak sudah terbentuk, kebudayaan Sasak memiliki panggilan-panggilan tertentu yang unik terhadap anggota-anggota kekerabatan yang ada. Misalnya, *Amak* untuk panggilan bapak, sedangkan jika keturunan bangsawan, maka dipanggil *Mamiq*, *Inak* untuk panggilan ibu, *Semeton* untuk saudara laki-laki dan perempuan, *Papu Balo'* untuk kakek nenek mereka, dan sebagainya.

## Konsep Kekerabatan Sasak

Konsep kekerabatan suku Sasak terlihat cukup sederhana. Suku ini hanya memisahkan sistem kekerabatan mereka menjadi dua kelompok, yaitu keluarga batih (keluarga inti) dan keluarga luas.

### a. *Kurenan* atau keluarga batih (inti)

Konsep keluarga batih dalam suku Sasak adalah terdiri dari bapak, seorang atau lebih ibu, dan beberapa anak. Keluarga model ini sering disebut dengan istilah *sekurenan*. Namun, sebenarnya istilah *sekurenan* bukan merujuk pada unsur-unsur keluarga tersebut, akan tetapi merujuk pada konsep kehidupan dan perekonomian. Artinya, meskipun dalam keluarga tersebut terdiri dari bapak, seorang atau lebih ibu, dan beberapa anak, namun jika di dalamnya ikut juga orang lain bermukim dan makan, misalnya nenek, paman, bibi, atau pembantu, maka mereka juga dianggap bagian dari keluarga yang harus dihidupi secara ekonomi.<sup>31</sup>

---

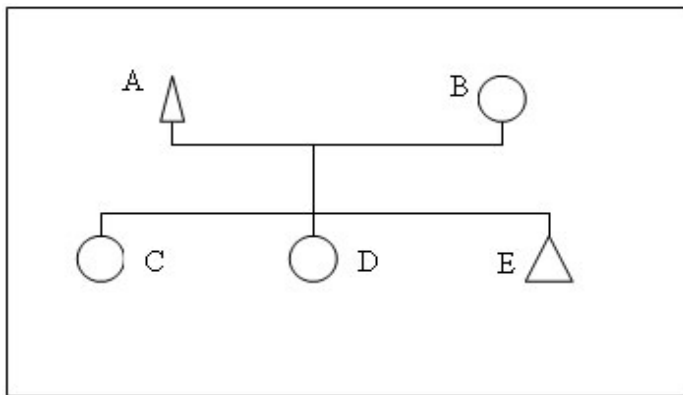
<sup>30</sup> Amin, *Adat...*, hlm. 145.

<sup>31</sup> Amin, *Adat...*, hlm. 145.

Jika *sekurenan* sudah terbentuk, maka dalam interaksi kehidupan nyata, keluarga Sasak memiliki panggilan-panggilan tertentu terhadap anggota-anggota sekurenan tersebut, yaitu:

- Bapak akan dipanggil oleh anak-anaknya dengan panggilan *Amaq*,<sup>32</sup> sedangkan oleh isterinya dipanggil *Pun*
- Ibunya akan dipanggil oleh anak-anaknya dengan panggilan *Inaq* dan oleh suaminya akan dipanggil *Pun Nina*
- Anak yang paling besar (*perangga*) dipanggil *Tekakaq*
- Anak yang paling kecil dipanggil *Teradiq*

Konsep sekurenan dalam suku Sasak dapat dijabarkan dari tabel sebagai berikut:



Skema *sekurenan* Sasak

Keterangan:

- A = suami
- B = Isteri
- C = Anak Pertama
- D = Anak kedua
- E = Orang lain yang ikut dalam keluarga tersebut

---

<sup>32</sup> Namun bagi orangtua yang berasal dari golongan bangsawan, maka bapak oleh anak-anaknya akan dipanggil Mamiq. Stratifikasi sosial bangsawan Lombok terbagi menjadi tiga yaitu *Raden* untuk bangsawan yang tinggal di Bayan, *Lalu* untuk bangsawan Lombok secara umum, dan *Tuan Guru* untuk bangsawan Lombok dalam bidang keagamaan. Sedangkan *Mamik* adalah sebutan pengganti untuk bangsawan Sasak, baik yang bergelar *Lalu* atau *Raden*. *Raden* adalah sebutan untuk bangsawan Bayan laki-laki dan *Dende* untuk bangsawan perempuan

## b. Sorohan atau keluarga luas

*Sorohan* adalah istilah suku Sasak untuk menyebut keluarga luas mereka. Secara umum, istilah sorohan merujuk pada silsilah suami isteri yang mengarah pada kakek nenek mereka masing-masing dan saudara-saudara yang berasal dari kakek nenek tersebut.

Dalam sorohan dikenal sebutan-sebutan tertentu, seperti.

1. *Papuy baloq*, yaitu sebutan untuk kerabat suami isteri garis ke atas (kakek nenek hingga yang paling tua)
2. *Semeton jari*, yaitu sebutan untuk kerabat suami isteri garis ke samping
3. *Papuy bai*, yaitu sebutan untuk kerabat suami isteri garis ke bawah
4. Saudara perempuan bapak dan ibu disebut dengan *Inaq Kaka* (dibaca *Inak kake*)
5. Saudara laki-laki bapak dan ibu disebut dengan *Amaq Kaka* (dibaca *Amak kake*)

Sehubungan dengan *Papuy Baluq* (kerabat garis ke atas), orang Sasak juga memiliki sebutan-sebutan tersendiri, yaitu:

1. *Amaq* adalah sebutan untuk bapak
2. *Papuy* adalah sebutan untuk orang tua dari bapak
3. *Baloq* adalah sebutan untuk orang tua dari *Papuy*
4. *Tata* adalah sebutan untuk orang tua dari *Baloq*
5. *Toker* adalah sebutan untuk orang tua *Tata*
6. *Goneng* adalah sebutan untuk orang tua *Toker*
7. *Keloyok* adalah sebutan untuk orang tua *Goneng*
8. *Kelatek* adalah sebutan untuk orang tua *Keloyok*
9. *Gantung* siwur adalah sebutan untuk orang tua *Kelatek*
10. *Wareng* adalah sebutan untuk orang tua *Gantung Siwur*.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Lalu Gde Suparman, seorang budayawan dan tokoh adat Sasak-Lombok, pada tanggal 16 Maret 2004; Yusuf Efendi, Budaya Melayu: "Sekurenan dan Sorohan: Keluarga dan Kekerabatan Suku Sasak, Nusa Tenggara Barat", diakses tanggal 12 Agustus 2012

Selanjutnya, sehubungan dengan *Semeton jari* (kerabat ke samping), orang Sasak juga memiliki sebutan berbeda, yaitu:

*Semeton* adalah sebutan untuk adik atau kakak seseorang

1. *Pisa'* atau *Menasa sekali* adalah sebutan untuk anak dari saudara seseorang
2. *Sempu sekali* atau *Menasa dua* adalah sebutan untuk anak dari *misan* orang tua seseorang
3. *Sempu dua* atau *Menasa telu* adalah sebutan untuk *Sempu* dari orang tua seseorang

Adapun sehubungan dengan *Papuaq Bai* (kerabat garis ke bawah), suku Sasak memiliki sebutan-sebutan sebagai berikut:

1. *Naken* atau *Ruwan* adalah sebutan untuk anak saudara laki-laki atau perempuan, atau anak laki-laki maupun perempuan dari *Sempu* atau *Menasa sekali* atau dua kali seseorang
2. *Mentoaq* adalah sebutan untuk orangtua laki-laki atau perempuan dari isteri seseorang (mertua)
3. *Menantu* adalah sebutan untuk isteri atau suami dari anak seseorang, baik laki-laki maupun perempuan.
4. *Sumbah* adalah sebutan untuk orang tua *Menantu* seseorang.
5. *Kadang waris* adalah sebutan untuk ahli waris seseorang yang berasal dari satu leluhur laki-laki.

Perlu untuk disebutkan di sini, bahwa istilah untuk pencarian kerabat dari suami (pihak laki-laki), biasa disebut dengan istilah *nurut lekan mama*. Adapun dari isteri (pihak perempuan) disebut dengan *nurut lekan nina*. Dikarenakan kebudayaan Sasak menganut sistem patriakhi (laki-laki menjadi sumber utama), biasanya pencarian kerabat didominasi dari pihak laki-laki (*nurut lekan mama*). Hal ini dibuktikan dari hukum adat waris, di mana laki-laki memiliki bagian yang lebih banyak.<sup>34</sup>

Konsep keluarga luas ini masih dijaga dengan baik oleh orang Sasak hingga sekarang. Hal ini dapat dilihat dalam proses upacara adat perkawinan *sorong serah* (memberi dan menerima). *Sorong serah* adalah

---

<sup>34</sup> Amin, *Adat ...*, hlm. 145 -146; dan Wawancara dengan Lalu Gde Suparman, budayawan dan tokoh adat Sasak-Lombok, tanggal 16 Maret 2004.

proses tawar menawar mahar (maskawin) suku Sasak. Dalam proses tersebut, uang bayar adat yang diterima pengantin perempuan akan dibagi-bagikan kepada seluruh keluarga yang hadir maupun tidak dalam upacara tersebut. Pembagian dimaksudkan sebagai pemberitahuan bahwa mereka telah menikah dan permohonan doa restu atas pernikahan tersebut.

Pola kekerabatan suku Sasak yang lebih menekankan kepada garis patrilineal, yakni ikatan silsilah antar individu dari garis laki-laki, seperti anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, ayah dari ayah, dalam pandangan Ali Syahbana, akan menempatkan kaum laki-laki pada kedudukan yang menentukan dalam hampir semua aspek kehidupan, seperti dalam hal kepemimpinan dan kekuasaan, kepemilikan tanah, pewarisan kekayaan, dan menjadi wali utama pengantin perempuan maupun laki-laki dalam perkawinan.<sup>35</sup>

## E. Stratifikasi Sosial Suku Sasak

Stratifikasi sosial adalah penggolongan untuk pembedaan orang-orang dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hirarkhis menurut dimensi kekuasaan, *previlese* dan *prestise*. Penggolongan untuk pembedaan artinya, setiap individu menggolongkan dirinya sebagai orang yang termasuk dalam suatu lapisan tertentu (menganggap dirinya lebih tinggi atau lebih rendah daripada orang lain) untuk digolongkan ke dalam lapisan tertentu.

Munculnya stratifikasi sosial disebabkan karena adanya perbedaan tinggi rendah kedudukan seseorang dalam masyarakat, sehingga menyebabkan adanya kedudukan yang dinilai lebih tinggi dari kedudukan yang lainnya.<sup>36</sup> Sistem ini merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidupnya teratur. Begitu juga dengan masyarakat suku Sasak di Lombok, pelapisan masyarakat di daerah ini didasarkan pada kebijaksanaan, keberanian, kebesaran darma dan asal-usul keturunan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Sutan Takdir Alisyahbana, *Indonesia: Social and Cultural Revolution* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1966), hlm. 5-6.

<sup>36</sup> Wayan Geriya, *Beberapa Segi Tentang Masyarakat dan Sistem Sosial* (Denpasar: Jurusan Anthropologi, Fakultas Sastra, Universitas Udayana, 1981), hlm. 36.

<sup>37</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Upacara Tradisional Daerah Nusa Tenggara Barat, Upacara Kematian* (Mataram: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), hlm. 3.

Stratifikasi sosial merupakan berbagai macam susunan hubungan antar individu yang menyebabkan adanya berbagai sistem dalam masyarakat. Konsep stratifikasi sosial suku Sasak pada umumnya banyak ditentukan oleh susunan keluarga yang berawal dari perkawinan yang disebut *nurut mama*<sup>38</sup>(baca: *mame*). Artinya, garis keturunan darah ditekankan pada laki-laki (garis bapak). Garis keturunan ini memberi pengaruh pada pembentukan lapisan sosial dan pola kekerabatan dalam sistem kemasyarakatan etnis suku Sasak. Perkawinan seorang bangsawan misalnya, dengan laki-laki dari lapisan status sosial rendah, maka anak yang dilahirkan tidak berhak menggunakan identitas kebangsawanan ibunya. Demikian pula sebaliknya, anak yang dilahirkan akan diberi hak untuk menggunakan atribut kebangsawanannya apabila ia dilahirkan oleh seorang laki-laki dari kalangan bangsawan, walaupun ibunya dari lapisan sosial *jajar karang* (rakyat biasa). Struktur sosial dengan konsep *nurut mama* ini, kemudian membentuk sistem kewarisan yang menitikberatkan kepada pola kekerabatan patrilineal.

Stratifikasi sosial dalam etnis Sasak dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelapisan pertama, *perwangsaraden* adalah keturunan yang berasal dari keturunan raja dan pemimpin atau penguasa yang merupakan golongan paling berpengaruh, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun kepemimpinan. *Raden* sebutan untuk laki-laki dan *denda* untuk perempuan. Walaupun di beberapa desa di Lombok, kelas *raden* populasi sudah banyak berkurang, tetapi masih dikenal dan berpengaruh kuat secara sosial di kalangan suku Sasak.
2. Pelapisan kedua, *triwangsa lalu* merupakan golongan yang berasal dari pimpinan rakyat tingkat rendah. Mereka ini mendapat gelar bangsawan karena keberanian dan keperkasaannya serta mempunyai hubungan dekat dengan *datu* (raja). Lalu sebutan untuk laki-laki dan *baiq* untuk perempuan. Kelas ini juga dikenal dengan sebutan *permenak* atau *perlalu*.<sup>39</sup> Dibandingkan dengan *raden*, kelas *lalu* dan *baiq* ini menyebar hampir di semua desa di Pulau Lombok, khususnya di Lombok Tengah dan sebagian lainnya di Lombok Timur.

---

<sup>38</sup> Idrus Abdullah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal di Kabupaten Lombok Barat*, Disertasi (Jakarta: Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana UI, 2000), hlm. 105.

<sup>39</sup> Berbeda dengan orang Sasak lainnya, orang Sasak di Desa Bayan tidak menggunakan gelar *Lalu* untuk laki-laki, dan *Baiq* untuk perempuan, sebagai gelar kehormatan. Wawancara dengan Raden Sageti, Kepala Desa Bayan Beleq.



3. Pelapisan ketiga adalah kelas *jajar karang* dan umumnya dikenal dengan panggilan *amaq* atau *loq* untuk laki-laki dan *le* untuk perempuan. Kelas *jajar karang* adalah kelompok mayoritas suku Sasak di Lombok.

*Perwangsa raden* adalah hasil perkawinan antara seorang laki-laki *raden* dengan perempuan *denda* di mana anak yang dilahirkan dari strata ini akan menerima gelar *raden* dari orang tuanya secara turun temurun. Sementara itu, kelas *lalu*, gelar kebangsawanan diturunkan dari hasil perkawinan antara seorang *perlalu* dengan perempuan bergelar *baiq*, atau *perlalu* dengan perempuan *jajar karang*.

Untuk mengidentifikasi berbagai stratifikasi sosial di Lombok, memang tidak mudah karena masing-masing kelas tidak memiliki perbedaan spesifik di mana kelas bangsawan dan kelas non bangsawan (baca: *jajar karang*) dalam kesehariannya melakukan interaksi menurut etika dan norma-norma yang berlaku. Namun demikian, dengan sistem stratifikasi sosial akibat pola kekerabatan itu telah membentuk jarak antara lapisan bangsawan dengan non bangsawan yang melahirkan pola kekerabatan atau hubungan darah yang khas Sasak. Keluarga-keluarga bangsawan mempunyai hubungan dengan lapisan lainnya, umumnya karena perkawinan antara anggota lapisan masyarakat tersebut.

## F. Status dan Kedudukan Perempuan Sasak

Berdasarkan pelapisan sosial yang berlaku di komunitas suku Sasak, maka status perempuan *perwangsa dende* dan *baiq* memiliki kedudukan yang tinggi dan mahal harganya oleh karena gelar kebangsawanan yang disandangnya. Status kebangsawanan perempuan Sasak, khususnya di Bayan Timur, menghalangi orang luar atau orang biasa untuk mengawini mereka karena biaya *ajikrama* yang harus dibayar jumlahnya sangat mahal. Apabila mempelai laki-laki berasal dari status sosial yang lebih rendah dari mempelai perempuannya, maka permintaan mereka akan harga *ajikrama* mempelai perempuan bukan alang kepalang besarnya dan di luar kesanggupan orang untuk membayarnya. Maka, tidaklah mengherankan kemudian jika tuntutan ini menjadi bumerang bagi kaum bangsawan itu sendiri. Siapa yang berani mengawini putri mereka kalau mempelai laki-laki diharuskan memberi sebelas ekor sapi? Para bangsawan yang tinggal di Bayan Barat dan Karangsalah pun tidak punya nyali untuk mengajak kawin lari para perempuan

bangsawan yang berdiam di *Kampu Bayan Timur* karena tuntutan yang tidak masuk akal itu. Permintaan harga *ajikrama* mempelai perempuan itu telah mengganjal langkah orang-orang kebanyakan untuk kawin lari dengan putri-putri mereka. Berdasarkan aturan adat perkawinan di Bayan ini, secara langsung memberi implikasi dan tekanan yang lebih berat kepada para perempuan bangsawan daripada kaum laki-lakinya. Hal ini mengakibatkan sejumlah perempuan tidak kawin. Para perempuan ini kemudian mendapat julukan perawan tua (*dedare toaq*) dan mereka biasanya tinggal bersama orang tua atau saudara laki-laki mereka sebagai bagian dari anggota keluarga besar.

Dalam konteks perkawinan, pada umumnya suku Sasak selalu memperhatikan aspek kesamaan dalam status sosial antara kedua mempelai yang biasa dikenal dengan istilah *sekufu' lan nyerompang*.<sup>40</sup> Secara etimologis, *sekufu'* artinya sebanding, seimbang dan sederajat. Dalam adat perkawinan suku Sasak Lombok, *sekufu'* maksudnya antara mempelai laki-laki dan perempuan harus sebanding, seimbang dan sederajat dalam beberapa hal, yaitu;

1. Agama, artinya harus sama-sama beragama Islam antara mempelai laki-laki dan Perempuan;
2. Tingkat kesalehan dalam menjalankan syari'at agama, artinya tidak *sekufu'* seseorang yang sholeh atau sholehah jika dinikahi oleh seseorang yang tidak sholeh atau sholehah, dan buruk akhlaqnya seperti pemabuk, penjudi, pencuri dan lain-lain, walaupun masih keluarga dan sama-sama wangsan/strata sosialnya.
3. Tingkat kewangsaan atau strata sosial, artinya tidak *sekufu'*, untuk kawin antar starata sosial, melainkan harus sesama strata sosialnya baru disebut *sekufu'*. Bagi yang melakukan pelanggaran dalam hal *kufu'* kewangsaan akan dikenakan denda/sanksi. Tetapi yang dikenakan denda adalah pihak laki-laki yang mengawini perempuan yang lebih tinggi lapisan sosialnya (denda ini disebut "denda penurun wangse"), sedangkan bagi laki-laki yang lebih tinggi lapisan sosialnya mengawini perempuan yang lebih rendah strata sosialnya tidak dikenakan denda apa-apa.
4. Tingkat persanakan, artinya tidak *sekufu'* antara paman dengan

---

<sup>40</sup> Jumarim, *Perkawinan...*, hlm. 28.

keponakan, atau bibi dengan keponakan. Sekalipun Islam membolehkan perkawinan antara Bibi atau paman dengan anak dari misannya bibi atau paman, tetapi dalam adat perkawinan Suku Sasak Lombok itu tetap dikatakan tidak *sekufu'* dan terhadap yang melakukan hal yang demikian itu akan dikenakan denda, yaitu denda "pelebur base" denda perusak bahasa/sebutan, yang biasanya berujud uang. Adapun yang melanggar *sekufu'* persanakan sekaligus melanggar ketentuan agama, seperti kawin dengan anak kandung, atau antara bibi/paman dengan keponakan (anak saudara sekandung), maka dikenakan sanksi adat berupa "hukum pati", dan sekurang-kurangnya dibuang ke hutan belantara, diasingkan jauh dari masyarakat.

Masyarakat Suku Sasak Lombok tidak menjadikan harta atau kekayaan sebagai standar *kekufu'an*, bagi mereka harta tidak terlalu diperdulikan karena masih bisa dicari bersama-sama, mereka malu menyebut-nyebut harta kekayaannya. Sifat seperti ini tercermin dalam ungkapan pepatah "*bani mate* takut susut" artinya lebih baik mati kelaparan dari pada pergi meminta-minta.

Sedangkan kata "nyerompang" artinya keluar melalui jalan yang tidak semestinya, seperti lompat pagar. Adapun yang dimaksud *nyerompang* dalam adat *merariq* adalah melanggar aturan-aturan (*awig-awig*) yang sudah ada. Ada dua macam *merariq* yang dianggap "nyerompang" di masyarakat suku Sasak, yaitu;

1. Perkawinan antara perempuan yang lebih tinggi stratanya dengan laki-laki yang stratanya lebih rendah.
2. Perkawinan antara perempuan muslim dengan laki-laki non muslim

Terhadap masalah kedua, apabila calon mempelai laki-laki tidak bersedia masuk agama Islam, maka cara penyelesaiannya menurut adat dari dulu hingga sekarang, tidak pernah berubah, yaitu *beteteh* (pembuangan) artinya pihak keluarga perempuan harus memutuskan hubungan keturunan dan silaturrahi dengan anaknya, karena dia telah *murtaddah* (keluar dari agama Islam). Adapun terhadap *nyerompang* pada kasus pertama, ada sedikit perubahan adat dalam menyelesaikannya. Adat pertama (dulu) cara menyelesaikannya sama dengan cara penyelesaian *nyerompang* macam kedua di atas, yaitu

*beteteh* (putus hubungan silaturrahim), tidak dikasih wali dan bahkan ketika dikemudian hari mengalami nasib buruk, seperti dicerai, maka pihak keluarganya tetap tidak bisa menerimanya.

Menurut adat sekarang, walaupun perbuatan seperti (nyerompang) tetap dianggap sebagai sebuah pelanggaran, tetapi ada cara penyelesaiannya yang lebih ringan, yaitu pihak orang tuanya bersedia menjadi wali, tetapi tidak bersedia untuk menerimanya kembali (putus silaturrahim). Dan kalau ada sanak-keluarganya yang bersedia menerima, maka dialah yang berhak memilikinya termasuk untuk pestanya, penyambutan sorong-serah”nya bahkan sebagai tempat kembalinya apabila dikemudian hari dia diceraikan suaminya.

Di samping itu, seiring dengan perkembangan dan dinamika zaman saat ini, maka aturan dan norma-norma adat juga mengalami perubahan (penyesuaian), seperti kasus perkawinan berbeda suku kerap terjadi di tengah masyarakat Lombok. Tidak sedikit masyarakat suku Sasak saat akan melangsungkan perkawinan dengan orang di luar sukunya, harus menggunakan prosesi upacara pengampuan (menerimaan), yakni, penerimaan alih status adat luar Sasak ke adat Sasak. Dalam acara upacara pengampuan ini juga bertujuan menghilangkan anggapan “*beteteh*” (dibuang), bagi perempuan bangsawan Sasak yang kawin dengan seorang laki-laki luar yang tidak bangsawan. Seperti dalam proses pengampuan yang dilakukan Yudha Andri Bastian, bin Basuki Hermanto dari Surabaya yang hendak menikahi Baiq Diah Devi Hadiana, putri H. L. Ijtihad Akbar dari Kuripan Lobar.<sup>41</sup>

Sebelum melangsungkan akad nikah, mempelai laki-laki terlebih dahulu harus diterima ampunan jadi warga Sasak. Pasalnya, sebelum mempelai laki-laki melakukan upacara pengampuan, dia belum syah dikatakan warga Sasak serta tidak boleh melangsungkan perkawinannya dengan menggunakan adat sasak sampai keturunannya.

Calon wali adat atau pengampu yang dipimpin Drs. H. Lalu Mujitahid, bersama anggota majelis adat Sasak, Lalu Puguh Wira Bhakti, mengambil posisi duduk bersama para tokoh adat Sasak yang lain untuk menunggu mempelai laki-laki datang ke upacara tersebut. Selang beberapa menit dengan pengawal yang menggunakan baju adat Sasak, ibarat raja, mempelai laki-laki mengambil posisi duduk dan

---

<sup>41</sup> Suara NTB, “Prosesi Upacara Pengampuan Adat Sasak”.

berhadapan dengan wali dan mejelis adat Sasak. Setelah itu, dilanjutkan dengan ikrar ijab kabul pengampuan mempelai laki-laki dengan wali adat, dengan ikarr: 'Saya Yuda Andri Bastian, bin Basuki Hermanto, supaya diampu menjadi orang Sasak,' kemudian wali adat menjawab dan menerima sang mempelai jadi keluarga Sasak.

Selanjutnya, untuk keabsahan menjadi warga Sasak dan meyakinkan semua pihak, maka mempelai laki-laki *disembek*<sup>42</sup> dan dilakuka penyematan keris sebagai simbul penerimaan hak dan tanggungjawab sebagai suku Sasak. Setelah itu sebagai wujud formalnya, salah seorang anggota majelis adat sasak, yaitu Lalu Puguh Wirabakti, mengesahkan dengan resmi bahwa mempelai laki-laki resmi masuk menjadi suku Sasak.

Budayawan Sasak, Jalaluddin Arzaki,<sup>43</sup> menjelaskan bahwa prosesi adat ini dilakukan supaya tidak ada anggapan *beteteh* untuk perempuan bangsawan yang kawin dengan yang tidak bangsawan. Pasalnya, masih terdapat fenomena di tengah masyarakat bangsawan yang fanatik yang membuang (*meneteh*)putrinya jika tidak kawin dengan sesama bangsawannya. Akhirnya, melalui kesepakatan majelis adat dan dikaitkan dengan ajaran Agama Islam supaya tidak ada istilah *beteteh*, maka upacara pengampuan digelar. Karena perkawinan itu ibadah, tapi harus dilakukan dengan aturan adat yang diciptakan manusia berdasarkan ajaran agama. Jika mempelai laki-laki tidak menggunakan upacara adat pengampuan, jelas Jalal, secara agama syah perkawinannya. Namun, secara adat mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan adat Sasak. Oleh karenanya, setelah prosesi adat pengampuan ini dilakukan, maka baru proses akad nikah dapat dilakukan.

## G. Relasi Islam, Adat dan Hukum

Ada ungkapan yang mengatakan "*Ubi societas ibis lus*" yang artinya di mana ada masyarakat di sana ada hukum, dengan kata lain, hukum itu tercipta karena adanya suatu masyarakat yang memiliki kepentingan yang berbeda satu sama lain, sehingga perlu adanya suatu aturan agar hak-hak dan kepentingan didalam kehidupan bermasyarakat dapat terjamin. Akan tetapi dengan cakupan hukum yang begitu luas

---

<sup>42</sup> *Disembek*, artinya diberikan do'a dan jampi-jampi kemudian ditiupkan ke bahan-bahan yang terdiri dari kapur dan daun leko' yang sudah dialuskan, kemudian dioleskan di keningnya.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Lalu Jalaluddin Arzaki, budayawan Sasak.

dan menyentuh semua warga masyarakat, sehingga menimbulkan perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan, dengan kata lain setiap negara-negara bahkan setiap daerah mempunyai sistem hukum yang berbeda.

Dalam setiap negara memiliki sistem hukum dan bentuk hukum yang berbeda satu sama lain, hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor keadaan yang ada di setiap negara tersebut. Didalam masyarakat dunia, tidak dipungkiri bahwa kiblat dalam menjalankan kehidupan hukum berkiblat sistem hukum yang berada di wilayah Barat, atau yang sering kita sebut dengan hukum Barat. Hukum Barat ini banyak diadopsi oleh banyak negara tak terkecuali Indonesia yang memang banyak menyerap sistem hukum Barat.

Demikian pula tidak sedikit pula negara-negara yang berkiblat pada hukum Islam dan menjadikan acuan sebagai tatanan hukum di negaranya. Indonesia sendiri selain mengadopsi hukum Barat juga mengadopsi hukum-hukum Islam, hal ini tidak dipungkiri dengan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sehingga hukum Islam ini sangat perlu untuk diadopsi. Selain hukum Barat dan hukum Islam, Indonesia sendiri dalam pembuatan hukumnya tidak sedikit pula mengacu pada hukum-hukum adat yang berlaku di masyarakat, akan tetapi hukum-hukum adat yang sangat beranekaragam dan berbeda disetiap daerah menyebabkan tidak semua hukum adat dijadikan hukum tertulis, hal ini disebabkan perbedaan kultur dan budaya yang beraneka ragam disetiap daerah masing-masing.

Hukum Islam, hukum adat dan hukum Barat tentu memiliki cirinya masing-masing dan memiliki sistem hukum yang saling berbeda satu sama lain. Namun demikian, tujuan sama yakni mewujudkan tatanan kehidupan yang tertib dan harmonis.

Tak mudah untuk meletakkan relasi antara agama, adat dan hukum nasional. Agama dalam tradisi Semitik kerap didefinisikan sebagai sesuatu yang sakral karena turun dari langit. Agama dipahami sebagai sekumpulan gagasan dan ajaran yang telah baku dalam kitab suci. Umat Islam berpendirian bahwa ajaran-ajaran al-Qur'an yang kemudian dielaborasi dalam hadits mesti menjadi pedoman hidup mereka. Begitu juga pandangan umat Kristen terhadap Bibel atau Injil, dan orang-orang Yahudi terhadap Torah atau Taurat. Dalam derajat tertentu, ayat-ayat

dalam kitab suci itu dianggap ayat hukum yang mengikat mereka. Dengan demikian, segala hal profan yang dirumuskan oleh manusia mesti tunduk pada ketentuan kitab suci.

Namun demikian, banyak yang lupa bahwa agama pun turun dalam konteks kebudayaan tertentu. Sejumlah nomenklatur dan peristilahan dalam agama-agama kerap dipinjam dari kebudayaan. Bahkan, rumusan dan cara pandang seseorang terhadap Tuhan tak sepenuhnya dibentuk oleh ajaran kitab suci, melainkan juga merupakan cerminan dari kebudayaan sekitar. Dalam konteks keIslaman-keIndonesiaan, kata “pesantren”, “kyai”, santri, dan “surau” yang dianggap mengandung aura kesucian muncul dari lanskap nusantara sendiri dan bukan diambilkan dari istilah-istilah Arab, lokus tempat Islam pertama kali muncul. Tidak sedikit pula, melalui proses perjumpaan lama antara Islam dan kebudayaan nusantara, kata-kata yang beraroma Islam seperti “majelis”, “dewan”, “permusyawaratan”, dan lain-lain diterima oleh masyarakat plural Indonesia. Oleh karena itu, sebagaimana telah berkembang cukup lama di negeri ini, agama, adat dan hukum mestinya saling berdialektika, dan mengisi formasi masing sesuai yurisdiksinya, sehingga tercipta tatanan kehidupan yang harmonis dalam kerangka simbiosis mutualisma antara ketiga komponen tersebut.

## **H. Wawasan Konseptual Agama, Adat dan Hukum**

Islam sebagai agama, kebudayaan, hukum dan peradaban besar dunia sudah sejak awal masuk ke Indonesia pada abad ke- 7 dan terus berkembang hingga kini. Ia telah memberi sumbangsih terhadap keanekaragaman kebudayaan nusantara. Islam tidak saja hadir dalam tradisi agung (*great tradition*) bahkan memperkaya pluralitas dengan Islamisasi kebudayaandan pribumisasi Islam yang pada gilirannya banyak melahirkan tradisi-tradisi kecil (*little tradition*) Islam. Berbagai warna Islam —dari Aceh, Melayu, Jawa, Sunda, Sasak, Bugis, dan lainnya— riuh rendah memberi corak tertentu keragaman, yang akibatnya dapat berwajah ambigu. Ambiguitas atau juga disebut ambivalensi adalah fungsi agama yang sudah diterima secara umum dari sudut pandang sosiologis.

Ada tiga istilah yang menunjukkan pengertian agama, yaitu agama itu sendiri, *religi*, dan istilah *din*.<sup>44</sup> Secara etimologis, pengertian agama yang berasal dari bahasa Sansekerta terdiri dari *a*= tidak, dan *gam*= pergi, berarti tidak pergi, tetap, statis, sudah ada sejak lama, menjadi tradisi, diwarisi secara turun temurun. *Agama* dari kata *gam* berarti kitab suci, tuntunan, atau pedoman. Maka agama adalah ajaran yang berdasarkan kitab suci, suatu yang dijadikan pedomana atau pegangan hidup manusia.<sup>45</sup> Adapula pengertian lain, *agama*, dari kata *a*= tidak, *gama*= kacau, jadi agama adalah suatu sistem kehidupan yang tertib, damai, dan tidak kacau.<sup>46</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa agama adalah suatu ajaran yang sudah ada sejak dahulu, diwarisi secara turun temurun yang berfungsi sebagai pegangan dan pedomana hidup yang bersumber dari kitab suci agar kehidupan manusia menjadi damai, tertib dan tidak kacau.

Secara terminologis, pengertian agama adalah *equivalent* [sama] dengan pengertian *religi* dalam bahasa-bahasa Eropa, dan istilah *din* dalam bahasa Arab. Istilah *religi* berasal dari kata *religie* dalam bahasa Belanda, atau *religion* dalam bahasa Eropa lainnya, seperti Inggris, Prancis, dan Jerman, yang bersumber dari bahasa Latin: *Lerigare* (*re* berarti kembali, *lerigare* artinya terikat/ikatan).

Dengan demikian, istilah *religi* dapat diartikan bahwa agama adalah sebuah sistem kehidupan yang terikat oleh norma-norma atau peraturan-peraturan, sedangkan norma atau peraturan yang tertinggi adalah norma atau peraturan yang berasal dari Tuhan. *Religion* juga dapat berarti sebagai *earnest observance of ritual obligation and an inward spirit reference*.<sup>47</sup>

Agama dalam pengertian Glock & Stark, sebagaimana dikutip Djamaludin Ancok,<sup>48</sup> adalah sistem simbol dan keyakinan, sistem nilai

---

<sup>44</sup> Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1989), hlm. 104-105.

<sup>45</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*, (Jakarta: UI Press, 1979), hlm. 9-11.

<sup>46</sup> Endang Saifuddin Anshari, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam*, (Jakarta: Usaha Enterprises, 1976), hlm. 109.

<sup>47</sup> The American Heritage Concise Dictionary, *Microsoft Encarta 97 Encyclopedia*, (Houghton Mifflin Company, 1994), Third ed. Copyright

<sup>48</sup> Djamaluddin Ancok, *psikologi Islami: Solusi Islam Atas Problema-problem Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 77.



dan perilaku yang terlembagakan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi.

Sedangkan Robert H. Thouless mendefinisikan *Relegion* adalah sikap dan penyesuaian diri terhadap dunia yang mencakup acuan yang menunjukkan lingkungan yang lebih luas daripada lingkungan dunia fisik yang terikat ruang dan waktu.<sup>49</sup>

William James berpendapat bahwa agama sebagai perasaan, tindakan, dan pengalaman-pengalaman manusia masing-masing dalam 'keheningannya'.<sup>50</sup> Kesadaran keagamaan berdasarkan pengalaman subyektif, ada tiga ciri yang mewarnai agama, yaitu *pertama*, pribadi, agama sebagai hal yang amat pribadi sesuai dengan kenyataan sepenuhnya; *kedua*, emosionalitas, sebagai hakikat agama yang baik dalam bentuk emosi maupun dalam perilaku yang didasarkan atas perasaan keagamaan; dan *ketiga*, keanekaragaman dalam pengalaman keagamaan.<sup>51</sup>

Selanjutnya lebih jauh, Anthony Giddens menjelaskan bahwa agama terdiri dari seperangkat simbol, yang membangkitkan perasaan takzim dan khidmat, serta terkait dengan pelbagai praktek ritual maupun upacara yang dilaksanakan oleh komunitas pemeluknya.<sup>52</sup> Sebagai sebuah sistem makna, maka agama memberikan penjelasan dan interpretasi tertentu atas berbagai persoalan, dan mejadikan berberapa persoalan lainnya tetap sebagai misteri. Agama memberikan jawaban atas pertanyaan tentang asal-usul alam semesta dan manusia dalam kehidupan, kematian dan hidup sesudah mati dalam konsep-konsep yang bernuansa keghaiban. Oleh karena itu Geertz<sup>53</sup> berpendapat bahwa keyakinan keagamaan menetapkan tatanan tertib sosial dan memberikan makna bagi dunia dengan referensi pada wilayah transendental. Ini berarti penjelasan dan makna yang melekat dalam agama melampaui keterbatasan pikiran dan logika manusia. Giddens menambahkan bahwa selalu ada 'obyek' tertentu yang makhluk supra natural yang eksistensinya terletak diluar jangkauan indera manusia yang mendatangkan perasaan takjub. Obyek supranatural itu dapat berupa

---

<sup>49</sup> Robert H. Thouless, *Pengantar Psikologi Agama*, (Jakarta: CV. Atisa, 1988), hlm. 10.

<sup>50</sup> Robert W. Crapps, *Dialog Psikologi dan Agama Sejak William James Hingga Gordon W. Allport*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 17.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 148-152

<sup>52</sup> Anthony Giddens, *Sociology*, (Cambridge: Polity Press, 1989), hlm. 452.

<sup>53</sup> Clifford Geertz, *the Interpretation of Cultures*, (New York: Basic Books, 1973).

”suatu kekuatan ilahiyah atau personalisasi para dewa”.<sup>54</sup> Dalam Islam, kekuatan ilahiyah itu adalah Allah SWT. Sedangkan dalam Hinduisme makhluk supranatural yang dipuja satu namun manifestasinya banyak, seperti dewa, arwah para leluhur, dan kekuatan supranatural lainnya.

Disamping itu agama juga menetapkan ”petunjuk-petunjuk moral” yang mengontrol dan membatasi tindak tanduk para pemeluknya.<sup>55</sup> Agama memberlakukan berbagai pranata dan norma serta menuntut agar para penganutnya bertingkah laku menurut pranata dan norma yang telah digariskan tersebut. Tujuannya adalah mengarahkan dan menuntun para pengikutnya pada jalan yang benar, jalan yang membimbing mereka menuju keselamatan.

Sementara istilah *din* berasal dari bahasa Arab, yang antara lain dapat diartikan sebagai: kebiasaan atau tingkah laku, seperti dalam surat (Q.S. 6: 156, 25: 12, 109: 6); jalan, peraturan atau hukum Allah (Q.S. 12: 76); ketaatan atau kepatuhan (Q.S. 16: 52); balasan yang setimpal atau adil (Q.S. 1: 3, 51: 6, 82: 17).

Dengan demikian, maka dapat dirumuskan bahwa agama adalah kebiasaan atau tingkah laku manusia yang didasarkan pada jalan, peraturan atau hukum Allah, yang apabila ditaati atau dipatuhi, maka pemeluknya akan memperoleh balasan yang setimpal atau adil. Di dalam al-Qur’an istilah *din* digunakan baik untuk agama Islam maupun agama lainnya termasuk agama leluhur kaum Quraisy, seperti ungkapan dalam Q.S. 109: 6, 48: 28, dan 61: 9. istilah *din* menjadi khusus bagi agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, jika dihubungkan dengan kata-kata: *Allah, al-Haqq, al-Qayyim, al-Khalish*, menjadi: *Din Allah, Din al-Qayyim, dan Din al-Khalish*.<sup>56</sup>

Selanjutnya akan dijelaskan tentang adat dan hukum adat di masyarakat. Hukum adat sering dikenal di masyarakat dengan sebutan kebiasaan, hukum adat yang ada di Indonesia sangatlah beragam mengingat daerah Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya dan agama yang saling berbeda. Hukum adat pertamakali diperkenalkan oleh C Snouck Hurgronje di Indonesia dari bahasa belanda yaitu “*adatrecth*” yang selanjutnya dipakai oleh Van Vollenhoven dengan istilah teknis yuridis. Istilah hukum adat baru muncul dalam perundang-undangan

---

<sup>54</sup> Giddens, *Sociology*, hlm. 452.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> E. Hasan Saleh, *Studi Islam*, (Jakarta: ISTN, 1998), hlm. 30-31.

pada tahun 1980, yaitu dalam undang-undang belanda mengenai perguruan tinggi di negeri Belanda. Hukum adat mulai diperkenalkan sejak zaman belanda, hal ini terbukti dengan adanya pengendalian masyarakat aceh dengan hukum adat. Hal ini diperjelas dengan sebuah buku yang berjudul *De Atjehers* yang dikarang oleh Snouck. Hukum adat adalah hukum non statutair dimana sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat memang tidak diberlakukan secara tertulis seperti halnya undang-undang, namun keberadaan hukum adat sendiri memang diakui sebagai suatu aturan yang berlaku dalam sebuah masyarakat tertentu dan dilindungi keberadaannya oleh undang-undang.<sup>57</sup>

Hukum adat ditemukan pertamakali oleh tiga orang yang berkebangsaan belanda yang dikenal dengan trio penemu hukum adat yaitu: (1) Penemu hukum adat yang pertama adalah Wilken, pegawai Pangreh Praja Belanda mula-mula di pulau buru, kemudian di Gorontalo dan Minahsa barat, selanjutnya di Sipirok dan Mandailing. (2) Penemu hukum adat yang kedua adalah Lieftrinck, pegawai Pangreh Praja Belanda di Indonesia. Lieftrinck membatasi penyelidikannya hanya pada satu lingkungan Hukum Adat, yaitu Bali dan Lombok. Pada tahun 1927 tulisan-tulisan terpenting dari Lieftrinck di kumpulkan oleh van Earde di dalam sebuah himpunan “Bali dan Lombok” dengan sub judul: “*Geschriften*”. (3) Penemu hukum adat yang ketiga, adalah Snouck Hurgronje seorang sarjana sastra yang menjadi politikus. Pada tahun 1884-1885 ia mengembara di tanah Arab sebagai mahasiswa, di Mekkah ia bertemu dengan orang Indonesia (Aceh dan Jawa) sehingga ia mengenal hukum adat. Tahun 1891 ia dikirim ke Indonesia untuk mempelajari lembaga Islam, selama di Indonesia ia menulis beberapa buku tentang lembaga-lembaga kebudayaan di Sumatera bagian utara, “*De Atjehers*”, dan “*Het Gajoland*” adalah buah karyanya.<sup>58</sup>

Hukum adalah seperangkat norma dan aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Istilah “kebiasaan” adalah terjemahan dari bahasa Belanda “*gewoonte*”, sedangkan istilah “adat” berasal dari istilah Arab yaitu *’adah* yang berarti juga kebiasaan. Jadi istilah kebiasaan dan istilah adat mempunyai arti yang sama, yaitu kebiasaan.

---

<sup>57</sup> Muchsin, *Hukum Islam Dalam Perspektif Dan Prospektif*, (Surabaya: Yayasan Al-Ikhlas, 2003), hlm. 34.

<sup>58</sup> Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 51-54.

Menurut ilmu hukum, kebiasaan dan adat itu dapat dibedakan pengertiannya. Perbedaan itu dapat dilihat dari segi pemakaiannya sebagai perilaku atau tingkah laku manusia atau dilihat dari segi sejarah pemakaian istilahnya dalam hukum di Indonesia. Sebagai perilaku manusia, istilah biasa berarti apa yang selalu terjadi atau apa yang lazim terjadi, sehingga kebiasaan berarti kelaziman. Adat juga bisa diartikan sebagai kebiasaan pribadi yang diterima dan dilakukan oleh masyarakat.

Sejarah perundang-undangan di Indonesia membedakan pemakaian istilah kebiasaan dan adat, yaitu adat kebiasaan di luar perundangan dan adat kebiasaan yang diakui oleh perundangan. Sehingga menyebabkan munculnya istilah hukum kebiasaan atau adat yang merupakan hukum tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Di negara Belanda tidak membedakan istilah kebiasaan dan adat. Jika kedua-duanya bersifat hukum, maka disebut hukum kebiasaan (*gewoonterecht*) yang berhadapan dengan hukum perundangan (*wettenrecht*).

Istilah hukum adat sendiri berasal dari istilah Arab “*Hukm*” dan “*Adah*”. Kata *hukm* (jama’: *ahakam*) mengandung arti perintah atau suruhan, sedangkan kata *adah* berarti kebiasaan. Jadi hukum adat adalah aturan kebiasaan. Di Indonesia hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana-sini mengandung unsur agama.

Terminologi “Adat” dan “Hukum Adat” seringkali dicampur aduk dalam memberikan suatu pengertian padahal sesungguhnya keduanya adalah dua lembaga yang berlainan. Adat sering dipandang sebagai sebuah tradisi sehingga terkesan sangat lokal, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan ajaran agama dan lain-lainnya. Hal ini dapat dimaklumi karena “adat” adalah suatu aturan tanpa adanya sanksi riil (hukuman) di masyarakat kecuali menyangkut soal dosa adat yang erat berkaitan dengan soal-soal pantangan untuk dilakukan (tabu dan kualat). Terlebih lagi muncul istilah-istilah adat budaya, adat istiadat, dan sebagainya.

Hukum Adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat. Contohnya sejak jaman dulu, Suku Sasak di Pulau Lombok dikenal dengan konsep Gumi Paer atau Paer. Paer adalah satu kesatuan

sistem teritorial hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, kemanan dan kepemilikan yang melekat kuat dalam masyarakat .

Selanjutnya sebagai perbandingan akan dikemukakan tentang pengertian dan tujuan hukum. Hukum adalah salah satu dari norma dalam masyarakat. Norma hukum memiliki sanksi yang lebih tegas. Hukum sulit didefinisikan karena kompleks dan beragamnya sudut pandang yang hendak dikaji. Beberapa pengertian hukum menurut para ahli hukum antara lain:

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan: Hukum adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.<sup>59</sup>

Sementara Karl von Savigny menyatakan bahwa hukum adalah aturan yang terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, dimana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga masyarakat.<sup>60</sup>

Selanjutnya dalam literatur hukum, dikenal ada dua teori tentang tujuan hukum, yaitu teori *etis* dan *utilities*. Teori *etis* mendasarkan pada etika. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan ang *etis* tentang yang adil dan tidak. Menurut teori ini, hukum bertujuan untuk semata-mata mencapai keadilan dan memberikannya kepada setiap orang yang menjadi haknya. Sedangkan teori *utilities*, hukum bertujuan untuk memberikan faedah bagi sebanyak-banyaknya orang dalam masyarakat. Pada hikikatnya, tujuan hukum adalah manfaat dalam memberikan kebahagiaan atau kenikmatan besar bagi jumlah yang terbesar.

## I. Dialektika Islam dan Adat

Relasi antara Islam sebagai agama dengan adat dan budaya lokal sangat jelas dalam kajian antropologi agama. Dalam perspektif ini diyakini, bahwa agama merupakan penjelmaan dari sistem budaya.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm.14; Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm.1.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Bassam Tibbi, *Islam and Cultural Accommodation of Social Change*, (San Francisco: Westview

Berdasarkan teori ini, Islam sebagai agama samawi dianggap merupakan penjelmaan dari sistem budaya suatu masyarakat Muslim. Tesis ini kemudian dikembangkan pada aspek-aspek ajaran Islam, termasuk aspek hukumnya. Para pakar antropologi dan sosiologi mendekati hukum Islam sebagai sebuah institusi kebudayaan Muslim. Pada konteks sekarang, pengkajian hukum dengan pendekatan sosiologis dan antropologis sudah dikembangkan oleh para ahli hukum Islam yang peduli terhadap nasib syari'ah. Dalam pandangan mereka, jika syari'ah tidak didekati secara sosio-historis, maka yang terjadi adalah pembakuan terhadap norma syariah yang sejatinya bersifat dinamis dan mengakomodasi perubahan masyarakat.<sup>62</sup>

Kata adat, berasal dari bahasa Arab, yaitu: *'āddah*, secara literal sinonim dengan kata *'urf* yang berarti kebiasaan, adat atau praktek. Sementara arti kata *'urf* sendiri adalah “sesuatu yang telah diketahui”.<sup>63</sup> Dari makna etimologis ini dapat dipahami, bahwa adat mengandung arti pengulangan atau praktek yang sudah menjadi kebiasaan, yang dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual (*'ada fardliyah*) maupun kelompok (*'adah jama'iyah*). Sementara *'urf* diartikan sebagai praktek yang terjadi berulang-ulang dan dapat diterima oleh seseorang yang berakal sehat. Oleh karena itu, berdasarkan arti ini, *'urf* lebih merujuk kepada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu komunitas masyarakat, sementara adat lebih berhubungan dengan kebiasaan sekelompok kecil tertentu saja dalam masyarakat. Namun demikian, beberapa fuqaha yang lain memahami dua term ini sebagai dua kata yang tidak berlainan.

Subhi Mahmasani, misalnya, memahami secara paralel kedua kata ini, bahwa kata adat dan *'urf* memiliki arti yang sama (*al-'urf wa al-'adah bi ma'na wahid*)<sup>64</sup>. Pada akhirnya, terjadi sebuah transisi dari arti *'urf* yang bermakna “sesuatu yang telah diketahui” kepada makna “sesuatu yang dapat diterima oleh suatu masyarakat” yaitu kebiasaan atau adat itu sendiri. Arti inilah yang banyak digunakan untuk memahami terma adat dipandang sebagai kata yang mempunyai arti ekuivalen dengan *'urf* yang diartikan sebagai “adat” atau “kebiasaan”.

---

Pres, 1991), hlm. 1

<sup>62</sup> Aziz al- Azmeh [ed.], *Islamic Law: Social and Historical Contexts*, (tp., 1988), hlm. viii

<sup>63</sup> Muhammad Musthafa Syalabi, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Nahdhal al-'Arabiyyah, 1986), hlm. 313-315

<sup>64</sup> Subhi Mahmasani, *Falsafat al-Tasyri' fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Kasysyaf lin-Nasyr wa Itiba'ah wa at-Tauzi', 1952), hlm. 178-181

Secara teoritis, adat tidak diakui sebagai salah satu sumber dalam jurisprudensi Islam.<sup>65</sup> Namun demikian, dalam prakteknya, adat memainkan peran yang sangat signifikan dalam proses kreasi hukum Islam dalam berbagai aspek hukum yang muncul di negara-negara Islam.

Jika dirunut secara sosiologis pada masa Nabi Muhammad SAW, maka terlihat komunitas Muslim banyak mengadopsi berbagai macam adat. Praktek adat ini, dalam banyak hal, telah mempunyai kekuatan hukum dalam masyarakat. Walaupun hukum adat tidak dilengkapi oleh sanksi maupun suatu otoritas,<sup>66</sup> perannya dalam masyarakat tidak diragukan lagi. Satu contoh yang dapat dikemukakan di sini adalah tindakan kaum Muslimin mempertahankan praktek adat dan perbuatan hukum Nabi Ibrahim, terutama dalam ritual-ritual yang berkaitan dengan Ka'bah dan tradisi sunatan (*khitan*). Ritual upacara tersebut berperan sebagai dasar kultural dalam pembentukan tradisi sosial setempat.<sup>67</sup>

Berbagai macam adat pra-Islam diteruskan pemberlakuannya selama periode Rasulullah. Fakta ini mengindikasikan bahwa Islam bukanlah merupakan suatu bentuk revolusi hukum yang secara langsung ditujukan untuk melawan adat yang telah diketahui dan dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum kemunculan Islam. Sebaliknya Nabi Muhammad, dalam kapasitasnya sebagai pembuat hukum dari sebuah agama yang baru, banyak menciptakan aturan-aturan yang melegalkan hukum adat masyarakat Arab, sehingga memberikan tempat bagi praktek hukum adat tersebut di dalam sistem hukum Islam yang baru. Hal ini dapat dipahami, karena Islam hadir ke pentas peradaban dunia tidak dimulai dari lembaran putih, meminjam istilah An-Na'im,<sup>68</sup> karena ia tidak hadir dalam ruang hampa keagamaan, sosial budaya, ekonomi dan politik. Dengan demikian, Islam merupakan kelanjutan dan kulminasi tradisi Ibrahim. Selain itu, hukum Islam dalam syari'ah menerima dan memodifikasi banyak aspek adat dan praktik Arab pra-Islam.

---

<sup>65</sup> Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford: The Clarendon Press, 1964), hlm. 62

<sup>66</sup> Duncan B. Macdonald, *Development Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory*, (London: Darf Publisher Limited, 1985), hlm. 68

<sup>67</sup> Reuben Levy, *The Social Structure of Islam*, (Cambridge: The University press, 1975), hlm. 251

<sup>68</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, (Yogyakarta: LkiS dan Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 102



Pernyataan ini agaknya relevan, jika kita mencoba melihat pada aspek sosio-historis ketika masa pewahyuan al-Qur'an baik di Makkah maupun di Madinah, telah memunculkan tipologi pembacaan yang khas bagi umat Islam, yakni untuk memahami dan mendialogkan al-Qur'an dengan realitas kehidupan. Teks demi teks dalam al-Qur'an oleh para Sahabat ditafsiri dengan teks kehidupan. Ini merupakan kesadaran bahwa antara teks al-Qur'an dan teks yang terhampar dalam kehidupan sosial saling menafsiri satu sama lain. Apa yang disebut sebagai ayat-ayat tekstual adalah refleksi dari ayat-ayat sosial.

Dengan perkataan lain, pada era kenabian ada sebuah bentuk dialektika antara al-Qur'an dan kebudayaan, khususnya kebudayaan lokal Arab pada saat itu. Jika mau konsisten dengan logika tersebut, maka al-Qur'an pada kurun yang paling awal bukanlah sebuah kitab suci yang terpisah dari konteks, melainkan sebuah teks yang terlibat dalam proses-proses pembentukan dan terbentuknya kebudayaan.<sup>69</sup>

Selanjutnya, dalam bidang hukum keluarga, Nabi Muhammad mempertahankan beberapa praktek hukum yang telah lama diketahui oleh masyarakat Arab sebelum Islam dan hanya mengganti beberapa hal yang tampaknya tidak konsisten dengan prinsip-prinsip alasan hukum yang masuk akal dan landasan moral yang baik. Karena peraturan-peraturan yang diderivasikan dari nilai adat pra-Islam yang berhubungan dengan masalah perkawinan dan pengaturan hubungan gender, demikian pula dalam masalah status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang bersifat meragukan dan tidak ada kepastian, maka kemudian Islam berusaha untuk menyesuaikan aturan-aturan tersebut sesuai dengan karakter manusia. Berangkat dari argumentasi ini, maka Rasulullah menghapuskan beberapa praktek hukum yang telah secara luas diamalkan sejak dahulu kala oleh bangsa Arab, seperti praktek poliandri, hubungan seksual yang tidak sah, pembunuhan terhadap bayi perempuan, perceraian yang berulang-ulang, dan lain sebagainya. Sementara di sisi lain, Nabi juga tetap mempertahankan atau memodifikasi praktek-praktek hukum yang lain, seperti poligami, pembayaran mahar, atau pemberitahuan (*iqrar*) dalam perkawinan.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Abdul Muqstith Ghazali, "Dialektika antara Al-Qur'an dan Kebudayaan", *Media Indonesia*, 4 Januari 2001

<sup>70</sup> Mahomed Ullah, *The Muslim Law of Marriage*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1986), h. ii-xvii; Abdul Rahim, *The Principles of Muhammadan Jurisprudence*, (London: Luzac & Co., 1911), hlm. 7-12



Berbicara tentang pengaruh kultur dan adat lokal dalam kaitannya dengan agama, di sana terlihat adanya pergulatan untuk mengompromikan pesan relegius keagamaan yang disnergikan dengan muatan lokal. Perjumpaan agama dengan budaya lokal itu mengambil banyak bentuk. *Pertama*, mengalami benturan (*clash*) yang sampai pada titik dimana budaya setempat dihabisi dan diganti yang baru dengan Islamisasi misalnya, yang terjadi di Padang tempo dulu. *Kedua*, ada yang mengambil jalan akomodasi. Artinya ada pertemuan saling mengisi dan tidak saling menjatuhkan. “Islam diterima tapi sebatas simboliknya. Adapun substansi seperti kepercayaan terhadap leluhur tetap dijaga. *Ketiga*, mengambil bentuk hibriditas. Artinya menerima agama tapi separohnya saja, sisanya tradisi setempat. Bentuk ini kemudian biasa dikenal dengan misalnya, Islam Jawa, Islam Banjar, Islam Sasak dan sebagainya.<sup>71</sup>

Ajaran agama Islam bagi masyarakat Sasak mendapatkan tempat sangat tinggi dalam menjalankan kehidupan keagamaannya sehari-hari sesuai dengan doktrin keagamaan yang dianut. Kuatnya tradisi keagamaan Islam ini dapat dilihat dengan jumlah-jumlah tempat ibadah. Islam merupakan dan menjadi faktor utama dalam masyarakat Lombok. Sekitar 90 % dari penduduk Lombok adalah orang Sasak dan hampir semuanya adalah muslim. Tidak mengherankan manakala muncul ungkapan “menjadi Sasak berarti menjadi muslim”. Hal ini kenyataannya dipegangi bersama oleh sebagian besar penduduk Lombok karena identitas Sasak begitu erat kaitannya dengan identitas mereka sebagai muslim.

Lombok adalah potret sebuah mozaik, terdapat banyak warna budaya dan nilai menyeruak di masyarakatnya. Mozaik ini terjadi antara lain, karena Lombok masa lalu adalah merupakan objek perebutan dominasi berbagai budaya dan nilai, yaitu antara Sasak (suku dominan di Lombok) sebagai pribumi yang harus berhadapan dengan pengaruh Hindu Bali yang dominan di Lombok Barat dan pengaruh Islam Jawa yang kuat ekspansinya di Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Islam merupakan dan menjadi sebuah faktor utama dalam masyarakat Lombok. Seorang etnografis bahkan lebih jauh mengatakan

---

<sup>71</sup> Ahmad Baso, *Plesetan Lokalitas: Politik Pribumisasi Islam*, (Jakarta: Desantara, 2002), hlm. 7-8 lihat juga “Tradisi Lokal dan Masa Depan agama” dalam *Majalah Majemuk*, No.6 November-Desember 2003, hlm. 3

bahwa “menjadi Sasak berarti menjadi Muslim”. Meskipun pernyataan ini tidak seluruhnya benar (karena pernyataan ini mengabaikan popularitas Sasak Boda)<sup>72</sup>. Sentimen-sentimen itu dipegangi oleh sebagian besar penduduk Lombok karena identitas Sasak begitu erat terkait dengan identitas mereka sebagai Muslim. Di samping itu, Lombok dikenal dengan sebutan “pulau seribu masjid” dan sebagai sebuah tempat di mana Islam diterima secara serius dan tipe Islam yang dipraktikkan pada umumnya adalah agak kaku, fanatik dan ortodoks, di satu sisi dan di sisi lain terlihat lebih lentur dan sangat sinkretik, karena bercampur dengan anasir budaya lokal.

Islam sebagai sebuah sistem nilai tersusun dari dua elemen dasar yang membentuk sebuah entitas tunggal yang masing-masing tidak bisa dipisah-pisahkan. Elemen tersebut adalah doktrin atau kredo yang bersifat dogmatik dan berperan sebagai elemen inti (*core element*) di satu sisi, dan peradaban yang bersifat historis dan kontekstual sebagai elemen permukaan (*peripheral element*) disisi lain. Disebut elemen inti karena ia menjadi ruh substantif dari agama Islam yang tanpa kehadirannya agama tidak akan mempunyai arti apa-apa, sementara peradaban menempati posisi permukaan mengingat bentuknya yang secara fisik bisa diobservasi oleh kasat mata jika tampak ke wilayah permukaan.<sup>73</sup>

Dari aspek doktrinal, Islam membawa pesan-pesan transendental yang permanen dan tidak berubah-ubah, namun ketika pesan-pesan transendental tersebut sampai ke tataran praksis komunitas umatnya, maka warna Islam bisa beragam sejalan dengan beragamnya interpretasi akibat perbedaan persepsi. Perbedaan interpretasi beserta segala konsekuensinya itu belakangan membentuk sebuah peradaban Islam yang sangat heterogen dan dinamis, sesuai dengan dimensi ruang dan waktu. Aspek yang terakhir ini menjadi faktor signifikan bagi proses

---

<sup>72</sup> Boda merupakan kepercayaan asli orang Sasak sebelum kedatangan pengaruh asing. Orang Sasak pada waktu itu, yang menganut kepercayaan ini, disebut Sasak Boda. Agama Sasak Boda ini ditandai oleh Animisme dan Panteisme. Pemujaan dan Penyembahan roh-roh leluhur dan berbagai dewa lokal lainnya merupakan fokus utama dari praktek keagamaan Sasak Boda. Lihat Erni Budiwanti, “*The Impact of Islam on the Religion of the Sasak in Bayan, West Lombok*” dalam *Kultur* Volume I, No.2/2001/hlm. 30.

<sup>73</sup> Masdar Hilmy, “Problem Metodologis Dalam Kajian Islam: Membangun Paradigma Penelitian keagamaan yang komprehensif”, dalam <http://www.geocities.com/HotSprings/6774/p-6.html>

pembentukan identitas Islam secara sosial, politik, dan kultural yang memiliki dialektika sejarah yang berbeda-beda namun secara prinsipil memiliki semangat teologis yang sama.

Dengan demikian, Islam harus dilihat sebagai sebuah sistem dialektis yang meliputi aspek idealitas dan realitas; mencakup dimensi kepercayaan (*belief*) yang berupa tauhid dan diimplementasikan ke dalam dimensi praksis yang meliputi ritual, budaya dan tradisi dan tradisi keIslaman lainnya.

Sebagai konsekuensi lebih jauh dari pemahaman diatas, aspek idealitas Islam sering disebut sebagai, meminjam istilah Fazlur Rahman, “Islam normatif” atau, istilah Richard C. Martin, “Islam formal” yang ketentuannya tertuang secara eksplisit didalam teks-teks Islam primer. Sementara itu, aspek praksis menyangkut dimensi kesejarahan umat Islam yang beraneka ragam sesuai dengan faktor eksternal yang melingkupinya. Aspek yang terakhir ini bersifat subyektif sebagai akibat dari akumulasi pengetahuan secara turun-temurun dan dialog akulturatif antara “Islam formal” dan budaya lokal Muslim tertentu.

Dalam mengkaji Islam beserta makna derivasinya, paling tidak ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu Pendekatan teksual dan pendekatan kontekstual. Pendekatan tekstual menekankan pada signifikansi teks-teks sebagai sentra kajian Islam dengan merujuk kepada sumber-sumber suci [*pristine source*] dalam Islam, terutama al-Qur’an dan al-Hadits. Pendekatan ini sangat penting untuk melihat realitas Islam normatif yang tertulis baik secara eksplisit maupun implisit.

Selain ajaran tauhid sebagai pilar utama dalam Islam, ibadah *mahdhah* (dimensi vertikal) merupakan bagian dari Islam normatif yang ketentuan hukumnya sudah diatur secara jelas dalam kedua teks suci tersebut. Ibadah *mahdhah* tidak memerlukan ijtihad untuk mencari penafsiran lebih jauh, namun ia hanya perlu diamalkan. Dalam bahasa ritualnya, ia sering disebut sebagai *arkan al-Islam* yang meliputi syahadat, shalat, puasa, zakat, dan ibadah haji bagi yang mampu. Bukan hanya *arkan al-Islam* yang membentuk Islam normatif, kesalehan teologis lainnya yang tertuang dalam al-Qur’an dan al-hadits juga sering menjadi rujukan utama ibadah dalam Islam dan, dengan begitu bisa dilihat dengan pendekatan pertama ini.

Dalam prakteknya, pendekatan tekstual ini barangkali tidak menemui kendala yang berarti ketika dipakai untuk melihat dimensi Islam normatif yang bersifat *qath'i* sebagaimana tersebut di atas. Persoalan baru muncul ketika pendekatan ini dihadapkan pada realitas ibadah umat Islam yang tidak tertulis secara eksplisit, baik di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits, namun kehadirannya diakui dan, bahkan, diamalkan oleh komunitas Muslim tertentu secara luas. Contoh yang paling terang benderang adalah adanya ritual tertentu dalam komunitas Muslim yang sudah mentradisi secara turun temurun, seperti selamatan, tahlilan dan lain sebagainya. Memang cukup dilematis bagi pendekatan tekstual untuk sekedar menjustifikasi bahwa ritual-ritual tersebut merupakan bagian dari ajaran Islam atau tidak.

Fenomena ritual keagamaan yang banyak bercampur dengan tradisi lokal tidak dapat disangkal lagi, kepercayaan dan ritual sinkretik/*Abangan* sangat banyak ragamnya. Banyak peneliti Islam Indonesia, yang memberikan keterangan tentang Islam yang begitu berbeda dengan karakter Islam Arab.<sup>74</sup>

Fenomena ini juga diamini oleh Martin van Bruinessen, dengan menunjukkan bukti bahwa banyak praktek yang dikategorikan Islam *Abangan* juga ditemukan di belahan lain dunia Islam. Ia membandingkan deskripsi Geertz tentang agama *Abangan* dengan pengamatan-pengamatan pada kehidupan sehari-hari kaum petani Mesir, pada awal abad ke-19, yang dilakukan oleh studi klasik lain, karya Lane: *Manners and Customs of the Modern Egyptians* (Perilaku dan Kebiasaan Orang-orang Mesir Modern). Beberapa praktek kurang Islami yang terlihat dalam perilaku keagamaan orang Jawa, telah dikenal juga oleh orang-orang Mesir.<sup>75</sup>

Di samping itu banyak praktek *magic* yang bersumber dari Islam, bahkan tidak diragukan lagi bersumber dari tanah suci (Makkah). Isinya banyak memuat tentang naskah magis populer dan ramalan-ramalan,

---

<sup>74</sup> Mark R. Woodward melakukan penelitian yang amat ekstrem mengenai kehidupan agama dalam masyarakat *urban* di lingkungan kraton Yogyakarta tahun 1989. Penemuan ritual keraton dan praktek keagamaan sinkretik lain yang ditelitinya tidak ditemukan dalam kitab ajaran Hindu, sehingga ia berkesimpulan bahwa pada mulanya mereka bukan asli Hindu. Lihat Mark R. Woodward, *Islam Jawa: Kesalesahan Normatif Versus Kebatinan*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 3-5

<sup>75</sup> Martin van Bruinessen, "Global and Local in Indonesian Islam" dalam *Southeast Asian Studies* (Kyoto) vol. 37, No. 2, 1999, h. 46-63, artikel ini juga dapat diakses melalui <http://www.let.uu.nl/~Martin.vanbruinessen/personal/publication/Global>

yang juga dikenal sebagai primbon atau dalam versi yang lebih Islami disebut kitab *mujarobat*, yang diperoleh langsung dari karya-karya penulis Muslim Afrika Utara abad ke-12-13, yakni Syekh Ahmad al-Buni.<sup>76</sup>

Beberapa kepercayaan dan praktek lokal telah menjadi bagian kompleksitas budaya global. Banyak umat Islam kontemporer Indonesia enggan menyebutnya Islami karena mereka menentang konsepsi Islam universal. Namun demikian, lanjut Martin, dalam beberapa kasus, mereka masuk ke Indonesia sebagai bagian dari perluasan peradaban Islam, meski tidak menjadi tulang punggung agama Islam. Mereka merepresentasikan gerakan awal Islamisasi, dan adalah keliru jika dikatakan bahwa Islamisasi adalah gerakan sekali jadi, melainkan merupakan suatu proses yang dimulai sejak abad ke-13 sampai 15 H.<sup>77</sup>

Untuk menjawab persoalan di atas, barangkali pendekatan yang diajukan Mark. R. Woodward dalam menjawab disparitas distingtif antara Islam normatif dengan Islam lokal dapat diajukan. Pendekatan ini disusun secara kronologis atas empat<sup>78</sup> unsur dasar, yaitu:

*Pertama*, Islam universalis. Penempatan Islam universalis di lakukan di awal karena di dalamnya tercakup ajaran-ajaran Islam yang secara *qoth'i* sudah digariskan di dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Masuk dalam katagori ini adalah tauhid, *arkan al-Islam*, dan credo religius lainnya yang bersifat *taken for granted*. Terhadap katagori ini, umat Islam pada umumnya sepakat meyakinkannya sebagai *ultimate truth* yang tidak memerlukan elaborasi (*ta'wil*) lebih jauh.

*Kedua*, Islam esensialis. Penggunaan terma esensialis ini pada awalnya dipinjam oleh Woodward dari Richard C. Martin untuk menunjukkan modus praktik-praktik ritual yang sekalipun tidak didelegasikan secara eksplisit oleh teks-teks universalis, namun secara luas diamalkan oleh umat Islam atas dasar justifikasi substansial dari semangat kedua sumber suci tersebut. Masuk dalam katagori ini adalah upacara tahunan Maulid Nabi Muhammad SAW., bacaan-bacaan zikir yang diamalkan oleh halaqah-halaqah sufi, juga modus-modus ritual yang secara mentradisi

---

<sup>76</sup> Dalam catatan al-Buni, *Syams al-Ma'arif*, sebuah kitab yang cukup populer di Indonesia. Banyak kitab yang sering disebut *mujarobat* yang secara sederhana disadur dari kitab *Syams al-Ma'arif*. Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning*, (Bandung: Mizan, 1989).

<sup>77</sup> Martin van Bruinessen, "Global and Local...." <http://www.let.uu.nl/-Martin.vanbruinessen/personal/publication/Global>

<sup>78</sup> Lebih lanjut lihat Mark R. Woodward, *Islam Jawa...*, hlm. 10- 22

dipraktikkan untuk memuliakan para wali, ziarah ke tempat-tempat suci, serta tradisi slametan, tahlilan yang tersebar luas di negara-negara Muslim, seperti India, Malaysia, Pakistan, dan Indonesia. Dengan demikian, Islam esensial merupakan katagori Islam yang sangat inklusif.

*Ketiga, receiverd* Islam. Secara harfiah, *receiverd* Islam bisa diterjemahkan sebagai Islam yang diterima atau dipahami. Woodward secara jujur tidak menghadirkan deskripsi yang memuaskan tentang kategori ketiga ini. Ia hanya menyebut bahwa *receiverd* Islam menjadi jembatan antara kategori universalis dan esensialis dengan Islam lokal. Lebih jauh ia menambahkan bahwa contoh konkrit dari kategori ini adalah dominasi ajaran sufi yang mempengaruhi perkembangan Islam lokal di Jawa dan Lombok. Islam jenis ini bersifat dinamis; ia berubah seiring dengan pengetahuan atau penafsiran terhadap teks-teks esensialis.

*Keempat, Islam lokal.* Islam lokal bisa didefinisikan sebagai seperangkat teks tertulis, tradisi oral atau ritual yang kehadirannya tidak dikenal di daerah asal turunnya Islam (Mekkah). Menurut Woodward, naskah-naskah atau tradisi mistik kejawaen merupakan contoh paling jelas adanya Islam jenis ini serta merupakan implikasi logis sebagai hasil interaksi antara kebudayaan lokal dan *received* Islam.

Berdasarkan erabolasi yang diberikan oleh Wood ward di atas, ada kesan bahwa pendekatan tekstual terkesan tidak memiliki batasan yang jelas untuk membedakan mana yang disebut “Islami” dan mana yang tidak. Justru dari sini muncul kesan seolah-olah pendekatan ini dapat diaplikasikan di wilayah mana saja sepanjang masih dalam lingkup ritual Islam. Ketidakjelasan batasan mengenai Islam ini bisa jadi merupakan kelemahan pendekatan tekstual bisa juga merupakan keistimewaannya.

Selanjutnya, kehadiran pendekatan kontekstual penting untuk memahami Islam dalam konteks ruang dan waktu. Pendekatan ini pertamakalidipopulerkan oleh D. Eickelman yang merupakan perangkat komplementer yang dapat menjelaskan motif-motif kesejarahan dalam ritual Islam untuk memperkuat asumsi bahwa Islam merupakan entitas komprehensif yang melingkupi elemen normatif dan elemen praksis.

Dalam memahami fenomena ritual lokal dalam Islam, maka teori-teori sosio kultural berikut ini menjadi bagian penting dari pendekatan kontekstual, antara lain:

*Pertama*, teori fungsional. Teori ini dikembangkan oleh Bronislaw Malinowski<sup>79</sup> yang mengasumsikan adanya hubungan dialektis antara agama dengan fungsinya yang diaplikasikan melalui ritual. Secara garis besar, fungsi dasar agama diarahkan kepada sesuatu yang supranatural atau, dalam bahasa Rudolf Otto, “*powerfull other*”. Partisipan yang terlibat dalam sebuah ritual bisa melihat kemanfaatan agama sebagai sarana meningkatkan hubungan spiritual dengan tuhan, karena pada dasarnya manusia secara naluriah memiliki kebutuhan spiritual.

Dengan demikian, teori fungsional melihat setiap ritual dalam agama memiliki signifikansi teologis, baik dari dimensi psikologis maupun sosial. Aspek-aspek teologis dari sebuah ritual keagamaan seringkali bisa ditarik benang merahnya dari simbol-simbol religius sebagai bahasa maknawiah. Pemaknaan terhadap simbol-simbol keagamaan tersebut sangat bergantung kepada kualitas dan arah performa ritual serta keadaan internal partisipan sehingga sebuah ritual bisa ditujukan untuk “memuaskan” kebutuhan spiritual.

Dalam konteks sosiologis, sebuah ritual juga merupakan manifestasi dari apa yang disebut oleh Durkheim sebagai “alat memperkuat solidaritas sosial” melalui performa dan pengabdian. Tradisi slametan merupakan contoh paling konkret dari ritual jenis ini sebagai alat untuk memperkuat keseimbangan masyarakat (*social equilibrium*), yakni menciptakan situasi rukun-setidaknya- di kalangan para partisipan. Kalangan fungsionalis yang mengakui asumsi ini adalah Clifford Geertz, James Peacock, Robert W. Hefner, Koentjaraningrat, dan masih banyak lagi.

Pendek kata, teori fungsional melihat fungsi ritual (agama) dalam konteks yang lebih luas, baik dalam konteks spiritual maupun eksistensi kemanusiaan. Ia bisa dipahami sebagai sebuah jawaban terhadap pertanyaan mengapa ritual [agama] itu ada atau diadakan. Jawaban tersebut tentu saja muncul karena umat Islam membutuhkannya sebagai perangkat untuk mendapatkan berkah suci dari Tuhan.

---

<sup>79</sup> Lihat lebih lanjut Bronislaw Malinowski, *Magic, Science and Religion*, (New York: Doubleday & Company, Inc., 1954).



*Kedua, Rite de Passage.* Secara harfiah, teori yang dikembangkan oleh Arnold Van Gennep<sup>80</sup> ini bisa diartikan sebagai “ritual penahapan” yang menandai perpindahan status seseorang dari yang satu ke yang lain, baik merupakan perubahan status sosial maupun transformasi spiritual. Ritual jenis ini melibatkan perubahan, baik status eksternal maupun internal, rekonfirmasi sebuah kondisi sebagaimana yang diharapkan tetapi belum sempat dialami atau diartikulasikan dalam hidup seseorang.

Sejalan dengan perspektif *Rite de Passage* di atas, *slametan* dan tradisi *tahlilan* bisa juga dipahami sebagai ritual yang menandai perpindahan status seseorang sepanjang hidupnya mulai dari kelahiran, aqiqah, khitan, perkawinan, dan kematian. Setiap tahapan dalam hidup manusia menandai perubahan status sosial dari yang satu ke yang lain. Sebagai contoh, ritual perkawinan menandai perubahan status sosial dari masa lajang menuju masa keluarga; ritual kematian menandai perpindahan status manusia dari alam dunia ke alam barzah dan seterusnya.

*Ketiga, teori struktural.* Teori ini dikembangkan oleh Claude Levi-Strauss sebagai seorang pelopornya. Ritual dalam sebuah ajaran agama diasumsikan memiliki hubungan struktural dengan mitos-mitos lokal tertentu. Terlepas dari persoalan orisinalitas antara mitos dengan ritual, pendekatan ini melihat keduanya memiliki hubungan resiprokal; mitos eksis pada tataran konsepsi dan ritual pada tataran aksi atau “*homology*”, dalam bahasa Levi-Strauss. Dengan demikian, strukturalisme melihat ritual sebagai bagian dari sebuah *logical order* dalam bangunan sistem kultural; ia mengikuti struktur formal dari sebuah sistem tertutup. Dalam konteks ini, teori *model of* [model dari] dan *model for* (model bagi) Geertz bisa diterapkan untuk lebih memperjelas perspektif teori ini. Jika Levi-Strauss melihat mitos dan ritual bisa saling berganti posisi ke satu sama lain, Geertz melihat mitos sebagai wujud dari teori *model of* sebagai ritual dan ritual sendiri menjadi *model for*-nya mitos.<sup>81</sup>

Berdasarkan elaborasi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konteks diskursus keIslaman, pendekatan tekstual merupakan pilihan prioritas yang kehadirannya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ia merupakan *conditio sine quanon* dalam rangka melihat wajah Islam dari sumber-sumber teks suci, terutama al-Qur’an dan al-Hadits. Selanjutnya eksistensi teks-teks

---

<sup>80</sup> Arnold Van Gennep, *Les Rites de Passage*, (Chicago: University of Chicago Press, 1960).

<sup>81</sup> Masdar Hilmy, “Problem....” <http://www.geocities.com/HotSprings/6774/p-6.html>



yang ditulis oleh intelektual atau 'ulama kenamaan di bidang tertentu dalam Islam juga tidak kalah pentingnya, terutama ketika ditemukan justifikasi dari kedua teks suci tersebut terhadap sebuah ritual.

Masih dalam aras yang sama pendekatan tekstual ini dikenal juga sebagai pendekatan *Bayani* (penerapan analisis tekstual). Pendekatan ini asumsinya diharapkan dapat menggali landasan normatif al-Qur'an dan al-Hadits yang berkaitan dengan wacana agama dan budaya lokal, serta dapat mengungkapkan makna teks normatif sehingga dapat memberikan kerangka relatifitas-kepastian hukum. Legitimasi normatif tekstual di atas, sangat dibutuhkan setidaknya justifikasi keyakinan keagamaan dalam menerima dan mengadaptasi serta mengakomodasi budaya lokal.

Namun pendekatan *Bayani* saja tidak cukup karena terkadang dalam teks al-Qur'an dan al-Hadits tidak ada penjelasan secara langsung. Oleh karena itu diperlukan pendekatan atau perspektif lain yang lebih bersikap terbuka, luwes dan toleran yaitu pendekatan *Burhani* dan *Irfani*. Melalui pendekatan *Burhani* (penerapan analisis rasional filosofis) dan *Irfani* [analisis konteks: historis sosio antropologis dan polotis-ideologis]; diharapkan selain dapat mengungkapkan konteks dari sebuah risalah keagamaan, juga dapat mengungkapkan realitas sejarah dari sebuah tradisi dan budaya lokal, baik genealogi pemikiran nilai-nilai spriritualitas dan religiusitasnya maupun filosofis, *local wisdom* (kearifan lokal) serta visi pencerahan dan kritik sosialnya .

Dengan demikian, kehadiran kajian tekstual (*Bayani*) akan lebih berbobot bilaklaim-klaimnyabisaditopangolehkajian-kajiankontekstual (*Burhani* dan *Irfani*), bukan untuk mencari klaim sepihak, melainkan untuk menempatkannya secara proporsional dan komprehensif. Pendekatan kontekstual ini bisa dipakai untuk melihat nuansa "lain" dari wajah Islam dengan tanpa mereduksi makna keIslaman seorang Muslim. Pendekatan ini diperlukan sekadar untuk memperkuat asumsi bahwa di dunia ini tidak hanya berlaku satu versi saja, melainkan banyak versi yang menggambarkan tentang Islam. Karena itu, sikap yang terjebak ke dalam kubangan *truth claim* apologetik bisa dihindarkan.

## J. Akomodasi, Adaptasi dan Akulturasi Islam dengan Adat

Kondisi Kehidupan keagamaan kaum muslimin pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari proses penyebaran Islam di Indonesia sejak beberapa abad sebelumnya. Ketika Islam masuk di Indonesia, kebudayaan nusantara telah dipengaruhi oleh agama Hindu dan Budha, selain masih kuatnya berbagai kepercayaan tradisional, seperti animisme, dinamisme, dan sebagainya.<sup>82</sup> Kebudayaan Islam akhirnya menjadi tradisi kecil di tengah-tengah Hinduisme dan Budhisme yang juga menjadi tradisi kecil. Tradisi-tradisi kecil inilah yang kemudian saling mempengaruhi dan mempertahankan eksistensinya.

Wilayah-wilayah nusantara yang pertama tertarik masuk Islam adalah pusat-pusat perdagangan di kota-kota besar di daerah pesisir. Islam ortodok dapat masuk secara mendalam di kepulauan luar Jawa, yang memiliki hanya sedikit pengaruh Hindu dan Budha. Sementara itu di Jawa, agama Islam menghadapi resistensi dari Hinduisme dan Budhisme yang telah mapan. Dalam proses seperti ini, Islam tidak saja harus menjinakkan sasarannya, tapi juga harus memperjinak diri.<sup>83</sup> Benturan dan resistensi dengan kebudayaan-kebudayaan setempat memaksa Islam untuk mendapatkan simbol yang selaras dengan kemampuan penangkapan kultural dari masyarakat setempat.

Kemampuan Islam untuk beradaptasi dengan budaya setempat, memudahkan Islam masuk ke lapisan paling bawah dari masyarakat. Akibatnya, kebudayaan Islam sangat dipengaruhi oleh kebudayaan petani dan kebudayaan pedalaman, sehingga kebudayaan Islam mengalami transformasi bukan saja karena jarak geografis antara Arab dan Indonesia, tetapi juga karena ada jarak-jarak kultural.

Proses kompromi kebudayaan seperti ini tentu membawa resiko yang tidak sedikit, karena dalam keadaan tertentu seringkali mentoleransi penafsiran yang mungkin agak menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Kompromi kebudayaan ini pada akhirnya melahirkan, apa yang di pulau Jawa dikenal sebagai *sinkretisme* atau Islam *Abangan*. Sementara di pulau Lombok dikenal dengan istilah Islam *Wetu Telu*.

---

<sup>82</sup> Sebuah studi menarik berkaitan dengan tema ini, lihat Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh, Suatu studi perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

<sup>83</sup> Taufik Abdullah, "Pengantar: Islam, Sejarah dan Masyarakat", dalam Taufik Abdullah [ed.], *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indoensia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 3

Proses Islamisasi yang berlangsung di nusantara pada dasarnya berada dalam proses akulturasi. Seperti telah diketahui bahwa Islam disebarkan ke nusantara sebagai kaedah normatif di samping aspek seni budaya. Sementara itu, masyarakat dan budaya di mana Islam itu disosialisasikan adalah sebuah alam empiris. Dalam konteks ini, sebagai makhluk berakal, manusia pada dasarnya beragama dan dengan akalnyapun mereka paling mengetahui dunianya sendiri. Pada alur logika inilah manusia, melalui perilaku budayanya senantiasa meningkatkan aktualisasi diri. Karena itu, dalam setiap akulturasi budaya, manusia membentuk, memanfaatkan, mengubah hal-hal paling sesuai dengan kebutuhannya.<sup>84</sup>

Dari paradigma inilah, masih dalam kerangka akulturasi, lahir apa yang kemudian apa yang dikenal sebagai *local genius*. Di sini *local genius* bisa diartikan sebagai kemampuan menyerap sambil mengadakan seleksi dan pengolahan aktif terhadap pengaruh kebudayaan asing, sehingga dapat dicapai suatu ciptaan baru yang unik, yang tidak terdapat di wilayah bangsa yang membawa pengaruh budayanya.

Pada sisi lain, secara implisit *local genius* dapat dirinci karakteristiknya, yakni: mampu bertahan terhadap dunia luar; mempunyai kemampuan megakomodasi unsur-unsur dunia luar; mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli; dan memiliki kemampuan mengendalikan dan memberikan arah pada perkembangan budaya selanjutnya.<sup>85</sup>

Muarif sebagai seorang sejarawan dan arkeolog, berpendapat bahwa ada beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan masalah akulturasi budaya nusantara dengan anasir-anasir budaya dari luar, diantaranya: (1) Proses pembentukan budaya inti (*core culture*) nusantara, semenanjung, Brunei darussalam, dan Mindanau berkesinambungan sampai pada saat-saat kontak budaya dengan tradisi besar India, dunia Islam dan eropa; (2) Kontribusi yang dihasilkan sehubungan persentuhan budaya dari luar tersebut; dan (3)

---

<sup>84</sup> Hasan Muarif Ambary, *Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*, [Jakarta: Logos, 2001], hlm. 251

<sup>85</sup> Soerjanto Poespowardojo, "Pengertian Local Genius dan Relevansinya dalam Modernisasi" dalam *Kepribadian Budaya Bangsa [local genius]*, Ayotrohaedi (ed.), (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986), hlm. 28-38

Proses dipusi budaya tempatan [lokal] dalam mengadaptasi anasir-anasir tradisi besar.<sup>86</sup>

Sebagai pranata lokal, Islam bagi komunitas Islam di di pulau Lombok tidak dapat lepas dari hukum adat, karena jauh sebelum Islam masuk ke Lombok, adat atau hukum adat telah bersemi sebagai perwujudan budaya lokal suku Sasak. Kemudian adat memperoleh kesahihannya setelah Islam menjadi keyakinan mayoritas suku bangsa ini, dan dalam pengertian pengertian ini dapat dikatakan bahwa adat dan ajaran Islam merupakan satu kesatuan sebagai tata nilai tunggal yang dirumuskan dalam terminologi “*adatgama*”.<sup>87</sup> Artinya ada suatu dialektika antara hukum adat dan hukum Islam, dan pada gilirannya merasuki hampir semua aspek komunitas, memberikan batasan-batasan mana yang boleh dan mana yang dilarang. Apabila terdapat perbedaan adat dengan nilai-nilai Islam, seperti praktek dan ritual adat *Wetu Telu*, maka yang berlaku adalah prinsip-prinsip kebenaran mutlak dari agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah.

Pemahaman ini memberikan pengertian bahwa apabila prinsip-prinsip adat ingin tetap dipertahankan, maka ia harus menyesuaikan diri dengan ajaran agama, dan konsep inilah menurut paham suku Sasak disebut sebagai *adat luiir gama*, bahwa adat dapat berlaku dan dijadikan pedoman dalam kehidupan bila sudah bersandar kepada agama, atau senada dengan falsafah adat Minangkabau, yang menyatakan: “*Adat basandi syarak dan syara basandi kitabullah*”.<sup>88</sup>

Hukum Islam dalam penerimaannya terhadap hukum adat selalu melakukan koreksi terhadap sistem pranata tersebut, kemudian baru dijadikan landasan kehidupan sehari-hari masyarakat. Konsep ini jelas berbeda dengan teori *receptie* dari Snouck Hurgronje yang mengatakan bahwa hukum Islam itu baru memiliki kekuatan sebagai hukum apabila sudah diterima oleh hukum adat.<sup>89</sup>

Sejalan dengan pandangan di atas, maka parameter yang digunakan untuk menyeleksi apakah adat itu sesuai atau tidak dengan nilai-nilai

---

<sup>86</sup> Hasan Muarif Ambariy, *Menemukan Peradaban ...*, hlm. 252

<sup>87</sup> Idrus Abdullah..., hlm. 126

<sup>88</sup> Abdul Aziz Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 21

<sup>89</sup> Teori ini dikenal dengan *theory receptio*, untuk kajian tentang tema ini secara lebih komprehensif, lihat Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 27-49

Islam adalah dengan melihat apakah perilaku adat itu memberikan banyak kemaslahatan atau kemudharatan bagi masyarakat. Jika terdapat banyak unsur kemaslahatan, maka adat dapat dinilai sesuai dengan norma agama dan sebaliknya apabila lebih banyak mudharatnya, maka adat tersebut menjadi tidak berlaku dan tidak dapat diterima.

Atas dasar itu kemudian para ahli hukum Islam memformulasikan kaidah hukum: *al-'adah muhakkamah*. Selanjutnya mereka juga mengkualifikasikan peran adat dengan berbagai macam persyaratan agar tetap valid menjadi bagian dari hukum Islam. Di antara kualifikasi itu adalah: (1) Adat harus secara umum dipraktekkan oleh masyarakat jika memang adat tersebut dikenal secara luas oleh semua anggota lapisan masyarakat; (2) Adat harus berupa suatu kebiasaan yang sedang berjalan dalam masyarakat pada waktu adat akan dijadikan sebagai hukum; (3) Adat harus dipandang tidak sah *ab intio* jika adat tersebut bertentangan dengan ketentuan yang eksplisit dari al-Qur'an dan al-Hadits; dan (4) Dalam hal perselisihan, adat akan dipakai hanya ketika tidak ada penolakan yang eksplisit sifatnya untuk menggunakan adat dari salah satu pihak yang terlibat.<sup>90</sup>

Makna hukum adat pada setiap daerah memiliki keanekaragaman, penafsiran, maupun manifestasi yang berbeda. Ekspresi adat tidak sama dan bervariasi di setiap komunitas kedaerahan Indonesia, seperti diungkap Hefner,<sup>91</sup> istilah adat itu sendiri memiliki berbagai macam makna regional. Dengan demikian, keragaman adat merupakan simbol perbedaan-perbedaan kultural, dan kebanyakan komunitas etnik seringkali memberikan pembenaran kepada adat sebagai identitas khas mereka.

Dialektika adat dan kepercayaan masyarakat Lombok melahirkan sifat-sifat majemuk dari suatu kehidupan sosial di mana warga masyarakat berada dan tunduk pada berbagai aturan pluralistik. Dari heterogenitas budaya ini, melahirkan perilaku masyarakat untuk selalu memberikan hormat kepada warga yang lebih tua, seperti Tuan Guru, para tetua adat, kepada pimpinan agama mereka (*Kyai*) selaku pemegang otoritas tradisional yang berpengaruh. Fenomena itu, membentuk kecenderungan kepada cara pandang masyarakat bahwa dalam

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 25

<sup>91</sup> Robert W. Hefner, *Hindu Javanese: Tengger Tradition and Islam*, (New Jersey: Princeton University Press, 1985), hlm. 33

konteks budaya mereka kedudukan pejabat informal lebih penting dari pejabat formal. Asumsi ini berakar pada keyakinan bahwa orang-orang yang mengemban jabatan-jabatan informal sebagai manifestasi dari pemegang otoritas tradisional adalah keturunan dari leluhur mereka atau orang-orang selaku panutan dalam konteks ibadah. Serangkaian nilai-nilai budaya Sasak Bayan berupa sistem adat dan kepercayaan lokal sekaligus “agama”, yakni “adat” dan “kepercayaan, pada hakekatnya dalam bahasa Koentjaraningrat, sebagaimana dikutip dalam dalam disertasi Idrus Abdullah,<sup>92</sup> merupakan hasil dari cipta, rasa, dan karya, atau merupakan pengalaman masyarakat tersebut, menghasilkan sistem nilai tertentu sebagai budaya bersama milik bersama suku Sasak di wilayah ini, yakni tentang apa yang dianggap buruk dan karenanya harus dihindari dan apa yang dianggap baik harus dipelihara, sekaligus dipertahankan.

Dialektika Islam dengan realitas kehidupan sejatinya merupakan realitas yang terus menerus menyertai agama ini sepanjang sejarahnya. Sejak awal kelahirannya, Islam tumbuh dan berkembang dalam suatu kondisi yang tidak hampa budaya. Realitas kehidupan ini diakui atau tidak memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengantarkan Islam menuju perkembangannya yang aktual sehingga sampai pada suatu peradaban yang mewakili dan diakui oleh dunia.

Aktualisasi Islam dalam lintasan sejarah telah menjadikan Islam tidak dapat dilepaskan dari aspek lokalitas, mulai dari budaya Arab, Persi, Turki, India sampai Melayu. Masing-masing dengan karakteristiknya sendiri, tapi sekaligus mencerminkan nilai-nilai ketauhidan sebagai suatu *unity* sebagai benang merah yang mengikat secara kokoh satu sama lain. Islam sejarah yang beragam tapi satu ini merupakan penerjemahan Islam universal ke dalam realitas kehidupan umat manusia.

Dalam aksinya, Islam pribumi selalu mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal masyarakat, di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa mengubah hukum-hukum inti dalam agama. Sementara ajaran-ajaran inti Islam itu dilahirkan di dalam kerangka untuk memberikan kontrol konstruktif terhadap penyimpangan-penyimpangan lokalitas yang terjadi. Terhadap tradisi lokal yang mempraktekkan pola-pola kehidupan zholim, hegemonik, tidak adil,

---

<sup>92</sup> Idrus Abdullah, ..., hlm. 138

maka Islam pribumi akan melancarkan kritiknya. Sedangkan terhadap tradisi lokal yang memberikan jaminan keadilan, dan kesejahteraan pada lingkungan masyarakatnya, maka Islam pribumi akan bertindak sangat apresiatif. Bahkan, tradisi lokal yang *adi luhung (urf shahih)* dalam pandangan Islam pribumi, memiliki semacam otoritas untuk *mentakhsis* sebuah teks nash. Sebagai ilustrasi, bagaimana sebuah tradisi yang bersifat propan oleh para ulama kemudian diberi semacam wewenang untuk *mentakhsis* sebuah teks yang dipandang berasal dari Tuhan, Disebutkan bahwa tradisi masuk dalam deretan dalil-dalil *istinbath* hukum Islam (*al-Adah Muhakkamah*).

Dalam tataran tersebut menarik juga memeperhatikan sebuah kaidah fiqh bahwa apa yang terhampar dalam tradisi, tidak kalah maknanya dengan apa yang dikemukakan oleh teks; *al-Tsabit bi al-Urf ka al-Tsabit bi al-Nash*. Kaidah ini menggambarkan bahwa betapa para ulama telah memberikan apresiasi yang begitu tinggi terhadap tradisi. Tradisi tidak dipandang sebagai unsur “rendah” yang tak ternilai, melainkan dalam spasi tertentu diperhitungkan sebagai sederajat dengan teks agama sendiri.

Dengan *platform* pemikiran ini, maka wajar jika sejumlah para pakar ushul fiqh menyatakan bahwa mengetahui setting sosial historis Arab dari terbentuknya sebuah ketentuan agama seperti yang terpantul dalam teks suci menjadi sangat urgen dan signifikan. Al-Syathibi dalam *al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syari’ah*, menyatakan bahwa mengetahui kondisi sosial masyarakat Arab, sebagai lokus awal turunnya al-Qur’an dan situasi ketika sebuah ayat turun merupakan salah satu persyaratan yang mesti dimiliki oleh seorang mufassir.<sup>93</sup> Dengan statemen ini sesungguhnya al-Syathibi ingin mengatakan bahwa aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menguakmaksud sebuah teks bukan hanya dari sudut gramatika, melainkan juga harus mencakup pengetahuan tentang keadaan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat tatkala berlangsungnya era pewahyuan al-Qur’an.

Dengan demikian, maka diperlukan sebuah upaya yang lebih dari sekedar mengenali, yaitu kategorisasi mana-mana ayat yang universal dan mana yang lokal-partikular terasa penting. Hal ini juga berlaku terhadap hadits. Terhadap ayat atau hadits khas lokal Arab, sangat tidak

---

<sup>93</sup> Al-Syatibi, *al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syari’ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz II, hlm. 348

bijaksana kalau kita mencangkoknya begitu saja untuk diterapkan di Indonesia.

Para pakar hukum Islam melihat prinsip-prinsip hukum Islam sebagai salah satu hukum Islam yang bersifat sekunder, dalam arti ia diaplikasikan hanya ketika sumber-sumber primer tidak memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang muncul. Para jurus muslim mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang masuknya adat ke dalam hukum Islam, tetapi mereka sampai kepada suatu kesimpulan yang sama, bahwa prinsip-prinsip adat merupakan alat yang efektif untuk membangun hukum. Dalam hal ini, Abu Hanifah memasukkan adat sebagai suatu pondasi dari prinsip *Istihsan*.

Sarakhsi dalam kitab *Mabsuth* mengatakan bahwa Abu Hanifah menginterpretasikan makna aktual dari suatu adat sesuai dengan makna yang secara umum dipakai dalam masyarakat, namun keberlakuan itu ditolak jika bertentangan dengan *nash*.<sup>94</sup> Sementara Imam Malik percaya bahwa aturan-aturan adat dari suatu negeri harus dipertimbangkan dalam memformulasikan suatu ketetapan, walaupun ia memandang adat penduduk Madinah sebagai suatu variabel yang paling otoritatif dalam teori hukumnya. Tidak seperti fuqaha Hanafi dan Maliki yang memandang signifikansi sosial dan politik dari adat dalam proses penciptaan hukum, Imam Syafi'i dan Ahmad Ibn Hanbal tampaknya tidak begitu memperhatikan dalam keputusan mereka. Namun begitu, bukti adanya *Qaul Jadid* Syafi'i yang dikompilasikan setelah ia sampai di Mesir, dan dikontraskan dengan *Qaul Qodim*-nya yang dikompilasikan di Irak, merefleksikan adanya pengaruh dari tradisi adat pada kedua negeri yang berbeda. Sementara penerimaan Ahmad Bin Hambal terhadap hadits *dla'if*, ketika ia mendapatkan hadits tersebut bersesuaian dengan adat setempat,<sup>95</sup> juga memberikan bukti bahwa prinsip adat pada kenyataannya tidak pernah dikesampingkan oleh para para Mujtahid dalam usahanya untuk membangun hukum Islam.

Imam Malik memasukkan adat sebagai pondasi dari doktrin *Maslahah al-Mursalah*. Lebih jauh, ia memandang bahwa praktek adat masyarakat Madinah sebagai konsensus pendapat umum yang

---

<sup>94</sup> Muhammad ibn Ahmad al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, (Kairo: Matba'ah al-SI-Sa'adah, 1331 H), jilid 9, hlm. 17

<sup>95</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 6, (Kairo: Dar al-Manar 1947), hlm. 485



mencukupi untuk digunakan sebagai sumber hukum ketika tidak ada teks yang eksplisit.

Dengan format ini, Islam pribumi tidak perlu memberikan vonis apa pun terhadap sejumlah keyakinan teologis yang menjadi pegangan masyarakat lokal. Oleh karena itu, kata *musyrik, kafir, murtad, muhtadi'* (pelaku *bid'ah*) tidak dikenakan lagi. Kesadaran Islam pribumi ini berdasar pada anggapan bahwa kekaffahan merupakan suatu proses yang tidak pernah benar-benar murni. Sebagai sebuah proses, keberislaman tidak dapat dipaksakan langsung terwujud; dan sebagai sesuatu yang tidak pernah murni keberislaman dipandang sebagai hasil dari pergulatan antara kemestian dan kenyataan ruang dan waktu. Pengakuan terhadap tradisi lokal dan kemungkinan sumbangan yang dapat diberikan tradisi lokal terhadap Islam merupakan kearifan yang ditekankan dalam Islam pribumi. Jika tidak, yang akan terjadi adalah pembasmian antara satu dan yang lain; dan ini pasti kontraproduktif bagi kelangsungan agama itu sendiri.<sup>96</sup>

Di sinilah fungsi dialog dibutuhkan, yaitu sebuah dialog yang tidak hanya memunculkan kelebihan masing-masing sambil merendahkan nilai yang lain, tetapi sebuah dialog yang sanggup menciptakan ruang heteroglosia, bersuaramajemuk. Dialog bukan hanya percakapan bahkan juga pertemuan dua pikiran dan hati mengenai persoalan bersama, dengan komitmen bersama yang tujuannya agar setiap partisipan dapat belajar dari yang lain, sehingga dapat berubah dan berkembang. “Berubah” artinya dialog dilakukan secara terbuka, jujur dan simpatik dapat membawa pada kesepahaman (*mutual understanding*), sehingga segala prasangka, stereotip, dan celaan dapat dieliminir. Selanjutnya dikatakan “tumbuh”, karena dialog mengantarkan setiap partisipan memperoleh informasi, klarifikasi dan semacamnya secara berimbang serta dapat mendiskusikannya secara terbuka dan tulus. Dialog merupakan pangkal pencerahan nurani dan akal pikiran (*tanwir al-qulub wa al-uqul*) menuju kematangan cara beragama yang menghargai kelainan (*the otherness*)

Dengan demikian, paradigma dan sistem nilai *sawa'* adalah menyangkut cara manusia melakukan perjumpaan dengan dan memahami diri sendiri dan dunia lain (*the others*) pada tingkat terdalam

---

<sup>96</sup> M. Imdadun Rahmat, “Islam Pribumi: Mencari Wajah Islam Indonesia” dalam *Tashwirul Afkar*, edisi No. 14 Th. 2003

(*from within*), membuka kemungkinan-kemungkinan untuk menggalai dan menggapai selaksa makna fundamental secara individual dan kolektif dengan berbagai dimensinya.<sup>97</sup> Berdasarkan elaborasi ini, maka dalam konteks ini, pribumisasi Islam diharapkan mampu melakukan secara simultan langkah invensi dan inovasi sebagai upaya kreatif untuk menemukan, merekonsiliasi, dan mengkomunikasikan serta menghasilkan konstruksi-konstruksi baru.<sup>98</sup>

Konstruksi tersebut tidak harus merupakan pembaruan secara total atau kembali ke tradisi leluhur masa lalu secara total pula, namun pembaruan yang dimaksud di sini adalah pembaruan terbatas sesuai dengan prinsip *al-'AdahMuhakkamah*. Jadi, sebuah invensi dalam konteks pribumisasi Islam tidak dimaksudkan menemukan tradisi atau autentisitas secara literal, melainkan bagaimana tradisi-tradisi lokal itu menjadi sesuatu yang dapat berdialektika dan dimodifikasi ulang sesuai dengan konteks dimensi ruang dan waktu sesuai dengan kaidah: *Taghayyur al-Ahkâmbial-Taghayyur al-Azminah wa al-Amkinah wa al-Ahwâl*.

Pribumisasi Islam, dengan demikian merupakan proses yang tidak pernah berhenti mengupayakan berkurangnya ketegangan antara norma agama dan manifestasi budaya.

---

<sup>97</sup> Zakiyuddin Baidhawiy, *Membangun Sikap Multikulturalis Perspektif Teologi Islam*, Halqah Tarjih: Menuju Muslim Berwawasan Multikultural.

<sup>98</sup> Zainul Milal Bizawie, "Dialektika Tradisi Kultural: Pijakan Historis dan Antropologis Pribumisasi Islam", dalam *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 14 tahun 2003



# BAB II

## PAHAM KEAGAMAAN NAHDLATUL ULAMA

### A. Sumber Hukum Islam

KATA SUMBER DALAM BAHASA INDONESIA berarti tempat keluar mata air, mata air, sumur, bahan yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya, atau segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai hasil dan asal dari sesuatu (yang mempunyai makna banyak).<sup>99</sup> Hal ini berarti sumber adalah sesuatu yang menjadi asal, atau hal yang menjadi sandaran atas sesuatu.

Dalam bahasa Arab istilah sumber hukum Islam mempunyai beberapa penyebutan, diantaranya adalah *أصول الأحكام* *ushul al-ahkam* (dasar hukum), *مصادر الأحكام* *mashadir al-ahkam* (sumber-sumber hukum) dan *دليل* *dalil*, ketiganya memiliki makna yang hampir sama (*muradif*). Kata “Sumber-sumber hukum Islam” merupakan terjemah dari lafadz *مصادر الأحكام* (*mashadir al-ahkam*). Istilah ini kurang populer di kalangan ulama fiqh klasik, mereka lebih sering menggunakan istilah *الأدلة الشرعية* *al-adilah asy-syar’iyyah*. Dengan demikian, kata «sumber hukum» hanya berlaku pada al-Qur’an dan al-Sunnah, sedangkan «dalil-dalil hukum» adalah merupakan alat (metode) dalam menggali hukum-hukum dari kedua sumber hukum Islam.<sup>100</sup>

Secara etimologi kata *مصدر* “*mashdar*” adalah bentuk *mufrad*, dalam bentuk *jama’* *المصادر* (*al-mashadir*) berarti wadah yang dari padanya digali norma-norma hukum tertentu, dikatakan *المصادر*

<sup>99</sup> Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Reality Publisier, hlm. 508.

<sup>100</sup> Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 82.

الشرعية yaitu rujukan utama dalam menetapkan hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah.<sup>101</sup> Sedangkan الدليل *al-dalil* merupakan petunjuk yang membawa kita menemukan hukum tertentu. Kata *dalil* adalah kata dalam bentuk tunggal (*mufrad*) الدليل (*al-dalil*) bentuk jamaknya adalah الأدلة (*al-adilah*). Dalil menurut bahasa adalah :

الهادي إلى أي شيء حسي أو معنوي

Petunjuk jalan kepada segala sesuatu baik yang sifatnya real/nyata atau bersifat maknawi/abstrak.<sup>102</sup>

Hamd bin Hamdi Al-Sha'idy menyatakan bahwa الدليل *al-dalil* secara bahasa bermakna المرشد *al-mursyid* (petunjuk).<sup>103</sup> Sedangkan secara istilah الدليل *al-dalil* bermakna :

ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم الشرع عملي على سبيل القطع  
او الظن.

“Setiap sesuatu yang menunjukkan kepada kebenaran pada hukum *syar'i* yang bersifat *mali* dengan mengambil sandaran yang *qath'i* ataupun yang *zhanny*.”<sup>104</sup>

Sebagian ulama *ushul* mendefinisikan *dalil* dengan “Setiap sesuatu yang disandarkan padanya hukum *syar'i* dengan menyandarkannya kepada dalil yang *qath'i*”, adapun jika sandaran tersebut bersifat *dzanny*, maka hanya sebuah isyarat saja bukan dalil. Nasrun Haroen mengatakan “Dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan sumber adalah *masdar*, yaitu asal dari segala sesuatu dan tempat yang merujuk segala sesuatu.”<sup>105</sup>

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa sumber hukum Islam adalah setiap *nash* atau pedoman yang digunakan dalam menyandarkan segala bentuk amalan-amalan atau suatu hukum dalam Islam. Telah

<sup>101</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Prenada, 202), hlm. 15.

<sup>102</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Ilm) hlm. 19.

<sup>103</sup> Hamd bin Hamdi As-Shaidy, *Muwazanah Baina Dalalah Al-nash wa al-Qiyas al-Ushuly wa Atsaru dzalika 'ala Furu' al-Fiqhiyah*, (Mesir : Dar Al-Harir li Thiba'ah, 1993), hlm. 17.

<sup>104</sup> Khalaf, *Ilmu Ushul..*, hlm. 19.

<sup>105</sup> Haroen, *Ushul..*, hlm. 15.

menjadi kesepakatan (*ijma'*) para ulama dan seluruh kaum muslimin bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits, hal ini sebagaimana yang termaktub dalam QS Al-Nisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'dy menyatakan bahwa dalam ayat ini Allah Ta'alamemerintahkan untuk taat kepadaNya, lalu kepada Rasul-Nya dan *ulil amri*. Jika terjadi permasalahan pada suatu masalah baik dalam masalah *ushul* maupun *furu'* hendaknya dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya yaitu kepada Kitabullah (al-Qur'an) dan al-Sunnah (al-Hadits), Pada keduanya terdapat pemutus dari setiap masalah *khilafiyah*. Karena Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya adalah pondasi bagi bangunan hukum Islam, maka tidak akan tegak iman kecuali dengan keduanya dan mengembalikan masalah kepada keduanya adalah syarat iman.<sup>106</sup>

Sedangkan hadist Nabi yang menunjukkan bahwa al-Qur'an dan al-Hadits adalah sumber hukum Islam adalah riwayat yang dibawakan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud :

عَنِ الْمَقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

<sup>106</sup> Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'dy, *Taisir Karimi Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan*, (Kuwait: Jum'iyah Ihya al-Turats al-Islami, 2003), hlm. 228.

Artinya: “Dari Miqdam bin Ma’di Kariba Al-Kindy dia berkata bahwa Rasulullah bersabda “Sesungguhnya telah diberikan kepadaku Al-Kitab (Al-Qur’an) dan yang semisalnya bersamanya (Al-Sunnah) ketahuilah sungguh telah diberikan kepadaku Al-Kitab (Al-Qur’an) dan yang semisalnya bersamanya (Al-Sunnah)”<sup>107</sup>.

Dalam hadits ini Rasulullah menyebutkan bahwa beliau diberikan al-Qur’an sebagai pedoman hidup dan sumber hukum bagi setiap permasalahan yang ada. Selain itu beliau juga diberikan sesuatu yang serupa dengan al-Qur’an yaitu al-Hadits sebagai pelengkapannya.

Hadits tersebut menunjukkan kedudukan hadits Nabi sebagai sumber hukum Islam, keduanya merupakan wahyu yang turun sebagai pedoman bagi setiap permasalahan yang muncul. Al-Baghawiy membawa sebuah riwayat yang derajatnya diperselisihkan oleh para ulama dan ada kecacatan padanya, yaitu riwayat dari Mu’adz bin Jabal bahwasanya Rasulullah pernah mengutusnyanya ke Yaman, maka beliau bersabda :

حديث معاذ لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تقضي قال  
بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد  
رأبي قال الحمد لله الذي وفق رسول رسوله

Artinya: “Bagaimana engkau memutuskan suatu masalah yang engkau hadapi?”, maka Muadz menjawab “Aku akan berhukum dengan Kitabullah“, “Jika tidak didapati hukumnya dalam Al-Qur’an?”, Muadz menjawab “Aku akan mengambil Sunnah Rasulullah (Al-Hadits)”, “Apabila tidak juga didapati dalam sunnah rasulullah?”, Muadz menjawab lagi “Aku akan berjihad dengan pemikiranku dan aku tidak akan membiarkannya” Kemudian Rasulullah menepuk dadanya dan mengucapkan “Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik utusan rasulNya dengan segala yang diridhainya”(HR Abu Daud, Thirmidzi, dan Ahmad)

Berdasarkan hal ini, makadapat dirumuskan tingkatan pengambilan sumber hukum dalam hadits ini adalah benar, yaitu al-Qur’an dan al-Sunnah/al-Hadits. Jika tidak ada nash *sharih* dalam al-Qur’an, maka

---

<sup>107</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Hadits no. 16546.

dapat beralih ke al-Hadits, hal ini karena fungsi dari hadits Nabi adalah merinci hukum-hukum yang masih *mujmal*, men-*taqyid* yang mutlak dan mengkhususkan yang umum dari al-Qur'an.<sup>108</sup> Dalam konteks ini tata urutan dalam pengambilan sebuah dalil yang benar adalah setelah diteliti tidak ada nash *qath'i* dari al-Qur'an dan al-Sunnah, maka seorang *mujtahid* diperkenankan untuk berijtihad. Hal ini sebagaimana dikonfirmasi dalam riwayat al-Baghawy dari Maimun bin Mahran, ia berkata :

كان أبو بكر إذا ورد عليه الخضم نظر في كتاب الله فان وجد فيه ما يقضي بينهم قضي به وان لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضي بها فان أعياه خرج فسأل المسلمين وقال أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي في ذلك بقضاء فرمما اجتمع إليه نفر كلهم بذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء فيقول أبو بكر الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ علينا علم نبينا فإن أعياه أن يجد فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم فاذا اجتمع رأيهم على أمر قضي به

*Artinya: "Abu Bakar apabila akan memutuskan sesuatu maka dia melihat kepada Al-Qur'an, apabila terdapat padanya maka dia berhukum dengannya, apabila tidak ada dalam Al-Qur'an maka akan diambil dari Al-Sunnah dan akan berhukum dengannya, maka jika tidak terdapat juga dalam Al-Sunnah maka dia akan mengumpulkan para sahabat Nabi dan bermusyawarah dengan mereka, jika mereka sepakat maka akan diambil kesepakatan itu sebagai pemutus suatu masalah".*<sup>109</sup>

Hal yang sama juga dilakukan oleh Umar bin Khattab, para sahabat Nabi lainnya, dan demikian juga praktekpara pemimpin kaum muslimin.

<sup>108</sup> Al-Sha'idy, *Muwazanah*..hlm. 58.

<sup>109</sup> Ahmad bin Abdurrahim Waliyullah Ad-Dahlawy, *Al-Inshaf Fi Bayan Asbab Al-Ikhtilaf*, (Beirut: Dar An-Nafais 1404 H.), hlm. 51.



Tidak ada yang menyelisih tentang hal ini.<sup>110</sup> Al-Qur'an dan al-Sunnah adalah pedoman pokok dalam menyelesaikan hukum-hukum yang dihadapi oleh manusia, hal ini seperti wasiat Nabi *Shalallahu Alaihi Wa Salam* dalam sebuah hadits:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

Artinya: “Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam* bersabda “Telah aku tinggalkan dua perkara, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh kepada keduanya yaitu Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya”. (HR. Malik no. 1395).

Dengan demikian, dalam konteks ini, *mashadir al-Ahkam* dalam Islam itu hanyalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Pengertian ini didukung oleh paham bahwa Allah SWT sebagai *al-Syari'* (pencipta hukum Islam). Para *ushuliyun* juga sepakat menyatakan bahwa hukum Islam itu seluruhnya berasal dari Allah SWT. Sementara Rasulullah hanyalah berfungsi sebagai penegas dan penjelas (*al-muakkid wa al-mubayyin*) hukum-hukum Allah melalui wahyu-Nya, betapapun Rasulullah saw. menetapkan hukum melalui sunnahnya ketika wahyu tidak menjelaskan, namun ketetapan Rasulullah saw ini juga tidak lepas dari bimbingan Allah. Berdasarkan pemahaman ini, maka para ulama *ushul fiqh* klasik dan kontemporer lebih cenderung mengatakan bahwa sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an dan al-Sunnah.

Selanjutnya pengertian dalil mengandung pemahaman yang dapat dijadikan sebagai basis argumentasi (petunjuk) dalam menetapkan hukum syara'. Dalam konteks ini, maka al-Qur'an dan al-Sunnah disamping berfungsi sebagai sumber hukum Islam di satu sisi, di sisi lain juga sebagai dalil untuk argumentasi penetapan hukum Islam. Sedangkan dalil lain, seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah al-mursalah* dan sebagainya tidak dapat dikategorikan sebagai sumber hukum Islam, karena dalil-dalil ini hanya bersifat menyingkap dan memunculkan hukum (*al-kasyf wa al-izhar li al-ahkam*) yang ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, sehingga para ulama *ushul* sering menyebutnya sebagai *thuruq istinbâth al-ahkam* (metode dalam menetapkan hukum).

<sup>110</sup> Khallaf, *Ilmu Ushul...*, hlm. 20.

Disamping itu, para ulama *ushul* juga sering mengidentifikasi sumber atau dalil *syara'* ke dalam katagori dalil-dalil hukum yang disepakati (*adillah al-ahkam al-muttafaq 'alaih*) dan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan (*adillah al-ahkam al-mukhtalaf 'alaih*). Katagori pertama terdiri dari al-Qur'an, as-Sunnah, ijma' dan qiyas. Sedangkan katagori kedua terdiri dari *istihsan, istishab, maslahah al-mursalah, al-urf, sadd al-zari'ah, mazhab al-shahabi, syar'u man qablana*.<sup>111</sup>

Penetapan ijma' dan qiyas yang disepakati kehujjahannya lebih didasarkan kepada statusnya sebagai dalil di kalangan *Ahlus Sunnah*. Para ulama *Ahlus Sunnah* sepakat menyatakan bahwa ijma' dan qiyas dapat dijadikan sebagai dalil *syara'* sekalipun keberadaanya sebagai dalil tidak bisa berdiri sendiri sebagaimana al-Qur'an dan al-Sunnah. Berdasarkan keterangan tentang sumber dan dalil hukum di atas, maka yang termasuk dalam katagori sumber dan dalil hukum yang disepakati oleh mayoritas ulama *ushul*, yaitu: al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', dan qiyas.

## B. Landasan Dasar Keagamaan Nahdlatul Ulama

Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama mendasarkan ajarannya pada sumber hukum Islam otoritatif. Sumber hukum Islam ini dipercaya memiliki kebenaran mutlak sebagai panduan dalam memahami ajaran Islam sesuai tingkatannya, yaitu sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'an<sup>112</sup>

Al-Qur'an merupakan sumber utama (*mashadir al-ahkam*) dari ajaran Islam. Ibarat mata air yang tidak pernah kering, al-Qur'an menjadi petunjuk dan sumber inspirasi bagi manusia dalam segala aspek kehidupan mulai dari aspek *'aqzdah, 'ubûdiah, mu'âmalah, jinâyah*, sampai dengan aspek *siyâsah*. Secara teologis-normatif, al-Quran akan senantiasa menjadi rujukan bagi umat Islam dalam menjalani

<sup>111</sup> Abd al-Wahab al-Khalaf, *'ilmu Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Ilm, 1968), hal.21

<sup>112</sup> Al-Qur'an adalah *Kalamullah* yang diturunkan kepada Rasulullah, Muhammad saw., dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir yang ditulis dalam mushhaf, membacanya merupakan ibadah, dimulai dari surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat al-Nas:

كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي المنقول الينا بالتواتر , المكتوب بالمصاحف ,  
المتعبد بتلاوته المبدوء بالفاتحة والمختوم بسورة الناس

kehidupannya. Hal inilah yang mendasari pernyataan, bahwa Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan manusia secara komprehensif, integral dan holistik.

## 2. Al-Hadits<sup>113</sup>

Al-Hadits merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Hal ini lebih disebabkan karena Nabi mempunyai kewenangan dan otoritas penuh sebagai sumber pertama dalam pembentukan hukum Islam (*mashdar al-awwal fi al-tasyri'*), bahkan melekat pada diri beliau legitimasi teologis untuk melakukan hal itu. Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (۳) إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (۴) [النجم: ۳، ۴]

Artinya: "Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya (3) Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)". (Q.S. An-Najm (53): 3-4).

Ayat al-Qur'an ini menggambarkan bahwa Nabi Muhammad saw. adalah satu-satunya legislator dalam memutuskan suatu hukum. Sehingga tidak ada kompetensi bagi orang lain untuk memproduksi hukum. Sementara generasi-generasi setelah Nabi Muhammad saw hanya berfungsi untuk mengembangkan konstruksi dasar hukum yang telah dibangun sebelumnya.

## 3. Ijma'<sup>114</sup>

*Ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Islam atas hukum *syara'* (mengenai suatu masalah) pada suatu masa sesudah Nabi wafat. Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa *ijma'* adalah bersepakatnya seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Nabi pada hukum *syar'i* yang mereka hadapi.<sup>115</sup> Ada perbedaan di kalangan ulama berkaitan dengan *ijma'* ini. Menurut Imam Malik bahwa *ijma'* yang dapat diakui adalah *ijma'* fuqaha ulama Madinah, sedangkan menurut Imam Ahmad

<sup>113</sup> Hadits adalah setiap yang datang dari Nabi *Shalallahu alaihi wasalam* baik berupa perkataan, perbuatan atau *taqrir* (sesuatu yang didiamkannya):

ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير

<sup>114</sup> *Ijma'* adalah kesepakatan seluruh mujtahid muslim pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah saw. atas suatu Hukum *Syara'* pada peristiwa yang terjadi":

اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم شرعي في واقعة

<sup>115</sup> Khalaf, *Ilmu Ushul* .. hlm. 40.

dan Madzhab Dzahiry yang diakui terjadi hanyalah *ijma'* shahabat.<sup>116</sup> Terlepas dari perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa *ijma'* adalah kesepakatan para ulama mujtahidin setelah wafatnya Nabi sampai akhir zaman atas suatu masalah-masalah baru yang tidak ditemukan dalilnya secara *sharih*.

#### 4. Qiyas<sup>117</sup>

Qiyas yaitu, sebuah landasan hukum yang diperoleh melalui proses perbandingan hukum terhadap persoalan yang belum jelas hukumnya dan yang sudah jelas hukumnya yang hasilnya dijadikan sebagai ketetapan hukum, di mana proses perbandingannya berdasarkan ketentuan-ketentuan kaidah ushul fiqh yang disepakati oleh ulama dan dibenarkan secara syara'.

Dengan pengertian seperti ini, maka ulama ushul fiqh sepakat bahwa proses penetapan hukum melalui metode qiyas bukanlah menetapkan hukum dari awal (*isbat al-hukm wa insya'uh*), melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum (*al-kasyf wal-izhhar lil-hukm*) yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Penyingkapan dan penjelasan ini dilakukan melalui pembahasan mendalam dan teliti terhadap 'illat dari suatu kasus yang sedang dihadapi. Apabila illat-nya sama dengan 'illat hukum yang disebutkan dalam nash, maka hukum terhadap kasus yang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan *nashnya* tersebut.

### C. Paham Keagamaan Nahdlatul Ulama

Dalam memahami dan menafsirkan Islam dari sumbernya tersebut, Nahdlatul Ulama mengikuti paham *Ahlussunnah Wal Jama'ah* dengan menggunakan pendekatan mazhab. Pada bidang aqidah mengikuti ajaran yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al Maturidi, Pada ranah fiqh mengikuti pendekatan salah satu dari empat imam mazhab, yaitu: Imam Abu Hanifah, Imam Maliki bin Anas, Imam Muhammad Idris al-Syafi'i, dan Imam Ahmad ibnu Hanbal.

<sup>116</sup> Masjufuk Zuhdi, *Pengantar Ilmu Syari'ah*, hlm. 65.

<sup>117</sup> Qiyas adalah menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan illat hukum antara keduanya:

الحاق امر غير منصوص على حكمه الشرعي بامر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم

Sedangkan dalam tasawuf mengikuti ajaran Junaidi al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.<sup>118</sup>

Dalam perspektif Nahdlatul Ulama, paham *Ahlussunnah wal Jama'ah* merupakan sistem ajaran Islam yang diajarkan dan dipraktikkan Nabi Muhammad SAW., dan para Sahabatnya. Untuk merinci lebih jelas rumusan Aswaja, ulama NU menempatkan aqidah sebagai sistem kepercayaan, syari'ah/fiqh sebagai norma yang mengatur kehidupan, serta tasawuf sebagai tuntunan dalam membina akhlak dan mencerahkan ruhani. Ketiga ajaran Islam ini bukan sebagai ajaran yang terpisah satu sama lain, melainkan sebagai tiga aspek yang menyatu sebagai ajaran Islam.

Dengan demikian paham *Ahlus Sunnah Wa al-Jama'ah* Nahdlatul Ulama mencakup aspek aqidah, syari'ah dan akhlaq. Ketiganya merupakan satu kesatuan ajaran yang mencakup seluruh aspek prinsip keagamaan Islam. *Ahlus Sunnah Wa al-Jama'ah* didasarkan pada *manhaj* (pola pemikiran) Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam bidang aqidah, dalam bidang fiqh menganut empat mazhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) dalam bidang tasawuf menganut *manhaj* Imam al-Ghazali dan Imam Abu al-Qasim al-Junaidi al-Baghdadi, dan dalam bidang siyasah mengikuti pendapat Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad al-Mawardi.<sup>119</sup>

#### **D. Prinsip Nilai Ahlussunnah wal Jama'ah Nahdlatul Ulama**

*Ahlussunnah wal Jama'ah* merupakan paham ajaran Islam yang mengikuti semua yang telah dicontohkan Nabi Muhammad Saw. dan para sahabatnya. Dengan demikian, maka tingkat kebenaran dan orisinalitas ajaran agama Islam akan terjaga kemurniannya melalui sanad yang terus bersambung antara masa Rasulullah Saw., masa Sahabat dan masa Tabi'in, Tabi'it Tabi'in.

Pendiri madzhab teologi *Ahlussunnah wal Jama'ah* adalah Abu Hasan 'Ali bin Isma'il al-'Asy'ari (lahir di Bashrah 260 H/874 M dan wafat 324H/936 M) yang bermazhab Syafi'idan Abu Manshur Muhammad

---

<sup>118</sup> Djohan Effendi, *Pembauran Tanpa Membongkar Tradisi, Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur*, Jakarta; PT Kompas Media Nusantara, 2010, hlm. 103-104.

<sup>119</sup> Khittah NU, Keputusan Mukamar XXVII NU No 02/MN-27/1984.

bin Muhammad bin Mahmud al-Maturidi (lahir di daerah Maturid abad ke 9 M dan wafat 944 M) dari madzhab Hanafi.<sup>120</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, konsep *Ahlussunnah wal Jama'ah* tersebut mengalami proses pergulatan dan penafsiran yang intensif di kalangan ulama NU. Sejak ditahbiskan sebagai paham keagamaan jama'ah NU, *Ahlussunnah wal Jama'ah* mengalami kontekstualisasi yang beragam. Meskipun demikian, kontekstualisasinya tidak menghilangkan makna dasarnya sebagai paham atau ajaran Islam yang pernah diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah Saw. bersama para sahabatnya.

Titik tolak dari paham *Ahlussunnah wal Jama'ah* terletak pada prinsip dasar ajaran Islam yang bersumber kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Ada beberapa tokoh-tokoh NU yang menafsirkan paham *Ahlussunnah wal Jama'ah*, di antaranya adalah KH. Bisri Mustofa, KH. Achmad Siddiq, KH. Saefuddin Zuhri, KH. Dawam Anwar, KH. Said Aqil Siradj, KH. Sahal Mahfuzh, KH. Wahid Zaini, KH. Muchith Muzadi, dan KH. Tolchah Hasan.

Pendapat para ulama NU tentang *Ahlussunnah wal Jama'ah* dimaknai dalam dua pengertian, yaitu: *Pertama*, *Ahlussunnah Wal Jama'ah* sudah ada sejak zaman sahabat Nabi dan Tabi'in yang biasanya disebut generasi salaf. Pendapat ini didasarkan pada pengertian *Ahlussunnah Wal Jama'ah*, yakni mereka yang selalu mengikuti sunnah Nabi Saw. dan para sahabatnya. *Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa *Ahlussunnah Wal Jama'ah* adalah paham keagamaan yang baru ada setelah munculnya rumusan teologi Asy'ari dan Maturidi dalam bidang teologi, rumusan fihiyyah mazhab empat dalam bidang fikih serta rumusan tashawuf Junayd al-Bagdadi dalam bidang tashawuf.<sup>121</sup>

Pengertian pertama sejalan dengan sabda Nabi Saw.:

عليكم بستي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين

“Hendaklah kamu sekalian berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah al-khulafâ al-râsyidin yang mendapat petunjuk” (HR. Ahmad).

---

<sup>120</sup> Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradisionalis: Jawaban atas Pelbagai Persoalan Keagamaan Seharian-hari*, (Surabaya: Khalista, 2004), Cet. VI, hlm. 16 dan 21.

<sup>121</sup> Tashwirul Afkar, Edisi No 1 Mei-Juni 1997, hlm. 3

Dalam hadits tersebut, yang dimaksud bukan sahabat yang tergolong al-khulafā' al-râsyidûn saja, tetapi juga sahabat-sahabat lain, yang memiliki kedudukan yang penting dalam pengamalan dan penyebaran Islam. Pada kesempatan lain, Nabi Muhammad SAW. bersabda:

أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

“Sahabat-sahabatku seperti bintang (di atas langit) kepada siapa saja di antara kamu mengikutinya, maka kamu telah mendapat petunjuk”. (HR. al-Baihaqi).

Sesudah generasi tersebut, yang meneruskan ajaran *Ahlussunnah wal Jama'ah* adalah para tabi'in (pengikut sahabat), sesudah itu dilanjutkan oleh tabi'it-tabi'in (generasi sesudah tabi'in) dan demikian seterusnya yang kemudian dikenal sebagai penerus Nabi, yaitu ulama.

Nabi Saw. bersabda:

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

“Ulama adalah pewaris para nabi.” (HR Al-Tirmidzi dari Abu Al-Darda Radhiallahu ‘anhu),

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ فَقَدْ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ

“Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu maka barangsiapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak.” (HR. al-Turmidzi).<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Hadits ini diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan beliau no. 2681, Ahmad di dalam Musnad-nya (5/169), Ad-Darimi di dalam Sunan-nya (1/98), Abu Dawud no. 3641, Ibnu Majah di dalam Muqaddimah-nya dan dishahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan: “Haditsnya shahih.” Lihat kitab Shahih Sunan Abu Dawud no. 3096, Shahih Sunan At-Tirmidzi no. 2159, Shahih Sunan Ibnu Majah no. 182, dan Shahih At-Targhib, 1/33/68). Lihat <https://qurandansunnah.wordpress.com/2009/07/07/ulama-adalah-pewaris-nabi/> diakses tanggal 11 November 2017

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa paham *Ahlussunnah wal jama'ah*, sesungguhnya adalah ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan generasi berikutnya.

Pengertian ini didukung oleh KH. Achmad Siddiq yang mengatakan bahwa *Ahlussunnah wal Jama'ah* adalah pengikut dari garis perjalanan Rasulullah Saw. dan para pengikutnya sebagai hasil permufakatan golongan terbesar umat Islam.<sup>123</sup> Pengertian ini dipertegas lagi oleh KH. Saefudin Zuhri yang mengatakan bahwa *Ahlussunnah wal Jama'ah* adalah segolongan pengikut sunnah Rasulullah Saw. yang di dalam melaksanakan ajaran-ajarannya berjalan di atas garis yang dipraktekkan oleh jama'ah (sahabat Nabi). Atau dengan kata lain, golongan yang menyatukan dirinya dengan para sahabat di dalam mempraktekkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad Saw., yang meliputi akidah, fikih, akhlaq, dan jihad.<sup>124</sup>

Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya, makna *Ahlussunnah wal Jama'ah* di lingkungan NU lebih menyempit lagi, yakni kelompok atau orang-orang yang mengikuti para imam mazhab, seperti Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali dalam bidang fikih; mengikuti Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dalam bidang tauhid, dan Junaid al-Bagdadi dan al-Ghazali dalam bidang tashawuf.<sup>125</sup>

Pengertian ini dimaksudkan untuk melestarikan, mempertahankan, mengamalkan dan mengembangkan paham *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Hal ini bukan berarti NU menyalahkan mazhab-mazhab *mu'tabar* lainnya, melainkan NU berpendirian bahwa dengan mengikuti mazhab yang jelas metode dan produknya, maka jama'ah dan warga NU akan lebih terjamin berada di jalan yang lurus. Menurut NU, sistem bermazhab adalah sistem yang terbaik untuk melestarikan, mempertahankan, mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam, supaya tetap tergolong *Ahlussunnah wal Jama'ah*.<sup>126</sup>

---

<sup>123</sup> Hasyim Latif, *Ahlussunnah Waljama'ah*, diterbitkan Majelis Ta'if Wa Tarjamah LP Maarif Jawa Timur, 1979, hlm 3.

<sup>124</sup> KH. Saefudin Zuhri, *Menghidupkan Nilai-Nilai Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Praktek*, IPNU Jakarta, 1976, hlm. 7. Lihat pula KH. M. Tolhah Hasan, *Ahlussunnah Waljama'ah, Pengertian dan Aktualisasinya*, dalam Imam Baihaqi (ed), *Kontroversi Ahlussunnah wal Jama'ah: Aula Perdebatan dan Reinterpretasi*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 86-87.

<sup>125</sup> A. Wahid Zaini, *Dunia Pemikiran Kaum Santri*, (Yogyakarta: LKPSM, 1999, hlm. 51.

<sup>126</sup> KH. A. Muchith Muzadi, *NU dan Fiqih Kontekstual*, (Yogyakarta: LKPSM,1995), hlm. 29.



Berbeda dengan dua pengertian tersebut, KH. Said Agil Siradj memberikan perspektif lain. Menurutnya, Ahlussunnah wal Jama'ah adalah orang-orang yang memiliki metode berfikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan yang berlandaskan atas dasar-dasar moderasi, menjaga keseimbangan, dan toleransi. Baginya, *Ahlussunnah wal Jama'ah* harus diletakkan secara proporsional, yakni *Ahlussunnah wal Jama'ah* bukan sebagai mazhab, melainkan hanyalah sebuah *manhaj al-fikr* (cara berpikir tertentu) yang digariskan oleh sahabat dan para muridnya, yaitu generasi tabi'in yang memiliki intelektualitas tinggi dan relatif netral dalam menyikapi situasi politik ketika itu. Meskipun demikian, hal itu bukan berarti bahwa *Ahlussunnah wal Jama'ah* sebagai *manhaj al-fikr* adalah produk yang bebas dari realitas sosio-kultural dan sosio-politik yang melingkupinya.<sup>127</sup>

Berdasarkan elaborasi ini, dapat dirumuskan bahwa landasan Islam bagi Nahdlatul ulama adalah al-Qur'an, al-Sunnah (perkataan, perbuatan dan taqzir/ketetapan) Nabi Muhammad Saw. sebagaimana telah dilakukan bersama para sahabatnya dan sunnah *al-khulafâ' al-rasyidîn*: Abu Bakr al-Shiddiq, 'Umar ibn al-Khaththab, 'Utsman ibn 'Affan dan 'Ali ibn Abi Thalib. Dengan landasan ini, maka dalam perspektif NU, *Ahlussunnah wal Jama'ah* dipahami sebagai 'para pengikut sunnah Nabi dan ijma' para ulama'. NU menerima ijtihad dalam konteks bagaimana ijtihad itu dapat dimengerti oleh umat. Ulama pendiri NU menyadari bahwa tidak seluruh umat Islam dapat memahami dan menafsirkan ayat al-Qur'an maupun hadits dengan baik, maka dalam konteks inilah peran ulama yang *sanad* (mata rantai) keilmuannya bersambung sampai ke Rasulullah Saw., diperlukan untuk mempermudah pemahaman itu.

Dengan demikian, paling tidak ada tiga ciri utama *Ahlussunnah wa al-Jama'ah* yang dianut dan diyakini oleh Nahdlatul Ulama, yaitu: *Pertama*, adanya keseimbangan antara dalil *aqliy* (rasio) dan dalil *naqliy* (al-Qur'an dan al-Hadits), dengan penekanan dalil *aqliy* ditempatkan di bawah dalil *naqliy*. *Kedua*, berusaha sekuat tenaga memurnikan akidah dari segala campuran akidah di luar Islam. *Ketiga*, tidak mudah menjatuhkan vonis musyrik, kufur dan sebagainya atas seseorang yang karena sesuatu sebab belum dapat memurnikan akidahnya.

---

<sup>127</sup> Said Aqil Siradj, *Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 1999)

Dalam konteks tashawuf, Nahdlatul Ulama berusaha mengimplementasikan *zmân*, *islâm* dan *ihsân* secara sinergis, integral dan berkesinambungan. Berlandaskan tashawuf yang dianut, NU dapat menerima hal-hal baru yang bersifat lokal sepanjang dapat meningkatkan intensitas keberagaman. Dengan tashawuf yang dianut, NU juga berusaha menjaga setiap perkembangan agar tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Lebih jauh paham *Ahlussunnah wal Jama'ah* memiliki beberapa prinsip nilai yang berlaku di kalangan Nahdlatul Ulama, yaitu: *tawassuth*, *tawazun*, *tasamuh*, dan *i'tidal* yang dijadikan pedoman dalam bertindak di segala aspek kehidupan. Adapun perinciannya sebagai berikut:<sup>128</sup>

*Pertama, Tawassuth*, yaitu jalan tengah, tidak ekstrem kanan atau kiri. Dalam paham *Ahlussunnah wal Jama'ah*, baik di bidang hukum (*syari'ah*) bidang akidah, maupun bidang akhlak, selalu dikedepankan prinsip tengah-tengah. Juga di bidang kemasyarakatan selalu menempatkan diri pada prinsip hidup menjunjung tinggi keharusan berlaku adil, lurus di tengah-tengah kehidupan bersama, sehingga ia menjadi panutan dan menghindari segala bentuk pendekatan ekstrem. dengan sikap dan pendirian. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya: “Dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian (umat Islam) umat pertengahan (adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) manusia umumnya dan supaya Allah SWT menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) kamu sekalian”. (QS al-Baqarah: 143).

Sikap *tawassuth* atau moderasi *Ahlussunnah Wal Jama'ah* tercermin pada metode pengambilan hukum (*istinbath*) yang tidak semata-mata menggunakan *nash*, namun juga memperhatikan posisi akal. Begitu pula dalam wacana berfikir selalu menjembatani antara wahyu dengan rasio (*ra'yu*). Metode (*manhaj*) seperti inilah yang diimplementasikan oleh imam mazhab empat serta generasi lapis berikutnya dalam

<sup>128</sup> Tim Penyusun, *Aswaja An-Nahdliyah; Ajaran Ahlussunnah wa al-Jama'ah yang berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2009), Cet. 3,

merumuskan hukum-hukum fiqh sebagai pranata sosial.<sup>129</sup> Moderasi merupakan satu ciri yang menengahi antara dua pikiran yang ekstrem; antara Qadariyah (*freewill*) dan Jabariyah (*fatalism*), ortodoks Salaf dan rasionalisme Mu'tazilah, dan antara sufisme falsafi dan sufisme salafi,

Penerapan sikap dasar *tawassuth* dalam memahami al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber ajaran Islam, dilakukan dalam rangka: (1) Memahami ajaran Islam melalui teks *mushhaf* al-Qur'an dan kitab al-Hadits sebagai dokumen tertulis; (2) Memahami ajaran Islam melalui interpretasi para ahli yang harus sepentasnya diperhitungkan, mulai dari sahabat, tabi'in sampai para imam dan ulama *mu'tabar*; (3) Mempersilahkan mereka yang memiliki kompetensi dan persyaratan cukup berijtihad untuk mengambil kesimpulan pendapat sendiri langsung dari al-Qur'an dan al-Hadits.

*Kedua, Tawazun*, yakni menjaga keseimbangan dan keselarasan, sehingga terpelihara secara seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan pribadi dan masyarakat, dan kepentingan masa kini dan masa datang. Keseimbangan di sini adalah bentuk hubungan yang tidak berat sebelah (menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak yang lain). Tetapi, masing-masing pihak mampu menempatkan dirinya sesuai dengan fungsinya tanpa mengganggu fungsi dari pihak yang lain. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya kedinamisan dalam hidup. Firman Allah SWT:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ  
بِالْقِسْطِ

Artinya: "Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (penimbang keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan". (QS al-Hadid: 25)

Keseimbangan menjadikan manusia bersikap *luwes* tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu, akan tetapi melalui kajian yang matang dan berimbang, dengan demikian yang diharapkan adalah tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang paling tepat sesuai dengan

<sup>129</sup> Said Aqil Siradi, *Ahlussunnah wal Jama'ah Dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 1999), hlm. 20.

kebutuhan dan kepentingannya. Pola ini dibangun lebih banyak untuk persoalan-persoalan yang berdimensi sosial politik. Dalam bahasa lain, melalui pola ini *Ahlussunnah wal Jama'ah* ingin menciptakan integritas dan solidaritas sosial umat.<sup>130</sup>

*Ketiga, Tasamuh*, yaitu bersikap toleran terhadap perbedaan pandangan, terutama dalam hal-hal yang bersifat *furu'iyah*, sehingga tidak terjadi perasaan saling terganggu, saling memusuhi, dan sebaliknya akan tercipta persaudaraan yang islami (*ukhuwwah islamiyyah*). Berbagai pemikiran yang tumbuh dalam masyarakat Muslim mendapatkan pengakuan yang apresiatif. Keterbukaan yang demikian lebar untuk menerima berbagai pendapat menjadikan ajaran *Ahlussunnah wal Jama'ah* memiliki kemampuan untuk meredam berbagai konflik internal umat. Corak ini sangat tampak dalam wacana pemikiran hukum Islam, yaitu sebuah wacana pemikiran keislaman yang paling realistik dan paling banyak menyentuh aspek relasi sosial.<sup>131</sup>

Dalam diskursus sosial-budaya, *Ahlussunnah wal Jama'ah* banyak melakukan toleransi terhadap tradisi-tradisi yang telah berkembang di masyarakat, tanpa melibatkan diri dalam substansinya, bahkan tetap berusaha untuk mengarahkannya. Formalisme dalam aspek-aspek kebudayaan dalam pandangan *Ahlussunnah wal Jama'ah* tidaklah memiliki signifikansi yang kuat. Karena itu, tidak mengherankan jika dalam tradisi kaum *Nahdlyyin* atau kaum Sunni terkesan hadirnya wajah akulturasi dengan ajaran Syi'ah atau bahkan dengan budaya Hinduisme. Hal ini pula yang membuatnya menarik banyak kaum muslimin di berbagai wilayah dunia. Pluralistiknya pikiran dan sikap hidup masyarakat adalah keniscayaan dan ini akan mengantarkannya kepada visi kehidupan dunia yang rahmat di bawah prinsip Ketuhanan.

*Keempat, Ptidal* adalah sikap adil, tegak lurus dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam al-Qur'an disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

<sup>130</sup> Husein Muhammad, dalam Imam Baihaqi (ed), *Kontroversi Aswaja: Aula Perdebatan dan Reinterpretasi*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 37.

<sup>131</sup> *Ibid.*, h. 39.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang tegak membela (kebenaran) karena Allah menjadi saksi (pengukur kebenaran) yang adil. Dan janganlah kebencian kamu pada suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Berbuat adillah karena keadilan itu lebih mendekatkan pada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS al-Maidah: 8)

Menempatkan sesuatu pada tempatnya ini adalah salah satu tujuan dari syari’at. Dalam bidang hukum, suatu tindakan yang salah harus dikatakan salah, sedangkan hal yang benar harus dikatakan benar, kemudian diberikan konsekuensi hukuman yang tepat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Dalam kehidupan sosial, rakyat sebagai komponen yang paling penting dalam negara demokrasi harus mendapatkan keadilan sesuai dengan hak dan kewajibannya dengan asas persamaan di depan hukum dan sesuai dengan undang-undang tanpa diskriminasi.

*Kelima, Amar Ma’ruf Nahi Munkar* (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Dengan prinsip ini, akan timbul kepekaan dan mendorong perbuatan yang baik dalam kehidupan bersama serta kepekaan menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan buruk dan kemungkaran.

Kelima prinsip nilai *Ahlussunnah wal Jama’ah* ini merupakan substansi dari ajaran Islam sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam (*Rahmatan Lil ‘Alamain*). Oleh karenanya, sikap moderasi yang tercermin dalam lima nilai tersebut harus dijadikan pedoman dalam berpikir, bersikap dan bertindak dalam segala hal yang menyangkut agama dan aspek sosial yang lainnya.

## E. Metode Bermazhab dan Istinbath al-Ahkam Nahdlatul Ulama

Pola perumusan hukum Islam dalam perspektif Nahdlatul Ulama sangat tergantung pada pola pemecahan masalahnya, antara: pola *maudhu’iyah* (tematik) atau terapan (*qonuniyah*) dan waqi’yah (kasuistik). Pola *maudhu’iyah* merupakan pendiskripsian masalah berbentuk *tashawur* lintas disiplin keilmuan empirik. Ketika rumusan hukum

atau ajaran islam dengan kepentingan terapan hukum positif, maka pendekatan masalahnya berintikan "tathbiq al-Syari'ah" disesuaikan dengan kesadaran hukum kemajemukan masyarakat. Apabila langkah kerjanya sebatas merespon kejadian faktual yang bersifat kedaerahan atau insidental, cukup menempuh penyelesaian metode eklektif (*takhayyur*), yaitu memilih kutipan doktrin yang siap pakai.

Metode penggalian hokum atau pengambilan sumber (referensi) dan langkah-langkahnya baik secara deduktif maupun induktif dalam Nahdlatul Ulama dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

1. Metode *Qauly* (tekstual); yaitu dengan merujuk langsung pada teks pendapat imam mazhab empat atau pendapat ulama pengikutnya.<sup>132</sup> Metode mazhab *qauly* ini adalah pandangan keagamaan ulama yang teridentifikasi sebagai "ulama sunni" dikutip utuh *qaul*-nya dari kitab *mu'tabar*, misalnya *qaul*-nya Imam Syafi'i dalam mazhab, untuk memperjelas dan memperluas doktrin yang akan diambil bisa menggunakan kitab syarah yang disusun oleh ulama sunni yang bermazhab yang sama, seperti *qaul*-nya Imam al- Nawawi.
2. Metode *Ilhaqi*; yaitu menyamakan hukum suatu kasus yang belum ada ketentuan hukumnya dengan kasus yang telah ada hukumnya dalam kitab-kitab fikih.<sup>133</sup>
3. Metode *Manhaji* (bermazhab secara *manhaji*/metodologis); yaitu menyelesaikan masalah hukum dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab. Prosedur operasional metode *manhajiy* adalah dengan mempraktekkan *qawaid ushuliyah* (kaidah-kaidah ushul fiqh) dan *qawaid fiqhiyah* (kaidah-kaidah fiqh).<sup>134</sup> Metode *manhaji* ini lebih mengarah pada masalah yang bersifat kasuistik yang diperlukan penyertaan dalil nash syar'i berupa kutipan al-Quran, *nuqulanmatan* sunnah atau hadist, serta *ijma'*.

---

<sup>132</sup> Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan NU*, (Surabaya: PP. RMI dan Dinamika Press, 1997), h. 365-367.

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> *Ibid.*

## F. Aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah Nahdlatul Ulama

Dalam konteks *aqidah*, paham *Ahlussunnah wal Jama'ah Nahdlatul Ulama* merumuskan enam hal yang wajib diyakini sebagai arkan iman yang dikenal dengan sebutan *ushul al-iman al-sittah*.

Adapun yang termasuk kewajiban yang berkaitan dengan keyakinan dalam hati (*al-fardl al-i'tiqadi*) adalah mengetahui dan mempelajari rukun iman atau *Ushul al-Iman*. *Ushul al-Iman al-Sittah* (dasar-dasar Iman yang enam) adalah salah satu dari dasar-dasar keyakinan dalam Islam, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadits yang diriwayatkan Imam Muslim:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيضًا قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدٌ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ ، وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا . قَالَ : صَدَقْتَ . فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ . قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ ، قَالَ : أَنْ بِاللَّهِ ، وَمَلَائِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ . قَالَ : صَدَقْتَ . قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ ، قَالَ : أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ . قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ : مَا الْمَسْئُورُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ . قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ أَمَارَاتِهَا ، قَالَ : أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا ، وَأَنْ تَرَى الْخُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّيْءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ ، ثُمَّ أَنْطَلَقَ ، فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ، ثُمَّ قَالَ : يَا عُمَرُ ،



أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلِ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ  
يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Umar bin Khatthab Radhiyallahu’anhu berkata: Suatu ketika, kami (para sahabat) duduk di dekat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi, kemudian ia berkata : “Hai, Muhammad! Beritahukan kepadaku tentang Islam.”Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab,”Islam adalah, engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah; menegakkan shalat; menunaikan zakat; berpuasa di bulan Ramadhan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah, jika engkau telah mampu melakukannya,” lelaki itu berkata,”Engkau benar,” maka kami heran, ia yang bertanya ia pula yang membenarkannya.Kemudian ia bertanya lagi: “Beritahukan kepadaku tentang Iman”. Nabi menjawab,”Iman adalah, engkau beriman kepada Allah; malaikatNya; kitab-kitabNya; para RasulNya; hari Akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk,” ia berkata, “Engkau benar.”Dia bertanya lagi: “Beritahukan kepadaku tentang ihsan”.Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab,”Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatNya. Kalaupun engkau tidak melihatNya, sesungguhnya Dia melihatmu.”Lelaki itu berkata lagi : “Beritahukan kepadaku kapan terjadi Kiamat?”Nabi menjawab,”Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya.” Dia pun bertanya lagi : “Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya!” Nabi menjawab,”Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya; jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, tanpa memakai baju (miskin papa) serta penggembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi.” Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam, sehingga Nabi bertanya kepadaku: “Wahai, Umar! Tahukah engkau, siapa yang bertanya tadi?” Aku menjawab,”Allah dan RasulNya lebih mengetahui,” Beliau bersabda, ”Dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian.”<sup>135</sup>

<sup>135</sup> Muslim bin Hajjaj Abu Al-Husain Al Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya’ Turas Arabi, tth.)



Berdasarkan hadits ini, maka *ushul al-iman al-sittah* tersebut sebagai berikut:

1. Iman kepada Allah, yaitu meyakini bahwa Allah ada, tidak ada permulaan bagi ada-Nya. Allah tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya, Allah Ta'ala berfirman:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ \* وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya (baik dari satu segi maupun semua segi), dan tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya”. (Q.S. as-Syura: 11)

Allah memiliki *al-Matsal al'A'la*, yakni sifat-sifat yang tidak menyerupai sifat-sifat makhluk-Nya seperti dijelaskan al Qur'an dalam surat al Ikhlas. Serta meyakini bahwa satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah, Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam bersabda:

حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا (رواه الشيخان)

“Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun”. (H.R. al Bukhari dan Muslim)

2. Iman kepada Malaikat Allah. Wajib beriman dengan adanya para malaikat, mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia, bukan laki-laki dan bukan perempuan. Mereka tidak makan, minum, tidur dan menikah. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah dan selalu menjalankan apa yang Ia perintahkan. Allah ta'ala berfirman:

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Mereka (para malaikat) tidak pernah membangkang terhadap apa yang diperintahkan Allah dan mereka senantiasa melakukan apa yang diperintahkan” (Q.S. at Tahrir:6)

3. Iman kepada Kitab-kitab Allah, yaitu mengimani bahwa Allah menurunkan kitab-kitab yang banyak jumlahnya, di antaranya empat yang terkenal; Taurat, Injil, Zabur dan al-Qur'an.

4. Iman kepada Rasul-rasul Allah. Wajib beriman dengan adanya utusan-utusan Allah, yaitu para nabi, baik nabi<sup>136</sup> yang sekaligus menyandang predikat rasul<sup>137</sup> maupun tidak. Keduanya baik nabi maupun rasul diperintah untuk *tabligh*, yaitu menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah SWT. Nabi dan rasul pertama adalah Adam dan yang terakhir adalah Muhamad SAW. Mereka semuanya adalah makhluk pilihan, sebagaimana firman Allah:

وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan setiap dari mereka (para nabi) Aku berikan kemulyaan di atas seluruh alam” (Q.S. al An’am: 86)

5. Iman kepada hari akhir, yaitu mengimani bahwa Allah akan mengembalikan hamba-Nya yang sudah mati ke suatu kehidupan yang kekal, tidak ada kematian setelahnya. Hari kehidupan kembali ini adalah hari pembalasan atas segala perbuatan masing-masing manusia di dunia.
6. Iman kepada Qadha’ dan Qadar atau ketentuan Allah, yaitu meyakini bahwa segala apa yang terjadi, baik atau buruk adalah dengan taqdir Allah yang azali. Perbuatan baik seorang hamba terjadi dengan taqdir Allah, kecintaan-Nya (mahabbah) dan keridlaan-Nya. Sementara perbuatan buruk seorang hamba terjadi dengan taqdir Allah, tapi Ia tidak mencintai dan tidak meridlainya. Allah ta’ala berfirman:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (سورة القمر: ٤٩)

“Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran (yang telah Kami tentukan)”.(Q.S. al Qamar :49)

Uraian tentang iman dalam aqidah *Ahlusunnah Wal Jamaah* sebagai berikut:

---

<sup>136</sup> Nabi ialah manusia yang diberi wahyu oleh Allah, ia tidak datang membawa syari’at baru tapi diperintah untuk mengikut syari’at rasul sebelumnya.

<sup>137</sup> Rasul adalah manusia yang diberi wahyu oleh Allah dengan membawa syari’at baru.

## 1. Keimanan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*

Uraian tentang ketuhanan ini telah disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Asyari dan dikenal sebagai "Tauhid Sifat 20". Dari sifat-sifat Allah yang sempurna dan tak berhingga itu yang wajib diketahui secara ringkas oleh setiap orang Islam yang sudah baligh dan berakal adalah :

- 20 sifat yang wajib (mesti ada ) pada Allah
- 20 sifat yang mustahil (tidak mungkin ada) pada Allah
- 1 sifat yang mubah (boleh ada-boleh tidak) pada Allah

Adapun sifat yang 20 yang mesti ada dan yang 20 mustahil pada Allah itu adalah :

1. *Wujud*: Allah itu ada, mustahil Allah tidak ada.
2. *Qidam*: Allah tidak berpermulaan ada-Nya. Mustahil Ia berpermulaan ada-Nya.
3. *Baqa'*: Allah kekal selama-lamanya, mustahil Ia akan lenyap (habis)
4. *Mukhalafatuhu lil Hawaditsi*: Allah berlainan dengan sekalian makhluk, mustahil Ia serupa dengan makhluk yang Ia ciptakan.
5. *Qiyamuhu Binafsihi*: Allah berdiri sendiri dan tidak memerlukan pertolongan pihak lain, mustahil memerlukan pertolongan pihak lain.
6. *Wahdaniyah*: Allah Allah Maha Esa, mustahil Ia banyak (berbilang).
7. *Qudrat*: Allah berkuasa, mustahil Ia lemah (*dhaif*)
8. *Iradah*: Allah menetapkan sesuatu menurut kehendak-Nya dan mustahil Ia dipaksa oleh kekuatan lain untuk melakukan sesuatu
9. *Ilmu*: Allah tahu seluruhnya, tahu yang telah dijadikan-Nya dan tahu yang akan dijadikan-Nya, mustahil Ia tidak tahu.
10. *Hayat*: Allah hidup, mustahil ia mati.
11. *Sama'*: Allah mempunyai sifat *sama*, yaitu mendengar, mustahil Ia tuli.
12. *Basyar*: Allah melihat, mustahil Ia buta
13. *Kalam*: Allah berkata, mustahil Ia bisu.

14. *Kaunuhu Qadiran*: Allah tetap selalu dalam keadaan berkuasa, mustahil Ia dalam keadaan lemah.
15. *Kaunuhu Muridan*: Allah tetap selalu dalam keadaan menghendaki, mustahil Ia dalam keadaan tidak menghendaki
16. *Kaunuhu 'Aliman*: Allah tetap selalu dalam keadaan tahu, mustahil Ia dalam keadaan tidak mengetahui
17. *Kaunuhu Hayyan*: Allah tetap selalu keadaan hidup, mustahil Ia dalam keadaan mati.
18. *Kaunuhu Sami'an*: Allah tetap dalam keadaan mendengar, mustahil Ia dalam keadaan tuli.
19. *Kaunuhu Basyiran*: Allah dalam keadaan melihat, mustahil Ia dalam keadaan buta.
20. *Kaunuhu Mutakalliman*: Allah tetap dalam keadaan berkata, mustahil Ia bisu.

Sedangkan sifat yang *jaiz/mubah*(boleh) pada Allah adalah boleh membuat dan boleh juga tidak membuat sesuatu. Tidak wajib bagi Allah untuk menjadikan segala makhluk, dan tidak wajib pula untuk meniadakan segala makhluk.

Allah mempunyai sifat yang tidak terbatas banyaknya, yaitu semua sifat jamal (keindahan), sifat jalal (keagungan), dan sifat kamal (kesempurnaan).<sup>138</sup>

## 2. Keimanan kepada Malaikat

Malaikat adalah makhluk halus, tidak berwujud fisik seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda fisik. Dijadikan dari nur atau cahaya. Hakikat jasadnya, Allah Maha Tahu. Dengan izin Allah mereka dapat menyerupakan dirinya menjadi seperti manusia dan lain-lain. Malaikat tidak berjenis kelamin, tidak makan dan minum seperti manusia, tidak tidur, tidak pernah istirahat dari melaksanakan tugas-tugasnya, melainkan senantiasa taat setia kepada Allah, tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan walaupun sekecil-kecilnya.

---

<sup>138</sup> Abdul Wahib, M.Ag, *Materi Dasar Nahdlatul Ulama (Ahlussunnah Waljama'ah)*, Pimpinan Wilayah Lembaga Pendidikan AL-Ma'arif NU Jawa Tengah: Semarang, 1999. hlm. 3.

Oleh karenanya, wajib bagi setiap *mukallaf* mengenal malaikat-malaikat Allah secara tepat, mengenal nama-namanya yang wajib diketahui, mengenal sifat-sifatnya serta mengenal tugas-tugasnya. Pengenalan terhadap para Malaikat mesti dilandasi dengan ilmu yang memadai, dihayati, sehingga terinternalisasi di hati bahwa betapa Maha Sempurna, Maha Hebat, dan Kuasa Allah Ta'ala menciptakan para Malaikat dan seluruh makhluk ciptaan-Nya.

Adapun malaikat-malaikat yang wajib diketahui ada 10, sebagai berikut:

1. Malaikat Jibril, tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan para rasul. Terutama kepada baginda Rasulullah SAW. Kadang-kadang Malaikat Jibril itu datang menyerupai laki-laki yang gagah dan tampan dan ada kalanya para sahabat pun mendengar dan menyaksikan ia berdialog dengan Rasulullah.
2. Malaikat Mikail, tugasnya dalam soal kesejahteraan manusia seperti mengantarkan rizki, menurunkan hujan, meniupkan angin, dan menyuburkan tanah dan kesuburan-kesuburan lainnya.
3. Malaikat Israfil, tugasnya dalam soal-soal yang berhubung kait dengan qiamat, seperti meniup sangkakala tanda qiamat, meniup sangkakala tanda manusia dibangkitkan di padang mahsyar dan lain-lain.
4. Malaikat Izrail, tugasnya adalah mencabut nyawa dan membawa nyawa itu kemana mestinya.
5. Malaikat Munkar dan Nakir, tugas keduanya adalah menanyakan amal kebaikan manusia yang sudah mati di alam kubur. Oleh karenanya, keduanya akan datang dengan wajah yang seram dan menakutkan bagi orang-orang yang mati membawa dosa dan hati yang tidak selamat. Sebaliknya wajah yang mereka tampilkan akan sangat indah dan menyejukkan pada mereka yang matinya *husnul khatimah*.
6. Malaikat Rakib, tugasnya adalah menuliskan amalan baik manusia.
7. Malaikat Atid, tugasnya adalah mencatat amalan jahat manusia. Kedua-dua malaikat Rakib dan Atid itu senantiasa mengiringi manusia dimana saja mereka berada dan kemana sana saja mereka

pergi. Malaikat Rakib dan Atid itu merupakan sekelompok malaikat yang jumlahnya sebanding dengan jumlah manusia sepanjang zaman.

8. Malaikat Malik, tugasnya adalah menjaga neraka dengan penampilan yang sangat menakutkan dan mengerikan bagi para penghuni neraka.
9. Malaikat Ridwan, tugasnya adalah menjaga surga dengan penampilan yang sangat menyenangkan para penghuni surga.

### **3. Keimanan kepada Para Rasul**

Nabi dan rasul jumlahnya banyak sekali sampai 124,000 orang, dan rasul-rasul itu ada 313 atau 315 orang. Nabi yang pertama sekaligus manusia pertama yang Allah utus ke muka bumi adalah Nabi Adam *Alaihissalam*, sedangkan Nabi terakhir sebagai penghulu sekaligus penutup risalah kenabian adalah Rasulullah Muhammad SAW.

Nabi dan Rasul yang wajib diketahui sebanyak 25 orang, sebagaimana disebutkan al-Qur'an sebagai berikut:

1. Nabi Adam *Alaihissalam*
2. Nabi Idris *Alaihissalam*
3. Nabi Nuh *Alaihissalam*
4. Nabi Hud *Alaihissalam*
5. Nabi Shaleh *Alaihissalam*
6. Nabi Ibrahim *Alaihissalam*
7. Nabi Luth *Alaihissalam*
8. Nabi Isma'il *Alaihissalam*
9. Nabi Ishaq *Alaihissalam*
10. Nabi Ya'qub *Alaihissalam*
11. Nabi Yusuf *Alaihissalam*
12. Nabi Ayyub *Alaihissalam*
13. Nabi Syu'aib *Alaihissalam*
14. Nabi Musa *Alaihissalam*

15. Nabi Harun *Alaihissalam*
16. Nabi Zulkifli *Alaihissalam*
17. Nabi Daud *Alaihissalam*
18. Nabi Sulaiman *Alaihissalam*
19. Nabi Ilyas *Alaihissalam*
20. Nabi Ilyasa' *Alaihissalam*
21. Nabi Yunus *Alaihissalam*
22. Nabi Zakaria *Alaihissalam*
23. Nabi Yahya *Alaihissalam*
24. Nabi Isa *Alaihissalam*
25. Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*.

Diantara mereka dipilih 5 Rasul sebagai *Ulul 'Azmi*, karena kesabaran mereka yang luar biasa yaitu:

1. Rasulullah Muhammad *Sallallahu Alaihi Wasallam*.
2. Rasulullah Ibrahīm *Alaihissalam*
3. Rasulullah Musa *Alaihissalam*
4. Rasulullah Isa *Alaihissalam*
5. Rasulullah Nuh *Alaihissalam*

Rasul-rasul itu adalah manusia pilihan Allah Ta'ala. Mereka manusia yang menerima wahyu dari Allah dan memiliki sifat-sifat kerasulan. Ini yang membedakan para rasul dengan manusia biasa. Mereka memiliki sifat-sifat yang wajib bagi mereka yang harus diketahui dan dan yakini. Selain itu ada sifat-sifat yang mustahil bagi mereka dan ada satu sifat yang *jaiz*(boleh).

Adapun sifat-sifat yang wajib bagi para rasul antara lain:

- Siddiq (benar), mustahil pendusta.
- Amanah (dipercaya), mustahil khianat.
- Tabligh (menyampaikan), mustahil menyembunyikan
- Fathanah (bijak) mustahil dungu.

Sedangkan sifat yang *jaiz* bagi para rasul ialah sifat-sifat kemanusiaan yang tidak merendahkan derajat kerasulannya. Umpamanya makan, minum, tidur, kawin, bergaul dalam masyarakat, menjadi imam dalam solat, menjadi jenderal dalam peperangan dan sebagainya.

#### 4. Keimanan kepada Kitab-Kitab Suci

Kitab suci yang wajib diketahui dan diyakini ada 4, yaitu:

1. Kitab Suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa Alaihissalam.
2. Kitab Suci Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud Alaihissalam.
3. Kitab Suci Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa Alaihissalam
4. Kitab Suci Al Quran yang diturunkan kepada Baginda Rasulullah saw.

Semua kitab suci itu dari Allah dan isinya semuanya benar, tidak boleh ada sedikitpun keraguan terhadapnya. Hanya kitab Taurat dan Injil yang ada ditangan penganut-penganutnya sekarang ini yang tidak lagi menurut yang aslinya, sudah banyak diubah oleh pendeta-pendetanya dulu, sehingga tidak dapat lagi dipercaya isinya, demikian keyakinan ummat Islam. Hal sebagaimana diinformasikan dan dikonfirmasi al-Qur'an:

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيْسُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ

Artinya: “Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Al-Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya: “Ini dari Allah”, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang mereka kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 79)

#### 5. Keimanan kepada hari Akhir (Hari Kiamat)

Hari akhir adalah hari kiamat yang didahului dengan musnahnya alam semesta ini. Pada hari itu akan hancur dan musnah alam semesta



beserta seluruh isinya. Percaya kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Hari akhir memiliki nama lain yang cukup banyak. Nama-nama hari akhir yang disebutkan dalam al-Qur'an menggambarkan keadaan hari kiamat hingga manusia dibangkitkan, dihisab, dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat besar terhadap penetapan keimanan pada hari akhir itu. Perhatian yang besar ini dapat diketahui antara lain Allah Ta'ala tidak mengemukakan hari kiamat itu dengan satu sebutan saja, tetapi menggunakan nama-nama yang berlainan dan setiap nama menunjukkan pengertian apa yang akan terjadi pada hari itu. sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Yaum al-Ba'tsi, sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar-Rum (30) ayat 56:

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ  
فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata (kepada orang-orang kafir), sungguh kamu telah berdiam (dalam kubur) menurut ketetapan Allah, sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, tetapi (dahulu) kamu tidak meyakini (nya)”.

2. Yaum al-Qiyamah, sebagaimana firman- Nya dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar (39) ayat 60:

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ  
فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ

Artinya: “Dan pada hari Kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, wajahnya menghitam....”

3. Yaum al-Sa'ah, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Qamar (54) ayat 1:

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

Artinya: “Saat (hari Kiamat) semakin dekat, bulan pun terbelah”.

3. Yaum al-Akhirah, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur’an surat Al-Ala (87) ayat 17:

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

Artinya: “Sedangkan kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal”

4. Yaum al-Din, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Our’an surat Al-Fatihah (1) ayat 4:

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

Artinya: “Pemilik hari pembalasan”.

5. Yaum al-Hisab, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur’an surat Al-Mu’min (40) ayat 27:

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ  
الْحِسَابِ

Artinya: “Dan (Musa) berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, tidak beriman kepada hari (perhitungan amal).”

6. Yaum al-Fathi, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur’an surat As-Sajdah (32) ayat 29:

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ

Artinya: “Katakanlah, pada hari (kemenangan) itu, tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir keimanan mereka dan mereka tidak diberi penangguhan.”

7. Yaum al-Talaq, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur’an surat Al-

Mu'min (40) ayat 15-16:

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ  
لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ \* يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ  
لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

Artinya: “Dialah Yang Mahatinggi derajat-Nya, yang memiliki Arsy, yang menurunkan (wahyu) dengan perintah-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya, agar memperingatkan (manusia) tentang hari pertemuan (hari kiamat), (yaitu) pada hari (ketika) mereka keluar (dari kubur); tiada sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah.”

8. Yaum al-Hasrah, artinya hari penyesalan, sebagaimana firman Allah swt. dalam surat Maryam (19) ayat 39:

وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا  
يُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, (yaitu) ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.”

9. Yaum al-Haq, artinya hari yang pasti terjadi, sebagaimana firman Allah swt. dalam Al-Qur'an surat an-Naba' (78) ayat 39.

ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا

Artinya: “Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.”

10. Yaum al-Jam'i, artinya hari berkumpul, sebagaimana disebutkan dalam surat asy-Syura (42) ayat 7:

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

Artinya: “Dan demikianlah Kami wahyukan Al-Qur’an kepadamu dalam bahasa Arab agar engkau memberi peringatan kepada (penduduk ibukota Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) di sekelilingnya serta memberi peringatan tentang hari berkumpul (kiamat) yang tidak diragukan adanya”.

11. Yaum al-Khulud, artinya hari kekekalan, sebagaimana firman Allah dalam surat Qāf (50) ayat 34:

ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ

Artinya: “Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi.”

12. Yaumal-Fashli, artinya hari keputusan, sebagaimana firman-Nya dalam surat Ad-Dukhan (44) ayat 40:

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya: “Sungguh hari keputusan (hari Kiamat) adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya”.

13. Yaum al-Wa’id, artinya hari terlaksananya ancaman, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Our’an surat Qaf (50) ayat 20.

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ

Artinya: “Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari yang diancamkan.”

14. Yaum al-Khuruj, artinya hari keluar dari kubur, sebagaimana firman Allah swt. dalam Al-Our’an surat Qaf (50) ayat 42:

يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ

Artinya: “(Yaitu) pada hari (ketika) mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya. Itulah hari keluar (dari kubur).”

15. Yaum At-Tagabun, artinya hari ditampakkan kesalahan- kesalahan, sebagaimana firman Allah swt. dalam surat At-Tagabun ayat 9:

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا  
يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا  
ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: “(Ingatlah) pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun, itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan....»

16. Yaum al-Tanad, artinya hari pemanggilan, sebagaimana firman Allah swt. dalam surat Al-Mu'min (23) ayat 32:

وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ

Artinya: “Dan wahai kaumku. Sesungguhnya aku benar-benar khawatir terhadapmu akan (siksaan) hari saling memanggil.”

17. Yaum al-Mau'ud, artinya hari yang dijanjikan, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Buruj (85) ayat 2:

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ

Artinya: “Dan demi hari yang dijanjikan.”

18. Yaum al-Kabir, artinya hari yang besar. Firman Allah swt. dalam surat Hud (11) ayat 3:

وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمِتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ  
مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ  
عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ

Artinya: “Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksaan yang besar (hari kiamat).”

19. Yaum al-Asir, artinya hari yang sulit. Firman Allah swt. dalam surat Al-Muddassir (74) ayat 9:

فَذَلِكَ يَوْمًا عَسِيرًا

Artinya: “Maka itulah hari yang serba sulit.”

Percaya kepada hari akhir artinya mempercayai bahwa kehidupan di dunia ini pada saat-Nya pasti berakhir, manusia, binatang pasti akan mati dan semua yang ada di dunia pasti akan rusak dan binasa. Kemudian sesudah itu pasti ada kehidupan lagi yang abadi, manusia yang mati dihidupkan kembali dan menerima pembalasan amal perbuatannya selama hidup di dunia ini.

Bagi ahlussunnah waljama’ah percaya kepada hari akhir tidak cukup secara global itu saja, tetapi semua proses sejak manusia mati (memasuki alam akhirat) sampai saat menerima pembalasan harus dipercayai, antara lain:

Pertanyaan di dalam kubur atau alam barzakh  
Adanya rahmat dan siksa kubur  
Hari kiamat  
Hari kebangkitan manusia dari kubur  
Mahsyar, tempat dikumpulkannya semua manusia yang bangkit dari kubur  
Hisab, perhitungan semua amal perbuatan manusia  
Mizan, timbangan tempat dihitung berat ringan amal baik buruk manusia  
Shirat, titian yang dilalui

manusia setelah ditimbang hasil perbuatannya.  
Surga dan neraka, surga tempat setelah manusia melalui titian shirat tersebut, dan yang tergelincir dari titian tersebut akan jatuh ke dalam neraka.  
Melihat Allah di dalam surga. Tujuan terakhir dan nikmat terbesar melebihi surga itu sendiri. Hal ini menjadi persoalan yang menurut yang paham yang lain tidak benar. Namun Ahlussunnah Waljama’ah berpegang teguh pada prinsip tersebut dengan mendasarkan pada al-Qur’an dan Hadits.<sup>1</sup>

## 6. Keimanan kepada Qadha dan Qadar

Qadha ialah ketentuan atau hukum yang telah Allah tetapkan sejak azali bagi seseorang atau sesuatu perkara, seperti sakit, sehat, miskin, kaya dan lain-lain. Segala kejadian mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya sudah Allah tetapkan sejak azali. Adapun Qadar adalah rincian dan batasan-batasan ketentuan yang telah Allah tetapkan sejak azali lagi.

Qadla dan Qadar secara garis besar menurut paham Ahlussunnah Waljama'ah adalah sebagaimana menurut yang disistematisasikan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Manshur Al-Maturidiy As-Samarkandiy ialah sebagai berikut:

Qadla adalah ketetapan Allah berdasarkan ilmunya pada sejak zaman azali (zaman sebelum Allah menciptakan makhluk) tentang apa yang terjadi di dunia dan di akhirat atau setelah zaman azali (zaman setelah makhluk tercipta). Misalkan kehendak Allah tentang diri si anu akan menjadi orang alim pada zaman azali disebut dengan qadla. Untuk memahami lebih bagus tentang istilah ini harus tetap dipadankan dengan istilah qadar.

Qadar adalah ketentuan perwujudan dan ketetapan Allah di zaman azali tentang segala sesuatu berdasarkan ukuran tertentu yang sesuai dengan ilmu dan kehendak Allah. Misalkan perwujudan setelah zaman azali (zaman setelah makhluk tercipta) dari kehendak Allah tentang diri si anu akan menjadi orang alim pada zaman azali maka si anu diberi ilmu dan petunjuk pada diri si anu sehingga menjadi orang alim inilah yang disebut dengan qadar atau biasa disebut dengan taqdir.

Qadar/Taqdir dibagi menjadi dua, yaitu *Mu'allaq* dan *Mubram*. Taqdir *mu'allaq*, yaitu ketentuan yang dapat dirubah oleh manusia semisal jika seseorang menginginkan untuk sembuh dari penyakit demam maka ia harus berobat ke dokter atau lainnya. Sedangkan taqdir *mubram*, yaitu ketentuan yang tak bisa dirubah misalnya kematian, ketuaan, dan lain sebagainya. Namun demikian, segala yang terjadi tersebut secara hakiki pun merupakan kehendak Allah sejak zaman azali atau yang disebut dengan qadla.

Apabila orang yang sudah mantap keyakinannya terhadap qadla dan qadar Allah maka ia tidak akan pernah putus asa jika ia gagal dalam perjuangannya, dan begitu pula tidak akan sombong atau membanggakan dirinya jika ia berhasil dan sukses dalam perjuangannya.<sup>139</sup>

Ketiga komponen tersebut di atas, yaitu aqidah, syari'ah, tasawuf atau akhlak harus bersinergis dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Karena NU mengikuti pendirian bahwa Islam adalah agama yang fithri dan 'ilmi, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki oleh manusia dengan pendekatan keilmuan yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Paham keagamaan yang dianut Nahdlatul Ulama bersifat akomodatif-konstruktif tidak destruktif, yaitu menyempurnakan nilai-nilai baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa, dan tidak bertujuan untuk menghapus nilai-nilai tersebut.

## G. Perbedaan Paham Ahlussunnah Waljama'ah NU Dengan Paham yang Lain

*Ahlussunnah wal Jama'ah* sebagai paham keagamaan tentu memiliki perbedaan dengan paham keagamaan atau firqoh lainnya. Dalam teologi Islam ada beberapa *I'tiqad* dan pemahaman yang berbeda dengan kelompok Khawarij, Syiah, Ahmadiyah dan lain sebagainya. Berikut ini akan dirumuskan beberapa perbedaan paham yang prinsipil antara *Ahlussunnah wal Jama'ah* dengan firqah-firqah yang lain. Klasifikasi beberapa rumusan perbedaan tersebut dielaborasi dari buku *I'tiqad Ahlussunnah wa Jama'ah* sebagai berikut;<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> Ach. Masduqi, *Konsep Dasar Pengertian Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*, (Surabaya: Al-Miftah, 1996), hlm. 45.

<sup>140</sup> Siradjuddin Abbas. *I'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2010), hlm. 405-411.



| Kepercayaan dan Paham Ahlussunnah Waljama'ah  | Kepercayaan dan Paham firqoh lainnya  |
|---|---|
| SYIAH   |   |
| <p>Khalifah yang pertama sayyidina Abu Bakar ra, kedua Umar ra., ketiga Utsman ra, dan keempat Ali ra.</p> <p>Khalifah boleh diangkat dengan musyawarah Ahlul Halli Wal Aqdi</p> <p>Khalifah orang biasa tidak ma'shum tidak menerima wahyu</p> <p>Tidak mempercayai adanya khalifah ghaib</p>  | <p>Selain Ali ra. mereka terkutuk sebab merampas posisi khalifah pertama dari tangan Ali ra. sebab adanya wasiat dari Nabi SAW.</p> <p>Imam harus ditunjuk nabi Muhammad dengan wasiat</p> <p>Khalifah masih menerima wahyu dan ma'shum</p> <p>Percaya adanya khalifah ghaib yang akan keluar akhir zaman</p>   |
| <p>Kepercayaan pada khalifah bukan rukun iman</p> <p>Kitab kedua adalah kitab hadist Bukhari</p> <p>Mushaf yang sah ialah mushaf Utsman</p> <p>Arti "ahli bait" ialah famili-famili termasuk istri nabi</p> <p>Tidak menganut paham "wahdatul wujud"</p> <p>Islam sudah cukup pada waktu Nabi Muhammad saw wafat</p> <p>"Taqiyyah" bukan rukun iman</p> <p>Raj'ah tidak ada</p> | <p>Percaya pada iman adalah salah satu rukun iman</p> <p>Kitab yang kedua adalah al kafi karangan Ya'kub al Kullani</p> <p>Mushaf yang sah ialah mushaf Ali</p> <p>Arti "ahli bait" hanyalah keturunan Ali dengan Siti Fatimah</p> <p>menganut paham "wahdatul wujud"</p> <p>Islam belum cukup ketika itu karena masih ada wahyu ilahi untuk imam-imam syi'ah</p> <p>"Taqiyyah juga salah satu rukun iman"</p> <p>Mempercayai adanya raj'ah</p> |

| KHAWARIJ   |   |
|--|---|
| <p>Khalifah Ali ra. sah sesudah “tahkim”</p> <p>Siti ‘Aisyah adalah ummul Mu’minin yang dihormati sampai wafatnya</p> <p>Sekalian orang yang membantahnya belum tentu kafir Ibadah bukan rukun iman</p> <p>Ada dosa kecil dan dosa besar</p> <p>Anak-anak orang kafir mati kecil tidak berdosa</p> | <p>Khalifah Ali tidak sah sesudah “tahkim”</p> <p>Siti ‘Aisyah terkutuk sebab melakukan “peperangan jamal” melawan Ali ra.</p> <p>Sekalian yang membantahnya kafir dan halal darahnya</p> <p>Ibadah rukun iman</p> <p>Sekalian dosa, adalah besar tak ada yang kecil atau yang besar</p> <p>Anak-anak orang kafir yang mati akan masuk neraka</p> |
| MURJI’AH   |   |
| <p>Rukun iman 6</p> <p>Berbuat dosa haram walaupun sudah beriman</p> <p>Orang yang bersalah harus dihukum didunia ini</p>  | <p>Rukun iman hanya mengenal tuhan dan rasul-rasulya</p> <p>Berbuat dosa tak apa-apa kalau sudah mengenal tuhan dan rasulnya</p> <p>Orang yang bersalah harus ditangguhkan sampai kemuka tuhan</p>  |
| MU’TAZILAH   |   |
| <p>Bentuk dan baik ditentukan oleh Allah</p> <p>Qur’an dan Hadist di atas akal</p> <p>Qur’an kalam Allah yang Qadim</p> <p>Tuhan boleh dilihat apalagi dalam syurga</p> <p>Mi’raj Nabi dengan roh dan tubuh</p> <p>Pekerjaan manusia dijadikan tuhan</p>   | <p>Baik dan buruk ditentukan akal manusia</p> <p>Qur’an dan Hadist di bawah akal</p> <p>Qur’an adalah mahluk sama dengan mahluk yang banyak</p> <p>Tuhan tidak bisa dilihat walaupun dalam syurga</p> <p>Mi’raj Nabi dengan tubuh dan roh tidak masuk akal. Hanya mimpi</p> <p>Pekerjaan manusia dijadikan manusia</p>                            |

|   |  |
|---|--|
| <p>'Arsy' dan <i>Kursi</i> Allah SWT. ada<br/> Ada Malaikat <i>Kiraman-Katibin</i><br/> Syurga dan neraka kekal selamanya<br/> Timbangan diakhirat ada<br/> Hisab di akhirat ada<br/> Titian Shirotul Mustaqim ada<br/> Telaga al-Kautsar ada<br/> Syafaat ada<br/> Siksa kubur ada<br/> Tuhan tidak diwajibkan membuat yang baik atau yang lebih baik<br/> Tuhan mempunyai sifat<br/> Ada Mu`jizat Nabi Muhammad Saw. Selain Al-qur'an seperti air keluar dari anak jari beliau<br/> Keramat-keramat wali ada<br/> Orang mukmin yang wafat dalam berbuat dosa besar bukan kafir dan tidak kekal dalam neraka<br/> Syurga dan Neraka sudah tersedia dari sekarang</p> | <p>'arsy' dan kursi Allah. tidak ada<br/> Malaikat kiraman katibin tidak ada<br/> Syurga dan neraka tidak kekal<br/> Timbangan di akhirat tidak ada<br/> Hisab di akhirat tidak ada<br/> Titian shirotul Mustaqim ada<br/> Kolam Kautsar tidak ada<br/> Syafaat tidak ada<br/> Siksa kubur tidak ada<br/> Tuhan wajib membuat yang baik dan yang lebih baik<br/> Tuhan tidak mempunyai sifat. Ia mendengar dengan Zat-Nya<br/> Tidak ada Mu`jizat Nabi selain Al-Qur'an<br/> Keramat-keramat tidak ada<br/> Lancang mulut mencaci sahabat Nabi yang dianggapnya berbuat salah<br/> Orang mukmin yang wafat dalam berbuat dosa besar adalah kafir, kekal dalam neraka<br/> Ada tempat yang lain selain syurga dan neraka yang dinamai "manzilah bainal manzilatain"<br/> Syurga dan Neraka belum tersedia dari sekarang</p> |
| <b>QADARIYAH</b>  |  |
| <p>Perbuatan manusia dijadikan oleh tuhan</p>   | <p>Perbuatan manusia dijadikan manusia</p>   |
| <b>JABARIAH</b>   |  |
| <p>Ada ikhtiar dan usaha dari manusia<br/> Iman harus diakui dalam hati dan di Ikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan</p>   | <p>Tidak ada ikhtiar atau usaha dari manusia, semuanya dari tuhan<br/> Iman cukup dalam hati saja</p>  |

| NAJARIAH  |  |
|---|--|
| Tuhan mempunyai atau memiliki sifat<br>Mukmin yang berbuat dosa belum tentu masuk Neraka<br>Tuhan bisa dilihat  | Tuhan tidak mempunyai sifat Mukmin yang berdosa pasti masuk Neraka<br>Tuhan tidak bisa dilihat   |
| MUSYABBIHAH   |  |
| Tuhan tidak bermuka dan bertangan seperti manusia dan makhluk lainnya.<br>Tuhan tidak duduk bersila di atas 'arsy'<br>Tuhan bukan di atas langit<br>Tuhan Allah tidak bertubuh seperti Nur  | Tuhan bermuka, bertangan, berkaki, dan beranggota badan.<br>Tuhan duduk bersila di atas 'arsy'<br>Tuhan di atas langit<br>Tuhan bertubuh serupa Nur  |
| IBNU TAIMIYAH   |  |
| Meyakini adanya sifat-sifat Allah SWT yang 20 sifat wajib.<br>Tuhan tidak bersila di atas 'arsy' dan tidak bertempat.   | Meyakini adanya pembagian tauhid kepada 3 macam, yaitu Uluhiyah, Rububiyah, Asma Wasshifat.<br>Tuhan duduk bersila di atas 'arsy' dan di langit.   |
| Tuhan tidak turun dari langit pada separuh malam<br>Berjalan ziarah kemakam Nabi di Madinah adalah perjalanan ibadah<br>Do'a bertawassul adalah Sunnah<br>Thariqat-thariqat Sufiyah adalah Thariqat yang baik sesuai dengan Sunnah nabi | Tuhan turun dari langit separu terakhir dimalam dengan cara bergerak dan berpindah.<br>Perjalanan ziarah kemakam Nabi di Madinah adalah perjalanan ma'shiat<br>Do'a bertawassul adalah bid'ah.<br>Thariqat Sufiyah adalah Bid'ah dan haram |
| SALAFI-WAHABI   |  |
| Aqidah sifat 20 susunan Imam Asy`ariy (lahir tahun 240 H)<br>Yasinan, tahlilan, dan maulidan boleh  | Tauhid Uluhiyah, Rububiyah, Asma Wa Shifat susunan Ibnu Taimiyah dan dikuatkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab (1115 H)<br>Yasinan, tahlilan, dan maulidan sesat  |

|  |  |
|--|--|
| <p>Mendo'a dan bertawassul adalah menurut sunnah<br/> Perjalanan dengan maksud ziarah adalah Sunnah<br/> Kubba di atas kubur boleh, apalagi di atas kubur Nabi dan Ulama-ulama<br/> Ada bid'ah hasanah<br/> Menganut salah satu dari 4 madzhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali)<br/> Mentradisikan ziarah dan do'a di kuburan<br/> Toleransi dalam furu'iyah/ khilafiyah (perbedaan)<br/> Mengislamkan orang kafir</p> | <p>mendo'a dan bertawassul adalah syirik<br/> perjalanan dengan maksud ziarah adalah perjalanan maksiat<br/> kubba di atas kubur haram termasuk di atas kubur Nabi semua bid'ah sesat<br/> tidak berbermadzhab<br/> menganggap berdo'a di kuburan musyrik dan menghancurkan kuburan ulama<br/> tak ada toleransi dalam perbedaan<br/> mengkafirkan orang Islam<sup>2</sup></p> |
| <b>BAHAIYAH</b>  |  |
| <p>Agama Islam, agama Nashara , agama Yahudi, masing-masing ada Paham Wahdatul Wujud paham sesat<br/> Rasulullah adalah manusia biasa</p>  | <p>Agama Islam, agama Nashara , agama Yahudi, masing-masing tidak ada<br/> Paham Wahdatul Wujud paham benar<br/> Rasulullah adalah manifestasi Tuhan.</p>  |
| <b>AHMADIYAH</b>   |  |
| <p>Nabi Muhammad adalah Nabi paling akhir<br/> Akan datang di akhir zaman Isa al Masih bin Maryam<br/> Syari'at Islam sudah sempurna ketika Nabi Muhammad SAW wafat<br/> Kitab suci adalah Al-Qur'an Al-Karim</p>  | <p>Mirzha Ghulam Ahmad Nabi paling akhir<br/> Mirzha Ghulam Ahmad adalah Isa al Masih yang dijanjikan itu Syari'at Islam belum sempurna tetapi disempurnakan oleh syariat Mirzha Ghulam Ahmad.<br/> Kitab suci adalah At-Tadzkirah</p>   |

## H. Sikap NU dalam Beragama dan Bermasyarakat (Diniyah wal Ijtima'iyah)

1. *Tawassuthiyyah*, yaitu pola pikir dan sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Nahdlatul Ulama dengan pola pikir dan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat *tatharruf* (ekstrem), selalu moderat tidak ekstrim, tidak fundamentalis/ radikal, karena sikap ini menimbulkan konflik di tengah-tengah umat atau bangsa, dan tidak *tasahhul* (liberalis), karena pola pikir dan sikap ini dapat menimbulkan kekacauan keberagamaan umat.
2. *I'tidaliyyah*, yaitu pola pikir dan sikap yang tegak lurus yang berintikan berpikir dan bersikap untuk membela dalam kebenaran. Dalam pola pikir dan sikap ini tolak ukurnya ialah berbuat adil dalam membela pihak yang benar, dan sikap adil tersebut tidak dipengaruhi kecenderungan atas dasar tertentu. Misalnya, karena keluarga, atau pun sebaliknya karena suatu kebencian kepada pihak tertentu maka kebenaran tersebut diletakkan pada urutan terakhir. Maka dalam pola pikir dan sikap yang dipegang Nahdlatul Ulama dalam beragama dan bermasyarakat ialah keadilan dan kebenaran tersebut tidak memandang hal lain yang akan mempengaruhi tindakan atau sikap tegak lurus kepada kebenaran tersebut
3. *Tasammuhiyyah*, yaitu pola pikir dan sikap toleransi terhadap berbagai perbedaan, tetapi tidak mengorbankan aqidah demi toleransi. Dengan pola pikir dan sikap tasammuh (toleran) NU dapat menerima dan berdampingan dengan kalangan lain kendatipun dalam aqidah, cara pikir, dan budayanya terdapat perbedaan dalam masalah keagamaan. Dengan kata lain, pola pikir dan sikap tasammuh adalah bersumber dari sikap “lapang dada, yaitu tidak terburu-buru menerima dan menolak saran dan pendapat orang atau pihak lain”.
4. *Tawazzuniyyah*, yaitu pola pikir dan sikap seimbang dalam berkhidmah. Menyerasikan pengabdian kepada Allah dan

pengabdian kepada sesama manusia, serta kepada lingkungan hidupnya. Sikap tawazzun adalah sikap yang mencari cara atau jalan yang tepat mewujudkan pengabdian kepada Allah di dalam masyarakat yang sesuai dengan tuntutan zaman, yaitu dengan kata lain "Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang". keseimbangan hidup dunia dan akhirat, material dan spiritual.

5. *Islahiyyah*, yaitu pola pikir dan sikap reformatif yang berorientasi pada upaya-upaya perbaikan menuju ke arah yang lebih baik (*Al-Ishlah Ila Ma Huwa Al-Ashlah*).
6. *Tathawwuriyah*, yaitu pola pikir dan sikap dinamis yang senantiasa melakukan kontekstualisasi dalam merespon berbagai persoalan yang muncul di tengah kehidupan masyarakat.
7. *Manhajiyah*, yaitu pola pikir dan sikap metodologis yang senantiasa menggunakan kerangka berpikir yang mengacu kepada manhaj atau metode yang telah ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama.
8. *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* Sikap yang selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal-hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan. Proses *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* yang dipahami NU dilakukan dengan penuh hikmah kebijaksanaan, lemah lembut, dan kasih sayang.<sup>141</sup>

## I. Sikap NU Di Bidang Politik

Sejak awal berdirinya, NU banyak terlibat dalam masalah politik, baik politik praktis maupun kultural. Pada masa awal kemerdekaan, banyak tokoh NU yang menduduki jabatan di pemerintahan. Bahkan, pada tahun 1952, lewat Mukhtar NU ke-19, NU memutuskan untuk menjadi partai politik yang kemudian bubar saat Orde Baru berkuasa tahun 1973.

---

<sup>141</sup>Abdurrahman Wahid., *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Dewasa ini*, (Jakarta: Prisma, 1984), hlm. 194-195. Lihat juga Chalim, Asep Saifuddin, *Membumikan ASWAJA Pegangan Para Guru NU*, (Pasuruan: Mawan Pandaan, 2014), hlm. 13.

Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo menjadi satu titik penting dalam sejarah NU. Dalam Muktamar tersebut NU menegaskan dirinya sebagai organisasi keagamaan yang lebih banyak berkonsentrasi dalam masalah-masalah yang dihadapi umat Islam. Sebenarnya, wacana kembali ke Khittah NU tahun 1926 sudah lama disuarakan, namun baru menjadi diskusi dan perdebatan yang serius ketika Muktamar di Situbondo.

Dalam formulasi Khittah NU ditegaskan bahwa NU tidak terlibat dalam organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan manapun. Namun begitu, NU tidak melarang anggotanya untuk terlibat dalam urusan politik, karena hal tersebut bukanlah eksistensi dari Khittah.

Dalam Muktamar ke-28 di Yogyakarta (1989) dirumuskan 9 (sembilan) Pedoman Politik Warga NU, yaitu garis-garis pedoman untuk melangkah bagi kaum Nahdhiyin yang menerjuni dunia politik dengan tetap menjunjung tinggi Khittah Nahdlatul Ulama. Di lingkungan NU juga dikenal istilah Politik Kebangsaan, Politik Kerakyatan dan Politik Kekuasaan. Berikut ini 9 Pedoman Politik Warga NU dimaksud antara lain:

1. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir batin, dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
3. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.
4. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan moral, etika dan budaya yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah



- kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil, sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.
  6. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, dan dilaksanakan sesuai dengan akhlakul karimah sebagai pengamalan ajaran *Ahlussunnah wal Jamaah*.
  7. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalih apapun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan.
  8. Perbedaan pandangan di antara aspiran-aspiran politik warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadhu' dan saling menghargai satu sama lain, sehingga di dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
  9. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.<sup>142</sup>

Warga dan kiai NU yang ingin terjun ke dunia politik diperbolehkan asal mengerti ilmu politik dan piawai menjalankan strategi *siyasah* dengan tidak membawa label organisasi. Potensi politik kader NU juga hendaklah dikelola dengan profesional agar memberikan kontribusi bagi NU dan tidak sekadar “menjual” organisasi. Inilah pentingnya pemaknaan politik bagi kalangan Nadhiyin agar NU tidak menjadi korban ketika pesta demokrasi.<sup>143</sup>

---

<sup>142</sup> Soelaeman Fadeli dan Muhammad Subhan, *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah*, (Surabaya: Khalista, 2007). hlm. 99-100.

<sup>143</sup> Khamami Zada dan A Fawaid Sjadzili (Ed), *Nahdlatul Ulama: Dinamila Ideologi dan Politik*

Dalam konteks ini, lebih jauh makna politik bagi NU adalah bahwa menghindarkan diri dari urusan politik dan pada saat yang sama menyerahkan urusan politik sepenuhnya kepada orang yang tidak kompeten justru akan membahayakan. Oleh karenanya, selain menghayati Khittah NU, paling tidak warga NU harus mengetahui rujukan *Siyasah Nahdliyah*.

## J. Sikap NU Di Bidang Kebudayaan

Dialektika Islam dengan realitas kebudayaan dan kehidupan sejatinya merupakan realitas yang terus menerus menyertai agama ini sepanjang sejarahnya. Sejak awal kelahirannya, Islam tumbuh dan berkembang dalam suatu kondisi yang tidak hampa budaya. Realitas kehidupan ini—diakui atau tidak—memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengantarkan Islam menuju perkembangannya yang aktual sehingga sampai pada suatu peradaban yang mewakili dan diakui oleh masyarakat dunia.

Tradisi atau kebudayaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah tingkah laku, kebiasaan, dan aturan-aturan tidak tertulis yang dipegang teguh oleh para kiai NU, baik dalam kehidupan berorganisasi maupun bermasyarakat sebagai konsekuensi dari ajaran Islam yang dipelajari dan diajarkannya. Dalam konteks ini, tradisi, meminjam beberapa variabel yang digunakan Koentjaraningrat sebagai kompleksitas ide, gagasan, nilai-nilai, moral, dan peraturan-wujud ideal dari kebudayaan yang sifatnya abstrak yang lokasinya terletak dalam alam pikiran manusia warga masyarakat<sup>144</sup>.

Aktualisasi Islam dalam lintasan sejarah telah menjadikan Islam tidak dapat dilepaskan dari aspek lokalitas, mulai dari budaya Arab, Persi, Turki, India sampai Melayu. Masing-masing dengan karakteristiknya sendiri, tapi sekaligus mencerminkan nilai-nilai ketauhidan sebagai suatu *unity* sebagai benang merah yang mengikat secara kokoh satu sama lain. Islam sejarah yang beragam tapi satu ini merupakan penerjemahan Islam universal ke dalam realitas kehidupan umat manusia.

Gagasan Islam pribumi, secara genealogis, diilhami oleh gagasan pribumisasi Islam yang pernah dilontarkan oleh Abdurrahman Wahid

---

*Kenegaraan*, (Jakarta: Kompas, 2010). hlm. 29.

<sup>144</sup> Ali Anwar, *Advonturisme NU*, (Bandung: Humaniora, 2004), hlm.134.

pada paruh akhir tahun 80-an. Dalam “pribumisasi Islam” tergambar bagaimana Islam sebagai sebuah ajaran yang normatif berasal dari Tuhan yang diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Bagi Abdurrahman Wahid, Arabisasi atau proses mengidentifikasi diri dengan budaya Timur Tengah adalah tercerabutnya kita dari akar budaya kita sendiri. Lebih jauh, Arabisasi belum tentu cocok dengan kebutuhan. Pribumisasi bukan sebagai upaya menghindari timbulnya perlawanan dari kekuatan-kekuatan budaya setempat, akan tetapi justru agar budaya itu tidak hilang. Karena itu, inti pribumisasi Islam adalah bukan untuk melakukan polarisasi antara agama dan budaya, sebab polarisasi demikian memang tidak terhindarkan.<sup>145</sup>

Pribumisasi Islam ini, sejatinya mengambil semangat yang diajarkan oleh Wali Songo dalam dakwahnya ke wilayah nusantara sekitar abad ke-15 dan ke-16 di pulau Jawa. Dalam konteks ini Wali Songo telah berhasil memasukkan nilai-nilai lokal dalam Islam yang khas Indonesia. Kreativitas ini melahirkan gugusan baru bagi nalar Islam Indonesia yang tidak harfiah dan tekstual meniru Islam di Arab. Tidak ada nalar Arabisasi yang melekat dalam penyebaran Islam awal di nusantara. Hal ini tentu saja berbeda dengan apa yang telah dilakukan pada masa selanjutnya, yakni abad ke-17 oleh Abdurrauf al-Sinkili dan Muhammad Yusuf al-Makasari yang lebih bercorak purifikasi dalam pembaruan Islam.

Wali Songo justru mengakomodasikan Islam sebagai ajaran agama yang mengalami historisasi dengan kebudayaan. Misalnya, apa yang dilakukan oleh Sunan Bonang dengan mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu menjadi bernuansa zikir yang mendorong kecintaan pada kehidupan transendental. Tembang “tombo Ati” adalah salah satu karyanya. Lebih jauh dalam pentas pewayangan Sunan Bonang mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam.

Oleh karenanya, ‘Islam Pribumi’ sebagai jawaban dari Islam otentik mengandaikan tiga hal. *Pertama*, ‘Islam Pribumi’ memiliki sifat kontekstual, yakni Islam dipahami sebagai ajaran yang terkait dengan konteks zaman dan tempat. Perubahan waktu dan perbedaan wilayah menjadi kunci untuk menginterpretasikan ajaran. Dengan

---

<sup>145</sup> Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, [Jakarta: Desantara, 2001], h. 111

demikian, Islam akan mengalami perubahan dan dinamika dalam merespons perubahan zaman. *Kedua*, 'Islam Pribumi' bersifat progresif, yakni kemajuan zaman bukan dipahami sebagai ancaman terhadap penyimpangan terhadap ajaran dasar agama (Islam), tetapi dilihat sebagai pemicu untuk melakukan respons kreatif secara intens. *Ketiga*, 'Islam Pribumi' memiliki karakter membebaskan. Dalam pengertian, Islam menjadi ajaran yang dapat menjawab problem-problem kemanusiaan secara universal tanpa melihat perbedaan agama dan etnik. Dengan demikian, Islam tidak kaku dan rigid dalam menghadapi realitas sosial masyarakat yang selalu berubah.

Dalam konteks inilah, 'Islam Pribumi' ingin membebaskan puritanisme, otentifikasi, dan segala bentuk pemurnian Islam sekaligus juga menjaga kearifan lokal tanpa menghilangkan identitas normatif Islam. Karena itulah, 'Islam Pribumi' lebih berideologi kultural yang tersebar (*spread cultural ideology*), yang mempertimbangkan perbedaan lokalitas ketimbang ideologi kultural yang memusat, yang hanya mengakui ajaran agama tanpa interpretasi. Sehingga dapat tersebar di berbagai wilayah tanpa merusak kultur lokal masyarakat setempat. Dengan demikian, tidak akan ada lagi praktik-praktik radikalisme yang ditopang oleh paham-paham keagamaan ekstrem, yang selama ini menjadi ancaman bagi terciptanya perdamaian.<sup>146</sup>

Selanjutnya dengan mempertimbangkan situasi-situasi sosio-historis yang melingkupi nash al-Qur'an ketika turun, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan dialektis antar teks al-Qur'an dan realitas budaya. Karena sifatnya yang selalu berdialektika dengan realitas itulah, maka tradisi keagamaan dapat berubah sesuai dengan konteks sosial dan kultural suatu masyarakat. Islam adalah sebuah gerakan yang membuka dan memberi harapan kepada semua kelompok sosial, baik agama, kelas, etnik, dan jender yang hidup di dalam wilayah sosio kultural tertentu untuk meneguhkan identitas diri mereka kepada lokalitasnya secara kritis, mengelola perbedaan-perbedaan yang muncul sebagai konsekuensinya dan mengarahkan berbagai kelompok-kelompok yang berbeda tersebut untuk selalu melihat cita-cita yang lebih jauh untuk pemenuhan ketinggian harkat kemanusiaan mereka sendiri.<sup>147</sup>

---

<sup>146</sup> Khamami Zada, "Islam Pribumi...", dalam Tashwirul Afkar, Edisi No. 14/ 2003

<sup>147</sup> M. Jadul Maula, "Syariat [Kebudayaan] Islam: Lokalitas dan Universalitas", *makalah*

Dalam aksinya, Islam pribumi selalu mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal masyarakat, di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa mengubah hukum-hukum inti dalam agama. Sementara ajaran-ajaran inti Islam itu dilahirkan di dalam kerangka untuk memberikan kontrol konstruktif terhadap penyimpangan-penyimpangan lokalitas yang terjadi. Terhadap tradisi lokal yang mempraktekkan pola-pola kehidupan zholim, hegemonik, tidak adil, maka Islam pribumi akan melancarkan kritiknya. Sedangkan terhadap tradisi lokal yang memberikan jaminan keadilan, dan kesejahteraan pada lingkungan masyarakatnya, maka Islam pribumi akan bertindak sangat apresiatif. Bahkan, tradisi lokal yang *adi luhung* [*urf shahih*] dalam pandangan Islam pribumi, memiliki semacam otoritas untuk *mentakhsis* sebuah teks nash. Sebagai ilustrasi, bagaimana sebuah tradisi yang bersifat propan oleh para ulama kemudian diberi semacam wewenang untuk *mentakhsis* sebuah teks yang dipandang berasal dari Tuhan, Disebutkan bahwa tradisi masuk dalam deretan dalil-dalil *istinbath* hukum Islam [*al-'adah muhakkamah*].

Istilah kaum *nahdliyin* merujuk kepada para pengamal paham *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang diidentifikasi kepada umat Islam yang tergabung dalam jam'iyah Nahlatul Ulama, komunitas muslim yang umumnya terbentuk dalam proses sejarah Islam Indonesia yang umumnya terkonsentrasi di pedesaan. Selain itu, mereka lekat dengan budaya Jawa, budaya yang di dalamnya orang-orang NU lahir dan NU sendiri berasal dari pulau Jawa. Akar sejarah yang seperti inilah yang melahirkan pemotretan sosial adanya kerapatan, bahkan tak terpisahkan antara budaya Jawa dan eksistensi kaum nahdliyin.

Sikap kaum nahdliyin mampu menyesuaikan antara agama dan budaya Jawa, khususnya dan budaya bangsa Indonesia pada umumnya. Itulah sebabnya, kaum nahdliyin sangat akrab dengan budaya lokal dan mempunyai tradisi yang sangat kuat untuk menjalankan syari'at Islam. Cara yang ditempuh NU dalam menghadapi budaya local adalah kompromi, tidak bersikap destruktif, tetapi sedapat mungkin membiarkannya tetap hidup dimasyarakat sambil mengisinya dengan jiwa dan semangat Islam. Inilah yang menjadi salah satu sumber kekuatan NU sehingga lahirnya NU tidak berhadapan dengan budaya

lokal masyarakat, bahkan mampu menyatukan aspirasi kebudayaan dengan aspirasi keislaman.

NU menyadari, bahkan meyakini, bahwa apresiasinya yang tinggi terhadap kebudayaan yang ada di tengah masyarakat tidak sampai masuk dalam kategori bid'ah, khurafat dan syirik. Misalnya, peringatan kematian hari pertama, ketiga, ketujuh, keseratus, keseribu hingga haul. Jika memang bid'ah, namanya adalah inovasi budaya, atau bias diistilahkan *bid'ah* kebudayaan. Bid'ah jenis ini justru merupakan sebuah keniscayaan sejarah.

Kemampuan NU mendudukan kebudayaan secara proporsional dan yang seharusnya telah menempatkan NU sebagai organisasi yang concern dalam pemeliharaan tradisi Islam di Indonesia. Kekuatan ini bukan hanya terletak pada pola pikir tradisionalnya, melainkan juga karena NU bertolak pada khadim al-ummah. Implikasinya, NU lebih populis di tengah-tengah kehidupan masyarakat, tanpa berkonfrontasi dengan mereka. Kerapatan dan kedekatan NU dengan kebudayaan lokal memposisikan eksistensi NU didukung oleh berbagai kelompok sosial dan aliran seperti kaum abangan, bahkan non-Islam. Tradisi tahlilan misalnya, di daerah-daerah minus agama yang terkadang diikuti oleh orang-orang yang beragama Hindhu atau Budha. Ini terjadi karena sikap NU yang selalu mengakomodasi tradisi masyarakat dan berusaha menghindari sikap konfrontatif yang karenanya terjadi jarak dengan masyarakat, apalagi menyerang tradisi mereka.

Upaya pembaharuan yang dilakukan NU adalah mengambil hal baru yang lebih baik. Jadi, NU berada di tengah-tengah antara tradisi lama dan budaya baru yang lebih baik. Sikap tengah-tengah (*wasathan*) ini merupakan bukti nyata bahwa NU berupaya membangun wacana baru dan khas dibandingkan organisasi lain dalam upaya merespons arus modernisasi. Karena itu, dapat dikatakan bahwa di dalam tubuh NU ditemukan akar proses persemaian tentang tumbuhnya neomodernisasi yang dialami NU. Ketika organisasi Islam lainnya bermusuhan dengan tradisi lokal guna mengikuti irama kemodernan, NU justru berusaha melindunginya, lalu menjadi organisasi yang berkarakter melindungi tradisi.<sup>148</sup>

---

<sup>148</sup> *Ibid.*, hlm. 116-118

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa sikap Nahdlatul Ulama dalam bidang kebudayaan adalah menghargai entitas budaya lokal dan budaya mana saja datangnya selama tidak bertentangan dengan norma fundamental Islam dan merusak aspek moral. Menyikapi budaya atau tradisi, ajaran Nahdlatul Ulama mengacu kepada salah satu kaidah fiqh yang berbunyi: “*al Muhafazhah `ala al-Qadīm al-Shālih Wa al-Akhdzu Bi al-Jadid al-Aslah*” (mempertahankan kebaikan warisan masa lalu dan mengambil hal baru yang lebih baik). Kaidah ini menuntun untuk memperlakukan fenomena kehidupan khususnya kebudayaan dengan seimbang dan proporsional. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama tidak apriori terhadap kebudayaan atau tradisi akan tetapi berusaha akomodatif terhadap kebudayaan itu khususnya terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran maupun dalam pelaksanaannya. Bahkan fiqh *Ahlussunnah Waljamā'ah* menjadikan tradisi sebagai salah satu yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan sebuah hukum. Hal ini tercermin dalam salah satu kaidah fiqh yang berbunyi: *Al`Udatu Muhakkamah*” (adat kebudayaan menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum).

## **K. Sikap NU Di Bidang Pendidikan**

Nahdlatul Ulama memaknai pendidikan tidak semata-mata sebagai sebuah hak, melainkan juga kunci dalam memasuki kehidupan baru. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama dan harmonis antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Ketiganya merupakan komponen pelaksana pendidikan yang interaktif dan berpotensi untuk melakukan tanggung jawab dan harmonisasi. Fungsi pendidikan bagi Nahdlatul Ulama adalah, satu, untuk mencerdaskan manusia dan bangsa sehingga menjadi terhormat dalam pergaulan bangsa di dunia, dua, untuk memberikan wawasan yang plural sehingga mampu menjadi penopang pembangunan bangsa.

Gerakan pendidikan Nahdlatul Ulama sebenarnya sudah dimulai sebelum Nahdlatul Ulama sebagai organisasi secara resmi didirikan. Cikal bakal pendidikan Nahdlatul Ulama dimulai dari berdirinya Nahdlatul Wathan, organisasi penyelenggara pendidikan yang lahir sebagai produk pemikiran yang dihasilkan oleh forum diskusi yang disebut Tashwirul Afkar, yang dipimpin oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah. Organisasi ini mempunyai tujuan untuk memperluas dan mempertinggi mutu

pendidikan sekolah atau madrasah yang teratur. Dalam mengusahakan terciptanya pendidikan yang baik, maka Nahdlatul Ulama memandang perlunya proses pendidikan yang terencana, teratur dan terukur. Sekolah atau madrasah menjadi salah satu program Nahdlatul Ulama, disamping jalur non formal seperti pesantren.

Sekolah atau madrasah yang dimiliki Nahdlatul Ulama memiliki karakter yang khusus, yaitu karakter masyarakat. Diakui sebagai milik masyarakat dan selalu bersatu dengan masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Sejak semula masyarakat mendirikan sekolah atau madrasah selalu dilandasi oleh mental, percaya pada diri sendiri dan tidak menunggu bantuan dari luar. Pada masa penjajahan, Nahdlatul Ulama secara tegas menolak bantuan pemerintah jajahan bagi sekolah atau madrasah dan segala bidang kegiatannya.

Lembaga Pendidikan Ma'arif (LP Ma'arif) yang berdiri pada tanggal 19 September 1929 M atau bertepatan dengan 14 Rabiul Tsani 1347 H adalah lembaga yang membantu Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan yang selalu berusaha meningkatkan dan mengembangkan sekolah atau madrasah menjadi lebih baik. Sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mengelola pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama, LP Ma'arif mempunyai visi dan misi yang selalu diperjuangkan demi meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Visi dan misi yang dimaksud adalah:

1) Visi

- a. Terciptanya manusia unggul yang mampu berkompetisi dan sains dan teknologi serta berwawasan Ahlussunnah Wal Jama'ah.
- b. Tersedianya kader-kader bangsa yang cakap, terampil dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berakhlak karimah.
- c. Terwujudnya kader-kader Nahdlatul Ulama yang mandiri, kreatif dan inovatif dalam melakukan pencerahan kepada masyarakat.

2) Misi

- a. Menjadikan lembaga pendidikan yang berkualitas unggul



dan menjadi idola masyarakat.

- b. Menjadikan lembaga pendidikan yang independen dan sebagai perekat komponen bangsa.

Selain sekolah atau madrasah, pendidikan lain yang dikelola Nahdlatul Ulama adalah pesantren. Dengan segala dinamikanya, keberadaan pesantren telah memberikan sumbangan besar yang tidak ternilai harganya dalam mencerdaskan anak bangsa, menyuburkan tradisi keagamaan yang kuat serta menciptakan generasi yang berakhlak karimah. Pendidikan pesantren dirancang dan dikelola oleh masyarakat, sehingga pesantren memiliki kemandirian yang luar biasa, baik dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, mengembangkan ilmu (agama) maupun dalam mencetak ulama. Para lulusan pesantren tidak sedikit yang tampil dalam kepemimpinan nasional, baik dalam reputasi kejuangan, keilmuan, kenegaraan maupun kepribadian.

Tradisi keilmuan dan keahlian dalam pesantren ditandai beberapa hal sebagai berikut :

- a. Adanya tahapan-tahapan materi keilmuan.
- b. Adanya hirarki kitab-kitab yang menjadi bahan kajian.
- c. Adanya metodologi pengajaran yang bervariasi (pola terpimpin, pola mandiri dan ekspresi).
- d. Adanya jaringan pesantren yang menggambarkan tingkatan pesantren.

Berdasarkan hal ini, sikap Nahdlatul Ulama adalah menjaga, merawat tradisi keilmuan dalam semua bidang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama yang berhaluan paham *Ahlussunnah wa Jama'ah* melalui “sistem pendidikan pondok pesantren” sebagai sebuah sistem yang dianut dan selalu dijaga, dilestarikan, dikembangkan, seperti metode sistem *sorogan*, sistem *ngaji tokol*.<sup>149</sup>

Lebih jauh, salah satu tugas besar yang menjadi tanggung jawab Nahdlatul Ulama dalam pengembangan pendidikan pesantren adalah bagaimana menggali nilai-nilai tradisi yang menjadi ciri khasnya dengan ajaran Islam untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.

---

<sup>149</sup> Ngaji tokol merupakan istilah kultur sasak yang menunjuk kepada suatu sistem pembelajaran klasik di mana guru dan murid melakukan pembelajaran menggunakan kitab klasik hanya dengan cara duduk bersila dan tidak menggunakan cara lain.

Hanya dengan demikian Nahdlatul Ulama akan mampu memberikan arti keberadaan dan kebermaknaannya dalam masyarakat, bangsa dan kemanusiaan.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa sikap Nahdlatul Ulama dalam konteks pendidikan adalah menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal yang sesuai dengan nilai-nilai Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah*, untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, dan berpengetahuan luas. Hal ini terbukti dengan lahirnya lembaga-lembaga pendidikan dengan berbagai jenjang, mulai tingkat dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, seperti berdirinya Universitas Nahdlatul Ulama di berbagai provinsi di Indonesia.

## **L. Sikap NU Di Bidang Ekonomi**

Dalam bidang ekonomi, secara embrional Nahdlatul Ulama diawali oleh terbentuknya Nahdlatul Tujjar yang artinya kebangkitan para pedagang. Institusi ini merupakan gerakan ekonomi yang bertujuan menguatkan sendi-sendi perekonomian rakyat dan berbagai bentuk usaha bersama seperti koperasidan pengembangan unit usaha kecil.

Kebanyakan peggagas awal berndirinya Nahdlatul Ualama, seperti KH A Wahab Chasbullah adalah seorang pedagang, atau paling tidak mereka memiliki unit usaha yang membuat mereka bisa mandiri secara ekonomi. Sedangkan Tashwirul Afkar atau potret pemikiran adalah gerakan pemikiran yang berfungsi sebagai laboratorium sosial untuk mengembangkan dan menerjemahkan pemikiran-pemikiran Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman yang terus berubah. Dengan demikian, NU sebenarnya bukan gerakan keagamaan un sich dalam arti yang sempit, tetapi juga gerakan ekonomi, gerakan pemikiran dan pendidikan yang berorientasi kebangsaan dan kerakyatan. Orientasi demikian bisa terus dijaga sampai saat ini dengan berbagai bentuk kebijakan yang mungkin belum terkonsolidasi dengan baik.

Sikap Nahdlatul Ulama dalam bidang ekonomi yaitu, berusaha mengembangkan sektor ekonomi melalui berbagai kegiatan yang produktif yang berdasar pada kaidah fiqih ekonomi yang dibenarkan oleh hukum syara' atau syari'at Islam. Sepanjang kegiatan ekonomi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka Nahdlatul Ulama mendorong, menganjurkan, serta memberikan bimbingan

ekonomi kepada masyarakat melalui lembaga ekonomi Nahdlatul Ulama (LP-NU) dan organisasi Nahdlatul Tujjar di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang dibentuk pada muktamar ke-27 di Situbondo bersamaan dengan hasil keputusan Nahdlatul Ulama untuk kembali ke khittah 1926. Tujuannya adalah untuk memberikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi umat Islam Indonesia di bidang perekonomian. Terutama melihat bahwa warga Nahdliyin merupakan mayoritas masyarakat petani dan tergolong miskin.

Berdasarkan hal ini, maka sikap Nahdlatul Ulama di bidang ekonomi antara lain: *Pertama*, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat. Hal ini ditandai dengan lahirnya BMT dan Badan Keuangan lain yang telah terbukti membantu masyarakat, dan *kedua*, mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Singkatnya, NU berusaha mengabdikan dan menjadi yang terbaik bagi masyarakat.

## **M. Sikap NU Di Bidang Dakwah**

Kondisi kehidupan keagamaan kaum muslimin pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari proses dakwah atau penyebaran Islam di Indonesia sejak beberapa abad sebelumnya. Kemampuan Islam untuk beradaptasi dengan budaya setempat, memudahkan Islam masuk ke lapisan paling bawah dari masyarakat, sehingga kebudayaan Islam mengalami transformasi.

Kemampuan Islam untuk beradaptasi dengan budaya setempat, memudahkan Islam masuk ke lapisan paling bawah dari masyarakat. Akibatnya, kebudayaan Islam sangat dipengaruhi oleh kebudayaan petani dan kebudayaan pedalaman, sehingga kebudayaan Islam mengalami transformasi bukan saja karena jarak geografis antara Arab dan Indonesia, tetapi juga karena ada jarak-jarak kultural.

Proses kompromi kebudayaan seperti ini tentu membawa resiko yang tidak sedikit, karena dalam keadaan tertentu seringkali mentoleransi penafsiran yang mungkin agak menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Kompromi kebudayaan ini pada akhirnya melahirkan, apa yang

di pulau Jawa dikenal sebagai *sinkretisme* atau *Islam Abangan*. Sementara di pulau Lombok dikenal dengan istilah *Islam Wetu Telu*.<sup>150</sup>

Secara etimologis, kata 'dakwah' berarti 'ajakan', yang berasal dari kata Arab, *da'û, yad'û, da'watan, du'a*<sup>151</sup> yang berarti mengajak, memanggil, menyeru, memanggil, permohonan dan mengharap manusia agar senantiasa berada di jalan Allah SWT. Istilah ini sering diberi arti yang sama dengan istilah *tabligh, amar ma'ruf-nahi munkar, mauizhoh hasanah, tabsyir, inzhâr, washiyah, tarbiah, ta'lim dan khotbah*.

Pada tataran empirik, parktek dakwah harus mengandung tiga unsur, penyampai pesan, informasi yang disampaikan, dan penerima pesan. Namun demikian, dakwah secara terminologi mengandung pengertian yang lebih luas, yaitu sebagai aktivitas menyampaikan ajaran Islam, menyuruh berbuat baik, dan mencegah perbuatan mungkar, serta memberi kabar gembira dan peringatan bagi manusia. Sebagai wacana *praxis*, dakwah selalu dikaitkan dengan frase 'dengan bijaksana', suatu ungkapan yang menegaskan penolakan atas setiap jalan kekerasan atau paksaan dalam mewujudkan tujuan. Pemaknaan etimologis ini diderivasi dari firman Allah SWT:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (Q.S. An-Nahl[16]: 125)

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

<sup>150</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, *Parokialitas Adat Terhadap Pola Keberagamaan Komunitas Islam Wetu Telu di Bayan Lombok*, (Jakarta: Lemlit UIN Jakarta, 2009), h. 111

<sup>151</sup> Majma' al-Lughah al-'arabiyah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), h. 286

“Katakanlah: “Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik”. (Q.S. Yusuf [12]: 108)

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dakwah pada dasarnya adalah suatu upaya manusia dan untuk kepentingan manusia pula dalam kerangka mewujudkan nilai-nilai dasar keislaman dalam realitas kemanusiaan di mana kemaslahatan bagi semua menjadi tujuannya. Nilai-nilai dimaksud adalah apa yang lazim diistilahkan sebagai *majorthemesofIslam*, yakni ketuhanan (*tawhîd*), keadilan (*al-‘adâlah*), egalitarianisme (*al-musâwah*), kebebasan (*al-hurriyah*), kebaikan (*al-khayr*), musyawarah (*al-syûrâ*), *amr ma‘rûf nahiy munkar*, dan seterusnya.

Makna dakwah sebagai seruan atau ajakan persuasif nan ramah itu relevan dengan metode dakwah yang dilansir Allah SWT sendiri dalam surat an-Nahl. Secara eksplisit ayat tersebut mendiskripsikan tentang strategi metode dakwah, yaitu diperintah untuk “mengajak” manusia ke dalam jalan kebenaran dengan tiga cara, yaitu (1) mengetengahkan *al-hikmah*; (2) menyampaikan *al-maw‘izhah al-hasanah* (pelajaran yang baik); dan (3) melangsungkan *mujâdalah* (dialog) dengan cara terbaik.

Dalam konteks dakwah, NU menggunakan metode yang digunakan Wali Songo dulu. Nahdlatul Ulama berkomitmen memperkuat pendekatan budaya sebagai salah satu elemen penting dakwah Islam di Tanah Air. Sebab, dengan pendekatan aspek budayalah Islam dapat diterima baik oleh penduduk pribumi awal kedatangan Islam. NU melakukan berbagai upaya agar dakwah akulturatif ini tetap menjadi khittah kuat organisasi ini. Salah satunya melalui upaya sosialiasi ke pondok pesantren yang merupakan basis kaderisasi potensial di kalangan NU. Termasuk pula memberikan penyadaran kepada warga nahdliyyin akan pentingnya menggunakan media budaya dalam berdakwah.

Menurut Muhammad Tholhah Hasan<sup>152</sup> bahwa untuk dapat memahami *Ahlussunnah wal Jama’ah* secara utuh, tidak mungkin hanya menggunakan pendekatan doktrinal saja, tetapi harus menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu :

---

<sup>152</sup> Muhammad Tholhah Hasan, *Ahlussunnah Wal-Jama’ah*; dalam *Persepsi dan Tradisi NU*, (Jakarta : Lantabora Press, 2005), hlm xiii-xviii.

*Pertama*, Pendekatan historis, *Ahlussunnah wal Jama'ah* ini telah melahirkan konsep dan pandangan serta doktrin-doktrin yang secara teoritis bersentuhan dengan perjalanan sejarah umat ini sejak zaman Rasulullah SAW. sampai masa kontemporer saat ini. Meskipun akar-akarnya tetap terkait kuat dengan aqidah “Tauhid”, dan prinsip-prinsip keimanan yang abadi, tetapi wujud formulasi konseptualnya bisa saja berbeda.

*Kedua*, Pendekatan kultural, muncul dan berkembangnya “Ilmu Kalam” sebagai disiplin keilmuan Islam yang berkonsentrasi pada masalah-masalah aqidah dengan menggunakan dalil-dalil ‘aqliyah (argument rasional) tidak lepas dari faktor internal Islam maupun faktor eksternal (terjadinya akulturasi atau persentuhan antar budaya), seperti perluasan disiplin keilmuan Islam, ada Ilmu Tafsir, Ilmu Fiqih, Ilmu Hadits, Ilmu Nahwu dan lain sebagainya, disamping berkembangnya ilmu-ilmu non-syari’ah, seperti Filsafat, Kedokteran, Ilmu Alam, Matematika, Astronomi, Kimia, dan sebagainya. Semua ini secara akumulatif memperluas cakrawala pemikiran umat Islam.

*Ketiga*, Pendekatan doktrinal, meskipun pada mulanya *Ahlussunnah wal Jama'ah* itu menjadi identitas kelompok/golongan dalam dimensi teologis atau aqidah Islam, dengan fokus masalah ushuluddin, tetapi dalam perjalanan selanjutnya tidak bisa lepas dari dimensi keislaman lainnya, seperti dimensi syari’ah, fiqhiyah atau dimensi tashawwuf, bahkan masalah budaya, politik dan sosial, karena kuatnya jaringan yang tali-temali antara yang fundamental tadi dengan cabang-rantingnya.<sup>153</sup>

Sikap Nahdlatul Ulama dalam bidang dakwah yaitu, mendasarkan pada sikapnya di bidang dakwah tidak lepas dari sikap-sikap dalam bermasyarakatnya seperti penjelasan sebelumnya dan dengan cara-cara hikmah, nasehat yang baik, dan jika tidak mencapainya sasaran dakwahnya bila perlu menggunakan jalan diskusi atau debat yang tetap santun dan bermartabat untuk menuju jalan kebenaran dengan berpedomankan pada ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama dan paham *Ahlussunnah Waljama'ah*.

---

<sup>153</sup> *Ibid.*

## N. Sikap NU di Bidang Kebangsaan

Nahdlatul Ulama sebagai suatu organisasi Islam terbesar di Indonesia ikut bertanggungjawab untuk memberikan kontribusinya dalam membangun cita-cita keadaban bangsa. Hal ini karena kontribusi NU tidak hanya dialamatkan kepada jamaah NU saja, tetapi lebih besar dari itu bagaimana NU bisa berkontribusi kepada bangsa (umat). Oleh sebab itu NU merumuskan jalan keadaban yang dapat dikontribusikan kepada bangsa dengan cara antara lain;

*Pertama*, NU merumuskan konsep *mabadi' khoiru ummat* (prinsip dasar umat terbaik) yang diorientasikan pada perubahan moral sosial-ekonomi masyarakat. Pengukuhan moralitas sebagai landasan dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang bertumpu pada *as-shidiq* (kejujuran) dan *al-amanah* (tanggung jawab), sehingga tatalaku masyarakat dilandasi oleh tata moral yang agung, bukan nafsu serakah dan kepentingan ego pribadi. Saat ini, moralitas sengaja dipinggirkan demi segala kepentingan. Tempat moralitas dipersepsikan hanya berada di dalam rumah ibadah (masjid dan mushola), bukan dalam tata laku masyarakat. Moralitas cukup menjadi menu utama dalam khotbah agama. Inilah yang terjadi di Indonesia, ketika moral hanya menjadi khotbah yang diperdengarkan di ruang publik, tetapi mengabaikannya dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Sebagai misal, masyarakat kita dengan nada meyakinkan akan memberantas korupsi “*say no to corruption*”, tetapi mengabaikan praktik korupsi disekelilingnya, bahkan ironisnya mereka jugalah yang mempraktikkan korupsi.

*Kedua*, NU merumuskan fondasi besar dalam kehidupan berbangsa ketika memelopori penerimaan Pancasila sebagai asas bernegara dan bermasyarakat yang harus diterima oleh umat Islam. Tidak berlebihan jika NU terus menerus melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara yang paling ideal bagi bangsa Indonesia. Sejak lahirnya NU, konsepsi ini telah dikumandangkan oleh para pendirinya, seperti KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Wahab Hasbullah, meskipun ide globalisme Islam terus dikumandangkan dengan negara *khilafah* namun NU kokoh dengan ide kebangsaan Indonesia yang berideologi Pancasila.

*Ketiga*, NU merumuskan kontribusinya dalam wawasan keagamaan moderat dan ikut mendorong pembentukan ide

kebangsaan. NU berhasil merumuskan sikap dasar dalam merespon isu-isu keagamaan dan kebangsaan dengan prinsip dasar; *tawasuth* (moderat), *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan), dan *i'tidal* (keadilan). Dengan gagasan dasar ini NU telah berhasil melahirkan generasi bangsa yang mengedepankan hidup dalam suasana yang toleran dan moderat, bukan dengan kekerasan.

Pencarian norma keadaban bangsa akan terus menjadi cita-cita ideal dalam rangka meraih mimpi Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat. Dalam konteks inilah NU sebagai bagian dari kekuatan masyarakat beradab menemukan relevansi kontributifnya dalam membangun keadaban bangsa.

Sikap Nahdlatul Ulama dalam bidang kebangsaan, yaitu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni konsekwen sebagai bentuk negara yang sudah final. Nahdlatul Ulama menolak ideologi yang dikembangkan oleh Hizbut Tahrir yang mau mendirikan negara Khilafah di bumi Nusantara dan kelompok-kelompok lainnya yang tidak mengakui Pancasila dan UUD 1945.<sup>154</sup>

Dalam kaitan ini Nahdlatul Ulama mendasari dengan 4 semangat yaitu:

1. *Ruh al-Tadayyun* (semangat beragama yang dipahami, didalami, dan diamalkan). Semangat yang menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama mendorong warganya untuk senantiasa meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah agama yang ramah dan damai. Dengan semakin banyaknya konflik kekerasan yang mengatasnamakan agama, Nahdlatul Ulama harus lebih intensif mengembangkan sikap *tawasuth* ke masyarakat, tanpa memandang agama dan keyakinan masyarakat lain.
2. *Ruhal-Wathoniyah* (semangat cinta tanah air). Keterlibatan Nahdlatul Ulama dalam pergerakan kebangsaan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia, Nahdlatul Ulama telah secara aktif menerapkan semangat cinta tanah air atau *ruhal wathoniyah*, bahkan ketika sebagian umat Islam mengajukan syari'at Islam sebagai ideologi negara dengan memasukkan tujuh kata dalam pancasila yang berbunyi: "*dengan*

---

<sup>154</sup> Tim PWNU Jawa Timur, *Aswaja An-Nahdliyah*, (Surabaya: Khalista, 2007, hlm. 7-9.



*kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya*”, Nahdlatul Ulama rela menghilangkannya demi persatuan bangsa tanpa harus mengorbankan aqidah. Ini gambaran jelas bagi betapa Nahdlatul Ulama sangat konsisten dengan perjuangan para pahlawan yang berasal dari berbagai macam latar belakang agama dan etnis yang ikut berjuang memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan. Dengan demikian, sudah menjadi keyakinan Nahdlatul Ulama dan warganya bahwa Pancasila merupakan wujud upaya umat Islam Indonesia dalam mengamalkan agamanya. Dan hal ini merupakan semangat yang tujuannya sudah merupakan hal yang sudah final bagi Nahdlatul Ulama.

3. *Ruh al-Ta'addudiyah* (semangat menghormati perbedaan). Dengan melihat semangat cinta tanah air tersebut. Nahdlatul Ulama sejak awal menyadari bahwa keanekaragaman bangsa ini harus dipertahankan. Bagi Nahdlatul Ulama, keanekaragaman bangsa Indonesia bukanlah penghalang dan kekurangan, melainkan sebagai kekayaan dan peluang, sehingga warga Nahdlatul Ulama menganggap perlu menjunjung tinggi dan menghormati keanekaragaman tersebut. Hal ini sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara pada waktu beliau hidup di kota Madinah. Di mana beliau hidup bermasyarakat dengan berbagai macam latar belakang agama dan etnis yang berbeda-beda dan sangat beliau sangat menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada tersebut.<sup>155</sup>
4. *Ruh al-Insaniyyah* (semangat kemanusiaan). Semangat yang mendorong setiap warga Negara Indonesia untuk menghormati setiap hak manusia. Meski Nahdlatul Ulama merupakan organisasi terbesar di Indonesia bahkan di dunia, namun kebesaran itu tidak menjadikan Nahdlatul Ulama memandang sebelah mata yang lain. Justru semua manusia dipandang sama akan hak dan derajatnya dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Karena semangat kemanusiaan ini merupakan dasar terakhir sebagai pengikat antar sesama warga negara Indonesia.

---

<sup>155</sup> Yayasan Darut Taqwa, *Piagam Madinah*, (Pasuruan: Yudharta Advertaising design, 2008). hlm. 29.

Keempat semangat inilah yang menjadi kunci Nahdlatul Ulama menjadi sebuah organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia dan dunia. Dengan demikian, kemunduran pasti akan terjadi jika Nahdlatul Ulama sampai mengabaikan apalagi melupakan empat semangat atau ruhnya tersebut.<sup>156</sup>

## 0. Perangkat Organisasi Nahdlatul Ulama

Untuk menjalankan segala visi dan misi perjuangan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan dan kebangsaan. Maka Nahdlatul Ulama memiliki serangkaian sistem perangkat organisasinya.<sup>157</sup> Untuk lebih rinci diuraikan sebagai berikut:

### 1. Lajnah

Lajnah merupakan perangkat pelaksana program Nahdlatul Ulama yang memerlukan penanganan khusus, meliputi:

- a. Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (LF-NU). Perangkat pelaksana pengkaji hal yang menyangkut astronomi, seperti penentuan awal dan akhir ramadhan dengan cara hisab dab rukyah, pendidikan dan pelayanan informasi tentang gejala alam, dan penerbitan almenak NU.
- b. Lajnah Ta'lif Wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTN-NU). Perangkat pelaksana pengkaji hal yang menyangkut ke-NU-an dan sosial kemasyarakatan, penulisan dan penerbitan buku-buku ke-NU-an dan penerbitan media massa, seperti majalah, koran, dan lain sebagainya.
- c. Lajnah Awqaf Nahdlatul Ulama (LA-NU). Perangkat pelaksana pengkaji perwakafan, pengembangan kualitas pengelolaan harta wakaf warga NU.
- d. Lajnah Zakat, Infaq, dan Shadaqoh Nahdlatul Ulama (LAZIS-NU). Perangkat pelaksana pengkaji hal yang menyangkut zakat, infaq, dan shodaqoh, sekaligus pengembangan efektifitas pola pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh.

---

<sup>156</sup> Tim PWNU Jawa Timur, *Op. cit.*, hlm. 48.

<sup>157</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1997). hlm. 353.

- e. Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah Nahdlatul Ulama (LBM-NU). Perangkat pelaksana pengkaji hal yang menyangkut persoalan aktual keagamaan kemasyarakatan, perumusan dan penyebarluasan fatwa hukum (Islam) serta pengembangan standarisasi kitab-kitab fiqh.

## 2. Lembaga

Lembaga merupakan perangkat pelaksana kebijakan NU yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu, meliputi:

- a. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LD-NU). Perangkat pelaksana kebijakan NU di bidang dakwah Islamiyah.
- b. Lembaga Pendidikan Al-Ma'arif (LP Ma'arif NU). Perangkat pelaksana kebijakan NU di bidang pendidikan agama (Ahlussunnah wal Jama'ah) dan umum.
- c. Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU). Perangkat pelaksana kebijakan NU di bidang perguruan tinggi. Lembaga ini dibentuk saat Mukhtamar ke-33 di Jombang 2015.
- d. Lembaga Pelayanan Kesehatan (LPK-NU). Perangkat pelaksana kebijakan NU di bidang kesehatan.
- e. Lembaga Perekonomian (LP-NU). Perangkat pelaksana kebijakan NU di bidang ekonomi.
- f. Lembaga Pengembangan Pertanian (LP2-NU). Perangkat pelaksana kebijakan NU di bidang pertanian.
- g. Lembaga Rabithah Ma'ahid Islamiyah (LRMI-NU). Perangkat pelaksana kebijakan NU di bidang pondok pesantren.
- h. Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK-NU). Perangkat pelaksana kebijakan NU di bidang pengembangan wawasan keluarga sejahtera, advokasi kependudukan dan lingkungan hidup.
- i. Lembaga Takmir Masjid (LTM-NU). Perangkat pelaksana kebijakan NU di bidang memakmurkan Masjid.
- j. Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI-NU). Perangkat pelaksana kebijakan NU di bidang perburuhan.
- k. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LBH-NU). Perangkat

pelaksana kebijakan NU di bidang hukum.

- l. Lembaga Seni-Budaya Islam (LESBUMI). Perangkat pelaksana kebijakan NU di bidang kesenian dan kebudayaan NU.
- m. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM). Perangkat pelaksana kebijakan NU di bidang pengembangan sumber daya manusia atau pengembangan masyarakat NU dalam proses pembangunan bangsa Indonesia.

### **3. Badan Otonom**

Organisasi yang melaksanakan kebijakan NU yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu, meliputi:

- a. Jam'iyah Ahli Thariqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdliyah. Organisasi pelaksana kebijakan NU di bidang pengkajian praktek tasawuf atau kethariqatan, pembinaan praktek thariqat bagi warga NU, serta pengembangan thariqat mu'tabaroh di lingkungan NU
- b. Muslimat NU. Organisasi pelaksana kebijakan NU yang terkait di bidang kaum wanita atau perempuan Islam.
- c. Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor). Organisasi pelaksana kebijakan NU yang terkait di bidang kaum pemuda atau laki-laki muda Islam.
- d. Fatayat NU. Organisasi pelaksana kebijakan NU yang terkait di bidang pemudi atau wanita muda Islam.
- e. Ikatan Pelajar Putra Nahdlatul Ulama (IPNU). Organisasi pelaksana kebijakan NU yang terkait di bidang kaum pelajar putra atau remaja laki sebagai tempat berhimpun putra-putra Nahdlatul Ulama.
- f. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU). Organisasi pelaksana kebijakan NU yang terkait di bidang kaum pelajar putri atau remaja wanita sebagai tempat berhimpun putri-putri Nahdlatul Ulama.
- g. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU). Organisasi pelaksana kebijakan NU yang terkait di bidang kaum sarjana sebagai tempat berhimpun para sarjana Nahdlatul Ulama.
- h. Ikatan Pencak Silat Pagar Nusa (IPS Pagar Nusa). Organisasi pelaksana kebijakan NU yang terkait di bidang kaum pendekar atau

ahli pencak silat sebagai tempat berhimpun para pendekar dalam membantu, dan mengamankan lingkungan yang ada di NU.

- i. Jam'iyatul Qurro wal-Huffazh (JQH). Organisasi pelaksana kebijakan NU yang terkait di bidang seni baca dan hafalan al-Qur'an. Organisasi ini sebagai wadah bagi pembinaan bagi pecinta al-Qur'an dan membantu terselenggaranya Seleksi Tilawatil Qur'an, Musabaqoh Tilawatil Qur'an, dan yang terkait dengan kegiatan al-Qur'an.
- j. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Organisasi pelaksana kebijakan NU yang terkait di bidang mahasiswa, dan sebagai tempat berhimpunnya mahasiswa Nahdlatul Ulama.
- k. Ikatan Seni Hadrah Islam (ISHARI). Organisasi pelaksana kebijakan NU yang terkait di bidang seni hadrah atau seni musik Islam sebagai tempat berhimpun para pecinta seni musik Islam untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkannya sebagai bagian dari warisan yang baik masa lalu dalam pengembangan musik Islam di Republik Indonesia. Terbentuknya organisasi ini adalah yang paling terbelakang melalui putusan Muktamar 33 di pondok pesantren Tebuireng Jombang 2015.<sup>158</sup>

---

<sup>158</sup> *Ibid.*, serta Lihat hasil keputusan Muktamar 33 di Jombang 2015.

# B A B III

## KELAHIRAN NU DI LOMBOK

### A. Lombok Pra Kelahiran Nahdlatul Ulama

LOMBOK SEBAGAI SALAH satu pulau dan daerah terindah di Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Sekitar 80 % warga Lombok adalah suku Sasak, dan 20 % adalah penduduk asal Bali dan selebihnya adalah penduduk asal Cina, Jawa, dan Arab. Walaupun persentase suku Sasak lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya, pola kehidupan masyarakat masih dipengaruhi oleh kultur Bali karena dahulu Lombok lama berada di bawah kekuasaan raja Bali.<sup>159</sup>

Sampai saat ini belum ada sumber sejarah yang pasti yang menyatakan tentang kapan masuknya Islam di Lombok. Diperkirakan abad 16, Sunan Prapen putra Sunan Giri membawa ajaran Agama Islam yang dahulunya masyarakat suku Sasak adalah penganut “animisme”, dan dengan datangnya secara bertahap agama Hindu, Budha, dan Islam, masyarakat Lombok mulai menganut agama tersebut, sedangkan agama pengenalan Islam waktu itu lebih populis dengan nama *wetu telu*<sup>160</sup>. *Wetu telu*<sup>161</sup> menunjuk pada orang yang belum menerima ajaran Islam secara utuh. Seiring berjalannya waktu, momentum bagi perkembangan Islam menjadi semakin lebih pesat ialah terlebih sekembalinya para ulama Lombok yang belajar di Mekkah. Para ulama tersebut, kemudian berperan besar dalam menyebarkan ajaran Islam melalui pengajian

---

<sup>159</sup> Solichin Salam., *Lombok Pulau Perawan: Sejarah dan Masa Depan*. hlm. 13

<sup>160</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>161</sup> Mendapat nama *wetu telu* berdasarkan makna harfiah berarti waktu tiga. Sebutan *wetu telu* ditafsirkan karena agama *wetu telu* meringkas hampir semua peribadatan Islam menjadi hanya tiga kali saja. *Wetu telu* Cuma melakukan sholat tiga kali sehari yaitu shubuh, Magrib dan Isya' yang dilaksanakan pada dini hari, senja dan malam. lihat Erni Budiwanti, *Islam Sasak*, (Jogyakarta: LkiS. 2000), hlm. 134.

majelis taklim di tengah-tengah masyarakat di samping juga mendirikan pondok pesantren yang difungsikan sebagai wadah atau tempat belajar dan aktifitas beragama bagi masyarakat dan para generasi selanjutnya. Istilah penyebutan “Ulama” di daerah Lombok biasa akrab disebut dengan istilah “Tuan Guru”.<sup>162</sup>

Sebelum munculnya Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan di Lombok atau Nusa Tenggara Barat (NTB) umumnya, sesungguhnya telah didahului oleh munculnya beberapa organisasi masyarakat Islam lainnya yang memiliki visi dan misi yang sama untuk memperjuangkan Agama Islam dan kemerdekaan Negara Indonesia diantaranya adalah Syarikat Islam, Muhammadiyah dan lain sebagainya.

Syarikat Islam berdiri tahun 1916 dan didirikan oleh H. Oemar Said Cokroaminoto, kemudian pada tahun yang sama datang dan diperkenalkan di Lombok. Kegiatan Syarikat Islam berorientasikan ekonomi, politik, dan tidak terlepas untuk memajukan umat Islam. Kegiatan Syarikat Islam mengalami berbagai hambatan dalam tubuh organisasi, hal ini disebabkan oleh struktur organisasi yang tidak tertata dan mendapat pengawasan dari pemerintah kolonial Belanda.<sup>163</sup>

Berselang dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1918 muncul di Lombok sebuah organisasi sosial keagamaan lain yang bernama Muhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Organisasi ini merupakan gerakan Islam yang menyebarkan pemahaman dan pemikiran modern yang bergerak dibidang dakwah, kemasyarakatan, dan keagamaan.

Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat yang berbasis agama, yang ajarannya adalah untuk kembali ke sumber aslinya, al-Qur'an dan al-Hadist di tengah masyarakat yang berpesta dengan takhayul, bid'ah, dan khurafat, dan bukan kecil hambatan dan tantangan yang dihadapi Muhammadiyah dalam menyebarkan paham organisasinya.<sup>164</sup>

---

<sup>162</sup> Tuan Guru adalah sebutan yang diberikan kepada orang yang memiliki kapasitas dan pengetahuan agama Islam yang luas. Dalam konteks Jawa, sebutan Tuan Guru dikenal dengan Kyai. Sebutan Tuan Guru dalam penulisan biasanya disingkat TGH (Tuan Guru Haji).

<sup>163</sup> Mohammad, Herry, *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 21*, (Jakarta: Gema Insani. 2001), hlm. 34.

<sup>164</sup> *Ibid.*, hlm.35.

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang memiliki visi pemurnian agama Islam dan pembaruan pendidikan Islam yang orientasi pembaruannya mencakup kesyirikan, kebid'ahan, dan kekhurafatan. Namun karena ajarannya dianggap kurang akomodatif oleh masyarakat Lombok, sehingga sulit diterima oleh pemikiran dan keyakinan masyarakat.

Berbagai upaya Muhammadiyah dalam mengembangkan sayap organisasi di Lombok hingga pada tahun 1937 mengalami perkembangan yang pesat dan untuk pertama kalinya dapat membentuk cabang Muhammadiyah di Labuan Haji dengan surat keputusan tanggal 15 November 1937, demikian di seluruh daerah di Lombok termasuk di Lombok Tengah yang dibawa oleh TGH. Abdul Haris dari Poh Gading Lombok Timur, turut didukung oleh guru-guru dari Jawa, Bugis, Bima, dan Sumatera termasuk orang Lombok yang kuliah di Jawa dan Kalimantan.<sup>165</sup>

Perkembangan Muhammadiyah di Lombok demikian cukup lama diterima masyarakat karena pemikiran progressif yang dibawa oleh Muhammadiyah belum dapat diterima oleh pikiran masyarakat yang sudah terbiasa dengan kultur kehidupan tradisionalnya sehingga Muhammadiyah di Lombok tetap menjadi minim dalam kuantiti namun maksi dalam aksi. Namun hal berbeda saat organisasi Nahdlatul Ulama masuk kedaerah Lombok. Bahwa paham keagamaan dari ajaran Nahdlatul Ulama adalah menjaga, melestarikan, dan mengembangkan paham *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang sudah diajarkan oleh para ulama sebelumnya. Hal ini sesuai dengan latar belakang dibentuknya Nahdlatul Ulama bahwa melihat kondisi masyarakat bermula dari keterbelakangan, baik secaramental, maupun ekonomi yang dialami masyarakat Sasak Lombok dan bangsa Indonesia secara umum akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi.<sup>166</sup>

Kondisi sosial, masyarakat Lombok bukanlah masyarakat yang sudah mapan secara sosial. Mapan dalam arti mampu secara bersama-sama mengadakan transaksi-interaksi sosial antar masyarakat. Kondisi ekonomi, masyarakat Lombok masih terlalu jauh dari harapan tentang keamanan dibidang ekonomi. Ketimpangan-ketimpangan yang ada pada masyarakat tidak menuntut progresifitas lompatan berfikir

---

<sup>165</sup> Nasri Anggara, *Melati Di Taman Tastura*. (Ttp: Nurani Rakyat, 2009), hlm. 6.

<sup>166</sup> www.nu.or.id



melainkan bagaimana seseorang mampu mengangkat ketimpangan sebagai modal untuk meraih kebahagiaan.

Sebagaimana disinggung di atas bahwa kelahiran Nahdlatul Ulama di Lombok pada umumnya tak bisa lepas hubungannya dengan adanya ikatan paham *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang sudah mengakar dan berkembang jauh sebelum lahirnya Nahdlatul Ulama itu sendiri di daerah ini. Kelahiran Nahdlatul Ulama di Lombok, adalah sebagai wujud estafet perjuangan yang sebenarnya melanjutkan perjuangan paham *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang diajarkan atau dikembangkan oleh para ulama penyebar Islam pertama awal abad ke-16 di Lombok dan sekitarnya, seperti penyebar Islam yang dimakamkan di bukit Seledendeng Ketara, Rembitan Wali Nyatoq, bukit Batu Layar, Loang Balok Mataram, Bayan, Seleparang, dan lain sebagainya.<sup>167</sup>

Beberapa ulama yang masyhur pada abad-abad berikutnya yang memperjuangkan paham Ahlussunnah Waljama'ah di daerah Lombok adalah antara lain yaitu, TGH. Mustafa Bakri Sekarbela, TGH. Umar Kelayu, TGH. Abdul Hamid Pagutan, TGH. Ali Batu Sakra, TGH. Muhammad Shiddiq Karang Kelok (beliaulah yang disebut ulama yang pertama kali membawa ajaran *Thariqat Qadariyah Wan Naqsabandiyah* ke daerah Lombok), TGH. Muhammad Ra'is Sekarbile, TGH. Muhammad Amin Pejeruk, TGH. Hamid al-Makki Pejeruk, TGH. Lalu Muhammad Saleh Lopan, TGH. Umar Buntimbe Penujak<sup>168</sup>, dan lain sebagainya. Termasuk juga ulama-ulama di lingkungan *Habaib* (Mereka Adalah Keturunan Nabi Muhammad SAW) yang biasa dikenal dengan sebutan Tuan Sayyid atau di daerah Lombok disebut "Yek", dan juga banyak lagi para ulama yang lainnya. Secara keseluruhan "pembawa dan penyebar panji ajaran Islam" pertama dan berikutnya ke daerah Lombok adalah mereka para ulama yang menganut "paham Ahlussunnah Waljam'ah yang memiliki mata rantai keilmuan sampai kepada Nabi Muhammad SAW".

Semua Tuan Guru tersebut di atas, rata-rata bermadzhab Syafi'i dalam ilmu fiqh, beraqidah Aswaja dalam ilmu ushuluddin atau aqidah sifat 20 menurut pemahaman Imam Abu Hasan al-Asy'ari, dan bertasawuf menurut tasawufnya Imam Abu Hamid al-Ghazali dan Imam

---

<sup>167</sup> Mahasiswa PAI, Komunitas al-Katib, *Islamologi IV "Tafsir Islam Warna-warni"*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta & Alam Tara Institute, 2012), hlm. 185.

<sup>168</sup> TGH. Lalu Umar Buntimbe merupakan orang pertama yang disebut Tuan Guru di pulau Lombok.

Junaid al-Baghdadi. Para tuan guru tersebut memperoleh ilmu agama setelah melalui proses menuntut ilmu yang relatif cukup lama di pusat Islam di Mekkah al-Mukarramah dan di negara-negara pusat studi Islam lainnya, seperti Mesir, Iraq, dan lain sebagainya. Diperkirakan aktifitas menuntut ilmu ke Mekkah oleh orang-orang Lombok secara intensif dimulai pada abad ke-18 Masehi setelah dimulainya pengajaran Islam oleh para ulama abad sebelumnya. Para tuan guru tersebut, dengan cara bergaul intensif dan berguru dengan para ulama di sana, baik ulama yang berasal dari Timur Tengah sendiri maupun dari Nusantara.<sup>169</sup>

Adapun Para ulama yang berasal dari bumi Nusantara di Mekkah saat itu antara lain, yaitu Syekh Abdul Ghani Bima, Syekh Zainuddin Sumbawa, Syekh Nawawi Banten, Syekh Yasin Isa al-Fadani Sumatera, Syekh Khatib Minangkabau dan ulama-ulama dari daerah lainnya di Nusantara yang sudah lama bermukim di Mekkah. Tercatat ulama yang berasal dari daerah Lombok yang pernah belajar dan kemudian mengajar di Masjidil Haram Mekkah, antara lain Tuan Guru Haji Umar Kelayu Lombok Timur, Tuan Guru Haji Mukhtar Kediri Lombok Barat, dan Tuan Guru Haji Mushtofa Umar Abdul Aziz Kapek Gunung Sari Lombok Barat.<sup>170</sup> Adapun TGH. M. Shaleh Hambali Bengkel, TGH. Zaenuddin Abdul Madjid Pancor, TGH. Ibrahim Al-Khalidiy Kediri, TGH. Lalu Muhammad Faisal Praya, mereka tidak pernah menjadi pengajar di Masjidil Haram Mekkah, namun hanya aktif belajar saja. Kemudian para tuan guru tersebut kembali ke daerah Lombok dan menyebarkan ilmu Islam berhaluan paham *Ahlussunnah wal Jamā'ah* yang diperolehnya di masyarakat Lombok yang kebanyakan mereka belum memeluk agama Islam maupun masyarakat yang pemahaman agama Islamnya masih kurang.

## **B. Lahirnya Nahdlatul Ulama di Lombok**

Berbicara tentang Nahdlatul Ulama tidak terlepas dari dua sosok ulama kharismatik yaitu KH. Hasyim Asy'ari (1875-1947 M) dan KH. Abdul Wahab Hasbullah (1888-1971 M). KH. Abdul Wahab Hasbullah seorang tokoh ulama Jawa Timur yang memimpin sebuah pondok pesantren yang besar di Tambakberas Jombang, tetapi mempunyai

---

<sup>169</sup> "Nusantara" merupakan istilah untuk menyebut negara Indonesia sebelum dan sesudah merdeka.

<sup>170</sup> Dikutip dari Pengajian Umum Santri TGH. Musthofa Umar Abdul Aziz di Ponpes Al Aziziyah Kapek Lombok Barat, pada tanggal 9 September 2007.

rumah di Kertopaten Surabaya. Bersama dengan tokoh lainnya, yaitu KH. Mas Mansyur (1896-1946), KH. Abdul Wahab Hasbullah mendirikan kelompok diskusi yang bernama “Nahdlatul Afkar” dan memimpin madrasah Nahdlatul Wathan. KH. Mas Mansyur keluar karena bergabung dengan Muhammadiyah.<sup>171</sup>

Pada tahun 1925, kongres Alam Indonesia mengirim sebuah delegasi ke kongres Islam Dunia di Mekah terdiri dari Haji Umar Said Cokroaminoto, Kiyai Haji Mas Mansyur dan Haji Sujak sebagai perwakilan Umat Islam di Indonesia, namun tidak satu pun yang mewakili aspirasi umat Islam yang menjadi idaman ulama, karena ketiga orang anggota delegasi tersebut terdiri dari seorang perwakilan SI (Serikat Islam), dan dua orang perwakilan Muhammadiyah. Kejadian itulah yang membuat KH. Muhammad Hasyim Asy`ari dan KH. Abdul Wahab Hasbulloh mengirim sebuah delegasi sendiri ke Kongres Islam sedunia di Mekkah. Delegasi Itu termasuk di dalamnya adalah KH. Abdul Wahab Hasbulloh dan Syekh Ahmad Ghanaim yang sepakat menamakan dirinya sebagai delegasi “Komite Hijaz”.<sup>172</sup>

Pengiriman ini didasari atas tidak hanya ketidaksetujuan delegasi yang dikirim berlatar belakang reformis semata, namun juga karena tidak tercapainya aspirasi umat Islam yang semestinya diharapkan. Komite ini pun diterima oleh Raja Saud Saudi Arabia. Komite Hijaz menjelaskan tentang madzhab yang diikutinya yaitu, Madzhab Syafi`i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Raja Saudpun sangat senang dan menerima pandangan tentang Islam Komite Hijaz. Demikian pula bahwa Komite Hijaz menjelaskan tentang ajaran yang diikuti adalah Ahlussunnah Waljama`ah.

Pada tanggal 16 Rajab 1344 bertepatan dengan 31 Januari 1926 terjadi pertemuan ulama-ulama di Surabaya bertempat di rumah pemrakarsa KH. Abdul Wahab Hasbullah. Hadirlah dalam pertemuan tersebut KH. Muhammad Hasyim Asy`ari (Jombang), KH. Bisri Syamsuri Denanyar (Jombang), Kiai Raden Haji Asnawi (Kudus), H. Abdul Halim Leuwimunding (Cirebon), dan banyak kiai lainnya.<sup>173</sup> Dalam pertemuan tersebut, dua hal yang diputuskan adalah *pertama*, meresmikan dan

---

<sup>171</sup> Muni'im DZ, Abdul, *Benturan NU PKI 1948-1965*, (Depok, Langgar Swadaya Nusantara, 2013), hlm. 606.

<sup>172</sup> *Ibid.*, hlm. 609.

<sup>173</sup> Tashwirul Afkar, *Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan*, (LAKPESDAM NU: Jakarta, 2007). hlm. 10.

mengukuhkan berdirinya “Komite Hijaz” dengan masa kerja sampai delegasi yang diutus menemui Raja Saud kembali ke tanah air. *Kedua*, membentuk *jam’iyyah* (organisasi) untuk wadah persatuan para ulama dalam tugasnya memimpin umat menuju terciptanya kejayaan Islam dan kaum muslimin.<sup>174</sup> Atas usul Kiai Haji Alwi Abdul Azis, *Jami’yyah* yang dibentuk diberi nama Nahdlatol Oelama (NO) atau Nahdlatul Ulama (dalam ejaan yang disempurnakan) yang artinya kebangkitan para ulama dengan KH. Muhammad Hasyim Asy’ari sebagai Rais Akbar.<sup>175</sup>

Secara historiografis, Nahdlatul Ulama masuk ke daerah Lombok pertama kali terjadi pada tahun 1930-an. Syekh Abdul Manan, seorang ulama keturunan arab diutus oleh Hadhratus Syekh Hasyim Asy’ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama untuk membuka wilayah Nahdlatul Ulama di Lombok.<sup>176</sup> Nahdlatul Ulama mulai tumbuh di daerah Lombok tepatnya pada awal tahun 1934. Hal tersebut muncul karena adanya prakarsa tokoh-tokoh PUIL (Persatuan Umat Islam Lombok) yang dibentuk oleh Saleh Sungkar pada waktu itu yang berpusat di Mataram (Ampanan, Mataram, Cakranegara dan sekitarnya) yang antara lain para tokohnya adalah, Tuan Guru Haji Mustafa Bakri, asal Banjarmasin yang menetap di Sekarbela, Sayyid Ahmad al-Kaf, Sayyid Ahmad al-Idroes dari keturunan Arab Hadhramaut dan beberapa tokoh agama Islam setempat yang berpaham *Ahlussunnah Waljam’ah* ala madzhab Syafi’i untuk menerima dan bergabung dalam satu wadah yang bernama Nahdlatul Ulama.

Kurang dari pada satu dasawarsa berikutnya sejak lahirnya Nahdlatul Ulama pada tanggal 16 Rajab 1344 H/31 Januari 1926 di Surabaya Jawa Timur. Nahdlatul Ulama mulai berkembang dan mempunyai beberapa konsulat di beberapa daerah di Nusantara termasuk pula di daerah Lombok. Proses terbentuk dan berkembangnya Nahdlatul Ulama tak lepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh PUIL tersebut, di samping tentunya *pertama*, berkat hubungan awal tokoh-tokoh PUIL tersebut dengan Syekh Abdul Hanan utusan KH. Hasyim Asy’ari, sehingga dapat diajak bergabung ke dalam NU.*Kedua*, atas dorongan

---

<sup>174</sup> Muni’im, *Benturan..*, hlm. 610.

<sup>175</sup> Rais Akbar adalah istilah yang dipakai untuk sebutan jabatan ketua umum sebelum terjadi perubahan menjadi Rais ‘Aam melalui keputusan hasil Mukhtamar pada tanggal 20 April s/d 30 Mei 1950 di Jakarta.

<sup>176</sup> Marzuki Wahid, Abd. Moqsih Ghazali, Suwendi, *Geger di “Republik NU” Perebutan Wacana, Tafsir, Sejarah, Tafsiran Makna*, (Jakarta: Kompas, 1999), hlm. 11.

keluarga TGH. Mustafa Bakri di Banjarmasin agar beliau dan keluarga yang lain juga bergabung ke dalam NU. *Ketiga*, setelah tokoh-tokoh PUIL tersebut mengenal Nahdlatul Ulama dari dekat melalui ziarah mereka ke pusat Nahdlatul Ulama di Surabaya.<sup>177</sup>

Pesatnya perkembangan Nahdlatul Ulama di Nusantara memberikan angin segar kepada PUIL meleburkan diri menjadi “Jam’iyyah Nahdlatul Ulama Konsul Surabaya Cabang Ampenan” yang selanjutnya disahkan oleh HBNO (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) pada tahun 1935, dengan ketua konsulnya yang pertama adalah KH. Muhamad Dahlan bin Muhammad Ahyad dari Surabaya. Tersusunlah kepengurusan pertama NU di Lombok dengan jajaran kepengurusan intinya ialah TGH. Musthofa Bakri, Sayyid Ahmad Al-Idroes duduk dalam jajaran Syuriah, sedangkan H. Sayuti (kakak kandung TGH. Musthofa Bakri) yang menjadi ketua Tanfidziyah. Kepengurusan NU Konsul Surabaya Cabang Ampenan ini terus berjalan mengikuti perkembangan organisasi baik melalui komunikasi surat menyurat melalui media berita NU yang terbit secara rutin.<sup>178</sup>

Nahdlatul Ulama telah mulai berkembang secara organisatoris sejak dipegang oleh TGH. Mustafa Bakri dan lainnya. Terbukti, “NU Konsul Surabaya Cabang Ampenan” di bawah pimpinan beliau dapat mengikuti Mukhtamar ke-14 di Magelang Jawa Tengah pada tanggal 15-21 Juni 1939, dan beliau berperan aktif sebagai tim perumus keputusan dalam Mukhtamar tersebut.

Pada tahun 1924, konferensi pertama “Nahdlatul Ulama Konsul Surabaya Cabang Ampenan” bersamaan pula dengan “konferensi Gerakan Pemuda Anshor” dilaksanakan dan terselenggara di gedung Bioskop Ampenan (Pasar Ampenan sekarang) milik H. Abdul Kadir. Konferensi tersebut kemudian menghasilkan keputusan bahwa Nahdlatul Ulama Konsul Surabaya Cabang Ampenan berubah menjadi Konsul Nahdlatul Ulama se-Daerah Lombok yang diketuai oleh TGH. Musthofa Bakri. Kehadiran KH. Muhammad Dahlan di Lombok dalam kapasitasnya sebagai Ketua Konsul menginspirasi salah seorang

---

<sup>177</sup> Wijaya Kusumah & Ida Bagus Putuh, *NU Lombok 1953-1984*, (Lombok: Pustaka Lombok, 2010), hlm. 35.

<sup>178</sup> A. Taqiuddin Mansur, *NU Lombok Sejarah Terbentuknya Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat disertai Do'a Istighosah dan Wirid Harian*, (Narmada: Pustaka Lombok, 2008), hlm. 24-25.

Pengurus Nahdlatul Ulama Lombok, kemudian memberi nama bagi anaknya yang baru lahir dengan nama Konsul Fauzi.

Dalam konferensi tersusun sejumlah pengurus antara lain: TGH. Musthofa Bakri (Rois Syuriah), Sayyid Ahmad Al-Idroes (Syuriah), H. Sayyid Ahmad Al-Kaf (Syuriah), H. Sayuti Sa'id kakak kandung TGH. Musthofa Bakri (Tanfidziyah), Sayyid Indus Muulaihela (Tanfidziyah), Abdul Ghani (Tanfidziyah), Abu Bakar Al-Jufri (Tanfidziyah). Sedangkan ketua pengurus Gerakan Pemuda Anshor dipercayakan kepada M. Yusuf Sa'id (adik kandung TGH. Musthofa Bakri).<sup>179</sup>

Terhitung dari tahun 1935 sampai dengan tahun 1950, Nahdlatul Ulama tetap selalu dipegang oleh tokoh PUIL (Persatuan Umat Islam Lombok) tersebut. Pada tahun 1946 atau bertepatan dengan satu tahun setelah kemerdekaan Indonesia, Nahdlatul Ulama bersama ormas Islam lainnya, bergabung dalam satu wadah besar partai Islam bernama Masyumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia).

Namun seiring dengan perkembangan yang ada, pada penghujung tahun 1950, Nahdlatul Ulama menetapkan diri keluar dari Partai Masyumi melalui Mukhtar ke-18 di Jakarta. Kemudian pada tahun berikutnya 1952 kembali mengukuhkan dirinya keluar dari Partai Masyumi dan mendirikan partai sendiri dengan nama "Partai NU", maka pimpinan Nahdlatul Ulama setelah keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik, tidak lagi dipegang oleh TGH. Mustafa Bakri. Namun, beliau tidak menghalangi tokoh Nahdlatul Ulama yang lain untuk bergabung dengan partai NU. Beliau tidak berkehendak menjadikan organisasi Nahdlatul Ulama sebagai partai politik yang artinya NU akan berkonsentrasi serta bergumul di ranah politik praktis. Karena menurut beliau aspirasi Islam sudah memiliki saluran politiknya yaitu partai Masyumi sebagai wadah pemersatu bagi semua ormas Islam termasuk dalam hal ini juga Nahdlatul Ulama. Namun demikian, beliau tidak bergabung dengan ormas sosial keagamaan yang lain. Beliau tetap mengidentifikasi dirinya sebagai orang NU. Beliau berpandangan lebih memilih sikap ber-NU secara kultural saja, senantiasa memberikan warna terhadap pengembangan ajaran *Ahlussunnah Waljam'ah* dan berupaya mencetak kader-kader penerus seperti yang dilakukannya melalui kiprahnya mengembangkan Pondok Pesantren Ar-Roisiyah<sup>180</sup>

---

<sup>179</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>180</sup> *Ibid.*, hlm. 24-25.

di bawah asuhan besarnya sendiri, yaitu TGH. Rois Sekarbela Mataram dan pandangan dan sikap beliau tetap teguh pendiriannya atau konsisten sampai beliau wafat.

Tuan Guru Kyai Haji Zainuddin Abdul Majid Pancor Lombok Timur pernah ditunjuk menjadi pengurus Konsul Nahdlatul Ulama Lombok, saat itu Lombok masuk wilayah Sunda Kecil meliputi pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sawu, Sumba, dan Rote pada tahun 1950. Ketika Nahdlatul Ulama dengan ormas yang lain bergabung ke dalam partai Masyumi, maka beliau ditunjuk sebagai ketua Badan Penasehat Partai Masyumi di Lombok pada tahun 1952. Posisi inilah yang kemudian mengantarkannya menjadi anggota konstituante tahun 1956-1959 dari Masyumi.<sup>181</sup> Namun, Nahdlatul Ulama ketika dipegang oleh beliau, Nahdlatul Ulama tidak tumbuh dan berkembang. Karena di samping memegang Nahdlatul Ulama beliau juga telah mendirikan ormas Islam sendiri sebelumnya pada tahun 1953, yaitu Nahdlatul Wathon (NW).

Dualisme posisi strategis yang diduduki oleh TGKH. Zainuddin Abdul Majid dalam perjalanannya, tampak Beliau lebih senang mengembangkan NW daripada Nahdlatul Ulama, yang akhirnya pada tahun 1953 TGKH. Zainuddin Abdul Majid diganti oleh TGH. Akhsid Muzhar Masbagik Lombok Timur sebagai Konsul “Nahdlatul Ulama se-Daerah Lombok” pada tanggal 22 April 1953.<sup>182</sup> Pada waktu proses pergantian tersebut Nahdlatul Ulama sudah menjadi partai politik berdasarkan hasil keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-19 di Palembang pada tahun 1952. Di bawah pimpinan TGH. Akhsid Muzhar, Nahdlatul Ulama kemudian dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai partai politik, bukan sebagai *Jam’iyah diniyah* sebagaimana awal asas pendiriannya. Nahdlatul Ulama dapat berkembang sebagai partai politik saat itu, dilihat dari berhasilnya salah satu kader Nahdlatul Ulama, yaitu TGH. Mustajab Pagutan Lombok Barat dapat mewakili Partai NU Lombok (propinsi Sunda Kecil) menjadi anggota Konstituante<sup>183</sup> saat itu pada pemilu tahun 1955 (saat itu TGH. Mustajab sebagai sekretaris pengurus Nahdlatul Ulama Lombok Barat)<sup>184</sup>. Beliau juga pernah

---

<sup>181</sup> Muhammad Noor, Muslihan Habib & Muhammad Harfin Zuhdi, *Visi Kebangsaan Religius Tuan Guru Kyai Haji Zaenuddin Abdul Madjid*, (Jakarta: Bania Publishing, 2014), hlm. xvii.

<sup>182</sup> Kusumah, *NU Lombok..*, hlm. 41.

<sup>183</sup> Konstituante adalah sebutan isitilah untuk menunjuk parlemen pada waktu itu atau sama dengan MPR-DPR sekarang.

<sup>184</sup> H. Fathurrahman Zakaria, *Wawancara*, saat acara Haul TGH. Mustajab di Pagutan, tanggal



menjadi konsul NU NTB menggantikan posisi TGH. Zaenuddin Abdul Majid, selanjutnya, kepengurusan konsul diganti oleh kepemimpinan yang baru yaitu TGH. Akhsid Muzhar. Posisi kepemimpinan TGH. Akhsid Muzhar di Nahdlatul Ulama menjadi semakin kuat terlebih sebelumnya telah mendapat restu dan dukungan penuh dari gurunya yaitu, TGH. Muhammad Shaleh Hambali Bengkel Lombok Barat.

Partai Masyumi, dan Nahdlatul Ulama sebagai partai pendatang baru, setelah itu kemudian bersaing secara politis. Nahdlatul Ulama sebagai partai politik yang baru lahir dapat berkembang dengan pesatnya di pulau Lombok (provinsi sunda kecil). Hal itu terbukti, Nahdlatul Ulama menjadi partai terbesar kedua setelah Masyumi di Lombok setelah pemilu pertama yang diikuti oleh Nahdlatul Ulama ketika itu. Awal-awal Nahdlatul Ulama dalam ranah politik praktis di daerah Lombok, sebagaimana lumrah ormas dan partai politik yang lain, Nahdlatul Ulama juga mengalami polemik internal khususnya terjadi di kalangan para tuan guru. Sebagian tuan guru ada yang masih tetap bertahan di partai Masyumi dan sebagian lagi keluar dari partai Masyumi dan bergabung ke partai Nahdlatul Ulama. Namun, polemik tersebut dapat diatasi dan diselesaikan dengan cepat berkat kharismanya TGH. M. Shaleh Hambali Bengkel sebagai tokoh besar dan figur Islam di wilayah Lombok dan sekitarnya dalam menangani berbagai persoalan agama dan lain sebagainya, termasuk dalam menangani persoalan politik di kalangan umat Islam di daerah Lombok.

Setelah adanya restu dan dukungan penuh dari TGH. M. Shaleh Hambali terhadap partai Nahdlatul Ulama di Lombok, sehingga kemudian partai NU disponsori secara langsung oleh beliau bersama dengan TGH. Akhsyid Muzhar Masbagik, sehingga dengan bergabungnya dua tokoh barat dan timur Lombok tersebut semakin membuat partai Nahdlatul Ulama berkembang karena lebih cepat diterima oleh semua lapisan masyarakat di Lombok dan sekitarnya.

Seiring dengan berkembangnya wilayah negara Indonesia pada waktu itu, termasuk propinsi Sunda Kecil yang beribukota di Singaraja Bali, maka terbentuklah propinsi baru yang kemudian disebut dengan NTB (Nusa Tenggara Barat) yang terdiri dari dua pulau yaitu, Lombok dan Sumbawa pada tahun 1958. Seiring dengan hal itu pula, isitilah

---

1 Januari 2011 M/ 27 Muharram 1432 H.



Konsul Nahdlatul Ulama se-Daerah Lombok, kemudian berubah menjadi Pengurus Wilayah Partai Nahdlatul Ulama NTB. Dalam susunan kepengurusan yang baru itu, secara langsung yang terpilih menjadi ketua Pengurus Wilayah Partai NU pertama adalah TGH. M. Shaleh Hambali sebagai Rois Syuriahnya dan TGH. Akhsyid Muzhar sebagai ketua Tanfiziyahnya. Karena memang semasih kepengurusan NU bernama Konsul Ulama se-Daerah Lombok beliau berdua telah menjadi pengurus.



Gambar. 1.  
TGH. M. Shaleh Hambali

TGH. Muhammad Shaleh Hambali Bengkel atau masyarakat Lombok lebih mengenalnya dengan sebutan Tuan Guru Bengkel, memiliki nama kecil Muhammad Shaleh, sedangkan Hambali dibelakang nama tersebut adalah dinisbatkan kepada nama ayahnya yang bernama Hambali. Beliau adalah putra bungsu dari delapan bersaudara, merupakan pendiri dan pengasuh Yayasan Perguruan Darul Qur'an di Desa Bengkel Lombok Barat.

TGH. M. Shaleh Hambali mengawali perjuangannya dalam mengembangkan Nahdaltul Ulama sejak tahun 1953 sampai dengan beliau wafat 1968, saat Nahdlatul Ulama sudah bermetamorfosis sebagai partai politik dengan tidak melupakan basis falsafah pemikiran dan pergerakan awalnya sebagai *jam'iyah diniyah* atau organisasi sosial keagamaan.<sup>185</sup>

Kiprah beliau dalam memperjuangkan Islam sangat besar dan juga memberikan sumbangan besar pula dalam perkembangan organisasi sosial keagamaan Nahdlatul Ulama di Lombok. TGH. M. Shaleh Hambali mulai belajar mengaji pada usia 7 tahun. pada tahun 1912 sampai dengan 1921 melanjutkan pendidikannya ke Mekkah Al-Mukarromah selama 9 tahun. Di Mekkah beliau banyak belajar kepada

<sup>185</sup> Lihat Pengurus Nahdlatul Ulama 1934-2017 (Terlampir).

sejumlah ulama terkemuka, diantaranya adalah: 1) Syekh Said al-Yamani, 2) Syekh Hasan bin Syekh Said al-Yamani, 3) Syekh Alawi Maliki al-Makki, 4) Syekh Hamdan al-Maghrabi, 5) Syekh Abdusstar Hindi, 6) Syekh Said al-Hadrawi Makki, 7) Syekh Muhammad Arsyad, 8) Syekh Shaleh Bafadhol, 9) Syekh Ali Umairah al-Fayumi al-Mishra dan ulama terkemuka lainnya.

Selain kepada ulama-ulama di atas, beliau juga belajar kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di tanah suci, antara lain: 1) TGH. Umar (Sumbawa), 2) TGH. Muhammad Irsyad (Sumbawa), 3) TGH. Haji Utsman (Serawak), 4) KH. Muchtar (Bogor), 5) KH. Misbah (Banten), 6) TGH. Abdul Ghani (Jemberana-Bali), 7) TGH. Abdurrahman (Jemberana-Bali), 8) TGH. Utsman (Pontianak), 9) TGH. Umar (Kelayu-Lombok), 10) TGH. Abdul Hamid (Pagutan-Lombok), 11) TGH. Asy`ari (Sekarbela-Lombok), 12) TGH. Yahya (Jerowaru-Lombok) dan ulama Indonesia lainnya. Sedangkan beberapa karya kitab yang telah dihasilkan oleh beliau antara lain: 1) Ta`lim al-Shibyan Bi Ghayat al-Bayan (berisi tauhid, fiqih, dan tasawuf), 2) Bintang Perniagaan (berisi tentang fiqih/hukum Islam), 3) Cempaka Mulia Perhiasan Manusia (berisi tentang akhlak), 4) Wasiat al-Musthafa (Terjemahan Wasiat Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali Ra.), 5) Mawa'idh al-Sh alihyah (kitab hadits), 6) Manzalul al-Amrad (berisi tentang puasa), 7) Intan Berlian Perhiasan Laki Perempuan (berisi fiqih keluarga), 8) Hidayat al-Athfal (berisi ilmu tajwid dan nasehat untuk anak-anak), 9) Al-Lu'lu' al-Mantsur (berisi tentang hadits), dan lain sebagainya.<sup>186</sup>

Rutinitas dakwah TGH.M. Shaleh Hambali disetiap kehidupannya berjuang untuk memperbaiki keadaan umat yang belum terlalu mengenal Islam dengan baik. Memperbaiki umat Islam yang masih belum sempurna pelajaran dan pengamalan mereka terhadap ajaran Islam yang sesuai dengan syari'at Nabi Muhammad SAW.

Aktivitas dakwah TGH.M. Shaleh Hambali dilakukan dari rumah kerumah, kampung kekampung, lokasi pengajian satu kepengajian lainnya, dengan tujuan membimbing dan mencerdaskan umat. Begitulah yang dilakukan dalam mengisi pengajian jama'ah-Nya, tanpa lelah dan letih. TGH. M. Shaleh Hambali dikatakan cukup berhasil dalam mengembangkan tugas dakwah, melalui pendidikan pondok pesantren

---

<sup>186</sup> *Ibid.*

inilah, beliau juga berhasil mengkader beberapa ulama kharismatik yang menjadi pejuang Nahdlatul Ulama setelahnya di pulau Lombok antara lain, TGH. Lalu Turmudzi Badaruddin (pengasuh ponpes Qomarul Huda Bagu), TGH. Lalu Khairi Adnan (pengasuh Ponpes At-Tamimiyy Praya), TGH. Ahmad Taqiuddin Mansur (pengasuh Ponpes Ta'limussyibyan Bonder) TGH. Lalu Ahmad Munir (pengasuh Ponpes Nurussalam Tanak Awu)<sup>187</sup> dan ratusan kiyai atau tuan guru lainnya yang tersebar di pulau Lombok dan sekitarnya.

Model pendidikan dan pengajaran TGH.M. Shaleh Hambali berbasis sistem tradisional dengan model *halaqoh*<sup>188</sup>. Dalam bahasa sasak model ini dikenal dengan istilah “*ngaji tokol*” (mengaji dengan cara duduk) dan waktu awal pendirian ponpesnya, beliau belum memformalkan sistem pendidikannya, hal ini berdampak pada lembaga pendidikan tidak berhak mengeluarkan ijazah santrinya, dan tidak dapat diangkat menjadi pegawai negeri.

Apa yang melatarbelakangi TGH. M. Shaleh Hambali tidak memformalkan sekolahnya padahal Darul Qur'an adalah pusat pendidikan Nahdlatul Ulama di Lombok waktu itu

*Pertama*, sistem *halaqoh* merupakan warisan tradisi akedemis para ulama sebelum beliau. Karenanya beliau lebih memilih untuk melanjutkan sistem pendidikan berbasis warisan tradisi akademis tersebut. *Kedua*, rupa-rupanya memang TGH. M. Shaleh Hambali tidak ingin santrinya menjadi cenderung kepada hal keduniaan (*Hubbud Dunia*), lebih memilih mengejar ijazah daripada memilih ilmu itu sendiri. Di samping itu, alasan lainnya adalah bahwa sekolah-sekolah yang berbau belanda seperti menggunakan celana tidak diperbolehkan oleh pemahaman Nahdlatul Ulama kala itu. Baru kemudian Nahdlatul Ulama mengadopsi sekolah formal setelah ada sekolah-sekolah formal Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah yang sekolah formalnya saat itu berada di Surabaya. Meski, sesungguhnya sebelum itu pada tahun 1919 pondok pesantren Tebuireng Jombang pimpinan KH. Hasyim Asy'ari sudah memasukkan kurikulum pelajaran umum seperti, Ilmu Bumi, ilmu hitung, bahkan sesudah Nahdlatul Ulama

---

<sup>187</sup> TGH. Lalu Ahmad Munir, *Wawancara*, di Tanak Awu tanggal 24 September 2015.

<sup>188</sup> Model *halaqoh* adalah salah satu model dalam pembelajaran dimana pengajar atau guru membacakan kitab tertentu, menerjemahnya, dan menjelaskannya, sementara murid atau jama'ah duduk melingkar atau berbaris mendengarkan dan sesekali diberi kesempatan bertanya jika ada penjelasan yang kurang dipahami.

terbentuk pada tahun 1926 oleh KH. Muhammad Ilyas memasukkan pelajaran bahasa Belanda dan sejarah ke dalam kurikulum madrasah atas persetujuan KH. Hasyim Asy'ari.<sup>189</sup> Selanjutnya, setelah disponsori oleh TGH. Abdul Ghafur dari Jawa, lembaga pendidikan TGH.M. Shaleh Hambali yang sebelah utara diformalkan pada tahun 1958.<sup>190</sup> Sehingga dengan demikian proses perkembangan pendidikan Nahdlatul Ulama di Lombok terlihat berjalan sangat lambat dibandingkan dengan pendidikan Nahdlatul Ulama di Jawa.

Berbeda dengan organisasi sosial keagamaannya lainnya, seperti Nahdlatul Wathan (NW) yang didirikan oleh TGKH. Zaenuddin Abdul Madjid, awalnya sistem pendidikan yang digunakan NW sejak berdiri pertama tahun 1937 sampai dengan 1950 menggunakan sistem pendidikan Ash-Sholatiyah Mekkah. Baru mengadakan reformulasi sistem pendidikan kurikulum ala Indonesia pada tahun 1951, dan seterusnya menyesuaikan dengan sistem yang ada. Pada tahun itu NW dapat membuka Ibtidaiyah dan tahun berikutnya 1952 didirikan Sekolah Menengah Islam, dan Pendidikan Guru Agama Pertama, dan lain sebagainya,<sup>191</sup> sehingga NW dapat dikatakan setingkat lebih maju dari pada Nahdlatul Ulama di Lombok di bidang pendidikan.

Namun demikian, dapat disayangkan adanya anggapan bahwa lembaga pendidikan Islam sulit melakukan perubahan dan pembaharuan. Ada baiknya perlu diperhatikan kritik Zamakhsyari Dhofier terhadap kenapa terjadi kelambanan reformasi Islam (termasuk pendidikan Islam) pada awal abad 20. Menurutnya disebabkan oleh tiga hal:

*Pertama*, terlalu urban bias sehingga hanya menyentuh kelompok kecil saja, sehingga tak mampu memobilisasi kelompok pedesaan yang jumlahnya jauh berlipat ganda. *Kedua*, menyerang dan mengucilkan ulama, padahal umat Islam Indonesia berada di bawah pengaruh ulama. Dengan mengucilkan ulama, proses reformasi tidak dapat dilembagakan dan dengan demikian tidak memiliki mekanisme untuk memperlancar proses reformasi selanjutnya. Para pemimpin reformasi Islam di perkotaan kurang menyadari bahwa reformasi merupakan suatu proses yang memerlukan taktik-taktik atau strategi yang tidak

---

<sup>189</sup> Mohammad Rifa'i, *Wahid Hasyim: Biografi Singkat 1914-1953*, (Jogjakarta: Garasi. 2009), hlm. 50-51.

<sup>190</sup> Kusumah, *NU Lombok..*, hlm. xiv..

<sup>191</sup> Muhammad Noor, Muslihan Habib, Muhammad Harfin Zuhdi, *Visi Kebangsaan...*, hlm. 177.

mesti harus mengambil jarak dengan tradisionalisme. *Ketiga*, reformasi Islam di perkotaan kurang menyadari bahwa reformasi itu juga terjadi di tingkat pedesaan, walaupun dalam tempo yang lebih lamban. Kelambanan itu sendiri bukan karena fatalitasnya untuk mengadakan reformasi terlalu lemah, melainkan karena sarana untuk mempercepat proses reformasi terlalu terbatas.<sup>192</sup>

Estafet perjuangan dan pergerakan selanjutnya dalam menumbuhkembangkan dan membesarkan Nahdlatul Ulama, diteruskan oleh para tuan guru lainnya seperti, Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Faisal Praya Lombok Tengah, dan para tuan guru dan ulama lainnya di Nusa Tenggara Barat.



Gambar.2.  
TGH. Lalu Muhammad Faisal

TGH. Lalu Muhammad Faisal dan kiprahnya dalam pengembangan Nahdlatul Ulama di Lombok yang diringkas dari Buku Karya Drs. Nasri Anggara, MA<sup>193</sup> memberikan penjelasan bahwa Haji Lalu Abdul Hanan dan Baiq Fatmawati merupakan orang tua dari sosok seorang ulama kharismatik yaitu TGH. Lalu Muhammad Faisal. Beliau dilahirkan di kampung Perbawe Praya Lombok Tengah pada 23 April 1925. Kedua orang tuanya terkenal dengan

keluarga yang sangat religius.

TGH. Lalu Muhammad Faisal terlahir dari kalangan bangsawan Lombok. Bangsawan merupakan keturunan Raja Lombok, yaitu Raja Banjar Getas yang kerajaannya berpusat di Praya. TGH. Lalu Muhammad Faisal adalah keturunan kedua belas dari Raden Arya Banjar Getas. Tuan guru memiliki dua saudara yaitu Hajjah Baiq Amnil dan Ustaz Lalu Bukran yang mana beliau ini mendirikan madrasah Sa'adatul Banat yang khusus mengakader generasi wanita NU yang kelak menjadi pengurus Muslimat, Fatayat, dan lain sebagainya.

---

<sup>192</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Kultur Pesantren dalam perspektif Masyarakat Modern*, Makalah disampaikan pada pertemuan cendekiawan Muslim di Jakarta tanggal 26-28 Desember 1984, hlm. 4.

<sup>193</sup> Nasri Anggara, *Politik Tuan Guru, Sketsa Biografi TGH. Lalu Muhammad Faisal dan Peranannya Mengembangkan NU di Lombok*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm. 9-18.

Latar belakang pendidikan TGH. Lalu Muhammad Faisal bermula dari Pondok Pesantren Al-Ittihad Al-Islamiyah Ampenan Lombok Barat tahun 1933-1937. Pada tahun 1938-1943 beliau melanjutkan sekolahnya di Madrasah Nahdlatul Wathan Pancor yang dipimpin oleh TGKH. Muhammad Zaenuddin Abdul Madjid. Setelah menamatkan di Pancor, beliau mengabdikan di Madrasah NW dan selanjutnya melanjutkan studi ke Mekkah yaitu Madrasah As-Sholatiyah selama empat tahun.

Di antara sekian banyak guru dari TGH. Lalu Muhammad Faisal, guru yang paling dekat dengan beliau di Mekkah adalah Syekh Muhammad Hasan al-Masysyath dikenal sebagai ulama ahli Hadist. Selain gurunya tersebut, guru beliau yang memiliki pengaruh besar adalah Syekh Salim Rahmatullah, Direktur Madrasah Al-Sholatiyah dan Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Kutbi. Syekh Salim Rahmatullah adalah guru politik TGH. Lalu Muhammad Faisal.

Adapun latar belakang organisasi TGH. Lalu Muhammad Faisal bergerak di bidang pendidikan dan organisasi masyarakat yaitu Organisasi Nahdlatul Ulama. Dalam organisasi pendidikan, TGH. Lalu Muhammad Faisal merupakan pengajar dan pengasuh serta pembina pondok pesantren Manhalul Ulum yang didirikan oleh beliau pada tahun 1960. Kemudian murid-murid beliau tersebar di daerah Lombok menjadi para ulama, antara lain TGH. M. Syahdi Amin (pengasuh Ponpes Al-Amin Batujai), TGH. Ma'arif Makmun Diranse (pengasuh Ponpes Manhalul Ma'arif Darek), TGH. Lalu Nasirudin Misbah (pengasuh Ponpes Nurul Ittihad Kute Pujut), Ustadz H. Sabarudin (pengasuh Ponpes Nurul Qur'an Praya), Ustadz Hasnanudin (pengasuh Ponpes Sullamul Ma'ad Penujak), dan masih banyak lagi murid-murid beliau yang tersebar di pulau Lombok dan daerah lainnya menjadi ulama pengasuh pondok pesantren.<sup>194</sup>

Selain mengajar di pondok pesantren, TGH. Lalu Muhammad Faisal juga aktif dalam sejumlah organisasi kemasyarakatan, antara lain Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, tetapi kemudian dalam tubuh NU, disamping menjadi pendiri juga terpilih menjadi Rois Syuriah Nahdlatul Ulama di Lombok Tengah dan Rois Syuriah Nahdlatul Ulama NTB.

---

<sup>194</sup> Wawancara dengan Ustadz H. Muh. Zaki, Pengasuh Ponpes Fajrul Hidayah Al-Ma'arif Batujai, beliau termasuk salah satu murid TGH. L. Muhammad Faisal Praya di Batujai tanggal 9 Nopember 2015.

Ketokohan para penerus perjuangan Nahdlatul Ulama di Lombok maupun Nusa Tenggara Barat, seperti TGH. Lalu Muhammad Faisal tidak kalah kharismatik dan loyalis dengan pejuang Nahdlatul Ulama sebelumnya, ketokohan beliau telah diakui oleh masyarakat Lombok dan Nusa Tenggara Barat umumnya karena beliau mampu mencetak ratusan bahkan ribuan kader unggulan yang tersebar di Lombok dan bahkan seluruh Nusantara, sehingga tidak salah beliau pun diakui secara nasional. KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Presiden ke-4 RI) pernah menulis tentang TGH. L. Muhammad Faisal. Artikel tersebut dimuat di Koran Nasional Kompas, Gus Dur menulis bahwa “bagi orang-orang yang belum mengenal NU, sikap Tuan Guru Faisal adalah contoh yang baik untuk berbicara tentang sikap saling menghormati di antara orang-orang yang berbeda pandangan sekalipun di tubuh Nahdlatul Ulama. Tuan Guru Faisal adalah contoh dan potret dari kepribadian Nahdlatul Ulama sejati, yang sangat mengutamakan persaudaraan.”<sup>195</sup>

Beliau TGH. Lalu Muhammad Faisal menjadi generasi emas ketiga Nahdlatul Ulama di Lombok NTB setelah, generasi pertama TGH. Musthofa Bakri Ampenan, generasi kedua TGH. M. Sholeh Hambali Bengkel, dan berikutnya adalah TGH. Lalu Muhammad Faisal Praya. Ketiga tuan guru tersebut merupakan setali seikat tokoh sentral pejuang kelahiran dan perkembangan Nahdlatul Ulama di Lombok NTB.

Setelah wafatnya ketiga tuan guru tersebut. Pelanjut estafet perjuangan Nahdlatul Ulama di Lombok NTB saat ini adalah generasi yang rata-rata murid dari ketiga tuan guru tersebut. Semoga Allah SWT mengampuni dosa mereka dan menerima amal perbuatan dan perjuangan mereka semua. Amin.

---

<sup>195</sup> Kompas, 23 Februari 1996.



# B A B I V

## NU SEBAGAI P ARPOL (1952- 1971)

### A. Terbentuknya NU Sebagai Partai Politik

POLITIK ADALAH SATU KATA dengan berjuta makna. Mulai dari makna yang baik sampai makna yang paling buruk, makna yang paling luas maupun makna yang paling sempit. Dalam politik tidak ada yang bernilai benar seutuhnya benar, atau bernilai salah seutuhnya salah. Yang benar bisa bernilai benar dan salah, dan yang salahpun demikian. Tidak ada teman dan musuh yang sejati, teman bisa menjadi musuh dan musuh dapat menjadi teman. Berbicara politik sesungguhnya dekat dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kenegaraan.

Pada dasarnya semua manusia yang hidup pada suatu negara adalah insan politik. Presiden terpilih juga merupakan keputusan politik, demikian juga strata kekuasaan terendah pun juga menjalankan aktivitas politik. Politik sebagai salah satu upaya memperbaiki keadaan umat. Sebagai sebuah gerakan dakwah terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama juga memiliki peran dan tanggung jawab dalam memperbaiki kondisi dan hegemoni kekuasaan negara Indonesia waktu itu, hingga mengharuskan Nahdlatul Ulama memikul tanggung jawab sebagai partai politik dalam menjamin hak-hak berbangsa dan bernegara terimplementasi dengan baik.

Warga Nahdlatul Ulama sebelumnya tidak pernah memimpikan Jam'iyahnya akan bermetamorfosis menjelma menjadi sebuah partai politik. Sebab Nahdlatul Ulama terlahir bukan dari semangat dan wawasan politik, atau karena motivasi kepentingan kursi kekuasaan, legislatif maupun eksekutif, baik di parlemen maupun di pemerintahan, Nahdlatul Ulama lahir semata-mata karena tanggungjawab agama



dan moral-sosial memperjuangkan Islam Ahlusunnah wal Jamā'ah sebagaimana yang dipahami mayoritas ulama Nusantara waktu itu, yang bertumpu pada pemahaman kema'zhaban yang shohih dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan diniyah. Walaupun pada akhirnya fakta tak terbantahkan Nahdlatul Ulama berubah sebagai partai politik, namun semangat Nahdlatul Ulama tetap sebagai organisasi sosial keagamaan tidak pernah berkurang apalagi menghilang.

Terjunnya Nahdlatul Ulama dalam politik praktis memberikan warna baru dalam sistem bernegara di Indonesia. Kondisi ini persis seperti sikap dan posisi ulama pada masa Islam awal berangkat dari pengalaman Nabi Muhammad Saw. Di Mekkah dan Madinah yang penuh onak dan duri. Misi Islam berbenturan dengan para pembesar kuffar Quraisy yang merasa kedudukannya sebagai bangsa arab terancam.<sup>196</sup> Misi besar Nahdlatul Ulama adalah mampu mensejahterakan umat.

Sejarah mencatat bahwa, Nahdlatul Ulama menceburkan diri secara langsung dalam kancah perpolitikan nasional, sebagai partai politik selama dua dasawarsa lebih (1952–1971).<sup>197</sup> Bagi Nahdlatul Ulama, Politik adalah jalan memperoleh kekuasaan, melakukan perubahan, dan memenuhi kemaslahatan umat. Sebagaimana dikemukakan oleh Anis Rasyid Baswedan bahwa Politik sebagai suatu upaya untuk memperjuangkan aspirasi kelompok dan agenda-agenda Islam, agar mempengaruhi hukum, kebijakan pemerintah melalui proses elektoral, dan institusi legislatif.<sup>198</sup>

Meski kiprah Nahdlatul Ulama dalam politik sesungguhnya dimulai sejak ia bergabung dengan partai Masyumi namun kapasitasnya tidak sebagai partai secara langsung dan demikian itu berlangsung dalam waktu yang relatif cukup lama. Baru setelah itu kemudian Nahdlatul Ulama menjadi partai sendiri secara mandiri. Walau telah lama dalam partai Masyumi, Nahdlatul Ulama pada akhirnya memutuskan untuk keluar dari partai Masyumi meski dalam proses mendirikan partai tersebut sebelumnya mengalami susah payah, bersama-sama dengan Muhammadiyah.

---

<sup>196</sup> Said Agil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2003), hlm. 136.

<sup>197</sup> *Suara Umat*, Desember 1997.

<sup>198</sup> Gonda Yumitro. *Partai Islam Dalam Dinamika Demokrasi Indonesia. Jurnal ilmu sosial dan politik*. Vol 17. 1. 37. 2013.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah anggota istimewa dalam partai Masyumi. Posisi Nahdlatul Ulama waktu itu adalah sesungguhnya sangat strategis, karena jabatan Ketua Majelis Syuro Masyumi berasal dari Nahdlatul Ulama sendiri. Namun dalam perjalanannya, apa terjadi tidak sebaik apa yang diharapkan. Posisi Majelis Syuro yang dipegang Nahdlatul Ulama hanya menjadi simbol belaka, atau dalam istilah populer masyarakat hanya sebagai “pendorong motor mogok”. Ketika mobil berjalan, maka si pendorong tidak pernah sama sekali dilihat apalagi diperhatikan oleh sang sopir. Dikatakan demikian, karena wewenang kebijakan politik partai Masyumi tidak dipegang oleh Nahdlatul Ulama hanya diposisikan sebagai penasihat saja. Padahal secara basis massa kelompok yang memiliki anggota terbanyak waktu itu dalam Masyumi adalah para ulama Nahdlatul Ulama. Mereka mempunyai basis anggota atau jama`ah yang banyak melalui sejumlah pengajian majelis taklim dan pondok pesantren yang mereka asuh. Tidak hanya puluhan atau ratusan pengajian majelis taklim dan pondok pesantren, tetapi ribuan pengajian majelis taklim dan pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia dan termasuk daerah Lombok khususnya.

Pertanyaan mendasar mengapa Nahdlatul Ulama sulit mendapat kekuasaan saat bergabung dengan Masyumi menjadi bingkai sejarah Nahdlatul Ulama yang melakukan pembaharuan. Pada awalnya Nahdlatul Ulama adalah sebuah gerakan yang sangat mengharamkan segala sesuatu yang berbau belanda termasuk menggunakan celana. Celana dianggap sebagai imitasi dari sistem, pola hidup dari pemerintah Belanda waktu itu.

Selama Nahdlatul Ulama masih menjauhkan diri pola hidup yang jauh dari kemajuan peradaban, maka selama itulah Nahdlatul Ulama akan selalu tenggelam dalam kehidupan sejarah yang tiada mencerahkan. Nahdlatul Ulama menyadari bahwa sikap tradisionalis menyebabkan Nahdlatul Ulama mengalami kemunduran dari perkembangan sumber daya manusia. Salah satu perubahan yang dilakukan Nahdlatul Ulama adalah perubahan dibidang pendidikan. Banyak kader Nahdlatul Ulama yang tidak mampu mengisi jabatan strategis karena tidak memiliki keahlian dan pendidikan yang memadai.

Sebagaimana dikemukakan oleh Zamroni bahwa Pendidikan selalu akan berpluktuasi seiring perkembangan zaman, dalam prosesnya,

wajah pendidikan selalu akan berubah, dibalik perubahan, pendidikan selalu akan mengalami permasalahan baik menyangkut efisiensi internal maupun eksternal dan ketidakmerataan pendidikan efisiensi internal berwujud dalam bentuk tingginya angka *drop out* dan angka ketidakhadiran kelas. Efisiensi eksternal pendidikan, diwujudkan oleh tidak dapat diserapnya hasil lulusan oleh pasar tenaga kerja. Sedangkan perbedaan pemerataan kesempatan adalah adanya perbedaan memperoleh kesempatan antara laki-laki dan wanita, antara penduduk kota dan desa, antara si kaya dan si miskin.

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan yang dipimpin oleh seorang kiyai atau tuan guru yang rata-rata merupakan orang yang pernah belajar lama tentang ilmu agama ke Mekkah al-Mukarramah. Di samping itu lagi, kaderisasi keilmuan kiyai mencetak murid yang kemudian menjadi seorang Kyai atau tuan guru lagi. Misalnya, ulama sepuh di Lombok, Tuan Guru Haji Muhammad Shaleh Hambali yang memiliki pondok pesantren Darul Qur'an Bengkel yang memiliki murid yang menjadi tuan guru pemimpin pondok pesantren lagi, yaitu Tuan Guru Haji Lalu Turmuzi Badarudin dengan pondok pesantrennya Qomarul Huda Bagu Lombok Tengah. Atau misalnya lagi ulama sepuh di Jawa, Hadhratus Syekh KH. Hasyim Asy'ari, Pendiri Pondok Pesantren di Tebuireng Jombang Jawa Timur, beliau memiliki murid yang menjadi Kyai pemimpin pondok pesantren, seperti KH. As'ad Syamsul Arifin, Pemimpin Ponpes As-Salafiah As-Syafi'iyah Situbondo Jawa Timur, KH. Jazuli Usman Ploso. Beliau merupakan pendiri dan pengasuh pondok pesantren Al-Falah yang berada di Ploso Mojo Kediri Jawa Timur, dan beliau lagi memiliki banyak murid dan berhasil mendidik dan mengkader muridnya tersebut menjadi seorang Kyai "pemimpin pondok pesantren" juga.<sup>199</sup>

Hadhratus Syekh KH. Hasyim Asy'ari, di samping posisinya sebagai Rais Akbar Jam'iyah Nahdlatul Ulama, juga sebagai Rais Akbar Majelis Syuro partai Masyumi sampai beliau meninggal pada tahun 1947.<sup>200</sup> Dalam perjalanan panjangnya itu, posisi Majelis Syuro yang dijabat oleh beliau tidak memberikan arti yang signifikan terutama bagi Jam'iyah

---

<sup>199</sup> Penyusun Alumni Ponpes PP. AL-Falah, *Biografi Sang Belawong dari Timur Kiyai Haji Jazuli Usman Ploso*, PP. Al-Falah. 2008.

<sup>200</sup> Einar M. Sitompul, *Nahdlatul Ulama dan Pancasila: Sejarah dan Peranan NU Dalam Perjuangan Umat Islam di Indonesia dalam rangka penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya Asas*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), hlm. 98.

Nahdlatul Ulama. Hal itu disebabkan karena adanya polemik politis antar kelompok Islam sendiri di tubuh partai Masyumi. Melihat dinamika tersebut maka dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama di Palembang tahun 1952, secara organisatoris memutuskan bahwa Nahdlatul Ulama keluar dari Masyumi dan mendirikan partai sendiri, yaitu partai Nahdlatul Ulama.

Setelah Nahdlatul Ulama menjadi partai, Nahdlatul Ulama menjadi kekuatan politik baru dan besar dalam kancah perpolitikan nasional. Terbukti pada pemilu tahun 1955, yang menjadi pemilu pertama bagi partai NU saat itu, dan kemudian keluar sebagai partai pemenang ketiga setelah Partai Nasional Indonesia dan Masyumi. Partai NU berhasil mendudukkan wakilnya di parlemen (Majelis Konstituante) sebanyak 45 orang yang mana ketika di Masyumi, NU hanya mendapat jatah 8 orang saja, termasuk dari 8 orang tersebut salah satu berasal dari Lombok (Sunda Kecil), yaitu TGH. Mustajab Pagutan yang menjadi Sekretaris Partai Nahdlatul Ulama Lombok Barat (Sunda Kecil) waktu itu, dan juga dalam jajaran Kabinet antara lain yang mengisinya adalah KH. Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama (Putra dari Hadhratus Syekh KH. Hasyim Asy`ari). Di mana sebelumnya ketika berada dalam Masyumi meski berada di posisi yang strategis, Nahdlatul Ulama tidak pernah mendapat jatah yang maksimal, baik di parlemen maupun di pemerintahan.

Kabinet yang dibangun partai Islam menduduki tiga mayoritas itu tidaklah berusia panjang sekitar tiga atau empat bulan, karena partai Masyumi dalam muktamarnya memutuskan keluar dari Kabinet. Keluarnya Masyumi memberikan angin segar bagi PKI, sebab kekuatan politik umat Islam mempunyai dukungan yang sangat kuat diluar maupun didalam kabinet sehingga sulit bagi PKI untuk berposisi. Keluarnya Masyumi dari Kabinet, PKI memperoleh keuntungan politis, karena salah satu kekuatan masyarakat lepas dari tubuh pemerintah.<sup>201</sup>

PKI dan Nahdlatul Ulama selalu berbenturan dan NU merupakan musuh yang menyulitkan bagi PKI. Kedudukan Nahdlatul Ulama dalam kabinet yang ditinggalkan Masyumi menjadi bahan provokasi

---

<sup>201</sup> Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm. 643.

PKI untuk memecah belah persatuan umat Islam. Namun Nahdlatul Ulama mampu memahami taktik PKI tersebut.<sup>202</sup>

Tahun 1962-1967 Saifuddin Zuhri diangkat menjadi Menteri Agama menggantikan KH. A. Wahib Wahab, tahun ini menjadi masa yang sangat berat bagi Bangsa Indonesia. Didalam negeri, rongrongan PKI bertambah memuncak. Pemuda-pemuda Nahdlatul ulama yang tergabung dalam “Ansor” membentuk “Banser” menngimbangi “pemuda rakyat”-Nya PKI. Partai Nahdlatul Ulama mengambil prakarsa menyelenggarakan K. I. A. A. (Konferensi Islam Asia Afrika) sebuah penyelenggaraan Konferensi Islam yang terdiri dari Nahdlatul Ulama (KH. Idham Chalid-KH. Ahmad Syaichu), PSII (Aruji Kartawinata-Harsono Cokroaminoto), Perti (KH. Sirajuddin Abbas), Muhammadiyah (K.H. A. Badawi-Prof. K.H. Farid Ma’ruf), Gasbindo (Wartomo-Agus Sudono), Alwashliah (H. Zainuddin Ja’far) dan dibantu oleh Departemen Luar Negeri dan ABRI.<sup>203</sup>

Sedangkan pada tanggal 30 September tahun 1965 terjadi peristiwa yang hampir menggoncangkan seluruh sendi kehidupan keagenaraan Bangsa Indonesia, jika saja tidak datang pertolongan Allah SWT, gerakan ini dikenal dengan istilah G30S/PKI. Setelah diketahui bahwa G30S/PKI mendalangi pemberontakan, maka Nahdlatul Ulama tidak tinggal diam, Nahdlatul Ulama menuntut pemerintah untuk membubarkan PKI dan menindak orang-orang yang terlibat dalam tragedi berdarah itu. Nahdlatul Ulama mengajak partai-partai dan golongan-golongan dalam masyarakat untuk membentengi negara dan keutuhan persatuan nasional dengan membentuk satu badan gabungan yang bernama “Front Pancasila” di bawah pimpinan Subchan Z. E. Salah seorang tokoh Nahdlatul Ulama. Sejak detik-detik itu maka lahirlah “Angkatan 66” sebagai permulaan lahirnya “Orde Baru”.<sup>204</sup>

Masyarakat tercekam oleh oleh suatu teka-teki sampai seberapa jauh ketertiban presiden Soekarno dengan G30S/PKI, sementara Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang pada tahun 1967 memberhentikan Presiden Soekarno. Jenderal Soeharto yang oleh Soekarno diberi kuasa untuk menertibkan situasi keamanan terkenal dengan “Surat Perintah 11 Maret 1966” lalu membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966.

---

<sup>202</sup> *Ibid.*, hlm. 644.

<sup>203</sup> *Ibid.*, hlm. 654.

<sup>204</sup> *Ibid.*, hlm. 656.

Sejak itu partai PKI dikatakan sebagai partai terlarang di bumi Nusantara (penjelasan jelasnya dalam pembahasan berikutnya).<sup>205</sup>

Kembali pada Nahdlatul Ulama berpolitik, Selain itu juga, dalam sejarah perkembangan Nahdlatul Ulama, eksistensi kaum Muhammadiyah yang memiliki sikap progressif atau dikenal dengan kaum pembaharu, dianggap oleh tokoh-tokoh Islam tradisional menjadi ancaman pada ajaran yang dianut berdasarkan petunjuk sumber ajaran yang dipahami Nahdlatul Ulama. Demikian juga Nahdlatul Ulama ketika tidak mampu menduduki jabatan strategis di Masyumi yang kemudian menarik diri dari partai tersebut.<sup>206</sup> Sikap defensif dan opensif internal Nahdlatul Ulama menjadikan Nahdlatul Ulama menjadi selalu dapat menyesuaikan diri dengan kondisi dan konteks politik, dan menerima perubahan secara internal dan eksternal dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan sikap Nahdlatul Ulama dalam berbagai bidang kehidupan.

Hubungan Nahdlatul Ulama dan Masyumi merenggang ketika Nahdlatul Ulama keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik, Banyak ulama yang bersimpati dan bergabung dengan partai baru itu di daerah Lombok dan provinsi NTB pada umumnya. Alasan pokoknya adalah karena dilihat bahwa hanya Partai Nahdlatul Ulama-lah satu-satunya partai Islam yang secara terbuka memperjuangkan asas Islam Ahlusunnah wal Jama'ah (Aswaja) dimana rata-rata ulama, tokoh masyarakat, dan masyarakat Lombok dan NTB umumnya adalah penganut agama Islam yang berpaham sama dengan pemahaman keagamaan yang dianut oleh Partai Nahdlatul Ulama.

Secara praktis ciri paham *Ahlusunnah Waljama'ah* ala Nahdlatul Ulama dapat diidentifikasi dengan hal-hal sebagai berikut; suka ziarah ke kubur orang saleh (Para Waliullah), jika mau sholat dia membaca *usholli*, qunut shubuh, mengangkat tangan ketika berdo'a, sholat tarawih 20 rakaat, suka dzikir atau membaca al-Qur'an sebagai hadiah pahala untuk orang meninggal dunia, suka dzikir berjama'ah, bertawassul kepada orang saleh, para waliyullah dan para Nabi, ketika hidup maupun sesudah mereka wafat, suka memperingati hari besar Islam, seperti maulid Nabi SAW dan lain sebagainya, membaca Sayyidina ketika

---

<sup>205</sup> *Ibid.*, hlm. 657.

<sup>206</sup> Laode Ida, *NU Muda: Kaum Progressif dan Sekulerisme Baru*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 11.

tahiyat sholat atau diluarnya yang digandeng dengan nama para Nabi atau sahabat atau para Imam. Adapun jika ada kelompok/ golongan yang menganggap atau menghukumi perbuatan-perbuatan tersebut haram, bid'ah, sesat, bahkan syirik hal-hal demikian, maka paham tersebut “bukan paham Ahlussunnah Waljamā'ah”. Inilah pendapat mayoritas umat Islam pada waktu itu hingga hari ini dan seterusnya.<sup>207</sup>

Di antara ulama yang bergabung dengan Partai Nahdlatul Ulama adalah Tuan Guru Haji Muhammad Shaleh Hambali, pendiri pondok pesantren Darul Qur'an Bengkel Lombok Barat dan Tuan Guru Haji Sakaki Umar, pendiri pondok pesantren Ad-Dinul Qoyyim Kapek Lombok Barat, Tuan Guru Haji Akhsid Muzhar Masbagik Lombok Timur, Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Faisal Praya Lombok Tengah, Tuan Guru Haji Lalu Arsyad Praya Lombok Tengah dan, Tuan Guru Haji Izzudin Ma'arif Pancor Lombok Timur, Tuan Guru Haji Badarul Islam Pancor Lombok Timur, Tuan Haji Zainuddin Karang Taliwang Cakranegara/ Mataram dan lain sebagainya.

## **B. Pelaksanaan Fungsi Partai NU di Lombok NTB**

Setelah terbentuknya pengurus wilayah partai Nahdlatul Ulama, maka ditetapkanlah Tuan Guru Haji Muhammad Shaleh Hambali Bengkel sebagai ketua Syuriah-Nya dan Tuan Guru Haji Akhsid Muzhar Masbagik sebagai ketua Tanfidziyah-Nya. Setelah resminya menjadi ketua pengurus wilayah partai Nahdlatul Ulama, maka kemudian Tuan Guru Haji Muhammad Shaleh Hambali menetapkan kebijakan politiknya melalui pondok pesantren beliau bahwa:

1. Mewajibkan para santrinya untuk masuk partai Nahdlatul Ulama dengan dibai'at terlebih dahulu.
2. Siapa yang tidak mau masuk partai Nahdlatul Ulama dilarang menuntut ilmu di ponpes Darul Qur'an Bengkel.

Kecintaan TGH. Muhammad Sholeh Hambali terhadap partai Nahdlatul Ulama sangat luar biasa bahkan tergambar dalam ungkapannya. beliau yang mengatakan, “jikalau malaikat Mungkar dan

---

<sup>207</sup> Asep Saifuddin Chalim, *ASWAJA di Tengah Aliran-aliran*, (Mojokerto: PP.Pergunu. 2013), hlm. 270.



Nakir menanyakan apa partaimu ? maka saya akan menjawab dengan tegas “NU”.<sup>208</sup>

Mengenai masuknya Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Faisal Praya kepartai Nahdlatul Ulama mempunyai cerita yang menarik, sebagaimana TGH. Lalu Muhammad Faisal bercerita kepada penulis ketika beliau masih hidup,

“Saya sebenarnya mau netral saja biar mengajar saja, atau berdakwah sesuai dengan amanat Guru Besar beliau Maulana Syekh Hasan Mas-yath sebelum saya kembali ke Indonesia. Ketika saya diketahui oleh Guru saya TGKH. Zainuddin Abdul Majid Pancor tidak masuk partai, saya dikirim surat oleh Beliau Maulana Syekh, berisi perintah agar saya masuk Partai NU saja, sebab Partai NU itu berhaluan Ahlussun-nah Waljama`ah yang sama dengan paham yang dikembangkan oleh para Ulama di Lombok dan Indonesia, apalagi sebentar lagi NU akan keluar dari Masyumi dan mendirikan partai sendiri dan kemungkinan saya, kata Maulana Syekh dalam surat itu juga akan bergabung den-gan partai NU itu”.<sup>209</sup>

Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Faisal juga menjelaskan tentang hasil kongres umat Islam bahwa:

Berdasarkan hasil kongres umat Islam wajib hukumnya umat Islam berpartai Islam karena partai Islam inilah yang akan memperjuangkan Islam di Indonesia. Apalagi saat itu, keputusan tentang dasar negara masih belum final dan masih sedang hangat dirundingkan. Saya tak bisa lepas memikirkan hal tersebut. Ketika itu, saya sedang aktif meng-ajar di Ponpes Nurul Yaqin Praya yang *nota bene* pendukung Masyu-mi. *Pertama*, setelah saya sholat Istikharah, *kedua*, minta pertimbangan juga dengan keluarga lainnya untuk masuk partai NU, *ketiga*, diperkuat dengan dorongan para jama`ah, dan terakhir *keempat*, adanya doron-gan dari Tuan Guru Haji Muhammad Shaleh Hambali Bengkel, maka saya kemudian masuk Partai NU.<sup>210</sup>

Setelah itu, beliau kemudian mendirikan cabang Nahdlatul Ulama di Lombok Tengah dengan dukungan beberapa tokoh lainnya terutama dari kalangan keluarga beliau seperti, Tuan Guru Haji Arsyad Mertak

---

<sup>208</sup> Wawancara dengan TGH. Lalu Ahmad Khairi Adnan, di Brangsak Praya tahun 2015.

<sup>209</sup> Wawancara dengan TGH. L. Muhammad Faisal di rumah di Praya, pada tanggal 29 Maret 1996.

<sup>210</sup> *Ibid.*



Tombok, Mamik Jalan, Mamik Likik, Haji Lalu Abdul Hamid, Lalu Kamal dan keluarga beliau yang ada di Balungadang Praya lainnya, termasuk dukungan dari kalangan birokrat, yaitu Haji Lalu Muhammad Hasyim (Bupati Lombok Tengah saat itu).<sup>211</sup> Karena TGH. Lalu Muhammad Faisal masih aktif mengajar di Ponpes Nurul Yaqin yang kebetulan berafiliasi dengan partai Masyumi dan di satu sisi pula sudah aktif di Nahdlatul Ulama, maka beliau berhenti mengajar di Nurul Yaqin secara baik-baik dan kemudian selanjutnya mendirikan pondok pesantren sendiri yaitu, “Pondok Pesantren Manhlul Ulum Perbawa” yang awalnya pondok pesantren tersebut dibangun dan dikelola di sebidang petak tanah di Balungadang Praya, sebelumnya di sana berupa madrasah darurat, Setelah itu dipindahlokasikan ke Seme Perbawa Praya Lombok Tengah, tanah wakaf milik keluarga Lalu Kamal sampai sekarang.<sup>212</sup>

Ketika pemilu pertama berlangsung pada tahun 1955, Nahdlatul Ulama keluar sebagai partai pemenang ketiga setelah Masyumi dan PNI. Pada waktu itu, isu sentral politik yang muncul di tengah masyarakat Lombok dan NTB umumnya, antara Masyumi dan Nahdlatul Ulama adalah, bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah satu-satunya Parpol Islam yang berpaham Aswaja. Sementara Masyumi dan para tokohnya disebut sebagai orang yang anti Madzhab, anti Tahlil, anti Ddzikir, anti Serakalan, anti Qunut, anti Talqin dan lain sebagainya. Di Lombok Tengah, Praya khususnya, isunya bertambah bahwa Masyumi disebut sebagai partai anti Menak (Anti Bangsawan), anti adat istiadat dan lain sebagainya. Maka geliat pertumbuhan dan perkembangan Nahdlatul Ulama sebagai partai politik terus maju dan perubahan positif tersebut tak bisa dipisahkan dari peran sosial politik para tuan guru.

Para Tuan Guru tersebutlah yang melanjutkan perjuangan Nahdlatul Ulama secara politik maupun sosial keagamaan di Lombok NTB, sehingga secara riil dan organisatoris Nahdlatul Ulama memiliki cabang-cabang di tiap-tiap kabupaten, bahkan Nahdlatul Ulama dengan cepat merambah masuk ke setiap kecamatan, dan ke desa-desa yang ada dari Ampenan ujung barat pulau Lombok sampai dengan Sape Bima ujung timur pulau Sumbawa.

---

<sup>211</sup> Nasri, *Melati..*, hlm. 157.

<sup>212</sup> Kusumah., hlm. 38.

Oleh karena itu, banyak muncul tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dalam berbagai level dan bidang di Lombok dan NTB umumnya, di samping dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Kondisi lain yang sangat berpengaruh positif bagi partai Nahdlatul Ulama ialah ketika Bung Karno membubarkan partai Masyumi dan partai lainnya, maka para Tuan Guru dan tokoh masyarakat semakin banyak yang bergabung ke dalam Partai Nahdlatul Ulama.

Tuan Guru Kyai Haji Zainuddin Abdul Majid tidak jadi bergabung dengan Partai Nahdlatul Ulama walaupun sebelumnya pernah berkirim surat kepada muridnya Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Faisal menerangkan bahwa beliau kemungkinan akan bergabung dengan partai Nahdlatul Ulama. Beliau lebih memilih tetap di partai Masyumi dan lebih konsentrasi mengembangkan organisasi NW (Nahdlatul Wathon), yang dirintis oleh beliau sendiri sebagai organisasi sosial keagamaan, yang sama dengan Nahdlatul Ulama bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan agama di Lombok dan Indonesia umumnya, sepulang beliau dari menuntut ilmu di Mekah. Namun, meski beliau tidak masuk ke partai Nahdlatul Ulama akan tetapi ada beberapa murid beliau yang masuk ke Partai Nahdlatul Ulama selain Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Faisal antara lain, Tuan Guru Haji Sakaki Umar dari Kapek Gunung Sari, Tuan Guru Haji Afifudin Adnan Kediri dan lain sebagainya. Tuan Guru Haji Sakaki Umar masuk ke partai Nahdlatul Ulama dan menjadi pengurus Syuriah bersama Tuan Guru Haji Muhammad Sholeh Hambali Bengkel, sementara Tuan Guru Haji Afifuddin Adnan masuk ke partai NU dan menjadi Pengurus Wilayah Ansor Partai NU. Tuan Guru Haji Afifuddin pernah dikirim oleh Nahdlatul Ulama kuliah selama tiga tahun ke Kulliyatul Muballighin Semarang bersama beberapa anak muda Nahdlatul Ulama yang lain seperti: KH. Ahmad Usman, TGH. Zainal Abidin Sakre, Anwar Samanhudi dan Haji Jamiludin Azhar dan lain sebagainya.

Tidak bergabungnya TGH. Zainudin Abdul Madjid kedalam partai Nahdlatul Ulama bukan semata karena beliau hendak memperoleh kekuasaan, namun dengan tetap di Masyumi juga dalam rangka menjaga NKRI dari dominasi PKI pada kabinet, sehingga beliau meminta muridnya TGH. Lalu Muhammad Faisal untuk masuk ke dalam partai Nahdlatul Ulama. Kewenangan memang bergantung pada kekuasaan.

Demikian juga dengan keputusan Nahdlatul Ulama yang mau keluar dari Masyumi dalam rangka membentengi komunisasi Indonesia secara massal dan itu merupakan keputusan *Brilliant* dan tepat.

Ketokohan Tuan Guru Haji Muhammad Shaleh Hambali Bengkel dan Tuan Guru Haji Akhsyid Muzhar Masbagik di awal-awal Nahdlatul Ulama menjadi partai adalah murni hajat beliau berdua untuk perjuangan Islam Aswaja. Sebab beliau berdua tidak pernah masuk organisasi atau partai politik manapun selain Nahdlatul Ulama, termasuk Masyumi. Alasan kuatnya, adalah karena organisasi yang lain tidak sepaham dengan paham Aswaja, dan partai Masyumi sendiri meski sebagian pemahannya Aswaja tetapi juga Masyumi menerima semua aliran Islam yang ada maka tentu hal tersebut menyebabkan timbulnya banyak hal yang tidak selaras dengan paham Ahlussunnah Waljam'ah khususnya. Sedangkan menurut pandangan Tuan Guru Haji Muhammad Shaleh Hambali Bengkel dan Tuan Guru Haji Akhsyid Muzhar Masbagik, Nahdlatul Ulama adalah paham yang murni berpaham Ahlussunnah Waljam'ah sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa; "satu-satunya kelompok atau paham yang selamat di akhirat adalah paham Ahlussunnah Waljam'ah (H.R. Thabrani).<sup>213</sup>

Pada umumnya paham Aswaja juga dianut oleh mayoritas masyarakat Islam Lombok dan NTB umumnya. Oleh karena itulah, beliau berdua lebih memilih bergabung dengan Nahdlatul Ulama. Figur serta posisinya sangat tepat menjadi tokoh sentral barat dan timur bagi partai Nahdlatul Ulama.

Beberapa tokoh NU yang dapat penulis rekam dalam buku ini adalah tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di Lombok dan NTB umumnya sejak Nahdlatul Ulama pertama kali menjadi parpol (1952-1971), yaitu sebagai berikut:

### **Lombok Barat ( Termasuk Kota Mataram ).**

TGH. Shaleh Hambali Bengkel

TGH. Ibrahim al Khalidi Kediri

TGH. Sakaki Umar Kapek Gunungsari

---

<sup>213</sup> Drs. Abdul Wahib, M.Ag, *Materi Dasar Nahdlatul Ulama (Ahlussunnah Waljama'ah)*, hlm. 4. Lihat di Tim PWNU Jawa Timur, *Aswaja An-Nahdliyah*, hlm. 2

TGH. Abhar Pagutan  
TGH. Mushtofa Faisal Pejeruk Mataram  
TGH. Hanan Dasan Agung Mataram  
TGH. Anwar Monjok  
H. Hamzah Karim  
H. Fathurrahman Zakaria Pagutan  
TGH. Jalaluddin Sekarbela  
TGH. Naim Batu Kute  
TGH. Ya'qub Batu Kute  
TGH. Mustajab Pagutan  
Hamzah Mulahele Ampenan Mataram  
Ahmad Djufri Karang Kelok Mataram  
TGH. Mustafa al- Khalidi Kediri  
TGH. Abdul Ghafur Rawi (Tanjung )  
TGH. Abdul Karim Dasan Agung Mataram  
TGH. Syafi`in Tanak Beak  
TGH. Muhiwan Roji Batu Samban  
TGH. Muh. Anwar MZ Duman Narmada ( Lingsar )  
Dan lain sebagainya

### **Lombok Tengah**

TGH. L. Muhammad Faisal Praya  
TGH. L. Arsyad Mertak Tombok  
H. L. Muh. Hasyim (Lalu Wirentanus, Datu Tuan Praya)  
Mamik Jalan  
Lalu Kamal  
Mamik Liki'  
TGH. Manshur Abbas Bonder

TGH. L. Turmuzi Badarudin Bagu  
Lalu Kamal Perbawa Praya  
TGH. Azhar Bagu  
TGH. Saleh Batu Nyale  
TGH. Khairudin Penujak  
Lalu Imron Ranggegate  
Syarifudin B.A.  
H. Abdullah Afifi  
Mamik Deboh  
Lalu Imron  
TGH. Nuruddin, MA  
TGH. L. Ahmad Munir  
TGH. Abdul Hamid  
TGH. L. Misbah Mujur  
Dan lain sebagainya

### **Lombok Timur**

TGH. Akhsid Muzhar Masbagik  
TGH. Ahmad Asy`ari  
TGH. Izuddin Maarif Pancor  
TGH. Badarul Islam Pancor  
TGH. Zainuddin Arsyad Mamben  
TGH. Mahsun Masbagik  
TGH. Manan Bagek Nyake  
Muhammad Sareh, SH  
TGH. Zainuddin Mansur, MA. Sakre  
TGH. Makshum Rensing  
TGH. Abdul Muin Mamben Daye

H. Muhammad Said  
H. Jalaluddin (ayah TGB. Zainul Majdi, Gubernur NTB)  
Lalu Wildan (mantan ketua PWNU)  
Lalu Nuruddin BA (Ketua LP Ma'arif)  
Drs. H. Mahsun (Ketua LP Ma'arif )  
Su'ud Suyuthi (Mantan sekretaris PCNU Lotim)  
TGH. Muhammad Pringgesile  
TGH. M. Jamiluddin Muhammad Pringgesile  
H. Ali B.D  
H. Lalu Muhammad Yunus  
Drs. Murjoko  
Dan lain sebagainya

### **Sumbawa**

KH. Muhamad Zain Idris  
TGH. Muhamad Amin  
TGH. Saleh Wake  
KH. Ahmad Usman  
KH. Sirojul Munir Utan Re  
Ihya' Ulumuddin  
Lalu Munca  
Ahmad Hasan  
Dan lain sebagainya

### **Dompu**

H. Bil'id MSA.  
Drs. H. Israil  
KH. Salman Faris  
Syekh Murshali

Dan lain sebagainya

## **Bima**

KH. Usman Abidin

Abdurrahim Ajrun

KH. Amin Ismail

KH. Said Amin

H. Abdurrahman Muhammad

KH. Syahrudin

KH. Muhammad Hasan

Ust. H. Mansur

Dan lain sebagainya.<sup>214</sup>

Ketika pemilu pertama sesudah Indonesia merdeka tahun 1955, partai Nahdlatul Ulama Lombok (Sunda Kecil) dapat mengirimkan TGH. Mustajab sebagai anggota Konstituante, dan untuk wilayah tingkat I DPRD Lombok (Sunda Kecil) menempatkan Haji Hidjas yang selama ketika Nahdlatul Ulama menjadi anggota Masyumi tidak pernah mendapat kesempatan jatah kursi sama sekali.

Pada tanggal 17 Desember 1958, sesuai dengan perkembangan perpolitikan nasional dan kondisi riil masyarakat NTB pada waktu itu, maka Lombok dan Sumbawa menjadi sebuah Propinsi tersendiri yang lepas dari Propinsi Sunda Kecil (Nusa Tenggara) yang beribukota di Singaraja Bali. Partai Nahdlatul Ulama dalam hal ini sangat berperan dalam proses pembentukannya, dimana berbagai ikhtiar dilakukan baik di tingkat lokal maupun nasional, sehingga Partai Nahdlatul Ulama berhasil mendapat kepercayaan langsung untuk memimpin Propinsi yang baru dengan terpilihnya Raden Arya Moh. Roeslan Tjakraningrat sebagai Gubernur Pertama Propinsi NTB (Nusa Tenggara Barat).<sup>215</sup> Kabupaten Lombok Barat dipegang J.B. Tuhumena Maspaitella,

---

<sup>214</sup> Wawancara dengan H. Ahmad Taqiuddin Mansur, H. Fathurrahman Zakaria, TGH. L. Turmuzdi Badarudin, TGH. Anwar MZ, tahun 2014.

<sup>215</sup> Istilah propinsi dahulu disebut Daerah Swatantra Tingkat I (Daswati I), sementara Kabupaten disebut Daerah Swatantra Tingkat II (Daswati II). Namun untuk memudahkan pemahaman dalam hal ini istilah tersebut disamaratakan dengan istilah yang sekarang. Baru berubah setelah Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin (1955-sekarang) dimana sebelumnya menganut sistem demokrasi parlementer (1945-1955).

Kabupaten Lombok Tengah dipegang oleh Lalu Mahnep, Kabupaten Lombok Timur dipegang oleh Idris H. M. Jafar, Kabupaten Sumbawa dipegang oleh M. Kaharuddin, Kabupaten Dompu dipegang oleh MT. Sirajuddin dan Kabupaten Bima dipegang oleh Junaidi Amir Hamzah. Di bagian legislatif, DPRD propinsi NTB berhasil disusun dan memilih Madilau ADT dari Masyumi sebagai Ketua, dan TGH. Akhsyid Muzhar dari Partai Nahdlatul Ulama sebagai Wakil Ketuanya.

Selanjutnya pada tanggal 9 Nopember 1959 secara resmi dipilihlah Raden Arya Moh. Roeslan Tjakraningrat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat yang pertama (dari partai NU), yang sebelumnya belum diresmikan. Pengangkatan Raden Arya Moh. Roeslan Tjakraningrat menjadikan partai Nahdlatul Ulama dapat bergerak secara leluasa di Lombok dan sekitarnya apalagi setelah bubarnya partai Masyumi. Raden Arya Moh. Roeslan Tjakraningrat dari daerah Madura, seorang Pamongpraja, pegawai pemerintah pusat yang berpangkat Bupati. Gubernur pada waktu dibantu oleh ABPH (Anggota Badan Pemerintahan Harian) sebanyak 4 orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, yang terdiri dari tokoh-tokoh partai yang tentunya mencerminkan kekuatan partai itu sendiri di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, begitu juga di tingkat kabupaten, polanya sama dengan di tingkat propinsi. Dan beberapa tokoh Nahdlatul Ulama yang pernah duduk di ABPH (Anggota Badan Pemerintahan Harian) Propinsi adalah Bapak H. Bil'id MSA, mantan sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama NTB (1953-1968) dan H. Mukhlis AR, Ketua Persatuan Tani Nahdlatul Ulama Wilayah NTB (1953-1968). Sementara untuk tingkat Kabupaten, khususnya Lombok Tengah yang mengisi posisi jabatan APBH adalah Lalu Kamal (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lombok Tengah).

Pada tahun 60-an, partai Nahdlatul Ulama kembali berhasil mendudukkan beberapa kadernya di posisi yang strategis, baik di pemerintahan propinsi maupun kabupaten. Ketika itu, Bupati Lombok Barat dipegang oleh Drs. Muh. Said, Lombok Tengah dipegang Drs. Lalu Srigede setelah mengalahkan rival politiknya Lalu Gde Wirestante dari Golkar<sup>216</sup>, Lombok Timur Lalu Mushlihah dan Sumbawa dipegang Drs. H. Hasan Usman (adik alm. KH. Ahmad Usman, Pengurus Wilayah

---

<sup>216</sup> Nasri Anggara, *Op. cit.*, hlm. 131.



NU NTB). Peranan-peranan strategis Nahdlatul Ulama tersebut dapat digunakan dan dijalankan dengan profesional dan proporsional.

Dalam perkembangan selanjutnya di tahun 60-an situasi politik mulai berubah memanas dengan adanya tindakan aksi sepihak yang dilakukan oleh partai Komunis Indonesia (PKI). Jelas tindakan ini mengundang perhatian dan respon berbagai kalangan ormas maupun orsospol, terutama Nahdlatul Ulama. Tindakan aksi sepihak PKI sangat ditentang oleh partai Nahdlatul Ulama dan berbagai macam upaya yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama untuk menghalau dan menyingkirkannya.

Memasuki tahun 70-an, perkembangan politik di daerah Lombok dan NTB umumnya seiring juga dengan perkembangan politik nasional, bahwa pada pemilu 1971 menghasilkan kemenangan partai Golkar atau partai pemerintah dan partai Nahdlatul Ulama pada peringkat kedua, meski diposisi kedua partai Nahdlatul Ulama saat itu perolehan suaranya tertinggal jauh oleh partai Golkar. Perolehan suara partai Golkar dan partai Nahdlatul Ulama pada pemilihan anggota DPRD tingkat I dan II provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 1971 dapat dilihat sebagaimana berikut:

Tabel: Hasil Pemilihan DPRD Tingkat I dan II Prov. NTB

Tahun 1971.<sup>217</sup>

| No | Wilayah       | Partai Golkar | Partai NU | Jumlah Kursi |        |
|----|---------------|---------------|-----------|--------------|--------|
|    |               |               |           | Golkar       | NU     |
| 1  | Lombok Barat  | 167.322       | 40.322    | 20 Buah      | 5 Buah |
| 2  | Lombok Tengah | 153.017       | 50.845    | 22 Buah      | 7 Buah |
| 3  | Lombok Timur  | 170.572       | 41.478    | 22 Buah      | 7 Buah |

Adapun untuk anggota DPR pusat dari NTB disediakan 6 kursi, yaitu 4 kursi diberikan kepada Golkar, dan sisanya masing-masing diberikan kepada Nahdlatul Ulama dan Parmusi. Masing-masing tokoh Nahdlatul

<sup>217</sup> Lembaga Pemilu, *Hasil Pemilu DPRD NTB Tahun 1971*, (Bandung: Offset, 1971), hlm. 33

Ulama yang menempati kursi tersebut ialah H. Hamzah Karim (Lombok Barat), Haji Hidjas (Lombok Barat), dan lain sebagainya.

Maka dengan kemenangan itu pemerintah semakin meningkatkan upaya deparpolisasi, yaitu menerapkan kebijakan untuk dilakukannya penyederhanaan partai dari 25 partai menjadi 8 partai. Maka setelah pemilu tersebut atau tepatnya pada tanggal 5 Januari 1973 empat partai Islam yaitu, Parmusi (Partai Muslimin Indonesia), NU, Perti (Partai Islam), dan PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) berfusi dalam satu wadah partai, yang namanya PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Namun nasib yang dialami oleh Nahdlatul Ulama ketika bergabung dalam PPP (Partai Persatuan Pembangunan), gambarannya tidak jauh berbeda dengan saat Nahdlatul Ulama bergabung dalam partai Masyumi di era pertama perpolitikan Indonesia.<sup>218</sup>Maka dengan berfusnya partai Nahdlatul Ulama ke PPP (Partai Persatuan Pembangunan) maka NU secara organisatoris politik berhenti atau tidak lagi menjadi partai.

Meski peranan-peranan strategis Nahdlatul Ulama tersebut dapat dinikmati secara organisatoris dan politis di era 60-an dan awal 70-an, namun hal tersebut tidak terlalu lama. Peranan Nahdlatul Ulama, khususnya di bidang politik semakin lemah baik ditingkat lokal maupun ditingkat nasional apalagi pada periode-periode sesudahnya. Nahdlatul Ulama masuk pada babak baru, yaitu memasuki masa-masa krisis yang berkepanjangan. Hampir semua yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama selama bertahun-tahun hampir ditelan masa dalam sekejap.

Memang perlu kita sadari bahwa tidak semua hal yang dilakukan akan baik-baik saja, selalu ada hambatan yang dihadapi. Kemunduran partai Nahdlatul Ulama menggambarkan bahwa tidak ada jaminan partai Islam dapat mempertahankan pemilihnya, dan Islam akan relevan dengan kehidupan politik.

Menurut Guntoro, secara umum ada dua faktor yang menyebabkan partai Islam mengalami kemunduran, yang juga mungkin dihadapi oleh partai Nahdlatul Ulama. Kedua faktor tersebut adalah; pemahaman Islam di Indonesia selama ini lebih banyak dimaknai dalam artian ritual dibandingkan dengan pelibatan agama dalam semua dimensi kehidupan. Kedua, kemunduran dukungan terhadap partai Islam disebabkan perpecahan yang terjadi diantara umat Islam sendiri.

---

<sup>218</sup> Anggara, *Melati...*, hlm. 154.

Diakui atau tidak, disadari atau tidak, walau mengalami kemunduran secara politis, namun di satu sisi, secara kultural gerakan Nahdlatul Ulama di Lombok dan NTB umumnya selalu tetap berjalan, namun tanpa memakai bendera Nahdlatul Ulama. Hal ini terjadi karena beberapa faktor internal dan eksternal di tubuh Nahdlatul Ulama sendiri, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam lembaran-lembaran berikutnya.

# B A B V

## NAHDLATUL ULAMA VERSUS GERAKAN 30 SEPTEMBER/PKI

### A. Paham Komunisme dan Aksinya

ADALAH TIDAK DAPAT dipungkiri dalam sejarah bahwa Nahdlatul Ulama memiliki peran besar dalam terwujudnya kemerdekaan Indonesia, mempertahankan kemerdekaan, serta mengisi kemerdekaan tersebut dengan pembangunan di segala sektor kehidupan sosial, dan spiritual, terutama sampai saat ini perannya yang paling besar adalah, dalam mempertahankan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sampai saat ini.

Nahdlatul Ulama dalam sejarah bangsa Indonesia, tidak pernah melakukan pemberontakan yang menyebabkan tercabik-cabiknya NKRI, seperti yang dilakukan PKI dan antek-anteknya, DI/TII, Permesta, RMS, PRRI, GAM, dan lain sebagainya. Nahdlatul Ulama tetap berkomitmen dan konsisten berpandangan bahwa Indonesia setelah merdeka, atau setelah menjadi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, adalah sesuatu yang tidak boleh diganggu gugat lagi dan sudah final. Mengubahnya sama dengan menghancurkan NKRI yang susah payah diperjuangkan oleh seluruh anak bangsa Indonesia dari berbagai latar belakang agama, etnis suku, ras dan bahasa yang berbeda, dengan pengorbanan curahan pikiran, linangan air mata, benda harta, jiwa raga, dan berbagai pengorbanan lain sebagainya. Dengan prinsip ini Nahdlatul Ulama berkomitmen, siapapun orangnya, golongan manapun, atas nama apapun, dan dengan

cara apapun yang ingin mengubah dasar ideologi bangsa Indonesia tersebut, wajib dilawan dan ditumpas, dengan apapun.<sup>219</sup>

Sebelum terlalu jauh membicarakan tentang komunisme, perlu diketahui tentang Apa sih sebenarnya aspek-aspek perbedaan ajaran komunisme dengan Islam?. Berdasarkan putusan kongres PPI Masyumi ke VI dijelaskan sebagaimana berikut:<sup>220</sup>

Tabel  
Daftar Perbedaan ajaran Islam dan Komunisme.<sup>221</sup>

| Aspek-aspek Ajaran Komunisme   | Alasan Bertentangan Dengan Islam   |
|--|--|
| Komunisme adalah falsafah yang berdasarkan materialisme-historis (paham kebendaan berdasarkan sejarah) | Ajaran Islam menyatakan bahwa yang menjadikan dan memberikan segala sesuatu, baik berwujud kebendaan maupun kerohanian adalah Allah SWT. (QS. 45:22; 25:2; 20:50; 18:84; 4:78) |
| Komunisme memusuhi agama dan mengingkari adanya tuhan (atheisme)                                       | Ajaran Islam mengakui adanya Allah SWT dan mengakui agama-agama (QS. 2:28; 109:6; 10:99)   |
| Komunisme melenyapkan keluarga dan menjadikan wanita milik bersama                                     | Ajaran Islam memelihara dan mengatur serta menganggap suci ikatan keluarga dan perkawinan serta mengharamkan perzinahan (QS. 4:3, 17:32, 8:75, 47:22)                          |

<sup>219</sup> Tim PWNU Jawa Timur, *Sikap NU Dalam Bidang Kebangsaan: Aswaja An-Nahdliyah*, (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 7-12.

<sup>220</sup> Samsuri. *Komunisme Dalam Pergumulan Wacana Ideologi Komunisme*. Millah Vol 1, No 1 Agustus 2001 Tentang Keputusan Kongres P. P. I Masyumi ke VI.

<sup>221</sup> Daftar Perbedaan ajaran Islam dan Komunisme, Samsuri. *Komunisme Dalam Pergumulan Wacana Ideologi Komunisme*. Millah Vol 1, No 1 Agustus 2001.

|  |   |
|--|---|
| <p>Komunisme pada dasarnya melenyapkan hak milik perseorangan atas alat-alat produksi dan kekayaan</p> | <p>Ajaran Islam sebenarnya mengakui hak milik perseorangan atas alat-alat produksi dan kekayaan, asal diperoleh dengan cara yang halal. Atas hak milik ada batas kewajibannya serta dapat diatur dan dipimpin untuk kepentingan umum (QS. 13:26; 4: 31; 51:19; 2:219; 9:34 dan hadis nabi dihaji perpisahan (wada’) artinya: sesungguhnya darah kamu dan harta kamu haram diganggu sampai kamu menghadap tuhanmu, seperti sucinya hari dan bulan haji ini”)</p> |
| <p>Komunisme memperjuangkan dan melaksanakan cita-citanya dengan sistem diktator-proletar</p>          | <p>Ajaran Islam menganjurkan bermusyawarah, antara segala golongan rakyat (QS. 42:38; 3:159)</p>  |

Tabel di atas memberikan gambaran yang jelas betapa terdapat kesenjangan antara paham komunis dengan ajaran Islam itu sendiri. Polarisasi kehidupan Islam sangat menghargai dan menghormati perempuan, kaum komunis sebaliknya. Demikian juga komunisme sangat tidak meyakini akan adanya agama sementara Islam adalah agama menuntun umatnya kejalan yang diridhoi tuhan.

PKI atau Partai Komunis Indonesia, sebagai partai yang berideologi Marxisme Leninisme, atau Atheisme (Berfalsafah Anti Tuhan Dan Anti Agama), misalnya pernah mengadakan beberapa kali pemberontakan di Indonesia. *Pertama*, pada tahun 1948 atau tahun awal-awal kemerdekaan yang terkenal dengan nama MADIUN AFFAIR, dalam peristiwa pemberontakan ini banyak menelan korban bukan saja dari rakyat jelata, tetapi juga dari para santri dan ulama ketika itu. Setelah itu PKI bergerak dibawah tanah, kemudian PKI muncul kembali pada tahun 1950 dalam kehidupan politik di Indonesia dan ikut serta dalam pemilihan umum 1 tahun 1955.<sup>222</sup>

<sup>222</sup> Wayan Badrika, *Sejarah Nasional Indonesia dan Umum*, (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm. 98.

Daerah Madiun dan sekitarnya seperti Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Ngawi, Boyolali, Porwodadi, Bojonegoro, hingga Pati, terus melingkar sampai Magelang, merupakan basis pengembangan PKI. Madiun menjadi titik pusat yang disangga oleh daerah sekitar yang memiliki basis komunis yang sangat kuat. Dengan posisi strategis seperti itu maka ibukota negara dalam keadaan terancam, PKI bisa saja memberontak langsung dan menguasai ibukota sehingga mampu menguasai Indonesia dengan begitu cepat. Dengan kerja keras dan sistematis, maka memasuki tahun 1947 konsolidasi PKI sudah nyaris merata, kepengurusan partai sudah menjangkau daerah pedalaman sehingga berbagai manuver sudah mulai dilakukan.<sup>223</sup>

Perkembangan PKI sudah sangat meluas menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat dan alim ulama, terutama para kiai pimpinan pesantren serta pejabat setempat yang bukan komunis. Untuk melindungi dari tekanan komunis, maka para pimpinan Nahdlatul Ulama bermanuver untuk mencegah perluasan PKI, maka pada 24 Mei 1947 Nahdlatul Ulama menyelenggarakan Mukhtamar ke-17 di Kota Madiun, dan hampir semua pengurus Besar Nahdlatul Ulama hadir dalam Mukhtamar tersebut.<sup>224</sup>

PKI sadar betul bahwa Nahdlatul Ulama yang memiliki banyak pesantren yang merupakan kekuatan strategis dalam mempertahankan NKRI. Penculikan para kiyai pimpinan pesantren yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan telah dimulai, dan dianggap menghambat agenda PKI karena itu harus dimusnahkan. Sebagai contoh KH. Imam Mursyid pemimpin pesantren Sabilil Muttaqin, dan pemimpin tarekat Syathariyah yang kharismatik dari Takeran diculik pada 17 September 1948 seusai sembahyang Jum'at. Akhirnya kiyai menyerah, sebab kalau melawan diancam pesantrennya dihabisi.<sup>225</sup>

Sebelum pemilu tahun 1955, yaitu tepatnya bulan April 1955, diadakannya konferensi Bandung, para politikus mengerahkan seluruh tenaga untuk menghadapi pemilu, demikian juga pada fase ini, PKI benar-benar sudah menggarap dengan serius termasuk maksimalisasi peran media massa, yaitu harian rakyat yang dicetak meningkat tiga

---

<sup>223</sup> AbdulMuni'im DZ, *Benturan NU PKI 1948-1965*, (Depok: Langgar Swadaya Nusantara, 2013), hlm. 41.

<sup>224</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

<sup>225</sup> *ibid.*, hlm. 55-56.

kali lipat antara bulan februari 1954 (15.000 eksemplar), 1956 (55.0000 eksemplar) terbesar di antara media massa yang berafiliasi dengan PKI waktu itu. PKI adalah salah satu partai terkaya karena sumber dananya berasal dari iuran anggota dan sumber lainnya, dan sebagian besar uangnya mungkin berasal dari komunitas dagang cina yang memberikannya dengan senang hati atau karena tekanan dari kedutaan besar Cina.<sup>226</sup>

Peristiwa Madiun merupakan salah satu titik balik revolusi yang sangat penting. PKI tidak lagi menjadi ancaman bagi para pemimpin republik ini sampai pada tahun 1950-an, dan selamanya ternoda oleh pengkhianatannya terhadap Revolusi. Peristiwa Madiun menciptakan tradisi permusuhan tentara-PKI dan memperbesar pertentangan antara Masyumi dan PKI seperti halnya ketegangan antarmasyarakat terutama kalangan santri-abangan.<sup>227</sup>

Namun, PKI pada peristiwa ini dapat ditumpas habis dengan keikutsertaan Nahdlatul Ulama sehingga tidak meluas dan hanya terjadi di kota Madiun Jawa Timur saja. Pemberontakannya yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 yang sampai meluas ke seluruh daerah di negara Indonesia.

Meskipun pernah ditumpas pada tahun awal-awal kemerdekaan, PKI ternyata tidak menyerah untuk bangkit, terbukti ketika negara dalam kondisi labil di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan khususnya politik. PKI, secara mengejutkan menyatakan diri secara terbuka ikut pada pemilu pertama setelah kemerdekaan, tahun 1955. Dalam pemilu tersebut PKI dinyatakan keluar sebagai pemenang keempat sesudah PNI (Partai Nasional Indonesia) pimpinan Bung Karno, Masyumi (Majelis Syuro Muslimin), dan Nahdlatul Ulama. PKI berusaha masuk dalam pemerintahan (kabinet) dengan segala cara. Politik menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan adalah taktik yang lumrah bagi PKI. Namun tetap mendapat perlawanan dari partai politik lain yang tidak seideologi dengannya terutama partai Islam. Di samping itu juga, PKI terus berupaya menancapkan kuku pengaruhnya di tengah masyarakat dengan menyebarkan ideologinya selagi ada kesempatan.

---

<sup>226</sup> M.C.Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, (Jakarta: Serambi Ilmu, 1981), hlm. 517.

<sup>227</sup> *Ibid.* hlm. 482.



## B. NU Versus PKI di Lombok

PKI di Lombok dibentuk dan dipimpin oleh Muhammad Baisir, seorang keturunan Arab di Ampenan. Pengakuan Sahrul Lubis wartawan “Gelora” milik NU yang pindah kehariian “Pelita” mencari tahu lebih banyak tentang sepak terjang Muhammad Baisir yang dalam laporannya pada intinya mengatakan bahwa beliau merupakan tokoh kontroversial karena terjadi peristiwa pembunuhan politik atas diri Saleh Sungkar yang menjadi ketua DPRD Lombok, maka dengan kekecewaannya, Muhammad Baisir keluar dari Masyumi dan kemudian membentuk PKI. Pembunuhan yang berlatar belakang politis itu terjadi pada 11 Maret 1952. Saleh sungkar, salah satu pendiri Masyumi Lombok diculik dan dibunuh keji oleh lawan-lawan politiknya dalam partai sendiri dan anasir-anasir dari luar.<sup>228</sup> Namun tidak ada satupun pelaku yang diadili. Tragedi ini terjadi menyusul gagal panen yang terjadi di Lombok bagian selatan. Daerah tidak berhasil mengantisipasi bahaya kelaparan yang melanda, sehingga PKI di bawah pimpinan Lalu Japa dan kekuatan-kekuatan lainnya yang menggelar demonstrasi dan tidak percaya kepada pemerintah daerah dan para demonstiran menyuarakan aspirasinya melalui DPRD. Suasana seperti ini yang menjadikan PKI memiliki pengikut yang banyak

Berikut ini tentang bagaimana taktik PKI dalam mengambil simpati masyarakat pada waktu itu dapat dicontohkan sebagai berikut :

Suatu ketika ada seorang tokoh PKI di desa Penujak Lombok Tengah yang bernama Den Tuan Haji Abdurrahim, menghadiri pesta perkawinan saudara sepupu penulis di Karang Puntik Penujak Lombok Tengah. Ketika itu dia hadir di rumah mempeleai wanita, yang secara kebetulan waktu itu penulis duduk mendampinginya bersama tuan rumah. Tokoh PKI ini bercerita tentang Sayyidina Ali r.a. yang begitu peduli dengan rakyat miskin (Kaum Dhuafa’). Dia mengisahkan,

“Suatu ketika Sayyidina Ali r.a. melakukan perjalanan, dan di tengah perjalanannya tersebut beliau bertemu dengan seorang anak bocah yang sedang menangis terisak-isak. Beliau lalu bertanya kepada anak bocah tersebut, “Nak, mengapa kamu menangis ?”. Sang anak bocah menjawab, ”Saya menangis karena saya baru kali ini pergi ke pasar

---

<sup>228</sup> Zakaria, Fath, *Gerakan 30 September 1965 Rakyat NTB Melawan Bahaya Merah*, (Mataram: Sumurmas Mataram, 2001). hlm. 32.

disuruh orang tua saya untuk membeli minyak tanah, dan sewaktu saya pulang dari pasar tadi minyak tanah yang saya bawa tiba-tiba jatuh dan tumpah ke tanah. Saya khawatir orang tua saya marah gara-gara ini, sedangkan kondisi keluarga saya adalah orang miskin”. Sayyidina Ali r.a. lalu melihat bekas minyak itu di tanah dan memerasnya dengan tangannya sendiri ke dalam botol yang dibawa anak itu. Sebenarnya Sayyidina Ali itu orang komunis, karena beliau sangat peduli kepada orang miskin. Itulah sebenarnya komunis, ajarannya sangat peduli dengan orang miskin sebagaimana Sayyidina Ali r.a. praktikkan”,<sup>229</sup>

Itulah salah satu cara dan taktik PKI dalam menarik simpati masyarakat terutama masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Partai PKI dan Nahdlatul Ulama merupakan dua entitas yang antagonis. Namun, dalam permusuhannya tersebut tidak dilakukan secara terbuka. Sebab, PKI waktu itu adalah parpol legal, bahkan dilindungi oleh Negara. Sepak terjang atau gerakan PKI tetap diamati oleh Nahdlatul Ulama dari dalam dan di luar pemerintahan secara pelan-pelan. Ketika Bung Karno menyerdahanakan partai menjadi delapan buah, PKI dan Nahdlatul Ulama secara bersamaan tetap dapat selamat menjadi partai. Sementara partai Masyumi dan Murba tidak dapat bertahan dan dibubarkan oleh Bung Karno. Setelah itu kemudian Bung Karno membuat kebijakan yang terkenal dengan istilah “poros Nasakom” (Nasional, Agama dan Komunis) PNI, NU dan PKI adalah urat nadinya.

Poros Nasakom memiliki peran yang sama dalam pemerintahan semua tingkatan, sehingga menghasilkan suatu sistem yang antara lain didasarkan pada koalisi kekuatan-kekuatan politik yang berpusat di Jawa. Karena PNI dan Nahdlatul Ulama sudah terwakili, maka satu-satunya masalah serius yang ditimbulkan oleh Nasakom adalah dimasukkannya para menteri PKI ke dalam kabinet. Inilah yang tidak disetujui pihak militer.<sup>230</sup>

Upaya yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama adalah tetap beramar makruf nahi mungkar di dalam dan di luar pemerintahan. Pandangan Nahdlatul Ulama ialah jikalau Nahdlatul Ulama tidak ikut dalam pemerintahan, maka Islam akan menjadi bulan-bulanan PKI dan itu sangat disadari oleh Nahdlatul Ulama. Taktik inilah yang sering salah

---

<sup>229</sup> Wawancara dengan Den Tuan Haji Abdurrahim, di Penujak tanggal 29 Mei 1963.

<sup>230</sup> M.C.Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, (Jakarta Balai Pustaka, 1981), hlm. 556.

pahami oleh orang luar Nahdlatul Ulama, sehingga Nahdlatul Ulama sering disebut sebagai partai oportunistis, bunglon, dan lain sebagainya. Namun sebenarnya tidak demikian. Hal ini terjadi karena prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama dalam bermasyarakat dan bernegara yang sangat toleran dan moderat (*tasamuhdantawassuth*). Karena itulah, eksistensi Nahdlatul Ulama sampai sekarang ini masih terjaga. Berbeda dengan partai lain, misalnya Masyumi dan PSI (partai Sosialis Indonesia) yang mati ditelan sejarah.

Nahdlatul Ulama mengetahui gelagat busuk PKI sejak ia memberontak 1948, bahkan sejak kemunculannya di Indonesia. PKI, baru muncul di Lombok dan sekitarnya pada tahun 1952 atau saat Nahdlatul Ulama sudah mandiri menjadi partai. PKI dengan cepat bergerak dan menyebarkan sayapnya sampai ke pelosok desa. Orang-orang desa dibucui oleh mereka dengan berbagai cara. Antara lain dengan mengatakan bahwa PKI adalah perpanjangan kata dari “Partai Kiyai Indonesia”, dan BTI adalah “Barisan Tani Islam” padahal yang sebenarnya “Barisan Tani Indonesia”. Karena itu banyak kiyai waktu itu khususnya Kyai watu telu<sup>231</sup> yang masuk PKI, karena ketidaktahuan mereka tentang apa dan siapa serta bagaimana sebenarnya PKI itu. Tokoh PKI bernama Muhammad Baisir, orang Arab dari Ampenan sebenarnya adalah tokoh Masyumi, namun ia kecewa dengan Masyumi karena dipimpin oleh Saleh Sungkar, ia kemudian keluar dari Masyumi dan mendirikan PKI di Lombok bersama Muslimin Yasin dari Sumbawa tahun 1952.

Seorang tokoh Nahdlatul Ulama asal Pagutan, Bapak H. Fathurrahman Zakaria bercerita dalam bukunya *Geger Gerakan 30 September 1965* menjelaskan tentang tingkah polah PKI yang menipu murid TGH. Naim Batukute, yang bernama Amaq Aminullah dari Lembah Sempage Narmada Lombok Barat. Amaq Aminullah bercerita:

“Kejadiannya tahun 1954, mereka datang ke masyarakat menjelaskan BTI itu Barisan tani Islam. Tetapi dua bulan kemudian datang Tuan guru Haji Naim dari Batukute Narmada yang mengatakan bahwa kami ditipu oleh mereka. Kami langsung masuk Partai NU mengikuti

---

<sup>231</sup> Kyai watu telu adalah istilah yang disebutkan untuk orang yang memiliki otoritas keagamaan dalam kelompok masyarakat Islam Lombok tertentu yang masih berpaham bahwa pengamalan syari'at agama bisa diwakili oleh Kyainya tersebut.

Tuan Guru. Kemudian saya cari Pak Baisir ke rumahnya di Ampenan agar jangan kami dicatat jadi anggota BTI<sup>232</sup>.

Karena itu PKI dapat berkembang di mana-mana dengan cepat. PKI hampir masuk di semua sektor kehidupan. Para petani dengan BTI nya, para buruh dengan SOBSI nya, seniman dengan LEKRA nya, mahasiswa dengan CGMI nya, para pelajar dan lain sebagainya. Kalau hal ini dibiarkan terus dan tidak ada upaya dari Partai Islam dan kelompok Islamnya lainnya, maka cepat atau lambat para ulama dan para tokoh Islam lainnya akan menjadi sasaran empuk keganasan PKI. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh mereka pada peristiwa Madiun 1948.

Melihat hal tersebut Nahdlatul Ulama sebagai satu-satunya kekuatan terbesar umat Islam di Indonsia, harus tampil paling depan dalam membendung pengaruh PKI yang mengancam eksestensi Islam di Indonesia. Nahdlatul Ulama selanjutnya menandingi kekuatan PKI itu. Nahdlatul Ulama kemudian membentuk Gerakan Pemuda Anshor, IPNU, dan IPPNU untuk pelajar, PMII untuk mahasiswa, Fatayat untuk remaja putri, Muslimat bagi kaum ibu, PERTANU bagi petani, SARBUMUSI untuk buruh, PERGUNU untuk pendidik, dan LESBUMI untuk para seniman, dan lain sebagainya.

Para tuan guru dan para jama`ah Nahdlatul Ulama berjuang mendirikan madrasah-madrasah dan ponpes di tempat mereka masing-masing. Masing-masing melakukan amar makruf nahi mungkar tanpa kenal lelah melalui dakwah atau pengajian majelis taklim sampai ke pelosok desa di pulau Lombok dan di Sumbawa. Semua hal tersebut dilakukan semata-mata mengharap ridho Allah SWT demi kejayaan Islam atau *'Izzil Islam Wal Muslimin'* ala paham Ahlussunnah Waljam`ah di Bumi Nusantara. Usaha itu kemudian membuahkan hasil di belakang hari. Maka bermunculanlah madrasah-madrasah dan ponpes Nahdlatul Ulama di berbagai tempat di Lombok maupun NTB umumnya, antara lain di Bengkel, Kediri, Praya, Pancor, Masbagik, Wanasaba, Penujak, Batujai, Darek, Bagu, Bageknyake, Pagutan, Dasan Agung, Sumbawa, Dompu, Bima dan lain sebagainya. Semua lembaga yang tersebar tersebut bernaung di bawah naungan bendera Nahdlatul Ulama. Lembaga-lembaga inilah, sebenarnya yang memperkuat posisi Nahdlatul Ulama

---

<sup>232</sup> Fathurrahman. *Geger...*, hlm. 36.

dan eksistensinya sampai saat ini. Jika tidak ada lembaga-lembaga ini, maka Nahdlatul Ulama sesungguhnya tidak akan mempunyai arti apa-apa, bahan mati konyol. *Na'udzu Billahi Min Dzalik*.

Melalui lembaga inilah, Nahdlatul Ulama menelorkan kader-kader militan yang banyak, yang pada selanjutnya menjadi generasi penerus perjuangan Nahdlatul Ulama dan merekalah yang memegang tampuk kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Inilah yang menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan yang cukup disegani oleh kawan dan lawan, termasuk oleh PKI.

PKI tidak begitu saja tinggal diam. Sebagai ideologi politik yang ingin berkuasa tentu berupaya melakukan apa saja demi ideologinya itu menang, hatta dengan cara-cara keji dan anarkis sekalipun, termasuk dengan melakukan revolusi radikal.

Dalam kasus pembubaran DPR hasil pemilu 1955, terjadi persilangan pendapat antara Rais 'Am-nya dan Sekretarisnya, KH. Abdul Wahab Hasbullah dan KH. Bisri Sansuri. Tidak sah membubarkan DPR hasil pilihan rakyat, haram untuk ikut dalam DPR-GR yang dibentuk secara tunjuk sebagai penggantinya, karena hak-hak partai lain dihilangkan. Misalnya saja Masyumi dihilangkan haknya, rakyat mencoblos partai berlambang bulan bintang tahun 1955, dan rakyat diingkari amanah wakilnya secara umum bahkan menghilangkan hak orang Islam, dan ini berarti pencurian terhadap hak orang Islam atas pengambilan hak secara tidak sah. Begitulah pendapat KH. Bisri Sansuri saat perdebatan di sidang syuriah waktu itu.<sup>233</sup>

Memang diakui bahwa perdebatan memang sangat panas, namun perbedaan pendapat tidak menjadi persoalan untuk perpecahan, sebagaimana tanggapan dari KH. Abdul Wahab Hasbulloh terhadap pandangan KH. Bisri Sansuri bahwa *sampeyan* atau anda seenaknya saja membuat keputusan hukum agama, terlalu murah. Tidak memperkuat keyakinan agama, nanti orang terbiasa memudahkan ajaran agama. Bagaimana jadinya kalau umat sudah begitu.<sup>234</sup> Kiai Bisri Sansuri tetap pada pendiriannya, demikian juga KH. Abdul Wahab Hasbulloh. Nahdlatul Ulama mempersilahkan yang setuju untuk menerima keanggotaan DPR-GR dan yang bersikeras dipersilakan menolak.

---

<sup>233</sup> Wahid Abdurrahman, *Kiai Nyentrik Membela Pemerintah*, (Yogyakarta: LKiS, 1997), hlm. 17.

<sup>234</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

Memasuki tahun 1960 setelah MANIPOL (Manisto Politik) ditetapkan sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara, maka dengan penetapan Presiden RI (Pinpres RI) no. 6 tahun 1965 dibentuklah DPR dan DPRD yang baru dengan sebutan DPR dan DPRD Peralihan, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten. DPR dan DPRD yang sedang berfungsi, dirombak total karena keluarnya para anggota DPR dan DPRD yang berasal dari Masyumi. Karena pada waktu itu, Masyumi sudah dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Susunan anggotanya terdiri dari anggota-anggota yang menerima kebijakan pemerintah yang disebut Manipol dengan dimasukkannya wakil-wakil golongan fungsional kekarya-an dan ABRI. Ketua DPRD dirangkap oleh Kepala Daerah (Gubernur) sedangkan wakil ketua dipilih dari anggota dewan yang ada.

Dengan komposisi yang baru tersebut maka dapat dipahami kemudian maka unsur-unsur golongan fungsional, seperti buruh, tani, nelayan, dan lain-lain dapat diisi oleh PKI. DPRD Peralihan ini kemudian disebut DPRD Gotong Royong atau DPRD-GR seperti halnya DPR-GR untuk tingkat pusat. Pembentukan DPR-GR dan DPRD-GR yang dilakukan berdasarkan peraturan presiden pada waktu itu sebenarnya jelas-jelas melanggar UUD 1945, karena Presiden waktu itu telah membubarkan Perlemen karena tidak mampu menyusun Undang Undang yang baru, yang selanjutnya kemudian keluar Dekrit Presiden 5 juli 1959 yang inti pokoknya berisi kembali ke UUD 1945. Nah, dalam UUD 1945 secara jelas tidak ada istilah DPR-GR atau DPRD-GR itu. Namun, itulah yang terjadi dalam kenyataannya. PKI, semakin menunjukkan gigi taringnya dan berupaya masuk dalam lembaga terhormat itu. Tokoh-tokoh PKI, seperti Muslimin Yasin, Muh. Husen asal Penujak, Lalu Brathayuda aktif di Front Nasional tingkat propinsi dan berupaya memasukkan tokohnya yang lain juga di tingkat kabupaten apalagi mereka didukung dengan mendapat gaji dari partainya sendiri. Mereka menyebarkan ideologinya di kalangan birokrat, lembaga-lembaga strategis atau tempat-tempat vital publik, seperti pasar, terminal bus, pelabuhan, perusahaan-perusahaan swasta dan lain sebagainya. Tanpa disadari oleh partai-partai lain, ternyata PKI sudah masuk di semua sektor kehidupan di NTB. Di semua sektor itu, PKI dengan leluasa membentuk jaringan-jaringannya yang sangat kuat. Sel-sel PKI menyebar di dalamnya. Ada para pekerja yang masuk secara langsung dan secara sadar menjadi kadernya dan ada juga yang

dimasukkan secara tidak langsung tanpa diketahui oleh orangnya sendiri.

Cara-cara yang dilakukan PKI tersebut tentu mengundang kebencian, antipati partai-partai lain, khususnya Nahdlatul Ulama. Kebencian Nahdlatul Ulama semakin memuncak, ketika PKI melancarkan aksi-aksinya dengan cara kasar dan radikal di tahun 1964. PKI melancarkan gerakan yang terkenal dengan “Aksi Sepihak“. Aksi ini adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kader-kader PKI, terutama kader petani PKI dalam kelompok BTI (Barisan Tani Indonesia). Mereka secara sepihak memaksa pembagian tanah dan hasil-hasil pertanian kepada petani-petani di berbagai desa terlebih di Jawa. Dengan aksi sepihak ini nampaknya PKI ingin supaya kaum tani yang banyak tertindas itu bersimpati kepada mereka. PKI beranggapan bahwa harta benda itu harus dibagi rata, harta itu milik bersama, tidak ada milik pribadi atau perorangan. Kalau pun ada yang punya harta atau tanah banyak secara pribadi maka orang tersebut tidak boleh memiliki harta melebihi ketentuan yang ditentukan oleh negara. Kalau ada yang lebih dari ketentuan itu, maka negara berhak mengambil alih walaupun dengan tindakan cara kekerasan sekalipun. Istilah sama rata sama rasa itu harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. PKI kemudian melancarkan serangan-serangan opsifnya dengan jargon-jargon seperti;

*Tanah untuk petani ...*

*Tanah bukan untuk mereka yang hidup ongkang-ongkangan ...*

*Petani tidak boleh jadi kuda tunggangan terus ...*

*Ganyang tujuh setan desa ...*

*Peraturan bagi hasil harus ditegakkan ...*

*Yang tidak melindungi petani penggarap adalah kontra revolusi ...*

Sementara itu, kondisi ekonomi, sosial, dan politik semakin bertambah kacau. Sikap pemerintah yang belum berani mengambil keputusan untuk membubarkan PKI, ditambah dengan situasi politik, ekonomi dan keamanan yang semakin bertambah kacau. Mengakibatkan kemarahan rakyat yang tidak dapat terbendung lagi. Dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), yang dibentuk tanggal 25 Oktober 1965 dan juga didukung oleh berbagai



aksi yang lainnya seperti KAPPI, KAPI, KASI, KAWI, KABI, dan lain sebagainya. Mahasiswa dan rakyat bergerak mengadakan demonstrasi, gerakan ini mendapat dukungan dari ABRI.

Dukungan dari berbagai pihak di atas mendesak pemerintah untuk memenuhi seluruh tuntutan. Aksi seperti itu tidak hanya terjadi di Jakarta tetapi terjadi juga di luar Jakarta. Para demonstran mengajukan tiga tuntutan yang terkenal dengan sebutan TRITURA (tiga tuntutan rakyat), meliputi sebagai berikut:

1. Pembubaran PKI.
2. Pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI.
3. Penurunan harga-harga (perbaiki ekonomi).<sup>235</sup>

Aksi sepihak PKI ini bukan saja dilakukan di Jawa, tetapi juga di luar Jawa. Termasuk misalnya, dengan adanya program pelaksanaan LANDREFORM sebagai amanat Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 dengan semua aturan pelaksanaannya.

Program pelaksanaan landreform ini telah menjadi isu sentral dan menjadi ladang yang subur bagi PKI di Lombok dan sekitarnya. Sebab penguasaan tanah masih banyak dikuasai oleh tuan tanah tanpa batas. Setiap tuan tanah tersebut memiliki tanah, tidak hanya puluhan hektar, tetapi ratusan hektar. Tuan tanah di Lombok yang berasal dari Suku Sasak seperti Muhammad Nur Gomong sampai memiliki 150 hektar, dan dari suku Bali seperti Ide Komang Djuwet memiliki 200 hektar lebih, Ide Bambang memiliki 150 hektar lebih, dan lain sebagainya.

Sebagaimana kondisi di Jawa, PKI di Lombok dan sekitarnya juga melakukan aksi-aksinya dengan para tokohnya, seperti, Surita di Narmada. Namun aksi mereka berhasil dihadang oleh beberapa tokoh, diantaranya tokoh PNI, seperti Kusnahr dan Kender Ali, dan tokoh partai Nahdlatul Ulama, seperti Muridan dan Muhammad Darwan. Demikian juga di beberapa tempat lain di daerah Lombok. Bahkan, Nahdlatul Ulama melakukan gerakannya secara organisatoris melalui Pertanunya, dengan langkah pertama meminta fatwa kepada Rois Syuriah partai Nahdlatul Ulama wilayah NTB, TGH. Muhammad Shaleh Hambali tentang *landreform* tersebut. Isi fatwa beliau antara lain bahwa *landreform* yang dipahami PKI selama ini bertentangan dengan

---

<sup>235</sup> Fathurrahman, *geger...*, hlm. 111.



Islam. Islam mengakui harta pribadi, sesuai dengan al Qur'an Surat ke-4: ayat 32, Surat ke-5: ayat 38, dan surat 59: ayat 7. Beliau mengatakan;

“Saya minta, bahwa Pertanu sebaiknya memperjuangkan agar menggerakkan pembukaan tanah-tanah baru di Lombok maupun di sumbawa, karena tanah masih luas. Pemerintah harus membangun dam dan bendungan banyak-banyak, supaya rakyat bisa dipindahkan dan membuka tanah baru. Ini juga namanya landreform. Jika para penggarap tanah telah mendapat tanah baru, siapa yang akan menggarap tanah milik tuan-tuan tanah? Demikian pula yang berusaha memiliki tanah absentase atau tanah yang digadaikan, adalah tindakan perampasan hak orang lain. Tentang perampasan, maka itu adalah tindakan dan perbuatan yang diharamkan. Terkutuklah barangsiapa yang melakukannya. Sabda Rasulullah SAW yang termaktub dalam Musnad Imam Ahmad: “Barangsiapa merampas sebidang tanah (milik orang lain) maka (kelak di hari kiamat) akan dikalungkan kepadanya tujuh lapis bumi dari tanah yang dirampasnya itu”. Jadi sekali lagi orang Pertanu jangan berbuat dosa”.<sup>236</sup>

Itulah fatwa beliau. Oleh sebab itu pimpinan dan pengurus Pertanu, dalam hal ini antara lain Mukhlis Ar, Muhammad Asmak, dan M. Mahyun serta para anggotanya harus tunduk kepada fatwa tersebut dan sedapat mungkin menjalankan dan mengamankannya. Jangan sampai termakan dan terperangkap dalam tindakan aksi brutal BTI. Dengan demikian PKI tidak dapat melakukan politik kotornya dengan semena-mena.

Kampanye pertentangan kelas dilancarkan di mana-mana. Kaum tani diadu dengan tuan tanah. Kaum tani harus berani berhadapan dengan apa yang disebut oleh mereka dengan “tujuh setan desa”. PKI melakukan berbagai demonstrasi, rapat umum, dan pawai menghujat para Bupati dan menuntut mereka mengundurkan diri karena tidak mampu melaksanakan landreform, bahkan aparat pemerintah tersebut selalu memihak kepada tujuh setan desa.

Secara serentak PKI mengkursuskan kadernya untuk dapat secara proaktif melaksanakan program *landreform*. Pada tanggal 1 Mei 1961 bertepatan dengan hari buruh sedunia, PKI Nusa Tenggara Barat mengeluarkan pernyataan, menuntut agar *landreform* dilaksanakan

---

<sup>236</sup> Fatwa TGH. Muhammad Shaleh Hambali Bengkel dikeluarkan pada saat berkejadiannya aksi PKI di Lombok, tahun 1963.

sekarang juga didaerah ini. Partai diluar PKI sangat hati-hati mengambil sikap terhadap pelaksanaan landreform. Seperti fatwa TGH. M. Shaleh Hambali Bengkel<sup>237</sup> yang menolak pelaksanaan landreform yang bunyinya sebagai berikut;

“Bahwa Islam menegakkan keadilan atas tiga asas pokok yaitu kebebasan jiwa yang mutlak, persamaan kemanusiaan yang sempurna, dan jaminan sosial yang adil. Terhadap asas yang ketiga itu, Islam memberikan petunjuk bahwa jalan-jalan untuk mendapatkan harta permulaan yang diakui sah adalah, berburu, membuka tanah baru, mengeluarkan hasil-hasil tambang, memburuh, atau bekerja menjual jasa dan membagikan infaq, zakat, dan shodaqoh. Selain itu harta permulaan juga diperoleh dari distribusi rampasan perang, untuk memperoleh harta lanjutan maka Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Untuk mewujudkan niat busuknya mereka meritul para Bupati, dengan menggalang kekuatan melalui Front Nasional setempat. Sementara dalam menghadapi aksi-aksi ini parpol-parpol telah terpolarisasi, sebagian ada yang mendukung dan sebagian besarnya menentang keras ajakan itu. Namun demikian, pernyataan bersama parpol-parpol yang ada di empat daerah berhasil dikeluarkan, yaitu dengan meritul Bupati Lombok Barat Lalu Anggrat B.A. tanggal 21 Juli 1964, Bupati Lombok Tengah Sanusi, tanggal 11 Agustus 1964, Bupati Sumbawa Madelau ADT, tanggal 18 Agustus 1964, dan Bupati Bima Putera Kahir tanggal 15 september 1964. Dengan keluarnya pernyataan bersama tersebut, maka sebagian parpol telah terjadi aksi pecat-mecat anggotanya yang ikut menanda tangani pernyataan bersama tanpa sepengetahuan dan ijin partainya. Maka dengan adanya rituling tersebut selanjutnya diganti dengan pejabat baru sebagai Bupati. Drs. Muhammad Said sebagai Bupati Lobar, Drs. Lalu Srigede sebagai Bupati Loteng, dan Abidin Ishak sebagai Bupati Bima. Sedangkan Bupati Dompu H. Abdurrahman Mahmud dan Bupati Lotim Lalu Muslihin, tidak kena rituling. Sebab kalau diritul, maka PKI kemungkinan besar akan berhadapan dengan partai NU. Oleh karena keberhasilannya itu nampaknya PKI berbangga diri, dia sudah merasa berada di atas angin. PKI sudah mampu memecah belah parpol-parpol yang ada sehingga seolah-olah ada yang memihak kepada mereka. Masing-masing partai

---

<sup>237</sup> Zakaria, *Geger...*, hlm. 48.

sudah terpecah-belah. Kalau sudah pecah-belah maka PKI dengan mudah menguasai Medan. Apalagi waktu itu PKI mempunyai media massa yang terkenal Harian rakyat (Koran nasional), dan Pioner (lokal). Sementara PNI mempunyai Koran Bara. Antara dua harian ini saling berseteru.

Dalam memperkuat posisi Nahdlatul Ulama dalam perpolitikan nasional dan lokal serta dalam mengemban dan mengembangkan dakwah Islamiyah ala Aswaja, Nahdlatul Ulama memiliki media cetak tingkat nasional yang bernama “Duta Masyarakat” yang dipimpin oleh KH. Saifuddin Zuhri dan Mahbub Junaidi. Sementara untuk lokal di Lombok dan NTB umumnya Nahdlatul Ulama menerbitkan harian “Gelora” yang dipimpin oleh H. Hamzah Karim, Fathurrahman Zakaria dan H. Anwar Monjok. Masyumi juga mempunyai koran nasional Abadi dan local bernama “Berjuang”. Namun yang terakhir ini tidak terbit lagi waktu itu setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan dengan bubarnya Masyumi sendiri.

Sebagai organ partai yang berbeda haluannya maka ketiga koran ini seringkali terlibat dalam polemik tentang berbagai masalah nasional dan daerah.

Harian “Gelora” sebagai organ Nahdlatul Ulama misalnya seringkali dengan gigih membela masyarakat non komunis, pada saat Sekolah Menengah Nasional Mataram diambil alih dan dikuasi oleh PKI dengan melalui “Yayasan Panca Cinta”. Padahal sekolah tersebut didirikan dan dibiayai oleh masyarakat luas di bawah Yayasan Pendidikan Nasional. Demikian berita-berita lain dalam mengutuk aksi sepihak PKI. Misalnya aksi sepihak dalam menduduki tanah kawasan Sekip Ampenan, perambahan hutan Sesaot, Narmada, Pelambik Lombok Tengah, menjarah perkebunan kopi HGU Monggal Lombok Barat dan perkebunan kelapa HGU Sugian Lombok Timur, yang akhirnya kawasan-kawasan seperti Sekip Ampenan, kawasan Monggal, dan Sugian diambil alih oleh PKI dan diawasi pihak kepolisian dan oleh Korem 162 Wirabhakti.

Gelagat PKI untuk berupaya memberontak kembali, semakin kelihatan mencolok ketika PKI mengadakan perayaan HUT PKI ke-45 secara nasional, termasuk di Mataram. Tentu maksudnya untuk membakar semangat atau emosi massa dan untuk unjuk kekuatan.

PKI sudah memiliki kekuatan, telah dapat masuk ke semua sektor kehidupan, termasuk dalam Kabinet, menguasai AU, AL, RRI, dan lain sebagainya. Pemerintah waktu itu, sesungguhnya memang tidak berkiblat ke negara Amerika, tetapi berkiblat ke Moskow Rusia dan Peking Cina. Sebab, ada kekuatan besar di dunia waktu itu yang saling berhadapan, yaitu pertama komunis yang berpusat di Moskow dan Peking, dan yang kedua komunis yang berpusat di Amerika. Pertama beraliran sosialis dan yang kedua kapitalis.

Ketika PKI mempunyai nyanyian “genjer-genjer” yang artinya gencet Jendral, maka Nahdlatul Ulama mempunyai “Sholawat Badar” yang dikumandangkan di mana-mana oleh warga Nahdliyyin dan simpatisannya sampai sekarang. Pertama kali sholawat badar ini dikumandangkan di Lombok, adalah saat datangnya dan dibawa kali pertama oleh KH. `Ali Ma`shum Lasem Krapyak Yogyakarta (Rois `Aam PBNU 1981-1997), dan diperdengarkan di Ponpes Darul Qur`an Bengkel pimpinan TGH. M. Shaleh Hambali, kemudian menyebar ke seluruh pelosok di daerah Lombok dan NTB umumnya. Sholawat Badar sampai sekarang tetap menjadi amalan atau wiridan warga Nahdliyyin, dan juga tetap dikumandangkan di even-even resmi Nahdlatul Ulama, misalnya pada saat munas, muktamar, konferensi, pelatihan kader, di pengajian majelis taklim dan lain sebagainya.

Sholawat ini menggugah kesadaran spiritual warga Nahdlatul Ulama untuk berjihad *fi sabilillah* sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi saw dan para sahabatnya dalam perang Badar melawan kaum kafir Quraisy. Jihad ini tidak semata-mata dalam arti perang fisik yang lebih menonjolkan kekerasan, tetapi juga yang terpenting adalah ruh atau semangat jihadnya untuk membasmi sifat-sifat tercela yang membahayakan bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Dalam konteks pribadi dan sosial, biasanya disebut perang melawan hawa nafsu (Jihad Akbar) sebagaimana yang tersebut dalam hadits Nabi saw. Kalau hawa nafsu ini sudah menguasai manusia, maka sifat ingin menang sendiri, benar sendiri, dan cenderung anarkis seperti yang dipraktikkan PKI akan muncul. Sebab berbuat kekerasan kepada orang atau golongan lain akan mengundang perbuatan yang sama dari orang atau golongan lain. Memang jihad dalam arti fisik ada dalam ajaran Islam, tetapi penerapannya mempunyai sebab-sebab dan syarat-syarat khusus, dan tidak mudah untuk dilakukan.

Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam ala Aswaja memiliki prinsip-prinsip tersendiri sebagaimana yang tertera di awal tulisan ini, yaitu sikap moderat dan toleran. Kedua sikap ini tetap harus lebih diutamakan dalam tata pergaulan sehari-hari, bermasyarakat dan bernegara. Tetapi jika hak-hak warga Nahdliyin dan umat Islam sudah terinjak-injak seperti, hak perlindungan agama, harta, darah, keturunan dan kehormatan diri, termasuk juga akal, serta pendiskriminasian hak-hak tersebut sudah mencapai titik klimaksnya dan tidak ada upaya damai, maka membela yang hak yang lima tersebut dengan jihad fisik sudah memenuhi syarat dan dibenarkan syara'. Mati membela hak yang lima tersebut adalah termasuk kategori mati Syahid.

Begitu kuatnya pengaruh ajaran komunis pada anggota PKI, maka pada setiap acara nasional dan lokal misalnya, mereka tak lupa memajang gambar tokoh-tokoh komunis internasional dalam ukuran besar dipampangkan di tempat-tempat strategis. Pada acara puncak HUT PKI 23 Mei 1965 diselenggarakan rapat raksasa yang dihadiri oleh 70.000 lebih massa PKI dari seluruh Lombok dan dikonsentrasikan di lapangan Malomba Ampenan. Ketika itu wartawan Gelora (NU) Fathurrahman Zakaria menyaksikan dan mendengarkan slogan-slogan yang isinya sangat menyeramkan, di mana isinya berbunyi:

*Laksanakan Manipol dan Dekon secara konsekuen ... !*

*Sekarang juga bentuk angkatan ke V... !*

*Persenjatai Buruh dan Tani untuk melawan Nekolim... !*

*Hancurkan manipolis gadungan ... !*

*Hancurkan tujuh setan desa dan tiga setan kota ... !*

Dipa Nusantara Aidit sebagai tokoh sentral PKI memberikan komando kepada seluruh mahasiswa PKI CGMI (Central Gerakan Mahasiswa Indonesia).

*... Mahasiswa komunis harus berani berpikir dan berani berbuat ... Jika mahasiswa komunis tidak bisa membubarkan HMI, lebih baik mahasiswa komunis memakai sarung seperti mereka ...<sup>238</sup>*

---

<sup>238</sup> *Harian Rakyat*, 24 Mei 1965.

Sehubungan dengan komando Aidit itu, PMII dan HMI cabang Mataram tidak tinggal diam. Mereka memburu anggota-anggota CGMI yang perilakunya sok revolusioner, bahkan HMI memancing-mancing, apakah CGMI akan taat dan patuh melaksanakan komando pemimpinnya, Karena itu banyak terjadi insiden antara kedua ormas mahasiswa itu.

Memang ada usaha dari PKI ingin membubarkan HMI lewat lobi mereka di kabinet dan hampir Presiden terpengaruh. Tetapi berkat ketegasan Menteri Agama, KH. Saifuddin Zuhri (NU) di kabinet waktu itu yang mengatakan bahwa kalau HMI dibubarkan, maka beliau bersiap untuk mengundurkan diri dari kabinet demi *Ukhuwah Islamiyah*. Ternyata HMI tidak jadi dibubarkan.

Menyikapi HUT PKI ke 45 itu, harian Gelora (milik NU) menurunkan tajuk rencana yang membuat berang pimpinan PKI NTB, yang isinya mengarah kepada sindiran bahwa PKI cepat atau lambat akan mengadakan pemberontakan sebagaimana yang dilakukan tahun 1948. "Jika benar PKI melakukan itu, maka PKI telah salah membuat perhitungan. Kekuatan-kekuatan Pancasila sejadi akan mengahadapinya". Dari Tajuk rencana Gelora itu, tokoh Pemuda Rakyat, Karim Halim datang ke kantor Gelora di jalan Pejanggik No. 2 Mataram dengan gelagat yang tidak baik menemui karyawan Gelora H. Muh. Anwar Monjok (beliau terakhir menjabat sebagai Wakil Rois Syuriah PWNU NTB sebelum meninggal dunia). Namun H. Muh. Anwar Monjok langsung mengahadapinya dengan engkol Inggris saat itu. Kemudian soal tajuk rencana itu melebar menjadi urusan GP. Ansor dengan Pemuda Rakyat. Visi dan perhitungan harian ini kemudian disosialisasikan ke kalangan luas GP Ansor. Pengurus Wilayah GP Ansor telah mengadakan safari ke cabang-cabang dan anak cabang GP Ansor di Lombok. Antara lain Bapak Fathurrahman Zakaria bersama rombongan datang bersafari ke Praya di Ponpes Manhulul Ulum pimpinan TGH. Lalu Muhammad Faisal untuk pertama kalinya. Dalam pertemuan dengan para Pengurus GP. Ansor itu dijelaskan bahwa menurut ajaran komunis internasional yang dianut PKI, cepat atau lambat PKI itu pasti akan melakukan kudeta untuk menegakkan kekuasaan kaum proletariat di Indonesia. Oleh sebab itu, GP Ansor harus bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan itu. GP. Ansor NTB dengan pasukan Banser (Barisan Ansor Serba Guna), yang merupakan pasukan inti GP. Ansor kemudian

mengadakan pelatihan-pelatihan fisik semi militer, pelatihan mental spiritual dan pengkaderan terus-menerus di tingkat wilayah maupun cabang, termasuk memperkuatnya dengan aksi *drumband* yang waktu itu sangat terkenal Sunaryo dan Subardan sebagai mayoretinya. Antara lain kegiatannya dengan memberi suatu pelatihan yang kemudian dibina oleh KH. Ahmad Usman pada tahun 1966 yang diikuti oleh seluruh pasukan Banser yang ada di cabang-cabang di seluruh kepengurusan wilayah NTB. Lokasi pengkaderannya waktu itu bertempat di Gedung PMD (Pembangunan Masyarakat Desa), tepatnya sekarang di jalan. Pendidikan sebelah Barat gedung Universitas Mataram.

Dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang ada dan setelah melihat secara cermat gelagat PKI dan antek-anteknya baik secara nasional maupun lokal, maka tokoh-tokoh Islam tingkat Nasional di Jakarta merapatkan barisannya, maka pada tanggal 12 Maret 1965, Nahdlatul Ulama bersama Muhammadiyah, Al Washliyah, dan GASBIINDO (Gerakan Serikat Buruh Islam Indonesia) serta Syarikat Islam, menggalang persatuan dan mengeluarkan pernyataan bersama sebagai berikut:

*...Menegaskan bahwa setiap perongrongan terhadap segolongan atau sebagian umat Islam, dianggap sebagai perongrongan terhadap umat Islam secara keseluruhan dan karenanya harus dihadapi secara konsekuen dengan persatuan Islam yang bulat ...*

Walaupun begitu, PKI tetap saja berupaya memperkokoh barisannya, bahkan semakin nekad dan buas, karena mereka merasa posisinya gerakannya di atas angin, apalagi waktu pemerintah masih belum menyatakan sikap secara jelas dan tegas terhadap perilaku politik PKI yang secara nyata membahayakan Negara. PKI, bahkan pada bulan Juli dan Agustus 1965 dengan melibatkan CGMI (Central Generasi Mahasiswa Indonesia) dan pemuda Rakyat mengadakan latihan di Lubang Buaya Jakarta. PBNU dalam hal ini, oleh salah satu ketuanya KH. M. Subhan ZE, yang sudah sejak lama menggalang persatuan di kalangan para pemuda Islam, seperti PMII, HMI, KAMI, Pemuda Ansor, Muhammadiyah dan lain sebagainya segera mengadakan kontak dengan kekuatan pemuda lainnya, termasuk dari kalangan partai atau ormas Khatolik dan Kristen, terutama PMKRI, konsolidasi ini dilakukan untuk mengimbangi latihan kemiliteran yang dilakukan PKI, Subhan merencanakan pelatihan yang sama dengan melibatkan TNI AD.



Di Lombok juga tak lupa melakukan hal serupa, dengan memepersatukan generasi muda Islam yang ada dalam satu forum bersama, yang dinamakan GEMUIS (Generasi Muda Islam) dengan melibatkan semua ormas Islam yang terdiri dari barisan kelompok NU, PSII, PERTI, dan Muhammadiyah serta organisasi kemahasiswaan atau kepemudaan Islam seperti HMI, PMII, dan lain sebagainya. Dalam pertemuannya di rumah Fathurrahman Zakaria sebagai inisiator dalam kapasitasnya sebagai salah seorang ketua PW Ansor NTB, lahirlah “Deklarasi Mataram” yang berisi:

1. Kebulatan tekad untuk berjihad memerangi PKI habis-habisan.
2. Membentuk forum kerjasama generasi muda Islam dengan nama Forum “GEMUIS” (Generasi Muda Islam) NTB Nusa Tenggara Barat.
3. Forum ini kemudian dipimpin sebuah presidium yang beranggotakan lima orang yaitu wakil dari GP Ansor (Moh. Said), Pemuda Muslimin (PSII) diwakili Anwar Saleh, Pemuda Perti diwakili M. Ponadi, Pemuda Muhammadiyah diwakili M. Syirkh dan dari HMI diwakili Lalu Mujitahid B.A.<sup>239</sup>

Selanjutnya forum ini kemudian bergerak maju secara tertutup agar tidak diketahui oleh PKI, setelah merasa kuat dan mantap, forum ini menyelenggarakan Tabligh Akbar dengan mengundang tokoh-tokoh tingkat Nasional, seperti KH. Hasan Basri (Jakarta), KH. Zainal Muttaqin (Bandung), dan Drs. Zamroni dan lain sebagainya (PMII, HMI, Jakarta). Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan sillaturahim ke beberapa pesantren, kegiatan tabligh dilakukan di beberapa masjid yang ada di Mataram dan daerah lain Lombok selama para tokoh ini berada di Lombok.

Dari hasil Tabligh Akbar itu ialah dapat mengimbangi tindakan brutal yang dilakukan PKI di mana-mana yang terkenal dengan aksi sepihaknya, maka para pemuda anti Komunis yang tergabung dalam forum GEMUIS melakukan aksi unjuk rasa dengan isi pengutukan kepada PKI dan antek-anteknya, menurunkan dan merusak papan nama milik PKI yang ada. Karena di mana sebelumnya semua ormas dan orpol yang non PKI harus memasang lambangnya di masing-

---

<sup>239</sup> Zakaria, *Geger...*, hlm. 63.



masing rumah atau tempat-tempat tertentu, tujuan sebelumnya ialah agar dapat diketahui mana yang PKI dan mana yang tidak.

Nahdlatul Ulama dengan seluruh badan otonomnya juga berbuat demikian. Dan pasca terjadinya aksi forum GEMUIS tersebut kenyataannya kemudian hampir seluruh tempat di pelosok desa dan kota bermunculan lambang Nahdlatul Ulama dan banomnya. Pulau Lombok dan NTB pada umumnya, dapat dipenuhi oleh lambang Nahdlatul Ulama dan neven-nevennya terpampang menghijau di seluruh tempat di mana-mana. Nahdlatul Ulama waktu itu betul-betul menjadi parpol yang sangat disegani dan ditakuti oleh PKI. Sholawat Badar berkumandang di mana-mana dan dapat menggetarkan hati nurani setiap pembacanya dan terutama para warga Nahdliyyin. Setiap ada gerakan yang dilakukan oleh PKI misalnya dalam pengerahan massa dalam acara-acara tertentu misalnya, peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pendidikan Nasional dan lain sebagainya, maka Nahdlatul Ulama dengan massanya yang ada juga mengimbangnya dengan pengerahan massa yang lebih besar lagi, ditambah khususnya dengan barisan Ansor dengan pasukan drumband-Nya dan pasukan intinya yaitu, BANSER (Barisan Serba Guna) yang muncul di mana-mana. Hal serupa juga dilakukan oleh ormas dan partai lain yang non PKI.

Hal tersebut dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, sebagai wujud jihad agar supaya PKI tidak berbuat seenaknya di daerah Lombok dan NTB umumnya. Karena waktu itu, Nahdlatul Ulama sudah mencium gelagat dan taktik busuk PKI untuk memberontak di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Pasukan drumband Ansor tatkala itu sempat menuai polemik kontroversial tentang boleh tidaknya penggunaan drumband waktu itu. Kemudian perihal itu diperbincangkan oleh kalangan Pengurus Nahdlatul Ulama bagian Syuriah (Tuan Guru) yang pada kesimpulannya diputuskan oleh mereka sebagai suatu kesenian yang boleh dilakukan oleh para pemuda Nahdlatul Ulama, termasuk Fatayatnya Karena drumband itu dapat menggugah semangat jihad para warga Nahdliyyin apalagi dalam menghadapi gerakan pemberontakan PKI yang berfalsafahkan anti Tuhan.

Pelatihan yang dilakukan oleh PKI di Lubang Buaya pada bulan Juli dan Agustus 1965 tersebut, ternyata berkelanjutan dengan meletusnya peristiwa 30 September 1965, yang terkenal dengan G30S/PKI (Gestapu

PKI), yang mana gerakan tersebut hampir saja menggoncangkan seluruh sendi kehidupan Negara, jika saja tidak ada pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah SWT dan upaya untuk menghalaukannya. PKI melancarkan suatu pemberontakan besar melalui aksi gerakan pembunuhan yang sadis dan terencana yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia waktu itu. Dimulai terhadap pimpinan angkatan darat, tokoh agama, dan sampai dengan warga sipil, sehingga sejumlah jenderal banyak yang gugur dan mayatnya dibuang begitu saja laksana sampah di Lubang Buaya, tempat PKI melakukan pelatihan militer. Di antara jenderal yang gugur waktu itu antara lain adalah Letjen Ahmad Yani, Mayjen Haryono, Mayjen Suprpto, Mayjen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo dan lain sebagainya. Mereka diculik dan dibunuh dengan kejam di Lubang Buaya. Sementara jenderal yang dapat lolos dari sergapan Gestapu PKI adalah Jendral Abdul Haris Nasution. Tetapi meski beliau dapat lolos, anak beliau yang bernama Ade Irma Suryani Nasution yang masih berusia 5 tahun mati terbunuh menjadi korban keganasan mereka di rumahnya sendiri. Lettu Pierre Tendean pengawal Jenderal Abdul Haris Nasution dibunuh secara keji juga oleh mereka di tempat yang sama. Gestapu PKI dipimpin Letkol Untung dari Komandan Batalyon Kawal kehormatan Cakrabirawa, dibantu oleh Kolonel Latif, Brigjen Suparjo, serta didukung satu Batalyon 454 Jawa Tengah, satu Batalyon 530 Jawa Timur. Di Jawa Tengah sendiri Gestapu PKI dipimpin langsung oleh Kolonel Suhirman, dan Letkol Usman. Sedangkan di Yogyakarta dipimpin oleh Mayor Mulyono dan berhasil menculik dan membunuh Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono.

Setelah berhasil membunuh jenderal-jenderal tersebut, lalu PKI bergerak menduduki tempat-tempat vital seperti RRI, tempat telekomunikasi dan lain sebagainya. Kolonel Untung menyiarkan berita palsu lewat RRI, bahwa tindakan-tindakan itu dilakukan untuk menggagalkan usaha Dewan Jenderal pada 5 Oktober 1965 mendatang untuk berontak. Dan pagi itu Jakarta dikuasai oleh G30S/PKI. Bahkan, pada tanggal 1 Oktober 1965 Untung menyatakan pembubaran Kabinet Kerja yang dipimpin Bung Karno, dan mengumumkan bahwa pusat kekuasaan sejak hari itu berada di tangan Dewan Revolusi yang dipimpinnya. Selang dua jam setelah pengumuman Untung, NU secara cepat melakukan reaksi keras menentang pembentukan Dewan Revolusi jam 14.30 tanggal 1 Oktober 1965, lalu diikuti oleh GP Ansor dengan

pernyataan yang sama. Gelagat PKI, untuk melakukan pemberontakan sesungguhnya sudah dicium dan diduga kuat oleh NU. Selanjutnya RRI menyiarkan berita bahwa Panglima Kostrad Mayjen Soeharto dan RPKAD (Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat) yang dipimpin Kolonel Sarwo Edi Wibowo (mertua mantan Presiden SBY) berhasil menguasai kembali RRI dan kantor Pusat Telkom serta berhasil menggiring para pelaku ke Lubang Buaya. Dan terlebih meyakini lagi setelah adanya penegasan Mayjen Soeharto, bahwa Gestapu PKI adalah kontra revolusi. Karena Gestapu PKI ternyata gagal menguasai keadaan, sejak itu pula banyak tokoh PKI di seluruh daerah Indonesia baik di pusat maupun di daerah yang menyembunyikan diri.

Seluruh rakyat kemudian tersentak kebangkitannya untuk menyelamatkan negara. Setelah jelas faktanya, bahwa Gerakan 30 September 1965 didalangi PKI, maka tak ayal lagi Nahdlatul Ulama menuntut kepada pemerintah agar PKI dibubarkan dan menindak tegas pihak atau orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan berdarah itu. Maka pada tanggal 3 Oktober 1965, tiga hari setelah terjadinya G30S/PKI, NU kemudian menjadi partai pertama yang paling terdahulu menuntut pembubaran PKI. Padahal ketika itu masyarakat masih berada dalam ketidakpastian tentang situasi yang sebenarnya dan apa yang sebenarnya sedang terjadi.

Nahdlatul Ulama bersama ormas lain pendukungnya tampil menyatakan sikap menentang, mengutuk, dan melawan usaha PKI melalui siaran RRI, publikasi surat kabar dan majalah baik dalam maupun luar negeri. Nahdlatul Ulama mengeluarkan resolusi yang berisi:

1. Mendesak pemerintah dalam hal ini Presiden Soekarno untuk segera membubarkan PKI dan antek-anteknya.
2. Mendesak Presiden mencabut izin terbit seluruh media cetak baik langsung maupun tidak langsung yang telah membantu gestapu PKI.
3. Menyerukan ke seluruh umat Islam membantu sepenuhnya ABRI dalam usahanya mengembalikan ketertiban nasional akibat G30S/PKI.

Nahdlatul Ulama mengajak semua partai dan semua golongan dalam masyarakat Indonesia untuk membentengi negara dan keutuhan persatuan nasional sebagai bangsa yang mencintai kemerdekaan dan ketertiban. Dalam rangka itu, atas inisiatif Nahdlatul Ulama pula maka dibentuklah satu badan gabungan bernama “Front Pancasila“, di bawah pimpinan KH. Subhan ZE, salah seorang Ketua PBNU waktu itu. Sejak detik-detik itulah maka lahirlah “Angkatan 66” sebagai permulaan lahirnya “Orde Baru“. Pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 1965 harian Gelora milik Nahdlatul Ulama NTB memuat berita secara lengkap berita tentang G30S/PKI itu, termasuk hampir keseluruhan isi pidato Mayjen TNI Soeharto dimuat sebagai berita utama. Disusul dengan berita telah ditemukannya para korban di Lubang Buaya yang diculik pada tanggal 4 Oktober 1965 dan tempat pemakamannya pada tanggal 5 oktober 1965.

Setelah adanya berita yang memuat pernyataan PBNU tentang tuntutan pembubaran PKI dan antek-anteknya, maka PW Gerakan pemuda Ansor NTB mengadakan pertemuan kilat pada tanggal 6 Oktober 1965 di Taman Mayura Cakranegara Mataram. Rapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Pernyataan PBNU 5 Oktober 1965 harus diamankan dari rongrongan PKI di daerah. Karena persatuan dan kesatuan warga Nahdliyyin harus ditingkatkan, agar semua garis partai terlaksana dengan sukses dan sebaik-baiknya.
2. Gerakan 30 September 1965 pasti ada pendukungnya di daerah ini di luar PKI sendiri, dan untuk itu perlu digalang kerjasama dan kesatuan langkah dengan semua kekuatan non komunis yang intinya adalah “Gemuis“ Nusa Tenggara Bara perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Panca Tunggal.
3. Perlu diadakan rapat antarorganisasi pemuda, pelajar dan mahasiswa dan direncanakan pada 9 oktober 1985 bertempat di gedung Nasional Indonesia (GNI) Mataram, yaitu bagian barat dari kantor Wali Kota Mataram termasuk kantor Bapeda sekarang.
4. Sebagai pelaksana persiapan rapat antar ormas tersebut, ditunjuk Fathurrahman Zakaria (Ketua) dan Ahmad Djufri (Sekretaris) serta anggota-anggota: Lalu Stam, Sidik Latif, Muhammad Fathullah (Taliwang Cakranegara), Masrah (Gomong Lama Mataram), M.

Chairi Asmu'i (Kampung Melayu Ampenan), M. Syahar, Maghrib, dan Muhammad Zain (Kebon Roek Ampenan asal Penujak Lombok tengah), Muhammad Anwar (Monjok), dan Lalu Muhammad Sadli.

5. Melaporkan hasil rapat kepada Ketua NU Cabang Lombok Barat H. Hamzah Karim, Ketua Wilayah NU NTB, H. Akhsyid Muzhar, dan Syuriah NU NTB TGH. M. Shaleh Hambali Bengkel serta Bupati Lombok Barat Drs. M. Said.<sup>240</sup>

Rencana ini kemudian diwujudkan dengan mengundang dan dihadiri lebih dari kurang lebih 30 ormas, baik pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Berangkat dari hasil pertemuan ini, kemudian secara musyawarah bersama dibentuklah Kesatuan Aksi Pengganyangan (KAP) G30S/PKI Nusa Tenggara Barat dalam bentuk presidium yang beranggotakan ormas-ormas yang hadir. Kemudian diketuai oleh Fathurrahman Zakaria, sekretaris oleh Ahmad Djufri dari GP Ansor., dan Wakil Sekretaris oleh Mudjaffar Husain (HMI). Sementara anggota Presidium yang lain adalah: Muh. Sa'id (Ketua Barisan Ansor Serba Guna), Nawawi AS (IPKI), Mutradi (Pemuda Marhaenis), Suhardi (Katolik), dan Lalu Mujitahid, B.A. (HMI). Gerakan ini bergerak maju menggugah massa dan berdemonstrasi menuntut pembubaran PKI dan setiap ormasnya, diikuti oleh cabang-cabang di setiap Kabupaten di seluruh NTB.

Kesatuan aksi juga bertujuan untuk mengetahui segala aktivitas PKI dimanapun berada, salah satu caranya adalah dengan menampung aspirasi, laporan masyarakat tentang aktivitas PKI. Sebagaimana yang terjadi di Narmada, rapat gelap dilakukan anggota PKI di salah satu tempat di Suranadi yang dipimpin tokoh PKI sekitar, agendanya adalah menyiapkan lubang buaya di Lembuak Narmada bagi tokoh yang ingin membunuh PKI. Demikian pula di Rembiga Mataram dimana anggota PKI memiliki agenda yang sama di setiap daerah. Laporan segera ditindaklanjuti.

Anggota Anshor bersama organisasi pemuda lainnya melakukan orasi, meneriakkan yel-yel membangkitkan semangat dan mengganyang

---

<sup>240</sup> Fathurrahman Zakaria, *Gerakan 30 September 1965 Rakyat NTB Melawan Bahaya Merah*, hlm.79-80. Dikutip dari catatan kakinya, Bupati Lombok Barat, Drs.Sa'id memberi petunjuk-petunjuk tempat rapat dan lain sebagainya.

PKI. Pada saat orasi, orator dilakukan secara bergiliran, Muhammad Sa'id mewakili pemuda Anshor, Nawawi AS (Pemuda IPKI), Mutradi (Pemuda Marhaenis), dan Suhardi (pemuda Khatolik). Sesaat setelah orator terakhir menyampaikan tuntutan, tiba-tiba sekelompok orang datang membawa cerurit dan benda tajam lainnya, ia hendak menangkap anggota OPR, dengan senggap seluruh anggota kesatuan aksi memberikan perlindungan kepada OPR.

Atas ijin panglima ABRI, tuntutan masyarakat NTB menyurukan agar partai PKI dibubarkan dan mengutuk pemberontakan G30S/PKI/PKI. Pernyataan dibacakan oleh Mutradi, wakil pemuda marhaenis. Pawai yang semula direncanakan sampai Ampenan pada akhirnya dibatalkan karena mengantisipasi sekelompok orang yang menyerang tadi membawa pasukan yang lebih banyak lagi. Gerakan pemuda di atas mendapatkan pengawalan, secara berkelompok dari ABRI.

Aksi masyarakat semua lapisan secara spontan dimulai sejak 10 Oktober 1965, dilakukan dengan berbagai cara, yaitu membongkar, membakar semua atribut organisasi yang berbau PKI. Hal ini semakin meningkat setelah rapat umum 16 Oktober 1965. Aksi puncak sampai membakar kantor CDB PKI di Palembak Ampenan, Kantor pemuda rakyat, dan kantor harian "pioner" dan lain-lain.

Penyerangan Kantor SOBSI di Ampenan dilakukan oleh buruh pelabuhan atas instruksi dari buruh pelabuhan. Demikian kantor "pioner" disita mesin percetakannya. Seminggu se usai rapat umum yang pertama, kemudian pada tanggal 23 Oktober 1965, ketua presidium kesatuan Aksi, Muhammad sa'id, dan Lalu Mujitahid, BA membeberkan temuan-temuan kesatuan aksi tentang indikasi bahwa PKI sudah menyiapkan agendanya untuk aksi gerakan 30 September 1965.

Di Lombok Tengah, yang menjadi KAPGESTAPU nya adalah Lalu Kamal (Ketua PCNU Lombok Tengah) dan Makmun sebagai sekretaris PII. Partai Nahdlatul Ulama dan badan otonomnya dari semua tingkat mulai dari PBNU (Pengurus Besar), PWNU (Pengurus Wilayah), PCNU (Pengurus Cabang), MWC (Majelis Wakil Cabang), dan ranting-ranting selalu bergerak menuntut pembubaran PKI dan ormas yang sehaluan dengan pahamnya, melarang ajaran Komunis Marxisme hidup di bumi Pancasila, ditumpas habis sampai ke akar-akarnya.

Menindak tegas secara hukum anggota PKI atau oknum-oknum yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan ajaran dan gerakan PKI. Di mana-mana orang-orang PKI diburu dan dikejar. Sebagian dibakar rumah-rumahnya, kantor-kantornya dirusak oleh massa, bahkan ada yang dibunuh terutama para tokohnya, seperti Husen, Sarkan, dan lain sebagainya. Masyarakat kemudian banyak yang rajin datang ke pengajian majelis taklim, rajin datang ke masjid dan musholla, sehingga tempat-tempat ibadah dan kegiatan dakwah penuh sesak dihadiri oleh mereka. Apakah karena ketakutan semata-mata ataukah mencari muka ataukah karena kesadaran mereka sendiri sampai kemudian PKI benar-benar dibubarkan oleh pemerintah, dalam hal ini pemegang mandat Supersemar (surat perintah sebelas maret) secara nasional. Pemegang mandat supersemar itu adalah Jenderal Soeharto yang dibuat Bung Karno di hadapan Jenderal Basuki Rahmat, Jenderal Amir Mahmud dan Jenderal M. Yusuf, namun teks Supersemar itu masih misteri.

Nahdlatul Ulama bersama partai non komunis waktu itu benar-benar menjadi parpol yang disegani dan ditakuti. Karena itu Nahdlatul Ulama menjadi imam dalam segala gerakan dalam menindak tegas dan menumpas G30S/PKI. Mulai dari gerakan politik maupun gerakan kulturalnya. Nahdlatul Ulama pada waktu itu dapat mengembangkan sayapnya di Nusa Tenggara Barat, sampai ke seluruh pelosok desa.

Daerah lombok dan NTB pada umumnya menghijau terang dengan bintang sembilannya Nahdlatul Ulama. Sejumlah madrasah atau lembaga pondok pesantren Nahdlatul Ulama dibangun secara bergotong-royong oleh warga Nahdliyyin dan simpatisannya, dikelola oleh para Tuan Guru Nahdlatul Ulama sesuai dengan levelnya masing-masing, struktural maupun non struktural. Pusat-pusat kegiatan Nahdlatul Ulama di NTB ada di setiap pondok pesantren di masing-masing cabang. Ponpes-ponpes ini kemudian memiliki abituren sendiri-sendiri. Dan abituren-abituren itulah yang melanjutkan dan membangun kembali lembaga madrasah dan pondok pesantren di tempatnya. Khususnya abituren yang di tempatnya yang ada basis anggota atau warga NU nya. Pondok pesantren yang terhitung berhasil melahirkan banyak abituren yang menjadi tuan guru yang memiliki pondok pesantren setelahnya adalah antara lain pondok pesantren Darul Quran Bengkel pimpinan TGH. Muhammad Shaleh Hambali, Ishlahudin Kediri pimpinan TGH. Ibrahim Al-Khalidi, Manhalul Ulum Praya

pimpinan TGH. Lalu Muhammad Faisal dan lain sebagainya. Pondok-pondok itulah yang mengembangkan ajaran *Ahlussunnah Waljama'ah* yang diajarkan, dilestarikan, dan dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama sampai saat ini.

Berikut ini beberapa kader Nahdlatul Ulama yang terlibat dalam pengganyangan PKI di NTB :

1. Muhammad Said (GP Ansor / Banser)
2. Fathurrahman Zakria (idem)
3. Achmad Djufri (idem)
4. Ahmad Tohri (IPNU, sekretaris KAPPI)
5. Muhammad Djamani (IPNU)
6. Ibrahim (IPNU)
7. Hirjan Thoif (IPNU)
8. Mahrif (IPNU)
9. Kamaruddin (IPNU)
10. Lalu Misban (IPNU)
11. Laili Aris Mansur (IPNU)
12. M. Zuhdi Amin (IPNU)
13. Munir Zain (PMII, sekretaris KAMI)
14. Muhammad Idoar (PMII)
15. Salman Faris (PMII)
16. Lalu Masyhar (Sarbumusi, KABI)
17. Lalu Yusuf B.A. (idem)
18. Husen Said (IPNU, KAPPI BIMA)
19. Husein Muhamad (IPNU, Dompu)
20. Karim AR (IPNU, Dompu)
21. Lalu Maliki (IPNU, Lotim)
22. Qosim (idem)



23. Sahabuddin (idem)
24. Putu Negara (idem)
25. Didi Budistiawan (idem)
26. Suting SJ (idem)
27. Syarifudin B.A (PMII)
28. Hanifah (IPNU Lombok Tengah)
29. Lalu Syukri (idem)
30. Lalu Ramadhan (idem)
31. Lalu Sahnun Faisal (idem)
32. Muhalli (idem)
33. Lalu Getul Nawawi (idem)
33. Lalu Samiun (idem)
34. Burdan (idem)
- 35 Tahkim (idem)
- 36 Syahdi Amin
37. Masriadi
38. Lalu Hijaz
39. Lalu Supardan
40. Lalu Miskuddin
41. Syatrah
42. Lalu Zulkarnain (IPNU NTB)
43. Lalu Fathul (GP Ansor Loteng)
44. Lalu Muh Azhar (IPNU NTB)
45. Satman al bayani (Lesbumi)
46. Daeng Hasan (idem)
- 47 Bajuri (idem)
- 48 Sunaryo (idem )

49. Murjoko (PMII)

50. L. Muh Chatim BA. (GP Ansor Loteng)

51. Dan banyak lagi tokoh-tokoh lainnya yang tidak dapat disebut, yang berperan dalam penganyangan PKI di NTB.<sup>241</sup>

Semenjak 10 Oktober 1965 sampai dengan 28 Oktober 1965, PKI NTB dibekukan. Tak seorang pun secara valid mengetahui berapa jumlah anggota PKI yang masih hidup, diburu, atau tidak kembali kerumahnya. Bahkan banyak eks PKI yang diburu oleh massa atau masyarakat. Anggota PKI yang tertahan disidik dan dikategorikan sesuai dengan berat ringannya, berpengaruh tidaknya dalam struktur kepemimpinan PKI. Dalam pemeriksaan dan seleksi mereka diklasifikasikan kedalam tiga golongan yaitu;

1. Golongan A, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam pemberontakan G30S/PKI baik dipusat maupun didaerah.
2. Golongan B, yaitu mereka yang telah disumpah atau menurut saksi telah menjadi anggota PKI atau pengurus organisasi massa yang seasas dengan PKI atau mereka yang menghambat penumpasan G30S/PKI.
3. Golongan C, yaitu mereka yang pernah terlibat dalam pemberontakan PKI Madiun atau anggota organisasi yang bersimpati atau telah terpengaruh sehingga menjadi pengikut PKI.<sup>242</sup>

Meski PKI sudah dibubarkan, Nahdlatul Ulama tetap memainkan peranan politik cukup penting dalam ikut menciptakan stabilitas politik. Pada awal tahun 1967, H. Nurdin Lubis (NU) bersama rekan-rekannya di Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengeluarkan "Memorandum" sebanyak 10 halaman folio dan berisi 7 pasal pokok. Pada inti prinsipnya, memorandum tersebut mengemukakan tentang adanya indikasi-indikasi keterlibatan Presiden Soekarno dalam peristiwa G30S/PKI/PKI. Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong diminta untuk mengajukan usul kepada pimpinan MPRS guna mengadakan sidang istimewa, untuk :

1. Memberhentikan presiden Soekarno dari jabatannya dan memilih/

---

<sup>241</sup> Wawancara dengan Fathurrahman Zakaria, H. Syahdi Amin, Lalu Chatim BA, di rumah beliau masing-masing tahun 2011-2015.

<sup>242</sup> Fathurrahman, *Geger...*, hlm. 110

mengangkat pejabat Presiden sesuai dengan pasal 3 Tap MPRS no. XV/MPRS/1966 dan

2. Memerintahkan kepada Badan Kehakiman untuk mengadakan pengusutan, pemeriksaan dan penuntutan secara hukum.

Memorandum itu segera disusul dengan resolusi H. Djamaludin Malik (ayah Camelia Malik) dari Nahdlatul Ulama dan kawan-kawannya yang pada dasarnya meminta agar Sidang MPRS mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia, menggantikan Presiden Soekarno. Akhirnya kemudian dua inisiatif tersebut diterima dan didukung sepenuhnya oleh anggota DPR-GR dan sekaligus menjadi usul resolusi DPR-GR tentang Persidangan Istimewa MPRS. Usul tersebut diterima dan berkelanjutan dengan diadakannya sidang Istimewa MPRS pada bulan Maret 1967, yang agenda utamanya tentang keterlibatan Soekarno. Keputusan terpenting dalam Sidang Istimewa tersebut yaitu memberhentikan Ir. Soekarno sebagai Presiden RI, dan mengangkat Jendral Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Selain itu Ir. Soekarno dilarang melakukan kegiatan politik sampai pemilihan umum 1971. Pejabat Presiden berkewajiban melakukan penyelesaian hukum yang menyangkut Soekarno. Tetapi dalam tahap selanjutnya ternyata Bung Karno tidak terbukti hingga akhirnya wafat tanggal 21 Juni 1970. Ketua MPRS waktu itu adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, Wakil Ketua KH. Subhan ZE (NU), Wakil Ketua Osa Maliki (PNI). Sementara Ketua DPR-GR nya adalah K.H. Ahmad Syaikhu dari NU. Kehebatan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dalam menumpas PKI, maka banyak orang memberi nama anaknya dengan Subhan, Idham Khalid, Saifudin Zuhri, Musaddat, bahkan Sukarno dan lain sebagainya.

Perkembangan politik berikutnya, perlu mengadakan perombakan politik secara radikal. Perombakan dimaksudkan untuk memperkokoh cita-cita Orde Baru. Dalam rangka itu pula pada bulan Maret 1968, MPRS mengadakan sidang kelima dan mengukuhkan Jendral Soeharto sebagai Presiden penuh. Dan setelah itu disusun Kabinet Pembangunan I (Satu) yang dipimpin langsung oleh Presiden Soeharto. Dalam Kabinet Pembangunan I (Satu) KH. Idham Khalid Ketua Umum PBNU, masih menduduki jabatan sebagai Menko Kesra dan KH. Muhammad Dahlan menjadi Menteri Agama. Namun semenjak pemilu tahun 1971, sampai tumbanganya Soeharto 1998 NU tidak pernah mendapat jatah seorang Menteri pun dan tamatlah riwayat NU di Kabinet kala itu. KH.

Muhammad Dahlan diganti Prof. DR. Mukti Ali (Muhammadiyah). KH. Idham Khalid waktu itu menjabat sebagai Ketua DPR saja. NU hanya bermain di legeslatif saja. Mulai dari DPR sampai ke DPRD Tk I dan DPRD Tk II itu saja, kondisi politik yang demikian itu, juga terjadi termasuk di Nusa Tenggara Barat.<sup>243</sup>

Memperjelas kronologi pemberontakan yang dilakukan PKI di Indonesia dapat diurai sebagaimana berikut:

1. Pada tahun 1920 PKI lahir sebelumnya menyamar dalam Serikat Rakyat (SI Merah)
2. Pada tahun 1926 PKI melakukan pemberontakan nasional, para pemimpinnya dibuang ke Digul, sebagian lari ke luar negeri. Para Ulama menjadi korban penangkapan dan pesantren serta masjidnya diobrak abrik Belanda.
3. Pada tahun 1945 PKI memberontak di Pantura dalam peristiwa tiga daerah, para ulama disiksa, masjid dan pesantren dibakar.
4. Pada tahun 1948 PKI melakukan pemberontakan di Madiun dan sekitarnya, ribuan santri dan ulama dibunuh, pesantren dan masjid dibakar
5. Pada tahun 1949 PKI membakar Masjid Agung Trenggalek, imam dan takmir masjid serta jama'ah disiksa.
6. Pada tahun 1951 PKI menyerbu Markas Brimob Jakarta Utara dan Gedung Pendidikan Nasional Bogor. 88 orang menjadi korban.
7. Pada tahun 1962 PKI menyerbu Masjid Agung Kembangkuning Surabaya peninggalan Sunan Ampel, al-Qur'an dan kitab lainnya diinjak-injak dan dibakar.
8. Pada tahun 1963 PKI melakukan penghinaan terhadap agama dengan mementaskan reog, ludruk, serta ketoprak dengan lakon matinya tuhan, sehingga mengakibatkan perkelahian.
9. Pada tahun 1964 PKI melakukan aksi sepihak merebut tanah rakyat dan pemerintah sehingga terjadi pertumpahan darah, kalangan NU menjadi korban.

---

<sup>243</sup> Pada bagian ini sebagian besar isinya merupakan resensi. Lihat Fathurrahman Zakaria yang berjudul *GEGER Gerakan 30 September 1965, Rakyat NTB Melawan Bahaya Merah*, (Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy. 2001).

10. Pada tahun 1965 PKI melakukan kudeta berdarah yang berusaha mengganti Negara Pancasila dengan Negara Komunis. Beberapa jenderal dibunuh.
11. Pada tahun 1968 PKI melakukan terror dari Blitar Selatan, sehingga mengakibatkan ratusan korban di kalangan warga NU dan aparat pemerintah.
12. Pada tahun 2000 – 2014 PKI menuduh NU dan TNI sebagai penjagal dan menuntut meminta maaf, serta mengajukan ke pengadilan Internasional.<sup>244</sup>

---

<sup>244</sup> AbdulMuni'im DZ, *Benturan NU PKI 1948-1965*, (Depok: Langgar Swadaya Nusantara, 2013), hlm. 113-114.

# B A B VI

## DINAMIKA INTERNAL NU SEBELUM KEMBALI KE KHITTAH 1926

### A. Lintas Peristiwa Sebelum Khittah

Di ERA TAHUN 1961-1965 di Lombok dan NTB umumnya Nahdlatul Ulama saat itu dalam kondisi yang kuat dan solid. Segala kegiatan politik maupun kultural dapat berjalan normal mulai dari tingkat wilayah sampai yang paling bawah, yaitu ranting-ranting. Semua badan otonom (banom) Nahdlatul Ulama atau neven-nevennya bergerak maju, Lembaga pendidikan pesantren terutama berjalan lancar, bahkan sudah mulai dapat menyelenggarakan program pendidikan umum seperti, SMP al-Ma'arif, PGA al-Ma'arif, dan lain sebagainya.

Pusat pendidikan induk Nahdlatul Ulama, yaitu pondok pesantren seperti Darul Qur'an Bengkel, Ishlahuddin Kediri, dan Manhalul Ulum Praya didatangi banyak murid dari berbagai cabang Nahdlatul Ulama, sampai dari berbagai pelosok desa, bahkan ada yang berasal dari luar Lombok seperti, Bali, Sulawesi, dan lain sebagainya. Dari beberapa pondok induk Nahdlatul Ulama inilah, dihasilkan kader-kader unggulan NU atau alumni-alumni yang kemudian yang mengembangkan Nahdlatul Ulama di daerahnya masing-masing. Bersamaan dengan itu, para santri setelah tamat dari jenjang pendidikan yang terselenggara di pondok induk, sudah mulai tertarik dan melanjutkan ke sekolah atau pondok pesantren yang lebih maju di luar Lombok, seperti Jombang (Tebuireng, Darul Ulum, Tambak Beras), Gontor, dan lain sebagainya. Mereka terus melanjutkan pendidikan S1 nya di pelbagai perguruan Tinggi yang ada, baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Syarif Hidayatullah, Unibraw Malang,

Airlangga Surabaya, UGM Yogyakarta, Al-Azhar Mesir, Mekkah al-Mukarromah, dan lain sebagainya. Hal tersebut mulai berkembang sekitar pasca G30S/PKI, bahkan sebelum terjadinya peristiwa tersebut.

Mereka aktif di Nahdlatul Ulama yang sesuai dengan levelnya, bagi mahasiswa di PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), bagi pelajar di IPNU, IPPNU dan lain sebagainya. Mereka pulang setelah meraih sarjana S1, sarjana muda (BA), ada yang menjadi Guru Negeri, Pegawai Negeri, Dosen, Politisi, Pengusaha, dan bahkan ada yang menjadi menjadi pengasuh pondok pesantren (Tuan Guru).

## **B. Pergolakan Internal NU Sebelum Khittah**

Perubahan sosial di lingkungan Nahdlatul Ulama tersebut merupakan hasil dari akumulasi dari berbagai dinamika sosial yang terjadi sebelumnya yang mengiringi tahapan demi tahapan NU menuju kondisi yang lebih baik. Namun Nahdlatul Ulama sebagai partai politik yang besar tentu tidak bisa lepas dari sejumlah polemik atau konflik yang terjadi di internal tubuh partai NU sendiri.

Bagaimana awal sejarah perpecahan terjadi dalam tubuh partai Nahdlatul Ulama ?

Pada tahun 1952, saat Nahdlatul Ulama resmi diputuskan atau dikukuhkan menjadi partai politik melalui Mukhtamar ke-19 di Palembang. Polemik internal di kepengurusan Nahdlatul Ulama se-Daerah Lombok telah mulai muncul. Pada tahun tersebut kepengurusan di tubuh NU telah memunculkan daya tarik dan menjadi rebutan para tokoh-tokohnya, yaitu terjadinya eksekusi persaingan antara M. Saud dan TGH. Akhsid Muzhar. Masing-masing kedua belah pihak ingin menduduki posisi tertinggi sebagai pimpinan NU di daerah Lombok. Persaingan tersebut selanjutnya dapat dimenangkan oleh TGH. Akhsid Muzhar karena sebab pokok telah mendapat restu dan dukungan penuh dari TGH. M. Shaleh Hambali Bengkel.<sup>245</sup>

Terjadinya kekalahan di pihak Muhammad Saud menyebabkan pihaknya membuat Nahdlatul Ulama tandingan di Lombok yang berpusat di Narmada Lombok Barat. M. Saud mengangkat dirinya secara langsung sebagai ketua Tanfidziyah, H. Hidjas sebagai wakil ketuanya,

---

<sup>245</sup> Wijaya Kusumah, Ida Bagus Putuh, *NU Lombok (1953-1984)*, hlm. 62.

M. Khalil sebagai sekretaris I, Syarafuddin sebagai sekretaris II, dan sebagai ketua Syuriah-Nya adalah TGH. Mustajab Pagutan Lombok Barat. Untuk membedakan dirinya dengan Nahdlatul Ulama pimpinan TGH. Akhsid Muzhar dan TGH. M. Shaleh Hambali, mereka tampil dengan ciri tidak mengenakan kopiah putih sebagaimana NU pimpinan TGH. Akhsid Muzhar dan TGH. M. Shaleh Hambali Bengkel.

Kedua Nahdlatul Ulama ini masing-masing bersaing memperebutkan simpati masyarakat Lombok. Persaingan ini kemudian dimenangkan oleh Nahdlatul Ulama pimpinan TGH. Akhsid Muzhar dan TGH. M. Shaleh Hambali Bengkel. Kemenangan di pihak TGH. Akhsid Muzhar dan TGH. M. Shaleh Hambali Bengkel karena berkaitan dengan figur dan sosok TGH. Muhammad Shaleh Hambali sebagai tokoh agama yang paling berwibawa dan berpengaruh di masyarakat Lombok pada waktu itu. Di samping secara penampilan mereka selalu mengenakan kopiah putih sebagai ciri ketaatan beragama Islam seseorang bagi masyarakat Lombok pada waktu itu.

Berbeda halnya dengan PMII, IPNU, dan IPPNU sedikitpun tidak mengalami perubahan sehingga tidak perlu dilakukan restorasi perubahan, namun saat itu, organisasi tersebut belum mampu mengepakkan sayapnya melebarkan sayap organisasi. Boleh dikatakan bahwa organisasi tersebut belum mampu berjalan sesuai dengan amanat pendiriannya.

Karena Nahdlatul Ulama pimpinan M. Saud dan TGH. Mustajab tidak mendapat simpati dari masyarakat Lombok maka dengan sendirinya pengurusnya atau anggotanya semakin berkurang dan tidak berfungsi lagi, karena ketua syuriahnya TGH. Mustajab tidak sekharisma dan seberpengaruh TGH. M. Shaleh Hambali Bengkel. Ditambah dengan ciri penampilannya yang kurang dinilai bagus dengan tidak mengenakan kopiah putih.<sup>246</sup>

Maka pada tahun 1953 terbentuklah secara resmi NU se-Daerah Lombok pimpinan TGH. Akhsid Muzhar dan TGH. M. Shaleh Hambali Bengkel yang diresmikan secara langsung oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yaitu KH. Idham Chalid dan Hamid Wijaya. Peresmian ini beritanya kemudian tersiar ke seluruh daerah di Lombok, termasuk Praya dan Mataram.

---

<sup>246</sup> *Ibid.*, hlm. 63



Peresmian ini mengundang minat beberapa tokoh masyarakat Nahdlatul Ulama untuk meresmikan pula Cabang Nahdlatul Ulama di daerahnya. Beberapa tokoh Nahdlatul Ulama ini kemudian mengadakan pertemuan di Praya, dan selanjutnya mengutus TGH. Lalu Muhammad Faishal untuk menemui utusan PBNU, yaitu KH. Idham Chalid dan Hamid Wijaya di Masbagik Lombok Timur dengan tujuannya adalah mengundang kedua utusan PBNU itu datang ke Praya untuk meresmikan pula terbentuknya Cabang Nahdlatul Ulama Praya Lombok Tengah. Keinginan para tokoh masyarakat Praya itu dipenuhi oleh kedua utusan PBNU itu. Akan tetapi berdirinya Cabang Nahdlatul Ulama Praya ini belum mendapat peresmian dari PBNU, statusnya masih diakui saja. Walaupun demikian keputusan itu sudah merupakan titik terang bagi tokoh Nahdlatul Ulama masyarakat Praya Lombok Tengah.<sup>247</sup>

Berdirinya Cabang Nahdlatul Ulama Praya agaknya tidak disukai oleh TGH. Akhsid Muzhar selaku Ketua Umum NU se-Daerah Lombok. Hal ini terlihat pada saat Cabang Nahdlatul Ulama Praya Lombok Tengah dalam jangka waktu yang singkat tiga hari telah dapat mengembangkan dan membentuk sebelas Ranting di daerahnya. TGH. Akhsid Muzhar kemudian mengirim surat kepada Kepala Daerah Pemerintahan Lombok Tengah dan Kepala kepolisian setempat yang berisikan agar melarang pengembangan Cabang Nahdlatul Ulama Praya Lombok Tengah tanpa seizin TGH. Akshid Muzhar. Keadaan ini menimbulkan ketegangan dan kemarahan para tokoh Nahdlatul Ulama Praya Lombok Tengah, begitu pula tokoh masyarakat Mataram yang pada saat itu bergabung dengan Cabang Nahdlatul Ulama Praya Lombok Tengah, di antaranya adalah H. Hidjas.

Oleh karena Cabang Nahdlatul Ulama Praya statusnya telah diakui oleh PBNU, maka diambillah langkah untuk langsung mengusahakan agar Cabang Nahdlatul Ulama Praya Lombok Tengah berdiri secara resmi dan tidak lagi berada di bawah Cabang Nahdlatul Ulama se-Daerah Lombok. Maka Lalu Wirentanus atau Haji Lalu Hasyim selaku Kepala Daerah Lombok Tengah mengirim tiga orang utusan untuk menemui PBNU di Jakarta, di antaranya H. Hidjas (Mataram), H. Abdul Hamid (Praya), Lalu Liki (Praya).

---

<sup>247</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

PBNU mengabulkan usulan tersebut dan bahkan berkat usaha H. Hidjas bersamaan dengan itu berdiri pula Cabang Nahdlatul Ulama Mataram dengan status diakui. Walaupun demikian hal ini sudah merupakan titik terang bagi para tokoh masyarakat Mataram. Cabang Nahdlatul Ulama ini baru pada tahun 1954 resmi menjadi Cabang Nahdlatul Ulama Lombok Barat. Dalam memasuki pemilu 1955, NU di daerah Lombok dapat menempatkan dirinya sebagai tiga besar meskipun sebelumnya terjadi berbagai kemelut internal.

Pada tahun 1958 setelah melalui proses usaha yang panjang maka terbentuklah wilayah propinsi NTB maka kepengurusan Nahdlatul Ulama se-Daerah Lombok berubah menjadi kepengurusan wilayah Nahdlatul Ulama NTB seiring dengan lahirnya provinsi baru propinsi NTB dengan membawahi enam cabang, yaitu cabang Nahdlatul Ulama Lombok Barat, cabang Nahdlatul Ulama Lombok Tengah, cabang Nahdlatul Ulama Lombok Timur, cabang Nahdlatul Ulama Sumbawa, cabang Nahdlatul Ulama Dompu, cabang Nahdlatul Ulama Bima. Maka direncanakanlah akan diselenggarakan Konferensi Wilayah untuk memilih ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama NTB.

Pada tahun 1961 maka sesuai rencana diselenggarakanlah Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama NTB. Dalam hal ini terdapat dua calon ketua terkuat, yaitu TGH. Akhsid Muzhar dan M. Saud yang dalam pemilihan tersebut memperoleh suara seimbang.

TGH. Akhsid Muzhar didukung oleh cabang NU Lombok Timur, cabang NU Lombok Barat, dan cabang Nahdlatul Ulama Bima. Adapun M. Saud didukung oleh cabang Nahdlatul Ulama Lombok Tengah, Cabang Nahdlatul Ulama Dompu, dan cabang NU Sumbawa. Calon pertama, TGH. Akhsid Muzhar adalah ketua Tanfidziyah Wilayah Nahdlatul Ulama NTB di masa sebelumnya, yang berasal dari cabang NU Lombok Timur. Calon kedua M. Saud adalah tokoh yang berasal dari cabang Nahdlatul Ulama Lombok Tengah. Munculnya M. Saud sebagai calon ketua mengingat pada pemilu 1955 NU menduduki posisi tiga besar, dan di antara keenam cabang Nahdlatul Ulama di wilayah Nahdlatul Ulama NTB suara yang terbanyak berasal dari cabang Nahdlatul Ulama Lombok Tengah.

Perolehan suara terbanyak kemudian diraih oleh M. Saud dan menempatkan dirinya sebagai calon ketua Tanfidziyah Wilayah NTB

yang akan menggantikan TGH. Akhsid Muzhar. Keadaan ini mendapat reaksi keras dari TGH. Akhsid Muzhar dan tidak setuju dengan terpilihnya M. Saud sebagai ketua Tanfidziyah karena merasa dirinya sebagai pemrakarsa berdirinya NU di Lombok. Terjadilah perselisihan antara kelompok TGH. Akhsid Muzhar dengan kelompok M. Saud yang menuntut agar TGH. Akhsid Muzhar mengundurkan diri dari jabatannya. Di pihak lain, kelompok TGH. Akhsid Muzhar masih tetap berusaha mempertahankan kepengurusannya.

Terjadinya ketidakpastian siapa yang akan tampil sebagai Ketua Tanfidziyah menimbulkan kemarahan kelompok TGH. Achsyid Muzhar. Akhirnya untuk menghindari tidak terjadi pertumpahan darah, maka pihak kepolisian NTB pun ikut melibatkan diri. Mereka kemudian memanggil kedua tokoh yang bertikai, dan menyarankan kepada M. Saud agar mengundurkan diri dan segera meninggalkan konferensi. Saran itu diterima M. Saud dengan alasan demi keamanan dan keselamatan partai. Pengunduran dan kepergian diam-diam M. Saud sebagai calon ketua ini tanpa sepengetahuan pendukungnya. Setelah Konferensi itu selesai akhirnya TGH. Achsyid Muzhar terpilih kembali sebagai Ketua Tanfidziyah Wilayah Nahdlatul Ulama NTB.

Konflik berikutnya terjadi pada tahun 1966 antara TGH. Achsyid Muzhar dengan TGH. Jalaludin. Konflik ini terjadi saat dilaksanakannya Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama NTB yang merupakan amanat dari keputusan Mukhtamar NU ke-23 Desember 1962 di Solo Surakarta. Sumber konflik adalah *pertama*, adanya keinginan dari kelompok TGH. Jalaludin Bagik Nyake untuk menggantikan posisi kelompok TGH. Achsyid Muzhar *kedua*, kelompok TGH. Achsyid Muzhar ingin menggantikan nama Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama (NU).

Akibatnya kelompok TGH. Achsyid Muzhar kemudian tidak memberikan peran kepada orang-orang Nahdlatul Wathon (NW) dalam kepengurusan wilayah Nahdlatul Ulama NTB, kemudian memutuskan agar nama Lembaga Pendidikan NW diganti dengan nama Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama. Dengan adanya kejadian ini, maka orang-orang NW di bawah TGH. Jalaludin merasa sangat kecewa. Diputuskanlah kemudian NW keluar dari Partai Politik Nahdlatul Ulama, kecuali hanya beberapa kader NW yang masih tetap.

Dalam perkembangan selanjutnya terjadi lagi kemelut dalam tubuh Nahdlatul Ulama NTB. Bermula dari *recalling* Arfah Muzhar adik kandung TGH. Achsyid Muzhar selaku anggota DPR wakil dari Nahdlatul Ulama NTB. Penarikan kembali (*recalling*) Arfah Muzhar ini disebabkan karena ia dianggap melakukan tindakan indisipliner dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR. Ia dituduh sering tidak mengikuti persidangan sebagaimana mestinya dan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya.

Sebelum keputusan *recalling* itu diambil pihak PBNU berkali-kali telah memberikan peringatan itu tidak diindahkan kepada Arfah Muzhar, namun peringatan itu tidak diindahkannya. Oleh karena Arfah Muzhar tidak responsif mengindahkan peringatan-peringatan PBNU, maka PBNU segera mengirim surat kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama NTB agar segera menarik kembali (*me-recall*) Arfah Muzhar dari jabatannya sebagai anggota DPR, dan segera mengadakan Konferensi Wilayah untuk menggantikan jabatan menjadi anggota DPR Pusat yang akan kosong.

Keinginan PBNU ini sangat mengecewakan TGH. Achsyid Muzhar yang pada saat itu masih menjabat sebagai Ketua Tanfidziyah Wilayah Nahdlatul Ulama NTB. Oleh karena itu, beliau tidak mengindahkan perintah PBNU mengadakan Konferensi Wilayah. Tindakan TGH. Achsyid Muzhar ini akhirnya mendapat reaksi dari L. Wildan Tanjung dan kelompoknya yang merasa tidak senang dengan sikap TGH. Achsyid Muzhar.

Adanya aksi dan reaksi ini akhirnya menimbulkan kemelut. Dengan adanya kemelut ini, PBNU kemudian mengutus KH. M. Subhan, ZE. (pada saat itu menjabat sebagai Ketua I PBNU) untuk menyelesaikan masalah itu. Kehadiran KH. M. Subhan, ZE. Ini tidak ditanggapi oleh kelompok TGH. Achsyid Muzhar. Mereka bahkan tidak bersedia bertatap muka dengan KH. M. Subhan, ZE. Walaupun demikian KH. M. Subhan, ZE. Tetap melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya untuk mengadakan Konferensi Wilayah.

Pada tahun 1968 NU Wilayah menggelar konferensi Wilayah di Gedung GNI Mataram (Kantor Wali Kota Mataram sekarang), yang agenda utamanya memilih pengurus yang baru. Yang paling menyita pikiran dan tenaga adalah pemilihan pengurus Tanfidziyah (eksekutif

organisasi). Di bagian ini kembali terjadi tarik urat antara yang kelompok pro TGH. Akhsyid Muzhar dan yang kontra. Baik yang pro maupun yang kontra sama-sama bergerilya mencari dukungan melalui lobi yang intensif ke seluruh cabang sebelum konferensi berlangsung maupun ketika sedang konferensi berlangsung. Sementara Rois Syuriah Wilayah NU NTB yang lama TGH. M. Shaleh Hambali Bengkulu sudah mulai *udzur*. Konferensi di buka oleh Gubernur Wasita Kusuma pengganti Raden Arya Moh. Roeslan Tjakraningrat, dan K.H. Subhan ZE hadir dari PBNU. Posisi TGH. Akhsyid Muzhar waktu itu kian terjepit dan melemah sebab mayoritas cabang tidak menghendaki beliau duduk lagi di jabatan Ketua Tanfidziyah. Akhirnya konferensi memilih H. M. Hamzah Karim dari Lombok Barat meski kelompok TGH. Akhsid Muzhar tidak menerimanya. Sementara di bagian Syuriah tidak terjadi gejolak perubahan.

Selesai konferensi masalah kepengurusan di Nahdlatul Ulama ternyata belum selesai, walaupun PBNU mengakui bahwa H. M. Hamzah Karim yang meraih jabatan sebagai ketua Tanfidziyah, tetapi kepengurusannya tidak berjalan normal. H. M. Hamzah Karim kemudian diganti oleh Lalu Wildan Tanjung dari Lombok Timur. Pada tahun 1968 TGH. M. Shaleh Hambali Bengkulu kemudian wafat. Perpecahan tidak saja terjadi di tingkat Wilayah, tetapi juga sampai ke tingkat Cabang, Majelis Wakil Cabang, bahkan ke tingkat Ranting. Nahdlatul Ulama berbelah dua, Ada yang tetap mendukung hasil konferensi dan ada yang tidak mendukung terutama dari kelompok TGH. Akhsid Muzhar.

Kedua kubu saling menganggap dirinya masih kuat dan berhak menduduki jabatan ketua Tanfidziyah. Kelompok TGH. Akhsid Muzhar datang ke Rois 'Aam PBNU KH. Wahab Hasbullah di Tambak Beras Jombang dan minta dukungan kepada beliau dan kelompok yang kontra TGH. Akhsid Muzhar datang ke Jakarta bertemu dengan Pengurus Tanfidziyah dan masing-masing kubu mengklaim sebagai pengurus yang sah (legal). Lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama seperti, lembaga Madrasah atau pondok pesantren pun memberikan respon yang berbeda, ada yang pro kelompok TGH. Akhsyid Muzhar dan ada yang kontra. Karena PBNU hanya mengakui hasil konferensi yaitu H. M. Hamzah Karim, kemudian digantikan Lalu Wildan Tanjung cs, maka PWNU yang sah adalah Lalu Wildan Tanjung.

Keputusan Konferensi ini sangat mengecewakan TGH. Achsyid Muzhar. Kekecewaan ini akhirnya menyebabkan ia mengambil keputusan mendirikan organisasi Rabithah. Alasan yang dikemukakan oleh TGH. Achsyid Muzhar mendirikan organisasi ini adalah karena para tokoh Nahdlatul Ulama dianggap lebih mencintai kekuasaan dan kedudukan dari pada kepentingan organisasi dan hal ini dianggap menyimpang dari ajaran Islam paham Ahlul Sunnah Waljamā'ah. Organisasi ini dimaksudkan untuk memantapkan bidang pendidikan keagamaan yang dianggapnya telah terbengkalai.

Organisasi Rabithah ini berdiri pada tanggal 4 Ramadhan 1388 H (25 November 1968). Organisasi ini berdiri dengan didukung oleh tujuh Yayasan Pendidikan sebagai anggotanya. Ketujuh Yayasan Pendidikan itu adalah Yayasan Pendidikan Islahuddin yang berkedudukan di Kediri Lombok Barat; Yayasan Pendidikan Darul Qur'an yang berkedudukan di Bengkel Lombok Barat; Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ummah yang berkedudukan di Masbagik Lombok Timur; Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah yang berkedudukan di Pagutan Lombok Barat; Yayasan Pendidikan Jami'iyah Islamiyah yang berkedudukan di Pancor Lombok Timur; Yayasan Pendidikan Jamaluddin yang berkedudukan di Aikmel Lombok Timur; dan yang terakhir adalah Yayasan Pendidikan Marakitut Taklimat yang berkedudukan di Mamben Lombok Timur.

Oleh Karena TGH. Achsyid Muzhar masih mengakui diri sebagai anggota Nahdlatul Ulama, maka eksistensi organisasi Rabithah dapat diakui oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama NTB. Akan tetapi menjelang tahun 1971, TGH. Achsyid Muzhar berkeinginan keluar dari Nahdlatul Ulama dan menjadi anggota Golongan Karya. Keinginan TGH. Achsyid Muzhar ini ditanggapi reaktif oleh TGH. Abhar sebagai anggota Rabithah dan seorang Pimpinan Pesantren Darul Falah agar TGH. Achsid Muzhar tidak keluar dari NU. Tanggapan TGH. Abhar kemudian disambut oleh TGH. Achsyid Muzhar dengan memecat TGH. Abhar (Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Pagutan Lombok Barat) dari anggota Rabithah. Setelah pemecatan Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah, Rabithah secara resmi dibawa oleh TGH. Achsyid Muzhar menjadi anggota Golongan Karya.<sup>248</sup>

---

<sup>248</sup> *Ibid.*, hlm. 65-72.

Partai NU mengikuti pemilu 1971 dengan suka dukanya. Menjelang Pemilu, PWNU mengikuti Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Tebuireng Jombang, yang hadir waktu itu adalah, TGH. Lalu Muhammad Faisal Praya, TGH. Lalu Turmudzi Badarudin Bagu, K.H. Ahmad Usman Sumbawa, TGH. Saleh Batunyale, H. Mustafa Bakri Lekok Mujur, dan lain sebagainya. Mereka yang hadir ini adalah para Pengurus NU yang bukan Rabithah.<sup>249</sup> Sebab karena pengurus NU yang masuk Rabithah sudah bergabung dengan Golkar dan menyatakan diri keluar dari NU. Kondisi riil NU menjelang pemilu 1971 NU betul-betul menjadi objek politik Golkar yang dimotori oleh ABRI. ABRI waktu itu berpihak kepada Golkar. Sementara PNS yang pro parpol, khususnya Nahdlatul Ulama di nonjobkan, aparat desa banyak diberhentikan gara-gara mereka mendukung Nahdlatul Ulama. Para guru negeri yang mendukung Nahdlatul Ulama diberhentikan secara langsung, atau minimal dipindahtugaskan ke tempat yang jauh, banyak sekali warga Nahdlatul Ulama yang di intimidasi dan didiskriminasi, terutama para warga yang ada di desa yang jauh dari PCNU dan PWNU. Mereka ketakutan tidak berani pulang ke rumah, mengungsi minta perlindungan ke pengurus Nahdlatul Ulama. Mereka diintimidasi karena tetap mendukung Nahdlatul Ulama, tetapi mereka banyak juga yang bertahan membela diri. Tidak mau mendukung Golkar, karena Golkar bukan partai Islam. Mereka tetap berpegang bahwa mendukung Parpol Islam wajib hukumnya menurut fatwa para Tuan Guru, yang mereka percayai otoritas keilmuan agamanya.

Sementara PNS yang berasal dari warga Nahdlatul Ulama ada yang menyeberang ke Golkar, karena takut kehilangan statusnya. Ada yang diam, tidak mampu berbuat apa-apa, “NU dalam hati saja bersikap seperti bunglon”. Sementara pendukung TGH. Akhsyid Muzhar membangun kekuatan baru di luar struktur Nahdlatul Ulama dengan Rabithah al-Ishlah al-Islami yang berpusat di ponpes Ishlahuddin Kediri, Ketua Umumnya TGH. Akhsyid Muzhar sendiri, dan Rois ‘Ammnya pimpinan ponpes Islahuddin yaitu, TGH. Ibrahim al Khalidi. Adanya Rabithah akhirnya mempengaruhi suara yang diperoleh NU dalam Pemilu 1971, Nahdlatul Ulama pada saat itu meski dapat menduduki posisi nomor dua namun perolehan suaranya jauh di bawah Golongan Karya. Walaupun kalah jauh dari Golongan Karya yang merupakan

---

<sup>249</sup> TGH. Lalu Muhammad Faisal Praya, TGH. Lalu Turmudzi Badarudin Bagu, K.H. Ahmad Usman Sumbawa, *Wawancara*, Tebuireng Jombang Tahun 1971.



pendatang baru, namun Nahdlatul Ulama dianggap partai politik yang bertahan terhadap goncangan politik.

Nahdlatul Ulama sebagai parpol mengikuti pemilihan umum DPR pusat tahun 1971, Nahdlatul Ulama meski menjadi nomor dua sesudah Golkar namun jauh perolehan suaranya tertinggal jauh Golkar. Perolehan suara partai Nahdlatul Ulama di tingkat nasional pada pemilihan umum DPR pusat tahun 1971 dapat dilihat sebagaimana berikut:

Tabel  
Hasil Pemilihan Umum DPR Pusat Tahun 1971.<sup>250</sup>

| No | Nama partai | Perolehan suara | Jumlah kursi |
|----|-------------|-----------------|--------------|
| 1  | Golkar      | 62%             | 227          |
| 2  | NU          | 18,67%          | 58           |
| 3  | Parmusi     | 7,365%          | 24           |
| 4  | PNI         | 6,94 %          | 22           |
| 5  | PSII        | 2,39%           | 10           |
| 6  | Parkindo    | 1,34%           | 7            |
| 7  | Katolik     | 1,11%           | 3            |
| 8  | Perti       | 0,70%           | 2            |

Pertarungan antara Nahdlatul Ulama politik dengan Rabithah Golkar terus berlangsung. Pusat pendidikan NU di NTB, dalam hal ini ponpes Darul Qur'an Bengkel sepeninggal TGH. M. Shaleh Hambali juga terjadi perpecahan internal yang berkepanjangan. Madrasah Darul Qur'an sebelah utara Masjid di kuasai oleh Rabithah, sedang Madrasah Intan Berlian yang dipimpin TGH. Bakri Mahsun tetap berada di bawah pengelolaan partai Nahdlatul Ulama.

Ketika pemilu tahun 1971 itu, di pulau Jawa khususnya di Jawa timur, juga terjadi intimidasi di kalangan warga Nahdlatul Ulama oleh aparat keamanan dan birokrat. Ketika penulis kuliah di Jombang Jawa Timur, sering mendengar dari teman-teman pondok pesantren al-Mimbar tentang intimidasi di kalangan warga partai NU. Di sana ada ungkapan yang sangat menyayat warga NU, "*Biyen nyembeleh sapi, sa' iki nyembeleh kebo, biyen nyembeleh PKI, sa' iki nyembeleh NU* (Dahulu menyembelih

<sup>250</sup> Lembaga Pemilu, *Hasil Pemilu DPR Pusat Tahun 1971*, (Bandung: Offset, 1971). hlm. 63



sapi sekarang menyembelih kerbau, dulu menyembelih PKI, sekarang menyembelih NU)“. Ketika awal-awal pemerintahan Orba (Suharto) memang melakukan politik yang diskriminatif dan tidak mengindahkan HAM sama sekali. Banyak terjadi dan bahkan hal itu sepertinya menjadi prinsip. Misalnya, seperti kalau ada kegiatan ceramah atau mengaji saja harus ada ijin dari pemerintah dan isi ceramahnya pun juga harus disensor, termasuk juga para khatib yang membaca khutbah di masjid. Kalau terjadi penyimpangan, maka khotib diturunkan dari podium, diinterogasi, dan ditahan, termasuk panitia penyelenggara acara juga diperlakukan demikian.

Sejumlah lembaga pendidikan yang dikelola oleh parpol Nahdlatul Ulama atau warganya dianaktirikan oleh pemerintah Orde Baru. Sementara lembaga pendidikan yang tidak masuk parpol Nahdlatul Ulama dianakemaskan. Karena itu NW, Rabithah dan lain sebagainya, pendidikannya lebih maju dari pada pendidikan yang dikelola oleh parpol Nahdlatul Ulama. Al-Ma'arif Mataram misalnya, ketika itu gedungnya hampir hanya dipenuhi oleh semak belukar, Qomarul Huda, Manhalul Ulum, al-Ma'arif Penujak, al-Ma'arif Darek, al-Ma'arif Batujai, al-Ma'arif Tanak Awu, al-Ma'arif Ta'limush Shibyan dan lain sebagainya, semua lembaga pendidikan tersebut, kondisinya digambarkan dengan istilah al-Qur'an *La YamutFihaWa La Yahya* (hidup enggan mati tak mau). Politik “*Bolduzer*” atau “*BelahBambu*” terjadi di mana-mana, kalau mau hendak maju lembaga pendidikannya, maka pengurusnya harus menyatakan diri masuk Golkar dan menyatakan keluar dari Partai Nahdlatul Ulama. Kalau tidak, lembaga pendidikannya tidak akan mendapat bantuan yang signifikan.<sup>251</sup>

Maka sekitar tahun 1971 sampai dengan tahun 1984 saat Nahdlatul Ulama kembali ke khittah 1926 nya atau setelah Muktamar NU ke-27 di ponpes Sukerejo, Nahdlatul Ulama NTB secara organisotris struktural betul-betul mati. Walaupun secara kultural Nahdlatul Ulama masih tetap berjalan melalui kegiatan dakwah meski hal tersebut kadang-kadang berjalan tertatih-tatih. Selanjutnya, pada tahun 1973 perkembangan politik nasional mulai berubah dengan adanya kebijaksanaan pemerintah mengenai penyederhanaan partai politik, maka Nahdlatul Ulama beserta partai-partai Islam lainnya (Parmusi,

---

<sup>251</sup> *Wawancara* dengan TGH. Ahmad Taquiuddin Mansur, di Bonder Tanggal 15 Desember 2015.

PSII, dan Perti) memfusikan diri ke dalam satu wadah yang diberi nama PPP. Dengan terjadinya fusi ini, maka polemik internal dalam tubuh Nahdlatul Ulama tidak lagi muncul ke permukaan. Warga Nahdlatul Ulama baru bergerak kalau ada kampanye PPP karena Nahdlatul Ulama waktu itu sudah bergabung dengan PPP yang berlambangkan ka'bah.

Tokoh-tokoh yang dahulunya motor penggerak Nahdlatul Ulama ketika pengganyangan PKI banyak yang tidak berani menyatakan diri sebagai orang Nahdlatul Ulama secara terbuka, karena takut diberhentikan dari pegawai negeri atau DPRD. Mereka adalah orang-orang Nahdlatul Ulama yang disebut *yaktumuna NU hum* (menyembunyikan ke-NU-annya), mereka yang menyembunyikan ke-NU-annya tersebut karena faktor politis, namun tidak secara kultural karena mereka masih tetap mengikuti tradisi ke-NU-annya, seperti zikir berjamaah, tahlil, talqin, wiridan, roah, serakalan, ratiban, ikut tarekat, maulid Nabi, ziarah ke kubur dan lain sebagainya. Jadi, walaupun mereka tidak diorganisir oleh Nahdlatul Ulama lagi, tetapi kultur NU nya tetap berjalan normal dan bahkan sangat kuat saat itu.

Di NTB, salah seorang pengurus Nahdlatul Ulama yaitu, Drs. H. Israil pernah ditunjuk menjadi Ketua Tanfiziyah dan Prof. Drs. H. Saiful Muslim menjadi sekretaris PWNU NTB, namun beliau berdua tidak tahan bantingan baik munculnya dari internal Nahdlatul Ulama sendiri maupun dari eksternal NU, seperti adanya kebijakan politik Orde Baru yang tidak memperkenankan Korpri aktif di partai politik atau ormas yang aspirasi politiknya disalurkan ke parpol tertentu. Kebijakan ini jelas secara langsung berakibat pada ormas Nahdlatul Ulama yang aspirasi politiknya disalurkan ke partai PPP. Jika aturan tersebut dilanggar, maka yang bersangkutan hanya diberikan pilihan untuk memilih salah satu antara dua hal, aktif di politik dengan melepas PNS nya atau menjadi PNS tanpa terlibat di parpol. Sebab ada satu orsospol yang wajib didukung oleh PNS, yaitu Golongan Karya (Golkar) atau partai pemerintah yang berkuasa waktu itu, walaupun di satu sisi Golkar tidak mau disebut partai politik, tetapi demikianlah politik. Beliau berdua lalu mengundurkan diri dari kepengurusan Nahdlatul Ulama, hanya tetap sebagai warga Nahdlatul Ulama saja. Beliau berdua aktif sebagai dosen di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Mataram.

Kata Golkar, partai politik hanya pandai berpolitik saja tidak pandai dalam hal membangun bangsa. Sedangkan, yang mampu membangun

bangsa hanya Golkar saja. Menurut Golkar, selama Orde Lama berkuasa, (sebelum tahun 1966) yang terjadi di negara ini hanya gontok-gontokan saja antar parpol dan tidak sempat membangun bangsa. Pancasila hanya berada di bibir, tidak pernah dilaksanakan oleh Orde Lama.

Pada waktu Golkar berkuasa, ABRI dan birokrasi sebagai mesin utama penggeraknya, dan Nahdlatul Ulama pada saat itu justru dituding sebagai mesin penggerak Orde Lama. Nahdlatul Ulama terlibat Nasakom (Nasional Agama Komunis) bersama partai-partai lain yang ada terutama PNI dan PKI. Padahal dalam kenyataan sejarah, Nahdlatul Ulama lah parpol yang menuntut pembubaran PKI dan antek-anteknya sebelum parpol dan ormas lain yang ada pada saat itu. Nahdlatul Ulama pula yang secara konstitusional di parlemen meminta supaya pejabat Presiden Suharto dipilih menjadi presiden menggantikan Bung Karno.

Nahdlatul Ulama tidak dapat bergerak maju mengejar Muhammadiyah apalagi Nahdlatul Wathon. Lembaga pendidikan yang bernaung di bawah kedua ormas ini terus berkembang. Muhammadiyah membebaskan warganya untuk masuk partai mana saja. Persyarikatan Islam hanya mengurus dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Muhammadiyah mendapat angin segar dari dalam pemerintahan. Muhammadiyah kemudian dapat menguasai Departemen Agama yang ditinggalkan Nahdlatul Ulama. Warga Nahdlatul Ulama di Departemen Agama hanya warga kelas dua, tidak diberi peran yang berarti selama Orde Baru. Muhammadiyah unggul dalam mengelola pendidikannya mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi. Begitu juga dengan NW (Nahdlatul Wathon). Organisasi yang terakhir ini sangat pandai memahami tanda-tanda zaman di Nusa Tenggara Barat. Ia pernah aktif di Masyumi ketika Masyumi jaya dan setiap ada ranting Masyumi ada ranting NW. Ketika Masyumi dibubarkan pemerintah, ia tidak berpartai. Ketika Parmusi lahir sebagai jelmaan Masyumi ia mencoba masuk Parmusi sebentar, namun kemudian secara terang-terangan bergabung dengan Golkar. Pemerintah terus membantu Nadlatul Wathon dengan berbagai jenis bantuan sehingga lembaga madrasah Nahdlatul Wathon bermunculan di mana-mana, khususnya di desa-desa yang sebenarnya dahulu merupakan basis Nahdlatul Ulama.

Kepiawaian TGKH. Zaenuddin Abdul Madjid menyoroti situasi politik pada masa itu perlu diacungi jempol. NW dengan sangat cerdas memilih kawan politik. Sebagaimana diketahui bahwa politik itu

dinamis, tak kenal kawan dan lawan. Kecerdasan seperti itulah yang dibutuhkan seorang pemimpin dalam menahkodai sebuah organisasi. Ketepatan berkawan member efek dominan dalam memperoleh kartu politik yang sehat bagi sebuah perjuangan.

Sementara Nahdlatul Ulama masih dalam kondisi hidup segan mati tak mau. Bahkan banyak madrasah milik Nahdlatul Ulama diambil atau diserahkan ke Nahdlatul Wathon. Orang Nahdlatul Ulama kemudian banyak yang nyantri ke sekolah NW, maka jadilah mereka kader NW atau simpatisannya. Waktu Nahdlatul Ulama jaya pada tahun 1960-an banyak warga NW aktif di Nahdlatul Ulama, namun ketika Nahdlatul Ulama lemah, maka mereka hijrah ke Golkar yang lebih menjanjikan masa depan. Ketika itu Nahdlatul Ulama hanya mengelus dada bahkan beberapa tokoh Nahdlatul Ulama memiliki prinsip yang berbeda-beda.

*Pertama*, ada yang berkata, biarkan saja mereka orang-orang NW mengurus madrasah NU, asalkan mereka mendukung PPP. Kami memberikan madrasah NU di Karang Bate Mataram dan madrasah NU di Bertais Mataram untuk dikelola NW asalkan mereka mendukung kami (PPP).

*Kedua*, ada yang berkata, yang penting kita tetap bertahan, sekalipun madrasah NU roboh asalkan tetap mendukung PPP yang partai Islam. Nah, yang terakhir inilah kelak saat Nahdlatul Ulama kembali ke Khittah 1926, menjadi cikal bakalnya kebangkitan Nahdlatul Ulama dari tidur politiknya yang pulas menuju Nahdlatul Ulama yang lebih cerah ke depan.

Pada tahun 1968 sampai dengan tahun 1984 (khittah NU 1926) Nahdlatul Ulama wilayah NTB waktu itu bagaikan benang kusut yang sulit diurai dan disatukan. Waktu itu, kepengurusan Nahdlatul Ulama terhitung hanya dipegang secara struktural hanya oleh empat orang saja. TGH. Lalu Muhammad Faisal sebagai Rois Syuriah, Syarifuddin B.A sebagai Katib syuriah, Lalu Muh. Chatim, BA sebagai Ketua Tanfidziyah dan Hirjan Thoif sebagai sekretaris Tanfidziyah wilayah Nahdlatul Ulama NTB.<sup>252</sup>

---

<sup>252</sup> Syarifuddin B.A., *Wawancara*, di Serengat Praya. 2015.



# BAB VII

## NU LOMBOK PASCA KHITTAH 1926

### A. Proses NU Kembali Ke Khittah 1926

PENGALAMAN DAN PERJUANGAN Nahdlatul Ulama tidak selamanya menjadi partai politik. Nahdlatul Ulama dengan demikian telah mengubah orientasinya dari organisasi keagamaan murni (*jam'iyah diniyah*) sebagaimana terlahir pada tahun 1926 menjadi organisasi yang berorientasi kepada politik praktis. Pergeseran orientasi ini, menurut Slamet Efendi Yusuf sebagaimana dikutip oleh Marijan (1992) telah menumbuhkan empat persoalan yang cukup mendasar.

*Pertama*, Nahdlatul Ulama selalu mengkaitkan perhitungan-perhitungan sikap dan tindakannya pada pertimbangan untung rugi dilihat dari kepentingan politik.

*Kedua*, tampilnya Nahdlatul Ulama menjadi parpol (mandiri atau fusi; pen) mengenalkan kelompok keagamaan ini pada “hukum” politik dengan segala liku-likunya, yang berarti pula telah menjadi pergeseran pada nilai-nilai yang menjadi anutan Nahdlatul Ulama sehingga masalah etik dan moral sebagai landasan perilaku politik menjadi masalah serius.

*Ketiga*, pranata dan lembaga yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama mengalami perubahan secara besar-besaran. Di satu pihak para kiyai atau tuan guru (dalam hal ini syuriah) direduksir (dikurangi, direndahkan) perannya, di lain pihak peranan politisi/ pelaksana harian (dalam hal ini tanfiziyah) kian menonjol.

*Keempat*, Nahdlatul Ulama setahap demi setahap kehilangan kegiatan yang semula menjadi bidangnya, seperti bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan budaya menjadi terabaikan.

Menurut KH. Mahrus Ali sebagaimana dikutip juga oleh Marijan (1992), semua itu terjadi karena adanya kerusakan batiniyah yang parah di kalangan orang-orang Nahdlatul Ulama. Lebih jauh KH. Mahrus Ali (PP. Lirboyo Kediri) mengatakan: “Ketika memasuki bidang politik, Nahdlatul Ulama dulu bertumpu pada pandangan bahwa dengan itu terdapat jalan untuk menjaga dan menyebarkan Islam Ahlussunnah Waljam’ah. Tetapi perkembangannya kemudian menjadi lain. (Orang-orang) Nahdlatul Ulama ternyata kemudian terlalu *Hubbul Jah Wa Hubbul Riyasah* (cinta kedudukan dan cinta kekuasaan)”.<sup>253</sup>

Memang ketika Nahdlatul Ulama menjadi partai banyak hal yang didapat oleh Nahdlatul Ulama, terutama *jah* dan *riyasah* itu. Tetapi sejak tahun 1970-an dan seterusnya sampai 1984, kenikmatan itu tidak lagi diperolehnya. Kenikmatan itu hanya diperoleh oleh para pengurus Nahdlatul Ulama, yang menjadi anggota legislatif DPR, DPRD TK I, dan DPRD TK II, dan eksekutif. Sedangkan warga Nahdliyyin tidak dapat merasakannya. Nahdlatul Ulama sepertinya menjaga jarak dengan pemerintah, meski pada awalnya merupakan pendukung kuat Orde Baru. Gejala demikian ini, misalnya terlihat dari kritisnya Nahdlatul Ulama terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah (Golkar), sehingga Nahdlatul Ulama telah menjadi sosok “oposisi loyal” atau menurut terminologi Mitsuo Nakamura menjadi “Tradisionalisme Radikal”.<sup>254</sup> Seperti sikapnya dalam menentang RUU Perkawinan, P4, dan aliran kepercayaan yang masuk dalam GBHN yang diajukan pemerintah. Tetapi dalam masalah dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi, Nahdlatul Ulama ditinggal jauh oleh ormas semisal NW dan Muhammadiyah. Padahal program-program ini seharusnya menjadi garapan utama Nahdlatul Ulama sesuai dengan niat didirikannya sejak 1926. Tetapi justru sebaliknya, politik adalah menjadi primadonanya atau panglimanya. Akhirnya mayoritas warga terkuras tenaga dan pikirannya untuk membela kepentingan politik praktis para

---

<sup>253</sup> Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 219.

<sup>254</sup> Mitsuo Nakamura, “Tradisionalisme Radikal: Catatan Muktamar Semarang 1979” dalam Greg Fealy, Greg Barton (eds.) *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1997), hlm. 61.

pemimpinnya. Sementara garapan yang lain dikerjakan oleh orang atau kelompok lain, sehingga mayoritas warga Nahdlatul Ulama tidak merasakan nikmat ber NU. Karena para pemimpinnya menjauh atau menjaga jarak dengan mereka.

Pada gilirannya masyarakat yang semula orang NU, tidak mengenal lagi tentang NU itu sendiri yang sebenarnya. Hanya mengenal Nahdlatul Ulama itu PPP atau PPP itu Nahdlatul Ulama. Lambang-lambang Nahdlatul Ulama tidak pernah tersaksikan dipajang di desa-desa, bahkan di Cabang dan di Propinsi sekalipun. Karena Nahdlatul Ulama waktu itu bagian dari PPP, maka pengurus Nahdlatul Ulama hanya ada di kabupaten saja. Tidak boleh ada pengurus di tingkat kecamatan apalagi di desa, hal tersebut didasarkan UU Parpol dan kebijakan pemerintah waktu itu. Gairah ber NU cukup meredup kalau tidak dapat dikatakan mati.

Kondisi inilah yang terjadi di Lombok dan sekitarnya pada waktu itu. Mayoritas generasi muda yang orang tuanya semula merupakan tokoh Nahdlatul Ulama, sama sekali kemudian tidak mengenal apa itu Nahdlatul Ulama. Mereka hanya mengenal PPP sehingga ketika Nahdlatul Ulama mau bangkit kembali dari tidurnya, betapa sulitnya mencari calon pengurus Nahdlatul Ulama, calon pengurus Muslimat, Ansor, Fatayat, IPNU, IPPNU, dan PMII dan lain sebagainya.

Pada tahun 1987, penulis diminta mencari anak muda-mudi untuk menjadi kader pengurus Fatayat dan PMII, yang kebetulan waktu itu akan dilatih dalam suatu pelatihan motivator kesehatan ibu dan anak, untuk menemukannya terlebih dahulu mencari anak-anak tokoh NU, yang muda-mudi dan yang tidak NU atau tidak Muhammadiyah. Kalau untuk menjadi kader PMII, ukurannya adalah paling tidak pernah nyantri pada ponpes yang bernaung di Nahdlatul Ulama, yang dicari adalah mereka yang kalau sholat subuh mengamalkan do'a *qunut* atau melafadzkan *ushalli* jika hendak sholat. Jika mereka memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, penulis baru menawarkannya untuk ikut pelatihan kader Fatayat dan PMII, dan setelahnya menjadi pengurus. nya langsung.

Pengalaman mencari kader-kader NU pada saat itu memang cukup sulit. Kalaupun menemukan mereka, yaitu anak-anak tokoh Nahdlatul Ulama tersebut, namun kebanyakan mereka tidak mau menjadi ikut



dikader apalagi mau aktif pengurus Fatayat, PMII, dan lain sebagainya. Sepertinya, ada trauma masa lalu, yaitu jika aktif di ormas Nahdlatul Ulama, persepsi mereka sama dengan aktif di PPP, dan kalau sudah aktif di PPP, maka berimplikasi pada kesulitan mencari pekerjaan, khususnya untuk menjadi PNS. Jadi mereka sudah beranggapan bahwa hal tersebut akan membuang-buang waktu saja.

Walaupun Nahdlatul Ulama tidak lagi menjadi bagian PPP, karena kembali ke Khittah 1926, dengan menjaga jarak yang juga dengan orsospol yang lain, kesulitan itu tetap ada. Ada semacam kecurigaan kalau menjadi pengurus Nahdlatul Ulama, jangan-jangan akan digiring ke PPP lagi atau politik yang tidak menguntungkan dari segi penghidupan yang selama ini mereka nikmati. Sebab pengaruh Golkar sangat kuat sekali dalam perpolitikan nasional saat itu. Cengkraman kuku pemerintah Orde Baru begitu berbisa. Apapun yang dilakukan oleh orsospol termasuk juga ormas yang ada harus ada restu dari pemerintah (Presiden, Gubernur, Bupati). Kalau belum ada restu, orsospol atau ormas itu kemungkinan tidak akan berjalan dengan baik. Sebaliknya jika restu itu ada, maka ada kemungkinan orsospol atau ormas itu dapat berjalan tentu sesuai dengan kehendak yang memberi restu. Dampaknya ialah proses mengalirnya pendanaan dapat keluar dengan mudahnya. Jadi campur tangan atau intervensi pihak eksekutif begitu kuatnya. Semuanya berjalan dalam satu komando, dalam hal ini pemerintah. Kekuatan pemerintah orde baru ditopang oleh tiga kekuatan yang bersinergis. ABRI, birokrasi, dan Golongan Karya. Melawan pemerintah, sama dengan melawan pembangunan. Melawan pembangunan sama dengan anti Pancasila. Dan ini dirasakan oleh warga Nahdliyyin dalam kurun waktu yang cukup panjang. Terutama pada era tahun 1970-an sampai dengan kembali ke Khittah 1926 dalam Mukhtamar NU ke-27 di Situbondo 1983.

Proses lahirnya Khittah Nahdlatul Ulama 1926 bukanlah proses yang mudah. Pada tanggal 19 Desember 1983 Khittah dilakukan pada saat munas Alim Ulama di mana pertama kali Nahdlatul Ulama membentuk komisi Khittah. Komisi ini dipimpin oleh pimpinan sidang KH. Chamid Mahmud, Terjadi ketegangan antara peserta sidang. Sidang komisi bersifat tertutup dan dijaga oleh GP Anshor berpakaian lengkap. Sidang komisi membahas hal yang gampang dianggap rawan yaitu masalah azas pancasila, mukaddimah AD/ART Nahdlatul Ulama, dan pemantapan

kembalinya Nahdlatul Ulama ke Khittah 1926.<sup>255</sup> Sebanyak 14 orang yang mendapat giliran berbicara waktu itu, semuanya dengan nada yang berapi-api dan suara yang lantang.

Tanggal 20 Desember 1983 malam, sidang ini berhasil menyelesaikan tahap inventarisasi pendapat. dan Kiyai Achmad Shiddiq diberi kesempatan memberikan tanggapan dan jawaban. Kiai Achmad meyakinkan kepada sidang bahwa makalah ini disusun bukan karena ketakutan atau karena “diiming-iming permen”. Dan masalah yang dibahas ini bukan sikap tergesa-gesa, tapi memang sudah tiba waktunya. Pemaparan argumen yang dilakukan Kiai Achmad diakhiri dengan kata-kata, “Namun kalau Anda ada yang punya pendapat lebih kuat dari ini dan berani mempertanggung-jawabkan umat di hadapan Allah SWT, saya siap menarik makalah ini”.<sup>256</sup>

Akhirnya seluruh anggota sidang semua tertunduk, hening dan seolah-olah kehilangan nafsu untuk mendebat lagi. Beberapa saat kemudian Kiai Achmad melanjutkan keterangannya, “Saya berani mempertanggung-jawabkan pendapat saya ini di Hadhirat Allah SWT”. Kata-kata ini seolah-olah merupakan klimaksnya. Dan setelah itu tinggal anti klimaksnya.

Ketika KH.Chamid Mahmud, selaku pimpinan sidang, menawarkan kelanjutan sidang ini kepada majelis, peserta sidang nampak sudah lega setelah mendapat penjelasan Kiai Achmad. Tak ada maksud lagi untuk menambah pendapat. Tinggallah tahap perumusan. Untuk itu ditunjuk 25 orang dalam Tim Perumusan. Dalam pelaksanaan berikutnya, Tim Dua Lima tersebut dibagi lagi ke dalam tiga sub tim, yaitu Tim Khittah, Tim Mukaddimah dan Tim Deklarasi. Ketika sidang pleno terakhir digelar pada 21 Desember 1983, para peserta resmi dan “muktamirin” sudah berjejal menanti hasilnya di halaman pondok. Saat itu, Komisi Khittah baru menghapus keringat dan siap melaporkannya di sidang pleno kemudian menjadi keputusan resmi Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama. Bahwa Nahdlatul Ulama mendeklarasikan diri kembali ke Khittah Nahdlatul Ulama 1926.<sup>257</sup>

---

<sup>255</sup> <http://www.nu.or.id/post/read/64403/panas-dingin-komisi-khittah03/02/2016> diakses Jam 11.38 WITA.

<sup>256</sup> *Ibid.*

<sup>257</sup> *Ibid.*

Memang diakui bahwa setelah itu terjadi perdebatan internal Nahdlatul Ulama yang sangat alot antara kelompok Idham Khalid (Cepete) dengan kelompok Syuriah, seperti KH Ali Ma'shūm, KH As'ad Syamsul Arifin. KH Ahmad Shidiq dkk (Situbondo), sehingga terjadi polarisasi dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Kelompok Cepete menginginkan agar Nahdlatul Ulama tetap berpolitik dengan menyalurkan aspirasinya ke dalam PPP, sementara kelompok Situbondo menginginkan agar Nahdlatul Ulama lepas dari PPP dan membebaskan warganya untuk berpolitik dalam menyalurkan aspirasinya kepada orsospol manapun.

Krisis politik yang dialami tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama segera dimanfaatkan oleh aliansi ulama dan generasi muda untuk mengkampanyekan pentingnya keluar dari gelanggang politik. Berbagai persoalan yang dihadapi Nahdlatul Ulama dalam perjuangan Khittah 1926. Menurut Kiai Ahmad secara sistematis melihat problem yang dihadapi Nahdlatul Ulama saat itu adalah;

1. Makin jauhnya jarak antara generasi pendiri dengan generasi penerus
2. Makin luasnya medan perjuangan dan banyaknya jumlah dan macam bidang yang ditangani

Makin banyaknya jumlah dan macam ragam mereka yang menggabungkan diri pada Nahdlatul Ulama, dengan latar belakang pendidikan dan subkultur yang berbeda

3. Makin berkurangnya peranan dan jumlah ulama generasi pendiri dalam pimpinan Nahdlatul Ulama.<sup>258</sup>

Implikasi politik Nahdlatul Ulama pasca Khittah memang sangatlah sulit, di satu sisi politik memberikan kehidupan untuk jama'ah Nahdlatul Ulama, namun disisi lain politik mengekang kebebasan warga Nahdliyyin. Dalam perspektif Khittah, operasionalisasi jama'ah seharusnya menjadi basis kekuatan masyarakat, bergotong royong meletakkan pondasi kehidupan berorganisasi lebih baik. Pemaknaan Khittah juga diartikan sebagai proses pengembalian pembinaan

---

<sup>258</sup> KH. Ahmad Shiddiq, *Khittah Nahdliyyah* (Surabaya: LTNU Jatim, 2006), hlm. 7.

keagamaan, mengedepankan kepedulian sosial kedalam praktik nyata.<sup>259</sup>

Untuk menindaklanjuti keputusan Khittah, beberapa kebijakan yang dilakukan Nahdlatul Ulama dalam mengembangkan sumber daya manusianya adalah dengan pembentukan Lakpesdam (Lajnah Kajian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia). Sebuah sayap organisasi yang dimaksudkan untuk mengimplementasikan Syu'un Ijtimai'yah dalam praktik nyata. Desain Lakpesdam seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di mana aktivitasnya ditujukan terhadap pengembangan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pertanian, tambak udang dan sejenisnya.<sup>260</sup>

Dari segi kebijakan, hubungan antara Nahdlatul Ulama dengan pemerintah sangat harmonis, lebih-lebih banyak ulama Nahdlatul Ulama digandeng pemerintah dalam menyusun rancangan Undang-undang Pengadilan Agama. tapi hubungan baik ini tidaklah cukup permanen melainkan hubungan ini mulai berkuang saat ICMI bentukan Habibi yang di dalamnya terdapat banyak kaum modernis walaupun ada juga warga Nahdlatul Ulama yang menjadi kader ICMI. Kecaman Gusdur terhadap ICMI mengawali kerenggangan antara pemerintah, Nahdlatul Ulama, dan ICMI. Kerenggan itu terlihat sekali Mukhtar Cilasung 1994 saat pemerintah tidak memberi restu kepada Gusdur untuk menjadi ketua PBNU, namun sebagai tokoh yang progresif-tradisionalis, Gusdur banyak mendapat dukungan tokoh muda Nahdlatul Ulama dan aktivis pengkritik pemerintah NGO (Non Government). Akhirnya Gusdur mampu menunjukkan pada pemerintah bahwa ia masih dipercaya kaum Nahdliyyin.

Sebagai aktivis yang prodemokrasi, Gusdur kritis dalam memberikan masukan pada pemerintah, namun tidak menepikan program berkualitas pemerintah, artinya program baik dan merakyat yang menjadi kebijakan pemerintah, Gusdur juga mengapresiasi. Itulah cita-cita seorang Gusdur yang menghendaki Nahdlatul Ulama sebagai *civil society* yang kuat, selain sebagai partner pemerintah juga menjadi kritikus pemerintah.

---

<sup>259</sup> As'ad Said Ali, *PERGOLAKAN DIJANTUNG TRADISI, NU yang saya amati*, (Jakarta: LP3ES, 2008), hlm. 68

<sup>260</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa Nahdlatul Ulama secara fisik memang mengubah haluan dengan keluar dari partai politik, namun warga Nahdlatul Ulama bebas memilih partai politik. Model inilah yang membuat hubungan Nahdlatul Ulama dengan pemerintah membaik bahkan ketegangan politik mencair. Lebih-lebih pemerintah harus berterima kasih pada Nahdlatul Ulama karena berdiri paling depan menerima pancasila sebagai asas tunggal. Bersamaan dengan membaiknya hubungan Nahdlatul Ulama dengan pemerintah, maka hubungan dengan PPP menjadi memburuk. Banyak kader Nahdlatul Ulama yang masuk ke Golkar, puncaknya adalah kesediaan Gusdur sebagai wakil utusan golongan dalam Sidang MPR dan masuk dalam fraksi Golkar.<sup>261</sup>

Keputusan Khittah 1926 tidak saja memutar politik Nahdlatul Ulama, namun hal lain yang diperhatikan juga adalah reinterpretasi pemikiran keagamaan, dalam hal ini adalah pentingnya Nahdlatul Ulama memandang Kitab Kuning dalam perspektif yang berbeda yang kemudian diisi oleh Masdar F. Mas'udi. Masdar mampu menggerakkan potensi kalangan muda Nahdlatul Ulama, sehingga banyak kaum muda tidak sepakat dengan metode pembahasan masalah keagamaan di Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, melalui gebrakannya, di bawah payung Syuriah, Masdar kemudian mengorganisir serangkaian diskusi PBNU mengenai kitab kuning. Kitab klasik ini menjadi sasaran analisa-analisa dosen muda IAIN dalam menafsirkan secara tekstual dan kontekstual, hal ini mendapat sambutan yang antusias dari beberapa kiai muda. Pada forum itulah Masdar menggagas agar membaca Kitab Kuning dan menafsirkannya secara kontekstual, bukan *taqlid* harfiah semata.

Pemikiran Masdar sebagai pemikiran pembaharuan rupanya tidak terlepas dari sorotan Gusdur, menyetujui upaya Masdar dalam mensosialisasikan metode analisis dan penalaran (*manhajy*) dalam pengambilan keputusan. Gerakan Masdar langsung berpengaruh pada Munas Alim ulama Nahdlatul Ulama di Cilacap 1987, waktu itu diusulkan oleh Kiai Achmad Siddiq langsung menyerang kaum konservatif untuk membahas tentang sampai mana batas pemikiran kaum cendekia muda atau konsep *tajdid* diletakkan, di kalangan Nahdlatul Ulama hal tersebut merupakan hal sangat tabu. Hal ini membuat Gus dur terkaget dengan

---

<sup>261</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

pemikiran KH. Acmad Siddiq walaupun pada akhirnya konsep *tajdid* tidak menjadi pembahasan pada Munas alim ulama tersebut.<sup>262</sup>

Pemikiran Masdar rupanya merambah pada generasi muda Nahdlatul Ulama, Masdar adalah sosok ulama yang dilahirkan di pesantren dan perguruan tinggi modern. Banyak santri Nahdlatul Ulama yang melanjutkan pendidikannya di sekolah-sekolah modern seperti IAIN, sehingga berakibat pada pemikirannya ulama-ulama tradisonal Nahdlatul Ulama terancam dan dapat tergerus oleh generasi baru Nahdlatul Ulama tersebut, *output* pemikiran dan kekayaan intelektual kader Nahdlatul Ulama semakin beragam.

Kembali pembahasan ketika kelompok Situbondo mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) di Situbondo 18-21 Desember 1983, maka kelompok Cepete melakukan musyawarah yang kemudian dihadiri oleh 22 wakil Pengurus Wilayah NU. Pengurus Wilayah NU NTB tetap mengirim utusannya ke kedua pertemuan nasional itu, atas restu dari Rois Syuriah wilayah Nahdlatul Ulama NTB, yaitu TGH. Lalu Muhammad Faisal Praya, masing-masing yang diutus adalah yang hadir ke Cepete, antara lain Lalu Muhammad Chatim B.A. yang kebetulan waktu itu masih duduk di DPRD TK I, dan yang hadir ke di Situbondo, antara lain Syarifuddin B.A. (Katib Syuriah). Pengurus Wilayah NU NTB tidak memihak kepada kedua belah pihak, sebab kedua belah pihak itu sama-sama pemimpin Nahdlatul Ulama yang harus dihormati juga.<sup>263</sup>

Pergulatan Nahdlatul Ulama dalam politik praktis dalam kurun waktu yang panjang menggiring Nahdlatul Ulama dan warganya kepada mengabaikan tugas utamanya sebagai organisasi keagamaan (*Jam'iyah Diniyah*), yaitu mengembangkan paham Ahlussunnah Waljam'ah sesuai dengan tujuan pendiriannya sejak tahun 1926. Program-program yang seharusnya diprioritaskan seperti pendidikan, ekonomi, budaya, dan sosial kemasyarakatan terabaikan sama sekali. Para tokoh struktural Nahdlatul Ulama lebih banyak memfokuskan diri pada bidang politik praktis, yang justru bukannya semakin memperkuat posisi Nahdlatul Ulama dalam posisi ranah legeslatif dan eksekutif, tetapi justru sebaliknya. Buah yang dihasilkan dan diterima tidak sebanding dengan upaya kerja keras, mengeluarkan dan mengucurkan keringat, tenaga,

---

<sup>262</sup> *Ibid.*, hlm. 79-80.

<sup>263</sup> Wawancara dengan Syarifuddin, BA. di Serengat Praya Tanggal 23 Februari 2014.

dan pikiran mereka. Bahkan Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah dan warganya sebagai jama'ah pendukungnya tertinggal terus dari kereta pembangunan. Warga yang seharusnya menjadi subyek (*fa'il*) dalam segala bidang kehidupan, justru lebih banyak menjadi obyek (*maf'ul bih*) saja. Betapa banyak lahan yang tersebar luas di Nusantara, khususnya di NTB, yang menjadi fokus utama Pertanu (Persatuan Tani NU), justru terabaikan sama sekali, adalah menjadi ladang empuk orang atau kelompok lain yang lebih memfokuskan diri pada bidang pertanian, misalnya sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), yang kadang-kadang LSM ini bukan milik atau bernaung di bawah bendera Nahdlatul Ulama.

Tidakkah bendungan Batujai, Pengge Lombok Tengah, mayoritas pemilik lahannya adalah warga Nahdlatul Ulama ? namun ketika lahan-lahan itu dijadikan proyek oleh pemerintah Orba, apakah pemilik lahan tersebut yang kebanyakan warga Nahdlatul Ulama lebih meningkat ekonominya atautkah justru sebaliknya ? sampai hari ini belum. Mereka memang banyak yang ditransmigrasikan, tetapi apakah mereka semakin baik atau meningkat ekonominya ?. Bagaimana pula dengan nasib para TKW dan TKI yang kebanyakan warga Nahdlatul Ulama, yang justru menjadi obyek pemerasan para calo dan penindasan kaum berduit (majikan) di mancanegara atau di negara tempat mereka mencari sesuap nasi dan seteguk air ?. Sudahkah dipikirkan oleh politisi-politisi Nahdlatul Ulama bagaimana penyelesaiannya ?.

Demikian juga program pendidikannya. ketika Nahdlatul Ulama pada tahun 60-an atau di bawah tahun 1985 menjadi terbengkalai tak terurus dengan baik, bahkan hampir mati. Apalagi jika dipertanyakan bahwa selama Nahdlatul Ulama terkuras tenaga dan pikirannya dalam politik praktis sudah berapa lembaga pendidikan yang dicanangkan ? Kalau sudah ada lembaga yang didirikan, seberapa jauh mutu pendidikannya, bagaimana kurikulum Aswajanya ? Betapa banyak lembaga pendidikan yang bernaung di bawah al-Ma'arif Nahdlatul Ulama,. Apalagi Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama telah direncanakan saat itu akan ada, TK Muslimat saja pada waktu itu belum ada. Inilah fakta, yang menjadi kekayaan sejarah milik Nahdlatul Ulama sekaligus menjadi pil pahit kala itu.

Hal-hal itulah antara lain yang mendorong sebagian ulama NU terobsesi untuk mengubah pola pikir dan pola tindak Nahdlatul Ulama



sebagai *jam'iyah diniyah* yang bermanfaat bukan hanya bagi warganya saja, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat bangsa dan Negara Indonesia. Semestinya jelas mana garapan Nahdlatul Ulama sebagai *jam'iyah diniyah* dan mana garapan PPP sebagai partai politik. Warga Nahdlatul Ulama tidak boleh terlalu digiring terus ke satu parpol karena warga Nahdlatul Ulama perlu diberdayakan pula secara politis, sementara parpol tersebut dirundung perpecahan internal yang justru merugikan para pendukungnya yang mayoritas Nahdlatul Ulama. Jangan sampai warga Nahdlatul Ulama itu tidak dilindungi hak-haknya, tidak diberikan kebebasan menyalurkan aspirasinya sesuai dengan hati nuraninya, selagi dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nahdlatul Ulama harus memberikan pedoman yang jelas dan terarah agar warganya tidak lagi hanya sebatas menjadi obyek politik (*maf'ulun bih*) orang atau kelompok lain.

Nampaknya, kembali ke Khittah 1926 adalah solusi (*makhraj*; jalan keluar) yang paling tepat dan strategis. Semua komponen dalam Nahdlatul Ulama harus memiliki visi dan misi sama, serta niat yang sama pula, bahwa berjihad lewat Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah amal jariyah yang tidak pernah putus pahalanya selagi niat pengurus dan para warganya itu ikhlas *lillahi ta'ala*. Sebagaimana ungkapan populer di kalangan aktifis Nahdlatul Ulama NTB, "Hidupilah Nahdlatul Ulama jangan hidup lewat Nahdlatul Ulama, Anda mencintai Nahdlatul Ulama, NU akan mencintai anda, Anda membesarkan NU anda akan dibesarkan NU"<sup>264</sup>.

Dengan demikian kembali ke Khittah 1926, sebagaimana diputuskan oleh Muktamar ke-27 tahun 1984 di Pondok Pesantren as-Salafiyah asy-Syafi'iyah Situbondo merupakan suatu keniscayaan.

Setelah muktamar Situbondo, semangat Nahdlatul Ulama berkobar untuk meninggalkan gelanggang politik praktis besar sekali. Beberapa keputusan dihasilkan oleh PBNU untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan muktamar tersebut, terutama hal yang berkaitan dengan pemisahan kegiatan politik praktis dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya saja soal perangkapan jabatan, muktamar menyerukan: Untuk tujuan efisiensi dan efektivitas organisasi, maka

---

<sup>264</sup> Lihat, *kata-kata Mutiara NU*, di papan spanduk yang terpampang di dalam kantor AULA di sekretariat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Jln. Pendidikan No. 6 Gomong Lama Mataram.



kepengurusan di lingkungan Nahdlatul Ulama tidak dirangkap dengan kepengurusan harian organisasi politik manapun. PBNU membuat SK No. 01/PBNU/1-1985, 11 Januari 1985 tentang perangkapan jabatan yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Pengurus Harian Nahdlatul Ulama tidak diperkenankan merangkap menjadi pengurus harian partai politik/ organisasi politik manapun.
2. Batas waktu pelaksanaan tersebut pada butir 1 (satu) di atas adalah satu tahun untuk wilayah dan dua tahun untuk cabang.
3. Kepada pengurus wilayah dan cabang NU di seluruh Indonesia supaya mengambil langkah-langkah ke arah pelaksanaan keputusan itu.<sup>265</sup>

Rupanya persoalan perangkapan jabatan ini amat penting bagi NU, sehingga belum sampai setahun surat penegasan telah dibuat kembali, yakni SK No. 72/A-II/04-d/XI/85, 26 Oktober 1985 yang isinya serupa dengan SK pertama.

SK tersebut begitu penting dibuat oleh PBNU dengan alasan, paling tidak karena dua hal:

1. Menunjukkan atas keseriusan NU untuk meninggalkan gelanggang politik praktis sehingga dengan demikian akan jelas mana aktifitas NU yang jam'iyah murni dan mana yang tidak.
2. PBNU berharap agar para pengurus NU berkonsentrasi pada bidang garapannya, setelah Khittah dan tidak menyibukkan dirinya dengan politik praktis lagi.<sup>266</sup>

Dengan kembalinya Nahdlatul Ulama ke Khittah 1926, berarti secara langsung NU sudah menceraikan dirinya dengan PPP, dan warga NU bebas memilih partai mana saja asalkan berdasarkan hati nuraninya dengan penuh rasa tanggung jawab, sesuai dengan haknya sebagai warga Negara. Dalam butir ke-8 dari Khittah Nahdlatul Ulama menjelaskan:

1. Sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjadi bagian dari keseluruhan bangsa Indonesia, Nahdlatul Ulama senantiasa

---

<sup>265</sup> KH. Ahmad Shiddiq, *Khittah...*, hlm. 10

<sup>266</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

menyatukan diri dengan perjuangan nasional bangsa Indonesia. Nahdlatul Ulama secara sadar mengambil posisi yang aktif dalam proses perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, serta ikut aktif dalam penyusunan UUD 1945 dan perumusan Pancasila sebagai dasar Negara”<sup>267</sup>.

Keberadaan Nahdlatul Ulama yang senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan bangsa, menempatkan Nahdlatul Ulama dan segenap warganya untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur yang diridloi Allah SWT (*Baldatun Thoyyibatun Warobbun Ghofur*). Oleh karena itu, setiap warga Nahdlatul Ulama harus menjadi warga negara yang senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama merupakan bagian tak terpisahkan dari umat Islam Indonesia yang senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan (*ukhuwwah*), toleransi (*tasamuh*), kebersamaan dan hidup berdampingan baik dengan sesama umat Islam maupun sesama warga negara yang mempunyai keyakinan/ agama lain untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis.

Sebagai organisasi yang mempunyai pendidikan, Nahdlatul Ulama senantiasa berusaha secara sadar untuk menciptakan warga negara yang menyadari tentang hak dan kewajibannya terhadap bangsa dan negara.

Nahdlatul Ulama sebagai jam’iyah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan manapun juga. Setiap warga Nahdlatul Ulama adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak-hak politik yang dilindungi oleh Undang-undang. Dalam hal menggunakan hak-hak politiknya warga Nahdlatul Ulama harus menggunakannya secara demokratis dan bertanggung jawab, sehingga dengan demikian dapat ditumbuhkan sikap hidup yang demokratis, konstitusional, taat hukum, dan mampu mengembangkan mekanisme musyawarah dan mufakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama.

Ketika kelompok lain menolak asas Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam bernegara dan berbangsa, maka Nahdlatul Ulama tidak mempertentangkan antara Pancasila sebagai falsafah dan dasar bernegara

---

<sup>267</sup> NU Kembali ke Khittah 1926, 1985, hlm. 120.

dan bermasyarakat dengan Islam sebagai agama, tetapi menempatkan keduanya dalam porsi dan posisinya yang wajar. Nahdlatul Ulama berpandangan dan berkomitmen bahwa Pancasila adalah falsafah dan dasar negara yang sudah disepakati bersama oleh semua pihak ketika negara ini dilahirkan. Sedangkan Islam dipahami sebagai agama, aqidah, syari'at, bukan falsafah. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama menempatkan Pancasila dalam pasal 2 Anggaran Dasarnya sebagai asas organisasi dan Islam menurut paham Ahlussunnah Waljam'ah.

2. Adapun tujuan Nahdlatul Ulama adalah : "Berlakunya ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah Waljam'ah dan mengikuti salah satu madzhab empat di tengah-tengah kehidupan, di dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ".<sup>268</sup>

Kepengurusan Nahdlatul Ulama tercantum dalam Anggaran Dasar pasal 8, yang terdiri atas : Mustasyar, Syuriah, dan Tanfidziyah (ayat 1), Mustasyar adalah Pembina, penasehat, dan pembimbing kegiatan Nahdlatul Ulama, (ayat 2), Syuriah merupakan pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pengelola, pengendali, pengawas, dan penentu kebijakan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. (ayat 3), Tanfidziyah merupakan pelaksana sehari-hari kegiatan Nahdlatul Ulama.

## **B. Aktifitas NU Lombok NTB Pasca Khittah 1926**

Warga Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat menerima dengan suka cita keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Mukhtamar tersebut, karena sudah lama Nahdlatul Ulama NTB tertidur dengan pulas. Dengan khittah 1926 diharapkan bersama dengan NU Wilayah yang lain juga Nahdlatul Ulama NTB kembali bangun dari tidurnya yang nyenyak. Apalagi Mukhtamar yang bersejarah tersebut, banyak dihadiri para tokoh Nahdlatul Ulama baik di tingkat Wilayah maupun cabang, baik sebagai peserta maupun sebagai peninjau bahkan ada yang sebagai penggembara sekalipun. Terlebih lagi salah seorang dari peserta NTB ada yang menjadi anggota tim perumus dalam komisi

---

<sup>268</sup> *Ibid.*, hlm. 123-126

rekomendasi dalam even yang bergengsi tersebut, yaitu Drs. Ahmad Taqiuddin Mansur.<sup>269</sup>

Dengan demikian, Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat sudah berkewajiban untuk mempertahankan, mengamankan, dan melaksanakan keputusan-keputusan muktamar tersebut dengan gembira dan suka cita apapun resikonya. Dalam rangka mengimplementasikan keputusan muktamar tersebut para pengurus yang kebetulan kebanyakan masih merangkap dalam kepengurusan PPP waktu itu mengambil langkah-langkah sebagai berikut: *pertama*, sillaturrahi dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang struktural dan non struktural. *Kedua*, mensosialisaikan hasil muktamar kepada seluruh para jama'ah Nahdlatul Ulama melalui cabang-cabang yang ada. *Ketiga*, menyelenggarakan konferensi Wilayah yang ke-7 untuk menyusun pengurus baru sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama yang diputuskan pada muktamar tersebut.<sup>270</sup>

Beberapa pertemuan yang diselenggarakan waktu itu antara lain di ponpes Manhalul Ulum Praya Lombok Tengah pada tanggal 25 Maret 1986. Hadir dalam pertemuan di Praya waktu itu kebanyakan tokoh-tokoh yang masih aktif dalam PPP, seperti TGH. Anwar, Lalu Muhammad Chatim, BA, Drs. Ahmad Taqiuddin, Syarifudin, dan lain sebagainya.

Sementara tokoh Nahdlatul Ulama yang sudah berafiliasi dengan Golkar dalam hal ini, tidak ada yang hadir, walaupun mereka sudah diundang kecuali Drs. H. Israil, Drs. H. Saiful Muslim, H. Bil'id, dan Drs. Kamaruddin. Nampaknya, mereka masih ragu-ragu saat itu apakah Nahdlatul Ulama betul terlepas dari politik praktis seperti yang diputuskan oleh Muktamar di Situbondo ataukah tidak. Karena di satu sisi pihak yang mengundang juga masih aktif di PPP.

Dalam pertemuan itu penulis dapat merekam pernyataan tentang perkembangan NU NTB waktu itu dari beberapa tokoh Nahdlatul Ulama tersebut, antara lain H. Bil'id MSA., mengatakan,

---

<sup>269</sup> Wawancara dengan TGH. Ahmad Taqiuddin Mansur di Bonder Tanggal 15 Desember 2015.

<sup>270</sup> Rumusan langkah-langkah yang diambil PWNU NTB, setelah NU diputuskan kembali ke Khittah 1926 pada Muktamar ke-27 di Situbondo 1984.

“Sejak dahulu, saya ini tidak pernah keluar dari Nahdlatul Ulama sampai sekarang karena saya sudah dibesarkan oleh Nahdlatul Ulama. Rumah yang saya tempati di Jln. Langko Mataram sekarang adalah karena jasa dari NU dan oleh karena itu silahkan memakainya untuk pertemuan-pertemuan NU, memasang lambang NU, dan dipakai apa saja yang terkait dengan kepentingan NU”.<sup>271</sup>

Itulah pernyataan H. Bil'id MSA. Beliau memang pernah menjadi sekretaris Wilayah NU pada tahun 1960-an, pernah duduk di DPRGR dalam partai Nahdlatul Ulama dan menjadi Anggota Badan Pemerintahan Harian (ABPH) mewakili partai Nahdlatul Ulama.

Sementara Bapak Drs. H. Saiful Muslim mengatakan:

“Saya dari sebelum lahir ke dunia sampai dewasa ini masih tetap di NU dan tidak pernah keluar dari NU. Adapun dahulu saya pernah melepaskan diri dari pengurus NU, karena memang kondisi riil politik yang tidak memungkinkan saya aktif dalam kepengurusan NU. Kalau saya sekarang diminta aktif di NU lagi apakah ada jaminan dari NU melindungi saya dan teman-teman NU yang sekarang aktif menjadi PNS? Ini yang saya khawatirkan dengan teman-teman NU yang aktif menjadi PNS”.<sup>272</sup>

Kondisi Nahdlatul Ulama pada waktu itu belum memiliki Kantor, baik Wilayah maupun Cabang, tidak satu pun yang ada, apalagi Majelis Wakil Cabang dan Ranting. Nahdlatul Ulama rata-rata hanya diurus melalui rumah para pengurusnya, atau di sejumlah madrasah yang kebetulan pengurusnya menjadi pimpinan madrasah tersebut. Kalau mencari pengurus Nahdlatul Ulama atau mengirim surat ke masing-masing pengurus mulai dari PWNU, PCNU, MWC, dan Ranting maka cukup mencari siapa yang memang dikenal populer dari masing-masing pengurusnya, dan mencarinya juga cukup sulit. Demikian juga jika berkirim surat ke pengurus Nahdlatul Ulama waktu itu mengalami kesulitan. Seringkali surat yang terkirim dari Pusat maupun antar PWNU, PCNU, MWC, dan Ranting nyasar ke rumah orang lain. Dalam rangka memudahkan surat menyurat di tingkat wilayah maka di tetapkanlah rumah dinas pengurus Nahdlatul Ulama yang kebetulan

---

<sup>271</sup> Pernyataan H. Bil'id MSA pertemuan yang diselenggarakan dalam rangka sosialisasi khittah NU di ponpes Manhalul Ulum Praya Lombok Tengah pada tanggal 25 Maret 1986.

<sup>272</sup> Pernyataan Bapak Drs. H. Saiful Muslim pertemuan yang diselenggarakan dalam rangka sosialisasi khittah NU di ponpes Manhalul Ulum Praya Lombok Tengah pada tanggal 25 Maret 1986.

masih aktif di PPP waktu itu, yaitu Lalu Muhammad Chatim B.A. di jalan Selaparang Pajang Mataram atau melalui SMA al-Ma'arif jalan Pendidikan No. 6 Mataram, yang secara kebetulan kepala sekolahnya waktu itu adalah Bapak Drs. Ahmad Taqi'uddin Mansur.

Maka menjelang konferensi Wilayah yang ke-7 sekitar tahun 1986 dibuatlah panitia konferwil yang ditunjuk menjadi ketuanya adalah H. Muh. Anwar dan sekretarisnya M. Hirjan Thaif. Sekretariat panitia ditempatkan di rumah dinas Lalu Muh. Chatim, BA. Kadang-kadang di gedung SMA al-Ma'arif, yang terakhir ini lebih mudah dijadikan sekretariat, karena tempatnya di jalan protokol Mataram. Panitia yang lain banyak diambil dari pengurus PMII cabang Mataram yang lebih dahulu konferensi waktu itu. PMII membenahi diri setelah lama tidur dengan nyenyaknya, sekitar 1986 sebelum konferwil NU. Konferensi PMII Cabang Mataram ke-7 berlangsung pembukaannya di gedung Wanita Mataram, dan dibuka oleh Gubernur yang saat itu dijabat oleh Bapak Gatot Suherman. Kemudian terpilih sebagai Pengurus PMII Cabang Mataram waktu itu adalah Drs. Marinah Hardy sebagai ketua umum dan sebagai sekretaris umumnya adalah Drs. Jamiluddin. Pengurus cabang PMII inilah yang sangat *allout* membantu kesuksesan Konferwil NU waktu itu, kemudian dibantu oleh Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor yang masih ada, antara lain Sunaryo, Lalu Putrajap, BA, dan lain sebagainya.

Panitia lalu mengirim surat ke cabang-cabang yang ada di NTB mulai dari lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, dan Bima tentang pelaksanaan Konferwil tersebut dan diminta kepada masing-masing cabang untuk mengutus peserta dan peninjau datang menghadiri konferensi Wilayah ke-7 Nahdlatul Ulama NTB, yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Gatot Suherman dan dihadiri langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang merupakan hasil Muktamar ke-27 di Situbondo, yaitu KH. Abdurahman Wahid, yang pada waktu itu juga memberi kata sambutannya sebelum dibuka secara resmi oleh Gubernur.

Acara pembukaan konferensi wilayah NTB pertama setelah Khittah Nahdlatul Ulama, berlangsung di gedung Wanita Mataram, sementara untuk sidang-sidang komisi dan pemilihan dilakukan di hotel Paradiso Mataram. Maka dalam konferensi wilayah tersebut menghasilkan beberapa keputusan penting. *Pertama*, melakukan penyusunan dan

penetapan kepengurusan NU wilayah NTB dengan terpilihnya TGH. Lalu Muhammad Faisal Praya Lombok Tengah sebagai Rois Syuriah dan TGH. Lalu Zainuddin Manshur MA. Sakra Lombok Timur sebagai ketua Tanfidziyah. *Kedua*, Katib Syuriahnya adalah Syarifuddin, B.A. dan sekretaris Tanfidziyahnya adalah H. Muhammad Anwar. Semua pengurus cabang yang ada, hadir dalam konferensi tersebut. Rata-rata pengurus Wilayah dan Cabang-cabangnya yang ikut konferensi waktu itu adalah tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang masih aktif di PPP, sehingga pengurus NU yang terpilih adalah mayoritas orang-orang PPP dan sangat sedikit sekali dari kalangan PNS.<sup>273</sup>

Saat itu, memang ada semacam kekhawatiran kalau Nahdlatul Ulama itu dipegang oleh kelompok yang dahulu rivalnya dalam politik dalam hal ini orang-orang Golkar sebab ada semacam *issu* kalau Nahdlatul Ulama harus dipimpin oleh mereka, apalagi posisi Golkar sangat kuat dalam perpolitikan nasional saat itu. Dengan demikian, jika kekhawatiran tersebut terjadi maka akan ada gejala intervensi eksekutif di Nahdlatul Ulama, yang berujung kepada ketidakmandirian Nahdlatul Ulama sebagai ormas yang independent sesuai keputusan Mukhtamar ke-27 di Situbondo itu.

Kekhawatiran yang lain, ialah menurut beberapa tokoh Nahdlatul Ulama yang ada di PPP ialah kalau Nahdlatul Ulama dipegang oleh orang-orang yang dahulunya sudah keluar dan loncat pagar meninggalkan Nahdlatul Ulama secara struktural selama bertahun-tahun kemudian datang dan hendak memegang atau memimpin NU. Ibarat sebuah ungkapan bahwa “luka lama walaupun sudah sembuh tetapi bekasnya masih akan ada”. Inilah antara lain yang menyebabkan pengurus Nahdlatul Ulama yang kembali ke Khittah tersebut harus dipegang oleh orang-orang yang berjuang di Nahdlatul Ulama dari sejak masa lahirnya, masa Orde Lama, masa Orde Baru, sampai kembali ke Khittah (1984), bukan dipegang oleh orang-orang yang berseberangan dahulu dengan Nahdlatul Ulama, yaitu orang-orang dahulunya pernah loncat pagar apalagi mereka yang membuat Nahdlatul Ulama tandingan.

Kesan-kesan semacam ini tetap ada dalam benak sebagian tokoh Nahdlatul Ulama. Walaupun sebenarnya keputusan Nahdlatul Ulama kembali ke khittah 1926 adalah bertujuan untuk merekatkan kembali

---

<sup>273</sup> Wawancara dengan Syarifuddin, BA., di Praya Tanggal 23 Februari 2014.

warga Nahdlatul Ulama yang berserakan di mana-mana, dan dalam politik yang berbeda-beda. Namun, bekas perseteruan lama masih ada saja saat itu. Menyatukan warga dalam satu barisan yang utuh seperti satu badan sungguh sangat sulit. Semboyan “Warga Nahdlatul Ulama ada di mana-mana dan Nahdlatul Ulama tidak kemana-mana”, hanya tinggal slogan saja. Hal tersebut menjadi sesuatu yang perlu diperjuangkan keras dan terus-menerus oleh pengurus yang terpilih pada konferensi tersebut. Pengurus yang terpilih dalam konferensi berkewajiban menghidupkan kembali jami’iyah dan jama’ah Nahdlatul Ulama dalam bingkai satu persaudaraan Nahdliyah yang sudah lama terserak-serak karena faktor politik praktis yang sesungguhnya tidak banyak menguntungkan bagi jami’iyah dan jama’ah Nahdlatul Ulama.<sup>274</sup>

Badan-badan otonom Nahdlatul Ulama seperti Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor, IPNU, IPPNU dan lembaga-lembaga lain terutama lembaga pendidikan al-Ma’arif dan ponpes-ponpes yang jumlahnya lebih dari seratus madrasah dan pondok pesantren yang ada diupayakan untuk menyatu dalam satu langkah bersama menuju Nahdlatul Ulama yang cerah dan dinamis demi *Izzul Islam Wal Muslimin* di bumi Nusa Tenggara dan umumnya bumi Nusantara ini.

Sosialisasi Nahdlatul Ulama kembali ke Khittah 1926 sesuai dengan keputusan Mukhtar ke-27 1984 di mana Nahdlatul Ulama NTB mengirimkan duta-dutanya mulai dari Pengurus wilayah, pengurus cabang baik sebagai peserta, peninjau, bahkan sebagai penggembira harus menjadi skala prioritas, sebab selama ini banyak di kalangan warga Nahdlatul Ulama sendiri apalagi bukan warga Nahdlatul Ulama masih mempunyai persepsi bahwa Nahdlatul Ulama adalah PPP, PPP adalah Nahdlatul Ulama dengan melihat kenyataan masih adanya para tokoh Nahdlatul Ulama yang duduk di DPRD Tk I dan DPRD Tk II.

Upaya memisahkan antara entitas Nahdlatul Ulama dan PPP, adalah memang tidak segampang membalik kedua telapak tangan. Namun, paling tidak netralitas Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama yang terpilih dan pengurus tingkat ke bawahnya harus ditampakkan secara *kongkret* di lapangan.

Setiap acara yang dilakukan Nahdlatul Ulama harus melibatkan semua warga Nahdlatul Ulama yang dahulunya masih ragu-ragu dengan

---

<sup>274</sup> *Ibid.*



semboyan kembali ke Khittah 1926. Dalam acara *Lailatul Ijtima'* (Malam Perkumpulan) setiap malam tanggal 15 bulan Hijriah pengurus NU diundang dan diberikan peran misalnya, sebagai penceramah, pemimpin zikir, imam, dan lain sebagainya, melalui kegiatan tersebutlah Khittah 1926 dijelaskan. Dan banyak cara yang lain untuk mensosialisasikan khittah itu. Lobi atau sillaturrahim kepada para pejabat eksekutif Gubernur, Bupati dan lain sebagainya terus dilakukan agar para penentu kebijakan tersebut tidak curiga lagi dengan Nahdlatul Ulama. Dan penentu kebijakan tersebut, dimasukkan sebagai pengurus Nahdlatul Ulama, paling tidak sebagai Mustasyar, dan mengajak isterinya aktif di Muslimat Nahdlatul Ulama, putra-putri beliau aktif di Ansor, Fatayat, IPPNU dan lain sebagainya.

Dengan adanya sosialisasi tersebut, maka ada penjelasan jelas bahwa NU tidak lagi bersama dengan partai PPP murni sebagai *Jam'iyah Diniyah*. Keadaan demikian tentu saja menimbulkan kerugian bagi pihak, yaitu orang-orang Nahdlatul Ulama yang ada di PPP. Sebab pendukung partai ini adalah mayoritas warga Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, terlihat PPP sejak awal banyak mendulang suara di basis-basis yang mayoritas warga Nahdlatul Ulama. Sebagai salah satu contohnya, adalah di kecamatan Praya Barat Lombok Tengah. Selama pemilu tahun 1971, 1977, dan 1982 di kecamatan ini PPP selalu menang. Tetapi ketika NU tidak lagi bersama mendukung PPP, dan warga Nahdlatul Ulama bebas memilih partai mana saja apalagi Golkar, maka suara PPP kalah dengan Golkar.<sup>275</sup>

Terbukti, pada pemilu 1987, kursi PPP di DPRD Tk II Lombok Tengah berkurang drastis dari 12 kursi menjadi 4 kursi, begitu juga di DPRD Tk I. Pada waktu itulah NU Lombok betul-betul menunjukkan kemurniannya dalam khittah bahwa Nahdlatul Ulama tidak terikat parpol manapun apalagi PPP. Sikap salah satu tokoh kharismatik, yaitu TGH. Lalu Muhammad Faisal sesudah NU kembali ke Khittah 1926. Sikap independent beliau sebagaimana amanat NU setelah NU kembali ke Khittah 1926 tercermin pada pemilu 1992. Kedua puteranya, H. Lalu Muhammad Zaki, BA. berkiprah di Golkar sebagai Anggota DPRD Tingkat II Lombok Tengah dan Lalu Muhammad Hadi Faisal,

---

<sup>275</sup> Wawancara dengan TGH. Ahmad Taquiuddin Mansur, di Bonder Tanggal 15 Desember 2015.

SH. berkiprah di PPP sebagai Anggota DPRD Tingkat I Nusa Tenggara Barat.<sup>276</sup>

Warga Nahdlatul Ulama dianjurkan memilih partai yang bermanfaat bagi jam'iyah dan jama'ah Nahdliyyin sendiri. Dalam hal ini, Golkar pandai mengambil peluang dengan mengambil hati para tokoh Nahdlatul Ulama yang tidak berpartai. Pemerintah melalui Departemen Agama memberikan rehab bangunan madrasah-madrasah yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama di beberapa Cabang dan Majelis Wakil Cabang yang dahulu sebelum khittah 1926 madrasah-madrasah tersebut terbengkalai, tidak terurus dengan baik karena mereka tidak mendukung Golkar. Sejumlah madrasah tersebut kemudian dihidupkan kembali, dan diberi fasilitas yang memadai. Ketika menjelang pemilu 1987 banyak para tokoh Nahdlatul Ulama terjun kampanye memenangkan Golkar terutama oleh tokoh Nahdlatul Ulama yang sangat kecewa dengan kebijakan PPP di bawah Naro yang otoriter yang justru banyak merugikan Nahdlatul Ulama sebagai pendukung yang mayoritas, meski ada tokoh Nahdlatul Ulama yang banyak diuntungkan Naro sehingga mereka tetap berada di PPP.<sup>277</sup>

Pengaruh pengembosan yang dilakukan oleh para tokoh Nahdlatul Ulama kepada PPP pada pemilu tahun 1987 ternyata membuat kemerosotan suara PPP di tingkat nasional termasuk di NTB, misalnya DPRD Tk II Lombok Tengah PPP hanya mendapat 4 kursi saja kehilangan 8 kursi yang pada tahun 1982 mereka mendulang 12 kursi. 8 kursi tersebut jelas berasal dari Nahdlatul Ulama yang secara terang-terangan menyatakan diri keluar dari PPP dan warga Nahdlatul Ulama diminta masuk ke Golkar, karena Golkarlah yang lebih bermanfaat bagi Nahdlatul Ulama dari pada PPP. Apalagi adanya sumbangan yang diberikan oleh pemerintah kepada madrasah-madrasah Nahdlatul Ulama yang dahulunya hidup enggan mati tak mau, sehingga pada gilirannya kemudian dapat membangkitkan semangat para warga Nahdlatul Ulama untuk menghidupkan kembali organisasi kesayangannya yang sudah lama tenggelam dan tertidur lelap.

Sebagian orang-orang Nahdlatul Ulama yang dahulunya menyembunyikan ke-NU-annya maka secara terang-terangan mengaku

---

<sup>276</sup> Nasri Anggara, *Politik Tuan Guru, Sketsa Biografi TGH. Lalu Muhammad Faisal dan peranannya mengembangkan NU di Lombok*, hlm. 156.

<sup>277</sup> Wawancara dengan Syarifuddin, BA., di Praya Tanggal 23 Februari 2014.

diri sebagai warga Nahdlatul Ulama dan aktif menghadiri even-even yang diselenggarakan Nahdlatul Ulama. Madrasah atau ponpes yang dahulunya menjauh dari Nahdlatul Ulama siap ditempati sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama, seperti konferensi, bahsul masail dan lain sebagainya. Orang-orang Nahdlatul Ulama yang ada di birokrasi, ada yang bersedia menjadi pengurus Nahdlatul Ulama baik ditingkat Wilayah, Cabang, bahkan di tingkat Majelis Wakil Cabang, bahkan di lembaga-lembaga Nahdlatul Ulama. Pelatihan-pelatihan kader yang difasilitasi oleh Lajnah Kajian dan Pengembangan sumber Daya Manusia (Lakspesdam) Nahdlatul Ulama dilakukan misalnya di hotel Nusantara II Mataram, yang dihadiri oleh PBNU seperti KH. Sahal Mahfudh, Drs. Tosari Wijaya, Arif Mudatstsir dan lain-lain dalam rangka sosialisasi khittah. Dengan adanya pelatihan kader oleh Lakspesdam Nahdlatul Ulama Pusat yang bekerjasama dengan PWNU NTB yang baru dibentuk pengurusnya ini, maka diharapkan Nahdlatul Ulama di daerah atau Cabang-cabang dapat bergerak menghidupkan kembali girah di tingkat Cabang, MWC, dan Ranting, termasuk juga di kalangan Badan Otonom Nahdlatul Ulama seperti Muslimat, Ansor, Fatayat, IPNU, IPPNU, dan PMII walaupun terakhir ini memang secara organisatoris tidak terikat dengan Nahdlatul Ulama lagi, tetapi rata-rata aktifis PMII adalah anak-anak Nahdlatul Ulama demikian juga para pembinanya.<sup>278</sup>

Fatayat kemudian melakukan konferensi wilayah yang pertama sesudah khittah 26 di Gedung Wanita Mataram yang dihadiri oleh Pengurus Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama waktu itu, yaitu Ibu Mahfudhah Ali Ubaid. Dalam konferensi tersebut, Dra. Malichah Taquiuddin Mansur terpilih menjadi ketua, dan Sofiah Syakban sebagai sekretarisnya. Fatayat bergerak maju lebih pesat lagi karena banom ini dipercaya untuk melakukan gerakan kesehatan ibu dan anak karena tingkat kematian ibu dan anak sangat tinggi di NTB. Pelatihan motivator kesehatan ibu dan anak oleh Fatayat bekerjasama dengan Unicef terus dilakukan. Hasil pelatihan ini sangat diharapkan dapat menggerakkan roda organisasi Fatayat di tingkat Cabang dan di bawahnya. Demikian juga PMII, sementara Ansor masih berjalan di tempat belum mempunyai pengurus yang difintif. Setelah konferensi barulah Ansor mulai bangun dari tidurnya, tetapi tidak segecit Fatayat. Pendataan madrasah dan

---

<sup>278</sup> Wawancara dengan TGH. Ahmad Taquiuddin Mansur, di Bonder Tanggal 15 Desember 2015.

ponpes Nahdlatul Ulama terus dilakukan dengan disponsori kepala SMA al-Ma'arif waktu itu, Drs. Ahmad Taquiuddin, Fatayat, dan kerjasama dengan Unicef.

Melalui pendataan tersebut diketahui jelas mana sekolah, madrasah, atau ponpes yang masih Nahdlatul Ulama atau tidak. Melalui proses pendataan ini kemudian ditemukan data sekitar 100 madrasah atau ponpes yang masih mau bergabung dengan Nahdlatul Ulama.<sup>279</sup>

Tentang lembaga pendidikan di Nahdlatul Ulama memang berbeda dengan di NW atau Muhammadiyah. Pendidikan di Nahdlatul Ulama lebih bersifat otonom desentralistik. Tidak dikelola langsung oleh Nahdlatul Ulama, tetapi dikelola oleh yayasan yang tidak terlalu terikat dengan Nahdlatul Ulama secara organisasi. Pendidikan atau ponpes itu adalah milik Tuan guru yang menjadi orang Nahdlatul Ulama atau pengurus Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikannya diserahkan kepada mereka. Nahdlatul Ulama hanya mengkoordinir saja. Memang ada lembaga pendidikan yang dikelola langsung oleh al-Ma'arif karena tanahnya diwakafkan langsung kepada Nahdlatul Ulama, tetapi ini sedikit. Adapun yang banyak adalah yang bergabung atau bernaung di bawah Bintang Sembilan saja. Pendidikan di Nahdlatul Ulama lebih banyak dibangun berdasarkan kehendak warga Nahdlatul Ulama sendiri di daerah itu, bukan dibangun oleh pengurus struktural formal Nahdlatul Ulama, karenanya lambangnya pun ada yang berbintang Sembilan, dan ada yang tidak. Ini memang menjadi persoalan mestinya segera ditata oleh Nahdlatul Ulama, memang ponpes Nahdlatul Ulama kebanyakan milik keluarga tuan guru yang kebetulan menjadi orang Nahdlatul Ulama saja. Namun, mereka lebih senang *yaktumuna NU hum* dari pada *yu'linuna NU hum*.

Sekitar tahun 1986 beberapa Cabang Nahdlatul Ulama di Kabupaten melakukan pembaharuan pengurus, ada yang melalui konferensi dan ada yang tidak, cukup dengan mengundang beberapa tokoh Nahdlatul Ulama yang ada di daerah itu, kemudian disusun pengurus baru. Cabang yang melakukan konferensi waktu itu, antara lain Cabang Nahdlatul Ulama Lombok Tengah dan Lombok Barat. Konferensi Nahdlatul Ulama Lombok Tengah menghasilkan pengurusnya yang baru, yaitu: Dewan Mustasyar Haji Lalu Hasyim (Datu Tuan), Tuan

---

<sup>279</sup> Wawancara dengan Dra. Malichah Taquiuddin Mansur, di Bonder Tanggal 15 Desember 2015.

Guru Haji Lalu Muhammad Faisal, dll. Dewan Syuriah dipimpin oleh TGH. Lalu Muhammad Alwi sebagai Rois dan wakil Roisnya adalah TGH. Lalu Khairi Adnan, Ust. Lalu Bukran, Katibnya dipegang oleh Ust. H. Husni. Dewan Tanfidziyah diisi oleh Drs. Lalu Suparlan sebagai ketuanya, dan Drs. Lalu Zulkarnain sebagai wakilnya. sementara sekretarisnya adalah Hirjan Thauf.<sup>280</sup>

Dalam penataan kembali organisasi Nahdlatul Ulama dan banomnya cukup mengalami kesulitan mencari siapa seharusnya yang duduk berada di banom-banomnya karena banyak warga Nahdlatul Ulama tidak tahu bagaimana mengurus organisasi Nahdlatul Ulama setelah lama tertidur pulas. Pengurus mencoba menghidupkan kembali al-Ma'arifnya melalui lembaga Pendidikan al-Ma'arif yang ada di jalan Pendidikan yang masih sebagai Kepala SMA nya Drs. Ahmad Taqiudin waktu itu, beliau dengan kiat-kiatnya mencoba memperbaiki lembaga ini dengan memasukkan pendidikan Aswaja sebagai mata pelajaran pokok. Stempel SMA yang dahulunya masih apa adanya diganti dengan stempel baru yang ada bintang sembilan, bola dunia, dan talinya. Setiap ada berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama atau ponpes Nahdlatul Ulama, kegiatan banomnya walaupun dalam skala kecil dimasukkan di koran Suara Nusa (Lombok Pos sekarang) dan RRI Mataram sehingga Nahdlatul Ulama kelihatan hidup, sehingga Nahdlatul Ulama dikenal orang bahwa NU di NTB tidak mati. Ciri-ciri Nahdlatul Ulama seperti Sholawat Badar dan kata-kata *Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq* dalam setiap akhir pidato selalu diupayakan dibaca. Dahulu, kata-kata ini sangat asing didengar oleh orang. SMA al-Ma'arif diupayakan menjadi sekolah unggulan Nahdlatul Ulama di kota Mataram untuk pendidikan swasta. Sehingga dapat berjalan sejajar dengan SMA Muhammadiyah, SMA Katolik dan SMA NW. Karena SMA ini cukup membanggakan warga Nahdlatul Ulama. Siswa-siswi yang tertampung sudah mencapai kelas paralel dengan jumlah 13 kelas keseluruhan saat itu.<sup>281</sup>

Lembaga pendidikan al-Ma'arif kemudian mencoba mendirikan Perguruan Tinggi yang bernama STIT al-Ma'arif diresmikan oleh Pengurus Wilayah dan dihadiri oleh Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Mataram Bapak Drs. H. Muhammad Saleh waktu itu yang

---

<sup>280</sup> Pengurus Cabang NU Lombok Tengah setelah NU Khittah 1926.

<sup>281</sup> Wawancara dengan TGH. Ahmad Taqiuddin Mansurdi Bonder Tanggal 15 Desember 2015.

dikelola langsung oleh Yayasan Pendidikan al-Ma'arif yang ditunjuk sebagai Ketua STIT waktu itu adalah bapak Drs. Ahmad Taquiuddin. Perjalanan STIT al- Ma'arif, meski baru cukup membanggakan saat itu sekitar 50 orang mahasiswa baru dapat terjaring. Urusan administrasinya pernah diupayakan mendapat izin operasional dari Kopertais IV Surabaya di mana Pengurus Yayasannya langsung mengurusnya ke Surabaya, akan tetapi perjuangan ini tidak dilanjutkan terus, sehingga akhirnya mati secara pelan-pelan. Padahal tenaga potensialnya cukup banyak dan rata-rata berkiprah di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Mataram (IAIN Mataram saat ini) dan lain sebagainya.

Penulis dua kali ditanya oleh sekretaris Kopertais IV Surabaya Bapak Drs. Hasan Basri yang secara kebetulan beliau teman penulis kuliah di UNHASY Jombang dan di Fakultas Dakwah IAIN Surabaya, *pertama* pertanyaan beliau kepada penulis ketika kuliah di Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga yang kebetulan waktu itu beliau sedang mendampingi Rektor IAIN Surabaya, Bapak Drs. H. Basri Afandi MA. yang sedang ujian Doktornya. Apa sebabnya STIT al-Ma'arif itu tidak lagi mengurus status izin operasionalnya mumpung saya ada di Kopertais IV Surabaya katanya dan mudah sekali sebenarnya untuk mengurusnya. *Kedua*, dan beliau juga bertanya kepada penulis lagi ketika beliau sedang mengawasi Ujian negara STIS (Sekolah tinggi Ilmu Syariah) Mataram yang waktu itu penulis juga menjadi salah seorang panitia lokalnya.<sup>282</sup>

Kendala dalam pengurusan STIT al-Ma'arif waktu itu adalah pihak Yayasan yang terbentur dengan masalah finansial. Para dosen yang mengajar di STIT al-Ma'arif ini adalah aktifis Nahdlatul Ulama yang sementara tidak minta bayaran apa-apa dari pihak Yayasan, yang penting STIT al-Ma'arif ini maju dan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan yang lain di NTB. Padahal para kadernya di beberapa Perguruan Tinggi di Mataram cukup banyak, apalagi di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Mataram waktu itu (IAIN Mataram saat ini). Di sisi lain, memang ada STIT Sunan Giri di kota Bima NTB yang sudah lama berjalan yang merupakan afilial UNSURI Surabaya. Namun, karena kota Bima bukan pusat kota propinsi belum dianggap menjadi representasi Pendidikan NU di propinsi NTB. Ada juga yang lain, yaitu STIT Uswatun Hasanah Cempaka Putih di Mantang Lombok Tengah yang diasuh oleh tokoh NU, yaitu TGH. L. Ibrahim Thoyyib. Tetapi

---

<sup>282</sup> Drs. H. Lalu Sohimun Faisal saat menjadi dosen STIT Al-Ma'arif.

oleh Kopertais IV Surabaya dianggap belum layak didirikan karena lokasinya jauh dari kota dan tempatnya sulit dijangkau para dosen yang mengajar ketika itu, sehingga ini pun juga mati pelan-pelan.

Muslimat Nahdlatul Ulama pun juga tidak ketinggalan mulai hidup, pengurus disusun walaupun tidak melalui konferensi tetapi hanya dengan melalui musyawarah terbatas dengan mengundang beberapa orang dan beberapa tokoh saja. Dalam musyawarah terbatas tersebut, dihasilkan sebuah keputusan tentang susunan kepengurusannya, yaitu Ibu Dra. Hj. Sri Banun Muslim sebagai ketua Muslimat NTB. Ketika beliau menjadi Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama ada semacam ganjalan dari pihak birokrasi atasan tempat beliau bekerja waktu itu, sebagai kepala sekolah di kota Mataram. Ada sebuah kecurigaan masih bersemi dalam hati sebagian para birokrat di daerah ini yang menganggap bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah masih berpolitik praktis. Karena itu beliau menjelaskan bahwa Nahdlatul Ulama itu bukan parpol atau masih terikat dan bergabung dengan PPP. Nahdlatul Ulama itu bebas dari parpol manapun, Nahdlatul Ulama itu independent. Setelah dijelaskan baru mereka mengerti dan mempersilahkan beliau aktif di Muslimat Nahdlatul Ulama dengan syarat tidak boleh meninggalkan tugasnya sebagai PNS.

Perjuangan Muslimat membentuk cabang-cabang dan berupaya mempunyai sebuah kegiatan pendidikan taman kanak-kanak dan akhirnya atas usaha ulet beliau Muslimat dapat membeli sebidang tanah di belakang kantor lurah Dasan Agung atas sumbangan gubernur Warsito ditambah dengan uang dari donatur yang lain. Fatayat juga tidak ketinggalan membangun TK (Taman kanak-kanak) di beberapa tempat di daerah, seperti di Sekarbela Mataram dan Kabar Lombok Timur.<sup>283</sup>

Selanjutnya PMII bergerak maju masuk membentuk komisariat di kampus-kampus yang ada. Sahabat-sahabat PMII sangat diharapkan oleh Nahdlatul Ulama menjadi ujung tombak gerakan Nahdlatul Ulama di NTB yang berpusat di gedung al-Ma'arif Jln. Pendidikan 6 Mataram. Sahabat-sahabat PMII tetap melakukan kegiatan dalam rangka membantu Nahdlatul Ulama sesuai dengan segala kondisi yang ada. Sahabat-sahabat alumni PMII banyak dimanfaatkan sebagai pengurus

---

<sup>283</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. Hj. Sri Banun Muslim di Mataram Tanggal 1 Desember 2015



pada Banom-Banom Nahdlatul Ulama yang ada, seperti di Fatayat, IPNU, IPPNU dan Ansor dan lain sebagainya. Bahkan sebagian menjadi pengurus di Nahdlatul Ulama sendiri terutama di bagian Tanfidziyah, seperti sahabat Drs. Marinah Hardi, Drs. Jamiluddin dan lain sebagainya. Rekrutmen sebagai pengurus Nahdlatul Ulama dan banom-banomnya banyak didominasi oleh kader-kader yang berasal dari aktifis PMII. Kiprah mereka dalam menghidupkan kembali jami'yyah Nahdlatul Ulama yang sudah lama terpuruk dalam segala sektor kehidupan adalah dapat diandalkan, walaupun ada suara-suara dari tokoh-tokoh tua yang kurang berkenan. Namun, mereka pun tak mampu mencari solusinya.

Kegiatan anak muda Nahdlatul Ulama yang digerakkan oleh PMII ini dipusatkan di gedung PWNU Jalan Pendidikan 6 Mataram, yang secara kebetulan Kepala SMA Ma'arif waktu itu adalah tokoh muda Nahdlatul Ulama yang mengalami pahit getirnya NU, dan dibantu oleh sahabat-sahabat yang lain dengan segala keterbatasannya baik dari segi finansialnya maupun mentalnya. Yang penting waktu itu Nahdlatul Ulama berjalan apa adanya, orang tahu bahwa Nahdlatul Ulama NTB tetap hidup walaupun dalam kondisi terengah-engah.<sup>284</sup>

Organisasi Nahdlatul Ulama tidak mempunyai dana untuk menghidupkan dirinya sendiri apalagi membangun kantor sebagai pusat sekretariat. Semua biaya sering dipikul oleh keikhlasan beberapa orang sajudan inipun sangat minim. Kalau ada kegiatan formal, lalu panitia membuat proposal mencoba mencari dana dari Pemerintah daerah walaupun minim dapat juga, sehingga ada kesan Nahdlatul Ulama adalah organisasi pengemis. Walaupun mungkin banyak orang-orang Nahdlatul Ulama yang bahkan dahulunya hidup lewat Nahdlatul Ulama menjadi pejabat, anggota DPR, dan lain sebagainya adalah namun sangat sulit untuk diharapkan membantu. Fatayat dan Muslimat memang dapat bergerak karena mendapat suntikan dana karena adanya program kesehatan ibu dan anak dari pemerintah dan Unicef, tetapi ketika proyek itu tidak ada aktifitas mereka juga terhenti. Ansor pun walaupun ada pengurusnya, kegiatannya hampir dikatakan mandul. Pihak pengurus belum ada upaya maksimal bagaimana Nahdlatul Ulama dapat dana, sehingga dalam menjalankan roda organisasi tidak terjadi kemandekan.

---

<sup>284</sup> Wawancara dengan Drs. H. Jamiludin, di Mataram Tanggal 2 Oktober 2015.



Kegiatan Syuriah memang tetap berjalan normal. Karena Syuriah rata-rata da'i dan mempunyai ponpes yang dikelolanya sendiri dan mempunyai jama'ah rutin di setiap desa dan kota. Jama'ah itulah yang membiayai pengajian itu. Kalau ada kegiatan bahtsul masail misalnya. Syuriah cukup mengadakannya di ponpesnya saja atau di ponpes yang ditunjuk, sehingga biayanya pun banyak ditanggung oleh ponpes itu, tanpa ada bantuan dari organisasi. Inilah problem yang dihadapi Nahdlatul Ulama setelah lepas dari politik praktis. Kegiatan *lailatul ijtima'* pun juga demikian. Sering ditempatkan di rumah pengurus, Masjid, dan ponpes yang biayanya juga dari orang yang ditempati. Kebetulan tokoh yang bersedia ditempati itu sedang punya hajatan. Maka pengurus Nahdlatul Ulama numpang pada hajatan mereka dan atas biaya dari jama'ah NU setempat. Sebenarnya Nahdlatul Ulama tidak kehabisan akal untuk melakukan kegiatan-kegiatan organisasi yang tidak perlu banyak mengeluarkan dana dari organisasi asalkan pengurus mau melakukannya. Misalkan saja pada acara PHBI yang diselenggarakan warga Nahdliyyin. Di acara itu pengurus Nahdlatul Ulama bisa numpang membentuk pengurus MWC, Pengurus ranting, bahkan pengurus banom-banomnya. Tetapi ini semua jarang dilakukan.

Pengurusan Nahdlatul Ulama sebenarnya tidak perlu terlalu formal, sesuai AD ART nya, tetapi bisa diurus dengan cara non formal. Pengurus Nahdlatul Ulama jangan malu-malu mengatakan di muka jama'ah Nahdlatul Ulama, bahwa NU itu hidup adalah karena jama'ahnya bukan karena pengurusnya semata. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kegiatan rutin *Lailatul Ijtima'* NU (LAINU) Bonder yang dikelola oleh ponpes Ta'limush Shibyan. Kegiatan seperti ini terus berjalan sampai sekarang. Kegiatan ini dimulai sejak al-Maghfurullah TGH. Mansur Abbas membentuk Nahdlatul Ulama melalui lembaga pendidikannya di daerah ini tahun 1955, yang disahkan langsung oleh ketua Syuriah Pengurus Partai NU NTB waktu itu, yaitu al-Maghfurullah TGH. M. Shaleh Hambali Bengkel. Kegiatan LAINU seolah-olah menjadi fardhu 'ain masyarakat setempat. Karena itu kegiatan Nahdlatul Ulama di daerah ini menjadi tetap hidup sampai sekarang.<sup>285</sup>

Dari hasil LAINU inilah maka ponpes ini terus berkembang sampai saat ini. Bisa saja *Lailatul Ijtima'* dilakukan di siang hari (*Naharul Ijtima'*)

---

<sup>285</sup> Wawancara dengan TGH. Ahmad Taquiuddin Mansur di Bonder Tanggal 15 Desember 2015.

karena kondisi keamanan setempat. Kegiatan Lailatul Ijtima' pun hidup di tempat atau daerah-daerah lain, seperti Desa Pengembur lain sebagainya.<sup>286</sup> Ini patut menjadi perhatian Pengurus Nahdlatul Ulama baik Tanfidziyah maupun Syuriahnya. Dan patut untuk direnungkan bahwa mengurus Nahdlatul Ulama sama dengan bersedekah dan beramal jariyah, mengembangkan amal para ulama yang telah menggagasnya dahulu. Para ulama tersebut juga tentunya membentuk Nahdlatul Ulama pun justru karena melihat bahwa mengurus orang banyak (umat) adalah amal jariyah yang paling mulia.

Banyak orang yang menjadi besar karena dia aktif secara ikhlas di Nahdlatul Ulama. Dan banyak juga orang menjadi kerdil ditelan masa karena ketika mengurus Nahdlatul Ulama itu lebih banyak dihidupi Nahdlatul Ulama dari pada dia menghidupi Nahdlatul Ulama.

Pada tanggal 16-18 Pebruari 1991 NU menyelenggarakan konferensi Wilayah ke II sesudah khittah di Gedung milik Departemen Transmigrasi (Transito) Pancor Lombok Timur. Sebelumnya konferensi dibuka di lapangan Masbagik oleh Gubernur Warsito waktu itu. Dari PBNU yang hadir adalah Bapak KH. Hafiz Usman. Panitia memilih lapangan Masbagik sebagai tempat pembukaan dengan harapan agar warga Masbagik yang dahulunya merupakan basis utama Nahdlatul Ulama di Lombok Timur dapat mengahdirinya, apalagi juga dimeriahkan oleh kecimol Ansor Masbagik yang keliling kota. Tetapi sayang warga Nahdlatul Ulama tidak banyak yang mengahdiri acara yang sangat penting itu. Di tribun saja tidak penuh orang yang hadir apalagi di tengah lapangan yang sangat luas itu. Memang Masbagik waktu itu masih kuat Rabithahnya dari pada NU-nya. Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama zaman 1960-an yang banyak berasal dari kota ini, seperti TGH. Akhsid Muzhar saja tidak hadir apalagi yang lain.<sup>287</sup>

Menurut janji pengurus cabang Nahdlatul Ulama setempat kepada panitia, kalau pembukaan konferensi dilaksanakan di lapangan Masbagik maka lapangan akan penuh sesak dengan warga NU-nya. Ternyata jauh dari kenyataan. Nampaknya warga Nahdlatul Ulama setempat masih menganggap Nahdlatul Ulama itu PPP atau masih parpol, jadi tak perlu ikut hadir di konferensi. Apalagi yang menjadi panitia dan Pengurus Wilayah NU-nya adalah bekas lawan politik dahulu semasih di parpol Golkar. walaupun begitu konferensi tetap berjalan dengan

---

<sup>286</sup> *Ibid.*

<sup>287</sup> TGH. Lalu Ahmad Munir, *Wawancara*, di Tanak Awu tanggal 24 September 2015.

baik. Arena sidang diselenggarakan di kantor Transito Transmigrasi di Pancor. Pengurus yang terpilih waktu itu adalah sebagai Rois Syuriah TGH. Lalu Muhammad Faisal dengan Katib Syuriahnya Syarifuddin, BA., sementara Ketua Tanfidziyah yang terpilih adalah Drs. Hasan Usman dengan sekretarisnya Drs. Syakban. Drs. Hasan Usman waktu itu merupakan asisten I Gubernur dan Drs. Syakban adalah pegawai Kanwil Depag. Memang ada sebagian peserta menginginkan agar Drs. H. Saiful Muslim atau Drs. H. Israil yang menjadi Ketua. Tetapi karena ini adalah pesanan eksekutif menurut sebagian informasi, maka dipilihlah Drs. Hasan Usman sebagai Ketua demi memperkuat kesan bahwa Nahdlatul Ulama tidak lagi bagian dari PPP, dan demi memperkuat posisi Nahdlatul Ulama di jajaran birokrasi. Dan oleh sebagian tokoh diharapkan dapat mengembalikan tanah al-Ma'arif itu menjadi hak penuh dari Nahdlatul Ulama, bukan sebagai hak guna pakai lagi dan juga dalam rangka merajut kembali warga NU yang berserakan di mana-mana, dengan demikian kesan bahwa Nahdlatul Ulama itu masih bagian dari parpol sedikit demi sedikit menjadi hilang. Dan banyak lagi alasan-alasan mengapa konferensi memilih Drs. Hasan Usman sebagai Ketua dan Drs. Syakban sebagai sekretaris. (Pengurus lengkap lihat lampiran).<sup>288</sup>

Dalam pengurus yang baru ini sudah mulai bermunculan tokoh-tokoh yang berbeda partai, termasuk juga dari kalangan muda NU. Tokoh-tokoh yang sudah lama tidak berkiprah di Nahdlatul Ulama secara struktural, dapat menjadi pengurus baik di tingkat Mustasyar, seperti KH. Ahmad Usman, di tingkat Syuriah Drs. H. Israil, Drs. Lalu Sahnun Faisal (Drs. H. L. Sohimun Faisal M.A, penulis sendiri), Tanfidziyah, seperti Bil'id MS. A, Drs. Marinah Hardi, Lalu Putrajap B.A., sedang dalam A'wan (anggota, pembantu) Drs. Ahmad Taquiuddin Mansur dan lain-lain. Namun tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang dahulunya pernah rival dalam politik di awal Orde Baru, seperti TGH. Akhsyid Muzhar, TGH. Ibrahim al-Khalidi dan lain sebagainya belum dapat dimasukkan. Tetapi dalam banyak kegiatan di banom-banom yang ada, para alumni pondok pesantrennya, para murid-murid beliau dan lain sebagainya dari mereka sudah mulai banyak yang aktif, terutama dalam kegiatan Ansor, Fatayat, dan PMII.<sup>289</sup>

---

<sup>288</sup> Prof. Drs. H. Saiful Muslim, MM. *Wawancara*, Di Mataram Tanggal 1 Desember 2015

<sup>289</sup> Drs. H. Ahmad Taquiuddin Mansur, M.Pd. I, *Wawancara*, di Bonder Tanggal 15 Desember

# BAB VIII

## DINAMIKA INTERNAL NU PASCA KHITTAH 1926

### A. Dinamika Internal NU Pasca Khittah

PERASAAN RAGU-RAGU dan tidak percaya mungkin dirasakan oleh siapaun yang pernah melewati gelombang kehidupan yang pluktuatif. Demikian juga Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi keagamaan terbesar Islam di Republik tercinta ini, bahkan dunia. Sebagai organisasi dakwah, sosial keagamaan yang kemudian bermetamorfosis menjadi partai politik, yang pada akhirnya kembali lagi menjadi jati diri yang sebenarnya yaitu ormas keagamaan, sulit bagi kader Nahdlatul Ulama menjaga keseimbangan seperti sedia kala. Karena semua orang tahu bahwa Nahdlatul Ulama memiliki jutaan massa yang menjadi magnet bagi siapapun yang memperoleh kekuasaan.

Kembalinya Nahdlatul Ulama ke Khittah 1926 menimbulkan berbagai penafsiran dikalangan intern dan ekstern kader dan pengurus Nahdlatul Ulama. Sebagian tokoh internal Nahdlatul Ulama memahami Khittah 1926 sebagai sebuah paradigma bahwa Nahdlatul Ulama itu terlepas dari politik seutuhnya dan termasuk bukan bagian dari PPP lagi. Sehingga ada slogan yang populis dikalangan Nahdlatul Ulama bukan PPP, dan PPP bukan Nahdlatul Ulama. Seolah-olah warganya tidak boleh lagi aktif di PPP. Padahal makna Khittah tidak sekedar makna bebas parpol tertentu saja melainkan warga Nahdlatul Ulama bebas aktif memilih parpol mana saja yang diinginkan asalkan pilihannya dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan etika tanpa mengorbankan Nahdlatul Ulama secara kelembagaan.

Menurut KH Abdurrahman Wahid pemahaman warga Nahdlatul Ulama dalam memaknai kembalinya Nahdlatul Ulama ke Khittah 1926 dibagi dalam tiga kelompok :

*Pertama*, kelompok Khittah murni, yakni warga Nahdlatul Ulama yang di dalam menjelaskan dan mengamalkan Khittah 1926 benar-benar dijelaskan dan diamalkan secara murni dan utuh, tanpa mengurangi, tanpa ada bagian-bagian yang ditutup-tutupi, serta tanpa ada penambahan dengan boncengan yang diwarnai oleh kepentingan pribadi berasaskan prinsip keterbukaan.

*Kedua*, kelompok Khittah plus, yaitu warga Nahdlatul Ulama yang dalam menjelaskan dan mengamalkan Khittah dilakukan secara berlebihan, misalnya membuat larangan terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak dilarang dalam Khittah 1926.

*Ketiga*, kelompok Khittah minus, yakni warga Nahdlatul Ulama yang di dalam menjelaskan dan mengamalkan Khittah 1926 secara tidak utuh, masih ada yang ditutup-tutupi, yang kemungkinan disebabkan oleh karena jika menjelaskannya secara utuh akan merugikan kepentingan pribadinya.<sup>290</sup>

Adanya kelompok-kelompok ini merefleksikan ketegangan intern Nahdlatul Ulama tersendiri. Mereka yang tergolong tokoh dalam faksi politisi Nahdlatul Ulama umumnya termasuk dalam kelompok kedua dan ketiga. Ini mulai terlihat dengan adanya keinginan sebagian tokoh Nahdlatul Ulama untuk membawa Nahdlatul Ulama kembali ke kancah politik praktis, dunia yang secara Khittah sudah resmi ditinggalkan. Para tokoh yang dalam kelompok ini umumnya mereka yang kecewa terhadap PPP dan kepemimpinan K.H Idham Chalid. Kelompok inilah yang banyak menggembosi PPP dalam kampanye menjelang pemilu 1987, mengajak warga Nahdlatul Ulama masuk Golkar, karena di Golkar lebih menjanjikan dari pada di PPP. Seperti antara lain, bantuan dalam rehabilitasi sekolah, madrasah, dan lain-lain.

Sementara pada kelompok yang pertama tidak terjadi. Dia menjaga jarak dengan parpol atau orsospol manapun. Tetapi kelompok ini tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kelompok kedua dan ketiga, karena yang dilakukan oleh kelompok ini merupakan hak politik pribadi masing-

---

<sup>290</sup> Ida, Laode. *Anatomi Konflik, NU, Elit Islam dan Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996). hlm. 19.

masing, yang penting melakukannya dengan penuh tanggungjawab dan tidak merugikan Nahdlatul Ulama secara kelembagaan. Apalagi mereka yang mengembosi PPP itu adalah tokoh Nahdlatul Ulama yang secara kebetulan mendapat bantuan rehab berat madrasah atau ponpes yang dikelolanya, yang selama ini tidak pernah dinikmatinya. Warga Nahdlatul Ulama itu bebas berpolitik sesuai dengan hati nuraninya masing-masing, tanpa dipaksa oleh siapapun. Dengan demikian ada manfaat yang diterima demi kemajuan lembaga yang dikelolanya bukan semata-mata keuntungan pribadi lebih-lebih asas semua orsospol yang ada baik Golkar, PPP, dan PDI adalah sama, yaitu asas Pancasila.

Memilih sebuah partai lebih mengutamakan asas manfaat dari sekedar menusuk sebuah partai. Tidak ada kewajiban menurut syariat Islam untuk bergabung dengan partai tertentu, walaupun secara historis parpol itu ikut dibidani oleh Nahdlatul Ulama, bahkan Nahdlatul Ulama sangat berperan dalam partai tersebut. Silahkan saja warga Nahdlatul Ulamaterlibat aktif dalam partai manapun, selagi partai itu bermanfaat bagi warga dan disesuaikan dengan kondisi setempat di mana warga Nahdlatul Ulama itu berada, yang penting Nahdlatul Ulama tidak kemana-mana, tapi warga ada di mana-mana, seperti ungkapan TGH. Lalu Muhammad Faisal Praya yang waktu itu menjadi Rois Syuriah :

“Memilih sebuah partai laksana orang betangku(kenduri), kita datang ke tuan rumah sesuai dengan undangan, dan kita bawa penangkok (bisa bahan makanan atau minuman) sesudah itu kita pulang ke rumah sendiri. Habis perkara. Kalau ada berkat kita bawa, kalau tidak ada yah tidak apa-apa. Yang penting tuan rumah harus tahu dirilah”.<sup>291</sup>

Pada periode kepengurusan Drs. Hasan Usman dkk, Nahdlatul Ulama mencoba menata diriterkait dengan kesekretariatan atau administrasi, dalam hal ini kantor Nahdlatul Ulama. Lalu dibentuklah panitia pembangunan kantor Nahdlatul Ulama yang rencananya di pusatkan di Jalan Pendidikan nomor 6 Mataram. Sebab dalam sejarahnya bahwa tanah ini dahulu adalah hadiah Gubernur Raden Arya Moh. Roeslan Tjakraningrat kepada Nahdlatul Ulamamelalui TGH. M. Shaleh Hambali sebagai Rois Syuriah. Kemudian tanah ini dipergunakan sebagai lokasi pendidikan al-Ma'arif NU setelah jadi sampai hari ini. Namun, dalam perjalanannya muncul berbagai

---

<sup>291</sup> TGH. Lalu Muhammad Faisal, *Wawancara*, di Praya 1986.

persoalan yang mengiringi perjalanan tanah ini, salah satunya masalah politik di mana Nahdlatul Ulama tidak mau masuk Golkar, lalu oleh Gubernur berikutnya tanah ini ditarik kembali dari tangan Nahdlatul Ulama bukan sebagai tanah milik penuh Nahdlatul Ulama tetapi sebagai tanah hak guna pakai saja, yang dikelola langsung oleh Yayasan Pendidikan Islam al-Ma'arif, pada waktu itu ketua Yayasannya adalah Bapak H. Hamzah Karim, kemudian pengelolaannya diserahkan kepada Sekretaris yayasan Bapak H. Moh. Anwar.<sup>292</sup>

Dalam pandangan yayasan, lembaga pendidikan al-Ma'arif ini tidak ada sangkutpautnya dengan struktural ormas Nahdlatul Ulama. Hampir semua kegiatan Nahdlatul Ulama di tempat ini tidak menerima sambutan yang hangat dari pihak yayasan. Tetapi karena kelihaihan Drs. Ahmad Taqiuddin Mansur dan tokoh Nahdlatul Ulama yang lain secara pelan-pelan yayasan ini mau tidak mau menerima kenyataan bahwa tanah ini tidak lepas dari Nahdlatul Ulama, milik warga Bintang Sembilan, bukan pribadi seseorang yang atau yayasan yang secara struktural tak ada kaitannya dengan Nahdlatul Ulama, sehingga semua stempel, kop surat dan, mata pelajaran ke Aswajaan diajar dalam lembaga ini, secara pelan-pelan semua kegiatan surat menyurat yang terkait dengan Nahdlatul Ulama melalui kantor yayasan ini. Namun untuk kantor Nahdlatul Ulama masih harus dibicarakan baik-baik dengan pihak yayasan. Tetapi kalau yayasan ngotot tidak mau memberi tanah ini sebagai tempat didirikan kantor wilayah Nahdlatul Ulama, maka pihak panitia akan menggugat yayasan ke pengadilan atas keberadaannya, apatah lagi waktu itu ada semacam dukungan dari Walikota, dalam hal ini Lalu Mas'ud untuk memberi izin membangun kantor Nahdlatul Ulama di tempat ini, yang akhirnya panitia berhasil membangun Aula Nahdlatul Ulama sebagaimana yang kita lihat sekarang.

Pihak yayasan tidak dapat berbuat apa-apa untuk menolak, Apalagi beberapa pengurus yayasan adalah pengurus juga dalam Nahdlatul Ulama (dalam hal ini H. Ambarsumirat dan H. Fathullah). Kantor Aula ini terwujud karena jasa besar bapak H. Abu Hasan, MA. yang kebetulan waktu itu beliau adalah salah seorang pengurus di Lembaga Nahdlatul Ulama, di bidang Mabarot (sosial) Nahdlatul Ulama, dan seorang pengusaha Nahdlatul Ulama yang cukup sukses, di samping karena adanya sumbangan dari para donator yang lain. Setelah kantor

---

<sup>292</sup> Drs. H. Jamaludin, MM, *Wawancara*, di Monjok 2010.



Aula ini terwujud, maka seluruh aktifitas Nahdlatul Ulama dan banom-banomnya berpusat di kantor tersebut.

Kiprah Nahdlatul Ulama di NTB semakin bersinar, segala kegiatan dimasukkan *mass media* cetak maupun elektronik. Termasuk penyelenggaraan sholat tarawih yang digerakkan para sahabat PMII dipusatkan di tempat ini. Hampir setiap hari aula ini tidak sepi dari kegiatan Nahdlatul Ulama. Semua tokoh Nahdlatul Ulama atau jamaah Nahdlatul Ulama sudah mulai merasakan nikmatnya ber-NU. Yang menjadi persoalan yang belum tuntas diselesaikan oleh PWNU sejak zaman TGH. Zainuddin Mansur, Drs. H. Hasan Usman dan Prof. Drs. H. Saiful Muslim, MM menurut penglihatan penulis belum sama sekali ada wujud yang kongkrit untuk berusaha mengembalikan tanah ini menjadi milik penuh Nahdlatul Ulama seperti sedia kala, waktu Gubernur Ruslan Cakranigrat menjabat. Bukan sebagai tanah hak guna pakai lagi. Adalah sungguh suatu kegagalan yang patal kalau PWNU tidak mampu mengembalikan tanah ini menjadi hak penuh Nahdlatul Ulama seperti sedia kala. Tidakkah di birokrasi katanya banyak warga Nahdlatul Ulama nya, termasuk di legislatif, dan eksekutif ?.

Kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama dan banom-banomnya sudah mulai semarak, walaupun dalam perjalanannya pernik-pernik internal terjadi dan itu sudah lumrah terjadi dalam sebuah rumah tangga apalagi dalam rumah tangga yang besar seperti Nahdlatul Ulama. Pernik-pernik hitam terwujud bukan karena tidak cintanya mereka terhadap Nahdlatul Ulama tetapi karena ingin melihat Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang hidupnya lebih dinamis, terarah sesuai dengan tujuannya yaitu mengembangkan ajaran Aswaja.

Pemahaman mayoritas keagamaan warga Nahdlatul Ulama di daerah NTB tidak terbiasa dengan pemahaman-pemahaman yang menurut mereka “menyimpang” dari apa yang dipahami dan diajarkan oleh para Tuan Guru atau ulama salafush shalih dan itulah sebenarnya Ahlussunnah Waljama`ah. Belum pernah mendengar apa itu toleransi, demokrasi, kesetaraan gender, hak asasi manusia, pribumisasi Islam dan istilah-istilah lain yang menurut mereka tidak ada dalam kitab kuning. Istilah-istilah itu seolah-olah tabu dalam pandangan mereka. Istilah-istilah itu sebenarnya berasal dari dunia luar Islam, khususnya Barat, yang justru tidak boleh dipakai oleh Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam Aswaja. Nahdlatul Ulama harus steril dari faham-faham



semacam itu. Kalau faham-faham itu dikembangkan di Nahdlatul Ulama, berarti Nahdlatul Ulama sudah kehilangan keaswajaannya. Istilah-istilah itu hanya ada pada mereka yang sudah terpengaruh dengan tradisi Barat, tradisi Kristen atau Yahudi, kata mereka. Tetapi bagi kalangan generasi muda Nahdlatul Ulama, justru menjadi trend tersendiri, wacana yang harus disambut oleh warga jika Nahdlatul Ulama tidak ingin ketinggalan dalam dunia modern dan kontemporer.

Nahdlatul Ulama tidak boleh sekedar berkutat pada masa lalunya saja, Nahdlatul Ulama harus menjadi organisasi modern yang dapat diterima dunia modern karena ajaran Aswajanya yang sangat *Solihun Li Kulli Zaman Wa Makan*. Mudah diterima dalam kondisi dan situasi apa saja. Kalau tidak, maka Nahdlatul Ulama akan menjadi ormas statis dan jumud. Wacana-wacana itu tidak begitu saja ditampik oleh Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama harus menjadi organisasi modern yang juga tidak boleh lepas dari masa lalunya, yang lama tidak boleh dibuang selagi baik dan masalah, sementara yang baru tidak boleh ditampik selagi lebih masalah untuk dunia sekarang. Dalam istilah Nahdlatul Ulama disebut dengan *Qa'idah: المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجدید الأصلح*

Nahdlatul Ulama harus mampu melestarikan tradisi lama yang baik dan mampu pula mewujudkan tradisi baru yang lebih baik yang sesuai dengan masa sekarang. Selama ini Nahdlatul Ulama hanya berkutat dengan pola lamanya saja, tetapi pola yang baru dan sesuai dengan zamannya jarang sekali bahkan tidak pernah dikembangkan apalagi diwujudkan. Inilah nampaknya yang dikembangkan oleh Gusdur dkk. Sehingga Gusdur dkk mencoba mencari terobosan baru dalam mengkaji Islam yang ada di kitab kuning sebagai tradisi pesantren yang tidak boleh begitu saja dibuang, tetapi dicarikan metodologi dalam pengkajiannya sehingga gampang diterima oleh dunia modern sekarang. Misalnya dalam masalah HAM, demokrasi dan lain-lain yang secara utuh belum dibahas dalam kitab kuning. Nah Gusdur dkk mencoba menelusurinya dan ternyata Gusdur mampu melakukan hal tersebut.

Istilah-istilah baru yang terasa asing di kalangan pesantren tradisional mencuat dipermukaan dalam diskusi-diskusi, seminar-seminar, dalam pelatihan-pelatihan yang banyak dilontarkan di kalangan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kemudian menghiasi *mass media*; media cetak dan elektronik nasional maupun lokal. Ide-ide yang asing di telinga justru banyak dilontarkan oleh Ketua Umum PBNU K.H.

Abdurrahman Wahid. Pernyataan-pernyataan beliau yang kontroversial menurut sebagian kalangan, termasuk sebagian tokoh Nahdlatul Ulama NTB justru dapat merusak nama baik Nahdlatul Ulama. Apalagi kondisi politik nasional pada waktu itu masih kuatnya Orde Baru di mana Golkar, ABRI dan Birokrasi adalah sangat menentukan. Semua harus diatur oleh mereka. Bertentangan dengan kebijakan pemerintah Orde Baru, berarti anti Pancasila, anti pembangunan dan sebagainya. Demokrasi yang dikembangkan oleh Orde Baru adalah Demokrasi Pancasila, demokrasi yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, bukan demokrasi impor dari Barat dan sebagainya.

Ide-ide Gusdur tentang demokratisasi, hak asasi manusia, pribumisasi Islam, modernisasi Islam, menggantikan *Assalamu alaikum* dengan selamat pagi, selamat sore “menghentakkan para sebagian tokoh Islam di negeri ini, termasuk sebagian tokoh Nahdlatul Ulama. Justru ide-ide itu merupakan parasit yang dapat merusak citra Nahdlatul Ulama sendiri di tengah-tengah umat yang menurut mereka bertentangan dengan ajaran Islam sekaligus juga bertentangan dengan Aswaja. Ditambah lagi dengan posisi Gusdur dalam sebuah perhelatan sebagai dewan juri festival kesenian di Bandung, kehadiran beliau pada malam puisi Yesus Kristus di Surabaya, menjadi ketua Dewan kesenian Jakarta, terlibat dalam forum demokrasi (Fordem) yang kebetulan beliau sebagai ketuanya, menolak bergabung ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang ketuanya BJ Habibi karena ICMI menurut Gusdur adalah organisasi sekretarian.

Sikap Gusdur seperti di atas bukan menjadikan menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi agama, tetapi sebaliknya menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai ormas layaknya grup wayang ketoprak, kesenian, atau apapun namanya. Toleransi yang dikembangkan Gusdur adalah toleransi yang justru mengorbankan Aswaja. Akhirnya gerakan kultural Nahdlatul Ulama menjadi sempit, dan Gusdur sebagai tokoh sentral Nahdlatul Ulama semakin terjepit.

Perbedaan paradigma berpikir antar tokoh Nahdlatul Ulama memang berbeda. Gusdur mengklaim Apa yang dilakukannya adalah untuk membesarkan Nahdlatul Ulama yang selama bertahun-tahun tidur dengan lelapnya. Maka Nahdlatul Ulama harus digerakkan dan

dibangunkan dari tidurnya yang lelap, sehingga menjadi organisasi Islam, yang tidak hanya mampu memegang tasbeih saja, akan tetapi mampu membuat perubahan yang signifikan dan lebih berarti dalam dunia modern alias tidak jumud yang akhirnya laksana posil atau benda purbakala.

Ide-ide Gusdur yang sangat nyeleneh itu tidak dipahami dengan baik oleh sebagian tokoh Nahdlatul Ulama termasuk sebagian pengurus di tingkat Pengurus Besar, wilayah, dan cabang-cabang di seluruh Indonesia. Mereka kebanyakan *suuzh zhon* dengan ide-ide segar Gusdur tersebut. Wacana-wacana semacam itu tidak boleh dikembangkan di Nahdlatul Ulama, sebab sebagian besar warga belum siap menerimanya. Para tokoh lebih banyak mendengar penjelasan pihak lain dari pada mendengar kalangan Nahdlatul Ulama sendiri. Sehingga pada gilirannya dalam Nahdlatul Ulama terjadi fiksi-fiksi dan sejumlah inilah yang bertarung di tingkat internal Nahdlatul Ulama, yang hampir membuat Nahdlatul Ulama pecah berantakan.

Menurut Gusdur, sebetulnya yang dimaksudkan dengan pribumisasi Islam adalah bagaimana menjadikan Islam berakar di Indonesia sesuai dengan kultur masyarakat setempat, agar masyarakat merasa memiliki atau tak merasaterasing karena mempertentangkan antarabudaya dengan Islam. Misalnya melalui syi'ar Islam melalui wayang.<sup>293</sup> Atau dengan kata lain Islam menurut Nahdlatul Ulama tidak mempertentangkan adanya budaya kearifan lokal atau adat istiadat, karena sesuai dengan qaidah *al-Urf* atau *al-'Adatu Muhkamah* selagi tidak menghilangkan substansi Islam yang pokok. Salah satu misalnya dalam masyarakat Sasak apa yang disebut adat "*nembang*" (membacakan hikayat sasak dalam bahasa sasak dengan sistem nada dan suara tertentu). Karena itu Islam dapat berkembang dengan damai, tanpa kekerasan di bumi Nusantara ini. Hal ini juga sesuai dengan metode dakwah Walisongo yang kemudian diteruskan oleh Nahdlatul Ulama sampai saat ini.

Adapun penggantian *Assalamu 'alaikum* dengan "selamat pagi" dan lain-lain sebenarnya adalah kekhilafan media saja, kita semua tahu bahwa media juga mengharapkan keuntungan sehingga apapun bisa diplintir atau lebih populis dengan istilah "*bad news is good news*" yang pada intinya agar media bersangkutan laris. Hal ini yang kemudian

---

<sup>293</sup> Ida, Laode. *Anatomi...*, hlm. 24.

menurut sebagian orang yang bersebarangan dengan Gusdur adalah menjadi senjatanya untuk menggempur Gusdur. Menurut Nurcholis Madjid (tokoh Paramadina), bahwa isu itu sebenarnya berawal dari keluhan Siswono Yudohusodo pada Wahid dalam suatu gedung pertemuan. Siswono mengeluh pada Wahid karena dia tidak fasih mengucapkan *assalamu 'alaikum*, sementara dalam pertemuan itu semua orang memulai pidato dengan salam itu. Lalu Gusdur dengan enak berkata, *Yah sudah ... ganti saja dengan selamt pagi, selamat siang dan sebagainya ... (untuk Pak Sis), ndak apa-apa*. Hal ini disiarkan oleh pers seakan-akan Gusdur menganjurkan *Assalamu'alaikum* diganti dengan “selamat pagi” dan lain sebagainya.<sup>294</sup>

Walaupun begitu bagi kalangan yang berseberangan dengan Gusdur justru dijadikan sebagai senjata pamungkas untuk memojokkan Gusdur di mana-mana. Apalagi dengan tindakan Gusdur yang lain seperti pergi ke Israel dan menjadi anggota Yayasan Simon Peres dan sebagainya. Gusdur juga pernah mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah Syi`ah Kultural, karena dalam amalan orang Nahdlatul Ulama seperti ziarahkubur, tawassul, menghormati Ulama dan sebagainya sama dengan tradisi Syiah. Kata-kata Gusdur semacam ini justru semakin membuat sebagian tokoh Nahdlatul Ulama semakin kebakaran jenggot. Bahkan ada isu bahwa Gusdur itu tidak sholat, Karena tidak pernah dilihat sholat jama`ah atau jum`at dan sebagainya.

Isu-isu ini kemudian disebarluaskan di kalangan sebagian tokoh Nahdlatul Ulama di NTB, kemudian dijadikan dasar untuk mendongkel Gusdur dalam muktamar ke-29 di Cipasung Tasikmalaya. Tapi bagi kalangan tokoh Nahdlatul Ulama yang lain apalagi generasi mudanya justru Gusdur menjadi primadonanya. Semuanya dianggap sepi oleh mereka. Itu hanya fitnah dari kalangan orang-orang lain yang tidak ingin melihat Nahdlatul Ulama menjadi besar. Orang-orang Nahdlatul Ulama banyak terkena isu negatif tersebut. Mereka belum mau melakukan tabayyun terhadap isu tersebut. Bahkan mereka adalah bagian dari penyebar isu tersebut. Apapun penjelasan yang diberikan kepada mereka, mereka tidak mau menerimanya. Mereka lebih senang mendengarkan penjelasan kelompok lain dari pada penjelasan orang-orang NU sendiri yang sudah tahu dan bahkan sudah pernah mengaji

---

<sup>294</sup> *Ibid.*, hlm. 99-100

di Jombang serta pernah mendengarkan langsung tentang Gusdur di Jombang.

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi memiliki beragam media massa, seperti koran dan majalah. Bagi pihak yang berseberangan dengan Gusdur, kebanyakan majalah atau koran yang dibaca adalah yang bukan diterbitkan oleh Nahdlatul Ulama. Sementara yang diterbitkan oleh Nahdlatul Ulama seperti majalah Aula milik Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan Warta Nahdlatul Ulama yang diterbitkan oleh PBNU sendiri walaupun sudah beredar di kalangan terbatas tetapi tidak pernah dibaca. Mereka hanya mendengar dari pihak tidak setuju dengan tingkah laku dan pola pikir Gusdur. Kalau Gusdur pergi ke Israel, lalu Gusdur dituduh antek Yahudi di Indonesia. Gusdur menyarankan pemerintah untuk membuka hubungan dagang dengan Israel, karena dalam kenyataannya banyak produk-produk Yahudi yang dijual di Indonesia, walaupun tidak langsung datang dari Israel tetapi lewat negara lain yang melakukan hubungan dagang secara langsung.

Menurut Gusdur tidak salah orang Islam melakukan hubungan dagang dengan Israel, sebab Nabi SAW dahulu juga pernah bermuamalah dengan orang Yahudi Madinah bahkan Nabi sendiri pernah meminjam barang kepada orang Yahudi. Sebagian umat belum bisa memisahkan antara hubungan politik dengan hubungan bisnis. Ijtihad-ijtihad Gusdur semacam ini belum banyak dipahami oleh sebagian umat Islam. Demikian juga Gusdur banyak melakukan komunikasi dengan tokoh non muslim lainnya di negeri ini, apa salahnya kalau seorang mengucapkan salam dengan selamat pagi dan sebagainya, dari pada mengucap *assalamu`alaikum* tetapi bacaannya salah kemudian ditertawai orang yang mendengarkannya.

Substansi makna *assalamu`alaikum* dengan selamat pagi dan lain-lain adalah sama saja. Kedua istilah tersebut mengandung doa keselamatan terhadap orang lain. Cuma yang pertama memakai bahasa Arab, sedang yang lain memakai bahasa Indonesia. Kata "selamat" berasal dari bahasa Arab *salamah* lalu di indonesiakan menjadi selamat. Dari kata ini lalu banyak orang Indonesia memberi nama anaknya dengan nama

“selamat“ kalau ia anak laki-laki, dan dengan nama “ Selamah “ kalau anak itu perempuan dengan maksud doa agar anak tersebut selamat lahir batin dunia akherat sesuai dengan namanya.

Penulis menyangkankantuduhan sebagian orang bahwa Gusdur itu antek Yahudi, Orientalis di Indonesia, dan menuduh bahwa Gusdur itu tidak sholat lima waktu itu. Karena tidak pernah dilihat sholat. Gusdur itu memang tidak dapat sholat dengan baik karena faktor fisiknya yang tidak sehat karena kegemukan atau karena pengaruh operasi mata beliau sehingga kalau sujud atau ruku tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Jadi ada udzur syar’i disini.

Gusdur bagi sebagian orang sulit untuk memberikan predikat karena memiliki beragam keahlian. Pengetahuan di bidang agama dan pengetahuan umum yang demikian luas. Gabungan keduanya menyebabkan banyak mengekspresikan diri dalam berbagai aktivitas. seorang peneliti Amerika John Esposito beropini bahwa Gusdur bukanlah tokoh tradisionalis konservatif Nahdlatul Ulama seperti halnya tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di pedesaan dan juga bukan modernis Islam yang berbasis tradisional. Karena itu esposito memasukkan Gusdur sebagai tokoh gerakan Islam kontemporer.<sup>295</sup>

Dari segi sifat dan corak pemikiran serta sepak terjangnya, selain sebagai tokoh tradisional-liberalis secara bergantian dan tepat sasaran. Ia juga bersikap inklusif dan humanis. Sikap inklusifnya karena membuka kerja sama dengan siapapun, termasuk Israel. Bersedia mencabut TAP MPR tentang larangan partai komunis di Indonesia. Demikian juga tanpakan inklusifitasnya pada partai yang didirikan tidak berlabel Islam yaitu PKB.<sup>296</sup>

Berdasarkan pada peran, kontribusi, keberanian, kejeniusan serta pengaruhnya yang besar itulah, menyebabkan Gusdur menjadi salah seorang tokoh yang disegani baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. Ia begitu dikenal di seluruh Indonesia bahkan dunia karena kontroversialnya.<sup>297</sup>

Gusdur merupakan pemikir reformis dan progresif serta aktivis yang memperhatikan kekuatan Islam tradisional. menjembatani dunia

---

<sup>295</sup> Abuddin Nata. *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 344

<sup>296</sup> *Ibid.*, hlm. 345

<sup>297</sup> *Ibid.*, hlm. 346

keulamaan tradisional dan pemikiran “modern”, mendukung tesis intelektual reformis dan agenda sosial yang membedakan antara doktrin-doktrin atau hukum-hukum agama yang baku dengan akomodasi logis dan perubahan sosial.<sup>298</sup>

Orang seperti beliau menurut hukum fikih boleh sholat dengan cara yang dapat ia lakukan. Namun apapun yang dilakukan oleh Gusdur, bagi orang sudah berasumsi yang tidak baik terhadap Gusdur tetap dianggap tidak baik oleh mereka. Tetapi yang jelas tingkah laku dan ucapan-ucapan Gusdur yang kontroversial selalu menghiasi surat kabar atau media elektronik yang tak ada seorang pun yang mampu menandinginya sepanjang perjalanan kepemimpinan beliau dalam Nahdlatul Ulama sampai beliau dipilih menjadi Presiden ke-4 yang disponsori oleh poros tengah di bawah motor Amin Rais dan dipilih dengan suara mayoritas menggantikan Prof. BJ. Habibie dan mengalahkan Megawati. Menurut keputusan Kongres Umat Islam menjelang reformasi, haram wanita itu menjadi pemimpin. Yang tidak mengharamkan wanita menjadi presiden adalah ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Namun akhirnya juga kelompok yang mengharamkan wanita menjadi Presiden justru memilih Megawati menjadi Presiden dengan wakilnya Hamzah Haz dari PPP menggantikan Gusdur karena Gusdur banyak melanggar Undang Undang.

Tingkah laku Gusdur yang menurut sebagian tokoh Nahdlatul Ulama menyimpang dari garis Khittah Nahdlatul Ulama tersebut lalu kemudian dijadikan senjata untuk mendongkelnya dari kepengurusan di PBNU. Hal tersebut kemudian memuncak ketika diselenggarakannya Muktamar Nahdlatul Ulama ke-29 di ponpes Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat. Pengurus Nahdlatul Ulama NTB, termasuk cabang-cabang berbelah menjadi dua fiksi yang saling berseberangan. Fiksi pertama yang mendukung dan mempertahankan Gusdur sebagai Ketua Umum dan fiksi kedua mengantikannya dengan orang lain, khususnya Abu Hasan. Karena Abu Hasan ini banyak didukung oleh para Kiyai sepuh Nahdlatul Ulama, antara lain mantan Ketua Umum PBNU KH. Idham Khalid, TGH. Lalu Muhammad Faishal, Bapak H. Bil'id dan lain sebagainya. Apalagi waktu itu Bapak H. Bil'id diangkat sebagai Pelaksana Tugas Ketua Nahdlatul Ulama NTB mengingat Ketua yang

---

<sup>298</sup> John L. Esposito- John O. Voll, *Tokoh kunci gerakan Islam kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 260



terpilih yakni Drs. Hasan Usman sibuk sebagai anggota DPR dari Golkar. SK tentang penunjukan Bapak H. Bil'id sebagai Pelaksana Tugas dapat dilihat dilampiran.

Gerakan dan monuver Bapak H. Bil'id dkk dalam mendongkel Gusdur dalam Mukhtamar banyak dilawan oleh mereka yang pro Gusdur seperti TGH. L. Muhammad Turmudzi, Drs. Ahmad Taquiuddin, Lalu Chatim, BA. dan lain-lain. Walaupun demikian Mukhtamar tetap memilih Gusdur sebagai Ketua Umum mengalahkan Abu Hasan. Sementara Rois 'Am dipegang oleh KH. Ilyas Ruhiyat. Dalam arena Mukhtamar majalah dan koran yang pro Gusdur seperti Kompas dan Tempo tak dapat masuk di tengah-tengah arena. Ada suara koran itu dibeli oleh seseorang. Sementara koran yang anti Gusdur seperti Republika dan lain-lain masuk dengan bebas. Walaupun demikian Mukhtamar, tetap jalan dan Gusdur dalam pemilihan mengalahkan Abu Hasan.

Kekalahan Abu Hasan ini membuat orang yang anti Gusdur tidak terima dengan menuduh ada suara cabang siluman di arena yang menambahkan suara ke Gusdur. Karena itu mereka akhirnya membuat PBNU Tandingan yang diberi nama KPPNU lengkap dengan pengurusnya di mana salah seorang Ketua Nahdlatul Ulama yang waktu itu menjabat PLT ikut terlibat di dalamnya yaitu Bapak H. Bil'id dkk.

Pada kepengurusan KPPNU ini, KH. Idham Khalid masuk dalam Mustasyar, termasuk juga TGH. Lalu Muhammad Faisal yang waktu itu masih menjabat sebagai Rois Syuriah Nahdlatul Ulama NTB. Sebenarnya TGH. Lalu Muhammad Faisal tidak mau terlibat dalam pertikaian ini. Walaupun sebenarnya tidak setuju dengan Gusdur sebagai Ketua Umum PBNU. Beliau sebenarnya sudah *mufaraqah* dengan PBNU bentukan hasil Mukhtamar Nahdlatul Ulama di Cipasung. Beliau tidak mengakuinya. Pada suatu ketika ada utusan PBNU hasil Mukhtamar Cipasung KH. Hafizh Usman mau bersillaturahim dengan PWNU NTB. Maka TGH. Lalu Muhammad Faisal, Bil'id MSAdkk. tidak mau menerimanya, hanya saja kalau sebagai tamu biasa tidak apa-apa, namun jikalau mengatasnamakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mereka menolaknya.

Sebelum kedatangan KH. Hafizh Usman ke Mataram penulis bersama Pak Syarifudin dan H. Fathullah menghadap ke Rois Syuriah dalam hal ini TGH. Lalu Muhammad Faisal membicarakan kehadiran PBNU ini.



Waktu itu bulan puasa, kami bertiga datang malam hari, kami menunggu di luar karena beliau bersama keluarganya sedang sholat tarawih. Selesai sholat tarawih kami diterima beliau dengan baik sekali. Kami melaporkan tentang kehadiran PBNU. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa kalau hadir atas nama PBNU tidak setuju, kalau sebagai tamu biasa tidak apa-apa. Saya mendengar dari salah seorang teman bahwa beliau sebenarnya tidak tahu menahu tentang pencantuman nama beliau dalam KPPNU itu. Seandainya ada nama beliau di situ, itu hak mereka yang memasukkannya. Beliau tidak akan mencabut namanya dalam kepengurusan karena beliau sendiri tidak merasa ikut dalam kelompok itu. Beliau memang berada pada pihak yang delematis. Yang jelas beliau diam saja atau *mufaroqah* dari PBNU Gusdur dan tidak ikut-ikutan KPPNU, sampai beliau meninggal dunia pada bulan Ramadhan 1997. Itulah sikap beliau tentang Nahdlatul Ulama baik PBNU Cipasung maupun KPPNU Abu Hasan.

Ketika beliau wafat, putra beliau Lalu Habiburrahman menelpon PBNU atas wafat beliau yang langsung di terima Gusdur. Gusdur langsung mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya beliau. Gusdur sempat menulis tentang TGH. Lalu Muhammad Faisal dalam koran Kompas, dan oleh pengedit Kiyai Nyentrik nama TGH. Lalu Muhammad Faisal tercantum dalam buku tersebut. Gusdur sangat menghargai sikap TGH. Lalu Muhammad Faisal tersebut. Beliaulah tokoh Nahdlatul Ulama tulen, yang walaupun berbeda dengan Gusdur beliau tidak meninggalkan Nahdlatul Ulama nya, sehingga Nahdlatul Ulama berkembang di NTB sampai saat ini. Apa kata Gusdur tentang beliau:

“Meskipun dalam alam pikiran yang berbeda, tetapi Tuan Guru Faisal dan saya tetap ingin mewujudkan keinginan bersama, yakni mencintai dan mengabdikan cita-cita NU. Karena itu, walaupun dalam suasana perbedaan pandangan pribadi sebelum wafat, beliau pernah mengatakan keluarganya kalau dirinya meninggal, maka orang yang pertama harus dihubungi dan diberitahu di Jakarta adalah Abdurrahman Wahid. Bukan PBNU-nya.”

Dalam komentar yang lain Gusdur berkata tentang TGH. Lalu Muhammad Faisal dalam tulisan “Kiyai Nyentrik” sebagai berikut:

“Saya merasa kehilangan Tuan Guru Faisal sebagai kehilangan pribadi. Saya secara pribadi melihat, tokoh yang satu ini memiliki karakter yang sangat mengasyikkan. Beliau mempunyai sikap yang konsisten dan menunjukkan kecintaan yang mendalam pada Nahdlatul Ulama sampai wafatnya. Bagi orang yang belum mengenal Nahdlatul Ulama, sikap Tuan Guru Faisal adalah contoh yang sangat berbicara tentang sikap saling menghormati di antara orang yang berbedapandangan sekalipun di tubuh Nahdlatul Ulama. Tuan Guru Faisal adalah contoh dan potret dari kepribadian Nahdlatul Ulama sejati, yang sangat mengutamakan persaudaraan.”<sup>299</sup>

## **b. Terselenggaranya Kombes dan Munas di Bagu Lombok**

Setelah TGH. Lalu Muhammad Faisal wafat, kepemimpinan Syuriah dipegang TGH. Lalu Turmudzi Badaruddin dan Ketua Tanfidziyah tetap dipegang Drs. H. Hasan Usman setelah melalui konferensi ke-9 di Mataram. Namun teman-teman yang pernah terlibat di KPPNU tidak dimasukkan di kepengurusan untuk sementara. Mereka kebanyakan terlibat di Jam`iyah Thariqat an Nahdhiyah, yang Ketua Umum Pusatnya KH. Idham Khalid (yang berseberangan dengan Gusdur). Namun dalam kehidupan ber-NU semua tetap berjalan normal. Masing-masing bekerja sesuai dengan tugas masing-masing dalam banom Nahdlatul Ulama.

Pada kepengurusan TGH. Lalu Turmudzi Badarudin sebagai Pengurus Wilayah NU NTB, beliau dipercaya oleh Pengurus Besar NU untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama tingkat Nasional pada tahun 1997. Munas dan kombes Nahdlatul Ulama ini dipusatkan di Ponpes Qomarul Huda Bagu. Segala suatunya dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Termasuk akomodasi yang sebenarnya belum layak untuk ditempati mengingat ponpes ini secara logika tidak akan mampu menampung para peserta yang datang dari seluruh penjuru tanah air. Sementara gedung yang tersedia untuk penginapan dan lain sebagainya belum mencukupi. Tetapi berkat kecakapan TGH. Lalu Turmudzi Badarudin dibantu para panitia lokal serta para jama`ah Nahdlatul Ulama dan tentunya pemerintah, dengan segera sarana dan prasarana yang dibutuhkan dapat tersedia dengan baik. Gedung madrasah yang sebelah timur

---

<sup>299</sup>Abdurrahman Wahid, *Kyai Nyentrik Membela Pemerintah*, (Yogyakarta:LKiS,1997), hlm. 131-132.

diperbaiki, dibongkar dijadikan lapangan. Kemudian sebelah selatannya ditingkatkan menjadi dua lantai, Siang malam para pekerja bangunan tidak henti-hentinya merehab gedung sehingga pantas untuk dijadikan tempat penyelenggaraan. Sementara gedung sebelah barat jalan memang sudah bagus dan layak untuk ditempati sidang-sidang komisi dan dijadikan sebagai tempat penginapan para peserta Munas dan kombes. Masjid juga dijadikan tempat sidang komisi bahtsul masail. Para panitia memang merasa khawatir kalau ponpes Qomarul Huda ini tidak dapat menyelenggarakan even nasional ini. Namun *alhamdulillah* kekhawatiran itu hilang dengan sendirinya berkat pertolongan Allah SWT. Semuanya beres dan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Sebab banyak isu berkembang bahwa Munas dan kombes tidak akan jadi diselenggarakan di Bagu. Akan dipindah ke Mataram di hotel berbintang. Menurut rencana memang Munas dan Konbes ini akan dibuka oleh Presiden Suharto. Tetapi karena satu dan lain hal Munas dan Konbes dibuka oleh Gubernur Warsito.

Pondok Pesantren Qomarul Huda Bagu terletak di Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah kurang lebih 17 kilometer kearah tenggara dari Kota Mataram. Ponpes ini dipimpin oleh seorang ulama kharismatik TGH. Lalu Turmudzi Badarudin yang lahir pada tahun 1937 dari pasangan H. Badruddin dan Hj. Aminah selaku pengasuh.<sup>300</sup> Di bidang pendidikan, menyelenggarakan lembaga pendidikan formal yang terdiri dari *Raudhatul Athfal*, *Madrasah Ibtidaiyah* (1963), *Madrasah Tsanawiyah* (1974), dan *Madrasah Aliyah* (1984). Sedangkan unit pengembangan sosial-masyarakat, telah memiliki lembaga-lembaga pengembangan sosial seperti “panti asuhan” yang telah mendapatkan bantuan dana pembinaan dari yayasan Dharmais sejak 1990, pos kesehatan santri, dan majelis ta’lim yang tersebar di wilayah Lombok Barat dan Lombok Tengah.

TGH. Lalu Turmudzi Badarudin pernah nyantri di ponpes “Darul Qur’an” Bengkel Lombok Barat pimpinan TGH. M. Sholeh Hambali kemudian tahun 1958 mengikuti pendidikan formal di Muallimin dan memperdalam ilmunya di tanah suci Mekah selama 6 tahun.

Munas dan Konbes di Qomarul Huda Bagu dibuka dengan penuh keprihatinan. Munas dan Konbes dilakukukan dimana negara dalam

---

<sup>300</sup> TGH. Lalu Turmudzi Badarudin, Kyai Khos Tanpa Jubah Kekuasaan, <http://www.microcyber.net/2012/03/pemikiran-pendidikan-Islam-tuan-guru.html#sthash.dBeMIOsn.dpuf>

mengalami berbagai musibah. Dari musibah kelaparan, kekeringan, asap, dan berbagai kerusakan. Namun KH. M. Ilyas Ruhiyat bahwa berbagai musibah menuntut kita untuk melaksanakan renungan dan refleksi tentang berbagai aspek kehidupan, berdasarkan itu memperbaiki tindakan selanjutnya. Oleh karena itu, Munas dan Konbes dilaksanakan dengan penuh kesederhanaan.

Hasil keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama di Ponpes Qomarul Huda Bagu pada 17-20 November 1997 diantaranya adalah Hak Asasi Manusia Dalam Islam (HAM) dan Kedudukan Wanita Dalam Islam. Jaminan HAM memberikan jaminan pada manusia tentang jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya (*Hifzh al-Din*), jaminan atas setiap jiwa (*Hifzh al-Nafs, waal 'Iradh*), kebebasan berekspresi, mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah (*Hifzh al-Aql*). Sedangkan keputusan Munas alim Ulama tentang kedudukan wanita dalam Islam bahwa Islam memberikan wanita hak yang sama dengan laki-laki untuk memberikan pengabdian yang sama dengan agama, nusa, bangsa dan negara, dengan kata lain bahwa kedudukan wanita dalam proses sistem negara-bangsa telah terbuka lebar, terutama perannya dalam masyarakat majemuk, dengan tetap mengingat bahwa kualitas, kapasitas, kapabilitas, dan aksesibilitas bagaimanapun harus menjadi ukuran.<sup>301</sup>

Sementara pemerintah pusat hanya diwakilkan kepada Menteri Agama Tirmizi Thahir. Dalam sambutannya Menag menyebutkan para ulama harus selaras antara kemampuan berdzikir dan berpikir. Kalau hanya berpikir semata, ulama akan pintar menipu orang. Sebaliknya, kalau hanya berdzikir saja ulama akan ditipu orang.<sup>302</sup> Seorang ulama harus mampu menyeimbangkan antara pikir dan zikir. Pada bagian lain dalam sambutan teksnya, Menag sangat khawatir dengan degradasi akhlak masyarakat, sebagian merasa bahwa uang negara adalah uangnya sendiri disimpan. Tugas berat ini hanya dapat diselesaikan dengan agama.

Di akhir sambutan, Menag berpesan agar para ulama tidak terpedaya oleh rayuan para calo yang akan memberikan hadiah umroh gratis tetapi para wanita itu dijual di Arab Saudi sebagai budak.

---

<sup>301</sup> Sahal Mahfudh, *Akhkamul Fuqoha solusi Hukum Islam keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*, (Surabaya:Diantama), hlm. 667-679.

<sup>302</sup> *Majalah Suara Umat. Pasar Dugusur Rakyat Tersungkur*, Vol 1 No. 2/ Desember 2007.

Kesempatan yang jarang seperti ini banyak dimanfaatkan oleh Para Ulama, melalui undangan warga di daerah ini. Ketika senggang para ulama ada yang diajak ceramah ke jamaah Nahdlatul Ulama yang ada di cabang-cabang se-pulau Lombok. Ponpes Qamarul Huda Bagu menjadi terkenal di tingkat Nasional karena setiap ada berita tentang Munas dan Konbes yang di muat di koran nasional, media TV dan radio. Apalagi dalam Munas dan Konbes ini juga dibahas tentang masalah yang sangat aktual waktu itu, terutama masalah gender, kepemimpinan perempuan. Termasuk juga masalah perbankan dan reksadana. Sebab banyak juga Ulama yang mengatakan bahwa wanita itu tidak boleh (haram) menjadi pemimpin berdasarkan ayat al-Qur'an.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya: “Laki-laki yang menjadi pemimpin dan penegak hak-hak perempuan” (QS. An-Nisa:34)<sup>303</sup>

Lakil-lakilah yang berhak menjadi pemimpin kaum perempuan bukan sebaliknya. Jadi wanita tidak boleh menjadi pemimpin dalam sebuah negara. Apalagi ada kongres Umat Islam yang diselenggarakan di Jakarta waktu itu memutuskan kaum perempuan haram menjadi presiden berdasarkan ayat ini. Ditambah lagi dengan hadits yang mengatakan:

لَنْ يَفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya: “Suatu kaum ( Negara ) tidak akan bahagia kalau urusannya itu diserahkan kepada kaum wanita”.

Namun Munas waktu itu berpendapatlain dalam memahami ayat dan hadits ini. Ayat dan hadits tetap benar dan tidak mungkin salah. Tetapi dalam memahami ayat dan hadits itu tidak boleh lepas dari konteksnya yakni asbab nuzul ayat dan asbab wurud hadits tersebut. Sehingga dengan demikian para Ulama Nahdlatul Ulama yang ikut dalam bahtsul masail dalam memahami ayat dan hadits ini harus mengacu kepada kedua hal tersebut. Agar dengan demikian kaum perempuan tidak terkesan dilecehkan oleh ayat atau hadits. Pemaknaan

<sup>303</sup> Al-Qur'an Digital version 2.0.: Muharram 1425/ Maret 2004. Surat, An-Nisa (ayat: 44)

para ulama tentang ayat atau hadits itulah yang seharusnya diperbaharui dan kontekstualisasi Sehingga dengan demikian ayat atau hadits dapat diterima untuk semua zaman dan tempat.

Cara pandang semacam ini sah-sah saja dalam konteks kekinian sesuai dengan ijtihad para ahlinya. Sebagaimana yang kita lihat dalam tafsir dan syarah hadits yang berbeda-beda pemahamannya tentang ayat atau hadits itu. Itulah yang digali oleh para Ulama Nahdlatul Ulama dalam Kombes dan Munas tersebut. Maka dalam tarap akhir pembahasannya setelah mengemukakan dalil-dalil dari ayat –ayat al Quran seperti dalam surat al-Taubah ayat 71, al-Mu'min ayat 40, al-Imran 195,an-Nahl ayat 195,al-Ahzab 35, dan beberapa hadits para Ulama Nahdlatul Ulama menyimpulkan sebagai berikut:

“Peran domestik wanita yang hal itu merupakan kesejatian kodrat wanita, sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak mereka, hamil, melahirkan, menyusui, dan fungsi-lain dalam keluarga yang memang tidak mungkin digantikan oleh laki-laki”.

Firman Allah SWT:

يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثَاتًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ وَ.....)

«Dan Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.(QS. As-Syuro:49)<sup>304</sup>»

Islam telah mengatur hak dan kewajiban wanita dalam kehidupan berkeluarga yang harus diterima dan dipatuhi oleh masing-masing (suami-isteri).

Akan tetapi ada peran publik wanita, dimana wanita sebagai anggota masyarakat,wanita sebagai warga Negara yang mempunyai hak bernegara dan berpolitik, telah menuntut wanita harus melakukan peran sosialnya yang lebih tegas, transparan dan terlindungi.

Dalam konteks peran-peran publik menurut prinsip-prinsip Islam,wanita diperbolehkan melakukan peran-peran tersebut dengan

---

<sup>304</sup> Al-Qur'an Digital version 2.0.: Muharram 1425/ Maret 2004. Surat. As Syura (ayat: 49)

konsekuensi bahwa ia dapat dipandang mampu dan memiliki kapasitas untuk menduduki peran sosial dan politik tersebut.

Dengan kata lain bahwa kedudukan wanita dalam proses sistem negara bangsa telah terbuka lebar, terutama perannya dalam masyarakat majemuk, dengan tetap mengingat bahwa kualitas, kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas bagaimanapun harus menjadi ukuran, sekaligus tanpa melupakan fungsi kodrati sebagai sebuah keniscayaan. Inilah salah satu contoh juga bagaimana Nahdlatul Ulama berpegang dalam mengikuti salah satu madzhab yang disebut dengan Madzhab Manhaji tersebut.

Pelaksanaan konbes di Bagu memang istimewa, pertama kali dalam acara konbes menghadirkan berbagai tokoh yang berlatang belakang keilmuan yang berbeda, diantaranya adalah Prof. Dr. Anwar Nasution dan Dr. Rizal Ramli (keduanya adalah pengamat ekonomi). Ribuan Nahdiyyin menghadiri dan mendengarkan dengan saksama diskusi yang dilaksanakan dengan kedua pakar tersebut.

Tema diskusi yang dikaji dengan Prof. Dr. Anwar Nasution dan Dr. Rizal Ramli adalah monopoli dan oligopoli. Tema ini menarik karena relevan dengan kondisi kebangsaan yang carut marut. Dr. Rizal menilai bahwa kondisi ekonomi tentang ide demokrasi ekonomi harus diformulasikan. Sementara Prof. Anwar menilai bahwa krisis ekonomi mulai tampak, persoalan ekonomi disebabkan oleh; pertama, nilai mata uang yang melorot secara drastis, kedua, 16 bank dibubarkan.

Kembali lagi Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan di Ponpes Qamarul Huda Bagu membawa berkah juga bagi Nahdlatul Ulama ke depan di pulau seribu masjid atau Bumi Gora. Tidak disangka memang Nahdlatul Ulama tetap hidup di tengah-tengah masyarakat baik struktural maupun kultural sesuai dengan kondisi masyarakat atau jamaah Nahdlatul Ulama termasuk juga kreatifitas dan aktifitas para pengurusnya. Biar tidak mempunyai Pengurus formal kegiatan Nahdlatul Ulama sebagai jamaah tetap berjalan. Karena warganya, khususnya para Tuan Gurunya mempunyai kegiatan yang banyak. wabilkhusus dalam mengembangkan dakwah Aswaja dan lembaga pendidikan yang disebut pondok pesantren. Salah satu contoh, dengan berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Ibrahimy Qamarul Huda adalah satu-satunya Perguruan Tinggi yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama di bawah Yayasan Ponpes Qamarul Huda.



Ketika berdirinya sekitar tahun 1998 PTAS ini masih afilial IAI Ibrahimy Situbondo. Banyak warga yang masih ragu-ragu atas keberadaan STAI tersebut, mengingat Statusnya belum jelas apakah sudah memiliki izin operasional atau tidak. Isu tentang tidak adanya izin operasional tersebut membuat sebagian mahasiswa keluar dari PTAS ini atau paling tidak jarang bahkan tidak membayar SPP atau jarang masuk kuliah. Namun atas berkat rahmat dan maunah Allah SWT karena kegigihan pihak Yayasan yang disponsori langsung oleh TGH. Lalu Turmudzi Badarudin serta kerjasamanya yang sangat intensif dengan pihak induknya di Situbondo, maka PTAS ini diberi izin operasional dan pada akhirnya juga berhak menyelenggarakan sendiri ujian Negara di bawah pengawasan dan bimbingan Kopertais IV Surabaya. Bahkan beberapa program studi di buka sehingga mendapatkan mahasiswa ribuan orang dan sudah menyelenggarakan ujian dan wisuda sendiri.

Sekolah tinggi ini terdiri dari dua jurusan waktu berdirinya yaitu Tarbiyah dan Syariah, yang salah seorang pimpinannya adalah penulis waktu itu pembantu ketua 1 (Puket I). Sementara ketuanya adalah Bapak Drs. Kamarudin (almarhum), Drs. H. Lalu Azhari sebagai Puket II dan Drs. Sudiatun sebagai Puket III. Oleh karena kesibukan di STAIN/ IAIN Mataram akhirnya penulis tidak aktif. Lalu kemudian setelah Drs. Kamarudin wafat Ketua dipegang oleh Bapak Akhyar Fadli, M.Si. Dalam perkembangan selanjutnya STAI ini menjadi IAI Qamarul Huda dengan tiga fakultas: Tarbiyah, Syariah dan Ushuludin. Bahkan sekarang Yayasan ini mengembangkan dua Perguruan Tinggi yang berbeda, STIKES dan STKIP. Kesemuanya berjalan baik dan cukup menjanjikan masa depan umat Islam khususnya warga Nahdlatul Ulama di daerah ini.

Ketika al-Mukarrom TGH. Lalu Muhammad Faisal menjadi Rois Syariah Nahdlatul Ulama sampai beliau wafat tahun 1996 pada bulan Ramadhan di ponpes yang beliau asuh. Ponpes Manhalul Ulum memang telah dibuka kelas "Takhasus Diniyah" semacam Ma'had Ali dengan jenjang pendidikan selama tiga tahun. Telah banyak alumni yang dihasilkannya, kelas takhasus menerima santri lulusan Madrasah Aliyah. Kelas takhasus memang tujuannya untuk mencetak kader-kader Aswaja yang tangguh di kemudian hari yang diharapkan akan menjadi cikal bakal Syariah di kemudian hari. Kelas Takhasus Diniyah ini didirikan karena produk-produk pendidikan agama baik yang lulusan Madrasah Aliyah Negeri atau swasta khususnya di kalangan Nahdlatul



Ulama masih jauh dari harapan untuk mampu membaca apalagi mendalami kitab-kitab kuning yang ditinggalkan oleh para Ulama Salafush Shālih ala Nahdlatul Ulama. Tetapi sayang kelas takhassus ini bubar setelah beliau wafat.

Belum ada penerus yang mampu melanjutkannya sampai dewasa ini, khususnya dari pihak pengelola Yayasan Manhalul Ulum. Penulis belum tahu apa gerangan penyebabnya? Memang sudah banyak ponpes Nahdlatul Ulama yang membuka kelas khusus ini. Namun masing-masing ponpes mempunyai pola tersendiri sesuai dengan otonominya dalam mengembangkan kelas khusus diniyah ini. Belum ada gagasan dari pihak Nahdlatul Ulama untuk secara struktural (organisatoris) mengkoordinirnya terutama dari pihak RMI atau LP Ma'arif. Memang diakui bahwa pihak Pengurus Wilayah LP Ma'arif dan RMI terutama setelah dipegang oleh Drs. Ahmad Taqiuddin (sekarang TGH. Drs. Ahamd Taqiuddin Manshur, M.Pd.I) sebagai Ketua bersama Drs. H. Marinah Hardi sebagai sekretarisnya telah cukup banyak melakukan terobosan-terobosan di dalam menghidupkan kembali Madrasah-Madrasah atau ponpes-ponpes Nahdlatul Ulama agar langsung berkoordinasi dengan pihak LP Ma'arif atau RMI, misalnya dengan melakukan rapat kerja (raker) di tingkat wilayah maupun mengikuti Rakernas yang diselenggarakan oleh LP Ma'arif dan RMI Pusat.

Dari raker-raker itu dapat didata kembali mana Lembaga pendidikan atau ponpes yang masih bernaung di bawah Nahdlatul Ulama langsung atau diasuh oleh warga Nahdlatul Ulama sendiri. Sebab lembaga pendidikan di Nahdlatul Ulama itu tidak sama dengan lembaga yang dikelola oleh NW atau Muhammadiyah yang sentralistik. Lembaga Pendidikan di Nahdlatul Ulama lebih bersifat desentralistik. Masing-masing Yayasan Lembaga pendidikan berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan kehendak pihak Yayasan sendiri. Sebab rata-rata Yayasan-Yayasan itu memang dikelola oleh warga Nahdlatul Ulama dan bahkan pimpinan Yayasannya adalah Pengurus Nahdlatul Ulama ditingkat MWC atau cabang atau bahkan tingkat Wilayah.

Pihak RMI atau LP Ma'arif memang pernah berusaha mengajak mereka misalnya untuk menyatukan lambang saja atau stempel sekolah atau kop surat agar ada *Bintang Sembilan* nya. Namun sebagian mereka ada yang mau memakainya dan banyak juga yang tidak memakainya. Ponpes-ponpes ini walaupun tidak memakai lambang *Bintang Sembilan*

tidak ada yang tidak tahu bahwa pimpinan atau Tuan Gurunya adalah tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Sebab setiap kegiatan Nahdlatul Ulama sering dipusatkan di ponpes-ponpes tersebut. Itulah ciri-ciri dari lembaga pendidikan di Nahdlatul Ulama yang sangat otonom sehingga kalau misalnya satu ponpes berkeinginan memiliki kegiatan program baru misalnya membentuk Perguruan Tinggi maka ponpes-ponpes yang lain ingin juga mengikutinya atau tidak mau kalah untuk membentuk program yang sama. Paling tidak misalnya ngekor dulu di perguruan tinggi yang sudah berjalan (terakreditasi), setelah mampu baru melepaskan diri dari induknya. Akhirnya perguruan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama berjalan sendiri-sendiri seperti keinginan pengelola yayasan bersangkutan. Begitu juga program-program pendidikan yang lain. Yang terjadi adalah “*Nafsu Besar Tenaga Kurang*”.

Koordinasi dari pihak Nahdlatul Ulama dalam hal ini LP Ma’arif atau RMI hampir tidak berjalan normal artinya masih pincang atau lonjong, bukan bulat seperti bola dunianya Nahdlatul Ulama. Tetapi talinya masih terus longgar seperti talinya Nahdlatul Ulama yang sampai kapan ia mau diikat tidak diketahui. Itulah lembaga pendidikan di Nahdlatul Ulama. Namun kita bersyukur lembaga-lembaga pendidikan itu bersaing sehat dan tidak saling mematikan. Siapa yang gesit, kreatif, dan inovatif itulah yang maju pendidikannya. Sebaliknya pula yang tidak, maka pelan-pelan lembaganya akan gulung tikar dengan sendirinya. Namun yang terakhir ini mudah-mudahan tidak terjadi. *Na’udzu billahi min dzalik*.

Dalam konferensi Nahdlatul Ulama yang ke IX yang diselenggarakan di komplek LP Ma’arif Jln. Pendidikan no. 6 Mataram telah dicetuskan rekomendasi atau taushiyah yang berupa pokok-pokok pikiran Nahdlatul Ulama yang terkait dengan pembangunan baik agama, pendidikan, pembinaan masyarakat di sekitar lokasi pariwisata dan lain sebagainya. Dalam masalah pendidikan misalnya tercetus kehendak untuk merintis sekolah unggulan yang berciri khas Nahdlatul Ulama yang tentunya berokasi di kota Mataram, dalam hal ini di LP Ma’arif Jln. Pendidikan 6 Mataram. Tujuan sekolah unggulan itu adalah untuk mengatasi kebutuhan jama’ah Nahdlatul Ulama bagi pembibitan generasi Nahdlatul Ulama yang berkualitas baik pada bidang IPTEK maupun Imtaq. Namun kehendak yang sangat brilian itu tak dapat dilakukan PWNU sendiri dalam hal ini oleh LP Ma’arif. Sebab pihak yayasan yang diharapkan untuk melaksanakan ide tersebut nampaknya

masih berjalan di tempat. Memelihara yang sudah ada seperti SMP/ SMA saja terasa sulit, bahkan mengalami kemunduran yang sangat menyedihkan baik kuantitas apalagi kualitas pasca Drs. Ahmad Taqiuddin Manshur tidak menjadi Kepala SMA lagi, bahkan SMP nya saja bubar. Walaupun sesudah itu memang dibuka SMK Bina Bangsa yang dikelola oleh Yayasan ini.

Untuk melahirkan generasi Syuriah yang berwawasan luas yang belakangan ini dirasakan mengalami krisis yang tajam, konferwil merekomendasikan agar PWNU sudah memulai memikirkan berbagai alternatif jalan untuk membuka latihan dan pendidikan bagi pembibitan generasi yang memiliki kedalaman ilmu agama dan wawasan keilmuan yang mendalam yang salah satu alternatifnya adalah perlu membuka semacam “Pesantren Mahasiswa” di Mataram atau tempat-tempat lain yang dekat dengan lokasi Perguruan Tinggi atau Universitas. Kehendak ini tidak dapat dilaksanakan di kota Mataram oleh PWNU, karena kebanyakan PWNU khususnya Syuriah banyak berdomisili di luar kota Mataram, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah. Lembaga pendidikan kemudian diwujudkan oleh para Syuriah yang kebetulan mengelola ponpes di tempat mereka masing-masing dengan membuka program takhassus bagi lulusan Madrasah Aliyah atau yang sederajat. Bahkan Rois Syuriah sendiri dalam hal ini TGH. L Turmudzi Badaruddin membuka STAIQ (Sekolah Tinggi Agama Islam Ibrahimy Qamarul Huda) yang merupakan afilial IAI Ibrahimy Situbondo. Mahasiswa-mahasiswa yang kebetulan mondok di ponpes beliau diwajibkan mengikuti kuliah tambahan khusus Mata Kuliah keIslaman pada sore atau pagi hari di ponpes yang beliau asuh.

Di sisi lain di beberapa ponpes juga terus berlanjut tradisi mengaji kitab kuning sebagaimana lazimnya sebuah pondok pesantren. Bahkan perkembangan yang cukup menggembirakan pada masa PWNU 1996-2001 ini di kalangan Pengurus sudah mulai bermunculan tokoh-tokoh muda Nahdlatul Ulama sebagai hasil pendidikan Nahdlatul Ulama sendiri di masa-masa sebelumnya baik lewat kaderisasi yang dilaksanakan oleh ponpes-ponpes itu sendiri atau lewat banom-banom Nahdlatul Ulama yang ada. Banyak kader Nahdlatul Ulama yang melanjutkan studinya ke luar NTB seperti di Jawa, bahkan kader Nahdlatul Ulama yang lulus di beberapa Universitas atau Ma'had di Timur Tengah yang memegang tampuk pimpinan baik di tingkat syuriah maupun tanfidziyah. Salah satu

misalnya, TGH. Nuruddin Husni M.A. adalah alumnus Universitas Umul Qura Mekkah, TGH. Ma'arif Makmun alumnus Sholatiyah Mekkah, Drs A. Taquiuddin alumnus IAIN Walisongo Semarang, Drs. Marinah Hardi (PMII cabang Mataram), Drs. M. Jamiludin (PMII Mataram), Dr. Zaidun Abdullah lulusan Fak. Kedokteran Hewan di sebuah PT di pulau Jawa, dan lain sebagainya. Bahkan kader muda lainnya yang datang dari luar NTB yang kebetulan menjadi Dosen di STAIN (saat ini IAIN) Mataram, seperti Drs. Zaidi Abdad dan lain sebagainya.

Kader-kader ini sebagiannya ada yang masuk dalam kepengurusan di banom-banom atau lembaga-lembaga Nahdlatul Ulama yang ada seperti Fatayat, Muslimat, Ansor, LDNU, LKK Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Kepengurusan di Fatayat misalnya, Dra. Nurul Yaqin, Dra. Nurhayati Murad, Dra. Wartiah, Baiq Elly Mahmudah, S.Ag., Dra. Hatiyatul Malichah dan lain sebagainya. Walaupun kegiatannya juga kembang kempis sesuai dengan kondisi masing-masing banom yang ada. Bahkan hanya sekedar nama saja menjadi pengurus dari pada tidak ada. Dan ini yang banyak ada. Adapun kegiatannya, *Wallahu A'alam*.

Kalau mau melihat Nahdlatul Ulama di NTB khususnya di Lombok, jangan melihat lambangnya terpajang di dekat jalan raya, Tapi lihatlah Nahdlatul Ulama di lembaga pendidikannya dan dakwah yang dilakukan oleh para Tuan Guru (Syuriah) nya termasuk juga dalam tradisi dan budayanya di basis-basis Nahdlatul Ulama itu. Lembaga-lembaga pendidikan (ponpes), dakwah, dan kultur inilah sebenarnya membuat Nahdlatul Ulama itu dapat hidup di Bumi Gora ini. Gerakan Muslimat, Fatayat, Ansor, IPNU, IPPNU dapat saja kembang kempis seperti karet, atau hanya sekedar nama saja mewakili Nahdlatul Ulama secara struktural dalam even-even tertentu saja. Namun kalau ponpesnya, madrasah nya, dakwahnya dan kultur (tradisi) seperti tahlilan, istighatsah, serakalan, maulidan dan lain sebagainya berjalan dengan baik, maka hiduplah NU itu.

Ketiga gerakan inilah sebenarnya yang membuat NU hidup sampai sekarang ini. Kalau mau mencari materi, HR, gaji, nafkah hidup di NU jangan harap itu. Tapi kalau mau mencari pahala, untuk beramal saleh, beribadah, bersedekah jariyah dan lain sebagainya tentu di Nahdlatul Ulama lah tempatnya. Karena itu hidupilah Nahdlatul Ulama, tapi jangan hidup lewat Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu bukan partai politik sehingga kalau dipilih dalam pemilu mendapat gaji

di DPR, DPRD Tk I , DPRD Tk II, bahkan DPD. Nahdlatul Ulama itu tidak demikian. Namun demikian Nahdlatul Ulama itu tidak berarti tidak perlu uang untuk menghidupinya. Uang itu perlu agar Nahdlatul Ulama itu hidup sebagai ormas yang maju. Tapi untuk mencarinya di situlah tugas pengurus yang ada. Bukan sekedar pengurus yang menjadi urusan terus. Tentunya dalam mencarinya harus sesuai dengan ajaran Nahdlatul Ulama itu sendiri.

Sebab akhir-akhir ini sudah mulai ada usaha pihak lain yang tidak senang dengan Nahdlatul Ulama dan kulturnya. Dan inilah perlunya Nahdlatul Ulama secara struktural bergerak. Baik PWNU sendiri maupun banom dan lembaga-lembaganya. Sebab kalau tidak bergerak, maka tradisi dan ajaran Aswaja Nahdlatul Ulama akan dihabisi oleh kelompok lain. pengelolaan masjid-masjid, mushalla-mushalla dan pembelajaran paham Ahlusunnah wal Jamaah kepada mereka yang ada di masjid-masjid dan mushalla-mushalla yang susah payah dibangun oleh warga Nahdlatul Ulama. Jangan biarkan tradisi Aswaja Nahdlatul Ulama hilang di tempat yang mulia itu. Ajarkan dan lestarikan ajaran Aswaja Nahdlatul Ulama di ponpes-ponpes Nahdlatul Ulama dan di madrasah-madrasah yang ada. Jangan dibiarkan mereka merana laksana anak ayam kehilangan induk. Sebab kalau dibiarkan, maka kelompok lain akan menguasainya dan akhirnya nanti akan berganti warna. Disinilah pentingnya PWNU struktural bergerak berkoordinasi dengan semangat baja bersama banom-banom dan lembaga-lembaga yang ada di Nahdlatul Ulama sendiri mulai dari tingkat wilayah sampai dengan ranting (jama`ah). Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada uraian-uraian lainnya dalam tulisan ini.

*Wallahua`alamu bis Showab wa Ilaihi al Marji`u wal Maab.*

# B A B IX

## NAHDLATUL ULAMA DAN ORDE REFORMASI

### A. Nahdlatul Ulama dan Menjelang Reformasi

Transisi demokrasi bukanlah hal mudah yang dapat dinikmati oleh semua insan yang hidup di Indonesia. Demokrasi merupakan pilihan bangsa Indonesia dalam menata dan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pelaksanaannya mengalami berbagai ujian dan rintangan yang tidak biasa. Berbagai kasus kekerasan secara fisik maupun mental melanda negeri ini, penculikan mahasiswa dan segolongan masyarakat yang berusaha hadir sebagai reformator, menyatukan visi membangun bangsa untuk negara yang lebih baik.

Pasca usainya orde baru yang dipelopori oleh Mahasiswa tepatnya 21 Mei 1998, memberikan harapan buat bangsa Indonesia, yang mana kurang lebih 32 tahun bangsa Indonesia berada dalam kungkungan rezim otoriter. Angin segar bagi rakyat Indonesia, lebih-lebih saat Gusdur menjadi presiden, Gusdur merupakan salah satu tokoh yang terkenal dengan konsep demokrasi dan reformasinya. Walaupun terkadang kebijakan Gusdur selalu berubah-ubah, dan membingungkan. Jelaslah bahwa gerakan penumbangan rezim Soeharto oleh meluasnya ketidakpuasan di kalangan masyarakat luas, Krisis ekonomi dan ketidakpuasan atas situasi politik melahirkan gerakan 98 tersebut.

Ada satu informasi yang tidak pernah muncul ke publik tentang peran ulama, ceritanya sebelum Soeharto turun dari kursi empuk

presiden, beliau telah mengundang beberapa tokoh agama ke istana untuk mencari solusi tentang pandangan membangun bangsa dimasa mendatang. Pesan dari tokoh agama kepada presiden, tantangan berbangsa dan bernegara dimasa mendatang menjadi tantangan yang sangat sulit jika elemen-elemen bangsa seperti organisasi keagamaan, sosial dan masyarakat tidak dirangkul atau diakomodasi kedalam pemerintahan.

Salah satu tokoh yang diundang ke istana adalah Gus dur. Beliau memberikan pandangan dan mengatakan kepada Presiden Soeharto; “Jika bapak tidak mengakomodasi keinginan masyarakat maka akan terjadi pemberontakan dimana-mana, demonstrasi yang akan mengganggu jalannya pemerintahan. Stabilitas politik dan keamanan tidak akan terkendali dengan baik”.<sup>305</sup>

Namun sepertinya Presiden Soeharto tidak menghiraukan pendapat tokoh agama atau kesimpulannya presiden yang tidak mendengar pandangan tokoh-tokoh tersebut, yang akhirnya tidak lama kemudian terjadi demonstrasi besar-besaran, demonstrasi yang digagas mahasiswa pada tahun 1998 yang mengakibatkan presiden kedua RI itu turun dari kursi kepresidenan.

Dari penjelasan di atas dapat kita menarik informasi tersirat bahwa sebelum Amin Rais menjadi pentolan penurunan Soeharto, ternyata ulama Indonesia telah lebih dahulu memberikan solusi kepada presiden berkuasa untuk turun dari tahta atau memperbaiki sistem pemerintahannya dari sistem otoriter menjadi pemerintahan yang akomodatif. Artinya semua elemen bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk membangun bangsa indonesia secara bersama-sama.

Kenyataan dimasa Orde Baru, negara seolah menjadi milik segelintir orang yang memegang tampuk kekuasaan. Jikalau kita analogikan sebagai kendaraan, maka kendaraan tersebut semuanya dikendalikan oleh sopir saja, seolah-olah penumpang tidak mampu dan boleh menjadi sopir. Kekuasaan dan kewenangan yang super power, dengan alat tersebut mampu mencukur nalar kritis dengan tidak boleh melawan pemerintah.

---

<sup>305</sup> Pernyataan Gusdur kepada Presiden Soeharto sebelum terjadi demonstrasi besar-besaran sehingga berujung Era Reformasi.

Realita impotenisasi daya berfikir kritis memang terjadi diseluruh wilayah termasuk di Lombok. Masyarakat tidak berani menginterupsi kebijakan pemerintah, karena konsekwensi di antaranya ialah pengucilan, pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan lain sebagainya.

Kejamnya noda Orde Baru membuat masyarakat Indonesia terlelap begitu lama. Kerinduan tentang dakwah secara terbuka pun menjadi hal yang langka, diawasi dan diintimidasi oleh kekuatan militer yang notabene di bawah kekuasaan presiden, yang jika menyimpang dari kehendak Orde Baru berujung dengan maut.

Salah satu kisah orde baru yang terjadi di Lombok adalah adanya pengawasan kegiatan-kegiatan agama. pengawasan ini tidak hanya terjadi pada masyarakat melainkan juga di Masjid saat melaksanakan Khutbah Jum'at. Pemerintah mengawasi isi ceramah dan jika bertentangan dengan batasan pemerintah maka dengan serta merta diturunkan dari mimbar, seperti di daerah Batujai dan lain-lain.<sup>306</sup> Dan dengan mudahnya dianggap sebagai pengkhianat negara dan harus dilenyapkan. Contoh di atas memberikan gambaran tentang dahsyatnya kehidupan masa Orde Baru.

Sebagai bagian darimasyarakat akademisi, kita tidak menjadi buta dan terhindar dari validitas sejarah ketika hanya melihat kekurangan dari sistem pemerintahan. Setiap pemerintah memiliki kelebihan dan kekurangan. Pemerintah tentu tidak ingin melihat masyarakatnya fakir maupun miskin atau bahkan tertinggal dari negara tetangga. Sebagai negara yang telah berusia lebih dewasa, Presiden Soeharto memang mengemban tugas kenegaraan yang tidak mudah dan bahkan rentan gagal, namun dengan kecakapannya mampu meletakkan pondasi pembangunan negara yang baik. Kondisi negara yang carut marut dan rentan terprovokasi oleh intervensi asing menurut sang Bapak Pembangunan menggunakan pemerintahan yang otoriter merupakan solusi untuk menjalankan kekuasaannya.

Salah satu keberhasilan dari Bapak Pembangunan adalah mampu menggirahkan kehidupan masyarakat Lombok. Lombok yang luasnya kurang lebih 4.758,65 KM<sup>2</sup>. Daerahnya yang subur namun tidak produktif dan menghasilkan, tandus namun tidak kekeringan. Itulah pernyataan yang menurut penulis tepat untuk Lombok, dengan kondisi yang tidak

---

<sup>306</sup> Ust. H. Muhammad Zaki, *Wawancara*, di Batujai Tanggal 31 Oktober 2015.



tentu, sebagian daerah di Lombok Tengah (di antaranya Batujai) adalah daerah yang sebagian tanahnya di bagian barat termasuk tanah yang sulit ditanami sebagaimana dengan tanah lain pada semestinya. Dengan kekuasaannya, Soeharto membangun waduk yang disebut “Bendungan Batujai” memberikan saluran irigasi yang memadai untuk menjamin pertanian masyarakat.<sup>307</sup> Demikian pula, tanah yang tidak terjangkau waduk, memperoleh pendampingan dan penyuluhan cara pertanian yang baik yang disebut “Gora”. Sehingga daerah lombok dengan “Bumi Gora”. Keberhasilan beliau yang lain adalah dengan sikap visionernya telah mempersiapkan luas tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Lombok. Walaupun tidak dapat tercapai sampai akhir masa jabatannya.

## B. Nahdaltul Ulama di Orde Reformasi

Pasca orde baru, kata demokrasi menjadi kata yang sangat populer dikala itu. Demokrasi secara *etimologis* terdiri dari dua kata berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat (penduduk suatu tempat) dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan. Oleh karena itu, menurut Abraham Lincoln demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara.<sup>308</sup>

Pendefinisian kata “demokrasi” memang mudah diucapkan tapi sulit diaplikasikan. Kita kesulitan menentukan batasan pemerintahan mana yang dikatakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Belum ada definisi yang jelas dari ketiga item tersebut. namun yang perlu digarisbawahi bahwa demokrasi merupakan landasan pengembangan masyarakat. Popularitas pemerintahan yang demokratis di era reformasi adalah pemerintah yang menjadikan kebijakannya transparan, demokratis, populis dan senantiasa berpihak kepada rakyat itulah *core* dari reformasi.

Lalu apakah yang dimaksud dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ?. Menurut Ubaidillah dan kawan-kawan menyatakan *Pertama*, pemerintahan dari rakyat, mengandung

---

<sup>307</sup> Bendungan Batujai dibangun pada tahun 1971 oleh Presiden Soeharto, terletak antara Desa Batujai dan Kota Praya. Lombok Tengah.

<sup>308</sup> Modul perkuliahan PGMI Pendidikan Kewarganegaraan. LAPIS PGMI.

pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi. Pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting, karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya. *Kedua*, pemerintahan oleh rakyat, memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elit negara atau elit birokrasi, ataudengan kata lain dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah beradadalam pengawasan rakyat. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung oleh perwakilannya. *Ketiga*, pemerintahan untuk rakyat mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis.<sup>309</sup>

Menjadi negara demokratis tidaklah muncul secara tiba-tiba, muncul dari keberagaman dan kesadaran atas kemajmukan, sehingga membutuhkan norma dan rujukan praktis dari masyarakat yang telah maju dalam berdemokrasi. Setidaknya ada enam norma yang dibutuhkan dalam oleh tatanan masyarakat yang demokratis. Keenam norma itu adalah<sup>310</sup>;

*Pertama*, kesadaran akan pluralisme. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagai negara yang majemuk, pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan harus diwujudkan dalam sikap orang dan kelompok lain sebagai bagian dari kewajiban warga negara dalam menjaga dan melindungi hak orang lain

*Kedua*, musyawarah. Merupakan kedewasaan setiap warganegara untuk dapat bernegosiasi dan melakukan kompromi sosial dan politik secara bebas dan damai dalam setiap keputusan bersama. Konsekuensi dari prinsip ini adalah kesediaan setiap orang maupun kelompok untuk menerima pandangan yang berbeda dari orang lain.

---

<sup>309</sup> Dikutip Dari Pendapat Ubaidillah, Dkk: 2006 Dalam Modul Perkuliahan PGMI.

<sup>310</sup> Ubaidillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2009).

*Ketiga*, cara haruslah sejalan dengan tujuan. Norma ini mengajarkan bahwa hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan

Keempat, norma kejujuran dalam kemufakatan, suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat untuk mencapai kesepakatan yang memberi keuntungan semua pihak

*Kelima*, kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban. Pengakuan akan kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban bagi semua merupakan norma demokratis yang diintegrasikan dengan sikap percaya pada i'tikad baik orang dan kelompok lain.

*Keenam*, *trial dan error dalam berdemokrasi*. Demokrasi bukanlah sesuatu yang telah siap saji, tetapi ia merupakan sebuah proses tanpa henti.

Kemajemukan masyarakat adalah nilai plus sebagai eksistensi negara yang terdiri dari ribuan suku di 34 provinsi, keanekaragaman ini mampu dipersatukan oleh suatu ideologi yaitu Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa.

Kesejatian hidup berdampingan dengan damai ada di Indonesia, keberagaman dalam bingkai agama, suku, ras terjamin eksistensinya oleh negara. Hak berpendapat, berserikat, berkumpul dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Sebagai contoh hak berserikat dan berkumpul, Islam memiliki berbagai organisasi yang dapat mewadahi aspirasinya, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Demikian juga agama-agama lainnya.

Beberapa unsur tegaknya demokrasi yaitu negara hukum, masyarakat madani, parameter tatanan kehidupan demokratis, pemilu dan partai politik dalam sistem demokrasi, dan aliansi kelompok strategis. Pilar-pilar ini berjalan dengan baik maka baiklah demokrasi itu, namun sebaliknya jika pilar-pilar ini rusak salah satunya maka rusaklah tatanan demokrasi tersebut. Untuk mewujudkan demokrasi yang maju, dituntut kesadaran universal sebagai warga negara yang baik.

Bagaimana pandangan Islam tentang demokrasi ?

Setiap agama memiliki pandangan masing-masing tentang demokrasi, termasuk juga Islam. Menurut Pandoyo yang dikutip dari

Trianto dan Triwulan bahwa asas atau prinsip demokrasi menurut Islam adalah sebagai berikut;

1. Adanya asas musyawarah dalam mengambil atau menetapkan semua keputusan tentang kebijaksanaan umum, baik menyangkut kehidupan bernegara, bermasyarakat maupun kehidupan beragama
2. Pemerintah negara bertanggungjawab kepada tuhan dan rakyat
3. Kehendak rakyat harus dijunjung tinggi, rakyat berhak mengawasi jalannya pemerintah untuk selalu bermusyawarah dengan rakyat dalam menyelenggarakan urusan-urusan kemasyarakatan
4. Semua manusia mempunyai kedudukan yang sama dimata tuhan

Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara sempat terjadi perdebatan tentang ideologi. Namun dengan tegas Nahdlatul Ulama mendukung pancasila sebagai pandangan berbangsa dan bernegara. Karena nilai-nilai Islam termaktub dalam sila ke 1-5, demikian pula pancasila menjunjung tinggi keberagaman berbangsa dan bernegara

Bagaimana peran Nahdlatul Ulama di era Demokrasi dan Reformasi?

Hingga era 1990 an, Nahdlatul Ulama bertindak secara dinamis melewati lima fase kehidupan dalam perjalanannya. Fase pertama, fase pra kemerdekaan. Pada fase ini Nahdlatul Ulama dengan sepenuh jiwa dan raga ikutserta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dengan ditandai dengan keluarnya Resolusi Jihad oleh KH. Hasyim Asy`ari. Fase kemerdekaan. Pada fase ini Nahdlatul Ulama fokus pada penyebarluasan dan aplikasi paham *Ahlussunnah Waljama'ah*, fase ini ditandai dengan maraknya pondok pesantren diberbagai daerah. Fase kedua adalah keterlibatan langsung Nahdlatul Ulama dalam partai politik, kondisi ini berawal kondisi dan situasi kebangsaan waktu itu, hingga Nahdlatul Ulama bergabung dalam partai Masyumi dan PPP. Fase ketiga adalah fase kembali ke khittah 1926, dan fase keempat adalah fase era reformasi.

Gerakan reformasi bukanlah ujuk-ujuk muncul tanpa sebab, reformasi hadir sebab kegagalan orde baru, zaman di mana yang kuat makin kuat dan yang lemah tertindas, yang berkuasa makin sehat dan rakyat melarat. Beberapa kegagalan dalam masa orde baru dalam pandangan Nahdlatul Ulama diantaranya adalah<sup>311</sup> sistem perekonomian yang dijalankan pemerintah yaitu mengkopi sistem kapitalisme sebagai ideologi pembangunan, sehingga maju tidaknya masyarakat diukur dengan maju tidaknya perekonomian. Kegagalan berikutnya adalah pembangunan alternatif yaitu pembangunan yang menempatkan negara sebagai agen otonomi, secara otomatis negara semakin kuat dan melemahnya kekuatan perubahan pada masyarakat. Pembangunan politik tidak lagi membangun melainkan memenuhi syahwat politik kekuasaan dalam hal ini adalah pemerintah dengan Golkar sebagai penguasa

Bagaimana menurut Nahdlatul Ulama tentang konsep pembangunan yang Humanis ?

Memang tidak ada model pembangunan yang paling baik cocok diterapkan sebagai model pembangunan di semua negara. Semua memiliki tantangan masing-masing. Beberapa pandangan Nahdlatul Ulama tentang hubungan humanis yaitu pemberdayaan masyarakat dapat dikelola dengan menggunakan sistem OTDA (Otonomi Daerah) sehingga tidak mengulang kesalahan yang dilakukan Orde Baru, OTDA dianggap dapat dipahami sebagai partisipasi yang bisa menurunkan tensi sosial yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

Pembangunan yang berhasil dalam kacamata Nahdlatul Ulama adalah pembangunan yang mempunyai unsur-unsur pencapaian pertumbuhan ekonomi memunculkan pemerataan baik masalah sosial maupun lingkungan. Perilaku sosial disebabkan lingkungan dan mempengaruhi karakteristik kualitas lingkungan.<sup>312</sup>

Orde reformasi ini dimulai setelah lengsernya Presiden Soeharto yang memangku jabatan beberapa bulan setelah pemilu 1997. Beliau dipilih MPR yang waktu itu diketuai oleh Harmoko (Ketua Umum Golkar) yang karena desakan rakyat dan mahasiswa melalui demonstrasi

---

<sup>311</sup> Wardi Taufiq, Sufardi Nurzaim, & Rokib Ismail, DIKALA TRANSISI TERSANDUNG Narasi Khidmat Nahdlatul Ulama 1999-2004. hlm. 20.

<sup>312</sup> Sunyoto Usman. *Perkembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm 226.

besar-besarnya di mana-mana dan banyak menelan korban sehingga mengakhiri kekuasaan Presiden yang berkuasa selama 32 tahun sejak lahirnya Orde Baru (1965-1997) menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden. Kemudian jabatan Presiden berikutnya dipegang oleh Wakilnya, yaitu Prof. BJ. Habibie selama beberapa tahun saja. Sekedar mengantarkan kepada penyelenggaraan pemilu 1999 yang diikuti oleh banyak partai politik (multi Partai).

Hal lain yang membuat Nahdlatul Ulama mahal secara politik adalah jaringannya. Kehadiran Nahdlatul Ulama dalam sejarah Indonesia jelas jauh lebih tua dari partai politik manapun. Nahdlatul Ulama termasuk ormas yang paling tua yang kini masih beroperasi. Tradisi silaturahmi antar jaringan Nahdlatul Ulama tentu termasuk yang paling mengakar. Nahdlatul Ulama jugahadir di seluruh pelosok Tanah Air, walau ia lebih terkonsentrasi di tanah Jawa. Untuk dunia politik praktis, jaringan yang solid diseluruh teritori Indonesia sangat bernilai jual. Semua partai yang ikut dalam pemilu belum mengembangkan jaringan yang bersifat kultural dan emosional seperti Nahdlatul Ulama.<sup>313</sup>

Jika partai atau politisi itu dapat tersambung dengan jaringan Nahdlatul Ulama, ia segera menjadi kekuatan politik yang mendapatkan dukungan *grass root*. Hubungan antara pemimpin lokal Nahdlatul Ulama dan komunitas lokalnya juga memiliki pertautan khusus. Hubungan kiai dan santri paling dalam dan emosional dibandingkan dengan hubungan ketua umum partaidan anggota partai, misalnya. Kiai lokal dengan mudah menjadi representasi komunitas lokal Nahdlatul Ulama. Dengan menguasai kiai lokal, komunitas lokal Nahdlatul Ulama, juga sedikit banyak akan terbawa.<sup>314</sup>

Sejarah Nahdlatul Ulama makin mengentalkan pula daya tarik politiknya. Sejak reformasi, siapapun yang menguasai Nahdlatul Ulama segera menjadi figur politik penting. Gus Dur yang pernah menjadi Ketua Umum Nahdlatul Ulama tercatat sebagai Presiden RI pertama era reformasi. Hasyim Muzadi yang juga pernah menjadi Ketua Umum NU menjadi cawapres yang diperebutkan. Hanya saja nasib Hasyim tidak sebaik nasib Gus Dur dalam perolehan jabatan publik.<sup>315</sup>

---

<sup>313</sup> Denny, J. A. *Jalan Panjang Reformasi*, (Yogyakarta: LKIS, 2006), hlm. 384

<sup>314</sup> *Ibid.*, hlm 384

<sup>315</sup> *Ibid.*, hlm. 385

Nahdlatul Ulama memandang bahwa kegagalan orde baru seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa akibat krisis kepemimpinan dan krisis moneter atau lebih dikenal dengan istilah *Krismon*. Faktor penyebabnya adalah korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang dapat menghilangkan hak-hak orang lain yang lebih membutuhkan.

Korupsi atau populis dengan pencurian uang negara baik yang dilakukan terang-terangan maupun terselubung sejak Republik ini ada. Korupsi tidak saja dimaknai hilangnya uang negara juga dapat dimaknai penyelewengan kekuasaan akan terus mengganggu terhadap keberlangsungan bangsa Indonesia.

Munas 2002, Nahdlatul Ulama merumuskan bahwa korupsi merupakan pengkhianatan berat (*ghulul*) terhadap amanah rakyat. Korupsi dapat dikatakan sebagai pencurian atau perampokan, tetapi korupsi biasanya dilakukan oleh orang-orang berdas, sedangkan perampokan yang biasa didengar tidak berdas. Lalu tidak ada bedanya. Pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama, semua insan yang tinggal di Indonesia bertanggung jawab terhadap model pencurian uang negara, masyarakat kecil dapat melaporkan jika ada yang mencurigakan dari setiap aktivitas seseorang yang tidak wajar.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai organisasi yang berlandaskan kekuatan moral, mempunyai kapasitas dan pengaruh untuk mendorong reformasi tersebut. salah satu kebutuhan utama reformasi adalah menciptakan kesadaran dan kepekaan masyarakat tentang pentingnya pemberantasan korupsi dan reformasi tata kelola pemerintahan. Selanjutnya antara PBNU dan PP Muhammadiyah dan kemitraan melakukan MoU tentang “Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi” yang ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2003 di Jakarta oleh KH. Hasyim Muzadi (Ketua Umum PBNU), Prof. Dr. Syafi’i Ma’arif (Ketua PP Muhammadiyah), dan Dr HS Dillon (Direktur Eksekutif Kemitraan).

Rencana aksi merinci tindakan *kongkret* melalui empat program besar seperti tertuang dalam MoU, yakni;

- Membuat tafsir tematik dan fiqh anti korupsi
- Menyusun kaidah-kaidah kepemimpinan yang mendorong tata pemerintahan yang baik

- Melakukan kampanye nasional untuk membangkitkan dukungan masyarakat mengenai gerakan nasional anti korupsi
- Membangun sebuah manajemen organisasi yang baik untuk mengimplementasikan sistem pencegahan korupsi dalam rangka tata pemerintahan yang baik, yang meliputi prinsip-prinsip: akuntabilitas, partisipasi, transparansi, integritas, keadilan, dan kesetaraan.<sup>316</sup>

Tak disangka, tumbangnya kekuasaan Soeharto kemudian membangkitkan syahwat politik Nahdlatul Ulama. Dalam orde reformasi ini syahwat politik Nahdlatul Ulama mulai bangkit kembali. Karena Undang-Undang Parpol membebaskan rakyat untuk membentuk parpol. Nahdlatul Ulama pun secara struktural membentuk partai politik sendiri sebagai penyalur aspirasi resmi warga Nahdlatul Ulama yang tidak tertampung di partai yang ada. Partai itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dibidani langsung oleh PBNU. Walaupun banyak tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang tidak setuju dengan kelahiran PKB ini. Lalu kemudian ada di antara mereka yang melahirkan partai sendiri dengan nama PKU (Partai Kebangkitan Umat) yang dipelopori oleh KH. Yusuf Hasyim (paman Gus Dur) dan Gus Solahudin Wahid (adik Gus Dur), kemudian PNU (Partai Nahdlatul Umat) yang dibidani oleh KH. Syukron Makmun dan partai Suni yang dibidani oleh H. Abu Hasan rival Gus Dur di muktamar Cipasung 1994 sebagaimana yang penulis sebut dalam uraian sebelumnya.

Kelahiran PKB dan partai-partai lain dari kalangan Nahdliyyin adalah tidak melalui Muktamar Nahdlatul Ulama sama dengan lahirnya PPP dulu kala tanpa lewat muktamar pula. Karena instruksi PBNU maka di semua pengurusan Nahdlatul Ulama baik tingkat wilayah dan cabang lahirlah PKB.

PKB ini menurut PBNU adalah satu-satunya parpol yang sah dari Nahdlatul Ulama, karena ia dibidani langsung oleh PBNU sendiri atas desakan dari bawah. Sementara yang lain tidak merupakan parpol yang sah. PKB ini parpol anak emas Nahdlatul Ulama dan partai yang lain kurang lebih seperti halnya anak tiri.

---

<sup>316</sup> Wardi Taufiq, Sufardi Nurzaim, & Rokib Ismail, *dikala...*, hlm 48-49.



Gerakan politik ini menjadi ujian bagi Nahdlatul Ulama untuk mempertahankan diri sebagai organ yang tetap eksis dalam dakwah keumatan. Apakah jama'ah Nahdlatul Ulama bisa tetap berkonsentrasi dalam bidang pengembangan dakwah atau lebih memilih mengembangkan jalur politik dengan PKB sebagai kendaraan politiknya. Ini yang menjadi wilayah analisis penulis bahwa sepertinya Nahdlatul Ulama tidak ingin kehilangan gigi politik dan pengembangan dakwah sosial keumatan. Dari gerakan politik itu terlihat upaya Nahdlatul Ulama untuk memadukan gerakan kultural dan gerakan struktural yang berada dalam domain negara. Peran gerakan kultural dan struktural dimainkan oleh partai bentukan Nahdlatul Ulama sebagai partai sayap Nahdlatul Ulama.<sup>317</sup>

Hal lain memang dirasakan bahwa di era reformasi, Nahdlatul Ulama menjadi salah satu magnet yang paling berpengaruh pada waktu itu, ditambah dengan jaringannya yang sangat luar biasa. Meminjam tipologi yang dibangun oleh Clifford Geertz (1989) dalam Sembodo Ardi Widodo terhadap penggolongan kaum muslim menjadi santri, priyayi dan abangan atau dikenal dengan trikonomi yang banyak memunculkan perdebatan tersebut. Maka, tak berlebihan bila dikatakan bahwa kepemimpinan GusDur, merupakan periode naiknya santridalam pentas politik di tingkat nasional, ataubisa disebut dengan santrinisasi politik. Prestasi tersebut tidaklah berlangsung lama, karena tak lama kemudian Gus Dur pun lengser dari kursi kepresidenan, dandigantikan oleh Megawati Soekarno Putri, yang kebetulan waktu itu beliau menjabat sebagai wakil presiden.<sup>318</sup>

Sama berpengaruhnya dengan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah yang juga merupakan organisasi besar di Indonesia, dinahkodai oleh Amien Rais juga turut berperan dalam peletakan cita-cita demokrasi di Indonesia sebagai amanat reformasi. Gusdur dan Amien Rais dua tokoh Islam dengan massa yang tidak sedikit mampu membuktikan bahwa Islam sangat mendukung demokrasi dalam membangun masyarakat madani.

---

<sup>317</sup> Martin, Ali. Skripsi Universitas Indonesia. *Gerakan politik Nahdlatul Ulama di Era Reformasi Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Nasional*. 2013.

<sup>318</sup> Sembodo Ardi Widodo. *Islam Dan Demokrasi Pasca Orde Baru*. UNISIA, Vol. XXX No. 65 September 2007, hlm. 217.

Konsep masyarakat madani (*civil society*) adalah sebuah tatanan komunitas masyarakat yang mengedepankan toleransi, demokrasi dan berkeadaban. Disisi lain masyarakat madani mensyaratkan adanya toleransi dan menghargai adanya pluralisme (kemajemukan).<sup>319</sup>

Masyarakat madani dalam perspektif Islam mengacu kepada nilai-nilai kebajikan umum yang disebut al-khair. Masyarakat seperti itu harus dipertahankan dengan membentuk persekutuan-persekutuan, perkumpulan, perhimpunan atau asosiasi yang memiliki visi dan pedoman perilaku. Cermin masyarakat Madinah itu adalah masyarakat yang didirikan di atas ketetapan hati para pendukungnya untuk tetap bertahan dalam cara, jalan, dan pesan Allah baik Qur'ani ataupun Kauni sebagai perwujudan suatu kultur dan peradaban yang sehat dan berakar kokoh dalam proses kesejarahan, sekaligus yang berpenampilan kerahmatan, dalam susunan dan tata kemasyarakatan. Yaitu suatu ciri masyarakat Islami dengan pendukung-pendukung yang terlebih dahulu berkepribadian Islami.<sup>320</sup>

Memaknai reformasi memang menimbulkan pandangan yang berbeda-beda. Situasi dan kondisi negara sangat carut marut. Pada tanggal 15 April 1998, berkaitan dengan situasi tanah air yang sangat memprihatinkan terutama berkaitan dengan dampak dari tuntutan reformasi, PBNU mengeluarkan pernyataan tentang reformasi yang ditandatangani oleh K.H M. Ilyas Ruchiat (Rais Aam), KH. Dawam Anwar (Katib Aam), dan lain sebagainya; adapun rumusannya sebagai berikut;

*Pertama*, reformasi dalam pandangan Nahdlatul Ulama adalah islah. *Kedua*, bahwa tuntutan reformasi yang semakin marak didalam masyarakat akhir-akhir ini, merupakan puncak dari keinginan perbaikan yang sudah sejak lama disuarakan. *Ketiga*, gerakan yang dilakukan mahasiswa dewasa inipun harus ditanggapi positif dan tidak apriori harus ditentang, apalagi dimusuhi. *Keempat*, mengingat badai krisis yang menerpa dan dampaknya mengenai semua, maka semua pihak hendaklah menjaga sikap *i'tidal*<sup>321</sup>

Multi krisis negeri kita tercinta Indonesia diawal reformasi memberikan tantangan pada Nahdlatul Ulama untuk melahirkan

---

<sup>319</sup> Modul Perkuliahan PGML, *Pendidikan...*, hlm. 9-14.

<sup>320</sup> *Ibid.*, hlm. 10-14.

<sup>321</sup> Diringkas dari tesis Martin Ali, hlm, 92-95.

generasi kepemimpinan nasional. Krisis kepemimpinan menuntut Nahdlatul Ulama muncul digarda depan dalam bentuk dan formulasi yang sudah dimiliki Nahdlatul Ulama sendiri. Akibat itu, polarisasi politik Nahdlatul Ulama cenderung lunak ketimbang organ lainnya.

Reformasi yang terjadi di Indonesia bisa dianalogkan dengan revolusi Bolsyevik dan revolusi Prancis. Ketika reformasi tidak disertai kesadaran makna masyarakat, hanya memahami sebagai pergeseran makna kekuasaan semata. Warga Nahdlatul Ulama tidak menyadari bahwa substansi reformasi mengarah pada Indonesia Baru dengan konsekuensi tertentu, tetapi apa yang terjadi sebaliknya dijadikan aji mumpung. Pada konteks ini generasi muda Nahdlatul Ulama seharusnya tidak hanya melakukan kaderisasi secara internal, tetapi juga melakukan transformasi sosial.<sup>322</sup>

Pada pemilu 1999, memang mendapatkan suara yang signifikan di tingkat pusat dan termasuk partai besar setelah PDIP pimpinan Megawati, Golkar, barulah PKB yang nomor tiga. Sementara partai lain ada yang lahir dari kalangan Muhammadiyah yang disebut Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipimpin langsung oleh mantan Ketua Muhammadiyah Prof. DR. Amin Rais, yang oleh banyak kalangan beliau disebut sebagai Bapak Reformasi yang waktu itu beliau ikut serta mendongkel Soeharto sebagai Presiden sehingga jatuh dari singgasananya. Termasuk Gus Dur misalnya dengan gerakan demokratisasinya sejak beliau menjadi ketua umum PBNU yang menurut banyak kalangan mampu memimpin Nahdlatul Ulama sebagai tokoh *Civil Society* lewat gerakan kulturalnya di Nahdlatul Ulama yang karena itu Gus Dur dikesankan banyak kalangan sebagai tokoh oposisi orde baru.

Nahdlatul Ulama NTB tidak lepas dariuforia politik ini. Pentolan-pentolan politik Nahdlatul Ulama yang dahulunya memang mereka adalah politisi di kalangan Nahdliyyin di daerah Bumi Gora ini mulai genit membuat partai. Maka tim sembilan membentuk PKB di tingkat wilayah yang ketuanya adalah Lalu. Muh. Chatim, BA. dan sekretarisnya adalah Drs. A. Taquiuddin Mansur. Dalam pemilu 1999 PKB NTB tidak mampu mengirim wakilnya di Senayan. Di DPRD Tk I hanya mendapat dua kursi saja yaitu L. Muh. Chatim, BA. (mewakili Lombok Tengah) dan Drs. A. Taquiuddin Mansur (mewakili Lombok Barat). Semenantara

---

<sup>322</sup> Wardi, Taufiq, Sufardi Nurzaim & Rokib Ismail, *Dikala...*, hlm. 36.

rival Gus Dur di Nahdlatul Ulama NTB Bapak Bil'id MS.A membentuk PNU mendapat satu kursi dalam hal ini Lalu Putrajap, BA. dan Partai Suninya Abu Hasan diisi H. Fathurrahman Zakaria di DPRD Tk I.

PKB NTB belum mampu mengambil suara Nahdlatul Ulama yang hilang sejak Nahdlatul Ulama kembali ke Khittah 1926 di NTB ini. Kalangan warga Nahdlatul Ulama banyak yang masih duduk di Golkar dan juga di PPP. Tokoh PPP waktu itu adalah TGH. Anwar MZ adalah pimpinan Ponpes Darun Najah Duman Lingsar yang kelak pada kepengurusan Nahdlatul Ulama 2007-2012 memegang posisi Wakil Rois Syuriah Nahdlatul Ulama NTB setelah beliau istirahat dari politik. Nampaknya warga NU NTB tidak mau di atur-atur kalau dalam masalah politik praktis. Mereka rupanya sudah cerdas. Mereka memilih parpol yang mereka sukai sesuai dengan kehendak hati nuraninya asalkan dengan penuh tanggungjawab sebagaimana semangat di dalam Khittah NU 1926.

Kader Nahdlatul Ulama sudah sangat paham bahwa khittah 1926 memberikan kebebasan pada mereka untuk memilih partai masing-masing. Kenetralan Nahdlatul Ulama dalam berpolitik memberikan wajah baru bagi Nahdlatul Ulama untuk tidak menggiring jama'ahnya kesatu parpol saja. Netralitas Nahdlatul Ulama di politik praktis sudah dipahami oleh mereka. Yah karena mereka mengetahuinya melalui para pengurus Nahdlatul Ulama sendiri yang gencar mensosialisasikan khittah itu sejak Nahdlatul Ulama kembali ke khittah 1926.

Pergantian pimpinan nasional dari BJ. Habibie kepada Gus Dur terjadi pada tahun 1999. Gus Dur dipilih oleh MPR atas inisiatif Poros Tengah yang dipimpin oleh Ketua Umum PAN Amin Rais yang waktu itu beliau menjabat sebagai Ketua MPR. Bersama partai-partai yang lain yang tidak menginginkan Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden. Gus Dur mendapat suara terbanyak mengalahkan Mega walaupun partainya memenangkan pemilu. Sementara Ketua DPR dipimpin oleh Akbar Tanjung yang juga Ketua umum Partai Golkar. Ketua Umum PKB waktu itu adalah Matori Abdul Jalil menjabat sebagai Wakil Ketua MPR. Muhaimin Iskandar (sekjen PKB) menjabat sebagai Wakil Ketua DPR. Antara poros tengah dan non poros tengah begitu kuat perseteruannya. Kelompok poros tengah ini pada umumnya adalah partai-partai Islam atau partai-partai yang berbasis Islam (santri), termasuk Partai Golkar. Poros Tengah dapat meredam kebuntuan politik di tingkat nasional.

Untuk menenangkan hati(*ngodop*; bahasa sasak: pen) PDIP dan partai-partai yang tidak memilih Gus Dur mampu memilih Megawati sebagai Wakil Presiden dengan melawan Hamzah Haz dari PPP.

Gus Dur waktu itu masih menjabat menjadi Ketua Umum PBNU. Dalam PKB beliau hanya salah seorang Deklarator PKB bersama beberapa tokoh Nahdlatul Ulama, kecuali KH. Sahal Mahfudzh. KH. Sahal Mahfudzh waktu itu menjabat sebagai Wakil Rois 'Am PBNU yang terpilih di Mukhtar Cipasung tahun 1994. Beliau dalam masalah politik bersikap diam (netral). Tidak ikut-ikutan sesuai dengan komitmen beliau tentang Khittah 1926.

Sedangkan kepemimpinan NTB saat Gus Dur menjadi presiden adalah Harun ar-Rasyid yang berasal dari Bima menggantikan Warsito. Beliau dipilih oleh DPRD Tk I NTB mengalahkan Drs. H. Mujitahid. Ini terjadi sebelum kejatuhan Soeharto (tokoh Orba). Sementara Wagubnya adalah Drs. H. Lalu Azhar.

Refleksi ini memang cukup menarik untuk direnungkan walaupun tidak menyelesaikan persoalan secara internal maupun kebangsaan. Kedepan apakah Nahdlatul Ulama akan lebih mengedepankan prinsip kultur ke struktural atau struktural ke kultural ataukah kedua prinsip dapat berjalan seirama.

*Wallahua 'alamu bis Showab wa Ilaihi al Marji 'u wal Maab.*

# B A B X

## MENGIKUTI UKTAMAR NU KE XXX & SALTU KELABU DI MATARAM

### A. Mengikuti Muktamar NU ke-30

PADATANGGAL 21 s/D 27 Nopember1999 Nahdlatul Ulama menyelenggarakan Muktamarnya yang ke XXX di Ponpes Lirboyo Kediri. Ketika itu dipilih pimpinan baru PBNU periode 1999- 2004. Yang terpilih sebagai Rois `Aam adalah K.H. Sahal Mahfudh menggantikan KH Ilyas Ruhiyat dan Ketua Umumnya adalah KH. Hasyim Muzadi menggantikan KH. Abdurrahman Wahid sementara yang menjadi anggota Musytasyar antara lain masuk TGH. L. Turmudzi Badarudin, dan dalam jajaran Syuriah adalah TGH. Nuruddin Husni MA. Beberapa anggota tim perumus dari NTB juga masuk, seperti Drs. Lalu Mustajab dari LKK NU di komisi Bahtsul Masail Diniyah Muadhu'iyah.

Komisi nampaknya memperkuat pendapat komisi Bahtsul Masail Maudhuyiah tentang peran wanita dalam Islam yang pernah dibahas Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama di Bagu tahun 1997,ditambah dengan masalah lainnya seperti Respon Islam terhadap demokrasi, Nahdlatul Ulama dan pemberdayaan masyarakat sipil,Aswaja dan perkembangan sosial budaya,pemulihan perkonomian nasional berorientasi pada kepentingan rakyat,syariat Islam tentang status uang Negara,acuan moral untuk menegakkan moral dan mencegah penyalahgunaan wewenang (KKN).<sup>323</sup>

---

<sup>323</sup> Demokrasi merupakan salah satu sistem tatanan kenegaraan ideal yang didambakan oleh seluruh negara didunia. Terutama setelah runtuhnya imperialisme-Kolonialisme usai

Dengan demikian Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia dapat memberikan respon pandangan-pandangannya terhadap persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah yang sangat aktual atau hangat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau bangsa Indonesia.

Ada yang berbeda sebelum pelaksanaan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke XXX, gonjang-ganjing dengan pelaksanaan Mukhtamar agar segera dipercepatpun mencuat, hal ini diusulkan oleh Gusdur agar Mukhtamar dipercepat. Namun demikian, terjadi berbagai penolakan dan mendapatkan berbagai pandangan yang berbeda dari berbagai tokoh diantaranya adalah H. Ahmad Bagdja, KH. Ruslan Kasmiri dan tokoh-tokoh Pengurus Wilayah NU lainnya. Mereka berpandangan bahwa Mukhtamar diatur dalam AD/ART organisasi. Dalam AD/ART tidak ada istilah Mukhtamar yang dipercepat karena itu sudah diatur dengan jelas, namun jika Gusdur sudah tidak sanggup memimpin PBNU, dipersilahkan untuk mengundurkan diri.

Menurut PWNU Jateng, berbagai persepsi muncul jika Mukhtamar dipercepat termasuk adanya dugaan intervensi pihak luar. Ini menandakan bahwa Nahdlatul Ulama pada dasarnya tidak solid didalam bahkan rapuh. Jika percepatan Mukhtamar dilakukan dengan alasan karena tidak adanya kekompakan PBNU, maka yang perlu diselesaikan adalah apa penyebab masalah dan ketidakkekompakan tersebut.

Pendapat DIY berbeda dengan PWNU yang lain, DIY mendukung dilaksanakannya Mukhtamar dipercepat setahun. Namun Ketua pimpinan NU Jawa Barat Drs. H. Habib Syarief Muhammad mengatakan bahwa masalah dimajukannya pelaksanaan Mukhtamar bukan sekedar memilih pengurus baru, dan sulit menghasilkan pengurus berkualitas karena terburu-buru. Pimpinan yayasan As-Salam Bandung memiliki pandangan yang konstruktif, jika PBNU mengalami krisis kekompakan maka hal lain yang perlu dilakukan adalah melakukan *reshuffle* (pergantian pengurus) dan konsolidasi seluruh pengurus bukan mempercepat pelaksanaan Mukhtamar. Hal tersebut tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan AD/ART organisasi.

---

perang Dunia II. Demokrasi juga merupakan tatanan yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat yang didasarkan atas nilai-nilai universal yaitu persamaan, kebebasan dan pluralisme. Islam dan kesetaraan Gender, Islam pada dasarnya adalah agama yang menekankan spirit keadilan dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan (lihat: Solusi Hukum Islam th:2006 hlm: 689-716 ).

Pendapat lain yang lebih kritis melihat wacana Gusdur mempercepat pelaksanaan munas oleh akibat adanya ambisi Gusdur untuk menghindari dari AD/ART organisasi yang tidak membolehkan Gusdur menjabat kembali setelah memimpin tiga periode. Upaya tersebut dilakukan untuk melancarkan menjadi ketua PBNU kembali dimasa mendatang. Disisi lain, ia melihat bahwa pengunduran diri tersebut berarti Gusdur menyadari kesalahannya dan dinilai gagal memimpin Nahdlatul Ulama.

Peran Nahdlatul Ulama NTB dalam setiap muktamar setelah kembali ke Khittah 1926 memang cukup menonjol. Seperti peran Drs. H. Ahmad Taqiuddin dalam anggota tim perumus di Muktamar Situbondo, dan penulis sendiri di Muktamar ke XXIX di Cipasung dan juga nanti di Muktamar ke XXXI di Boyolali tahun 2004 dalam sebuah komisi Bahtsul Masail pula.

Pada periode kepengurusan wilayah tahun 1996–2001. Nahdlatul Ulama sebagaimana ormas yang lain terjangkit syahwat politik praktisnya lagi, bahkan lebih kencang dari periode–periode sebelumnya hanya terfokus pada pemulihan dan pemurnian khittah 1926. Namun dalam masa orde reformasi ini Nahdlatul Ulama dihadapkan dengan banyak problema, baik yang datang dari internal Nahdlatul Ulama sendiri maupun eksternal. Sehingga banyak program-program yang sudah dicanangkan dalam konferensi tidak terurus secara signifikan. PWNU baik dalam jajaran Syuriah dan Tanfidziyah termasuk banom-banom apalagi lembaga-lembaganya nampaknya sudah mulai genit denganuforia politik karena reformasi. Banyak pengurus yang rangkap jabatan di parpol yang dibidani Nahdlatul Ulama (PKB) atau parpol lain.

Walaupun kita mengakui bahwa memang ada buah yang dihasilkan bagi mereka. Misalkan banyaknya anggota DPR, DPRD TKI, dan DPRD Tk II dari kalangan Nahdlatul Ulama. Tentu dari merekalah diharapkan memperjuangkan nasib Nahdlatul Ulama secara politis yang selama orde baru dimarjinalkan. Dengan kata lain nasab dan nisob Nahdlatul Ulama tak dapat diragukan. Tapi nasibnya jauh dari yang diharapkan (kenyataan). Inilah yang seharusnya diperjuangkan. Namun mampukah politisi-politisi Nahdlatul Ulama berbuat yang terbaik bagi Nahdlatul Ulama ke depan atau yang didapat hanya keuntungan pribadi atau pendapatan yang bersifat material belaka.



Kantor Nahdlatul Ulama yang seharusnya menjadi program khusus PWNU belum terjamah secara signifikan, sehingga kegiatan PWNU banyak yang terlantar, yang aktif ya aktif dalam kegiatan Nahdlatul Ulama, sedang yang tidak juga tidak. Banyak pengurus Nahdlatul Ulama, sedang yang tidak juga tidak. Banyak pengurus Nahdlatul Ulama, nama saja dalam SK. Kita tidak tahu siapa dia yang sebenarnya. Di awal-awal kegiatan sebagian mereka ada yang aktif, paling tidak hadir dalam rapat-rapat formal PWNU. Namun sebagiannya tidak pernah muncul sama sekali. Mungkin mereka tidak tahu sama sekali kalau dirinya sebagai pengurus Nahdlatul Ulama. Apalagi jika mereka berdomisili di tempat yang jauh dari pusat Nahdlatul Ulama (Mataram). Banyak kemungkinan jika terjadi ketidakaktifan kader, bisa saja ketika tim formatur menyusun struktur kepengurusan, mereka hanya mencomot sana mencomot sini sekedar mencerminkan keterwakilan masing-masing kabupaten yang ada. Akhirnya yang aktif hanya itu-itulah saja. Memang mengurus Nahdlatul Ulama itu memerlukan keikhlasan yang tinggi dan kemauan yang keras, serta kesempatan yang cukup. Sebab dalam mengurus Nahdlatul Ulama tidak ada honorariumnya apa lagi gaji. Yang ada hanya berkorban untuk Nahdlatul Ulama bukan mengorbankan Nahdlatul Ulama.

Nahdlatul Ulama adalah jam'iyah tempat beramal shaleh dan beramal jariyah dalam rangka mengembangkan paham Aswaja sebagai warisan para ulama *salafusshaleh* terdahulu. Walaupun demikian Nahdlatul Ulama juga butuh materi untuk menghidupkannya. Nah bagaimana materi itu terwujud, itu adalah kiat dan usaha para pengurusnya untuk mewujudkannya. Ilmu pendekatan (lobi) disini sangat penting. Namun nama pengurus dipertaruhkan.

Secara kultural Nahdlatul Ulama dapat dengan mudah saja bergerak. Sebab banyak aktifitas jama'ah Nahdlatul Ulama, seperti Hari Besar Islam, Tahlilan, Ngurisan, Serakalan, istighatsah, yasinan, haul dan lain sebagainya dapat ditumpangi sebagai kegiatan Nahdlatul Ulama. Kegiatan kultural jama'ah Nahdlatul Ulama ini tinggal oleh pengurus formalnya mengkalim sebagai kegiatan Nahdlatul Ulama secara struktural. Pengurus Nahdlatul Ulama tidak terlalu banyak memikirkan biayanya. Kadang-kadang Pengurus tinggal datang saja dalam even-even tersebut, berdasarkan undangan mereka.

Hasil keputusan Bahtsul Masail Al-Diniyah Al Maudhu'iyah Muktamar XXX NU di pondok pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur

Tanggal 21 s/d 27 November 1999 diantaranya menghasilkan: 1) Respon Islam terhadap demokrasi, 2) NU dan pemberdayaan masyarakat sipil, 3) Ahlussunnah Waljama'ah dan perkembangan budaya, 4) Islam dan kesetaraan gender, 5) pemulihan perekonomian nasional berorientasi kepentingan rakyat, status uang negara, acuan modal untuk menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan wewenang (KKN).

Respon Islam terhadap demokrasi. Merupakan salah satu sistem tatanan kenegaraan ideal yang didambakan oleh seluruh negara didunia. Terutama setelah runtuhnya imperialisme-kolonialisme usai perang dunia II. Dalam prakteknya demokrasi diterapkan dalam bentuk kelembagaan trias politika. Yang memisahkan kekuasaan menjadi badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemerintahan didasarkan pada undang-undang yang disusun oleh rakyat serta pelaksanaannya dikontrol oleh rakyat melalui wakil-wakilnya. Demokrasi merupakan tatanan yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat yang didasarkan atas nilai-nilai universal, yaitu persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Dilihat dari prinsip bahwa hubungan antara negara dan rakyat didasarkan atas kontrak sosial dengan rakyat yang berhak membentuk pemerintahan sebagai amanah dan penegak keadilan. Ruang lingkup kekuasaan legislasi didasarkan pada pokok-pokok ajaran agama dan mengikuti sistem penetapan hukum keagamaan yang baku. Pemerintahan dalam suatu negara merupakan pemerintahan yang *sunnatullah* yang mesti terwujud secara *syar'iy* maupun *'aqliy* untuk menjaga kedaulatan, mengatur tata kehidupan, melindungi hak-hak setiap warga negara dan mewujudkan kemaslahatan bersama.

Nahdlatul Ulama dan pemberdayaan masyarakat sipil. Dalam usaha pengembangan demokrasi, masyarakat sipil perlu diberdayakan karena beberapa alasan; *Pertama*, sebagai pengembangan visi etis dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*, pengembangan civil society ini penting untuk penyebaran pandangan dan sikap kesetaraan antara berbagai individu dalam masyarakat maupun antar kelompok, dalam hal ini civil society menawarkan prinsip kewarganegaraan. *Ketiga*, pengembangan civil society semakin mendesak untuk menciptakan keseimbangan antara masyarakat dan negara. Apa yang diperjuangkan masyarakat sipil bukan istilah atau sekedar konsep, tetapi prinsip-prinsip yang intinya memberikan peluang yang sama pada warga masyarakat dan warga negara tanpa diskriminasi. Penerimaan konsep tersebut memang

menghendaki transformasi yang sangat mendasar dalam memahami ajaran atau doktrin agama.

Islam dan kesetaraan Gender. Islam adalah agama yang menekankan spirit keadilan dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Relasi gender dalam masyarakat yang cenderung kurang adil merupakan kenyataan yang menyimpang dari spirit Islam yang menekankan pada keadilan. Terdapat tiga bidang masalah yang menjadi halangan terciptanya “hubungan Gender” yang lebih adil yaitu bidang teologi, kebudayaan, dan politik. Dalam bidang teologi, terdapat penafsiran yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan gender, dalam hal ini perempuan didudukkan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Di bidang Kebudayaan, terdapat apa yang disebut kebudayaan Patriarkhi, yaitu kebudayaan yang memapankan peran laki-laki untuk melakukan apa saja dan menentukan apa saja, disadari atau tidak. Perempuan berada pada posisi subordinat, yaitu tunduk pada laki-laki. Di bidang politik, terdapat praktek-praktek politik yang mendeskriminasikan perempuan. Di setiap instansi kehadiran perempuan sangat marginal, akibat ketidakterwakilan perempuan dalam pusat “kekuasaan”, maka pengambilan keputusan sering mengabaikan isu yang menjadi perhatian kaum perempuan, baik dalam sektor politik atau sosial.

Pemulihan perekonomian nasional berorientasi pada kepentingan rakyat. Urgensi hasil keputusan Muktamar ini adalah pengembangan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan mayoritas rakyat melalui;

1. Terma (*al-musthalah*), teori ini tidak dikenal dalam teori ekonomi tetapi penamaannya merupakan dampak dari krisis ekonomi, yang kemungkinan yang dimaksud terma ini adalah gabungan antara kapitalisme dan sosialisme.
2. Prasyarat untuk pemulihan ekonomi adalah pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*).
3. Ekonomi kerakyatan melibatkan masyarakat menengah ke bawah dengan berbagai usaha dalam skala menengah dan kecil ternyata lebih tahan terhadap goncangan resmi global untuk itu perlu dibantu pemerintah lewat kredit bank, juga perlu diberikan Hak Guna Usaha (HGU), secara temporer kepada petani yang kurang lahan dengan memanfaatkan tanah negara untuk tanaman jangka

pendek, atau usaha peternakan kecil dan industri rumah tangga dengan membayar sewa atau bagi hasil dengan pemerintah daerah.

Syari'at Islam tentang status uang negara, acuan moral untuk menegakkan penyalahgunaan wewenang (KKN). Ketika berbicara tentang negara, yang menjadi pokok bahasan selalu saja berkisar pada isu-isu tentang kedaulatan, bentuk pemerintahan, dan proses rekrutmen pemegang kekuasaan. Rezim apapun yang hadir dalam kehidupan suatu negara sangat ditentukan oleh dua hal tadi, yang kesemuanya berbasis atau berkaitan soal "uang". Maka wajib bagi kita semua, terutama ulama untuk meletakkan prinsip-prinsip moral-keagamaan perihal sesuatu yang sangat fundamental "keuangan negara", darimana bersumber, siapa pemilik, untuk apa, pemerintah dalam hal ini apa, dan apa wewenang rakyat.

Prinsip-prinsip syariat Islam tentang keuangan negara;

1. Bahwa sebagai pembawa amanat Allah, amanat keadilan dan amanat segenap rakyat, pemerintah berkewajiban menegakkan ketertiban umum, melindungi keamanan seluruh rakyat, dan menegakkan keadilan bagi kemaslahatan semua pihak tanpa membedakan warna kulit, suku bangsa, golongan maupun keyakinan agamanya.
2. Pemerintah harus melakukan pemberdayaan dan perlindungan hak-hak rakyat yang lemah (fisik, sosial, ekonomi, politik, dan budaya) dari eksploitasi dan agresi kelompok kuat
3. Bahwa dalam rangka tegaknya amanah di atas. Allah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk, atas nama Allah memungut uang dari mereka yang mampu sebagai sumber negara muslim disebut "zakat" dan bagi warga non muslim disebut "jizyah"
4. Dengan demikian dalam pandangan Islam, uang negara pada hakikatnya adalah uang Allah yang diamanatkan kepada pemerintah bukan untuk penguasa melainkan untuk ditasarrufkan bagi sebesar-besarnya kemaslahatan seluruh rakyat, tanpa diskriminasi apapun. Setiap rupiah dari uang pajak harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.

Demikian keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-XXX di Lirboyo Kediri.

Diangkatnya beberapa persoalan yang dianggap penting dalam muktamar tersebut, seperti tentang Demokrasi dan lain sebagainya karena sepanjang beberapa dekade terakhir kepemimpinan Orba banyak menyisakan problem konflik yang berkepanjangan yang belum ada solusinya secara manjur dan maknyos. Konflik di Aceh di bawah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ingin mempunyai Negara sendiri, konflik di Maluku yang membawa nama agama yang sebenarnya tidak dipicu oleh agama, konflik di Poso Sulawesi Tengah dan juga masalah ekonomi yang belum normal setelah jatuhnya Soeharto dan lain sebagainya. Semuanya belum ada solusi atau jalan keluar yang tepat. Justru ketika Gusdur menjadi Presiden konflik itu masih tetap terjadi bahkan ada konflik etnis antara suku Madura yang sudah lama hidup di Sampit Kalimantan Tengah dengan etnis setempat. Sehingga orang-orang asli Madura terusir meninggalkan kampung halamannya di Kabupaten Sampit kembali ke Jawa Timur. Konflik ini berupa konflik etnis. Betul-betul kepemimpinan Gusdur waktu itu dalam dilema. Apalagi menurut sebagian kalangan gaya kepemimpinan Gusdur waktu masih menjadi Ketua Umum PBNU masih terbawa-bawa ketika beliau menjabat menjadi Presiden ke-4.

Selama Gusdur menjadi Presiden pemerintahan tidak berjalan normal. Antara legeslatif dengan eksekutif terjadi saling sikut. Beliau sering mengganti Menteri-nya. Termasuk Menko Polkam Wiranto. Demo anti Gusdur juga terjadi di mana-mana yang membuat warga Nahdlatul Ulama merasa terusik dan tersinggung. pendemo anti Gusdur ini justru yang dahulu partainya mendukung Gusdur (Poros Tengah) ditambah lagi dengan kelompok Garis Keras di kalangan Ormas Islam. Kebijakan Gusdur yang sering mengganti menteri dan ide-idenya untuk membuka dagang dengan Negara Zionis Israel dan rencana Pencabutan TAP MPRS tahun 1966 tentang pelarangan dan pembubaran PKI dan ajaran Marxisme Leninisme dan tuduhan bahwa Gusdur terlibat Bulog Get (korupsi) di Bulog membuat pemerintahan Gusdur goyang, ditambah dengan adanya Dekrit pembubaran DPR / MPR ala Soekarno oleh Gusdur membuat mayoritas anggota MPR/ DPR gerah dan berakhir kepada pendongkelan Gusdur menjadi Presiden ke-4 yang justru juga disponsori oleh Poros Tengah.

## B. Sabtu Kelabu di Mataram

Solidaritas umat Islam bak satu tubuh yang jika salah satunya kesakitan, maka bagian yang lainpun akan merasakannya. Yang satu terzalimi maka yang lainpun membelanya, demikian juga ketika terjadi konflik di Ambon, yang ratusan manusia meninggal baik umat Islam maupun umat beragama lainnya. Agama memang sangat sensitif, masalah sekecil apapun akan menjadi persoalan yang rumit jika masalah bermula dari agama.

Ambon yang dahulu mayoritas dihuni oleh saudara non-muslim terbiasa hidup berdampingan dengan damai, namun setelah konflik yang berdarah itu, atas nama agama memberikan dampak berantai dan mempengaruhi kedamaian umat Islam di seluruh penjuru Indonesia termasuk pulau Seribu Masjid, Lombok.

Belum Genap dua bulan setelah mengikuti Muktamar NU ke-30 disusul terjadi konflik antaragama di NTB. Pada mulanya, konflik Ambon Maluku yang sebenarnya tidak dipicu oleh agama, kemudian berlanjut dengan terjadinya konflik antar umat beragama di daerah itu, membuat sebagian umat Islam NTB merasa tersentuh hatinya agar bagaimana konflik dapat diselesaikan secepatnya. Berita-berita yang dilangsir koran dan adanya brosur-brosur atau selebaran-selebaran yang tidak jelas asal usulnya, video-video yang memuat photo-photo orang-orang Islam yang disiksa secara sadis oleh umat Kristen membuat sebagian kalangan umat Islam di daerah ini membuat inisiatif melakukan gerakan-gerakan solidaritas mengajak umat Kristiani di daerah ini untuk bersikap mengutuk peristiwa di Ambon Maluku itu. Namun oleh umat Kristiani belum menanggapinya secara memuaskan yang berakhir kepada upaya sebagian umat Islam mengumpulkan massa dalam sebuah acara Tabligh Akbar di lapangan umum Mataram.

Pelaksanaan Tabligh Akbar diawali dengan pembacaan Sholawat Badar kemudian dilanjutkan dengan ceramah keagamaan yang menciptakan suasana tenang, damai, ceramah-ceramah yang disampaikan menyentuh hati dan mendamaikan hati. Namun sulit dipercaya, pada hari itu, tiba-tiba sekelompok orang datang dan mengamuk ? para jama`ah yang lain ketakutan dan akhirnya banyak jama`ah yang berhamburan entah ke mana dan kegiatan ceramah pun dihentikan.

Koordinasi panitia dengan pihak keamanan yang tidak berjalan dengan baik membuat massa yang datang dari beberapa penjurur pulau Lombok sementara selebaran-selebaran tentang peristiwa di Ambon begitu mengigit mereka, pada gilirannya selesai acara Tabligh Akbar ada sebagian massa yang tidak jelas asal usulnya membakar gereja-gereja yang ada di Mataram, menjarah toko-toko, rumah-rumah penduduk yang beragama Kristen. Karena adanya tindakan tersebut, mayoritas mereka merasa terancam keamanannya lari mengungsi meminta perlindungan khususnya Polda NTB. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2000.

Ketika itu penulis sedang menghadiri pembukaan pelatihan jama`ah haji di gedung Koni Praya. Karena sebagai petugas haji dalam hal ini TPHI (Tim Pimpinan Haji Indonesia) sebagai ketua kloter (kelompok terbang) 39 berkewajiban memperkenalkan diri dengan jama`ah yang masuk dalam kloter tersebut. Jama`ah kloter saya waktu itu berasal dari Lombok Tengah yaitu dari kecamatan Pujut, Praya Barat, Kopang, Janapria, Jonggat, Batu Kliang, dan Peringgarata, ditambah dengan jama`ah dari kecamatan Gunungsari dan Narmada Lombok Barat.

Peristiwa kelabu ini betul-betul mencemarkan nama baik NTB sebagai provinsi yang sangat toleran dalam beragama, di mana umat Islam sebagai penduduk terbesar (97 %). Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam waktu itu tidak terlibat dalam Tabligh Akbar itu, karena sudah mengetahui ada gejala yang mengganggu keharmonisan hubungan umat beragama di NTB, apalagi Nahdlatul Ulama sangat konsisten dalam hal toleransi, terlebih Presidennya waktu itu adalah Gusdur. Tetapi dalam hal peristiwa kelabu ini betul-betul Nahdlatul Ulama secara organisatoris kondisinya lemah, tidak berdaya membendung arus massa yang begitu besar yang bersikap anarkis terhadap mereka umat Kristiani.

Nahdlatul Ulama hanya mampu membendung anggota-anggotanya saja. Misalnya saja seperti dilakukan oleh Rois Syuriah Nahdlatul Ulama kota Mataram TGH. Mustiadi Abhar terhadap jama`ahnya di Pagutan, yang secara kebetulan ponpes beliau berdekatan dengan rumah seorang penganut Kristen.

Setelah kejadian itu benar-benar menantang Nahdlatul Ulama untuk berada di garda depan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, menghargai dan menghormati perbedaan agama. sebagaimana TGH. Mustaidi Abhar memberikan jaminan kepada masyarakat non-muslim dilingkungan sekitarnya tentang pelarangan melakukan penyerangan, penjarahan maupun penyiksaan.

Peristiwa seperti di atas miris bagi Nahdlatul Ulama, kendati demikian Nahdlatul Ulama terus berjuang menggerakkan kadernya seperti para kiai dengan pesantrennya secara getol mengajarkan dan menanam nilai-nilai toleransi kepada santrinya.

Rekomendasi Nahdlatul Ulama yang disampaikan dalam konferensi wilayah ke IX yang berkaitan dengan toleransi antarumat beragama menjadi tidak ada artinya. Rekomendasi ini mengatakan:

“Panatisme masyarakat dalam memegang teguh agamanya dijaga dan dipelihara sebagai asset besar bagi pembangunan di daerah ini. Demikian pula kerukunan intern dan kerukunan antar umat beragama serta kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah tampak dinamis. Karena itu harus dipupuk dan ditingkatkan. Akan tetapi belakangan ini kota Mataram dan tempat-tempat lain kerukunan antar umat beragama bisa terusik jika ada di antara agama tertentu yang secara demonstratif membangun tempat ibadah di sekitar pemukiman kaum muslimin. Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya masalah-masalah yang tidak diinginkan maka pembangunan tempat ibadah tersebut hendaknya ditertibkan dan ditinjau kembali. Selanjutnya hendaknya dapat mentaati dan mematuhi terhadap ketentuan Depdagri dan Depag perihal tatacara serta ketentuan pembangunan tempat ibadah“<sup>324</sup>.

Gejala ini terjadi karena adanya pendirian beberapa gereja misalnya di Jalan Panji Tilarnegara Selatan Bioskop di Jalan Bung Karno dan di Jalan yang menuju Jalan Lingkar Selatan dekat pantai Sekip Ampenan. Padahal di sekitar wilayah itu mayoritas penduduknya beragama Islam.

Apabila rambu-rambu ini tidak dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait maka kerukunan antar umat beragama tentu terancam. Atau dengan bahasa Nahdlatul Ulama Ukhuwah Wathaniyah terganggu.

---

<sup>324</sup> Lihat Materi Konferwil IX hlm, 42.



Sebab dalam Nahdlatul Ulama ada trilogi persaudaraan atau tiga ukhuwah: *Ukhuwah Islamiyah*, yaitu ukhuwah yang terkait dengan internal umat Islam, *Ukhuwah Wathaniyah*, yaitu ukhuwah yang terkait dengan sesama sebangsa dan setanah air yang berbeda suku, bahasa, adat istiadat bahkan agama tetapi diikat oleh satu bangsa dan tanah air yaitu tanah air Indonesia. Kemudian *Ukuwah Insaniyah* (basyariyah), yaitu ukhuwah kemanusiaan yang lebih universal atau mendunia.

Pernyataan mendasar adalah mengapa pelengseran Gusdur tidak menciptakan konflik, mungkinkah rakyat menyetujui Gusdur dilengserkan dan apa respon Nahdlatul Ulama ?

Sebuah kasus yang edukatif bahwa seorang Gusdur tidak menjadikan kekuasaan sebagai ambisi memperoleh pengakuan, justru sebaliknya pelengseran Gusdur sebagai presiden yang tidak menciptakan konflik di masyarakat terutama di kalangan Nahdliyyin yang notabene adalah jama'ah terbesar di Indonesia. Sifat berjiwa besar dari seorang Gusdur yang tidak menggunakan pengaruhnya untuk mengaborsi pendongkelannya. Gusdur dengan kebijaksanaannya meminta warga Nahdliyyin untuk tetap tenang dan tidak berperilaku anarkis. Ia percaya ini adalah Sunnatullah dan presiden terpilih adalah presiden kita bersama dan kita wajib mentaatinya. Memang sulit memahami pikiran besar Gusdur, namun itulah Gusdur dengan segala kekurangan dan kelebihanannya.

Gusdur diberhentikan secara tidak terhormat lewat sidang istimewa MPR. Hanya PKB saja waktu itu yang tidak ikut, kecuali Ketua umum PKB Matori Abdul Jalil yang ikut dalam pendongkelan Gusdur yang berakibat kepada terjadinya konflik internal PKB yang cukup lama sampai berakhir kepada lahirnya partai baru nantinya (tahun 2009) sebagai pecahan PKB yang namanya PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Ulama).

# B A B X I

## NU NTB PASCA GUSDUR SEBAGAI PRESIDEN

### A. Kilas Biografi Gusdur

Sosok Kyai nyentrik tak lepas dari tokoh populis yang bernama Abdurrahman Wahid yang kemudian akrab disebut Gusdur. Lahir di Denanyar, Jombang Jawa Timur 4 Agustus 1940. Setamat dari Sekolah Dasar di Jakarta tahun 1953 dan Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) di Yogyakarta tahun 1956, di samping belajar mengaji kepada KH. Ali Maksum di Krapyak Yogyakarta, Gusdur melanjutkan pendidikan ke Pesantren Tegalrejo Magelang, kemudian ke Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang (1959-1963). Sesudah itu memperdalam ilmu-ilmu Islam dan sastra Arab di Universitas al-Azhar Kairo Mesir, kemudian pindah ke Fakultas Sastra Universitas Baghdad.

Kariernya banyak di pesantren. Ia pernah menjadi guru Mu'allimat Pesantren Tambakberas, Jombang (1959-1963), sekretaris Pesantren Tebuireng, Jombang (1974-1979), di samping sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, dan pengasuh Pesantren Ciganjur, Jakarta. Baru pada tahun 1984, Gusdur mulai terlibat langsung dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama setelah dipilih sebagai ketua Tanfidziyah PBNU (1984-1989) dalam Mukhtamar ke-27 di Pesantren Sukorejo, Situbondo, meskipun sebelumnya Gusdur sudah duduk sebagai Katib Syuriah PBNU setelah Mukhtamar ke-26 tahun 1979 di Semarang. Kemudian dalam Mukhtamar ke-28 di Pesantren al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, Gusdur kembali dipilih secara aklamasi oleh muktamirin sebagai ketua umum Tanfidziyah PBNU (1989-1994).

Naiknya Gusdur ke puncak pimpinan NU tidak terlepas dari dukungan warga NU dan hasil kerja sebuah tim yang pernah ada sejak sebelum Muktamar ke-26 di Semarang tahun 1979. Tim itu semula bernama “kelompok warung” (warung pemikir) yang dimotori antara lain oleh Gusdur sendiri. Kelompok ini intinya bertujuan melakukan terobosan-terobosan baru agar NU, setelah peranan politik praktisnya hilang, masih bisa mengembangkan sayapnya seperti pada awal berdirinya (kemudian dikenal sebagai Khittah Nahdliyyah tahun 1926). Kelompok ini kemudian membengkak dan menjelma menjadi “Kelompok G”. Nama ini diambil dari nama sebuah gang di kawasan Mampang, Jakarta, tempat berkumpul kelompok ini. Menjelang Muktamar ke-28 di Yogyakarta, kelompok ini sempat bersilang pendapat di antara para anggotanya dan kemudian bubar.

Ratusan artikel telah ditulisnya di berbagai media massa di Indonesia dan di luar negeri, termasuk beberapa terjemahan seperti terjemahan karya Sayyid Hussein an-Nasr. Buku-buku karangannya ialah: Bunga Rampai Pesantren (1979), Muslim di Tengah Pergumulan (1981), dan “*Islam, the State and Development in Indonesia*” (Islam, Negara dan Pembangunan di Indonesia) sebagai bagian dari kumpulan karangan dalam judul *Ethical Dilemmas of Development in Asia* (Dilema Etis Pembangunan di Asia).

Ia Sering disebut “mozaik” dan “cermin banyak gambar”. Tokoh majalah Editor 90 ini banyak memprakarsai pendirian Bank-Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NUSUMMA sebagai bagian kerja sama NU dengan Bank SUMMA. Langkah ini dianggap sebagai “loncatan budaya” bagi warga NU dalam melakukan alih sosial ekonomi, karena warga NU umumnya belum akrab dengan dunia perbankan, sebuah sendi penting dalam sistem ekonomi modern.

Sebagai santri yang kemudian tumbuh menjadi pemikir, Gusdur pun hilir-mudik untuk menghadiri pelbagai pertemuan ilmiah seperti lokakarya, simposium, diskusi panel, dan seminar. Pengetahuannya yang luas dan ide-idenya membuat namanya terus melambung ke tingkat nasional dan Asia. Mula-mula Gusdur bicara di forum ACFORD yang berkedudukan di Bangkok mengenai perkembangan masyarakat dan juga ikut memberikan kontribusi dalam masalah sosial pada *Southeast Asian Studies* di Singapura.

Cucu dari KH. Hasyim As'ari ini mulai mencuat sebagai tokoh nasional saat mulai menahkodai Nahdlatul Ulama, di samping pernah menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta (1983-1985) Beliau pernah menjadi tim penasehat di berbagai departemen, Departemen Agama, Departemen Koperasi, Departemen Hankam, pernah menjadi penasihat ahli Keluarga Berencana di BKKBN. Beliau aktif dalam pelbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di forum nasional dan internasional. Pada tahun 1991 Gusdur mendirikan kelompok yang dinamakan Forum Demokrasi.

Sosok tokoh seorang Gusdur memang sulit ditebak, terkadang pemikirannya selalu bertolakbelakang dengan pemikiran orang lain, ia sosok yang moderat tapi tradisional, tradisional tapi moderat. Pendapat Gusdur memang sering berbeda dengan orang lain, sebagai contoh saat pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Muria, menolak bergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Gusdur sebagai antitesa perubahan setelah tumbanganya Orde Baru. Kedaulatan politik menjadi causa prima untuk sama tinggi dengan negara lainnya. Gagasan reformasi pada dasarnya bukanlah realita kekuasaan pada pendukung setianya, melainkan kemampuan membangun sinergisitas dengan non pendukungnya. Faksi-faksi dalam memperoleh suara dukungan hendaknya dihilangkan dalam rangka mendekatkan masyarakat dengan penguasa.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas civil society. Apapun yang dilakukan masyarakat selama dianggap melanggar, atau menjadi ancaman terhadap keamanan, dan kenyamanan kedamaian nasional dibumihanguskan. Hal inilah yang menyebabkan kekangan dan ketegangan masyarakat dengan mengoptimalisasi industrialisasi dan mengelememindir politik.

Terpilihnya Gusdur sebagai Presiden ke-4 Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1999, mengakibatkan dituntut terjadinya pergantian kepengurusan ketua umum PBNU. Ketika Gusdur menjadi Presiden maka jabatan Ketua Umum PBNU dipegang oleh KH. Hasyim Muzadi mantan Ketua Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Sementara Rais 'Amnya adalah KH. Ahmad Sahal Mahfudzih menggantikan KH. Ilyas Ruhiyat.

Kata nyentrik dan unik adalah kata yang tepat bagi seorang Gusdur. Apa yang membedakannya dengan presiden Indonesia sebelumnya ? presiden Soekarno, Soeharto, dan Habibie adalah presiden yang sangat terkenal dengan wibawa istana. Istana tidak dapat dikunjungi oleh selain orang-orang penting. Namun di era Gusdur, dari yang bercelana sampai yang sarunganpun dapat menginjakkan kakinya ke istana.

Diceritakan oleh seorang kiyai tentang seorang kiyai yang hendak bertamu pada Gusdur. Semula sang Kyai tidak diijinkan masuk oleh protokoler presiden karena tidak memenuhi standar tamu seorang presiden, sang Kyaipun tidak berkeras hati, dengan lapang dada ia menerima perintah protokoler dan pulang. Sepulangnya sang tamu, protokolerpun melaporkan ke presiden bahwa ia kedatangan tamu dan menyuruhnya pulang. Apa yang terjadi ? sang presiden menegur sang protokoler bahwa sebenarnya ia sedang menunggu sang Kyai. Akhirnya sang Kyaipun dijemput kembali oleh sang protokoler. Unik kan.

## **B. NU NTB saat Gusdur Sebagai Presiden**

Di Lombok, terselenggaranya Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama yang bertempat di Ponpes Manhalul Ma'arif Darek Lombok Tengah semua semenjak Gusdur menjadi presiden memberikan warna baru Nahdlatul Ulama, faksi Nahdlatul Ulama yang dahulunya saling sikut antara kelompok Gusdur dan Abu Hasan menyatu kembali. Sekat-sekat itu sudah tidak ada lagi berkat kepemimpinan PBNU hasil Mukatamar yang ke-30 di Lirboyo Kediri.

Dalam Komferwil kali ini yang kebetulan Ketua panitianya Drs. Jamiludin kader GP Ansor dapat menghadirkan KH. Hasyim Muzadi dan Gubernur NTB Harun Ar-Rasyid dalam pembukaan Konferensi. Sementara yang hadir untuk mewakili Gubernur dalam mengisi materi acara sidang komisi terkait pembangunan NTB sebagai narasumber adalah Drs. Badrul Munir (di kemudian hari menjadi Wagub mendampingi Tuan Guru Bajang H. Zainul Majdi sebagai Gubernur).

Dalam pembukaannya panitia sudah mulai memanfaatkan media RRI, sehingga gegap gempita konferensi dapat didengar oleh sebagian masyarakat. Terpilih sebagai Syuriah adalah TGH. Lalu Turmudzi Badarudin sedang katibnya adalah Drs. Zaidi Abdad dosen STAIN Mataram. Sementara Tanfidziyah yang dipilih adalah Prof. Drs. H.

Saiful Muslim, MM guru besar STAIN Mataram dan sekretaris dijabat oleh Drs. M. Jamiludin, mantan Ketua PW GP Ansor. (Pengurus selengkapnya lihat lampiran). Prof. Drs. H. Saiful Muslim bersaing dengan Drs. H. Lalu Imron mantan sekretaris PWNU tahun 1970-an. Beliau adalah pensiunan Pegawai BPN DKI Jakarta.

Selama kepengurusan PWNU hasil konferensi di Darek ini sebenarnya cukup banyak kegiatan yang dilakukan. Misalnya penataan organisasi di tingkat cabang seperti membentuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Sumbawa Barat, turun ke cabang-cabang pada lailatul ijtima' dan lain sebagainya. Walaupun pembentukan lembaga dan lajnah tidak banyak yang dibentuk kecuali Lembaga ekonomi dan LKK Nahdlatul Ulama tetapi tak jalan. Kalau LP. Ma'arif tetap bergerak sebagaimana biasa, yang paling menonjol adalah gerakan istighatsah kubro di lapangan umum Mataram yang dirangkaikan rakerwil yang dihadiri oleh Ketua umum PBNU yang baru yaitu KH. Hasyim Muzadi dan Gubernur Harun Ar-Rasyid dan puluhan ribu jama'ah Nahdlatul Ulama sepulau Lombok dan berapa wakil dari cabang-cabang di pulau Sumbawa sekaligus ikut serta Rakerwil di hotel Sariguna.

Pada acara istighatsah kubro ini ada sebagian warga Nahdlatul Ulama menilainya sangat politis. Karena ada acara suksesi Gubernur dan Wagub. Kebetulan Ketua Tanfidziyah waktu itu, dalam hal ini Prof. Drs. H. Saiful Muslim sedang menjadi Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama. Namun, beliau menjadi Kakanwil Depag NTB hanya berumur satu tahun saja. Disebabkan umur beliau waktu itu mencapai 60 tahun. Sementara ketentuan untuk menjadi Kakanwil tidak boleh lebih dari 60 tahun. Pengganti beliau dari NU adalah sulit ditemukan di jajaran pegawai Departemen Agama. Sebab pegawai yang dari NU tidak ada yang berpangkat minimal IV b ke atas. Kalau pun ditemukan orang NU ke-NU-annya masih abu-abu. Akhirnya yang terpilih adalah Drs. H. Lalu Suhaimi Ismi yang tidak berasal dari Nahdlatul Ulama.

Langkanya pengganti Prof. Drs. H. Saiful Muslim disadari atau tidak mengindikasikan bahwa kaderisasi Nahdlatul Ulama lambat. sehingga ke depan konsen Nahdlatul Ulama memperbaiki pola kaderisasi sehingga Nahdlatul Ulama berkembang di segala bidang.

Prof. Drs. H. Saiful Muslim oleh Fraksi PDIP dicalonkan menjadi Wakil Gubernur mendampingi Harun Ar-Rasyid. Sementara PKB yang

notabene partai bentukan Nahdlatul Ulama dan partai lain seperti PAN tidak mencalonkan Prof. Drs. H. Saiful Muslim. PKB bersama partai lain mencalonkan Harun Ar-Rasyid sebagai Cagub didampingi Pak Ir. Nanang Samudera sebagai Cawagub. Warga Nahdlatul Ulama yang duduk di DPRD TK I NTB tidak menginginkan Prof. Drs. H. Saiful Muslim duduk di politik (wagub), diharapkan agar mengurus Nahdlatul Ulama saja agar semakin maju. Prof. Drs. H. Saiful Muslim sebenarnya tidak mau duduk menjadi Wagub waktu itu. Tetapi karena diminta oleh Fraksi PDIP untuk maju dan didukung juga oleh sebagian tokoh NU dan lain-lain akhirnya Prof. Drs. H. Saiful Muslim menghormati kehendak mereka. Harun Ar-Rasyid waktu itu menyerahkan sepenuhnya kepada Partai yang mendukung. Sebab Harun Ar-Rasyid menganggap kedua calon ini sama-sama baiknya. Akhirnya terjadi voting. Prof. Drs. H. Saiful Muslim kalah dengan oleh Ir. Nanang Samudera. Orang-orang NU termasuk PKB di DPRD TKI NTB tidak mendukung beliau sebagai calon Wagub mendampingi Cagub Harun Ar-Rasyid.

Dalam pemilihan Gubernur dan Wagub, Harun Ar-Rasyid yang didampingi Ir. Nanang Samudera bersaing dengan L Serinata dan Tamrin Rayes yang didukung PPP, Mesir Suryadi yang didukung Golkar. Akhirnya L. Serinata menang mengalahkan Harun Ar-Rasyid dan calon lain dari Golkar, yaitu Mesir Suryadi.

Walaupun sebenarnya kegiatan istightsah itu murni tidak ada unsur politiknya sebagaimana yang disampaikan oleh ketua panitianya pak Ir. Mahfudh dan ketua Nahdlatul Ulama, namun kesan itu tetap saja dianggap politis oleh mereka yang suka bermain politik. *Wallahua'lam.*

Pada tahun 2004 Nahdlatul Ulama dihadapkan lagi dengan politik praktis, yaitu dengan terlibatnya Ketua Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Megawati Sukarno Putri dari PDIP sebagai calon Presiden. Namun dalam pada putaran kedua kalah oleh SBY yang berpasangan dengan Yusuf Kalla.

Pada masa kepemimpinan PWNU NTB dipegang oleh TGH. Lalu Turmuzi Badaruddin sebagai Rois Syuriah dan Prof. Drs. H. Saiful Muslim, MM sebagai Ketua Tanfidziyah NU, Muhammadiyah, dan Partnershif Kemitraan melakukan aqad kerjasama memberantas korupsi secara moral atas bantuan dari Kerajaan Denmark lewat Duta Besarnya dan telah melakukan sosialisasi di hotel Lombok Raya

yang dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing cabang dari kedua organisasi ini serta beberapa badan otonom masing-masing organisasi, yang sebelumnya juga dilakukan oleh Pengurus Tingkat pusat di Jakarta. Kondisi ini membuat jama'ah Nahdliyyin galau. Namun di satu sisi ini pertanda bahwa banyak tokoh Nahdlatul Ulama yang menjadi tokoh nasional

Kegiatan PWNU sepanjang kepemimpinan Syuriah TGH. L. Turmudzi Badarudin dan kepemimpinan Tanfidziyah Prof. Drs. H. Saiful Muslim, MM, dalam masalah politik nasional dan lokal mengalami ketidakbersambungan antara pendapat Tanfidziyah dengan Syuriah. Tanfidziyah, misalnya mendukung calon Prsiden Megawati berdampingan dengan KH. Hasyim Muzadi yang notabene adalah ketua umum PBNU walaupun non aktif waktu itu, tetapi dia kader tulen Nahdlatul Ulama, sementara Syuriah mendukung calon Wiranto yang berpasangan dengan KH. Salahuddin Wahid (adik Gusdur) yang notabene adalah kader Nahdlatul Ulama juga.

Pengurus dihadapkan pada posisi sulit untuk berbuat netral atau independent sebagai amanat Khittah. Pilihan mesti salah satunya, dengan alasannya masing-masing. Apalagi Rois Syuriah waktu itu anggota Dewan Syuro PKB yang merupakan partai sah yang dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama sendiri. Nahdlatul Ulama betul-betul diuji konsistensinya dalam menjalankan Khittah 1926. Nampaknya sebagian Pengurus dan warga Nahdlatul Ulama masih terbius dengan gegap gempitanyauforia politik. Hal mana adalah sangat sulit untuk dihindari, baik secara organisatoris maupun secara pribadi. Tentu dengan alasannya sendiri-sendiri. Ternyata politik itu sangat menggiurkan semua orang. Tak terkecuali warga Nahdlatul Ulama dan tokoh-tokohnya. Sebab politik itu, dalam hal ini pemilihan presiden dan wakil prsiden, gubernur dan wakilnya, bupati dan wakil bupati bersinggungan langsung dengan nasib rakyat di masa depan, termasuk warga Nahdlatul Ulama di dalamnya.

Kondisi demikian menjadi respon setiap orang termasuk penulis. Penulis waktu itu mau tidak mau melibatkan diri dalam hal dukung mendukung calon Presiden dan wakilnya bersama Ketua Tanfidziyah dan Sekretaris, walaupun tidak memakai cap dan stempel Nahdlatul Ulama. Tetapi dalam perjalanannya ketika turun ke bawah ke beberapa cabang, MWC, tokoh-tokoh pondok pesantren Nahdlatul Ulama dan



bukan Nahdlatul Ulama mau tidak mau memakai bahasa Nahdlatul Ulama, seperti halnya yang lain juga. Hal mana sulit dihindari, Apalagi terkait dengan kepemimpinan wanita dan masa depan Nahdlatul Ulama kalau calon Megawati dan Hasyim menang.

Penulis bersama Ketua Tanfidziyah dan sekretaris (Drs. Jamiluddin) dan beberapa tokoh yang lain memang sering safari ke bawah, ke kantong-kantong Nahdlatul Ulama di pulau Lombok dan bahkan pada bukan kantong Nahdlatul Ulama seperti ke dua pesantren di Jerowaru pimpinan TGH. Abdul Aziz dan TGH. Lalu Muh Nuh, demikian juga pada pusat pesantren NW Anjani dan pesantren NW yang mendukung Mega-Hasyim waktu itu. Hal ini terjadi pada putaran pertama Pilpres.

Pada putaran kedua kami tidak banyak terlibat. Walaupun jago kami Mega-Hasyim bertarung dengan SBY-JK. Karena pada putaran kedua yang main adalah Golkar dan PDIP, tidak banyak melibatkan Nahdlatul Ulama. Pada putaran kedua memang pendukung Wiranto-Salahudin banyak yang mendukung Mega-Hasyim dari kalangan warga Nahdlatul Ulama. Walaupun tidak terang-terangan, walaupun pada akhirnya SBY-JK yang menang.

Memang sedikit ada manfaat yang dapat kami peroleh dari keterlibatan kami dalam politik praktis yang disebut tingkat tinggi. Kami bertiga tidak mempunyai partai, netral dalam hal berpartai. Tetapi dalam hal pilpres kami tidak netral. Sebab ini terkait dengan kepentingan orang banyak terutama warga Nahdlatul Ulama, terutama yang tidak mendukung SBY-JK waktu itu. Sebab dalam hal kontribusinya ke warga Nahdlatul Ulama tentu Hasyim mempunyai nilai plus dari pada JK walaupun beliau tokoh Nahdlatul Ulama juga di Sulawesi Selatan sebagai Mustasyar NU di sana. Sementara Hasyim adalah Ketua Umum PBNU non aktif yang kontribusinya terhadap Nahdlatul Ulama tidak diragukan lagi. Beliau telah lama berkiprah di Nahdlatul Ulama mulai dari ranting sampai ke PBNU.

Bagi penulis dengan ikut sedikit saja dalam dukung-mendukung pilpres waktu itu dapat mengetahui kantong-kantong Nahdlatul Ulama di Pulau Lombok yang belum terjamah sama sekali oleh struktural Nahdlatul Ulama baik tingkat cabang maupun tingkat wilayah. Terutama kantong-kantong Nahdlatul Ulama di akar rumput. Penulis juga dapat bersillaturahim dengan mereka secara pribadi maupun

secara organisatoris. Ternyata warga Nahdlatul Ulama di Lombok kuantitasnya besar sekali, perlu pembinaan serius dari para tokohnya secara struktural agar tidak diperalat oleh kelompok lain yang justru bertentangan dengan paham Nahdlatul Ulama.

Beberapa pesantren mengaku sebagai warga Nahdlatul Ulama yang tidak pernah dijajah oleh NU struktural penulis dapatkan di lapangan. Penulis dapat meresmikan sebuah pesantren Nahdlatul Ulama yang sedang membuka SMP dengan santrinya yang cukup banyak di Aik Prape Lombok Timur yang jauh dari perkotaan. Termasuk juga di Bagekpapan Pringgebaya pimpinan TGH. Aminuddin yang merupakan tokoh PDIP. Kami tidak menjajah warga Nahdlatul Ulama yang sudah jelas pilihannya. Beberapa Pesantren mengundang PWNU yang kebetulan waktu itu Prof. Drs. H. Saiful Muslim, MM baru diangkat menjadi Kakanwil Depag menggantikan Muhibudin Abbas untuk sillaturahim Lailatul Ijtima' dan kegiatan-kegiatan lainnya, seperti Pesantren Ta'limush Shibyan Bonder Lombok Tengah, Pesantren Sirojul Ulum Mamben Daye (Pesantren khusus Tahfizhul Qur'an), Pesantren Nurussalam Tanak Awu dan lain sebagainya.

Pada masa kepemimpinan Prof. Drs. H. Saiful Muslim, MM, Pondok Pesantren Ishlahuddin Kediri mencanangkan membangun Universitas Mushthafa Ibrahim (UMI) yang diresmikan langsung oleh Menteri Agama RI Prof. Dr. KH. Sa'id Agil Husain al-Munawwar (Katib 'Am Syuriah PBNU), walaupun dalam perkembangan berikutnya UMI menjadi Sekolah Tinggi atau Ma'had Ali. PWNU melalui LP Ma'arif mencoba mengkoordinir lembaga-lembaga pendidikan dan ponpes yang ada (kurang lebih 100 buah), melakukan rapat kerja di pondok pesantren Ta'limush Shibyan Bonder.

Upaya PWNU dalam pengembangan lembaga pendidikan yang bernaung di bawah NU mengajarkan Aswaja di masing-masing lembaga. Berupaya bagaimana supaya lembaga-lembaga mendapat suntikan dana yang lebih memadai dari pemerintah. Disepakati memang agar masing-masing lembaga mengajukan proposal yang nantinya akan dibawa oleh Sekretaris PWNU Drs. H. Jamiluddin, MM untuk dibawa ke Depag Pusat di Jakarta. Sebab selama ini nama Nahdlatul Ulama sering disalahpahami oleh Pusat Jakarta bahwa NW itu juga Nahdlatul Ulama karena ajarannya sama dengan Nahdlatul Ulama yang Aswaja. Padahal di tingkat lapangan berbeda, terutama dalam hal gaya gerakannya,

walaupun sama-sama Aswaja. Sumbangan memang diberikan secara langsung kepada beberapa lembaga yang ada sesuai kehendak yang memberikan (Depag Pusat).

Beberapa lembaga pendidikan NU banyak yang salah paham terhadap PWNU bahwa PWNU tidak pernah menyumbang dana kepada mereka. Mereka rupanya menganggap Nahdlatul Ulama itu banyak uang. PWNU menjelaskan bahwa Nahdlatul Ulama tidak mempunyai uang, jangankan untuk menyumbang dana, untuk membiayai kesekertariatan saja masih kembang kempis. Dana lebih banyak berasal kocek beberapa anggota PWNU yang menyumbang yang jumlahnya sangat minim. Kantor PWNU masih berupa gedung lama aula Nahdlatul Ulama kemudian diisi oleh beberapa kursi, meja sidang, lemari lama, kemudian ada komputer satu buah, yang kemudian di akhir kepengurusan hilang. Memang beberapa buah komputer merupakan sumbangan dari Depnaker ketika Menteriya dijabat Yacob Wowalia dari PDIP waktu itu. Komputer-computer tersebut langsung didistribusikan kepada cabang-cabang yang cukup aktif diantaranya Lombok Timur, Lombok Barat dan Lombok Tengah.

Demikian kondisi internal PWNU yang secara finansial cukup menyedihkan memang. Menurut penulis sudah lama berjalan baik setelah khittah maupun sampai reformasi. Masalah dana selalu menjadi problem, walaupun kegiatan-kegiatannya tetap jalan apa adanya.

Pada konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Darul Qur'an Bengkel, kepemimpinan baru dipegang oleh Drs. H. Ahmad Taqiuddin Mansur sebagai ketua Tanfidziyah dan Rois Syuriahnya tetap diisi oleh TGH. L Turmudzi Badaruddin. Tapi karena kedua tokoh ini masih merangkap di PKB maka akhirnya Rois Syuriah Nahdlatul Ulama dipegang oleh TGH. Lalu Khairi Adnan mantan Rois Syuriah Nahdlatul Ulama Lombok Tengah menggantikan TGH. L Turmudzi Badarudin. TGH. L Turmudzi Badarudin masuk sebagai Mustasyar. Drs. H. Ahmad Taqiuddin Mansur digantikan oleh Ir. H. Mahfudz, MM (pensiunan Pegawai Bapeda NTB) sebagai Ketua Tanfidziyah PWNU periode 2008–2013. Pada priode ini NU sedang bergerak membentuk Lembaga-lembaga: Ma'arif, Pertanian, Kesehatan, LBHNU, LKK dan membentuk cabang NU Lombok Utara. Semuanya dalam proses bergerak. Kantor sudah mulai ditata walaupun tetap di lingkungan aula. Sillaturahim ke

beberapa cabang, MWC berjalan sesuai situasi dan kondisinya dalam even-even formal Nahdlatul Ulama maupun kultural.

Dalam kepengurusan PWNU periode ini banyak bermunculan wajah-wajah baru yang dulunya secara struktural belum masuk, seperti TGH. Mukhlis Ibrahim Pimpinan Ponpes Islahuddin Kediri yang duduk sebagai Mustasyar, TGH. Anwar MZ Pimpinan Ponpes Darunnajah Duman Lingsar sebagai Wakil Rois Syuriah, TGH. Muhammad Najib Pimpinan Ponpes al-Halimi Sesile sebagai wakil Katib, Dr. H. Mutawali, Dr. Adi Fadli, Dr. Masnun Thahir, Drs. H. Hasan Mustafa, M.Ag dan lain-lain.

Pada kepengurusan ini sudah mulai ada aktifitas yang tidak saja berkaitan pembinaan internal NU, tetapi juga melakukan MoU dengan beberapa ormas Islam di luar NU, seperti Muhammadiyah dan NW Pancor. MoU ini berkaitan dengan pembangunan di NTB terutama yang terkait dengan pendidikan, dakwah, Aswaja, sosial dan lain sebagainya. Termasuk juga dalam mendukung program-program pemerintah yang secara kebetulan Gubernurnya adalah seorang Ulama yang berpengaruh di daerah ini, TGH. Muhammad Zainul Majdi, MA Ketua Umum PBNW (Pengurus Besar Nahdlatul Wathon) Pancor alumni Universitas al-Azhar Kairo. Dan ketika studi di kairo beliau pernah aktif di KMNU (keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama, dan salah satu paman beliau beliau Muh. Said pernah menjadi pimpinan Banser pada tahun 1965 terutama pada aksi pengganyangan G30S/PKI).<sup>325</sup>

Sillaturrahim dengan NW ini sebenarnya pernah dilakukan oleh PBNW Pancor dalam rangka Hultahnya dengan mengundang PBNU (KH. Hasyim Muzadi) dan bersamaan dengan itu, kedatangan KH. Hasyim Muzadi ini sekaligus menghadiri lebih dulu kegiatan istighatsah dan pelantikan pengurus sekaligus Rakerwil pertama Pengurus Wilayah NU NTB yang baru di Asrama Haji Jalan Lingkar Mataram, sebelum menghadiri Hultah NW besoknya. Ini terselenggara pada tanggal 10-12 Agustus 2008.

Rakerwil kedua diselenggarakan pada tanggal 26-27 Juli 2009 di pondok pesantren At-Tamimi Praya asuhan TGH. Lalu Khairi Adnan Rois Syuriah PWNU. Serangkaian kegiatan dilakukan mulai dari

---

<sup>325</sup> TGH. Syamsul Hadi, Lc. Pimpinan ponpes Nurul Shobah Batunyale Lombok Tengah, katib Syuriah NU Lombok Tengah, *Wawancara*, di Batunyale tanggal 23 September 2014.

dibukanya langsung kegiatan oleh Gubernur NTB TGH. Zainul Majdi, MA dan taushiah langsung dari KH. Hasyim Muzadi dan sekaligus pada malam harinya pelantikan LDNU, LBHNU, LP Ma'arif, LKKNU, LENU dan lain-lain, kemudian besok harinya dilanjutkan dengan Bahtsul Masail yang diikuti oleh beberapa Tuan Guru (Syuriah) Cabang, MWC dan para pakar.<sup>326</sup> Dalam acara rakerwil ini nampaknya ada nuansa politisnya karena terselenggaranya menjelang pilpres tahun 2009. Nampaknya warga mau diarahkan untuk memilih JK-Wiranto, karena betapun JK adalah kader Nahdlatul Ulama dan Wiranto adalah Muhammadiyah yang juga didukung oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah, yang berarti dukungan dari PP Muhammadiyah dan PBNU, walaupun pada akhirnya semuanya menentukan pilihannya sesuai hati nurani mereka masing-masing.

Kenyataan mencengangkan terjadi, ternyata di kantong-kantong Nahdlatul Ulama lebih banyak mendukung SBY-Budiono dari pada JK-Wiranto. Warga nampaknya semakin cerdas dan tidak mau dipaksa-paksa, tidak seperti zaman dulu, warga NU dapat dipastikan akan mengikuti sesuai dengan pendapat Syuriah, mereka langsung *sami'na wa atho'na*. Kalau Pemilu 2009 bahkan nyaris menurunkan wibawa Syuriah sendiri karena arahnya tidak diikuti. "Ini dalam politik praktis". Mungkin ini dampak dari pemahaman tentang pemaknaan khittah NU 1926 yang mulai dan sudah dipahami sendiri oleh masyarakat NTB terutama warga Nahdliyyin.

---

<sup>326</sup> TGH. Lalu Ahmad Tamim, *Wawancara*, di Berangsak Semayan Praya tanggal 24 Februari 2016.

## **B A B X I I**

# **TANAH AL MA'ARIF MATARAM DAN BASIS-BASIS NU DI LOMBOK PASCA KHITTHAH**

### **A. Tanah al-Ma'arif Nahdlatul Ulama**

PERAN NAHDLATUL ULAMA dalam perjuangan mempertahankan NKRI baik pada zaman pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan sampai sekarang, maka sangat wajar jikalau pemerintah memberikan berbagai penghargaan kepada Nahdlatul Ulama diminta ataupun tidak, salah satu misalnya pada saat pemerintahan orde lama melalui Menteri Agama K.H. Saifuddin Zuhri, Bung Karno menghadiahkan tanah kepada NU seluas 8 hektar di sekitar Jakarta Pusat, namun saat ini tanah itu tidak jelas keberadaannya. Hanya 1 dari 8 hektar tanah tersebut yang bisa diselamatkan oleh PBNU.

Demikian juga di NTB, Gubernur Raden Arya Ruslan Cakraningrat Gubernur pertama propinsi NTB tahun 1959, menghadiahkan tanah kepada NU seluas 1 hektar di sekitar wilayah Dasan Agung Mataram, sebagaimana juga diberikan kepada organisasi lain yang berperan dalam memperjuangkan NKRI. Tanah tersebut saat ini tepatnya berada jalan Pendidikan No. 6 depan MAN (Madrasah Aliyah Negeri) 2 Mataram, tanah ini memang pertama kali merupakan milik penuh Lembaga Pendidikan al-Ma'arif, diberikan oleh pemerintah pada waktu itu kepada Nahdlatul Ulama melalui mantan Rois Syuriah Nahdlatul Ulama NTB, al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Muhammad Shaleh Hambali Bengkel.

Kemudian di atas tanah tersebut saat ini berdiri beberapa lembaga pendidikan formal seperti, SMP al-Ma'arif, SMA al-Ma'arif, SMK Bina Bangsa, dan terakhir saat ini dibangun sebuah perguruan tinggi yaitu, “perguruan tinggi UNU NTB (Universitas Nahdlatul Ulama NTB)” sebagai “lembaga kebanggaan milik bersama warga NU”, dengan rektor pertamanya Marsekal Madya Dr. H. Raden Mas Dwi Putranto Sulaksono, dan telah direncanakan dengan baik bahwa perguruan tinggi UNU NTB ini ke depannya akan dipindahlokasikan ke wilayah Kabupaten Lombok Tengah sekitar wilayah dekat BIL (Bandara Internasional Lombok).

Menurut beberapa keterangan tanah tempat akan dibangunnya perguruan tinggi tersebut sudah dibeli dan siap dimulai operasional pembangunannya.

Selain itu, di atas tanah Al-Ma'arif Mataram juga didirikan sebuah bangunan gedung yang difungsikan menjadi aula, saat ini disebut AULA NU, yang digunakan atau dimanfaatkan sebagai kantor wilayah Nahdlatul Ulama NTB dan pusat sekretariat panitia acara yang berkaitan dengan segala kegiatan Nahdlatul Ulama di wilayah NTB, khususnya kegiatan Nahdlatul Ulama di tingkat wilayah.

Jadi, sesungguhnya tanah ini dahulu merupakan milik penuh Nahdlatul Ulama. Sehingga kemudian dibangun gedung permanen memanjang dari barat ke timur atas gotong royong dan dukungan masyarakat Nahdlatul Ulama dan simpatisannya di Kota Mataram dan sekitarnya. Kemudian setelah itu, karena faktor politik, tepatnya setelah lahirnya orde baru dengan politik monoloyalitasnya, karena banyak tokoh Nahdlatul Ulama yang tidak bergabung dengan partai Golkar, maka tanah ini lalu kemudian dicabut status hak kepemilikannya dari Nahdlatul Ulama, oleh pemerintah orde baru tidak lagi menjadi milik penuh Nahdlatul Ulama, berubah hanya menjadi Hak Guna Pakai saja. Sementara ini belum ada upaya secara serius dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama NTB untuk berupaya mengembalikan status sebenarnya tanah ini sebagai milik penuh Nahdlatul Ulama, mulai dihitung sejak Nahdlatul Ulama mulai tidak terlibat politik praktis atau berhenti menjadi partai politik sampai kembali ke Khittah 1926, yang selanjutnya hanya terkonsentrasi mengurus aktifitas dakwah, pendidikan, ekonomi, budaya, dan sosial kemasyarakatan saja, meski dalam aktifitas politik yang terlibat adalah hanya warga Nahdlatul

Ulama bukan Nahdlatul Ulama secara organisatoris sampai dewasa ini (2016).

Pada tahun 2017 menjadi hari bersejarah bagi perkembangan NU di Pulau Lombok, bertepatan dengan pelaksanaan Musyawarah Nasional (MUNAS) Alim Ulama dan Konferensi Besar (KONBES) NU yang kedua kalinya di percaya oleh PBNU untuk menyelenggarakan even yang sangat bergengsi yang dipusatkan di Kota Mataram dan Lombok Barat. Sekaligus juga direncanakan penyerahan tanah hibah dari Pemda NTB kepada NU. Pada kesempatan bersamaan, juga mendapat tanah hibah (Wakaf?) dari salah seorang warga NU di Kota Mataram seluas 35 are di Jalan lingkaran selatan.

Penulis berdo'a, mudah-mudahan semoga tanah ini dapat kembali menjadi hak milik penuh Nahdlatul Ulama ke depannya, tentu saja bersamaan dengan adanya ikhtiar atau perjuangan pengurus Nahdlatul Ulama di provinsi NTB ini.

Ketika K.H. Saifuddin Zuhri dari Nahdlatul Ulama menjadi Menteri Agama, pada tahun 1966 beliau meresmikan perguruan tinggi IAIN Sunan Ampel Cabang Mataram, yang selanjutnya disebut Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Mataram. Bapak Muhammad Sareh, S.H dari Nahdlatul Ulama ditunjuk langsung sebagai Dekan pertamanya. Pendirian IAIN Sunan Ampel Cabang Mataram di daerah Lombok adalah merupakan hadiah terbesar pemerintah kepada umat Islam NTB yang merupakan mayoritas pemeluk Agama Islam. Perjalanannya dari bentuknya sebagai Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Mataram menjadi STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) Mataram kemudian berubah menjadi STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Mataram dan berubah terakhir saat ini menjadi IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Mataram. Perubahan status kembali akan dilakukan dimana tengah berproses menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) Mataram. Di samping perguruan tinggi Islam yang berdiri, perguruan tinggi Universitas Mataram pun berdiri, dipimpin oleh Bapak Kolonel Yusuf Abu Bakar yang menurut salah satu sumber yang shohih, Bapak Sunaryo Dasan Agung Mataram, bahwa Bapak Kolonel Yusuf Abu Bakar pimpinan perguruan UNRAM tersebut lahir dan hidup dari keluarga yang berlatar belakangkan Nahdlatul Ulama juga.



Banyak tokoh Nahdlatul Ulama tingkat nasional yang datang memberi pencerahan dan pengkaderan di NTB di tahun awal dan pertengahan kemerdekaan selain KH. Saifuddin Zuhri, yaitu antara lain: KH. Idham Khalid, KH. Wahab Hasbullah (pendiri pertama NU), KH. Anwar Musaddad, KH. Yusuf Hasyim, Subhan ZE, KH. Ali Ma'shum, Drs. Zamroni, KH. Hasyim Muzadi dan lain-lain. Biasanya sillaturrehman dilakukan lebih dahulu ke Ponpes Darul Qur'an asuhan Tuan Guru Haji Muhammad Shaleh Hambali Bengkel, lalu ke cabang-cabang yang ada antara lain ke Praya Lombok Tengah di ponpes Manhalul Ulum asuhan Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Faisal dan ke pondok pesantren Nahdlatul Ulama Al-Ittihadul Mahsuni asuhan TGH. Mahsun yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

Setelah Reformasi, Pondok pesantren yang menjadi corong Nahdlatul Ulama NTB yang sering dikunjungi oleh tokoh-tokoh nasional, seperti Prof. DR. KH. Sa'id Aqil Siradj, MA, DR. KH. Musthofa Bisri, DR. KH. Manarul Hidayat, DR. KH. Ma'ruf Amin dan lain-lain ialah sebagai berikut;

1. Ponpes al Manshuriyah Bonder Lombok Tengah, asuhan TGH. Ahmad Taqiudin Manshur, M.Pd.I (Ketua Tanfidziyah Wilayah NTB sekarang) beliau merupakan murid dari al Maghfurullah TGH. Lalu Muhammad Faisal pimpinan ponpes Manhalul Ulum Praya.
2. Ponpes Qomarul Huda Bagu Lombok Tengah, pimpinan TGH. Lalu Turmudzi Badarudin (sekarang beliau menjadi salah satu anggota Istimewa Tim Sembilan yang selanjutnya disebut "*Ahlul Halli wal Aqdi*") PBNU yang berfungsi memilih dan menunjuk Ketua Umum PBNU secara langsung) beliau merupakan murid dari al Maghfurullah TGH. Muhammad Shaleh Hambali pimpinan Ponpes Darul Qur'an Bengkel Lombok Barat.
3. Ponpes At-Tamimiy Brangsak Praya pimpinan TGH. L. Khairi Adnan (Ketua Syuriah PWNU NTB). Beliau merupakan murid dari TGH. M. Shaleh Hambali pimpinan Ponpes Darul Qur'an Bengkel Lombok Barat. Dan lain sebagainya.

Seyogyanya, para tokoh nasional dan khususnya tokoh nasional yang beralmamaterkan Nahdlatul Ulama, juga dapat mengunjungi pondok pesantren Nahdlatul Ulama lainnya seperti, Ponpes Fajrul

Hidayah Al-Ma'arif Batujai, nama ponpes ini disematkan oleh TGH. L. Muhammad Faisal dan saat ini diasuh oleh murid-murid beliau, antara lain TGH. M. Syahdi Amin, TGH. Muhammad Zaki (saat ini lokasi ponpes Fajrul Hidayah berdampingan dengan lokasi Kantor Cabang Nahdlatul Ulama Lombok Tengah), sebelumnya TGH. Husni, TGH. Manshur, TGH. Abdul Hamid yang merupakan murid TGH. M. Shaleh Hambali. Hal ini diharapkan untuk menghindari kecemburuan sosial antar pondok pesantren Nahdlatul Ulama dan sekaligus dapat memberikan pencerahan dan pengkaderan secara langsung dan merata sebagai bagian yang sama sebagai kader-kader Nahdlatul Ulama dahulu, kini, dan mendatang. Tentunya demi maju dan mulianya yang lima, yaitu:

1. *'Izzul Islam wal Muslimin* (Maju dan mulianya agama Islam dan orang-orang Islam).
2. *Wa 'izzul Indonesia wal Indonesiyyin*(Majunya dan mulianya Negara Indonesia dan orang-orang Indonesia).
3. *Wa 'izzul NTB wal NTBiyin* (Maju dan mulianya propinsi NTB dan orang-orang NTB).
4. *Wa 'izzul Sasak was Sasakiyyin*(Maju dan mulianya suku sasak dan orang-orang sasak).
5. *Wa 'izzul NU wan Nahdliyyin"*. (Maju dan mulianya NU dan orang-orang NU).

## **B. Basis-Basis Nahdlatul Ulama Di Lombok**

Saat ini Nahdlatul Ulama digerakkan oleh sejumlah tokoh-tokohnya di berbagai tempat di wilayah Lombok sehingga menjadi basis-basis warga Nahdliyyin di Lombok. Adapun basis-basis NU tersebut ialah sebagai berikut:

### **Kota Mataram**

#### **Kecamatan Ampenan**

1. Desa Pejeruk dengan Pondok Pesantren Al-Amin yang diasuh oleh TGH. Mustafa Faisal (alm) dengan pengembangan ajaran Thariqat Qadiriyyah wan Naqsyabandiyahnya, TGH. Muhammad Aminullah (alm) Rois Syuriah

PCNU Kota Mataram yang pertama dengan Tarbiyatul Qurra'nya, kemudian dilanjutkan oleh putra beliau TGH. Abdul Hamid Faisal dan lain-lain. Beliau keturunan TGH. Amin Pejerk Ulama besar Lombok.

2. Desa Kebun Sari dengan pengajian Majelis Taklim pimpinan TGH. Baehaqi, TGH. Murad dll. Termasuk pula pendidikan al-Qur'an, seperti Taman Pendidikan al-Qur'an. Beliau bersama dengan sejumlah keluarganya mengembangkan ajaran NU di wilayah ini.
3. Dan lain sebagainya.

### **Kecamatan Cakranegara**

1. Desa Karang Taliwang dengan Madrasatul Qubbatul Islam pimpinan TGH. Ahmad Murad, H Ahmad Fathullah dan beberapa keluarganya. TGH. Murad adalah tokoh Nahdlatul Ulama yang sangat sukses dalam berdagang sejak belum merdeka. Yang paling menonjol adalah usaha di bidang masakan, ia membuka restoran atau warung yang terkenal dengan Warung Taliwang di Mataram bersama keluarganya. Setiap tokoh Nahdlatul Ulama atau pejabat dari Pusat hampir dapat dikatakan pernah menikmati masakan khas dari Warung Taliwang. Usaha TGH. Murad ini sekarang dilanjutkan oleh keluarganya yang masih ada.
2. Dan lain sebagainya.

### **Kecamatan Mataram**

1. Desa Pagutan dengan Ponpes Darul Falah pusat Thariqat Qadiriayah Naqsyabandiyah, pimpinan TGH. Mustiadi Abhar Rois syuriah Nahdlatul Ulama kota Mataram. Beliau merupakan putra TGH. Abhar yang melahirkan banyak kader-kader NU di wilayah ini maupun di luar wilayah ini, sampai ponpes ini memiliki cabang ponpes Darunnajah al-Falah pimpinan TGH. Ahmad Khairil Anwar, ada juga Madrasah Nurul Qur'an peninggalan TGH. Mustajab (alm), kemudian dilanjutkan oleh Ust. Muh. Ghazali putra beliau, SMA al-Hikmah yang tokohnya TGH. Abdul Hamid, TGH. Fathurrahman Zakaria

dll. Semuanya merupakan anak keturunan dari salah satu Ulama besar Lombok, yaitu TGH. Abdul Hamid Pagutan yang merupakan salah satu guru dari TGH. M. Sholeh Hambali Bengkel.

2. Dan lain sebagainya.

### **Kecamatan Sandubaya**

1. Desa Bertais dengan ponpes Mamba'ul Khair pimpinan Ust. Ahmad Suhaimi. Bersama dengan keluarganya mengembangkan ajaran NU di wilayah ini.
2. Desa Selagalas dengan ponpes Darul Aman pimpinan TGH. Zulkarnaen. Bersama dengan keluarganya mengembangkan ajaran NU di wilayah ini.
3. Desa Babakan dengan pengajian Majelis Taklim pimpinan Para Alumni Islahudiniy dll. Termasuk TGH. Mutawalli Rektor IAIN Mataram saat ini.
4. Desa Turida dengan ponpes Nurul Qur'an Al-Aziziyah pimpinan TGH. Husnul Hadi. Beliau merupakan murid dari TGH. Mushtofa Umar Abdul Aziz Kapek. Saat ini beliau bersama dengan keluarganya mengembangkan ajaran NU di wilayah ini.
5. Dan lain sebagainya.

### **Kecamatan Sekarbela**

1. Desa Sekarbela dengan ponpes Ar-Roisiyah merupakan lembaga pendidikan NU pertama di Lombok. Di mana TGH. Mustafa Bakri pimpinan NU pertama Lombok mengabdikan diri mengkader generasi NU pada zamannya bersama dengan TGH. Muhammad Ra'is. Saat ini ponpes Ar-Roisiyah dipimpin oleh TGH. Maschun Ra'is. Kegiatan Nahdlatul Ulama disini digerakkan oleh putri-putri Nahdlatul Ulama keturunan TGH. Mustafa Bakri, TGH. Muhammad Ra'is, terutama Fatayat NU dan IPPNU. Tokoh Fatayatnya antara lain digerakkan oleh Dra. Nurul Yaqin (Dekan fak. Tarbiyah IAIN Mataram 2007–2011), Dra. Wartiah (sekarang

Ketua Fatayat NU/Anggota DPRD TK I PPP) dan sahabat-sahabat yang lain. Dengan kegiatan-kegiatan mereka lalu dapat membangun TK Fatayat NU (Nurul Islam).

2. Desa Jempong Baru dengan ponpes al-Madaniyah pimpinan TGH. Ahmad Madani. Beliau bersama keluarganya menjaga dan mengembangkan NU di wilayah ini.
3. Dan lain sebagainya.

### **Kecamatan Seleparang**

1. Desa Monjok dengan Yayasan Riyadlul Ulum pimpinan TGH. M. Anwar Isma'il pentolan NU tiga zaman, Pengurus Yayasan Ma'arif, Sekretaris Nahdlatul Ulama, mantan Wakil Ketua DPRD TK II Lombok Barat, terakhir beliau sebagai wakil Rois Syuriah Nahdlatul Ulama. kemudian digerakkan oleh putra putri beliau.
2. Desa Dasan Agung dengan Yayasan Ittihadul Umah Karanganyar dikelola oleh keluarga H. Idhar mertua Dra. Nurul Yaqin, M.Pd. Ada KH. Ahmad Usman, Ada H. Bil'id MSA, lembaga Pendidikan Makrifatul Islamiyah, yang konon kabarnya dibangun oleh sahabat-sahabat PMII tahun 1960-an yang sekarang dikelola oleh Ust. Muhammad. selanjutnya putra-putri TGH. Abdul Karim, yaitu Ust. H. Muaidi, Drs. H. Syakban, Drs. H. Subai dan di Dasan Agung terdapat TK Muslimat Nahdlatul Ulama. Di daerah ini ada keturunan TGH. Abdul Karim, TGH. Abdul Hanan yang beliau merupakan tokoh NU pada zamannya (Ayah dari Walikota Mataram Bapak Ayhar Abduh).
3. Desa Gomong dengan tokohnya TGH. Murad, Ust H. Lalu Sarfin dan lain-lain. Melalui pengajian Majelis Taklim mengembangkan NU di wilayah ini. Di samping itu di daerah inilah terpusat lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama al-Ma'arif, Jln. Pendidikan 6 Mataram yang merupakan tempat berdirinya lembaga pendidikan tinggi NU, yaitu perguruan

tinggi “UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA NUSA TENGGARA BARAT” serta kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat.

4. Kampung Jawa dengan tokoh besar NU Prof. Drs. H. Saiful Muslim, MM dan isterinya Prof. Dra. Hj. Sri Banun Muslim dan para putra putrinya. Karang kelok dan sekitarnya, tradisi Nahdlatul Ulama tetap berjalan baik.<sup>327</sup>

Dan masih banyak lagi basis-basis NU yang lain di kota Mataram. Rata-rata masyarakat kota Mataram baik penduduk asli maupun pendatang asal tidak NW dan Muhammadiyah adalah warga Nahdlatul Ulama. Karena tradisi-tradisi Nahdlatul Ulama masih sangat kuat di kota ini. Walaupun muncul aliran Salafi (Wahabi) dan Ikhwanul Muslimin (IM) bahkan Syi'ah. Tradisi Nahdlatul Ulama itu sulit untuk diubah. Mereka sebenarnya Nahdlatul Ulama jama'ah, walaupun belum jami'yyah. Masjid-masjid di kota Mataram asal yang bukan masjid BTN atau Perumnas, tradisi azan dua kali, memakai tongkat ketika khutbah Jumat tetap berjalan dengan baik. Dengan demikian kultur Nahdlatul Ulama masih eksis walaupun hantaman-hantaman dari golongan yang membid'ahkannya masih berlangsung terus. Ini tantangan buat para tokoh Nahdlatul Ulama, khususnya Syuriahnya.

## **Kabupaten Lombok Barat**

### **Kecamatan Kediri**

1. Kecamatan Desa Kediri Ponpes Islahudiniy pimpinan TGH. Mukhlis Ibrahim bersama dengan keluarga dan murid beliau lainnya. Saat ini beliau menjadi wakil rois syuriah pengurus wilayah Nahdaltul Ulama NTB. Desa Kediri bahkan disebut sebagai wilayah kota Santri karena mayoritas masyarakat di wilayah ini adalah tuan guru hasil cetakan alm. TGH. Musthofa al-Khalidiy dan TGH. Ibrahim al-Khalidiy. Sebagian besar ponpes yang ada di wilayah Lombok Barat dan Lombok

---

<sup>327</sup> Dikutip dari Data Pondok Pesantren dan madrasah binaan Nahdlatul Ulama UNU NTB dan disesuaikan dengan wawancara Drs. Ahmad Taqiuddin Manshur, M.Pd.I Ketua Pengurus Wilayah NU NTB.

Timur didirikan oleh murid-murid beliau.

2. Desa Rumak dengan ponpes Islahil Athfal pimpinan Ust. Ahmad Mursyid Sema'un. Beliau bersama dengan tokoh setempat melalui ponpes ini mengembangkan ajaran NU di wilayah ini.
3. Ponpes Saadatutdarain Dasan Geres Gerung Pimpinan TGH. Akhmad Asyari. Beliau merupakan salah seorang mustasayr NU sekitar tahun 1990 an
4. Desa Umbe dengan Pengajian Majelis Taklim pimpinan TGH. Lukman. Desa Keling dengan ponpes Al-Ma'arif Qomarul Huda pimpinan TGH. Nasruddin Muhdi. Di desa Bangkat Dalam terdapat pula ponpes NU al-Mukhtariyah pimpinan TGH. Muhammad Mukhtar dll. Bersama dengan keluarga beliau semua mengembangkan ajaran NU di wilayah masing-masing.
5. Dan lain sebagainya. Tidak heran kemudian di wilayah ini disebut sebagai Kota Santri.

### **Batu Layar**

1. Desa Lembah Sari dengan ponpes Riyadhussibyan pimpinan TGH. Ahmad Hanafi. Saat ini beliau menjadi ketua umum jam'iyah Thoriqoh Nahdlatul Ulama al-Muktabaroh NTB.
2. Desa Sandik dengan ponpes Madrasatul Qur'aniyah yang mengembangkan ajaran NU pimpinan Ust. Mujtahidin. Ada juga ponpes Islahul Muslimun pimpinan TGH. Sanusi. Bersama dengan keluarga beliau mengembangkan ajaran NU di wilayah ini.
3. Dan lain sebagainya.

### **Kecamatan Lembar**

1. Desa Labuhan Tereng dengan ponpes Nurul Hidayah pimpinan TGH. Nuril Anwar. Beliau mengembangkan ajaran NU di wilayah ini.
2. Desa Batu Samban dengan Ponpes Nujumul Huda pimpinan TGH. Moh. Nafsin Al-Kholili. Beliau merupakan murid TGH.

Ibrahim al-Khalidiy.

3. Dan lain sebagainya.

### **Kecamatan Labuapi**

1. Desa Bengkel dengan Ponpes Darul Qur'an pimpinan alm. TGH. M. Shaleh Hambali dan dilanjutkan oleh putra-putri beliau, termasuk Desa Merembu ada ponpes Ihyauddiniy pimpinan Ust. Kusairiy, Desa Tembelok dan lain sebagainya. Pondok pesantren inilah yang banyak melahirkan kader-kader NU tulen dalam sejarah Nahdlatul Ulama di Lombok. Masing-masing muridnya kemudian membangun sejumlah pondok pesantren di berbagai tempat. Di Ponpes inilah banyak tokoh-tokoh pendiri NU, antara lain KH. Wahab Hasbulloh, KH. Anwat Musaddad, dan lain sebagainya, tokoh-tokoh nasional sering berkunjung termasuk Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno.
2. Desa Jereneng Bajur dengan ponpes Abhariyah pimpinan TGH. Ulul Azmi. Beliau saat ini menjadi Rois Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lombok Barat. Terdapat pula ponpes Al-Istiqomah pimpinan TGH. Abdul Hafidz.
3. Dan lain sebagainya

### **Kecamatan Gerung**

1. Desa Dasan Ketujur dengan ponpes Manba'ul Ulum pimpinan TGH. Muhajirin. Di desa Ekok ada tokoh NU, yaitu TGH. Kaharudin dengan ponpesnya. Di desa Dasan Geres ada TGH. Asy'ari dengan ponpes beliau. Termasuk di desa Banyu Urip Tempos Kesuma terdapat ponpes Nurul Huda pimpinan Ust. Mudaham. Di Kebon Talo desa Kebonayu dengan ponpes Al-Hamidiy pimpinan TGH. Badrun. Beliau-beliau menjaga dan mengembangkan ajaran NU di wilayahnya masing-masing.
2. Desa Bermi dengan ponpes Darussalam pimpinan TGH. M. Ridlwanullah At-Tauhidiy. Saat ini diteruskan oleh putra beliau TGH. Hardiatullah Ridlwaniyah. Ponpes sudah memiliki perguruan tinggi Islam yang cukup berkembang dengan baik.



3. Dan lain sebagainya.

### **Kecamatan Gunung Sari**

1. Desa Sesela dengan ponpes Al-Halimiyy pimpinan TGH. Munajib Khalid. Saat ini beliau menjadi wakil rois Syuriah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama NTB. Bersama dengan keluarga beliau TGH. M. Ridwan Anwar dll. Mengembangkan ajaran NU di wilayah ini.
2. Di desa Kekait ada ponpes At-Tahtdzib pimpinan Ust. H. Zaini. Beliau bersama dengan beberapa keluarganya mengembangkan ajaran NU di wilayah ini.
3. Desa Gunung Sari dengan ponpes Ad-Dinul Qoyyim pendirinya alm. TGH. Syakaki Umar (beliau menjadi pengurus syuriah wilayah NU bersama dengan TGH. M. Shaleh Hambali Bengkel). Saat ini dilanjutkan oleh keturunan beliau, yaitu TGH. M. Tohri AM, BA. S. Sos. bersama dengan keluarga beliau lainnya. Termasuk pula ponpes Al-Aziziyah pimpinan TGH. Fathul Aziz Musthofa. Beliau merupakan keturunan TGH. Musthofa Umar Abdul Aziz saudara kecil dari TGH. Syakaki Umar.
4. Dan lain sebagainya.

### **Kecamatan Narmada**

1. Desa Batu Kuta dengan ponpes Qur'aniyah pimpinan TGH. Muhammad Hanan. Terdapat juga ponpes tahfidzul Furqon dan lain sebagainya. Semuanya mengembangkan NU dan ajarannya di wilayah ini.
2. Desa Batu Rimpang dengan ponpes Hidayatul Mustafid pimpinan TGH. Adnan. Bersama dengan keluarga beliau mengembangkan ajaran NU di wilayah ini.
3. Dan lain sebagainya.

## **Kecamatan Kuripan**

1. Desa Kuripan Utara dengan ponpes Nurul Madinah pimpinan TGH. Subki As-Sakaki. Beliau mengembangkan ajaran NU di wilayah ini.
2. Dan lain sebagainya.

## **Kecamatan Lingsar**

1. Desa Duman dengan ponpes Darunnajah pimpinan TGH. Anwar MZ. Beliau merupakan murid TGH. Abhar Muhyiddin Pagutan. (saat ini beliau menjadi wakil rois syuriah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama NTB ).
2. Desa Langko dengan ponpes Nurul Hikmah pimpinan TGH. Muhammad Azhar. Ada ponpes As-Sulamiy pimpinan TGH. Jamhur. Beliau semua bersama dengan keluarganya mengembangkan ajaran NU di wilayah ini.
3. Dan lain sebagainya.

## **Kecamatan Sekotong**

1. Desa Sepi dengan Darul Ikhlas pimpinan Ust. Sirajudin. Beliau mengembangkan ajaran NU bersama dengan keluarganya di wilayah ini.
2. Dan lain sebagainya.<sup>328</sup>

Kabupaten Lombok Barat juga merupakan salah satu basis warga Nahdliyyin di NTB sesudah Lombok Tengah. Di semua kecamatan sudah berdiri Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.

## **Kabupaten Lombok Tengah**

### **Kecamatan Praya**

1. Desa Tiwu Galih dengan Ponpes Manhalul Ulum Praya dan Ponpes Sa'adatul Banat masing-masing didirikan oleh TGH. Lalu Muhammad Faisal dan Ust. Lalu Bukran. Dua pondok pesantren inilah yang telah banyak melahirkan pondok

---

<sup>328</sup> Dikutip dari Data Pondok Pesantren dan madrasah binaan Nahdlatul Ulama UNU NTB dan disesuaikan dengan wawancara dari Ust. Rusnam (Pengurus Rabhithah Ma'ahid Islamiy NTB)

pesantren Nahdlatul Ulama di Lombok, khususnya Lombok Tengah. Di ponpes inilah kader-kader NU banyak dicetak baik yang kader NU laki-laki maupun kader-kader NU yang perempuan. Ponpes ini kemudian dilanjutkan oleh putra-putri kedua tokoh tersebut, antara lain TGH. Lalu Habiburrahman, TGH. Sukarno, dan lain sebagainya.

2. Desa Semayan dengan Ponpes At-Tamimi pimpinan TGH. Lalu Khairi 'Adnan (beliau merupakan Rois Syuriah Pengurus Wilayah NU NTB saat ini). Bersama dengan salah satu keluarganya TGH. Lalu Tamim sera tokoh-tokoh NU yang lain, beliau mengembangkan ponpesnya. Di ponpes ini sering terselenggara even-even kegiatan Nahdlatul Ulama. Beliau merupakan murid dari al-Maghfurullah TGH. Saleh Hambali Bengkel. Dan Ponpes NU yang lain.
3. Desa Mertak Tombok dengan Ponpes Nurul Qur'an pimpinan TGH. Sabarudin. Beliau merupakan termasuk salah satu Qori' Internasional Lombok. Pembelajaran di ponpes ini lebih terkonsentrasi pada seni baca al-Qur'an di samping pelajaran yang lain. Beliau merupakan murid dari TGH. Lalu Muhammad Faisal. Di samping ponpesnya beliau terdapat juga ponpes yang lain, yaitu ponpes Nurul Ulum pimpinan Ust. Muhammad Nur. Beliau merupakan murid TGH. Lalu Muhammad Faisal. Pembelajaran di ponpes ini terkonstrasi pada pembelajaran kitab kuning. Di samping pelajaran yang lain.
4. Desa montong Terep dengan ponpes At-Thohiriyah pimpinan TGH. Fadli Fadhil Thohir. Beliau merupakan kakak dari Bupati Lombok Tengah H. Suhaili Fadhil Thohir TGH. Fadhil merupakan murid dari TGH. Lalu Muhammad Faisal.
5. Dan lain sebagainya

### **Kecamatan Praya Tengah**

1. Desa Batu Nyala dengan ponpes Nurushshobah pimpinan TGH. Syamsul Hadi, Lc. Beliau merupakan keturunan TGH. M. Shaleh salah satu pendiri NU di Lombok Tengah. Bersama dengan keluarganya beliau mengembangkan NU di wilayah ini.

2. Desa Braim dengan ponpes Darul Ulum pimpinan TGH. Muhsin Bukhori. Beliau merupakan murid dari TGH. Lalu Muhammad Faisal. Bersama dengan keluarganya yang salah satunya TGH. Asrorul Haq beliau mengembangkan NU di wilayah ini.
3. Dan lain sebagainya.

### **Kecamatan Kopang**

1. Desa Muncan dengan ponpes As-Sholihyyah pimpinan TGH. Lalu Muhammad Shaleh Tsalits. Beliau merupakan keturunan TGH. Lalu Muhammad Shaleh Lopan Ulama Lombok yang sangat mahsyur pada abad ke-19 yang gigih dan teguh memperjuangkan ajaran Ahlussunnah Waljama'ah. Bersama dengan keluarganya mengembangkan NU di wilayah ini. di samping itu juga terdapat ponpes NU yang lain, yaitu Manba'ul Bayan pimpinan TGH. Muhammad Adam.
2. Desa kopang Rembiga dengan ponpes Fathiyah pimpinan Ust. Fatahri, ponpes Nurul Jama'ah pimpinan Ust. Jama'ah. Selain itu di Desa Monggas terdapat pula ponpes As-Sayutiyah pimpinan Ust. As-Sayuti. Bersama dengan keluarga masing-masing mengembangkan NU di wilayah ini.
3. Dan lain sebagainya

### **Kecamatan Janapria**

1. Desa Langko dengan ponpes Az-Zulkarnain pimpinan TGH. Mustajab Zulkarnain Arifin. Bersama dengan keluarganya beliau mengembangkan NU di wilayah ini.
2. Desa Pendem dengan ponpes Darul Ihsan pimpinan TGH. Lalu Makmun Saleh Hasibuan. Bersama dengan keluarganya juga mengembangkan NU di wilayah ini.
3. Dan lain sebagainya

### **Kecamatan Pujut**

1. Desa Tanak Awu dengan ponpes Nurussalam pimpinan TGH. Lalu Ahmad Munir. Beliau dengan keluarganya Ust. Zulkarnain, Ust. Lalu Hartono, TGH. Lalu Sohimun Faisal, TGH. Lalu

Muzammil Yadaen beliau mengembangkan NU di wilayah ini. Beliau TGH. Lalu Ahmad Munir merupakan murid dari TGH. Saleh Hambali Bengkel dan TGH. Lalu Muhammad Faisal Praya.

2. Desa Kute dengan ponpes Nurul Ittihad NU pimpinan TGH. Lalu Nasirudin. Bersama dengan salah satu keluarganya TGH. Lalu Sulhi Khair beliau mengembangkan NU di wilayah ini. Beliau TGH. Lalu Nasirudin merupakan murid dari TGH. Lalu Muhammad Faisal Praya. Dan ponpes ini telah membuka cabang madrasah di wilayah sekitar garis pantai Kute Lombok.
3. Desa Pengembur dengan ponpes Nurani Al-Ikhlas pimpinan Ust. Slamet Riyadi. Terdapat juga ponpes Al-Mansyuriah N pimpinan Ust. Haris. Beliau merupakan murid dari TGH. Lalu Muhammad Faisal.
4. Desa Sengkol dengan ponpes Albaladul Amin pimpinan TGH. Hariadi. Bersama dengan keluarganya beliau gigih memperjuangkan NU di wilayah ini.
5. Dan lain sebagainya

### **Kecamatan Praya Timur**

1. Mujur dengan ponpes al-Ma'arif pimpinan Ust. Salman Rinadi. Bersama dengan keluarganya beliau mengembangkan NU di wilayah ini. selain itu juga terdapat ponpes NU yang lain, yaitu ponpes Miftahul Falah pimpinan TGH. Alvin Hartana. Semuanya mengembangkan NU di wilayah ini.
2. Marong dengan ponpes Nurul Qur'an Al-Aziziyah pimpinan Ust. Taufiq Firdaus. Beliau merupakan murid TGH. Mushtofa Muar Abdul Aziz Kapek. Bersama dengan keluarganya mengembangkan NU Ahlussunnah Waljama'ah di wilayah ini.
3. Lajut dengan ponpes Darunnadwah Al-Yamini pimpinan Ust. Muhammad.
4. Dan lain sebagainya

### **Kecamatan Praya Barat**

1. Batujai dengan ponpes Fajrul Hidayah al-Ma'arif pimpinan

TGH. Muhammad Syahdi Amin. Bersama dengan keluarganya salah satunya TGH. Muhammad Zaki mengembangkan NU di wilayah ini. di samping itu beliau juga membangun ponpes yang lain di wilayah ini, ponpes Al-Amin. Beliau berdua merupakan murid TGH. Lalu Muhammad Faisal. Sebelum beliau berdua terdapat TGH. Husni, TGH. Abdul Hamid, TGH. Manshur. Semuanya merupakan murid TGH. M. Sholeh Hambali Bengkel. Selain itu juga terdapat ponpes Nurul Muhsinin pimpinan TGH. Daud Muhsin. Beliau merupakan dewan Mustasyar Pengurus Wilayah NU

2. Bonder dengan ponpes Ta'limushshibyan pimpinan TGH. Ahmad Taqiuddin Manshur. Ponpes ini didirikan oleh bapaknya TGH. Manshur Abbas murid TGH. M. Sholeh Hambali Bengkel. Beliau sendiri merupakan murid TGH. Lalu Muhammad Faisal Praya. Bersama dengan segenap keluarganya beliau mengembangkan NU di wilayah ini. beliau saat ini merupakan ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah NU NTB. Beliau sangat gigih memperjuangkan NU di wilayah NTB. Di desa Kateng ponpes Nurul Iman pimpinan TGH. Lalu Muksin Ibrahim murid TGH. Lalu Ibrahim al-Khalidiy, ponpes Nurul Islah Islami pimpinan TGH. Lalu Ihsan. Di desa Mangkung Ponpes Miftahul Falah pimpinan TGH. Lalu Hambali sampai dengan di desa Selong Belanak dengan ponpes Nurul Mujahidin pimpinan Ust. Dawiyah. Semua ponpes tersebut mengajarkan dan mengembangkan ajaran NU Ahlussunnah Waljam'ah di wilayah masing-masing.
3. Penujak dengan ponpes Sullamul Ma'ad pimpinan Ust. Hasnanudin. Beliau telah memiliki kurang lebih 10 Pengajian Majelis Taklim yang tersebar di wilayah Praya Barat, Praya Barat Daya, dan Batukliang Utara. Bersama dengan keluarganya TGH. Zakaria Buntimbe beliau mengembangkan NU di wilayah ini. Beliau Ust. Hasnanudin merupakan murid terakhir TGH. Lalu Muhammad Faisal Praya yang diijazahi legalitas keshohihan membaca apa saja kitab kuning.
4. Dan lain sebagainya

## **Kecamatan Praya Barat Daya**

1. Desa Darek dengan ponpes Manhalul Ma'arif pimpinan TGH. Ma'arif Makmun Diranse. Beliau saat ini dipercayakan menjadi Rois Syuriah Pengurus Cabang NU Lombok Tengah. Bersama dengan keluarga beliau mengembangkan NU di wilayahnya, antara lain alm. TGH. Nurudin Husni, MA, TGH. Lalu Bashirun, di samping itu juga ada ponpes Darul Hikmah pimpinan TGH. Lalu Wildan dan lain sebagainya. Beliau TGH. Ma'arif Makmun Diranse merupakan murid TGH. Lalu Muhammad Faisal.
2. Desa Batu Jangkik dengan ponpes Darul Falah pimpinan TGH. Moh. Syar'I dan ponpes Raudlatul Ulum pimpinan Ust. Jumedan. Beliau merupakan murid TGH. Lalu Muhammad Faisal
3. Desa Montong Ajan dengan ponpes Madinatul Ulum pimpinan TGH. Zainal Fahmi. Beliau mengembangkan ajaran NU di wilayah ini.
4. Dan lain sebagainya

## **Kecamatan Jonggat**

1. Desa Perina dengan ponpes Nurul Falah pimpinan Drs. Sahnan, SH. M.Hum, ponpes Nurul Ittihad pimpinan Ust. Hulaifi bersama dengan tokoh-tokoh dan keluarganya beliau-beliau mengembangkan NU di wilayah ini.
2. Desa Labulia dengan ponpes Hidayatul Ummah pimpinan TGH. Saifuddin Zuhri, ponpes Nurul Hidayah pimpinan TGH. Muhaimin Muhsin. Beliau-beliau bersama keluarganya mengembangkan NU di wilayah ini.
3. Desa Pengejek dengan ponpes Darul Musyawwirin pimpinan TGH. Marzuki. Beliau bersama keluarganya mengembangkan NU di wilayah ini.
4. Desa Dan lain sebagainya. Di wilayah kecamatan ini selain sebagian basis NU juga merupakan basis NW Lombok Tengah di mana merupakan tokoh setempat merupakan keluarga besar TGKH. Zaenuddin Abdul Madjid khususnya Desa Bonjeruk.

## **Kecamatan Pringgarata**

1. Desa Bagu dengan ponpes besar NU Qomarul Huda pimpinan TGKH. Lalu Turmuzi Badarudin. Di ponpes inilah pusat pengembangan Nahdlatul Ulama di wilayah NTB saat ini. Bersama dengan keluarga beliau mengembangkan NU di wilayah ini. Kegiatan berskala nasional pernah dilaksanakan di ponpes ini. saat ini beliau menjadi Ketua Dewan Mustasyar Pengurus Wilayah NU NTB. Beliau merupakan murid TGH. M. Sholeh Hambali Bengkel. Pondok pesantren Qomarul Huda sudah memiliki perguruan tinggi meskipun masih cabang ponpes sukorejo situbondo di samping cabang-cabang di beberapa tempat termasuk di wilayah Bagu.
2. Desa Sintung dengan ponpes Islahul Ittihad pimpinan TGH. Abdurra'uf. Beliau bersama keluarga beliau mengembangkan NU di wilayah ini. selain itu juga terdapat ponpes NU yang lain, yaitu Tahdzibul Akhlak pimpinan TGH. Saufi, ponpes Al-Ikhlasiyah pimpinan TGH. Syukron, ponpes As-Sa'adah pimpinan TGH. Lalu Mushtofa, ponpes As-Syafi'iyah pimpinan Ust. Sakarta dan lain sebagainya. Rata-rata beliau-beliau tersebut merupakan murid TGH. M. Sholeh Hambali. Daerah ini termasuk daerah yang sangat nampak warna hijaunya NU.
3. Desa Bilebanti dengan ponpes Hadil Ishlah pimpinan TGH. Hasanudin. Bersama keluarganya beliau mengembangkan NU di wilayah ini. selain itu, terdapat juga ponpes NU di Desa Pemepak dengan ponpes Darul Hikmah pimpinan TGH. Salaman. Beliau semuanya bersama keluarganya mengembangkan NU di wilayah ini.
4. Dan lain sebagainya.

## **Kecamatan Batukliang**

1. Desa Aik Darek dengan ponpes Uswatun Hasanah pimpinan alm. TGH. Lalu Ibrahim Thoyyib. Saat ini ponpes ini dipimpin oleh adiknya TGH. Lalu Abdul Hanan. Ponpes ini termasuk



ponpes NU yang besar karena terdapat perguruan tinggi dan sudah memiliki cabang-cabang di berbagai tempat. Selain itu ada ponpes Ishlahul Anam pimpinan Ust. Basirah. Bersama dengan keluarganya beliau mengembangkan NU di wilayah ini. warna NU di wilayah ini cukup menghijau mudah-mudahan hingga seterusnya.

2. Meski di daerah ini belum terlalu banyak ponpes NU namun sejumlah tokoh NU banyak di sini, antara lain TGH. Ahmad Mali Peresak-Pagutan putra TGH. Abdul Hamid Pagutan gurunya TGH. M. Shaleh Hambali. Melalui tokoh-tokoh NU inilah NU dikembangkan secara model pengajian Majelis Taklim, dan lain sebagainya.

### **Kecamatan Batukliang Utara**

1. Desa Mas-mas dengan ponpes Ilham pimpinan TGH. Mahyuddin Zakiyah. Beliau bersama keluarganya mengembangkan NU di wilayah ini.
2. Desa Setiling dengan ponpes Dakwatul Khair pimpinan TGH. Abdul Wasek. Beliau bersama keluarganya mengembangkan NU di wilayah ini.
3. Desa Aik Berik dengan ponpes Darul Athfal pimpinan TGH. Abdul Hanan. Beliau bersama keluarganya mengembangkan NU di wilayah ini. dan masih banyak lagi tokoh-tokoh NU di wilayah ini.<sup>329</sup>

Dan banyak lagi basis-basis NU di wilayah Lombok Tengah lainnya. Yang tercantum di tulisan ini hanya merupakan model keterwakilan dari masing-masing daerah kecamatan yang ada sehingga bukan berarti daerah yang tidak disebut di sini tidak NU. Karena secara kultur religinya semuanya sama kecuali yang sebagian kecil saja. Di samping NU di daerah Lombok Tengah juga terdapat sejumlah organisasi dan aliran keagamaan yang lain, seperti Nahdlatul Wathon, Muhammadiyah, dan aliran salafi-wahabi yang mulai merangsek masuk ke wilayah ini.

---

<sup>329</sup> Dikutip dari Data Pondok Pesantren dan madrasah binaan Nahdlatul Ulama UNU NTB dan disesuaikan dengan wawancara dari Ust. Rusnam (Pengurus Rabhithah Ma'ahid Islamiy NTB)

Namun di wilayah Lombok Tengah ini tetap merupakan basis utama NU Nusa Tenggara Barat.

## **Kabupaten Lombok Timur**

### **Kecamatan Aik Mel**

1. Desa Aik Mel dengan ponpes Riyadhul Falah pimpinan Ust. Marwan Hakim. Beliau merupakan katib Syuriah Lombok Timur. Beliau merupakan murid TGH. Abhar Muhyidin pimpinan Darul Falah Pagutan. Terdapat pula ponpes Al-Hikam pimpinan TGH. Sunardi. Beliau merupakan murid TGH. Abdul Manan pimpinan ponpes Jamaludin Bagik Nyake. Di samping itu, ada beberapa tokoh NU juga yang mengembangkan NU melalui pengajian majelis taklim, seperti TGH. Abdul Halim, TGH. Mukhtar, Ust. Hilmi Abdul Halim beliau merupakan murid TGH. Abhar Muhyidin Pagutan yang menjadi Rois Syuriah Lombok Barat era awal NU menjadi partai politik.
2. Desa Bagik Nyake dengan ponpes Hidayatul Islamiyah pimpinan TGH. Abdul Azim. Terdapat juga ponpes Jamaludin pimpinan TGH. Luthfi Abdul Manan dan TGH. Ahmad Manar Abdul Manan beliau berdua putra TGH. Abdul Manan. Ponpes ini termasuk ponpes besar karena telah melahirkan dua ponpes berikutnya. Masing-masing ponpes Zamharir Abdul Manan pimpinan TGH. Zamharir cucu TGH. Abdul Manan dari TGH. Luthfi Abdul Manan, dan ponpes As-Sunnah pimpinan H. Abdullah Husni putra TGH. Abdul Manan. Namun ponpes As-Sunnah tidak meneruskan mengembangkan ajaran NU Ahlussunnah Walajama'ah yang diwarisi TGH. Abdul Manan namun justru mengembangkan ajaran Salafi-Wahabi.
3. Desa Aik Mel Utara dengan ponpes Darul Falah pimpinan TGH. Muhammad Safwan. Beliau mengembangkan ajaran NU di wilayah ini.
4. Dan lain sebagainya

### **Kecamatan Jerowaru**

1. Desa Jerowaru dengan ponpes Darul Wustho pimpinan TGH. Abdul Aziz Anshori. Terdapat juga ponpes Darul Yatama Wal

Masakan pimpinan TGH. Badar pengganti TGH. Sibawaih Mutawalli yang terkenal dengan gerakan Ampibinya. Disamping juga ada ponpes Darul Qur'an pimpinan TGH. Hamdani Yamin pengganti TGH. Muhammad Nuh. Semuanya mengembangkan ajaran Ahlul sunnah Waljama'ah An-Nahdliyah di wilayah ini.

2. Desa Pemandah dengan ponpes Qudwatussholihin pimpinan Ust. Lalu Sukirman. Terdapat juga ponpes NU di Desa Sukaraja dengan ponpes Al-Ikhlas pimpinan Ust. Mahdi yang mengembangkan ajaran Ahlul sunnah Waljama'ah An-Nahdliyah di wilayah ini.
3. Dan lain sebagainya.

### **Kecamatan Keruak**

1. Desa Keruak dengan ponpes Nurul Iman pimpinan TGH. Ahmad Subki Mansyur. Bersama keluarganya mengembangkan NU di wilayah ini.
2. Desa Pijot dengan ponpes Bumi Nusantara AM. Pimpinan TGH. Muksin. Bersama keluarganya mengembangkan NU di wilayah ini.
3. Dan lain sebagainya.

### **Kecamatan Labuan Haji**

- Desa Labuhan Haji dengan ponpes yayasan Bintang Sembilan milik Bupati Lombok Timur Bapak Ali Bin Dahlan. Pengelolaan yayasan ini diserahkan kepada Ust. Lalu Nurman.

### **Kecamatan Masbagik**

1. Desa Danger dengan Ponpes Al-Ijtihad Al-Mahsuni pimpinan Hj. Nurhasanah Mahsun. Beliau merupakan putri dari TGH. Mahsun salah satu pendiri NU di Lombok Timur atau NTB. Selain itu juga ada ponpes Roudhotul Mujahidin pimpinan Ust. Ahmad Sadri. Kesemuanya masing-masing mengembangkan NU di wilayah ini. Beliau TGH. Mahsun merupakan murid TGH. M. Sholeh Hambali.
2. Desa Masbagik Utara dengan ponpes Yadinu pimpinan TGH.

Anshorulloh. Beliau merupakan keluarga dari TGH. Ishak Abdul Ghani. Salah satu tokoh yang NU-nya beliau bawa sampai meninggal dunia. Saat ini diteruskan oleh keluarga beliau. Di samping itu, di wilayah ini juga ada ponpes NU Ash-Shomadi pimpinan Ust. Abdul Ghony. Beliau TGH. Ishak merupakan murid TGH. M. Sholeh Hambali.

3. Desa Masbagik Selatan dengan ponpes Ihya Ulumuddin pimpinan TGH. Fathul Qodir Zen. Bersama dengan beberapa tokoh paling sepuh di Lombok Timur saat ini TGH. Abdul Qodir Jaelani dan TGH. Munsipudin, TGH. Ahmad Asy'ari beliau merupakan murid TGH. M. Sholeh Hambali.
4. Desa Masbagik Timur dengan ponpes Al-Khair pimpinan TGH. Muh. Madlul Khoir. Juga ponpes NU terdapat di desa lain di kecamatan Masbagik antara lain, Di Desa Kesik dengan ponpes Al-Abror pimpinan TGH. Abdullah Arif. Di Desa Lendang Nangka dengan ponpes Thohir Yasin pimpinan TGH. Isma'il Thohir, ponpes Halimatusa'diyah pimpinan TGH. Lalu Burhanudin. Di Desa Paok Motong dengan ponpes Fadilatul Hasanah pimpinan TGH. Fadil Thohir.
5. Dan lain sebagainya. Di wilayah ini memang termasuk wilayah yang paling hijau warna NU-nya di wilayah Lombok Timur karena betapa pun tokoh NU NTB paling fenomenal TGH. Akshid Muzhar berasal dari wilayah ini. Semoga semakin menghijau NU-nya.

### **Kecamatan Montong Gading**

1. Desa Jenggik Utara dengan ponpes As-Syafi'iyah pimpinan TGH. Subki Nurussalam. Bersama dengan tokoh NU yang lain, seperti TGH. Lalu Isma'il, TGH. Lalu Hasyim, dan lain sebagainya mengembangkan NU melalui pengajian Majelis Taklim di wilayah ini.
2. Dan lain sebagainya.

### **Kecamatan Pringgabaya**

1. Desa Bagik Papan dengan ponpes Al-Wustho pimpinan Ust. Abdu Manap. Bersama dengan TGH. Zaenuddin beliau

mengembangkan ajaran NU di wilayah ini.

2. Desa Pringgabaya dengan pengajian Majelis Taklim dalam mengembangkan ajaran NU. Di antara tokoh NU di sini ialah TGH. Ainuddin, Ust. Suhaili, dan lain-lain.
3. Dan lain sebagainya.

### **Kecamatan Pringgasela**

1. Desa Jurit dengan ponpes Manba'ul Ulum pimpinan Sayyid Usman.
2. Desa Pringgasela dengan pengajian Majelis Taklim pimpinan TGH. Jamiluddin Muhammad. Bersama dengan salah satu keluarganya TGH. Lukmanul Hakim dan yang lainnya mengembangkan ajaran NU di wilayah ini.
3. Dan lain sebagainya.

### **Kecamatan Sakra**

1. Desa Kabar dengan ponpes Baiturrahim pimpinan TGH. Ahmad Syafi'I, ponpes Darul Muhsinin pimpinan TGH. Muhsin Badri. Bersama dengan Ust. Mahirudin mengembangkan ajaran NU di wilayah ini.
2. Desa Rumbuk dengan ponpes Darussalam al-Kubro pimpinan TGH. Yahya Ibrahim. Bersama dengan TGH. Afhar Izzudin, TGH. Abdussyukur mengembangkan ajaran NU di wilayah ini.
3. Desa Sakra dengan ponpes Darul 'Abidin pimpinan TGH. Zainal Abidin 'Aly. Di samping di Desa Suangi juga ada ponpes NU Nurul Yaqin pimpinan TGH. Bustanudin.
4. Dan lain sebagainya.

### **Kecamatan Sakra Barat**

- Desa Gunung Rajak dengan ponpes Darul Abror pimpinan TGH. Lalu Anas Hasysyri. Terdapat juga ponpes Darul Furqon pimpinan TGH. Abdul Aziz Mujahid di wilayah Sakra Barat. Semuanya mengembangkan ajaran NU di wilayah ini.

### **Kecamatan Sakra Timur**

1. Desa Lepak dengan ponpes Nurul Jihad pimpinan Ust. M. Saprin. Bersama dengan keluarganya mengembangkan ajaran NU di wilayah ini.
2. Dan lain sebagainya.

### **Kecamatan Sambalia**

1. Desa Belanting dengan pengajian Majelis Taklim pimpinan Ust. Lalu Mas'ud.
2. Dan lain sebagainya.

### **Kecamatan Selong**

1. Desa Pancor dengan ponpes Jam'iyatul Islamiyah pimpinan TGH. Athar Izzudin. Beliau merupakan keturunan Ulama besar Lombok TGH. Umar Kelayu. Bersama dengan keluarga beliau tetap konsisten mengembangkan ajaran NU dari sejak alm. TGH. Ahmad Badarudin (TGH. Tretetet) di wilayah ini. Di samping itu juga di wilayah kampung Bermi kampung kelahiran organisasi Islam Lokal Nahdlatul Wathon yang didirikan oleh TGH. Zaenuddin AM. terdapat pula tokoh NU TGH. Ja'far Shodiq. Di wilayah ini terdapat sesepuh NU NTB, yaitu TGH. Izzudin Ma'arif, TGH. Muhayyan dan saat ini diteruskan oleh anak keturunan beliau, seperti Bapak Asyirul Kabir, MM (beliau sekretaris NU Cabang Lombok Timur).
2. Desa Rakam dengan ponpes Izzudin Badar pimpinan Hj. Hadijah Athar. Di samping itu terdapat TPQ NU yang mengembangkan ajaran NU. Beliau merupakan anak keturunan TGH. Izzudin Ma'arif dan TGH. Muhayyan.
3. Dan lain sebagainya. Di wilayah ini terdapat juga tokoh-tokoh NU, antara lain TGH. Nurko'im, TGH. Zaenal Hasyim, TGH. Bahaudin dll. Melalui pengajian Majelis Taklim beliau-beliau mengembangkan NU di wilayah ini.

### **Kecamatan Sembalun**

1. Desa Sembalun Bumbung dengan ponpes Baitul Izzah pimpinan TGH. Sunardi.

2. Desa Sembalun Lawang dengan al-Ma'ahidul Islam pimpinan Ust. Abdurrahman. Beliau-beliau mengembangkan NU di wilayah ini bersama dengan keluarganya dan lain sebagainya.

### **Kecamatan Sikur**

1. Desa Kotaraja dengan ponpes Nurussalam pimpinan TGH. Subki. Di samping itu, ada ponpes Darul Muttaqin pimpinan TGH. Safrudin. Bersama dengan keluarganya beliau mengembangkan ajaran NU di wilayah ini.
2. Desa Penyenggir dengan ponpes Nurul Falah pimpinan TGH. Ahmad Ibrahim.
3. Desa Sikur dengan ponpes al-Lathifiyah pimpinan TGH. Aminullah
4. Desa Tetebatu dengan pengajian Majelis Taklim pimpinan TGH. Syukron. Dan lain sebagainya.

### **Kecamatan Swela**

1. Desa Swela dengan pengajian Majelis Taklim pimpinan Ust. Suhardi.
2. Dan lain sebagainya.

### **Kecamatan Sukamulia**

1. Desa Lekong dengan pengajian Majelis Taklim pimpinan TGH. Lalu Sayin. Termasuk di desa Setanggor melalui pengajian Majelis Taklim pimpinan TGH. Abdul Manan. Beliau-beliau mengembangkan ajaran NU di wilayah ini.
2. Desa Padamara dengan ponpes Tarbiyatul Muslimin pimpinan TGH. Ra'is.
3. Desa Tibu Karang dengan pengajian Majelis Taklim pimpinan TGH. Rustam 'Ali. Beliau merupakan murid TGH. Ibrahim al-Khalidiy.
4. Dan lain sebagainya.

### **Kecamatan Suralaga**

1. Desa Anjani dengan pengajian Majelis Taklim pimpinan TGH.

Sadarudin, TGH. Bahaudin dll. Beliau merupakan alumni ponpes Jamaludin pimpinan TGH. Abdul Manan Bagik Nyake.

2. Desa Bagik Payung dengan ponpes Al-Ma'arif pimpinan Ust. Hasan. Di desa Suralaga terdapat tokoh NU, yaitu TGH. Mukhtar melalui pengajian Majelis Taklim beliau mengembangkan ajaran NU di wilayah ini dan lain sebagainya.

### **Kecamatan Terara**

1. Desa Rarang dengan ponpes Al-Istiqomah pimpinan TGH. Moh. Nasir. Selain itu juga terdapat ponpes NU yang lain, yaitu ponpes Urwatul Wutsqo pimpinan Ust. Zakaria Rahman dan lain sebagainya.
2. Desa Santong dengan ponpes As-Sholiyah pimpinan TGH. Abdul Qodir Jaelani. Di samping juga ada ponpes Darul Muhyiddin pimpinan TGH. M. Adnan. Beliau mengembangkan ajaran NU di wilayah ini.
3. Desa Terara dengan Al-Lathifiyah pimpinan Ust. Yusuf. Beliau mengembangkan ajaran NU di wilayah ini, dan lain sebagainya.

### **Kecamatan Wanasaba**

1. Desa Bebidas dengan ponpes Al-Islamiyah pimpinan TGH. Badarudin. Namun saat ini beliau diganti dan diteruskan oleh keturunannya, antara lain TGH. Rafi'I dan Ust. Syarqowi. Beliau merupakan murid TGH. Ibrahim Al-Khalidiy.
2. Desa Mamben Daye dengan ponpes Marikuttaklimat pimpinan TGH. Hazmi Hamzar. Termasuk di Desa Mamben Lauk dengan ponpes Sirojul Ulum pimpinan TGH. Akmaludin. Ada juga ponpes Sa'adatul Islamiyah pimpinan Ust. H. Sa'addudin. Ada juga ponpes Al-Mujahidin pimpinan Ust. Tajudin. Di samping itu juga ada yang melalui pengajian Majelis Taklim pimpinan TGH. Kholil dll.
3. Desa Tembeng Putik dengan ponpes ponpes Al-Mukhtariyah



pimpinan TGH. Yusi 'Adnan. Ada juga ponpes Jam'iyyatul Ahliyah pimpinan TGH. M. Abu Bakar. Beliau mengembangkan ajaran NU di wilayah ini.

4. Desa Wanasaba dengan Nahdlatul Ulama Al-Ma'arif pimpinan TGH. Suhaili. Bersama dengan TGH. Zaenuddin Tanjung, TGH. Khidir, MA dan lain-lain. Beliau-beliau semuanya mengembangkan Nahdlatul Ulama dan ajarannya di wilayah ini. termasuk juga di desa Karang Baru terdapat SMP Al-Ma'arif yang ke-NU annya tidak pernah goyah sampai sekarang. Di wilayah ini termasuk daerah yang hijaunya NU jelas.<sup>330</sup>

Pendidikan Nahdlatul Ulama disini belum begitu banyak berkembang, karena Lombok Timur adalah basis utama NW NTB. Tetapi walaupun begitu semangat ke NU-an daerah ini dapat dibanggakan. Bahkan akhir-akhir ini Nahdlatul Ulama disini sedang menunjukkan giginya secara signifikan dengan begitu giatnya kader-kader Nahdlatul Ulama terutama dari kalangan IPNU dan IPPNU. Hampir semua kecamatan sudah berdiri Pengurus MWC NU.

## **Kabupaten Lombok Utara**

### **Kecamatan Bayan**

1. Desa Bayan dengan ponpes Babul Mujahidin pimpinan Raden Kertajuana. Ada juga ponpes Nurul Bayan pimpinan TGH. Abdul Karim Abdul Ghofur. Ada juga ponpes Al-Jihad pimpinan Ust. Mujahid. Beliau merupakan murid TGH. Abdul Ghofur.
2. Dan lain sebagainya.

### **Kecamatan Gangga**

1. Desa Bentek dengan ponpes Al-Jariyah pimpinan TGH. Rusydi. Selain itu juga terdapat tokoh NU di wilayah ini, yaitu TGH. Saifuddin Zuhri kelahiran penujak yang berperan berdakwah di wilayah Islam Wetu Telu di wilayah ini.
2. Dan lain sebagainya.

---

<sup>330</sup> Di Kutip dari data Yayasan Pondok pesantren dan madrasah binaan Nahdlatul Ulama di Wilayah Lombok Timur UNU NTB, dan disesuaikan dengan data pengurus cabang Lombok Timur milik Asyirul Kabir, MM (Sekretaris Cabang NU Lombok Timur).

### **Kecamatan Kayangan**

1. Desa Santong dengan ponpes Bayyinul Ulum pimpinan TGH. Sukarman Azhar Ali, ada juga ponpes Marakittaklimat pimpinan Ust. Saparwadi, ada juga ponpes Nurul Islam pimpinan Ust. Muhammad Turmudzi. Beliau semuanya melalui ponpes-ponpes tersebut mengembangkan ajaran NU di wilayah ini.
2. Desa Selengen dengan ponpes Nurul Jihad pimpinan Ust. M. Zohni. Beliau mengembangkan ajaran NU di wilayah ini.
3. Dan lain sebagainya.

### **Kecamatan Pemenang**

1. Desa Malaka dengan ponpes Nurul Yaqin pimpinan Ust. Thoha Mahsun. Beliau mengembangkan ajaran NU di wilayah ini.
2. Desa Pemenang Barat dengan ponpes Al-Hikmah pimpinan TGH. Lalu Muchsin Efendi. Di samping juga ada ponpes As-Syafi'iyah pimpinan TGH. Jumhur Hakim. Beliau-beliau ini mengembangkan NU di wilayah ini.
3. Dan lain sebagainya

### **Kecamatan Tanjung**

1. Desa Jenggala dengan ponpes Al-Istiqomah pimpinan KH. Hidayatullah atau TGH. Ahmad Jazri. Beliau mengembangkan NU di wilayah ini.
2. Desa Medana dengan ponpes Tarbiyatul Islamiyah pimpinan TGH. Ibrahim Shaleh. Beliau mengembangkan ajaran NU di wilayah ini.
3. Desa Teniga dengan pengajian Majelis Taklim pimpinan TGH. Nasri. Melalui pengajian Majelis Taklim beliau mengembangkan ajaran NU di wilayah ini. Di samping itu juga, terdapat tokoh NU asal nganjuk pada tahun 1950-an, yaitu TGH. Abdul Ghofur Rowi. Saat ini perjuangan beliau diteruskan oleh anak keturunannya.

#### 4. Dan lain sebagainya.

Mengingat kabupaten Lombok Utara masih tergolong kabupaten yang baru tumbuhkembang setelah melalui proses pemekaran dengan Lombok Barat. Maka NU juga sedikit mengalami proses dinamisasi di wilayah ini.

Basis-basis Nahdlatul Ulama ini kalau tidak dikelola dengan baik oleh para petinggi Nahdlatul Ulama, maka bisa jadi Nahdlatul Ulama hanya organisasi fosil yang tak bermakna. Apalagi sekarang dengan munculnya paham-paham Islam baru seperti Islam Liberal, Salafi Wahabi, maupun yang paham semi Islam yang tertolak oleh umat Islam sedunia, yaitu Ahmadiyah dan lain-lain. Arus masuknya gerakan trans nasional baik dari Timur Tengah maupun dari Barat dan lain-lain dengan mudah masuk dan berkembang di Indonesia saat ini, yang justru bukan memperbaiki Islam dan Indonesia bahkan mengancam eksestensi Nahdlatul Ulama dan Indonesia di masa-masa yang akan datang. Pusat-pusat NU dengan lembaga pendidikannya berupa ponpes, masjid, mushalla yang bila tidak diurus dengan baik akan menjadi sasaran empuk bagi gerakan ini untuk menguasai Islam di Indonesia, gejala ini sudah nampak dimana-mana bahkan dengan gerakannya ini banyak anak muda yang dahulunya NU justru menjadi tokoh kelompok yang lain tersebut.[]

# BAB XIII

## PENUTUP

NAHDLATUL ULAMA sebagai organisasi sosial kemasyarakatan terbesar di Indonesia telah memainkan peranan yang penting dalam kemerdekaan dan perkembangan bangsa dan agama. Sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan, sosial, pendidikan, dan dakwah Islamiyah, NU telah memberikan banyak perubahan dan kemajuan. Semangat NU zaman dahulu hingga sekarang harus tetap tumbuh dan berkembang untuk merawat bangunan NKRI dan mengembangkan Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah*, dengan mendesiminasikan sikap *tawassuth*, *tawazzun* dan *ta'adul* sebagai visi Islam *Rahmatan Lil 'Alamin*.

Sejarah panjang dinamika mozaik perkembangan Nahdlatul Ulama di pulau Lombok yang secara embrional sudah dimulai sejak sebelum kemerdekaan, sekitar tahun 1930-an, tepatnya empat tahun setelah Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya. Secara historiografis, Nahdlatul Ulama masuk ke daerah Lombok pertama kali terjadi pada tahun 1930-an. Syekh Abdul Manan, seorang ulama keturunan arab diutus oleh Hadhratus Syekh Hasyim Asy'ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama untuk membuka wilayah Nahdlatul Ulama di Lombok. Nahdlatul Ulama mulai tumbuh di daerah Lombok tepatnya pada awal tahun 1934. Hal tersebut muncul karena adanya prakarsa tokoh-tokoh PUIL (Persatuan Umat Islam Lombok) yang dibentuk oleh Saleh Sungkar pada waktu itu yang berpusat di Mataram (Ampenan, Mataram, Cakranegara dan sekitarnya) yang antara lain para tokohnya adalah, Tuan Guru Haji Mustafa Bakri, asal Banjarmasin yang menetap di Sekarbela, Sayyid Ahmad al-Kaf, Sayyid Ahmad al-Idroes dari keturunan Arab Hadhramaut dan beberapa tokoh agama Islam setempat yang berpaham *Ahlussunnah Waljama'ah* ala

madzhab Syafi'i untuk menerima dan bergabung dalam satu wadah yang bernama Nahdlatul Ulama.

Proses terbentuk dan berkembangnya Nahdlatul Ulama tak lepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh PUIL tersebut, di samping tentunya *pertama*, berkat hubungan awal tokoh-tokoh PUIL tersebut dengan Syekh Abdul Hanan utusan KH. Hasyim Asy'ari, sehingga dapat diajak bergabung ke dalam NU. *Kedua*, atas dorongan keluarga TGH. Mustafa Bakri di Banjarmasin agar beliau dan keluarga yang lain juga bergabung ke dalam NU. *Ketiga*, setelah tokoh-tokoh PUIL tersebut mengenal Nahdlatul Ulama dari dekat melalui ziarah mereka ke pusat Nahdlatul Ulama di Surabaya.

Berdasarkan elaborasi ini, maka rekam jejak dinamika sejarah Nahdlatul Ulama di pulau Lombok dapat terlacak dan saat ini perkembangan Nahdlatul Ulama di pulau Lombok semakin berkembang dan menegaskan eksistensinya dengan berdirinya Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) di provinsi Nusa Tenggara Barat.

Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) dibawah naungan langsung Pengurus Besar (PB) NU, hingga saat ini telah meresmikan 23 UNU di Indonesia, termasuk UNU di NTB. Hal ini dikatakan Ketua PB NU pada peresmian kampus UNU NTB di Mataram, pada tanggal 6 Desember 2014. Peresmian UNU NTB yang dilaksanakan di halaman kantor PWNU NTB, ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Ketua PBNU Prof Dr. KH Said Agil Syiradj, MA, didampingi Ketua PWNU NTB, TGH Ahmad Taqiudin Mansyur dan TGH. L.M. Turmuzi Badarudin.

Di samping dinamika perkembangan Nahdlatul Ulama di pulau Lombok, perkembangan Nahdlatul Ulama secara kultural dan struktural juga berjalan di pulau Sumbawa. Di Bima, hal ini dapat dilacak dengan adanya lembaga pendidikan al-Ma'arifnya, seperti SMA al-Ma'arif, SMA al-Hidayah dan STIT Sunan Giri, beberapa pesantren seperti Ponpes Darul Ma'arif di bawah pimpinan KH. Yasin Lathif ayah dari Bapak Drs. H. M. Fachrir Rahman, MA. (Wakil Rois Syuriah NU NTB), dan tokoh-tokoh NU lainnya.

KH. Yasin Lathif adalah seorang Ulama terkenal di Bima yang banyak menulis buku-buku khas Aswaja Nahdlatul Ulama seperti masalah mengangkat tangan dalam berdoa, memakai tongkat dalam

berkhutbah, cara menyelenggarakan jenazah, termasuk talqin mayit dan lain-lain, yang mengacu kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Namun disayangkan buku-buku beliau belum dicetak dan masih dalam bentuk stensil saja. Di Bima, tradisi tahlilan, talqin mayit, memukul beduk ketika hendak sholat masih tetap berjalan di masjid-masjid baik di kota, maupun di desa-desa yang ada, kecuali beberapa tempat yang sudah terpengaruh dengan aliran yang membid'ahkannya atau yang tidak membolehkannya.

Demikian pula di Kabupaten Dompu pulau Sumbawa tradisi-tradisi Nahdlatul Ulama itu masih berjalan dengan baik walaupun masih ada upaya-upaya dari pihak yang anti terhadapnya untuk menggantikannya. di Dompu ada tokoh Nahdlatul Ulama, seperti KH. Salman Faris dengan Pondok Pesantrennya yang di asuh bersama keluarganya dan jama'ah Nahdlatul Ulama termasuk putra beliau yang sekarang menjabat Bupati Dompu H. Saifurrahman Salman dan di Dompu ada juga ponpes yang didirikan oleh warga transmigran di desa Lanci dan lain-lain.

Hal yang sama juga terjadi Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, tradisi dan kultur ala Nahdlatul Ulama masih tetap berjalan. Apalagi di kabupaten Sumbawa banyak pentolan-pentolan Nahdlatul Ulama seperti almarhum KH. Ahmad Usman, Drs. H. Hasan Usman, Zaidun Abdullah, KH. Mukhtar, MA, KH. Muhammad Zein Idris, dan lain-lain yang tidak dapat penulis rekam dalam tulisan yang sangat terbatas ini.

Akhirnya, semoga penulisan literasi sejarah perkembangan dinamika Nahdlatul Ulama ini menjadi awal untuk kajian-kajian selanjutnya. Paling akhir, penulis berharap semoga buku Mozaik NU ini dapat bermanfaat dan menjadi kontribusi bagi khazanah keilmuan, kajian ke-NU-an - ke-Aswajaan, keislaman - keindonesiaan, serta menjadi amal shalih di sisi Allah *Ta'ala. Amiin ya Rabb al-'Alamiin*. Semoga.[]



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddin, *I'tiqad Ahlussunnah Waljama'ah*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2010.
- Abdul Wahib, *Materi Dasar Nahdlatul Ulama (Ahlussunnah Waljama'ah)*, Pimpinan Wilayah Lembaga Pendidikan AL-Ma'arif NU Jawa Tengah: Semarang, 1999.
- Abdurrahman wahid, *Kiai Nyentrik membela pemerintah*, Yogyakarta: LKiS, 1997
- Abdullah, Idrus, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal di Kabupaten Lombok Barat*, Program Pasca Sarjana UI, 2000.
- Abdullah, Taufik, *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indoensia*, [Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987]
- Ali, Fachry Agama, *Islam dan Pembangunan*, (Yogyakarta: PLP2M, 1985)
- Ambary, Hasan Muarif, *Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*, [Jakarta: Logos, 2001]
- Amin, Ahmad, et all, *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat*, [Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1997]
- Ahmad Safi`i Mufid, *Kasus-Kasus Aliran/Paham Keagamaan Aktual Di Indonesia*, (Jakarta: Prasasti,2009)
- Alsaqqaf, S. Hasan. Diterjemahkan oleh Ahmad Anis. 2013. *Mini Ensiklopedi Wahabi*. Beirut: Dar al-Imam ar-Rawwas.
- Anam, Chairul, *Pertumbuhan & Perkembangan NU*. Surabaya: Bisma Satu, 1999.
- Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna* (Yogyakarta: LKiS, 1999)
- Andries, F. F., Maso'ed, M., Bagir, Z. A. (2014). *Identitas Jemaah Ahmadiyah*



*Indonesia Dalam Konteks Multikultural. HUMANIORA. Vol 26.*

Asy Syak'ah, Mustofa Muhammad. 1995. *Islam Tidak Bermadzhab*. Jakarta: Gema Press Insani.

As'ad Said Ali. 2008. *Pergolakan Dijantung Tradisi*. Yogyakarta: LP3ES

Ball, J. Van, *Pesta Alip di Bayan*, [Jakarta: Bhratara, 1976]

Baso, Ahmad, *Plesetan Lokalitas: Politik Pribumisasi Islam*, [Desantara, 2002]

Bizawie, Zainul Milal, "Dialektika Tradisi Kultural: Pijakan Historis dan Antropologis Pribumisasi Islam", dalam *Tashwirul Afkar*,

Budiwanti, Erni, *Islam Sasak: Wetu Telu Versus Waktu Lima*, Yogya: LkiS, 2000

Chalim, Asep Saifuddin, *ASWAJA di Tengah Aliran-aliran*, Mojokerto: PP.Pergunu. 2013.

Chalim, Asep Saifuddin, *Membumikan ASWAJA Pegangan Para Guru NU*. Pasuruan:"MawaN"Pandaan, 2014.

Denny, J. A., *Jatuhnya Soeharto dan Transisi Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: LkiS, 2006.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1997.

Dzuhri, M. Roffiddin, *Mengenal Malaikat Serta Tugas-Tugasnya*, UBA Press.

Fic, Victor M. 2004. *Kudeta 1 Oktober 1965 sebuah studi tentang Konspirasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Floriberta Aning, S. 100 tokoh yang mengubah Indonesia: Biografi 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah indonesia di abad 20, 2005.

Gibb H. A. R. 1995. Dalam skripsi Fandi Akhmad. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Aliran-aliran Modern dalam Islam, Alih Bahasa Mahnun Husain (Jakarta: PT raja Grafindo Persada)

Gita Permita Sari, *Perkembangan Organisasi Ahmadiyah Di Indonesia Pada Tahun 1928 -1968*, Ringkasan Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.

- Greg Fealy, Greg Barton (eds.) *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1997).
- Nasri Anggara, *Politik Tuan Guru, Sketsa Biografi TGH. Lalu Muhammad Faisal dan peranannya mengembangkan NU di Lombok*, Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran Dan Paham Sesat Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- H. Abdurrasyid Banjar, *Perkunan Melayu*, Maktabah Sa'ad bin Nasir bin Nabhan Wa-Awladuh, Surabaya, 1979.
- H. L. Sohimun Faisal. 1999. *TGH. Muh. Shaleh Hambali Bengkel dan Tasawuf Al-Ghazali. Laporan Hasil Penelitian*, STAIN Mataram
- H. Muh. Najih Maimoen, *Ahlussunnah Wal Jama'ah*, Toko Kitab Al-Anwar 1, Karangmangu, 2011.
- H. A. R. Gibb. Dalam skripsi Fandi Akhmad Aliran-aliran Modern dalam Islam, Alih Bahasa Mahnun Husain (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1995).
- Ida, Laode. 2004. *NU Muda: Kaum Progresif Dan Sekulerisme*. Jakarta: Erlangga.
- Ida, Laode. 1996. *Anatomi Konflik, NU, Elit Islam dan Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harpan.
- Iskandar, Nanang. 2005. *Fatwa MUI & Gerakan Ahmadiyah Indonesia*. Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah
- Jaiz, Hartono Ahmad. 2007. *Aliran Dan Faham Sesat Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Jawa Timur, Tim PWNU, *Aswaja An-Nahdliyah*, Surabaya: Khalista, 2007.
- John L. Esposito- John O. Voll. 2002. Tokoh kunci gerakan Islam kontemporer. PT Raja Grafindo Persada.
- Kacung Marijan. 1992. *Qua Vadis NU Setelah Kembali k Khittah 1926*. Jakarta: Erlangga.
- Kamarudin, Hidayat, *Agama Dan Feminis*, Yogyakarta: PT Hidayah. 2009.

- KH. Ahmad Shiddiq, *Khittah Nahdliyyah* (Surabaya: LTNU Jatim, 2006).
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul Fiqh*, (Mesir: Dar al-'ilm, 1998).
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam & Hukum Adat*, [Jakarta:INIS,
- Maula, Jadul, "Syariat[Kebudayaan] Islam:Lokalitas dan Universalitas", [Yogyakarta: LkiS, 2002]
- Mahasiswa PAI, Komunitas al-Katib, *Islamologi IV "Tafsir Islam Warna-warni"*, Kurnia Alam Semesta: Yogyakarta & Alam Tara Institute, 2012.
- Manaf, Abdurrahim, *Kitab As-Sa'adah Fi-Tauhidil Ilahiy*, Maktabah Sa'adiyah Putra, Jakarta, 1 Syawal 1252 H
- Martin, Ali. Skripsi Universitas Indonesia. *Gerakan politik Nahdlatul Ulama di Era Reformasi Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Nasional*. 2013
- Masduqi, Ach., *Konsep Dasar Pengertian Ahlussunnah wal Jama'ah*, Surabaya, Al-Miftah, 1996.
- Masnun (Editor supriyanto) (2007). *Tuan Guru KH Muhammad Zainuddin Abdul Majid, Gagasan dan Gerakan Pembaharuan Islam di Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Pustaka Al Miqdad.
- Muhammad Noor, Muslihan Habib, Muhammad Harfin Zuhdi, *Visi Kebangsaan Religius Tuan Guru Kyai Haji Zaenuddin Abdul Madjid*, Jakarta: Bania Publishing, 2014.
- Modul perkuliahan PGMI. Pendidikan Kewarganegaraan*. Lapis Australia.
- Mohammad, Herry. *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 21*. Jakarta: Gema Insani.
- Mufid, A. Safi'i. 2009. *Kasus-kasus aliran/faham keagamaan aktual di Indonesia*. Jakarta: CV PRASASTI
- Muh. Najih Maimoen, *Ahlussunnah Wal Jama'ah*, Toko Kitab Al-Anwar 1, Karangmangu, 2011.
- Munim DZ, Abdul, Benturan NU PKI 1948-1965, Depok: Langgar Swadaya Nusantara, 2013.

- Nanang Iskandar, *Fatwa MUI & Gerakan Ahmadiyah Indonesia*. Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2005.
- Nasri Anggara. *Melati Di Taman Tastura*. Nurani Rakyat, 2009.
- Nata, Abuddin. 2004. Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Natsir, M, *Capita Selecta*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973
- Nugroho, M. Y. Amin. Fiqh Ikhtilaf NU-Muhammadiyah.
- PBNU.(1926). *Ahkamul Fuqaha'*, *Kumpulan hasil Muktaar NU, sampai dengan 2004*
- PBNU. 1985. *NU Kembali Ke Khittah 1926*, Risalah Bandung.
- Penyusun Ponpes PP. AL-Falah, *Biografi Sang Belawong dari Timur Kiyai Haji Jazuli Usman Ploso*, PP. Al-Falah. 2008.
- Ricklefs, M. C. 1981. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: PT Serambi Ilmu.
- Rifa'I, Mohammad, *Wahid Hasyim (Biografi Singkat 1914-1953)*, Jogjakarta: Garasi. 2009.
- Sahal Mahfudh, *ahkamul Fuqaha solusi hukum Islam keputusan Muktaamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*, Surabaya: Diantama, 2006
- Saifuddin zuhri, sejarah kebangkitan Islam dan perkembangannya di Indonesia, Bandung: PT. Almaarif, 1981.
- Salam, Solichin. 1992. *Lombok Pulau Perawan*. Jakarta: Kuning Mas
- Samsuri. *Komunisme Dalam Pergumulan Wacana Ideologi Komunisme*. Millah Vol 1, No 1 Agustus 2001 tentang keputusan kongres P. P. I Masyumi ke VI
- Sayyid Hasan Al-Saqqaf. 2013. *Mini Ensiklopedi Wahabi*. Dar al-Imam ar-Rawwas. Beirut diterjemahkan oleh Ahmad Anis. Kasayafa.
- Sayyid Husein Afandi, *Husunul Hamidiyah; Ilmu Tauhid Benteng Iman*, ter. H. M. Fadlil Sa'id An-Nadwi (Surabaya: Al-Hidayah, 2006),
- Sembodo Ardi Widodo. Islam dan Demokrasi Pasca Orde Baru. *UNISIA, Vol. XXX No. 65 September 2007*
- Simon Ali Yasir, *Rumah Laba-Laba*, (Yogyakarta: Gerakan Ahmadiyah

Indonesia Cabang Yogyakarta, 2005).

Sitompul Einar Martahan. 1989. *NU dan Pancasila*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,

Siradjuddin Abbas. *I'tiqad Ahlussunnah Waljama'ah*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2010.

Syeikh Muhammad Al-Fudholi, *Kifayatul Awam; Pembahasan Ajaran Tauhid Ahlus Sunnah*, ter. H. Mujiburrahman (Mutiara Ilmu, Surabaya, 2009).

Siroj, S. Agil. (2006). *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*. Bandung: PT Mizan Pustaka.

Taqiuddin Mansur. (2008). *NU di Lombok, Sejarah Terbentuknya Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat*, Pustaka Lombok

Wahid, Abdurrahman, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Dewasa ini*, Jakarta: Prisma, 1984.

Wahid, Marzuki, Abd. Moqsih Ghazali, Suwendi, *Geger di "Republik NU" Perebutan Wacana, Tafsir, Sejarah, Tafsiran Makna*, Jakarta, Kompas, 1999.

Wardi, Taufiq, Sufardi Nurzaim & Rokib Ismail. *DIKALA TRANSISI TERSANDUNG Narasi Khidmat Nahdlatul Ulama 1999-2004*.

Wayan Badrika. 2004. *Sejarah Nasional Indonesia Dan Umum*. Jakarta: Erlangga.

Wijaya Kusumah, Ida Bagus Putuh, *NU Lombok (1953-1984)*, Lombok: Pustaka Lombok, 2010.

Yasir, S. Ali. 2005. *Rumah Laba-Laba*. Yogyakarta: Gerakan Ahmadiyah Indonesia Cabang Yogyakarta,

Yayasan Darut Taqwa, *Piagam Madinah*, Pasuruan: Yudharta Advertaisingdesign, 2008. Zamakhsyari Dhofier, *Kultur Pesantren dalam perspektif Masyarakat Modern*, Makalah disampaikan pada pertemuan cendikiawan Muslim di Jakarta tanggal 26-28 Desember 1984.

Zakaria, Fath, *Geger gerakan 30 September 1965 Rakyat NTB Melawan Bahaya Merah*, Mataram: Sumurmas Mataram, 2001.

Zuhri, Saifuddin. 1979. *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di*

Indonesia, Bandung: Al Ma'arif.

Zuhdi, Muhammad Harfin, *Parokialitas Adat Terhadap Pola Keberagamaan Komunitas Islam Wetu Telu di Bayan Lombok* (Jakarta: Lemlit UIN Jakarta, 2009).

-----, *Praktik Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak*, (Mataram: Leppim, 2012).

Artikel, Majalah, dan Laman Internet

Al-Qur'an Digital version 2.0.: Muharram 1425 / Maret 2004.

AULA NU, Majalah Terbit Bulanan

Gonda Yumitro. 2013. Partai Islam Dalam Dinamika Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*. Vol 17. 1. 37

Harian Rakyat, 24 Mei 1965

Lembaga Pemilu, *Hasil Pemilu DPR Pusat Tahun 1971*, (Bandung: Offset, 1971)

Lembaga Pemilu, *Hasil Pemilu DPRD NTB Tahun 1971*, (Bandung: Offset, 1971)

Lihat hasil keputusan Muktamar 33 di Jombang 2015

*Majalah Suara Umat. Pasar Dugusur Rakyat Tersungkur*, Vol 1 No. 2 / Desember 2007.

Nina Mariani Noor, Siti Syamsiyatun, JB. Banawiratma, *Ahmadiyah, conflicts, and violence in contemporary Indonesia*, IJIMS, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, Volume 3, Number 1, June 2013:

Tashwirul Afkar, *Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan*, LAKPESDAM NU: Jakarta

Data Ponpes dan Madrasah Binaan Nahdlatul Ulama di Nusa Tenggara Barat 2015, diperoleh dari Data Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat.

<http://www.microcyber.net/2012/03/pemikiran-pendidikan-Islam-tuan-guru.html#sthash.dBeMlOsn.dpuf>

<http://www.sasak.org/tag/TGH.-saleh-hambali-bengkel>

<http://www.nu.or.id/post/read/64403/panas-dingin-komisi-khitthah>

www.n.our.id

Dan lain sebagainya

### **Daftar Informan**

#### Mataram

TGH. Abdurrahman Mustafa  
Bakri  
TGH. Muhammad Anwar  
Prof. Drs. Saiful Muslim, MM  
H. Bil'id MSA  
TGH. Mustiadi Abhar  
Drs. Jamiluddin, MM  
TGH. Fathurrahman Z.  
Prof. Dra. Hj. Sribanun Muslim  
Dan lain-lain

#### Lombok Timur

TGH. Asy'ari Masbagik  
TGH. Ishak Abdul Ghani  
Ust. H. Tajudin  
TGH. Khudri Abdullah  
Ust. Asyirul Kabir, MM  
TGH. Athar Izzudin  
TGH. Fathul Qodir Zen  
Ust. Amri  
Dan lain-lain

#### Lombok Tengah

TGH. Lalu Muhammad Faisal  
TGH. Lalu Turmudzi Badarudin  
TGH. Lalu Khairi Adnan  
TGH. Lalu Ahmad Munir  
TGH. Ahmad Taqi'uddin  
Manshur  
TGH. Syamsul Hadi  
TGH. Muhammad Zaki  
Ust. H. Syarifuddin, BA  
Dan lain-lain

#### Lombok Barat

TGH. Hasan Mustafa  
TGH. Mukhlis Ibrahim  
TGH. Muhammad Hanan  
TGH. Hanafi  
TGH. Ulul Azmi  
Ust. Rusnam  
TGH. Anwar MZ  
Ust. H. Zaini  
Dan lain-lain

# Indeks

## A

- Abu Hasan Al-Asy'ari 61, 69  
Abu Manshur Al-Maturidiy 61, 69  
'adah 34, 37, 52  
Adaptasi 49  
Aghniya' vii  
ahlusunah waljamaah iii  
Ahmadiyah 71, 269, 270, 271, 272, 273,  
274, 276, 277, 278, 279, 283, 284,  
285, 286, 287, 288  
AHMADIYAH 77, 267  
ajikrama 23  
Akomodasi 49  
Akulturasi 11, 49  
Amaq 17, 19, 134  
Amar Ma'ruf 79  
Aswaja 81, 91, 113, 116, 118, 128, 142,  
144, 201, 213, 214, 215, 216, 229,  
230, 235, 262, 263, 267, 277, 281,  
285  
awig-awig 25

## B

- Babad Lombok 3  
Babad Selaparang 3  
BAHAIYAH 77  
bahasa Kawi 3  
baiq 22, 23  
barzah 47  
Bayani 48  
beteteh 25, 26, 27  
bid'ah 56, 76, 88, 114, 275, 276  
Burhani 48

## D

- disembek 27

## E

- eklektisme 274

## F

- Fatayat 85, 103, 135, 179, 180, 195, 196,  
199, 203, 204, 208, 234  
fi'liyah 60  
firqoh 71, 72  
Fuqoro Walmasakin vii

## G

- Gajah Mada 4, 6, 7  
Geertz 31, 43, 46, 47, 248  
genjer-genjer 143  
GP Ansor 85, 145, 146, 147, 150, 153,  
155, 157, 195, 256, 257  
Gumi Paer 35  
Gusdur 183, 184, 214, 215, 216, 217, 218,  
219, 220, 221, 222, 223, 237, 238,  
249, 253, 254, 255, 256, 259, 309

## H

- Hizbut Tahrir 81

## I

- IBNU TAIMIYAH 75  
Ijma' 60, 70, 267  
Irfani 48  
Islahiyyah 78  
Islam esensialis 44  
Islam pribumi v, 54, 56  
Islam universalis 44  
I'tidaliyyah 77  
I'tiqad 61, 71, 283, 287



## J

JABARIAH 75  
jajar karang 22, 23  
jam'iyah 93, 99, 187, 197

## K

kafir 56, 73, 74, 76, 143  
Kampu 23  
Kampung Arab Ampenan 2  
Khawarij 71  
KH. Hasyim Asy'ari 92, 94, 101, 110,  
111, 243  
KH. Hasyim Muzadi 247, 255, 256, 257,  
259, 264  
Khilafah 81  
Khittah 161, 162, 176, 177, 180, 181, 182,  
183, 184, 187, 188, 189, 191, 194,  
195, 196, 197, 200, 209, 210, 221,  
251, 252, 254, 259, 285, 286  
KH. Salahuddin Wahid 259  
Kombes 223, 227, 309  
Komite Hijaz 92, 93  
Komunisme 127, 128, 129, 287  
kurenan 15

## L

Lahore 270, 271, 272  
Lajnah 83, 84, 183, 198  
Lombok ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, 1, 2, 3,  
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,  
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,  
26, 33, 35, 40, 45, 50, 51, 53, 87,  
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,  
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,  
105, 109, 110, 111, 113, 114, 115,  
116, 117, 118, 119, 120, 122, 123,  
124, 125, 132, 134, 135, 139, 140,  
141, 142, 143, 144, 145, 147, 148,  
152, 154, 156, 161, 162, 163, 164,  
165, 166, 168, 169, 170, 179, 186,  
191, 192, 194, 197, 198, 200, 201,  
202, 203, 206, 223, 224, 225, 226,  
233, 234, 239, 240, 251, 256, 257,  
259, 260, 261, 262, 263, 264, 276,

277, 278, 279, 281, 282, 284, 287,  
288, 289, 290, 295, 297, 298, 299,  
300, 305, 306, 307, 309, 310

Lombok Mirah 3, 4

## M

Manhajiy 60  
Manhajiyah 78  
Masyumi 95, 96, 97, 108, 109, 111, 112,  
113, 115, 116, 117, 118, 122, 125,  
128, 131, 132, 133, 134, 136, 137,  
142, 175, 244, 287  
Mataram ii  
merariq 25  
Mpu Prapanca 3  
mubtadi' 56  
Muhammadiyah v, 49, 88, 89, 92, 109,  
112, 113, 146, 147, 159, 174, 175,  
178, 199, 201, 231, 242, 246, 247,  
249, 250, 259, 263, 264, 274, 286  
MUI 271, 272, 273, 285, 286  
Muktamar 84, 86, 93, 95, 97, 111, 130,  
162, 166, 173, 178, 180, 183, 188,  
191, 192, 194, 196, 221, 222, 226,  
248, 252, 253, 254, 287, 288, 306,  
307, 308

MURJIAH 73

murtaddah 25

MUSYABBIHAH 75

musyrik 56, 76

MU'TAZILAH 73

## N

Nabi iii, v, 32, 37, 38, 39, 44, 59, 60, 61,  
66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77,  
82, 90, 91, 100, 108, 114, 118, 143,  
144, 173, 218, 268, 269, 270, 271,  
272

Nahdlatul Ulama ii, iii, iv, v, vi, vii, viii,  
ix, x, 1, 59, 60, 61, 70, 71, 77, 78,  
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,  
88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97,  
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,  
105, 107, 108, 109, 111, 112, 113,  
114, 115, 116, 117, 118, 119, 122,

123, 124, 125, 127, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 267, 268, 274, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 309, 310

Nahdlatul Wathan v, 92, 101, 103

Nahi Mungkar 79

NAJARIAH 75

Nasakom 133, 174

Negarakertagama 3

NU ii, iii, iv, vi, vii, ix, 59, 60, 61, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 103, 104, 107, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 133, 135, 142, 144, 145, 147, 150, 152, 155, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 212, 213, 218, 223, 224, 234, 235, 246, 251, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 279, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 305, 306, 309, 310

NU Lombok vi, 94, 97, 101, 162, 165, 191, 197, 200, 263, 264, 288, 305

nyerompang 24, 25, 26

## P

papu' balo' 15

PBNU 143, 147, 151, 152, 154, 159, 164, 165, 167, 168, 169, 183, 184, 188, 189, 198, 206, 215, 218, 221, 222, 223, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 255, 256, 257, 259, 261, 262, 264, 286, 309

perangga 18

Perempuan Sasak 23

perlalu 22, 23

permenak 22

Persis v

perwangsa raden 22

Peta Dakwah ii

PKI 92, 111, 112, 113, 118, 123, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 162, 172, 173, 174, 264, 286

PMII 86, 135, 145, 147, 148, 156, 157, 162, 163, 179, 180, 193, 199, 203, 204, 208, 213, 234

PNI 116, 131, 132, 133, 140, 142, 159, 171, 174

PPP 124, 125, 173, 174, 176, 179, 180, 182, 184, 187, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 203, 206, 207, 209, 210, 211, 220, 244, 248, 251, 252, 258

Provinsi Sunda Kecil 8, 9

Pulau Seribu Masjid 1

Pun 17, 18

## Q

Qadar 69

QADARIYAH 75

Qadian 270, 271, 273

Qadla 69

Qaul Jadid 56

Qiyas 60, 70, 267

qouliyah 60

## R

Rasul 66, 67

receiverd Islam 45

Ritual 38, 47

Rois Syuriah 95, 104, 140, 145, 168, 176,  
185, 207, 211, 222, 230, 233, 251,  
259, 263, 264, 278, 281, 296, 297,  
298, 309

## S

Salafi-Wahabi v, 275, 279

salafussholeh 268

Sasak 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16,  
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,  
26, 27, 29, 35, 40, 51, 53, 89, 139,  
217, 283

Sasak Adi 3, 4

sawa' 57

sekufu' 24, 25

Selaparang 3, 4, 5, 6, 7, 11, 193

Selapawis 4

semeton jari 15

Semitik 28

sifat jaiz 61, 64, 67

sifat mustahil 61, 62, 67

sifat wajib 61, 62, 75

sorohan 15

Sumbawa 2, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 91, 96, 98,  
99, 117, 121, 122, 123, 134, 135,  
136, 141, 165, 170, 194, 257, 281,  
282, 297

Sunan Giri 87, 202, 281

Sunan Prapen 87

syari'at 24, 80, 82, 100, 134, 190, 275

Syiah 71, 217

## T

taqririyah 60

Tasammuhiyyah 78

Tathawwuriyah 78

Tawassuthiyyah 77

Tawazzuniyah 78

Tekakaq 18

Teradiq 18

TGH. Lalu Muhammad Faisal viii, 91,  
103, 104, 105, 115, 116, 118, 146,  
155, 170, 176, 185, 194, 197, 207,  
211, 222, 223, 230, 284, 289

TGH. Lalu Turmudzi Badaruddin 100,  
223, 259

TGH. M. Shaleh Hambali 97, 98, 99,  
100, 101, 141, 143, 152, 162, 163,  
168, 172, 205, 211

TGH Taquiddin Mansyur iii

Thariqat 71, 76, 90, 223

Torah 29

triwangsa lalu 22

Tuan Guru viii, 12, 17, 53, 88, 90, 91, 93,  
96, 98, 102, 104, 110, 114, 115,  
116, 117, 118, 135, 149, 155, 162,  
170, 197, 200, 213, 223, 234, 256,  
264, 285, 286

## U

Ubi societatis ibis lus 27

UIN iii, ix, 13, 241, 284

Ulama' vii

## W

Waktu Lima 2, 11, 13

Wali Songo iii

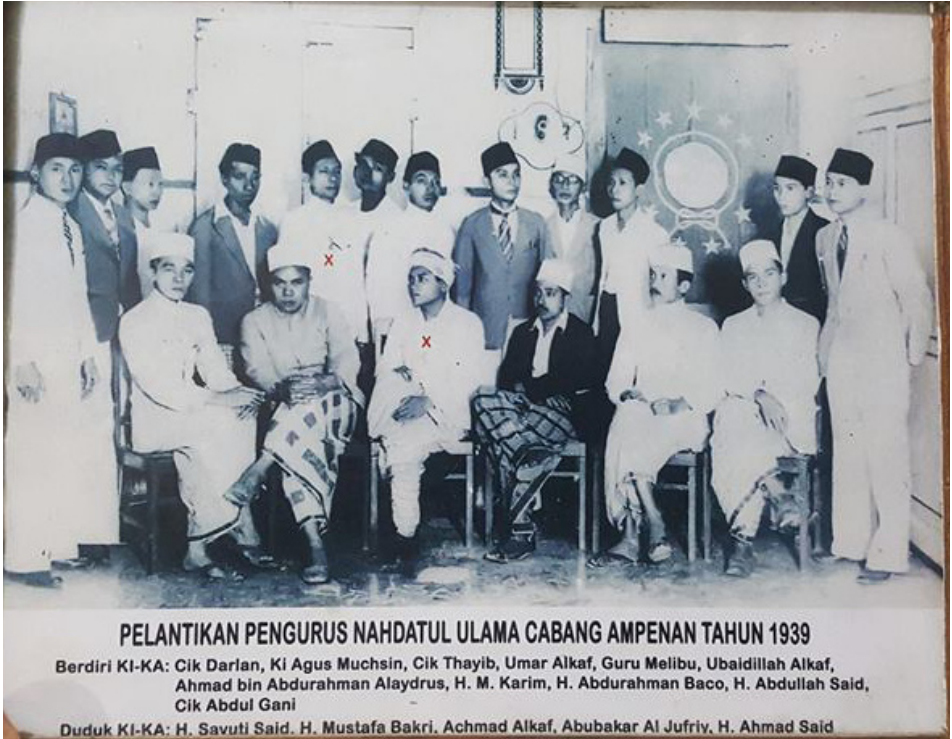
## Z

Zu'ama' vii

# DOKUMENTASI

## A. Dokumentasi Tokoh Nahdlatul Ulama Lombok

### 1. Beberapa Sesepeuh Nahdlatul Ulama



TGH. Mustafa Bakri  
Sekarbela



TGH. M. Sholeh  
Hambali Bengkel



TGH. Muhammad Rais  
Sekarbela



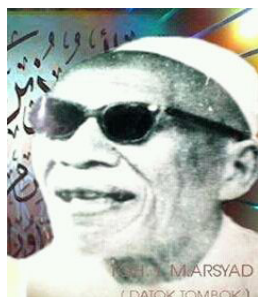
TGH. Abhar M.  
Pagutan



TGH. Ibrahim al-  
Khalidiy Kediri



TGH. Sakaki Umar  
Abdul Aziz Kapek



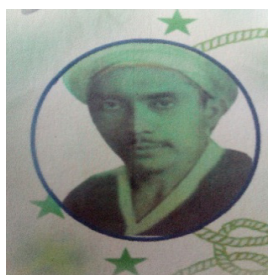
TGH. M. Arsyad M.  
Tombok Praya



Ust. Lalu Bukran  
Perbawa Praya



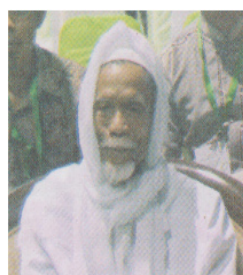
TGH. Akhsid Muzhar  
Masbagik



TGH. Mustajab



TGKH. Lalu Turmudzi  
Badarudin Bagu



TGH. L. Khairi Adnan  
Praya



TGH. Mustiadi Abhar  
Pagutan



TGH. Taqi'uddin  
Mansyur Bonder



TGH. L. A. Munir  
Tanak Awu





Ust. H. M. Syahdi Amin  
Batujai



TGH. Mukhlis Ibrahim  
Kediri



TGH. L. Nasir Misbah  
Kute



TGH. Ma'arif Makmun  
Darek



Prof. H. Saeful Muslim  
Mataram



Prof. Hj. Sribanun Muslim  
Mataram



TGH. Daud Muhsin  
Batujai



TGH. Khudri Abdullah.  
Masbagik



TGH. Lalu Muh. Faisal  
Praya



TGH. M. Syahdi Amin  
Batujai




TGH. Lalu Muhammad  
Nasir Kute



TGH. Munajib Khalid  
Sesele Gunungsari

## B. Beberapa Dokumentasi Surat Keputusan

### 1. Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Tentang Susunan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama NTB 1991-1995

**PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA**  
Jalan Kramat Raya No. 164, Jakarta 10430. Telp. (021) 323033 P.O. BOX 56 MT.

SURAT KEPUTUSAN P.B. NAHDLATUL 'ULAMA'  
No.: 109/A.II.04.d/IV/1991

Nomor  
Sifat  
Lampiran  
Perihal

TENTANG :  
PENGESAHAN PENGURUS WILAYAH NU NUSA TENGGARA BARAT (NTB)  
MASA KHIDMAT : 1991-1995.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGURUS BESAR NAHDLATUL 'ULAMA',

MEMPERHATIKAN : Surat Pengurus Wilayah NU Propinsi NTB Nomor : 123/PW.NU/23/III/91, tgl. 28 Sya'ban 1411 H/ 15 Maret 1991 M tentang laporan hasil Konferensi Wilayah NTB yang diselenggarakan pada tgl. 16-18 Febr. '91.

MENIMBANG : 1. Bahwa kepengurusan NU Wilayah Nusa Tenggara Barat yang lama telah berakhir masa khidmatnya ;  
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat sebagai PWNU NTB.

MENGINGAT : 1. Keputusan-keputusan Muktamar NU ke-28 tahun 1989 ;  
2. AD NU Bab IX Psl. 21 ayat (2) Psl.22 dan Psl. 23 ;  
3. ART NU Bab II Psl. 11 ayat (1) s/d (4), Bab IV Psl. 23 ayat (1) s/d (6), Psl. 40 ayat (1) s/d (7).

Dengan senantiasa memohon taufiq dan hidayat serta keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala,

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Pengurus Wilayah NU Nusa Tenggara Barat yang lama dengan ucapan terima kasih.

KEDUA : Mengesahkan susunan PW NU NTB masa khidmat : 1991-1995, sebagaimana terlampir.

KETIGA : Mengamanatkan kepada PW NU Nusa Tenggara Barat tersebut di atas untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan NU di Wilayahnya dengan sebaik-baiknya, dengan keharusan untuk senantiasa berpedoman kepada AD/ART NU serta petunjuk-petunjuk dari PENU.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 19 Februari 1991 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di: JAKARTA  
Pada tanggal : 19 Ramadhan 1411 H.  
5 April 1991 M.

P.B. NAHDLATUL 'ULAMA' PENGURUS BESAR  
KEP. UMUM  
SEJZEN,  
H. ABDURRAHMAN WARTU, H. RAHAFAR RAHMAN, SH.


WKL. BOZIS KAM, KATIB,  
K.H. ALI YAPIS, K.H. MA'RUF AMIN.

Tembusan : 1. PC NU se Wilayah NTB  
2. Arsip.

MENGETAHUI DEKAN  
D. D. SAMANUSULIN

## 2. Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang Susunan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara

**Barat Masa Khidmat 1996-2001**



**PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA**  
Jalan Kramat Raya No. 164, Jakarta 10430 Telp. (021) 323033 - 3908424 Fax. 3908425

**SURAT KEPUTUSAN P.B. NAHDLATUL ULAMA**  
No: 105 /A.II.04.d/V/1996  
TENTANG:  
PENGESAHAN PWNU PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
MASA KHIDMAT : 1996-2001

**PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA,**  
MEMBACA : Surat Pengurus Wilayah NU Propinsi Nusa Tenggara Barat tgl.26 April 1996 Nomor : 194/PWNU/23/IV/1996 tentang laporan hasil konperensi Wilayah NU yang diselenggarakan pada tgl. 16-17 April 1996.

**MENIMBANG** : Bahwa nama-nama yang tercantum dalam SK PBNU ini telah menyatakan kesediannya dan menuhi syarat sebagai PWNu Propinsi Nusa Tenggara Barat.

**MENGINGAT** : 1. Keputusan Muktamar NU ke-29 tahun 1994 di Cipasung;  
2. AD NU Bab V Ps1. 6, Ps1. 7 ayat (a) s/d (e), Bab VIII Ps1. 12 ayat (1) s/d (5), Ps1. 13 ayat (1) dan Ps1. 14 ayat (2);  
3. ART NU Bab IV Ps1. 8 ayat (b), Ps1. 10 ayat (1) s/d (4), Bab VII Ps1. 22 ayat (1) s/d (3) dan Ps1. 23 ayat (1) dan (2).

Dengan senantiasa memohon taufiq dan hidayat serta keridlaan Allah Subhanahu wa Ta'ala,

**M E M U T U S K A N :**

**MEMETAPKAN** :  
**PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat PWNu Propinsi Nusa Tenggara Barat masa khidmat : 1991-1995 dengan ucapan terima kasih.

**KEDUA** : Mengesahkan PWNu Nusa Tenggara Barat masa khidmat : 1996-2001 sebagaimana terlampir.

**KETIGA** : Mengamanatkan kepada PWNu tersebut di atas untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan NU di wilayahnya dengan sebaik-baiknya, dengan keharusan untuk senantiasa berpedoman kepada AD/ART NU serta petunjuk-petunjuk PBNU.

**KEEMPAT** : SK PBNU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapananya.

Ditetapkan di: JAKARTA  
Pada tanggal : 19 Dzulhijjah 1416 H  
7 1996 M

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

RAIS AAM, KATIB AAM, KETUA LAMBAHAN, SEKJEN,

KH. MUH. ILYAS RUHIAT. Drs. KH. DAWAM ANWAR. H. ABDURRAHMAN, H. AHMAD BAGDJA.

Tembusan : 1. PCNU se Wilayah Nusa Tenggara Barat.



### 3. Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang Susunan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama 2012-2017



## PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430 Telp. (021) 31923033, 3908424 Fax (021) 3908425  
E-mail : setjen@nu.or.id - website : http/www.nu.or.id

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Nomor: 202/A.II.04/08/2012

Tentang:

PENGESAHAN PWNUNUSA TENGGARA BARAT

Masa Khidmat : 2012 - 2017

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Menimbang

: Surat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat tanggal 26 Juli 2012, No.03/Tim Fomatur PWNUNTB/VII/2012, tentang hasil Konferensi PWNUN Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan tanggal 9 Juli 2012.

Memperhatikan

: Bahwa personalia pengurus wilayah hasil rapat formatur telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat dan telah memenuhi kelentuan organisasi.

Mengingat

: 1. Keputusan Mukhtamar ke-32 Nahdlatul Ulama Tahun 2010 di Makassar;  
2. Pasal 12, Pasal 15 ayat (2); Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama;  
3. Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 26 ayat (1) dan (2), Pasal 27, Pasal 42 ayat (1) dan (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 76 ayat (1),(2),(3),(4),(5) dan (6); Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya :

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

: Mencabut kembali SK PBNU No.296/A.II.04/4/2008 tentang PWNUNusa Tenggara Barat dan membubarkan pengurusnya dengan ucapan terima kasih.

Kedua

: Mengesahkan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat Masa Khidmat 2012 - 2017 dengan susunan pengurus terlampir.

Ketiga

: Mengamanatkan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama tersebut di atas, untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan Nahdlatul Ulama di daerahnya, dengan keharusan untuk berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, peraturan-peraturan organisasi yang berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama serta petunjuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Keempat

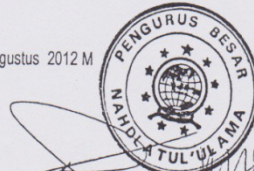
: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dalam penetapannya terdapat perubahan atau kekeliruan, Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Syawal 1433 H / 31 Agustus 2012 M

DR.KH.M.A.Sahal Mahfudh  
Rais Aam

Dr.H.A. Malik Madaniy, MA  
Katib Aam



Dr.KH.Safd Aqil Siroj, MA  
Ketua Umum

H. Marsudi Syuhud  
Sekretaris Jenderal

Tindasan : PCNU se-Nusa Tenggara Barat

## C. Dokumentasi Aktifitas NU Lombok Cabang Ampenan

1. Beberapa Dokumentasi Penyelenggaraan Konferensi NU Cabang Ampenan Lombok



**Peserta Konferensi NU Cabang Ampenan**  
Nomor 1 dari kiri ke kanan (berdiri) berturut-turut yaitu: 1. AM. Dahlan, Ampenan; 2. Ki Agus Muchsin, Palembang; 3. M. Thoyib, Ampenan; 4. Sayid Muhyiddin Alkaf, Ampenan; 5. Guru Zainuddin, Ampenan; 6. Sayid Husain Alkaf, Ampenan; 7. Sayid Ubaidillah Alkaf, Ampenan; 8. Sayid Ahmad Al-Aydrues, Ampenan; 9. Sayid Abu Bakar Al-Jufri; 10. H. Abdurrahman Baco, Cina Muslim asal Bugis; 11. H. Ubaidillah Said (Adik TGH Mustafa Bakri), Ampenan; 12. Abdul Gani (Mertua H. M. Hamzah Kartim).  
Duduk di deretan depan berturut-turut dari kiri ke kanan yaitu: 1. H. Sayuti Said (Kakak Kandung TGH Mustafa Bakri); 2. TGH. Mustafa Bakri; 3. KH. M. Dahlan (Konsul HBNO); 4. Sayid Ahmad Alkaf; 5. Sayid Abu Bakar Al-Jufri; 6. H. Ahmad Said (Saudara Tertua TGH. Mustafa Bakri)

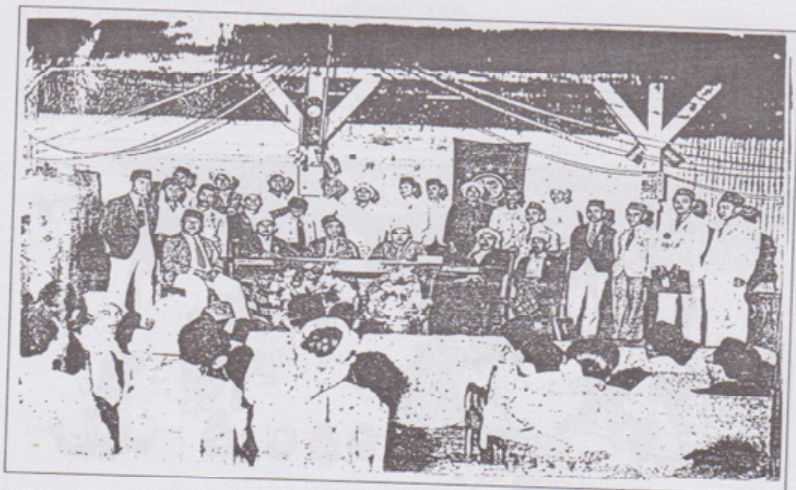
### Peserta Konferensi NU Cabang Ampenan 1934 Pengurus Pertama Nahdlatul Ulama Lombok Sunda Kecil



**Peserta Konferensi NU Cabang Ampenan sedang bersantai di halaman gedung bioskop Ampenan**  
1. Sarijan (tukang kebun Taman Narmada); 2. H. Vihar, Bagu; 3. H. Muhyiddin Alkaf; 4. M. Arsyad; 5. ....; 6. Sayid Ahmad Alkaf; 7. Guru Zainuddin; 8. Ki Agus Muchsin; 9. Abdul Gani; 10. TGH. Mustafa Bakri (tampak berdiri); 11. KH. M. Dahlan; 12. H. Ahmad Said (duduk di belakang); 13. H. Sayuti Said; 14. Sayid Husein Alkaf; 15. Sayid Abu Bakar Al-Jufri; 16. Sayid Ahmad Al-Aydrues.

### Peserta Konferensi NU Cabang Ampenan 1934 sedang bersantai di halaman gedung Bioskop Ampenan Sunda Kecil





Suasana Saat Peserta Selesai Melakukan Sidang Pleno Konferensi NU Cabang Ampenan Berdiri dari kiri ke kanan berturut-turut, yaitu: 1. Abdul Gani; 2. Sayid Syaikh Al-Aydrus; 3. H. Abdullah; 4. ....; 5. ....; 6. H. Ahmad; 7. H. Said, Bima; 8. ....; 9. ....; 10. K.H. M. Dahlan; 11. Sayid Idrus Mulaheha; 12. Sayid Umar Al-Aydrus; 13. K.H. W. Ake', Sumbawa; 14. ....; 15. ....; 16. H. Sayuti Said; 17. .... (utusan Dompui); 18. .... (utusan Dompui); 19. ....; 20. M. Thorib. Duduk di deretan depan dari kiri ke kanan berturut-turut, yaitu: 1. Nang Tji, Palembang; 2. H. M. Rojak; 3. Sayid Ahmad Al-Aydrus; 4. TGH. Mustafa Bakri; 5. K.H. Ghofir (Jakarta, urusan HBNO); 6. Sayid Ahmad Al-Raf.

## Suasana Peserta Konferensi saat selesai melakukan sidang Pleno Konferensi NU Cabang Ampenan 1934 Sunda Kecil

|               |  |                  |  |
|---------------|--|------------------|--|
| perwakilan.   | Kj. R.A.A. Fakhri, Abdul-Fattach, (s.r). C. Djawawantira (s). Alandi (A.N.O.).   | 57. PuerAwordjo. | Ki. H. Moekei, Damsri (s.r). Patchoen (s). Moch-Dingri (A.N.O.).   |
| ngar-Alam.    | Moechamad-Nesri (s).   | 58. Balikpapan.  | S.M. Afandi, (s.r).  |
| isah. Poeloe. | Kj. Samsoddeen, (s).   | 59. Barabai.     | Goeroe D.M. Coesyo, (s.r) H. Saetyan-Kawri (s).  |
| ndang.        | Nawawi, (s).   | 60. Karangasjar. | Ki. Imam, H. Moeelim, Abdul-Chasan (s.r). Moechri (s).   |
| gandjok.      | Kj. M. Moeradiat, Ali-Shiddien, H.M. Falech, H. Abdul-Qohhar, (s). Ki. H.M. Dachlan, Abdul-Qohhar H.M. Achman, (s). Chamud-Djajani (A.N.O.). Moch. Aly, (s). (s). (s).   | 61. Ampenan.     | Sj. Achsa, Al-Aydrus H. Moechhofa-Bakri (s). H. Soesohi (s).   |
| aten.         | Kj. Malaran, Moch. Chamdani (s.r). Tjokro-soedarmo (s).  | 62. Indramajour. | Ki. H. Sa'di, H. Anas, H. Manshor, (s). H. Moch. Zayn, R. Djoser, (s).   |
| stembang.     | Sj. Achmad Moechamad-Alkaf (s.r). Sj. Abdullah-Alkaf Gathawy (s).  | 63. Madjoein.    | Ki. M. Andali-Malik, (s.r) M. Oemar, (s). R. Komarudin (s). (s).   |
| spasa.        | Kj. Ach. Fauzan, H. Moch. Haroro, H.M. Djanjahi, H.M. Cholil, Moech-Moecham, Moech-Abdullah, (s.r). Kj. Abdur-Rasid (s) Moech-Machien (s). (s).  | 64. Malang.      | Ki. H. Jasin, H. Imam H. Chous, (s.r). H.M. Moesono, M.A. Daldari (s). Abjol-Gaosi (A.N.O.). Ach. Abdullak (s). (s).   |
| ir. Itra.     | Kj. Moech-Charif, (s). Mansoor (s).  | 65. Koodora.     | R.H. Aswan, Ki. H. Ach. Kamal, S. Jaldi, H. Abd. Suroso, H. Rif-san, H. Sabi, H. Achdas, Tuerechah, H. Radi, R. Soedjono, H. Abdull-Haxim, H. Nurachmid, H. S.A. Koesum, Moechidi, (s). A. Koesmasi (s). A.M. Ashadi (A.N.D.). A. Saadi, H. Nurachmid Tamis-Chordiri (s). (s). |
| Yonosobo.     | Kj. H. Moedjoesro, Moch. Tamliko H. Chas-tobellah, Abdul-Chamid, H. Djanjahi H. Chazali-Roestam, H. Abdullah-Siradi, Djoeirdani, H. Chakabali, H. Abdul-Rachmon, Djamil, H. Dathas, Abdullah-Satari, Achmad, Ronoroedjo, Anwar, Oeda', H. Syamsari, Abdul-Jasro, Bedri, Djoebrok, Deman Hoeri, Aswoeri, Anwar, Isammar, Abos-Bakar, Aswoeri, An-Talchiz, Abdul-Chamid, Abdul-Ghoni, Moe'soro, Ista-mar, (s). (s). T. Adasopetra, Soepadon (s) Abos-Talchiz (A.N.O.) Moch-Salis (s). (s). |                  |  |

Bagian dari hasil Muktamar NU ke-14 di Magelang

Nama-nama peserta Muktamar ke-14 di Magelang di mana terdapat nama peserta dari Ampenan Lombok, Sayyid Ahmad Al-Idrus, TGH. Mustafa Bakri, dan TGH. Sayuti





Ite menjetak boeke-boeke baroe, karangan baroe, tjara baroe, maka dilajang dijajalah meloetakan karangan-baroe.

Oetoesan Tjoeloe Agoeng (Pngoesnel) menjajak bahwa dalam boeke Oesol ioe ada salah zet. Maksoednja T. Agoeng ioe ipeana soepaja kitab-kitab jg. telah dipotoeksan oleh Conf. Darah Comulat Madang ioe dipotokan oleh H.B.N.O. djadi tjerloer pada peroesagan jg. beaso. jpeotepah katu H.B.N.O. soepaja agent dari Uilgeversia sadja. Lebih djoeh spr. meujakan ta perjala akan noot H.B.N.O. bahwa sekarang ini belem masanja menjajakan terlepan Malaris H.O., sebab mesoroet anggapan spr. sekarang ini sudah mesorok terlepan ioe dipersamakan. Pimpinan lale menjajaka H.B.N.O. menjajaka pemandanganja. lale H.B.N.O. mendjawa pegeratan Oetoesan T. Agoeng ioe dg. menerangkan bahwa anggapan T. Agoeng, noot H.B.N.O. dalam boeke Oesol ioe, iuk dipotokan atas doega-dogaan sadja, tapi boeki telah mesoroetjekan keberanjanja. Sesoegehoenja sadja H.B.N.O. sekarang mesegang pimpinan, telah dipikirkannya oetoesan Malaris ioe Tetapi sebagai diketahui belaka, bahwa sadja Tjajang-tjajang ditanja teutang djendral Madrasah Madrasah sadja ta meolebikan dijabakan. Spr. memperingat, djogahab kita meuberi djandi-djandi pada Gemmat, bila kita ta dapat meolepaja.

Pimpinan lale mengdjajarkan agar sesoroet jg. akan dikerjake ioe, katu tidak meoroti, soek kerjake pada pimpinan.

Oetoesan Pamekasan berpeudapa soepaja Madaris kita ioe dapat semoerana, maka H.B.N.O. soepaja mesoroetkan paratoeran dg. kekerasan. Pimpinan menjajaka dijabakan, bahwa katu dilakokan kekerasan, keme kita ta'boleh mesoroetkan akibar'ja.

2. Oetoesan Palembang menerangkan soepaja Oesol ioe ditolak, karena kekerasan kita dalam peroesagan.

3. Oetoesan Tjiljap mengajik bahwa kekerasan H.B.N.O. Alg. Zaken sadja keme ioe beotaja, maka hal ioe baiklah ditirakan kepa H.B.N.O. kedu.

4. Oetoesan Pererakarta. Menjajaka bahwa madaris kita ioe mekam selibedijalstereen, semoeraja diorees oleh Madrasah dan diongkoi oleh Madrasah. Maka bektas ioe, meskipun bagaimana djoga dilesahkan, akan soepa H.B.N.O. bg. Ma'arif katu tidak diberi bektien, teotepah ta keme djadi berdjalan. Maka dari ioe, djangan loepa soepaja ioe: H.B. bg. Ma'arif ioe hareas ada coesiruhite soedri.

5. Oetoesan Pomorego (Pngoesnel) menjajaka bahwa Tjib. ditana sanggep menjajaka soepa selengkap f 250 soelook keperluan Oesol jg. dikerekekan soepa Tjib. katu meuang

Oesol ini diterima oleh Congres, Tjajang-tjajang harees meolepakan soeang sebahjak ioe poela, gona meojokong H.B.N.O. dilan hal ini.

6. Cusul Darah Beribon menjemboreng keterangan bahwa hingga kini telah 2 iheron kita meogehatkan perbaikan madaris kita, tetapi belem dapat beres sebagai jg. kita ingini. Dari ioe, munda soepaja sdr.-sdr. Tjibang-tjibang, katu mesoroetkan sesoeloe soeka meulajaja deradja pembejaraan.

H.B.N.O. bg. Ma'arif lale menerangkan bahwa hingga sekarang ini masli basjak betoel Tjajang-tjibang kita jg. belem berdjad dalam Oetoesan keninging geroer-geroer berhoehong dg. Geroer Oetoesanja, ioe toeh taloe boeki bahwa kita ini belem memesehi sekalian kerentoesan-kerentoesan. Achirnja diandjorkannya hal-hal jg. bersangkot dg. Ma'arif ioe, sebahjanya jg. terkoesob dalam boeke Oesol diteriakan kepa H.B.N.O. sadja.

CONGRES MEMOETOS.

Oeroesan-oeroesan jg. bersangkot dg. Ma'arif dalam boeke Oesol ioe. Kitab-kitab Kweeschool dan Madjallah diteriakan kepa H.B.N.O. sadja.

H.B.N.O. bg. Ma'arif menabab keterangan, mesoroet pemandangan H.B.N.O. bg. Ma'arif tadija katu hal Kweeschool ioe akan diterima, lebih doeloe harees diingit bahwa akan mengdjajarkannya H.B.N.O. bg. Ma'arif dg. persetoeloesanja Tanfidziah akan mesudjajakan begoeng jg. beotaja f 1.200 roepiah setaboen. Katu begoeng jg. sekas ioe telah tekepoepot 507,7, ija, H.B. akan berdjad. Tapi katu tidak, maka lebih baik kita djangan meedikan sekolah ioe sama sekalih.

Pimpinan menerangkan bahwa sesoegoeong bagaimana djoga pengkoesan Tjibang-tjibang kita akan kemasjaja, tetapi thermometer jg. berada ditangan H.B.N.O. katu selaloe mesoroetjekan kemasjaja Tjibang-tjibang kita teoretama dalan hal-hal kekerasan. Sebeloanja rapat diteroet, maka pimpinan menjajakan bahwa beotok pagl dalam madjalis Combinatie Sjoerjah Tanfidziah, dan Oetoesan-oetoesan Tanfidziah dalam madjalis teoroetok mesesahkan sadja ioe ta'boleh mebantah poretoesanja sendiri. Djari 12.30 mistam rapat diteroet dg. bajian al-Falichah.

COMBINATIE VERGADERING SJOERJAH TANFIDZIAH.

Madjlis Combinatie Sjoerjah Tanfidziah pada hal Selas, 4 Juli 1939, bertampal digoeong teoreot, dimulai djari 11.45

Bagian dari hasil Mukhtar NU ke-14 di Magelang

Bagian isi Keputusan Mukhtar ke-14 di Magelang tahun 1939

— 65 —

soepa Tjibang-tjibang jg. mesudjajaka ada 73. Consul-consulto soepaja, kepaerah Coesul Darah Madrasah.

Rapat ditampal soepa jg. p. R. J. Abdul Wahab sebagai Voerzitter dan jg. R. H. N. O. Djadi sebagai Secretaris dan Anggotas anggotas Madjalis sadja berikoe:

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. jg. Ma'arif, R. H. N. O. | Sjehondjo.                |
| 2. " " " "                  | Malang.                   |
| 3. " " " "                  | Soroemep.                 |
| 4. " " " "                  | Patoeroesan.              |
| 5. " " " "                  | Moesjibulabakri.          |
| 6. " " " "                  | Anggaran.                 |
| 7. " " " "                  | Moesjib, Sjoedjo.         |
| 8. " " " "                  | Pandjilang.               |
| 9. " " " "                  | Djarkas.                  |
| 10. " " " "                 | Macroeroe.                |
| 11. " " " "                 | Tjoe, Agoeng.             |
| 12. " " " "                 | Misbahjoel Adzika; Kerja. |

Soetela pimpinan menjajakan bahwa rapat ini ditokoek, maka j. Zainul Arifien sebagai Voerzitter Tanfidziah diperilakan mesoroetkan kepoetoesan-kepoetoesan. Tanfidziah. Sebeloem ioean ioe menerangkanja, lebih doeloe ditajakan bajian al-Falichah, iale silihet dg. bajian al-Qoran oleh sdr. Sjibahoeidin dari Istanboel, dg. soerata dan lagoe jg. sangat meredoe.

Sesoeud ioean Zainul Arifien memberikan pendahoeloesanja, iale ioe. ioean Iskandar Soetaman, Secretaris Tanfidziah diperilakan mebantah kepoetoesan-kepoetoesan bagian Tanfidziah selajamanna jg. telah teoreot diatas. Dan satoe perantoesan poetoesan-poetoesan ioe diteroeng dg. temak-masakja, dg. kesoeudhan sekalannja diteroetjekan.

Dan sebeloemnja rapat diteroet lebih doeloe jamp. ioean K. H. Abdul Wahab sebagai Voerzitter memperlajakan kepa chadidim-chadidim soepaja memperlakan kerentoesan mekam ioeingke bagi Anggotas anggotas N.O. Rapat diteroet poekot f 1 sring, dg. bajian al-Falichah dan o'ra oleh jg. moelia, K.H. Siraal, Magelang.

Madjalis ke IV dilangsungkan pada hari Moem REBO ddo, 4/5 Juli 1939, dg. bertempot di Chadidim Congres teoreot atas pimpinannja Toean Z. Aulim Ar. Comelat, sebagai Voerzitter, dan Soetaman Iskandar Madang sebagai Secretaris. Rapat dimulai pada djari 8.55 mistam dg. bajian al-Falichah. Oetoesan-oetoesan dari Tjibang-tjibang ada beotaja iale ada 59 Tjibang. Begoe djoga Consul-consulto H.B. N.O. ta'kestingjangan djoga.

— 69 —

Setelajnja memerikak Oetoesan-oetoesan, maka sebelidahoeloe Voerzitter menerangkan, bahwa beotepoeng dg. beotepoengnja H.B. Adeling Wajilah, maka sekarang ini akan mesoroeloesanja hal ioe. Lebih djoeh Vy. menerangkan, bahwa mesoroet dan pada sadja beotepoeng kepoetoesan-jg. telah diteroet. Katoeloe Comulat, sadja penggalangan oeraha pada noot H.B. WAKTIAH iak jg. ditioetaman. Kepeotoesanja Comulat ioe, dilasarkan atas penjelekannja, bahwa beotepoeng ioe ioean poetoesan-perhoehong jg. berada dibeketi ini, dipajaja loepa soepa basja dari meuberi jg. beotepoeng, jallo meupoeja permesan pendirian jg. mesoroetkan hasil. Dendikan ioe poe-hal ta' terangkan, bahwa berdjaja WAKTIAH jg. akan ditioetokan dalam ini soekoe, adabab semata-mata meudjaja bahwa Tjib. jg. mesoroeloesakan, j'ni beotepoeng meudjaja bahwa H.B. Poekojan, sadja meudjaja bahwa N.O. beotepoeng.

H.B.N.O. menerangkan, bahwa mesoroet satoe soetoe dalan pada kepoetoesanja Congres kita jg. ke XI di Bandung, bahwa H.B.N.O. ditioetokan pada setip tahoesanja harees mesoroeloesakan penggalangan meotaja jg. teoreot. Beotela sebahnja H.B. meana perim mengdjajakan ioe telaja pada Comulat, ioe, mana mesoroet pendidapaanja, hal ioe amat diteroetjeli. Lebih djoeh diteroetkan oleh katu, bahwa beotepoeng doega adaja beotepoeng sebah-sebah dan kekerasan-kekerasan jg. mesoroetja diladapi oleh sandara-sandara katu katem Mesjimin pada oetoesanja, teoretama dari filik Perhoehong pada choesoesanja, ditilik dari soetoe peroesagan, maka terdapatlah sebah jg. teoretama, jallo; ketidat adaja soeang beotepoeng jg. berdjad ditampal, jallo oedjajaja pendirian jg. dapat meolepakan hasil, beotepoeng diteroetkan oetoesja, bahwa sekoehong Perhoehongan-jg. mana poe-djoga, katu di silik sebeloet-betoesja, adabab dari adaja meka mana meupoeja WAKTIAH ioe ioe.

Dendikan ioe, maka H.B. mengdjajakan, soepaja Tjibang-tjibang soeka mesoroeloesakan hal ioe, sebah H.B. berpendapatlan, katu mesoroeloesakan katu soeka beotepoeng kepoetoesan-kepoetoesan jg. sebah meulaja dari filidajaja beotepoeng katu ini silik soeka meowaklakan sebahagian dari misting. Ditata pada ioe H.B. mesoroeloesakan poe, teoretama mesoroeloesakan kepoetoesan-kepoetoesan jg. mesoroeloesakan ditioetokan hari, maka adabab hal ioe, meudjaja perim penggalanja N.O.

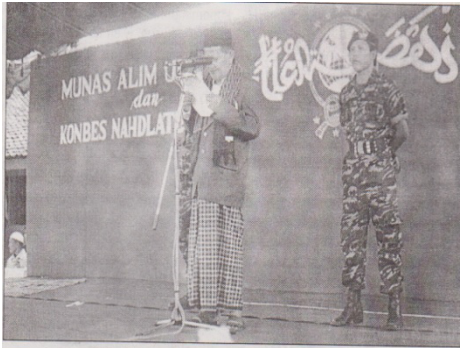
Oetoesan dari TOELOENGAGONG beritaja; Pengmeot soeang soeang dari filik N.O. iale adabab beotepoeng oetoesanja, dg. atax namanja silikapa?

Didjawa oleh H.B.N.O. ja atas namanja Stichting N.O.

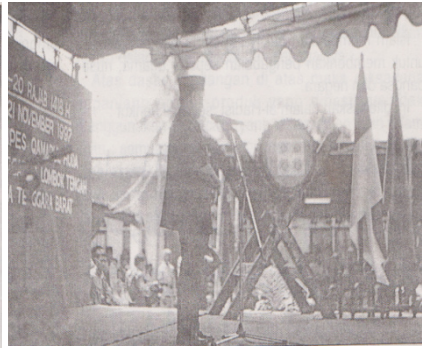
Bagian dari hasil Mukhtar NU ke-14 di Magelang

Kelanjutan dari bagian isi Mukhtar ke-14 di Magelang tahun 1939

2. Beberapa Dokumentasi Penyelenggaraan Munas dan Kombes ke-8 NU di Bagu Lombok tahun 1997



KH. Ilyas Ruchiyat Rois Syuriah PBNU saat menyampaikan sambutan pembukaan Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama di Bagu Lombok Tengah



Menteri Agama RI. Tarmidzi Tahir saat menyampaikan sambutan pada Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama di Bagu



Gusdur nampak saat pembukaan acara Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama di Bagu Lombok Tengah



TGKH. Lalu Turmudzi Badarudin Bagu sebagai Tuan Rumah dalam Munas dan Kombes NU di Lombok Tengah



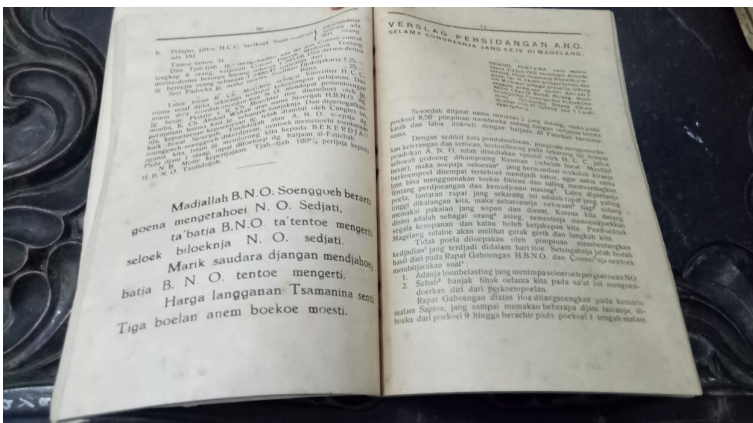
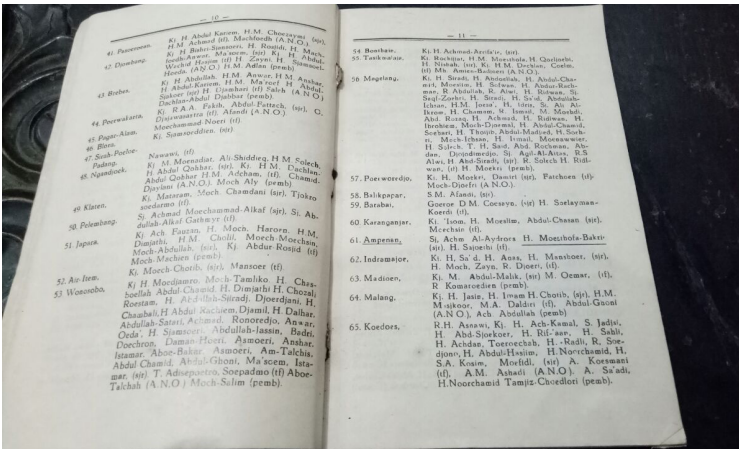
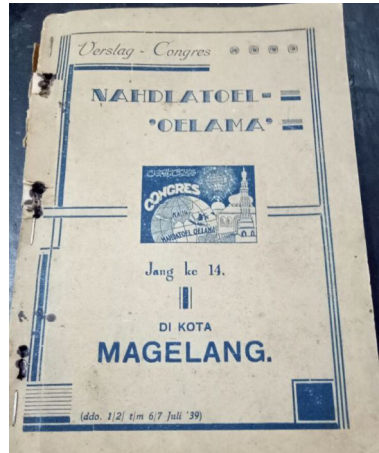


Peserta Acara Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ke-8 di Bagu Lombok Tengah

3. Dokumentasi Saat Pelantikan **Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama NTB**



Ketua PB NU Prof. DR. KH. Ma'sum Mahfudz saat melantik Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Nusa Tenggara Barat periode 2012-2017 di Ponpes Al-Islahudiny Kediri Lombok Barat (8/12/2012), Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama NTB yang di komandoi oleh Drs. TGH. Achmad Taquiuddin Mansyur, M.PdI dan sekretaris Ir. HL. Winengan, MM.



Dokumen majalah Mimbar Nahdlatul Ulama tahun 1937 dan mukhtar NU yang ke-14 di Magelang tahun 1939





## TENTANG PENULIS



Haji Lalu Sohimun Faisol yang nama kecilnya bernama Lalu Purne lahir dari keluarga petani pasangan Haji Lalu Muhammad Faisal dan Hj. Bq. Amnah Karang Puntik Penujak Lombok Tengah tahun 1948. Tamat SR tahun 1961 dan nyantri di Ponpes NU Manhalul Ulum asuhan TGH. Lalu Muh. Faisal Praya Tahun 1961-1967.

Kemudian melanjutkan ke PP Darul Ulum Jombang pada jenjang MAAIN 1968-1969 dibawah asuhan KH. Mustain Ramli.

Menjadi mahasiswa Fakultas Dakwah Universitas Hasyim Asy'ari tahun 1970-1973. SI di Fakultas Dakwah Surabaya sejak 1974-1981 dan S2 di IAIN Sunan Kalijaga tahun 1990-1992. Selama di Jombang menjadi guru agama negeri tahun 1970-1985. Sepulang berlanglang buana di Jombang, kembali ke daerah kelahirannya menjadi dosen di IAIN Mataram sampai pensiun tahun 2013. Mengenal NU ketika pemilu pertama 1955 di kampungnya di Desa Penujak. Mengabdikan di NU NTB sejak 1985 dari pengurus cabang NU Lombok Tengah seksi Dakwah, lanjut dengan sekretaris LDNU PWNU NTB, wakil Katib Syuriah PWNU NTB, Wakil Rais Syuriah PWNU NTB, sampai saat ini. Penulis juga merupakan salah seorang pengasuh-pembina Pondok Pesantren NU Nurussalam Tanak Awu Pujut mendampingi mertua sekaligus pamannya, TGH. Lalu Ahmad Munir salah seorang Mustasyar PWNU NTB.



Muhammad Harfin Zuhdi, putra kedua dari pasangan H. Djumhur Ahmadi dan Hj. Darwilan Nur Fatmah, lahir di Gubug Panaraga, Cakra Barat Mataram Lombok, tanggal 31 Oktober 1972, menempuh Pendidikan Dasar di SDN 3 Karang Jangkong tahun 1985; Pendidikan Menengah Pertama di MTsN Mataram tahun 1988; Pendidikan Menengah Atas di MAPK Jember tahun 1991; Pendidikan Tinggi di IAIN

Jakarta tahun 1996; Pendidikan Pascasarjana di UIN Jakarta tahun 2004; Pendidikan S3 Ilmu Hukum di Universitas Mataram tahun 2014. Penulis pernah menjadi Guru SMA Dwiwarna (*Boarding School*) Bogor, tahun 1998-2000, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2006-2011. Saat ini penulis adalah Dosen UIN Mataram, sebagai Ketua Prodi Ilmu Falak dan Astronomi Islam. Email: [harfin72@yahoo.co.id](mailto:harfin72@yahoo.co.id). Contact Person: 0817897845.

Penulis pernah mengikuti workshop *Teaching and Learning Method* di Melbourne University, Australia, tanggal 26 Oktober - 2 November 2014. Penulis bersama MUI NTB melakukan *Road Show* kenegaraEropadanAfrikatanggal 14 - 24 Oktober 2016 untukkunjunganmuhibah agama danbudayakePrancis, Maroko, Belgia danBelanda. Mengadakan pertemuan dan dialog tentang implementasi Islam Wasathiyah, Sertifikasi Halal MUI dan Promosi Pariwisata Syari'ah Lombok-Sumbawa NTB dengan akademisi dan Ulama Uni Eropa di kampus *Institut Europeen des Sciences Humaines* (IESH) De Paris Prancis.

Penulis aktif di beberapa organisasi sosial keagamaan, diantaranya: sebagai Ketua LTMNU NTB, 2012-2017; Wakil Sekretaris PWNU NTB, 2012-2017; Ketua Komisi Penelitian MUI NTB, 2015-2019; Ketua Komisi Penelitian FKPT NTB, 2015-2019; Sekretaris FKDM NTB 2013-2015, Wakil Sekretaris LBM PBNU, 2010-2014; Pengurus Rahmat Semesta Center Jakarta, 2005-2011; Pengurus Pusat LP. Ma'arif NU, 1999-2004; Aktivis Piramida Circle, 1995-1997; aktivis PMII Ciputat, 1991-1994.

Penulis sebagai narasumber pada beberapa event kegiatan, diantaranya: pembicara pada *Annual International Conference on Islamic Studies* (AICIS) ke-XIV, "*Responding the Challenges Multicultural Societies, The Contribution of Indonesian Islamic Studies*", di Balikpapan Kalimantan

Timur, 21-24 November 2014; sebagai presenter pada *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) ke-XV*, title: “*Harmony in Diversity: Promoting Moderation and Preventing Conflicts in Socio-Religious Life*” di Manado, 3-6 September 2015; sebagai pembicara pada *International Symposium on the Strategic Role of Religious Education in the Development of Culture of Peace*, title: “*Radicalism and Effort Deradicalization Of Religious Understanding*”, Litbang Kemenag RI, September 2012; sebagai narasumber pada acara “Mimbar Agama Islam” di Lombok TV, sebagai narasumber pada acara “Kajian Islam” di TVRI NTB; dan sebagai narasumber “Dialog Interaktif” di RRI Mataram.

Publikasi karya tulis yang telah diterbitkan, antara lain: Penulis Buku: *Mozaik Islam: Awal Mula Islam di Nusa Tenggara Barat* (Mataram: Sanabil, 2017), *Peta Dakwah MUI NTB*, (Mataram: Sanabil, 2017); Penulis Buku: *Kontra Radikalisme –Terorisme: Counter Terhadap Ideologi Radikal*, (Mataram: sanabil, 2017), Penulis Buku: *Muqaranah Mazahib Fil-Mu’amalah*, (Mataram: Sanabil, 2016); Penulis Buku: *Parokialitas Wetu Telu: Wajah Sosial Dialektika Agama Lokal di Lombok*, (Mataram: sanabil, 2015); Penulis Buku: *Deradikalisasi Agama: Menghidupkan Agama Sebagai Spirit Perdamaian*, (Mataram: Sanabil: 2015); Penulis Buku: *Islam Ahlusunah Waljama’ah di Indonesia: Sejarah, Pemikiran dan Dinamika Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Pustaka Ma’arif, 2014); Penulis Buku: *Khutbah Jum’at Tematik: Islam Damai*, (Mataram: Bhanja Pres-FKDM Kesbangpoldagri NTB, 2014); Penulis Buku: *Praktik Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak*, (Mataram: Leppim, 2013); Penulis Buku: *Visi Kebangsaan Religius: Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 1904 – 1997*, (Mataram: Bhanja Pres, 2013); Penulis Buku: *Lombok Mirah Sasak Adi*, (Jakarta: Imsak Press, 2011); Kontributor Buku: *Kumpulan Khutbah Jum’at: Islam dan Terorisme*, (Jakarta: Rahmat Semesta 2008); Kontributor Buku: *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur’an dan Hadits*, (Jakarta: Rahmat Semesta, 2008); Editor Buku: *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010); Editor Buku: *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Prenada, 2006).



Ahmad Pahrurrozi, lahir di kampung kesayangannya Ketangge Daye Batujai Lombok Tengah hari Kamis jam 9 pagi tanggal 9 Nopember 1989. Semua pendidikannya dari TK sampai SLTA diselesaikan di kampung kelahirannya di Batujai Lombok Tengah. Pendidikan TK (Taman Kanak-kanak) diselesaikan di TK Dharma Wanita Batujai,

kemudian pendidikan selanjutnya, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah diselesaikan di YAYASAN PONPES FAJRUL HIDAYAH AL-MA'ARIF NU BATUJAI dari 1995-2007. Meski di tengah perjalanannya pernah sempat mencicipi ilmu di MAKAN (Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri)/MAN 2 Mataram selama 2 bulan, dan menjadi "Sang Penutup Para Alumni" sekolah tersebut, karena dibubarkan. Kemudian hijrah ke penjara suci kawasan penuh berkah ponpes al-Aziziyah Kapek Gunung Sari Lombok Barat, mengikuti pendidikan di MQWH (Madrasah Qur'an Wal Hadits) selama 2 tahun setengah dan pernah sempat menjadi juara 1 umum santri al-Aziziyah, hingga kembali ke menyelesaikan pendidikan SLTA-Nya di Madrasah Aliyah Fajrul Hidayah al-Ma'arif Batujai kampung kelahirannya tahun 2006/2007. Kemudian, pendidikan perguruan tinggi di tempuh di IAIN Mataram 2007-2011 (kini UIN Mataram), dengan mengambil konsentrasi jurusan KPI (Komunikasi Penyiaran Islam) Fakultas Dakwah. Selama kuliah aktif PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), hingga menjadi pengurus Cabang PMII Kota Mataram bidang Kaderisasi dari tahun 2009-2011. Berikutnya, menjadi pelayan tetap di Yayasan Fajrul Hidayah al-Ma'arif Batujai sejak tahun 2012 sampai sekarang. Selain itu, sebagai Ketua IKAFAH (Ikatan Keluarga Alumni Fajrul Hidayah) sejak 2015 sampai sekarang. Mengikuti pendidikan Program 6 bulan kader Mufassir ponpes Baytul Qur'an Pondok Cabe Jakarta Pimpinan Prof. Dr. Qurasiy Syihab, MA di Jakarta tahun 2015. Pada tahun 2016 bersama dengan guru yang lain membentuk IPNU-IPPNU (Ikatan Pelajar Putra Nahdlatul Ulama-Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama) Komisariat Fajrul Hidayah dan sekaligus menjadi dewan pembina. Selain itu, aktif juga di Lakpesdam NU Kabupaten Lombok Tengah.

Kini, tinggal bersama istri dan dianugerahi 2 anak, “Asma’ulHusna” yang kini menjadi bidadari Syurga dan bayi mungil “Inarotul Husna” yang lahir pada hari Selasa (hari kedua setelah seminggu = 9) tanggal 27 (2+7=9) bulan September (9) tahun 2016 (2+0+1+6=9) di rumah baru tapi setengah jadi, dan memulai aktifitasnya yang baru sebagai pekebun dan sesekali menulis buku.



Muhamad Ahyar Rasidi, lahir di Dusun Jomang Desa Batujai Kec. Praya Barat Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada 15 Februari 1986. Menyelesaikan S1 pada jurusan PGMI IAIN Mataram tahun 2012 dan meraih predikat wisudawant erbaik utama pada angkatan wisudanya. Tak cukup dengan ilmu yang diperoleh, kemudian melanjutkan studi magister di Universitas Negeri Yogyakarta pada jurusan Pendidikan Dasar.

Selama Kuliah SI, pernah mengikuti berbagai organisasi diantaranya English Study Club dan Nahdlatul Ulama. Penulis juga pernah menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan PGMI IAIN Mataram. Selama kuliah S2, tidak aktif di organisasi kampus dan ekstra lainnya melainkan menjadi aktivis masjid yakni menjadi Takmir di Masjid Nurussalam Yogyakarta. Hari-harinya bekerja sebagai Dosen Tetap Non PNS di Universitas Islam Negeri Mataram. Beberapa karya penulis yang pernah diseminarkan diantaranya adalah; (1) pengaruh media *flashcard* terhadap penguasaan kosa kata Bahasa Inggris di SD 19 Ampenan; (2) *The existence of local culture for supporting the sharia Tourism*, (3) efektivitas metode *think pair share* terhadap restasi belajar Matematika MTS Tulehu, (4) faktor-faktor kesulitan guru pada pembelajaran tematik integratif di SD Kota Mataram, dan (5) Peningkatan Standar dan Kualitas Pendidikan Dasar di Nigeria: Studi Kasus Negara Bagian Oyo dan Osun, (5) efektivitas metode debat dalam pembelajaran PKn. Adapun Buku yang dihasilkan adalah; (1) Pengembangan Fisikmotorik anak usia dini; (2) Mozaik NU; dan (3) Pendidikan Anak berkebutuhan Khusus. Penulis juga aktif sebagai pemakalah pada konferensi internasional. Motto hidup “masa lalu adalah potret masa depan bagi yang berfikir”. Semoga karya yang dihasilkan tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT.

